



**PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 18 TAHUN 2024**



**RENCANA KERJA PEMERINTAH
KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2024**



WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan perencanaan partisipatif maka perlu melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2025;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan pembangunan di daerah harus memiliki dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2025, yang merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2025;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2012 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2012 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Keputusan Menteri Dalam Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
19. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
20. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Otonomi Khusus;

22. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2014 Nomor 4);
23. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;
24. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintahan Kota adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Wali Kota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Lhokseumawe.
5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Lhokseumawe.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Lhokseumawe yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota, Dinas, Badan dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan.

9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Kota Lhokseumawe yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota Lhokseumawe melalui Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe.
11. Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026 adalah dokumen pembangunan untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Qanun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Kota yang selanjutnya disingkat RKPK adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRK.
16. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
17. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, Musyawarah Rencana Pembangunan, Anggaran Pendapatan Belanja Kota.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA

Pasal 2

- (1) RKPK Lhokseumawe Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan kota untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yaitu Tahun 2025 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) RKPK Lhokseumawe Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan
 - b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Kota Lhokseumawe
 - c. Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Kota Lhokseumawe
 - d. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe
 - e. Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Kota Lhokseumawe
 - f. Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kota Lhokseumawe
 - g. Bab VII Penutup
- (3) Uraian secara rinci RKPK Lhokseumawe Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

- (1) RKPK Lhokseumawe Tahun 2025 merupakan RKPK penjabaran tahun ke-3 (tiga) dari RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026, yang disusun berdasarkan hasil musrenbang, penjaringan aspirasi masyarakat melalui hasil reses DPRK, arah kebijakan dan strategi pembangunan, serta prioritas pembangunan kota.
- (2) RKPK Lhokseumawe Tahun 2025 sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kota.
- (3) RKPD Lhokseumawe Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan:
 - a. pedoman penyempurnaan rancangan Renja perangkat daerah Tahun 2025;

- b. landasan dalam menyusun KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025; dan
- c. pedoman dalam menyusun Rancangan APBK Tahun Anggaran 2025.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Rancangan APBK Tahun Anggaran 2025:

- a. Pemerintah Kota Lhokseumawe menggunakan RKPK Lhokseumawe Tahun 2025 sebagai bahan pembahasan KUA dan PPAS dengan DPRK.
- b. Perangkat Daerah menggunakan RKPK Lhokseumawe Tahun 2025 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan DPRK.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN RKPK

Pasal 5

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPK adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis pelaksanaan rencana kerja dari masing-masing SKPD sesuai tugas dan kewenangannya;
- b. Kepala Perangkat Daerah wajib memperbaiki dan menyempurnakan rencana kerja Perangkat Daerah bila belum sesuai dengan RKPK;
- c. dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah berupa pelaksanaan Program dan Kegiatan atas sumber dana yang telah ditentukan penggunaannya oleh pemerintah dan/atau perubahan kebijakan pemerintah daerah terkait usulan masyarakat yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan maupun masukan DPRK berupa hasil reses yang muncul dalam pembahasan dengan DPRK maka RKPK Tahun 2025 dapat dilakukan penyesuaian;
- d. kerangka pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang tercantum dalam RKPK merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran bersama DPRK;
- e. target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPK dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat pembahasan dengan DPRK;
- f. penyesuaian RKPK Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditetapkan Kepala Bappeda setelah dilaporkan dan mendapat persetujuan Wali Kota;
- g. RKPK Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan KUA serta PPAS Tahun 2025 serta bahan arahan penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPK sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RKPK DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Penambahan program baru dalam RKPK dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan dan/atau penambahan program dalam RPK.
- (2) Dalam hal penambahan program baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah dan/atau perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja, tidak perlu mengubah RPK.
- (3) Penambahan Program/Kegiatan baru dalam RKPK ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan RKA-Perangkat Daerah yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala Bappeda paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah triwulan yang berkenaan berakhir.
- (3) Kepala Bappeda melakukan evaluasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan selanjutnya menyerahkan hasil evaluasi berikut rekomendasi dan langkah yang diperlukan kepada Wali Kota.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sebagai bahan/pertimbangan dalam penyusunan RKPK periode tahun berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 11 JULI 2024 M
5 MUHARAM 1446 H

Pj. WALIKOTA LHKSEUMAWE,



A. HANAN

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 11 Juli 2024 M
5 MUHARAM 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHKSEUMAWE,


T. ADNAN

BERITA KOTA LHKSEUMAWE TAHUN 2024 NOMOR....

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR TABEL | v |
| DAFTAR GAMBAR | xvi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | I-1 |
| 1.1. Latar Belakang | I-1 |
| 1.2. Dasar Hukum Penyusunan | I-6 |
| 1.3. Hubungan Antar Dokumen | I-10 |
| 1.4. Maksud dan Tujuan | I-11 |
| 1.5. Sistematika Penyusunan | I-12 |
| | |
| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI KOTA LHOKSEUMAWE . | II-1 |
| 2.1. Kondisi Umum Kota Lhokseumawe | II-1 |
| 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi | II-1 |
| 2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah | II-1 |
| 2.1.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah | |
| Administrasi | II-1 |
| 2.1.1.1.2. Kondisi Topografi | II-2 |
| 2.1.1.1.3. Kondisi Geologi | II-3 |
| 2.1.1.1.4. Kondisi Hidrologi | II-4 |
| 2.1.1.1.5. Kondisi Klimatologi | II-5 |
| 2.1.1.1.6. Penggunaan Lahan | II-7 |
| 2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah | II-8 |
| 2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana | II-20 |
| 2.1.1.4. Demografi | II-21 |
| 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat | II-23 |
| 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan | |
| Pemerataan Ekonomi | II-23 |
| 2.1.2.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik | |
| Regional Bruto (PDRB) | II-23 |
| 2.1.2.1.2. Distribusi PDRB | II-25 |
| 2.1.2.1.3. Laju Inflasi | II-26 |
| 2.1.2.1.4. PDRB Per Kapita | II-27 |
| 2.1.2.1.5. Indeks Rasio Gini | II-29 |
| 2.1.2.1.6. Tingkat Kemiskinan | II-29 |
| 2.1.2.1.7. Pengangguran | II-30 |
| 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial | II-31 |
| 2.1.2.2.1. Angka Melek Huruf | II-31 |
| 2.1.2.2.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah | II-32 |
| 2.1.2.2.3. Angka Harapan Lama Sekolah | II-33 |
| 2.1.2.2.4. Angka Usia Harapan Hidup | II-34 |
| 2.1.2.2.5. Angka Kematian Ibu (AKI) | II-35 |
| 2.1.2.2.6. Indeks Pembangunan Manusia | II-36 |
| 2.1.2.2.7. Persentase Balita Gizi Buruk | II-37 |
| 2.1.2.2.8. Pandemi Corona Virus Disease 2019 | |
| (Covid-19) | II-38 |
| 2.1.2.3. Fokus Seni Budaya | II-39 |

| | | |
|---------------|---|--------|
| 2.1.3. | Aspek Pelayanan Umum | II-42 |
| 2.1.3.1. | Fokus Layanan Urusan Keistimewaan Aceh dan Kekhususan | II-42 |
| 2.1.3.1.1. | Penyelenggaraan Kehidupan Beragama..... | II-42 |
| 2.1.3.1.2. | Majelis Ulama | II-46 |
| 2.1.3.2. | Fokus Layanan Urusan Wajib | II-48 |
| 2.1.3.2.1. | Layanan Urusan Wajib Dasar | II-48 |
| 2.1.3.2.1.1. | Pendidikan | II-48 |
| 2.1.3.2.1.2. | Kesehatan | II-54 |
| 2.1.3.2.1.3. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang..... | II-91 |
| 2.1.3.2.1.4. | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | II-98 |
| 2.1.3.2.1.5. | Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | II-105 |
| 2.1.3.2.1.6. | Sosial | II-116 |
| 2.1.3.2.2. | Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar | II-123 |
| 2.1.3.2.2.1. | Ketenagakerjaan | II-123 |
| 2.1.3.2.2.2. | Pangan | II-128 |
| 2.1.3.2.2.3. | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | II-129 |
| 2.1.3.2.2.4. | Pertanahan | II-136 |
| 2.1.3.2.2.5. | Lingkungan Hidup | II-139 |
| 2.1.3.2.2.6. | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | II-145 |
| 2.1.3.2.2.7. | Komunikasi dan Informatika | II-148 |
| 2.1.3.2.2.8. | Penanaman Modal | II-153 |
| 2.1.3.2.2.9. | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | II-155 |
| 2.1.3.2.2.10. | Perhubungan | II-168 |
| 2.1.3.2.2.11. | Koperasi dan Usaha Kecil & Menengah | II-176 |
| 2.1.3.2.2.12. | Kepemudaan dan Olahraga..... | II-176 |
| 2.1.3.3. | Urusan Pemerintahan Pilihan | II-178 |
| 2.1.3.3.1. | Pariwisata | II-178 |
| 2.1.3.3.2. | Statistik | II-179 |
| 2.1.3.3.3. | Perpustakaan | II-180 |
| 2.1.3.3.4. | Kearsipan | II-181 |
| 2.1.3.3.5. | Pertanian | II-182 |
| 2.1.3.3.6. | Perdagangan | II-183 |
| 2.1.3.3.7. | Perindustrian | II-184 |
| 2.1.3.3.8. | Kelautan dan Perikanan | II-185 |
| 2.1.3.4. | Fokus Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan | II-186 |
| 2.1.3.4.1. | Perencanaan | II-186 |
| 2.1.3.4.2. | Keuangan | II-189 |
| 2.1.3.4.3. | Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan | II-189 |
| 2.1.3.4.4. | Pengawasan | II-191 |
| 2.1.3.4.5. | Sekretariat DPRK | II-193 |

| | | |
|------------|---|--------|
| 2.1.3.4.6. | Sekretariat Daerah | II-194 |
| 2.1.3.5. | Fokus Urusan Penunjang Urusan Kewilayahan | II-199 |
| 2.1.3.5.1. | Kecamatan | II-199 |
| 2.1.4. | Aspek Daya Saing Daerah | II-203 |
| 2.1.4.1. | Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah | II-203 |
| 2.1.4.2. | Fokus Fasilitasi Wilayah/ Infrastruktur..... | II-205 |
| 2.1.4.3. | Telaahan RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2043 | II-209 |
| 2.1.4.4. | Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Lhokseumawe Tahun 2023 | II-210 |
| 2.2. | Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPK dan Realisasi RPJMK sampai dengan Tahun 2023 | II-213 |
| 2.2.1. | Capaian Indikator Makro Kota Lhokseumawe | II-213 |
| 2.2.2. | Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Lhokseumawe | II-215 |
| 2.2.3. | Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) | II-222 |
| 2.2.4. | Realisasi Terhadap Proyeksi Kebijakan Keuangan | II-237 |
| 2.2.4.1. | Realisasi Pendapatan Tahun 2023 | II-237 |
| 2.2.4.2. | Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 | II-238 |
| 2.2.4.3. | Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2023 | II-239 |
| 2.2.5. | Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Realisasi | II-241 |
| 2.2.5.1. | Metode Evaluasi..... | II-241 |
| 2.2.5.2. | Hasil Evaluasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Terhadap Target RKPK Tahun 2023..... | II-243 |
| 2.2.5.3. | Kesimpulan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi RKPK Tahun 2023 Semester II..... | II-252 |
| 2.3. | Permasalahan Pembangunan Kota Lhokseumawe | II-254 |
| 2.3.1. | Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan | II-262 |
| 2.3.1.1. | Urusan Wajib Pelayanan Dasar | II-262 |
| 2.3.1.1.1. | Bidang Pendidikan | II-262 |
| 2.3.1.1.2. | Bidang Kesehatan | II-262 |
| 2.3.1.1.3. | Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | II-263 |
| 2.3.1.1.4. | Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | II-263 |
| 2.3.1.1.5. | Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | II-264 |
| 2.3.1.1.6. | Bidang Sosial | II-264 |

| | | |
|-------------|---|--------|
| 2.3.1.2. | Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar | II-265 |
| 2.3.1.2.1. | Bidang Tenaga Kerja | II-265 |
| 2.3.1.2.2. | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | II-265 |
| 2.3.1.2.3. | Bidang Pangan | II-265 |
| 2.3.1.2.4. | Bidang Pertanahan | II-266 |
| 2.3.1.2.5. | Bidang Lingkungan Hidup | II-266 |
| 2.3.1.2.6. | Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | II-266 |
| 2.3.1.2.7. | Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | II-266 |
| 2.3.1.2.8. | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | II-267 |
| 2.3.1.2.9. | Bidang Perhubungan | II-267 |
| 2.3.1.2.10. | Bidang Komunikasi dan Informatika | II-267 |
| 2.3.1.2.11. | Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | II-267 |
| 2.3.1.2.12. | Bidang Penanaman Modal | II-267 |
| 2.3.1.2.13. | Bidang Kepemudaan dan Olahraga .. | II-268 |
| 2.3.1.2.14. | Bidang Statistik | II-268 |
| 2.3.1.2.15. | Bidang Persandian..... | II-268 |
| 2.3.1.2.16. | Bidang Kebudayaan..... | II-268 |
| 2.3.1.2.17. | Bidang Perpustakaan..... | II-269 |
| 2.3.1.2.18. | Bidang Kearsipan..... | II-269 |
| 2.3.1.3. | Urusan Pilihan | II-269 |
| 2.3.1.3.1. | Bidang Kelautan dan Perikanan | II-269 |
| 2.3.1.3.2. | Bidang Pariwisata | II-269 |
| 2.3.1.3.3. | Bidang Pertanian | II-269 |
| 2.3.1.3.4. | Bidang Perdagangan | II-270 |
| 2.3.1.3.5. | Bidang Perindustrian | II-270 |
| 2.3.1.4. | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | II-270 |
| 2.3.1.4.1. | Bidang Perencanaan | II-270 |
| 2.3.1.4.2. | Bidang Keuangan | II-270 |
| 2.3.1.4.3. | Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan | II-271 |
| 2.3.1.4.4. | Bidang Penelitian dan Pengembangan | II-271 |
| 2.3.1.4.5. | Bidang Pengawasan | II-271 |
| 2.3.1.5. | Urusan Keistimewaan Aceh | II-271 |
| 2.4. | Isu Strategis Kota Lhokseumawe | II-272 |

| | | |
|----------------|---|--------------|
| BAB III | KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN KOTA | III-1 |
| 3.1. | Arah Kebijakan Ekonomi..... | III-3 |
| 3.1.1. | Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional | III-3 |
| 3.1.2. | Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi Aceh..... | III-11 |
| 3.1.3. | Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi Kota Lhokseumawe | III-13 |

| | | |
|----------------|--|--------------|
| 3.1.3.1. | PDRB Per Kapita | III-20 |
| 3.1.3.2. | Pertumbuhan Ekonomi..... | III-22 |
| 3.1.3.3. | Laju Inflasi | III-25 |
| 3.1.3.4. | Gini Ratio..... | III-29 |
| 3.1.3.5. | Kemiskinan | III-30 |
| 3.1.3.6. | Tingkat Pengangguran Terbuka | III-32 |
| 3.1.3.7. | Arah Kebijakan Ekonomi Kota Lhokseumawe Tahun 2025 | III-33 |
| 3.1.3.8. | Tantangan dan Prospek Ekonomi Tahun 2025 | III-35 |
| 3.2. | Arah Kebijakan Keuangan Kota..... | III-36 |
| 3.2.1. | Arah Kebijakan Pendapatan Kota Lhokseumawe | III-36 |
| 3.2.2. | Arah Kebijakan Belanja Kota Lhokseumawe | III-46 |
| 3.2.3. | Arah Kebijakan Pembiayaan Kota Lhokseumawe | III-51 |
| BAB IV | SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA LHOKSEUMAWE | IV-1 |
| 4.1. | Tujuan dan Sasaran Pembangunan | IV-1 |
| 4.2. | Arah Kebijakan Pembangunan Nasional, Aceh dan Kota Lhokseumawe | IV-10 |
| 4.3. | Tema Pembangunan..... | IV-10 |
| 4.4. | Prioritas dan Sasaran Pembangunan..... | IV-11 |
| 4.5. | Sasaran Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2025..... | IV-18 |
| 4.6. | Penetapan Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe..... | IV-23 |
| 4.7. | Sinkronisasi Prioritas Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) | IV-31 |
| 4.8. | Inovasi Pembangunan Tahun 2025 | IV-33 |
| 4.9. | Pokok-Pokok Pikiran DPRK Lhokseumawe | IV-38 |
| BAB V | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KOTA..... | V-1 |
| BAB VI | KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KOTA | VI-1 |
| BAB VII | PENUTUP | VII-1 |

DAFTAR TABEL

| | | | |
|-------|------|---|-------|
| Tabel | 2.1 | Rata-rata Temperatur Maximum dan Minimum Kota Lhokseumawe Tahun 2023 | II-6 |
| Tabel | 2.2 | Banyaknya Curah Hujan, Hari Hujan dan Penyinaran Matahari Kota Lhokseumawe Tahun 2023 | II-6 |
| Tabel | 2.3 | Rata-rata Tekanan Udara dan Kelembaban Nisbi Kota Lhokseumawe Tahun 2023 | II-6 |
| Tabel | 2.4 | Arah Angin, Kecepatan Rata-rata, dan Kecepatan Angin Maksimum Kota Lhokseumawe Tahun 2023 | II-7 |
| Tabel | 2.5 | Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Lhokseumawe Tahun 2023 | II-22 |
| Tabel | 2.6 | Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-24 |
| Tabel | 2.7 | Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-25 |
| Tabel | 2.8 | Perbandingan Gini Rasio Kota Lhokseumawe dengan Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota Tetangga Tahun 2019-2023 | II-29 |
| Tabel | 2.9 | Tingkat Kemiskinan Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023..... | II-30 |
| Tabel | 2.10 | Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-36 |
| Tabel | 2.11 | Penyelenggara Festival Seni Budaya Kota Lhokseumawe Tahun 2023 | II-40 |
| Tabel | 2.12 | Situs/Bangunan Cagar Budaya Kota Lhokseumawe..... | II-41 |
| Tabel | 2.13 | Tipe Dayah, Kepemilikan dan Jumlah Guru Dayah Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-42 |
| Tabel | 2.14 | Jumlah Hafiz Hafizah yang Dibina Tahun 2019-2023 | II-43 |
| Tabel | 2.15 | Rasio ZIS yang Disalurkan dan ZIS yang Berkumpul Tahun 2019-2023 | II-44 |
| Tabel | 2.16 | Jumlah Masjid yang Melaksanakan Sholat 5 Waktu dan Jumlah Masjid yang ada Imam Hafiz Tahun 2019-2023..... | II-45 |
| Tabel | 2.17 | Data Masjid Kota Lhokseumawe Tahun 2023 | II-45 |
| Tabel | 2.18 | Jumlah Peserta PKU Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-46 |
| Tabel | 2.19 | Kegiatan Musyawarah Ulama Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-47 |
| Tabel | 2.20 | Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-48 |
| Tabel | 2.21 | Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-49 |

| | | | |
|-------|------|--|-------|
| Tabel | 2.22 | Angka Kelulusan Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-51 |
| Tabel | 2.23 | Kondisi Ruang Kelas Kondisi Baik Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-53 |
| Tabel | 2.24 | Angka Kematian Bayi (AKB) (%) Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-55 |
| Tabel | 2.25 | Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-55 |
| Tabel | 2.26 | Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-56 |
| Tabel | 2.27 | Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-58 |
| Tabel | 2.28 | Rasio Posyandu Per Satuan Balita Per Kecamatan Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-58 |
| Tabel | 2.29 | Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023... | II-60 |
| Tabel | 2.30 | Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-61 |
| Tabel | 2.31 | Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-62 |
| Tabel | 2.32 | Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-63 |
| Tabel | 2.33 | Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-64 |
| Tabel | 2.34 | Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-66 |
| Tabel | 2.35 | Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-67 |
| Tabel | 2.36 | Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-67 |
| Tabel | 2.37 | Cakupan Persentase Anak Usia I Tahun Yang Mendapat Imunisasi Campak Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-68 |
| Tabel | 2.38 | Cakupan Persentase Non Polio AFP rate per 100.000 Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023..... | II-69 |
| Tabel | 2.39 | Cakupan Penemuan Pneumonia Pada Balita Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-70 |
| Tabel | 2.40 | Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023..... | II-71 |

| | | | |
|-------|------|---|-------|
| Tabel | 2.41 | Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023.. | II-71 |
| Tabel | 2.42 | Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-72 |
| Tabel | 2.43 | Proporsi Jumlah Kasus Tuberculosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-73 |
| Tabel | 2.44 | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-74 |
| Tabel | 2.45 | Cakupan Penderita Diare Yang Ditangani Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-75 |
| Tabel | 2.46 | Cakupan Angka Kejadian Penderita Malaria Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-75 |
| Tabel | 2.47 | Prevalensi HIV/AIDS Dari Total Populasi Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-76 |
| Tabel | 2.48 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-77 |
| Tabel | 2.49 | Cakupan Kunjungan Bayi Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023..... | II-77 |
| Tabel | 2.50 | Cakupan Puskesmas dan Pembantu Puskesmas Kota Lhokseumawe Tahun 2023 | II-78 |
| Tabel | 2.51 | Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-80 |
| Tabel | 2.52 | Cakupan Pelayanan Nifas Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-81 |
| Tabel | 2.53 | Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 .. | II-82 |
| Tabel | 2.54 | Cakupan Pelayanan Anak Balita Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-84 |
| Tabel | 2.55 | Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 ... | II-86 |
| Tabel | 2.56 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-87 |
| Tabel | 2.57 | Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-88 |
| Tabel | 2.58 | Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi ≤ 24 jam Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-89 |

| | | | |
|-------|------|---|--------|
| Tabel | 2.59 | Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 (Km) | II-92 |
| Tabel | 2.60 | Jenis, Kondisi, Kelas dan Panjang Jalan (Km) Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-94 |
| Tabel | 2.61 | Rasio Panjang Jalan Dengan Per Satuan Jumlah Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 .. | II-95 |
| Tabel | 2.62 | Persentase Panjang Jalan Dilalui Roda 4 Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-96 |
| Tabel | 2.63 | Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2023 | II-96 |
| Tabel | 2.64 | Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-97 |
| Tabel | 2.65 | Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2023 | II-99 |
| Tabel | 2.66 | Persentase Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-100 |
| Tabel | 2.67 | Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni Kota Lhokseumawe 2019-2023 | II-101 |
| Tabel | 2.68 | Rasio PSU dalam Kondisi Baik Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-102 |
| Tabel | 2.69 | Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-103 |
| Tabel | 2.70 | Persentase Tidak Terjadi Genangan > 2 kali Setahun Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-104 |
| Tabel | 2.71 | Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja dan Linmas Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-106 |
| Tabel | 2.72 | Jumlah Penegakan Peraturan Daerah/Qanun Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-107 |
| Tabel | 2.73 | Jumlah Patroli Penegakan Peraturan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-108 |
| Tabel | 2.74 | Jumlah Pelanggaran Syariat Islam yang dilakukan Masyarakat Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-109 |
| Tabel | 2.75 | Jumlah Penertiban Untuk Menjaga Ketertiban dan Ketentraman Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-110 |
| Tabel | 2.76 | Persentase Pembinaan Ormas Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-112 |
| Tabel | 2.77 | Kejadian Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-113 |

| | | | |
|-------|------|--|--------|
| Tabel | 2.78 | Indeks Risiko Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-114 |
| Tabel | 2.79 | Persentase Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-116 |
| Tabel | 2.80 | Cakupan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Keluarga Kurang Mampu Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-117 |
| Tabel | 2.81 | Persentase Rehabilitasi Sosial yang tertangani Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-118 |
| Tabel | 2.82 | Persentase Penanganan Anak Terlantar Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-119 |
| Tabel | 2.83 | Persentase Penanganan Fakir Miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-120 |
| Tabel | 2.84 | Rekapitulasi P3KE Kota Lhokseumawe 2023 | II-121 |
| Tabel | 2.85 | Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Masa Tanggap Darurat Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-123 |
| Tabel | 2.86 | Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-123 |
| Tabel | 2.87 | Persentase Pencari Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-124 |
| Tabel | 2.88 | Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar dan Ditempatkan Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-125 |
| Tabel | 2.89 | Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 .. | II-126 |
| Tabel | 2.90 | Ketersediaan Pangan Utama Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-128 |
| Tabel | 2.91 | Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-132 |
| Tabel | 2.92 | Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPR Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-133 |
| Tabel | 2.93 | Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-133 |
| Tabel | 2.94 | Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-135 |
| Tabel | 2.95 | Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Kota Lhokseumawe 2019-2023 | II-136 |

| | | | |
|-------|-------|---|--------|
| Tabel | 2.96 | Persentase Luas Lahan bersertifikat Milik Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-137 |
| Tabel | 2.97 | Persentase Luas Lahan Bersertifikat Milik Masyarakat di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-137 |
| Tabel | 2.98 | Persentase Luas Hak Guna Bangunan yang Dipetakan di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-138 |
| Tabel | 2.99 | Persentase Penyelesaian Kasus Sengketa Dan Konflik Pertanahan Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-139 |
| Tabel | 2.100 | Persentase Jumlah Sampah yang tertangani Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-144 |
| Tabel | 2.101 | Persentase Cakupan Area Pelayanan Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-144 |
| Tabel | 2.102 | Rasio Penduduk ber-KTP per satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-145 |
| Tabel | 2.103 | Rasio Bayi ber Akta Kelahiran Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-146 |
| Tabel | 2.104 | Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-148 |
| Tabel | 2.105 | Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-151 |
| Tabel | 2.106 | Persentase Penyebarluasan Informasi Publik Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-152 |
| Tabel | 2.107 | Persentase Pelayanan Publik yang Terintegrasi Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-152 |
| Tabel | 2.108 | Persentase PD yang Melakukan Pengamanan Data dan Informasi Terintegrasi Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-153 |
| Tabel | 2.109 | Jumlah Investor PMDN/PMA Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-154 |
| Tabel | 2.110 | Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-154 |
| Tabel | 2.111 | Status Desa Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-155 |
| Tabel | 2.112 | Indeks Desa Membangun Kota Lhokseumawe Tahun 2023 | II-157 |
| Tabel | 2.113 | Data Kondisi Kantor Pemerintahan Desa Tahun 2019-2023 | II-159 |

| | | |
|-------|--|--------|
| Tabel | 2.114 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-159 |
| Tabel | 2.115 Data Penyaluran Dana Ke Gampong Tahun 2019-2023 | II-160 |
| Tabel | 2.116 Data Cakupan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Gampong Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 ... | II-161 |
| Tabel | 2.117 Data Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-162 |
| Tabel | 2.118 Cakupan Pembinaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-163 |
| Tabel | 2.119 Data Kelompok Binaan PKK di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-164 |
| Tabel | 2.120 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-164 |
| Tabel | 2.121 Persentase PKK Aktif di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-165 |
| Tabel | 2.122 Persentase Posyandu Aktif di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-166 |
| Tabel | 2.123 Strata Posyandu Di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-167 |
| Tabel | 2.124 Cakupan Pembinaan Kerjasama Antar Desa Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-168 |
| Tabel | 2.125 Jumlah Kendaraan dan Arus Penumpang Angkutan Umum Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-168 |
| Tabel | 2.126 Rasio Ijin Trayek di Kota Lhokseumawem Tahun 2019-2023 | II-170 |
| Tabel | 2.127 Uji Kir Angkutan Umum Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-171 |
| Tabel | 2.128 Jumlah Pelabuhan Udara, Laut dan Terminal Bis Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-171 |
| Tabel | 2.129 Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-172 |
| Tabel | 2.130 Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-172 |
| Tabel | 2.131 Pemasangan Rambu-Rambu Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-173 |
| Tabel | 2.132 Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Kendaraan Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-174 |
| Tabel | 2.133 Jumlah Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2019-2023 | II-174 |

| | | |
|-------|--|--------|
| Tabel | 2.134 Jumlah Orang melalui Dermaga/Bandara/ Terminal per Tahun Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-175 |
| Tabel | 2.135 Fasilitas Keselamatan Jalan Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-176 |
| Tabel | 2.136 Persentase Koperasi Aktif Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-176 |
| Tabel | 2.137 Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-177 |
| Tabel | 2.138 Cakupan Pembinaan Olahraga Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023..... | II-177 |
| Tabel | 2.139 Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023..... | II-178 |
| Tabel | 2.140 Objek Wisata Kota Lhokseumawe | II-178 |
| Tabel | 2.141 Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-181 |
| Tabel | 2.142 Jumlah SKPD Yang Mengelola Arsip Secara Baku Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-182 |
| Tabel | 2.143 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (ADHB) Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-183 |
| Tabel | 2.144 Produktivitas Komoditas Pangan (Kg) Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-183 |
| Tabel | 2.145 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (ADHB) Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-184 |
| Tabel | 2.146 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (ADHB) Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-185 |
| Tabel | 2.147 Produksi Perikanan Budidaya Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-185 |
| Tabel | 2.148 Persentase Pejabat ASN mengikuti DIKLAT Struktural Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 .. | II-190 |
| Tabel | 2.149 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-191 |
| Tabel | 2.150 Capaian Kapabilitas APIP Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-192 |
| Tabel | 2.151 Capaian Tingkat Maturitas SPIP Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-192 |
| Tabel | 2.152 Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-193 |
| Tabel | 2.153 Capaian Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-197 |
| Tabel | 2.154 Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Lhokseumawe 2019-2023..... | II-198 |

| | | |
|-------|--|--------|
| Tabel | 2.155 Nilai Hasil Evaluasi LPPD Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023..... | II-199 |
| Tabel | 2.156 Persentase Binaan PKK Gampong dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-200 |
| Tabel | 2.157 Persentase Penertiban dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-201 |
| Tabel | 2.158 Persentase Penanganan di Kecamatan Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-202 |
| Tabel | 2.159 Persentase Pengawasan Dokumen Gampong Tahun 2019-2023 | II-203 |
| Tabel | 2.160 Persentase Akses Jaringan Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih Tahun 2019-2023 . | II-205 |
| Tabel | 2.161 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-206 |
| Tabel | 2.162 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-207 |
| Tabel | 2.163 Persentase Drainase dalam Kondisi Baik Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-208 |
| Tabel | 2.164 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-209 |
| Tabel | 2.165 Pusat-Pusat Pelayanan Kegiatan Kota Lhokseumawe Tahun 2023 | II-210 |
| Tabel | 2.166 Realisasi Standar Pelayanan Minimal Kota Lhokseumawe Tahun 2023 | II-211 |
| Tabel | 2.167 Target dan Capaian Indikator Makro Kota Lhokseumawe Tahun 2023 | II-215 |
| Tabel | 2.168 Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Lhokseumawe Tahun 2023 | II-217 |
| Tabel | 2.169 Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Capaian Tahun 2023 Kota Lhokseumawe | II-223 |
| Tabel | 2.170 Realisasi Pendapatan Tahun 2023 terhadap Target RKPK-P Tahun 2023 | II-237 |
| Tabel | 2.171 Realisasi Belanja Tahun 2023 terhadap Target RKPK-P Tahun 2023 | II-238 |
| Tabel | 2.172 Realisasi Pendapatan Tahun 2023 terhadap Target RKPK-P Tahun 2023 | II-240 |
| Tabel | 2.173 Tingkat Capaian Rata-Rata Kinerja dan Realisasi Anggaran Terhadap Target RKPK Tahun 2023 dan Realisasi Anggaran terhadap RPK Tahun 2023-2026 | II-244 |
| Tabel | 2.174 Kesesuaian Dokumen Anggaran Tahun 2023 | II-247 |
| Tabel | 2.175 Rekapitulasi Capaian Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2023 | II-249 |
| Tabel | 3.1 Target Makro Ekonomi Tahun 2025 | III-34 |

| | | | |
|-------|-----|--|--------|
| Tabel | 3.2 | Realisasi dan Target/Proyeksi Pendapatan Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025 | III-39 |
| Tabel | 3.3 | Realisasi dan Target/Proyeksi Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025 | III-49 |
| Tabel | 3.4 | Realisasi dan Target/Proyeksi Pembiayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025 | III-52 |
| Tabel | 4.1 | Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan | IV-3 |
| Tabel | 4.2 | Sasaran dan Target Makro Pembangunan Nasional Aceh dan Kota Lhokseumawe | IV-10 |
| Tabel | 4.3 | Penyandingan Prioritas Nasional dan Prioritas Kota Lhokseumawe | IV-16 |
| Tabel | 4.4 | Penyandingan Prioritas dan Sasaran Kota Lhokseumawe..... | IV-17 |
| Tabel | 4.5 | Target Sasaran Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2025 | IV-18 |
| Tabel | 4.6 | Intervensi Mendukung Prioritas Kota Lhokseumawe..... | IV-20 |
| Tabel | 4.7 | Program Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2025 | IV-23 |
| Tabel | 4.8 | Sinkronisasi SPM dan Prioritas Kota Lhokseumawe Tahun 2025..... | IV-32 |
| Tabel | 4.9 | Data Inovasi Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2024 | IV-35 |
| Tabel | 5.1 | Rekapitulasi Usulan Program dan Kegiatan Kekhususan Aceh Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025 | V-2 |
| Tabel | 5.2 | Usulan Program dan Kegiatan Kekhususan Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2025..... | V-4 |
| Tabel | 5.3 | Rekapitulasi Pagu Anggaran Kota Lhokseumawe Tahun 2025 Pendukung Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe..... | V-11 |
| Tabel | 5.4 | Program Prioritas Reformasi Birokrasi Kota Lhokseumawe Tahun 2025..... | V-12 |
| Tabel | 5.5 | Program Prioritas Reformasi Pendidikan Kota Lhokseumawe Tahun 2025..... | V-16 |
| Tabel | 5.6 | Program Prioritas Pertumbuhan Ekonomi Kota Lhokseumawe Tahun 2025..... | V-16 |
| Tabel | 5.7 | Program Prioritas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2025..... | V-18 |
| Tabel | 5.8 | Program Prioritas Memperkuat Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya Kota Lhokseumawe Tahun 2025..... | V-19 |

| | | | |
|-------|------|---|------|
| Tabel | 5.9 | Program Prioritas Infratraktur Kota Lhokseumawe Tahun 2025..... | V-20 |
| Tabel | 5.10 | Program Prioritas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe Tahun 2025..... | V-20 |
| Tabel | 5.11 | Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2025..... | V-22 |
| Tabel | 5.12 | Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2025..... | V-24 |
| Tabel | 6.1 | Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2025 | VI-2 |
| Tabel | 6.2 | Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Lhokseumawe Tahun 2025 .. | VI-4 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-------------|---|--------|
| Gambar 1.1 | Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPK | I-3 |
| Gambar 1.2 | Hubungan Antara RPJPD, RPJMK/RPK dan RKPK Lhokseumawe..... | I-11 |
| Gambar 2.1 | Peta Wilayah Kota Lhokseumawe | II-2 |
| Gambar 2.2 | Peta Kemiringan Lereng Kota Lhokseumawe | II-3 |
| Gambar 2.3 | Peta Geologi Kota Lhokseumawe | II-4 |
| Gambar 2.4 | Peta Hidrologi Kota Lhokseumawe | II-5 |
| Gambar 2.5 | Penggunaan Lahan Kota Lhokseumawe (Ha) | II-7 |
| Gambar 2.6 | Peta Rawan Bencana Kota Lhokseumawe | II-21 |
| Gambar 2.7 | Jumlah Penduduk (jiwa) dan Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Kota Lhokseumawe 2019-2023 | II-21 |
| Gambar 2.8 | Piramida Penduduk Kota Lhokseumawe 2023 | II-22 |
| Gambar 2.9 | Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2019-2023 | II-23 |
| Gambar 2.10 | Inflasi Kota Lhokseumawe 2019-2023 (%) | II-27 |
| Gambar 2.11 | PDRB Per Kapita ADHB Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah) | II-28 |
| Gambar 2.12 | PDRB Per Kapita ADHK Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah) | II-28 |
| Gambar 2.13 | Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023..... | II-31 |
| Gambar 2.14 | Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Kota Lhokseumawe Tahun 2019- 2023 | II-32 |
| Gambar 2.15 | Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-33 |
| Gambar 2.16 | Angka Harapan Lama Sekolah Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-34 |
| Gambar 2.17 | Angka Usia Harapan Hidup Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-35 |
| Gambar 2.18 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-37 |
| Gambar 2.19 | Persentase Balita Gizi Buruk Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-38 |
| Gambar 2.20 | Angka Partisipasi Sekolah Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-51 |
| Gambar 2.21 | Persentase Siswa Yang Memperoleh Pembinaan Tahun 2019-2023 | II-53 |
| Gambar 2.22 | Nilai Kelulusan dan Ketercapaian Kurikulum di Satuan Pendidikan di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-54 |
| Gambar 2.23 | Prevelensi Balita Stunting Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-90 |
| Gambar 2.24 | Indeks Pembangunan Gender Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-130 |
| Gambar 2.25 | Indeks Pemberdayaan Gender Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-130 |

| | | |
|-------------|---|--------|
| Gambar 2.26 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, IKL, IKLH) Tahun 2020-2023 | II-140 |
| Gambar 2.27 | Status Desa Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 | II-156 |
| Gambar 2.28 | Indeks Reformasi Birokrasi Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2023 | II-194 |
| Gambar 2.29 | Nilai Komponen Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita ADHB (Juta Rupiah) Tahun 2019-2023 Kota Lhokseumawe | II-204 |
| Gambar 2.30 | Realisasi Pendapatan Tahun 2023 terhadap Target RKPK-P Tahun 2023 | II-238 |
| Gambar 2.31 | Realisasi Belanja Tahun 2023 terhadap Target RKPK-P Tahun 2023 | II-239 |
| Gambar 2.32 | Realisasi Pembiayaan Tahun 2023 terhadap Target RKPK-P Tahun 2023 | II-241 |
| Gambar 3.1 | PDRB ADHB Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 (triliun rupiah) | III-14 |
| Gambar 3.2 | PDRB ADHK Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 (triliun rupiah) | III-15 |
| Gambar 3.3 | Distribusi Persentase PDRB ADHB Lhokseumawe dengan Migas Tahun 2023 (persen) | III-16 |
| Gambar 3.4 | Distribusi Persentase PDRB ADHB Lhokseumawe Tanpa Migas Tahun 2023 (persen) | III-17 |
| Gambar 3.5 | PDRB Lhokseumawe Menurut Pengeluaran Dengan Migas Tahun 2019-2023(triliun rupiah)..... | III-18 |
| Gambar 3.6 | Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2019 dan Tahun 2023..... | III-19 |
| Gambar 3.7 | PDRB Per Kapita Lhokseumawe ADHB Tahun 2019-2023 (juta rupiah) | III-20 |
| Gambar 3.8 | PDRB Per Kapita Lhokseumawe ADHK Tahun 2019-2023 (juta rupiah) | III-21 |
| Gambar 3.9 | Nilai Komponen Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita ADHB Tahun 2019-2023 (juta rupiah)... | III-22 |
| Gambar 3.10 | Laju Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe Tahun 2019-2023 (persen) | III-23 |
| Gambar 3.11 | Laju Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023 (persen) | III-23 |
| Gambar 3.12 | Laju Pertumbuhan PDRB Lhokseumawe ADHK Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023 (persen)... | III-24 |
| Gambar 3.13 | Inflasi Lhokseumawe, Meulaboh, Banda Aceh Aceh dan Nasional Tahun 2023 (persen)..... | III-26 |
| Gambar 3.14 | Tingkat Inflasi Year on Year Lhokseumawe Bulan Mei 2022-2024 (persen)..... | III-27 |
| Gambar 3.15 | Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Lhoksumwe, Mei 2024..... | III-28 |
| Gambar 4.1 | Sinkronisasi Prioritas dan Sasaran Kota Lhokseumawe | IV-15 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) merupakan penjabaran perencanaan pembangunan tahunan dari Rencana Pembangunan Kota (RPK) dan merupakan rencana pembangunan tahun ketiga atas RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026. Penyusunan RKPK Tahun 2025 diawali dengan penyusunan Rancangan Awal RKPK sebagaimana tertuang dalam Pasal 74 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Awal RKPK Lhokseumawe Tahun 2025 mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPK Lhokseumawe 2023-2026 dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan Semester II tahun 2023, serta isu strategis nasional dan daerah tentang kemiskinan ekstrim, stunting dan penanganan inflasi.

Secara umum RKPK Lhokseumawe Tahun 2025, difokuskan pada Upaya Meningkatkan Infrastruktur Kota Lhokseumawe berkualitas dengan memperhatikan tata kelola lingkungan hidup yang baik serta peningkatan layanan publik melalui digitalisasi sesuai dengan kapasitas riil keuangan daerah.

Tahun 2023 capaian indikator makro Kota Lhokseumawe sudah lebih baik dan terjadi peningkatan yang signifikan dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe Tahun 2019 berada diangka 3,98% naik menjadi 4,21% ditahun 2023, masih dibawah angka pertumbuhan ekonomi Aceh sebesar 4,23% dan nasional sebesar 5,05%, setelah mengalami

kontraksi di Tahun 2020 yaitu pada angka -1,45%. yang dipengaruhi oleh pandemi Covid-19. Di sisi lain, tingkat kemiskinan Kota Lhokseumawe mengalami tren menurun dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 dari angka 11,18% di Tahun 2019 turun kembali di Tahun 2023 menjadi 10,73%, dan berada pada peringkat ketiga terbaik se-Aceh, namun demikian masih lebih tinggi dengan angka kemiskinan nasional yang hanya 9,36%.

Tingkat pengangguran terbuka di Kota Lhokseumawe sangat terlihat jika dibandingkan dengan data pengangguran di tingkat nasional maupun provinsi. Angka pengangguran Kota Lhokseumawe masih berada di atas dua digit dari 2019 hingga Tahun 2021 yaitu 11,01%, 11,99%, 11,16% dan di Tahun 2022 menjadi 9,15% dan turun kembali di Tahun 2023 menjadi 8,68%, akan tetapi penurunan Tingkat pengangguran terbuka Kota Lhokseumawe di Tahun 2023 masih menempatkan Kota Lhokseumawe pada posisi tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Aceh dan jauh berada dibawah angka pengangguran Aceh sebesar 6,03 dan Nasional sebesar 5,32 di Tahun 2023.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Lhokseumawe terus meningkat dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 dan selalu berada di atas Nasional dan Aceh dengan capaian 77,30 Tahun 2019, 77,31 Tahun 2020, 77,57 Tahun 2021, 78,04 Tahun 2022 dan 80,26 ditahun 2023.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPK Tahun 2025 mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedudukan dari RKPK ini, diantaranya adalah:

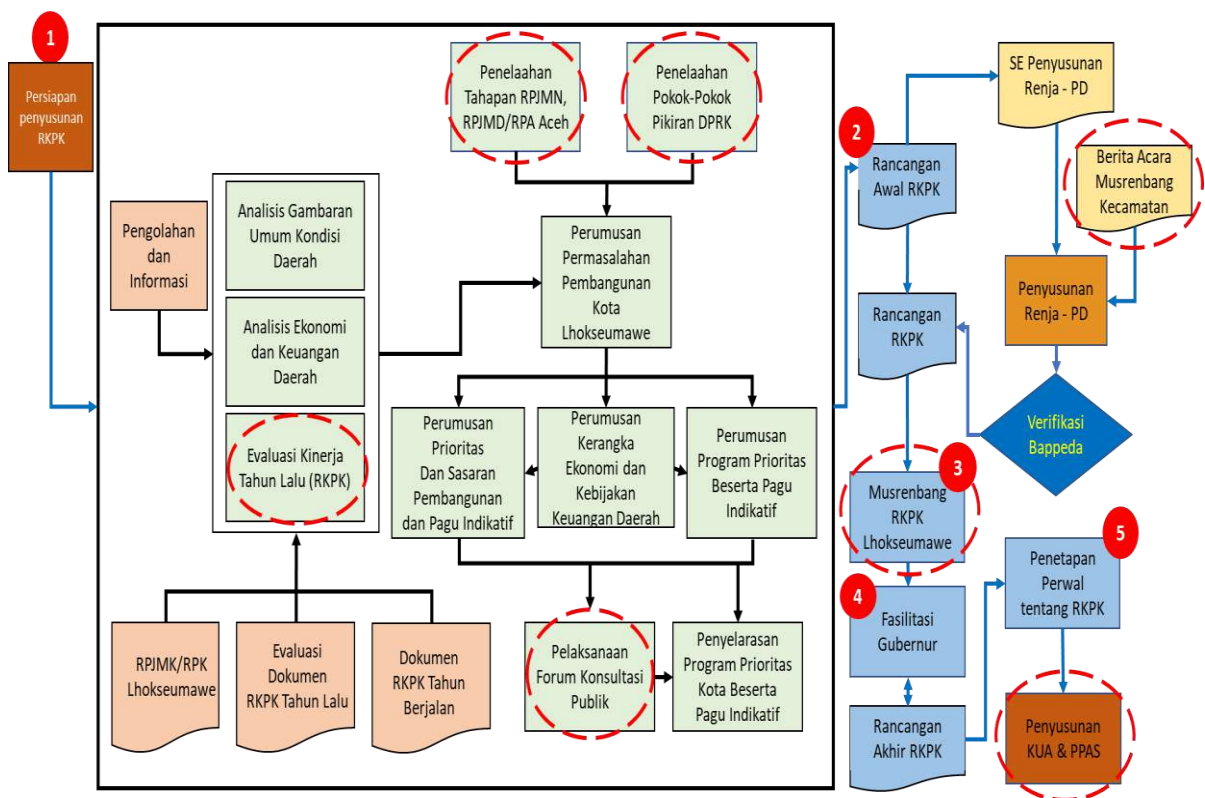
- a. Merupakan penjabaran tujuan, sasaran dan program daerah yang telah ditetapkan dalam RPK 2023-2026 ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
- b. Memuat acuan operasional tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) program dan kegiatan pembangunan Perangkat Daerah.
- c. Menjadi acuan bagi Wali Kota dan DPRK dalam menentukan Kebijakan Umum APBK dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBK Tahun Anggaran 2025.

- d. Bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam RKPK dapat diketahui sejauh mana capaian kinerja RPK sebagai wujud kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2023.

Adapun tahapan dan tata cara penyusunan RKPK disajikan pada Gambar 1.1

Gambar 1.1
Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD



Tahapan dan tata cara penyusunan RKPK sebagaimana tergambar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan RKPK

Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi:

 - a. penyusunan rancangan keputusan Wali Kota tentang pembentukan tim penyusun RKPK;
 - b. orientasi mengenai RKPK;
 - c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPK; dan

d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan Rancangan Awal RKPK

Penyusunan Rancangan awal RKPK melalui tahapan kegiatan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, yaitu:

a. Tahap penyusunan Rancangan RKPK, mencakup:

- 1) analisis gambaran umum kondisi daerah;
- 2) analisis Rancangan kerangka ekonomi daerah;
- 3) analisis kapasitas riil keuangan daerah;
- 4) penelaahan Rancangan awal Renja perangkat daerah;
- 5) perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
- 6) penelaahan terhadap sasaran RPK;
- 7) penelaahan terhadap arah kebijakan RPK;
- 8) penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
- 9) penelaahan pokok-pokok pikiran DPRK;
- 10) perumusan prioritas pembangunan daerah; dan
- 11) perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

b. Dalam penyusunan Rancangan Awal RKPK, DPRK memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRK disampaikan secara tertulis kepada kepala Bappeda berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota tentang Rencana Pembangunan Kota Tahun 2023-2026.

c. Rancangan Awal RKPK dibahas bersama dengan kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran

penyempurnaan, lalu dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Bappeda dan kepala perangkat daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik.

3. Penyusunan Rancangan RKPK

Penyusunan Rancangan RKPK adalah proses penyempurnaan Rancangan awal RKPK disempurnakan berdasarkan:

- a. rancangan awal Renja seluruh perangkat daerah Kota Lhokseumawe yang telah diverifikasi; dan
- b. hasil penelaahan terhadap Rancangan awal RKPA Provinsi, RKP dan program strategis nasional.

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPK

Musrenbang RKPK bertujuan untuk membahas Rancangan RKPK yang dilaksanakan dalam rangka:

- a. menyepakati permasalahan pembangunan daerah;
- b. menyepakati prioritas pembangunan daerah;
- c. menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
- d. penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; dan
- e. klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah kabupaten/kota dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang di tingkat Kecamatan.

5. Perumusan Rancangan Akhir RKPK

Perumusan rancangan akhir RKPK merupakan proses penyempurnaan Rancangan RKPK menjadi rancangan akhir RKPK berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPK. Rancangan akhir RKPK yang telah dibahas dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Wali (Perwal) Kota Lhokseumawe tentang RKPK Tahun 2025 setelah terlebih

dahulu dilakukan reviu oleh APIP dan dilakukan fasilitasi oleh Gubernur melalui Bappeda Aceh.

6. Penetapan Rancangan Akhir RKPK

Rancangan Perwal tentang Rancangan Akhir RKPK yang telah disempurnakan disampaikan oleh kepala Bappeda kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan. Peraturan Wali Kota tentang Rancangan Akhir RKPK dijadikan sebagai:

- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja perangkat daerah;
- b. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Tahapan panjang dalam proses penyusunan RKPK dimaksud tidak terlepas dari empat pendekatan perencanaan yang berorientasi proses. Pertama pendekatan teknokratis, yaitu menggunakan metoda dan kerangka pikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Kedua pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*). Ketiga pendekatan politis, penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan. Dan keempat pendekatan bawahatas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*) dimana hasilnya diselaraskan melalui musyawarah nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4633);
 4. Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Tahun 2012-2032;
15. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh Tahun 2012-2032;
16. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam;
17. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
18. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) (Lembaran Aceh tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 137);
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Pemerintah Aceh;
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026;
22. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2044;
23. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025;
24. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;
25. Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RKPK Lhokseumawe berpedoman pada RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 untuk sinkronisasi dan keselarasan program serta kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan daerah provinsi. RKPK Lhokseumawe Tahun 2025 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kota maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, penyusunannya mengacu pada RKP Tahun 2025 dan RKPA Tahun 2025. RKPK Lhokseumawe Tahun 2025 menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan rancangan APBD Tahun 2025.

RKPK Lhokseumawe Tahun 2025 memiliki hubungan erat dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. RKPK dan RPJPK 2005-2025

RKPK Lhokseumawe Tahun 2025 merupakan pelaksanaan periode terakhir RPJPK yakni periode 2020-2025. RKPK berisikan prioritas program dan kegiatan berdasarkan Analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPK Lhokseumawe Tahap keempat yang disesuaikan dengan RPA dan RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026.

2. RKPK dan RPK 2023-2026

RKPK Lhokseumawe Tahun 2025 merujuk pada dokumen RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026 yang berisikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang penyusunannya disesuaikan dengan RPJMN, RPJMA, dan RPJPK Lhokseumawe.

3. RKPK dan Renja PD

RKPK sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja)

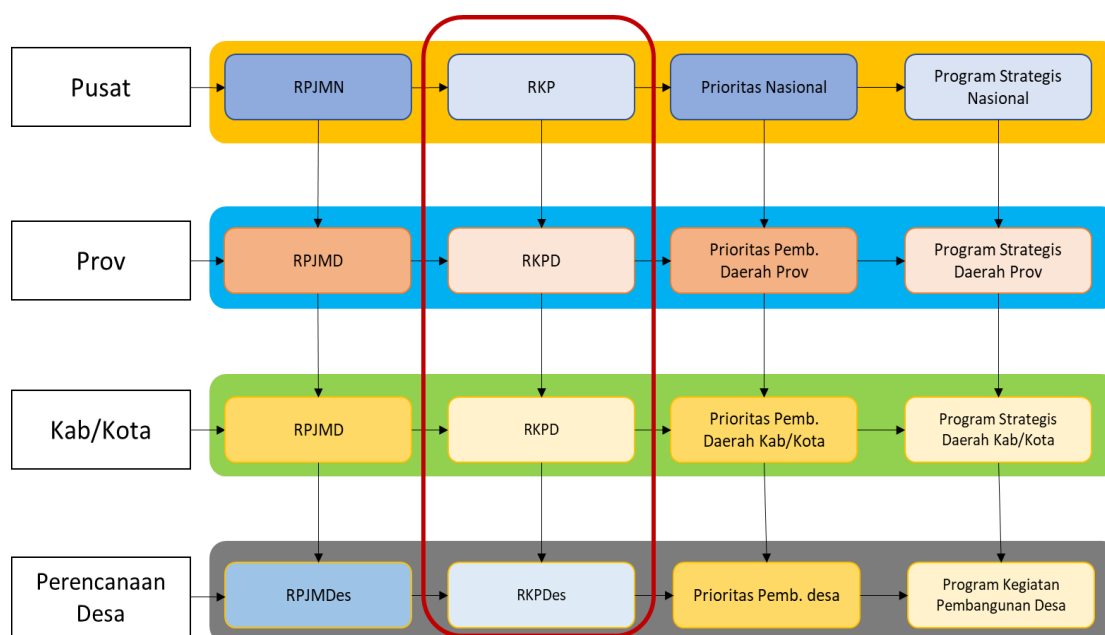
Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen tahunan yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan

yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan dan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah.

4. RKPK dan APBK

RKPK digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memastikan bahwa APBK telah disusun berdasarkan RKPK.

Gambar 1.2
Hubungan Antara RPJPD, RPJMK/RPK, dan RKPK Lhokseumawe



1.4 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud disusunnya RKPK Lhokseumawe Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan program pembangunan daerah yang tertuang dalam RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026 ke dalam RKPK Lhokseumawe Tahun 2025 dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPK tahun sebelumnya.
2. Menciptakan sinergi program/kegiatan antar wilayah, antar kewenangan urusan pembangunan, antar Perangkat Daerah.
3. Mewujudkan efektivitas alokasi sumber dana.
4. Mengakomodir dinamika kebutuhan prioritas masyarakat.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan RKPK Lhokseumawe Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025;
2. Pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.5. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan RKPK Lhokseumawe Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Sistematika Dokumen RKPK
- 1.5 Maksud dan Tujuan

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI KOTA LHOKSEUMAWE

- 2.1. Kondisi Umum Kondisi Kota
 - 2.1.1 Aspek Geografi
 - 2.1.2 Aspek Demografi
 - 2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.1.4 Aspek Pelayanan Umum
 - 2.1.5 Aspek Daya Saing Daerah
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPK sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMK
- 2.3 Permasalahan Pembangunan Kota Lhokseumawe

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN KOTA LHOKSEUMAWE

- 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Kota
- 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Kota

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA

LHOKSEUMAWE

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KOTA LHOKSEUMAWE

BAB VI. KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAH KOTA

LHOKSEUMAWE

BAB VII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI KOTA LHOKSEUMAWE

2.1. Kondisi Umum Kota Lhokseumawe

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana, demografi dan sosiologi.

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

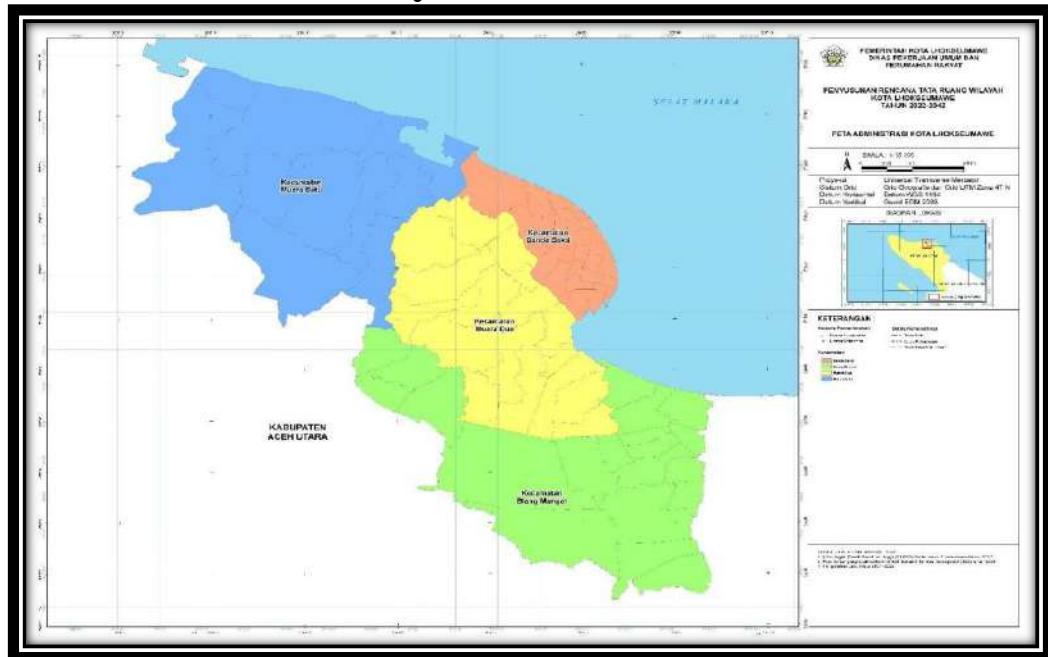
Letak geografis Kota Lhokseumawe yaitu 04°54'–05°18' Lintang utara dan 96°20' –97°21' Bujur Timur. Kota Lhokseumawe berada pada ketinggian +24 meter di atas permukaan laut, disebelah utara dan daerah disebelah timur berada pada ketinggian antara 105 di atas permukaan laut, sedangkan pada daerah di sebelah selatan memiliki kondisi yang relatif berbukit-bukit dengan ketinggian antara 5-100 di atas permukaan laut. Kota Lhokseumawe dengan luas wilayah 181,06 Km² atau 18.106 Ha dibagi menjadi 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Blang Mangat dengan luas wilayah 56,12 Km², Kecamatan Muara Dua luas wilayah 57,80 Km², Kecamatan Muara Satu luas wilayah 55,90 Km² dan Kecamatan Banda Sakti luas wilayah 11,24 Km². Kota Lhokseumawe memiliki 9 kemukiman dengan 68 gampong.

Berdasarkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Kota Lhokseumawe Periode 2024-2044, Kota Lhokseumawe berbatasan dengan wilayah berikut:

- Utara dengan Selat Malaka;
- Selatan dengan Kecamatan Kuta Makmur (Kabupaten Aceh Utara);
- Barat dengan Kabupaten Kecamatan Dewantara (Kabupaten Aceh Utara); dan

- Timur dengan Kecamatan Syamtalira Bayu (Kabupaten Aceh Utara).

Gambar 2.1
Peta Wilayah Kota Lhokseumawe

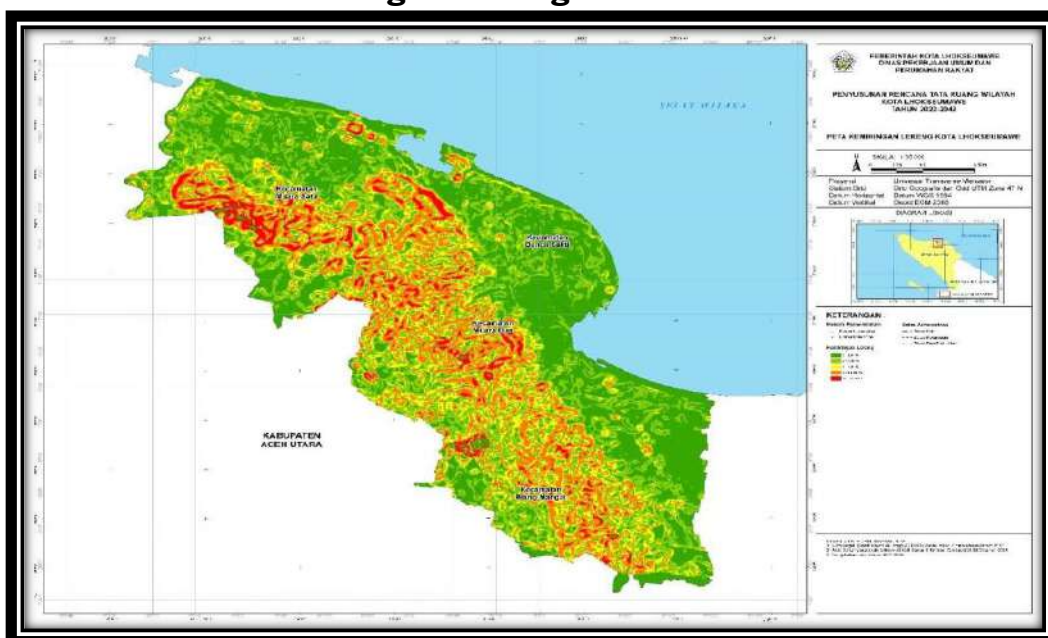


Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2044.

2.1.1.1.2 Kondisi Topografi

Wilayah utara Kota Lhokseumawe merupakan pesisir selat malaka dan daerah sebelah Timur merupakan daerah dataran dengan kemiringan antara 0-8%. Sedangkan pada daerah yang menjauhi pesisir merupakan daerah yang berbukit-bukit dengan kemiringan antara 8-15%. Kondisi ketinggian lahan menunjukkan bahwa Kota Lhokseumawe berada di antara ketinggian 0-100 mdpl. Daerah pesisir disebelah utara dan daerah disebelah timur berada pada ketinggian antara 0-5 mdpl. Sedangkan pada daerah selatan memiliki kondisi yang relatif berbukit-bukit dengan ketinggian antara 5-100 m dpl. Dengan kondisi kemiringan lahan seperti ini masih memungkinkan untuk dilakukan pengembangan kegiatan perkotaan.

Gambar 2.2
Peta Kemiringan Lereng Kota Lhokseumawe

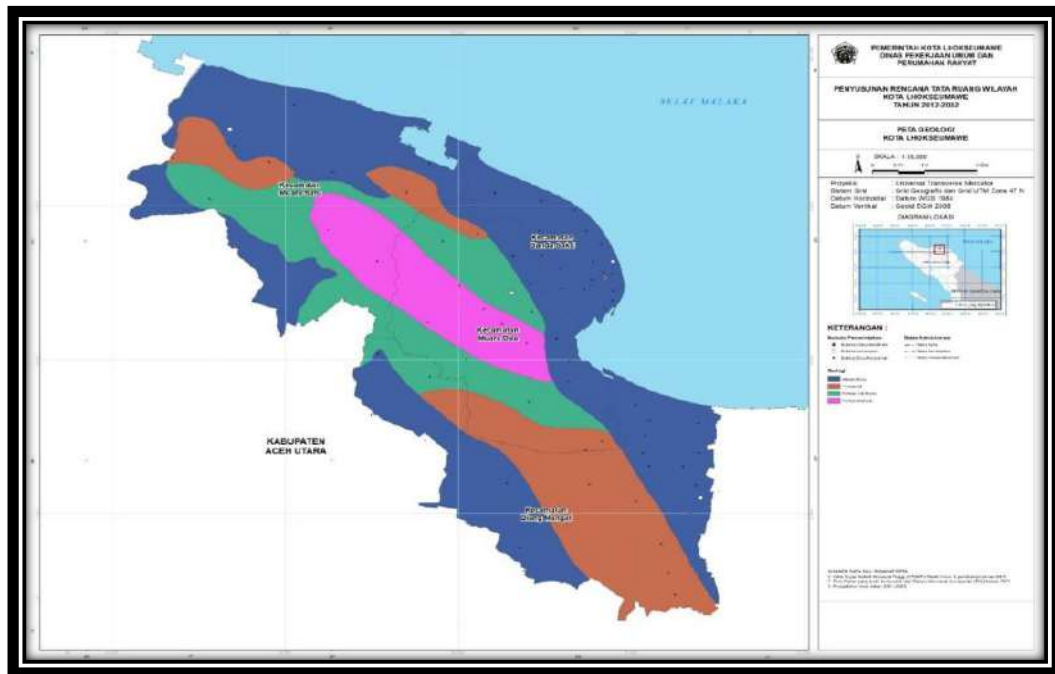


Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2044.

2.1.1.1.3 Kondisi Geologi

Kondisi geologi Kota Lhokseumawe terbentuk oleh bantuan Alluvium Muda, Formasi Idi, Formasi Julurayeu dan Formasi Seureula. Sebaran batuan Aluvium Muda berupa endapan pesisir dan Fluviatill berada pada daerah di sebelah utara dan selatan Kota Lhokseumawe. Sebaran Formasi Idi berupa kerikil, pasir, gamping dan lempung berada pada daerah sebelah barat yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua dan sebelah timur yaitu sebagian Kecamatan Muara Dua dan Blang Mangat. Sebaran Formasi Julurayeu berupa endapan sungai batu pasir tufaan, lempung berlignit, dan batulumpur berada pada daerah sebelah barat hingga tengah Kota Lhokseumawe yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua. Sedangkan sebaran formasi seureula berupa batupasir gunungapi, dan batulumpur gampingan berada pada daerah tengah Kota Lhokseumawe yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua.

Gambar 2.3
Peta Geologi Kota Lhokseumawe

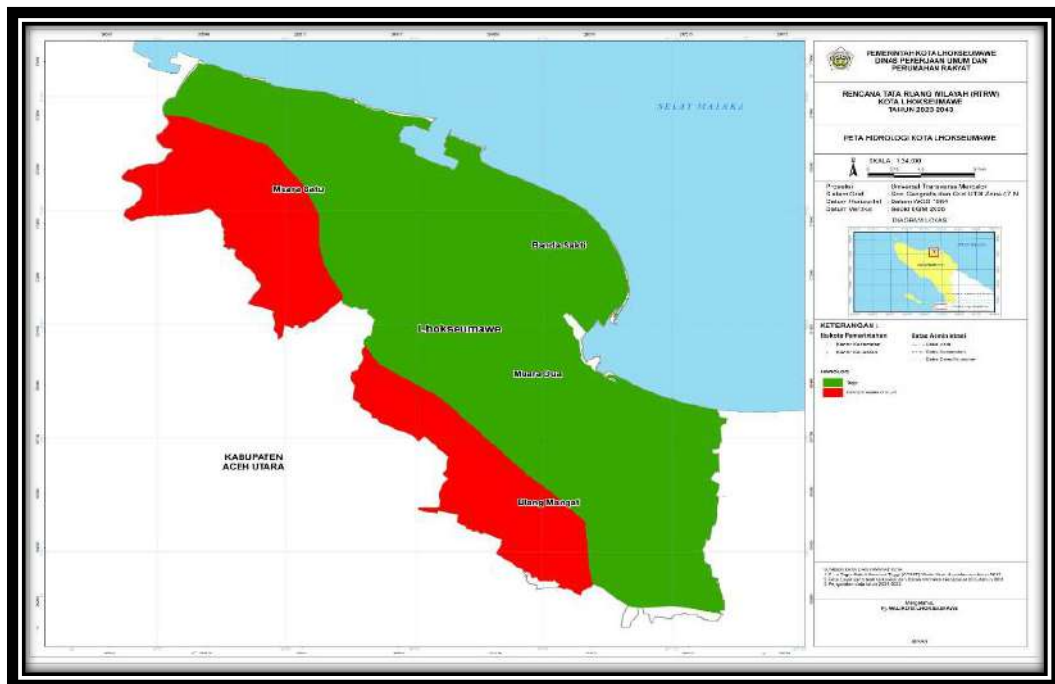


Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2044.

2.1.1.1.4 Kondisi Hidrologi

Kondisi air tanah dalam dicirikan dengan adanya akuifer cukup produktif meliputi sebagian besar wilayah Kota Lhokseumawe. Sedangkan akuifer tinggi berada pada daerah barat hingga selatan Kota Lhokseumawe. Kondisi air permukaan dicirikan dengan keberadaan *Krueng* (Sungai) Cunda yang terletak di bagian barat. Namun keadaan air sungai tersebut merupakan air payau sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh penduduk sebagai air bersih. Untuk keperluan air bersih, pada umumnya penduduk memanfaatkan air sumur dan air PDAM.

Gambar 2.4
Peta Hidrologi Kota Lhokseumawe



Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2044.

2.1.1.1.5 Kondisi Klimatologi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe Tahun 2023, rata rata suhu udara minimum Kota Lhokseumawe berkisar antara 22^oC dan suhu udara maksimum 33^oC dan rata rata kelembapan udara berkisar 82% sampai dengan 89%. Dan rata rata tekanan udara berkisar 1.009 mb sampai dengan 1013 mb. Lamanya penyinaran matahari maksimum terjadi pada Bulan April sebesar 7.7 persen dengan jumlah hari hujan maksimum yaitu 24 hari di bulan Oktober. Sementara itu, jumlah penyinaran matahari minimum yaitu 5 persen yang terjadi pada Bulan September dengan jumlah hari hujan minimum yaitu 4 hari di bulan April sedangkan rata-rata kelembapan udara tertinggi terjadi pada Bulan Desember sebesar 89 persen dan terendah terjadi pada Bulan April yaitu sekitar 81 persen. Berikut tabel temperatur suhu Kota Lhokseumawe Tahun 2023:

Tabel 2.1
Rata-rata Temperatur Maximum dan Minimum
Kota Lhokseumawe Tahun 2023

| Bulan | Temperatur | | |
|-----------|------------|-------|-----------|
| | Min | Maks | Rata-rata |
| Januari | 19.70 | 32.40 | 26.30 |
| Februari | 20.80 | 31.80 | 26.50 |
| Maret | 20.00 | 33.20 | 27.10 |
| April | 21.20 | 33.80 | 27.90 |
| Mei | 22.40 | 34.20 | 28.20 |
| Juni | 22.60 | 33.80 | 27.90 |
| Juli | 22.80 | 33.60 | 28.00 |
| Agustus | 22.60 | 33.60 | 27.70 |
| September | 22.60 | 34.40 | 27.30 |
| Oktober | 22.60 | 32.50 | 26.80 |
| November | 22.60 | 33.00 | 26.50 |
| Desember | 23.40 | 32.40 | 26.70 |

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka (LDA), BPS 2024.

Tabel 2.2
Banyaknya Curah Hujan, Hari Hujan dan Penyinaran Matahari
Kota Lhokseumawe Tahun 2023

| Bulan | Curah Hujan (mm) | Hari Hujan | Penyinaran Matahari |
|-----------|------------------|------------|---------------------|
| Januari | 171.40 | 16 | 5.5 |
| Februari | 52.90 | 11 | 5.3 |
| Maret | 35.00 | 9 | 6.9 |
| April | 26.60 | 4 | 7.7 |
| Mei | 165.70 | 13 | 7.4 |
| Juni | 161.90 | 15 | 7.3 |
| Juli | 41.90 | 9 | 7.4 |
| Agustus | 131.60 | 9 | 6.3 |
| September | 135.40 | 16 | 5.0 |
| Oktober | 173.30 | 24 | 5.5 |
| November | 241.70 | 23 | 4.4 |
| Desember | 342.70 | 22 | 4.0 |

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka (LDA), BPS 2024

Tabel 2.3
Rata-rata Kelembaban Nisbi dan Tekanan Udara
Kota Lhokseumawe Tahun 2023

| Bulan | Rata-rata | Tekanan Udara (mb) |
|-----------|-----------|--------------------|
| Januari | 85.20 | 1011.40 |
| Februari | 85.30 | 1012.20 |
| Maret | 82.90 | 1013.90 |
| April | 81.10 | 1011.60 |
| Mei | 83.00 | 1011.90 |
| Juni | 83.00 | 1009.50 |
| Juli | 82.00 | 1009.50 |
| Agustus | 83.10 | 1011.40 |
| September | 84.20 | 1010.70 |
| Oktober | 87.70 | 1011.90 |
| November | 89.80 | 1011.00 |
| Desember | 89.30 | 1012.00 |

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka (LDA), BPS 2024

Tabel 2.4
Arah Angin, Kecepatan rata-rata, dan Kecepatan Angin
Maksimum Kota Lhokseumawe Tahun 2023

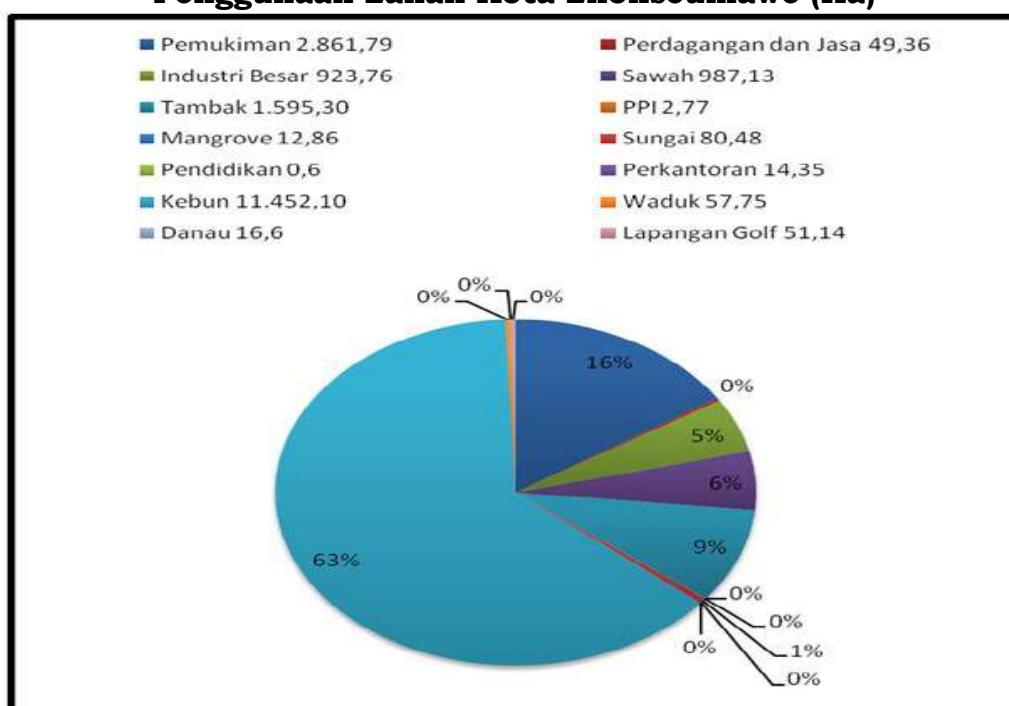
| Bulan | Arah Angin | Kecepatan Rata-rata | Kecepatan Maksimum | Arah Maksimum |
|-----------|------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Januari | TG | 4.70 | 16.00 | T |
| Februari | BD | 4.10 | 18.00 | T |
| Maret | BD | 4.90 | 16.00 | T |
| April | BD | 4.20 | 16.00 | TL |
| Mei | BD | 4.20 | 14.00 | T |
| Juni | BD | 3.90 | 15.00 | B |
| Juli | TG | 3.60 | 15.00 | TL |
| Agustus | TL | 4.00 | 20.00 | T |
| September | BD | 3.80 | 15.00 | N |
| Oktober | BD | 3.60 | 12.00 | B |
| November | BD | 3.60 | 14.00 | BD |
| Desember | T | 4.10 | 16.00 | T |

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka (LDA), BPS 2024.

2.1.1.1.6 Penggunaan Lahan

Kota Lhokseumawe memiliki luas 181,06 Km² dengan penggunaan lahan yang beragam. Angka paling tinggi digunakan sebagai kawasan pemukiman dan diikuti oleh kawasan perdagangan dan jasa. Untuk Lebih jelas mengenai kondisi penggunaan lahan Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar 2.5
Penggunaan Lahan Kota Lhokseumawe (Ha)



Sumber: Data diolah dari Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2024

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kota Lhokseumawe dilihat dari sisi perwujudan sistem perkotaan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2044 meliputi :

- a. perwujudan sistem pusat pelayanan, meliputi:
 1. Perwujudan Pusat Pelayanan Kota (PPK) Lhokseumawe, meliputi:
 - a) Penetapan dan pengembangan fungsi utama kegiatan perkantoran;
 - b) Penetapan dan pengembangan fungsi utama perdagangan dan jasa skala kota;
 - c) Penetapan dan pengembangan fungsi utama pusat permukiman;
 - d) Penetapan dan pengembangan fungsi utama kegiatan pariwisata;
 - e) Penetapan dan pengembangan fungsi utama pusat pertahanan dan keamanan; dan
 - f) Penyusunan dan legalisasi rencana detail tata ruang (RDTR).
 2. perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Lhokseumawe, meliputi:
 - a) Penetapan dan pengembangan fungsi utama kawasan perdagangan dan jasa, Kawasan permukiman dan kegiatan perkantoran;
 - b) Penetapan dan pengembangan fungsi utama kawasan perdagangan dan jasa, kawasan permukiman, kawasan perkantoran dan kawasan pendidikan;
 - c) Penetapan dan pengembangan fungsi utama kawasan perdagangan dan jasa, kawasan permukiman, kawasan pendidikan, Kawasan industri dan kegiatan ruang terbuka hijau; dan
 - d) Penetapan dan pengembangan fungsi utama kawasan permukiman, Kawasan perkantoran dan kegiatan pertanian.
 3. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Kota Lhokseumawe, meliputi:

- a) Penetapan dan pengembangan fungsi utama kawasan perdagangan dan jasa, kegiatan pariwisata, kawasan permukiman, dan kegiatan perikanan;
 - b) Penetapan dan pengembangan fungsi utama kawasan campuran, kawasan permukiman, kegiatan industri, kegiatan pertanian, kawasan perkantoran;
 - c) Penetapan dan pengembangan fungsi utama kegiatan transportasi, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan permukiman, dan perikanan budidaya;
 - d) Penetapan dan pengembangan fungsi utama kawasan perdagangan dan jasa, kawasan permukiman, kegiatan pertahanan dan keamanan, Kawasan industri dan kegiatan perkantoran; dan
 - e) Pembentukan Kecamatan Kandang Makmur beserta kelengkapannya.
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi terdiri dari:
- 1. perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
 - a) Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
 - b) Survei Kondisi Jalan/Jembatan;
 - c) Rehabilitasi Jalan;
 - d) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan umum berupa jalan arteri primer yang merupakan kewenangan nasional, meliputi:
 - 1) Bts. Aceh Utara/Lhokseumawe-Sp. Cunda (Jln. Raya Banda Aceh) (Lhokseumawe);
 - 2) Sp. Cunda-Buket Rata; dan
 - 3) Buket Rata-Bts. Kota Lhokseumawe/Aceh Utara
 - e) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan umum berupa jalan arteri sekunder yang merupakan kewenangan kota, meliputi:
 - 1) jalan Tgk. Daud Beureueh (Jalan Lingkar Loskala); dan
 - 2) jalan Tgk. Hasan Ditiro (Jalan Lingkar Ujong Blang Lhokseumawe)
 - f) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan umum berupa jalan kolektor primer yang merupakan kewenangan provinsi, meliputi:

- 1) Bts. Aceh Utara/Kota Lhokseumawe-Buket Rata;
 - 2) Sp. Krueng Geukueh-Pel. Krueng Geukueh (Pel. Lhokseumawe);
 - 3) Jl. Cunda – Lhokseumawe;
 - 4) Jalan Padang Sakti I;
 - 5) Jl. Teungku Akhmad Kandang;
 - 6) Jl. Alue Raya – Line Pipa;
 - 7) Jl. Cot Sabong – Jeulikat;
 - 8) Jl. Jambo Timu – Lancok;
 - 9) Jl. Kenari;
 - 10) Jl. Merdeka Barat;
 - 11) Jl. Merdeka Timur;
 - 12) Jl. Pase;
 - 13) Jl. Sp. Buloh – Line Pipa;
 - 14) Jl. Sp. Kandang- Alue Lim;
 - 15) Jl. Stadion Tunas Bangsa;
 - 16) Jl. Tgk Chik di Paloh; dan
 - 17) Jl. Ujong Pacu.
- g) peningkatan status jalan nasional pada ruas jalan Akses Terminal Tipe A Lhokseumawe;
- h) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan umum berupa jalan lokal primer yang merupakan kewenangan kota, meliputi:
- 1) Jl. Air Bersih;
 - 2) Jl. Akhmad Kandang;
 - 3) Jl. Alkalali;
 - 4) Jl. Aman;
 - 5) Jl. Ampera;
 - 6) Jl. Bakau;
 - 7) Jl. Bangdes;
 - 8) Jl. Blang Pulo – Blang Naleung Mameh;
 - 9) Jl. Blang Weu Baroh;
 - 10) Jl. Cempaka Putih;

- 11) Jl. Cut Meutia;
- 12) Jl. Diponegoro;
- 13) Jl. Goa Jepang;
- 14) Jl. Gudang;
- 15) Jl. Gudang Baru;
- 16) Jl. Haji Nafi/Simpang Ardath;
- 17) Jl. Haji Tana;
- 18) Jl. Imam;
- 19) Jl. Iskandar Muda;
- 20) Jl. Jamaika Timur;
- 21) Jl. Jambo Timu – Lancok;
- 22) Jl. Kenari;
- 23) Jl. Keuchik Daud;
- 24) Jl. Koperasi;
- 25) Jl. Lr. Baroena/Listrik;
- 26) Jl. Lr. Blang Geulumpang;
- 27) Jl. Lr. Hasan;
- 28) Jl. Lr. Kenanga;
- 29) Jl. Lr. Kuburan/Darussalam;
- 30) Jl. Lr. Kuta Kareung;
- 31) Jl. Lr. Puskesmas Banda Masen;
- 32) Jl. Lr. Tgk Ben Puteh;
- 33) Jl. Lr. Suud/SMPN 8;
- 34) Jl. Lr. Tgk. Gambang;
- 35) Jl. Mahoni;
- 36) Jl. Malikussaleh;
- 37) Jl. Merpati;
- 38) Jl. Nelayan;
- 39) Jl. Palapa;
- 40) Jl. Paloh Bate;
- 41) Jl. Pandan/Uteun Bayi;
- 42) Jl. Panglath;

- 43) Jl. Panglima Kaom;
- 44) Jl. Pasar Sayur;
- 45) Jl. Pase;
- 46) Jl. Pelangi;
- 47) Jl. Pelita;
- 48) Jl. Pendidikan;
- 49) Jl. Perdagangan;
- 50) Jl. Perikanan;
- 51) Jl. Perniagaan;
- 52) Jl. Perum Bambu Kuning;
- 53) Jl. Peutua Rumoh Rayeuk;
- 54) Jl. Peutua Ali;
- 55) Jl. Peutua Beurahim;
- 56) Jl. Peutua Malim;
- 57) Jl. PPI Pusong;
- 58) Jl. Pramuka;
- 59) Jl. Purnawirawan;
- 60) Jl. PWI;
- 61) Jl. PWI I;
- 62) Jl. Rahmat;
- 63) Jl. Rumah Alue;
- 64) Jl. Samudera;
- 65) Jl. Samudera Baru;
- 66) Jl. Seuneubok - Line Pipa;
- 67) Jl. Stadion Tunas Bangsa;
- 68) Jl. Stasiun;
- 69) Jl. Suka Ramai;
- 70) Jl. T. Chik di Tiro;
- 71) Jl. T. Hamzah Bendahara;
- 72) Jl. T. Nyak Adam Kamil;
- 73) Jl. T.U. Agam;
- 74) Jl. Teratai Putih;

- 75) Jl. Teuku Chik di Tunong;
 - 76) Jl. Teuku Syarief;
 - 77) Jl. Teuku Umar;
 - 78) Jl. Tgk Affan – SMAN 3;
 - 79) Jl. Tgk. Cik di Tunong;
 - 80) Jl. Tgk. Muda Lam Kuta/Ulee Jalan;
 - 81) Jl. Tun Ibrahim Tapa; dan
 - 82) Jl. Ujong Pacu
- i) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan umum berupa jalan lokal sekunder yang merupakan kewenangan kota di Kota Lhokseumawe;
 - j) Rencana umum (masterplan) Pembangunan dan pengembangan jalan lokal sekunder di Kota Lhokseumawe;
 - k) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan umum berupa jalan lingkungan sekunder yang merupakan kewenangan kota di Kota Lhokseumawe;
 - l) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan khusus berupa jalan line pipa di Kecamatan Muara Satu dan Kecamatan Blang Mangat;
 - m) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan khusus berupa jalan akses Terminal Tipe A Lhokseumawe yang merupakan kewenangan nasional di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua;
 - n) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan khusus berupa jalan akses KEK Arun di Kecamatan Muara Satu;
 - o) Pembangunan *exit* Tol Langsa-Lhokseumawe di Kota Lhokseumawe;
 - p) Pembangunan *exit* Tol Lhokseumawe-Sigli di Kota Lhokseumawe;
 - q) Pembebasan lahan untuk pembangunan *exit* Tol Langsa-Lhokseumawe di Kota Lhokseumawe;
 - r) Pembebasan lahan untuk pembangunan *exit* Tol Lhokseumawe -Sigli di Kota Lhokseumawe;
 - s) Pengembangan terminal penumpang tipe A Lhokseumawe di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua;

- t) Pengembangan terminal penumpang tipe C di Gampong Keude Aceh di Kecamatan Banda Sakti;
 - u) Pengembangan angkutan dalam kota yang terintegrasi di Kota Lhokseumawe;
 - v) Pengembangan Terminal Barang Kota Lhokseumawe di Gampong Meunasah Mee di Kecamatan Muara Dua;
 - w) Pembangunan dan pengembangan jembatan di Kota Lhokseumawe;
 - x) Penggantian Jembatan di Kota Lhokseumawe; dan
 - y) Pembangunan *fly over* Cunda di Kota Lhokseumawe.
2. perwujudan sistem jaringan transportasi laut, meliputi:
- a) pengembangan terminal khusus Migas V di Gampong Blang Panyang di Kecamatan Muara Satu;
 - b) Pengembangan Terminal khusus Energi Listrik II Gampong Hagu Teungoh di Kecamatan Banda Sakti; dan
 - c) Pengembangan Pelabuhan Pendaratan Ikan Ujong Blang di Gampong Ujong Blang di Kecamatan Banda Sakti.
- c. perwujudan sistem jaringan energi, meliputi:
1. perwujudan sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi:
- a) jaringan minyak dan gas bumi, meliputi:
 - 1) Pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan di Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Dua; dan
 - 2) Pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen di Kota Lhokseumawe;
 - b) infrastruktur minyak dan gas bumi berupa pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi di Kecamatan Muara Satu dan Kecamatan Banda Sakti.
2. perwujudan sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
- a) jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, meliputi:
 - 1) Pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) jaringan transmisi Banda Aceh-Sigli-Lhokseumawe-Langsa-Medan-Tebing Tinggi di

Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu;

2) Pengembangan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu;

3) Pengembangan Saluran transmisi lainnya di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu.

b) jaringan distribusi tenaga listrik, meliputi:

1) Pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) di Kota Lhokseumawe;

2) Kajian rencana pengadaan tenaga listrik di Kota Lhokseumawe; dan

3) Penataan jaringan udara dan jaringan dalam tanah di Kota Lhokseumawe.

c) pengembangan gardu listrik di Kecamatan Muara Satu;

d) infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:

1) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Arun (LNG) 180 MW di Gampong Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu; dan

2) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Sumbagut-2 Peaker 240 MW di Gampong Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu.

d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:

1. perwujudan sistem jaringan tetap, meliputi:

a) Pembangunan dan pengembangan jaringan tetap di Kota Lhokseumawe;

b) Pengembangan sistem penataan menara diluar zona pembangunan Menara di Kota Lhokseumawe;

c) Pengembangan jaringan kabel maupun non kabel di Kota Lhokseumawe; dan

d) Penataan jaringan udara dan jaringan dalam tanah di Kota Lhokseumawe.

2. pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan tetap di Gampong Alue Awee di Kecamatan Muara Dua;

3. perwujudan sistem jaringan bergerak, meliputi:

- a) Pembangunan dan pengembangan jaringan bergerak seluler di Kota Lhokseumawe;
 - b) Kajian pengembangan infrastruktur jaringan mikro digital di Kota Lhokseumawe;
 - c) Kajian Pembangunan menara BTS di Kota Lhokseumawe;
 - d) Pengembangan jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum di Kota Lhokseumawe; dan
 - e) Pembangunan menara bersama di Kota Lhokseumawe;
- e. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
1. Perwujudan sistem jaringan irigasi, meliputi:
 - a) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi primer di Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Dua;
 - b) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu; dan
 - c) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu.
 2. Perwujudan sistem pengendalian banjir, meliputi:
 - a) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan pengendalian banjir di Kota Lhokseumawe; dan
 - b) Pembangunan dan pemeliharaan bangunan pengendalian banjir di Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Satu.
 3. Perwujudan bangunan sumber daya air, meliputi:
 - a) Pembangunan dan pemeliharaan pintu air di Kota Lhokseumawe;
 - b) Pembangunan dan pemeliharaan prasarana irigasi di Kota Lhokseumawe;
 - c) Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya di Kota Lhokseumawe;
 - d) Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku di Kota Lhokseumawe;
 - e) Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya di Kota Lhokseumawe; dan

- f) Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya di Kota Lhokseumawe.
- f. perwujudan sistem infrastruktur perkotaan, meliputi:
1. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM), meliputi:
 - a) perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan di Kota Lhokseumawe;
 - b) Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan di Kota Lhokseumawe;
 - c) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM di Kota Lhokseumawe;
 - d) Penataan jaringan dalam tanah di Kota Lhokseumawe;
 - e) perwujudan sistem jaringan perpipaan, meliputi:
 - 1) pengembangan unit air baku di Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Satu;
 - 2) pengembangan jaringan air baku di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu;
 - 3) pengembangan unit produksi di Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Satu; dan
 - 4) pengembangan unit distribusi di Kota Lhokseumawe.
 - f) perwujudan bukan jaringan perpipaan berupa pembangunan dan pengembangan terminal air di Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Muara Satu.
 2. perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL), meliputi:
 - a) Penyusunan Masterplan Air Limbah di Kota Lhokseumawe;
 - b) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota di Kota Lhokseumawe;
 - c) Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman di Kota Lhokseumawe;
 - d) Kajian Pembangunan IPAL dan IPLT di Kota Lhokseumawe;
 - e) Kajian Pembangunan pipa jaringan air limbah di Kota Lhokseumawe;

- f) Kajian Pembangunan Penampungan Sementara Air Limbah di Kota Lhokseumawe;
 - g) Kajian Pembangunan Rumah Pompa Air Limbah di Kota Lhokseumawe;
 - h) Perwujudan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik berupa Pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Lhokseumawe;
 - i) Perwujudan Jaringan Pengelolaan Air Limbah Domestik berupa Pengembangan Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Lhokseumawe.
3. perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), meliputi:
- a) Pengembangan dan peningkatan Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Gampong Blang Buloh di Kecamatan Blang Mangat;
 - b) Penyediaan *buffer* hijau pada lokasi penampungan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Gampong Blang Buloh di Kecamatan Blang Mangat; dan
 - c) Penataan lingkungan disekitar lokasi tempat pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Gampong Blang Buloh di Kecamatan Blang Mangat.
4. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:
- a) Pengembangan dan pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Gampong Alue Lim Kecamatan Blang Mangat;
 - b) Pemindehan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Gampong Blang Buloh Kecamatan Blang Mangat;
 - c) Peningkatan dan pemeliharaan penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Blang Mangat, dan Kecamatan Muara Satu;
 - d) Peningkatan dan pemeliharaan penyediaan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) di Kota Lhokseumawe;
 - e) Peningkatan pengadaan alat angkut sampah (gerobak, *dump truck*, *amroll truck*, *buldozer*) di Kota Lhokseumawe;

- f) Peningkatan sistem penyuluhan kesadaran masyarakat di Kota Lhokseumawe; dan
 - g) Peningkatan pengawasan dan penerapan sanksi pencemaran lingkungan di Kota Lhokseumawe.
5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
- a) Penyediaan jalur evakuasi bencana di Kota Lhokseumawe;
 - b) Pembangunan dan pengembangan tempat evakuasi bencana di Kota Lhokseumawe; dan
 - c) Penyusunan kajian teknis rencana induk kebencanaan di Kota Lhokseumawe.
6. perwujudan sistem drainase, meliputi:
- a) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan di Kota Lhokseumawe;
 - b) Perwujudan Jaringan Drainase Primer, meliputi:
 - 1) Pemeliharaan Jaringan drainase primer di Kota Lhokseumawe;
 - 2) Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan di Kota Lhokseumawe;
 - 3) Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan di Kota Lhokseumawe;
 - 4) Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan di Kota Lhokseumawe;
 - 5) Normalisasi Jaringan drainase primer di Kota Lhokseumawe;
 - 6) Kajian pembangunan kolam retensi air/kolam penampungan air hujan di Kota Lhokseumawe; dan
 - 7) Kajian pembangunan kanal-kanal yang terdapat di seluruh wilayah terutama di jalan arteri primer di Kota Lhokseumawe.
 - c) Perwujudan Jaringan Drainase Sekunder, meliputi:
 - 1) Pemeliharaan jaringan drainase sekunder di Kota Lhokseumawe; dan
 - 2) Peningkatan jaringan drainase sekunder di Kota Lhokseumawe.
 - d) Perwujudan Jaringan Drainase, meliputi:

- 1) Pemeliharaan jaringan drainase Tersier di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Banda Sakti, dan Kecamatan Muara Dua; dan
 - 2) Peningkatan jaringan drainase Tersier di Kota Lhokseumawe.
7. Penyediaan jalur sepeda di Kecamatan Banda Sakti dan Kecamatan Muara Dua;
8. perwujudan jaringan pejalan kaki, meliputi:
- a) Pengembangan jaringan pejalan kaki di jalan arteri primer dan sekunder di Kota Lhokseumawe;
 - b) Pengembangan jaringan pejalan kaki di jalan kolektor primer di Kota Lhokseumawe; dan
 - c) Pengembangan pedestrian ramah disabilitas di Kota Lhokseumawe.

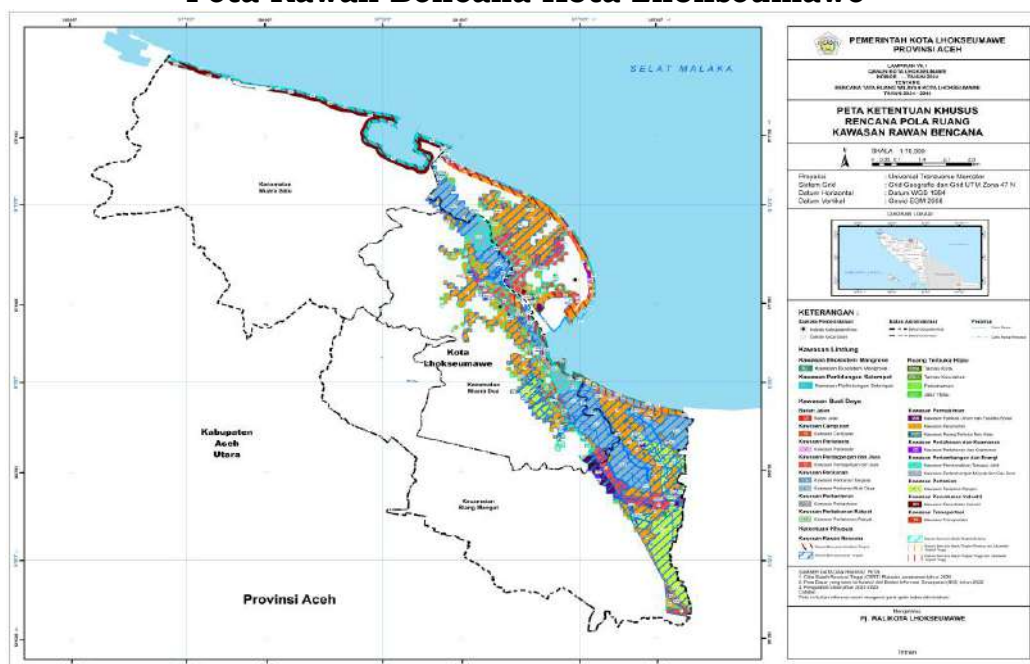
2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kota Lhokseumawe juga merupakan wilayah yang berpotensi terjadinya bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, abrasi dan gelombang pasang. Wilayah rawan bencana Kota Lhokseumawe didominasi pada kawasan lindung dan sebagian kawasan budidaya, sehingga diperlukan pengelolaan intensif terutama yang berada pada

kawasan budidaya. Dengan adanya resiko kerawanan terhadap bencana pada kawasan budidaya ini tidak berarti bahwa pada kawasan tersebut tidak dapat dibangun, akan tetapi pemanfaatannya harus disertai dengan upaya untuk mengantisipasi/mengurangi (mitigasi) dari terjadinya dampak bencana alam.

Selain itu, Kota Lhokseumawe juga merupakan wilayah yang rawan bencana abrasi, gelombang pasang seperti Pantai Ujong Blang, Rancung, dan Meuraksa. Sedangkan wilayah yang rawan akan bencana banjir terdapat di Kecamatan Banda Sakti, meliputi Gampong Jawa, Gampong Jawa Lama, Lancang Garam, dan Tumpok Teungoh. Berikut Peta Rawan Bencana Kota Lhokseumawe:

Gambar 2.6
Peta Rawan Bencana Kota Lhokseumawe

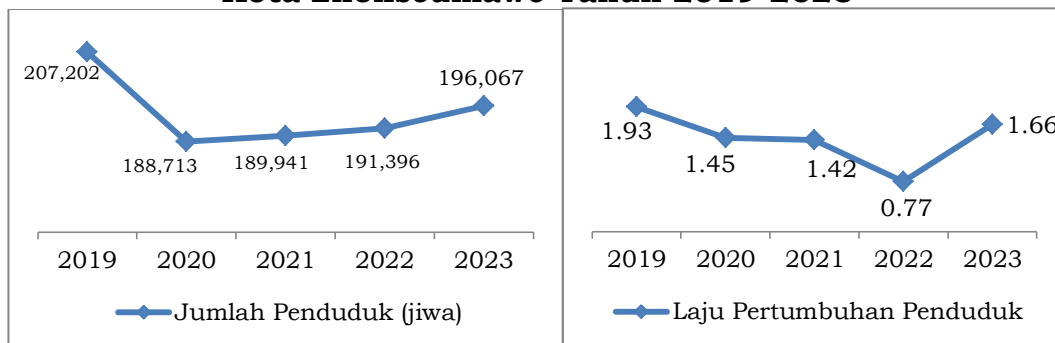


Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2044

2.1.1.4 Demografi

Pada Tahun 2023 penduduk Kota Lhokseumawe mencapai 196.067 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk Kota Lhokseumawe 1.66 persen. Dari Tahun 2019 sampai Tahun 2023 laju pertumbuhan penduduk mengalami fluktuatif. Laju pertumbuhan ini dipengaruhi oleh faktor kematian, kelahiran dan migrasi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.7
Jumlah Penduduk (jiwa) dan Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023



Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka (LDA), BPS 2024.

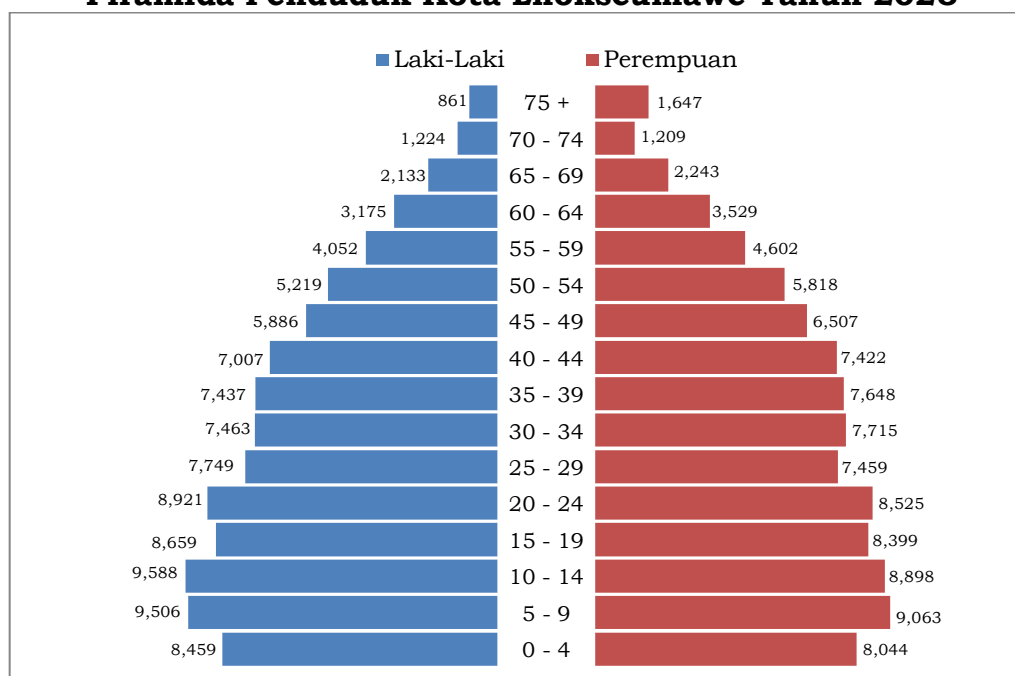
Tabel 2.5
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kota
Lhokseumawe Tahun 2023

| No | Kecamatan | Persentase penduduk | Kepadatan penduduk | Rasio Jenis kelamin |
|----|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | Blang Mangat | 14.36 | 502 | 99.60 |
| 2 | Muara Dua | 27.07 | 918 | 97.92 |
| 3 | Muara Satu | 17.85 | 626 | 99.75 |
| 4 | Banda Sakti | 40.73 | 7.104 | 98.18 |
| | Lhokseumawe | 100 | 1.083 | 98.59 |

Sumber : BPS 2024.

Berdasarkan sebaran umur dan jenis kelamin, gambaran penduduk Kota Lhokseumawe disajikan pada Gambar 2.8, Piramida penduduk tersebut memperlihatkan bahwa terdapat dominasi jumlah penduduk oleh kelompok umur 5-9 tahun dengan jumlah total sebesar 18.569 jiwa. Penduduk pada kelompok umur 5-9 tersebut memiliki komposisi jenis kelamin laki-laki sebesar 9.506 jiwa dan perempuan sebanyak 9.063 jiwa. Sedangkan kelompok umur dengan jumlah paling sedikit adalah kelompok umur 70-74 tahun yaitu sebesar 2.433 jiwa.

Gambar 2.8
Piramida Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2023



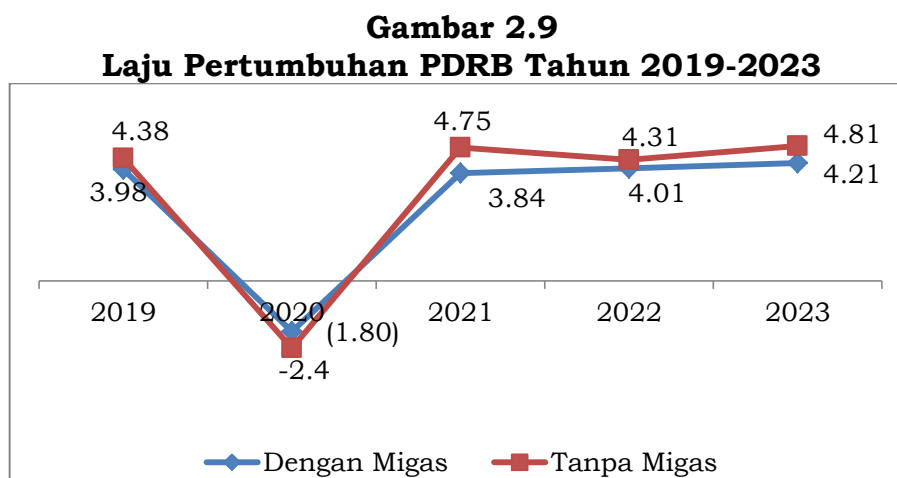
Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka (LDA), BPS 2023

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan Tahun yang bersangkutan terhadap Tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Selama lima Tahun terakhir (2019-2023), pertumbuhan ekonomi Lhokseumawe mengalami peningkatan dari waktu ke waktu terutama tanpa migas, Namun, Pertumbuhan ekonomi ini sama-sama mengalami kontraksi pada Tahun 2020 dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 diperlihatkan oleh gambar berikut:



Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka 2024

Gambar 2.9 menunjukkan bahwa pada Tahun 2020 terjadi kontraksi pertumbuhan (-1.80%) akibat terjadinya pandemi Covid-19. Seiring membaiknya pencegahan Covid-19 maka pada Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi kembali tumbuh positif menjadi sebesar 4.21 persen meningkat 0.2 persen dari tahun 2022.

Perekonomian Kota Lhokseumawe tanpa migas juga mengalami fluktuasi dari tahun 2019-2023, rata-rata relative tumbuh lebih tinggi bila dibandingkan dengan PDRB Migas, kecuali pada Tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar (-2.40 persen). Pada Tahun 2021 perekonomian tanpa migas tumbuh signifikan sebesar 4.75 persen, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 4.31 persen dan tahun 2023 kembali meningkat menjadi 4.81 persen.

Tabel 2.6
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Lapangan Usaha | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 5.66 | 3.85 | -1.65 | -1.60 | 0.96 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 3.37 | 2.53 | 7.1 | 0.33 | 3.79 |
| C | Industri Pengolahan | 2.05 | 1.15 | 0.07 | 2.82 | 1.35 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 6.31 | 2.84 | -0.30 | 2.21 | 6.45 |
| E | Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 18.25 | 3.1 | 2.32 | 9.51 | 6.33 |
| F | Konstruksi | 5.94 | 4.08 | -1.82 | 0.73 | -0.04 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 2.51 | -3.85 | 4.17 | 5.91 | 9.44 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 1.88 | -22.31 | 23.65 | 4.77 | 7.09 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 10.61 | -6.91 | -0.85 | 29.78 | 9.82 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 3.30 | 12.35 | 6.98 | 10.05 | 7.93 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 9.34 | 0.73 | -3.81 | -4.18 | -10.60 |
| L | Real Estat | 6.43 | 2.80 | 3.57 | 3.71 | 4.98 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 5.01 | 0.28 | 0.83 | 10.45 | -0.24 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 4.18 | -0.17 | 5.16 | -0.21 | 4.48 |
| P | Jasa Pendidikan | 7.55 | 3.53 | 1.41 | 2.94 | 4.71 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 7.17 | 3.63 | 9.52 | 10.36 | 0.30 |
| R,S, T,U | Jasa Lainnya | 8.88 | 2.12 | 2.28 | 12.70 | 7.42 |
| PDRB dengan Migas | | 3.98 | -180 | 3.84 | 4.01 | 4.21 |
| PDRB Tanpa Migas | | 4.38 | -2.4 | 4.75 | 4.31 | 4.81 |

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka 2024.

Berdasarkan Tabel 2.6 Perkembangan pertumbuhan PDRB Seri Menurut Lapangan Usaha dengan migas dan non migas

periode 2019-2023 (c to c) yang menggambarkan beberapa lapangan usaha mengalami pertumbuhan kontraksi. Pada Tahun 2019–2023 secara keseluruhan menunjukkan perkembangan dan terjadi kontraksi pertumbuhan pada beberapa lapangan usaha. Pada Tahun 2020 lapangan usaha mengalami kontraksi untuk 3 (tiga) lapangan usaha yaitu lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan serta lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Pada Tahun 2023 terdapat 3 lapangan usaha yang kontraksi yaitu lapangan usaha Kontruksi, lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib.

2.1.2.1.2 Distribusi PDRB

Peran dari masing-masing lapangan usaha dalam pembentukan PDRB Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada Tabel 2.7 dibawah ini.

Tabel 2.7
Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Lapangan Usaha | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 9.37 | 10.10 | 9.79 | 9.38 | 9.18 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.37 |
| C | Industri Pengolahan | 18.78 | 18.86 | 18.97 | 19.45 | 18.12 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| E | Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| F | Konstruksi | 14.68 | 15.51 | 14.49 | 14.17 | 13.31 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 21.91 | 21.31 | 21.37 | 21.28 | 22.93 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 10.42 | 8.19 | 9.58 | 9.96 | 11.35 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 1.98 | 1.89 | 1.79 | 2.20 | 2.30 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 3.14 | 3.53 | 3.53 | 3.57 | 3.61 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 2.98 | 3.04 | 2.89 | 2.73 | 2.28 |
| L | Real Estat | 4.69 | 4.87 | 4.80 | 4.64 | 4.55 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.10 | 1.04 |

| No | Lapangan Usaha | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 4.36 | 4.56 | 4.68 | 4.24 | 4.27 |
| P | Jasa Pendidikan | 1.52 | 1.66 | 1.58 | 1.51 | 1.48 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 3.28 | 3.49 | 3.59 | 3.80 | 3.58 |
| R,S, T,U | Jasa Lainnya | 1.32 | 1.38 | 1.36 | 1.41 | 1.46 |
| PDRB Migas | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| PDRB Tanpa Migas | | 83.35 | 83.31 | 83.66 | 83.36 | 84.67 |

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka 2024.

Pada Tabel 2.7 Kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Lhokseumawe berasal dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Pada Tahun 2019 kontribusi lapangan usaha ini sebesar 21.91%, kemudian Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 21.31%, lalu menurun lagi sampai Tahun 2022 sebesar 21.28%. Namun Tahun 2023 meningkat menjadi 22.93%.

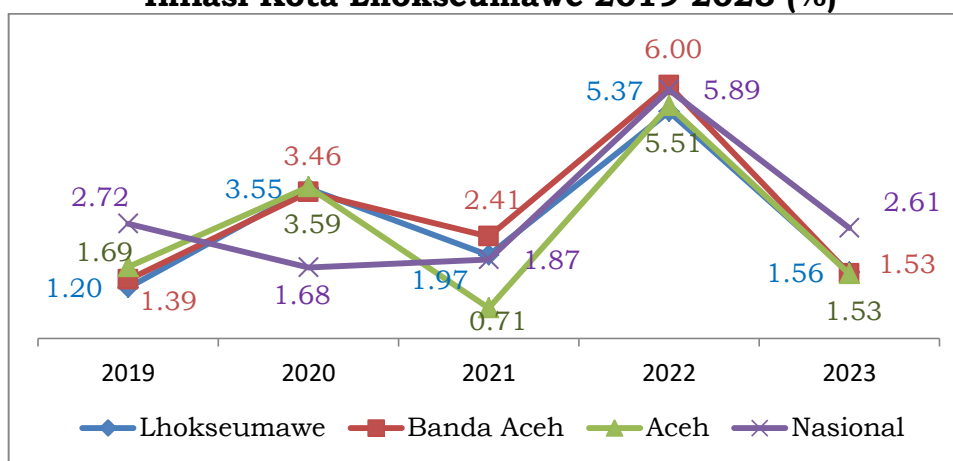
Kemudian kontribusi kedua terbesar yaitu dari lapangan usaha Industri Pengolahan. Pada Tahun 2019 lapangan usaha ini berkontribusi sebesar 18.78%, dan terus mengalami peningkatan sehingga pada Tahun 2022 menjadi sebesar 19.45%, serta mengalami penurunan pada Tahun 2023 menjadi sebesar 18,12%.

2.1.2.1.3 Laju Inflasi

Inflasi yang terjadi di Lhokseumawe terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,34 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 4.20 persen, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,47 persen; Kelompok kesehatan sebesar 1.81, kelompok transportasi sebesar 1,86 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,28 persen, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 8.93 persen, kelompok pendidikan sebesar 0.52 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1.59 dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2.45 persen. Sedangkan

kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga mengalami deflasi sebesar 0.71 persen. Tingkat Inflasi tahun kalender Desember 2023 (Januari-Desember) 2023 untuk Kota Lhokseumawe sebesar 1.56 persen, Kota Meulaboh sebesar 1.42 persen, Kota Banda Aceh sebesar 1.53 persen. Untuk Provinsi Aceh sebesar 1.53 persen dan Nasional sebesar 2.61 persen.

Gambar 2.10
Inflasi Kota Lhokseumawe 2019-2023 (%)



Sumber : BPS, *Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2024*.

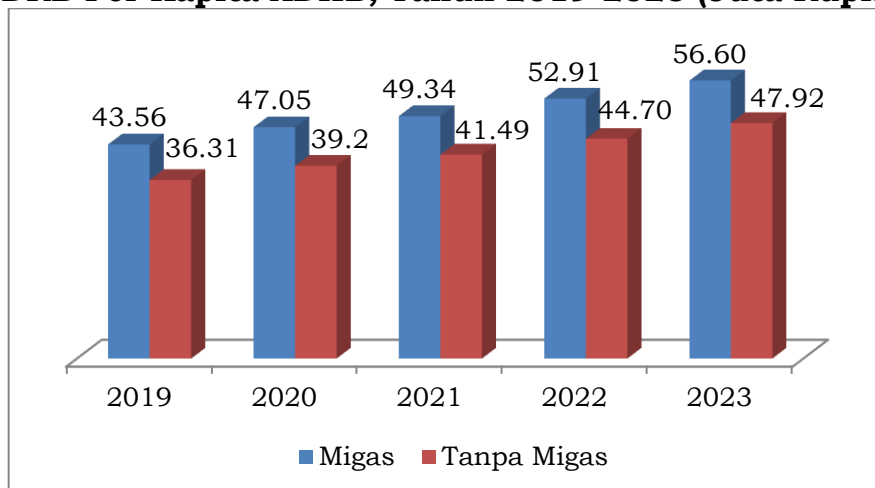
Dari gambar 2.10 diatas dapat dijelaskan bahwa Inflasi di Kota Lhokseumawe sangat fluktuatif dimana inflasi Tahunan menurun drastis dari 5.37 persen di Tahun 2022 menjadi 1.56 persen di Tahun 2023. Kurun waktu 2019-2023 inflasi Kota Lhokseumawe fluktuatif. Inflasi Kota Lhokseumawe tahun 2023 berada di atas Inflasi Aceh yaitu sebesar 1.53 persen dan berada dibawah inflasi nasional sebesar 2.61 persen.

2.1.2.1.4 PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Berdasarkan Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga

Berlaku (ADHB) Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 dalam gambar 2.11 dibawah ini:

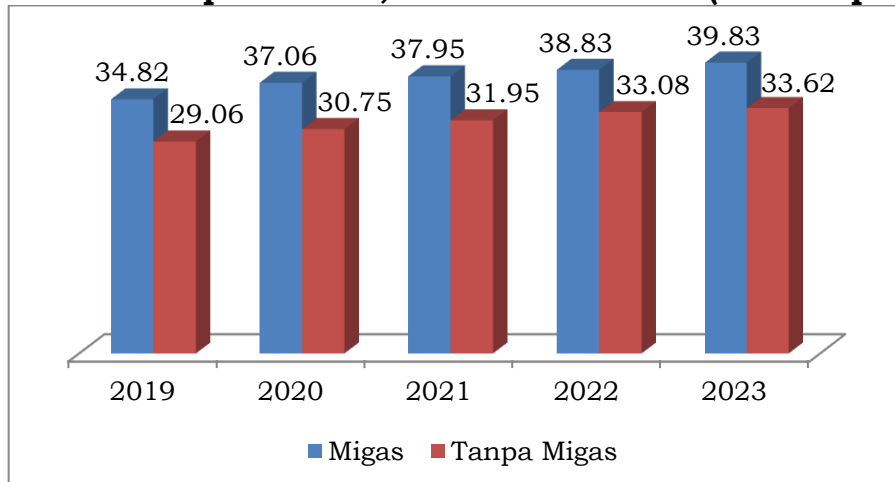
Gambar 2.11
PDRB Per Kapita ADHB, Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)



Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe 2019-2023

Dari gambar 2.11 di atas dapat dijelaskan bahwa selama lima tahun terakhir terlihat bahwa PDRB per kapita Lhokseumawe ADHB terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 PDRB perkapita Lhokseumawe ADHB sebesar 43.56 juta rupiah dan pada tahun 2023 PDRB per kapita Lhokseumawe meningkat menjadi sebesar 56,59 juta rupiah setahun, meningkat sebesar 3.68 juta rupiah dari tahun 2022. Sedangkan PDRB per kapita Lhokseumawe tanpa migas pada tahun 2023 adalah sebesar 47,92 juta rupiah setahun, meningkat sebesar 3,22 juta rupiah dari tahun 2022.

Gambar 2.12
PDRB Per Kapita ADHK, Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)



Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe 2019-2023

Dari gambar 2.12 di atas dapat dijelaskan bahwa selama lima tahun terakhir PDRB per kapita Lhokseumawe Atas Dasar Harga Konstan juga terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 PDRB per kapita Lhokseumawe Atas Dasar Harga Konstan dengan migas adalah sebesar 39,83 juta rupiah pertahun, meningkat sebesar 1,00 juta rupiah dari tahun 2022. Sedangkan PDRB per kapita Lhokseumawe Atas Dasar Harga Konstan tanpa migas pada tahun 2022 adalah sebesar 33,08 juta rupiah setahun, meningkat sebesar 1,12 juta rupiah dari tahun 2021.

2.1.2.1.5 Indeks Rasio Gini

Indeks Gini merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi untuk menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan individu. Rasio Gini mempunyai nilai antara 0-1 dimana nilai 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan tidak sempurna. Rasio Gini lebih kecil dari 0,4 menunjukkan tingkat ketimpangan rendah, nilai 0,4-0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan sedang dan nilai lebih besar dari 0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan tinggi.

Tabel 2.8
Perbandingan Gini Rasio Kota Lhokseumawe dengan Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota Tetangga Tahun 2019-2023

| Kabupaten/Provinsi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kota Lhokseumawe | 0,310 | 0,307 | 0,296 | 0.348 | 0.293 |
| Aceh Utara | 0,312 | 0,261 | 0,283 | 0.275 | 0.294 |
| Kota Langsa | 0,363 | 0,356 | 0,340 | 0.368 | 0.330 |
| Aceh | 0,319 | 0,323 | 0,324 | 0,311 | 0.296 |

Sumber: BPS Aceh, 2024.

Dalam tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai Rasio Gini Kota Lhokseumawe, Aceh Utara, Kota Langsa dan Provinsi Aceh masih dibawah 0,4 yang berarti bahwa tingkat ketimpangan pendapatan dalam masyarakat masih tergolong rendah.

2.1.2.1.6 Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan data Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2023, jumlah penduduk miskin Kota Lhokseumawe mengalami

pergerakan yang dinamis sebagaimana dapat dilihat dalam gambar 2.9 dibawah ini:

Tabel 2.9
Tingkat Kemiskinan Kota Lhoksemawe Tahun 2019-2023

| Indikator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jumlah Penduduk Miskin | 23.050 | 22.690 | 23.380 | 23.030 | 23.100 |
| Persentase Penduduk Miskin | 11.18 | 10.80 | 11.16 | 10.84 | 10.73 |

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka 2024.

Berdasarkan Tabel 2.9 di atas dapat dijelaskan bahwa Tingkat kemiskinan Kota Lhokseumawe selama periode 2019-2023 bergerak secara dinamis, terlihat bahwa pada Tahun 2019 persentase kemiskinan Kota Lhokseumawe sebesar 11.18% dan Tahun 2023 mengalami penurunan menjadi yakni 10.73 % atau 23.100 jiwa, hal ini sangat dipengaruhi oleh berakhirnya pandemi covid 19 yang memperluas aktifitas ekonomi dan pelaku usaha.

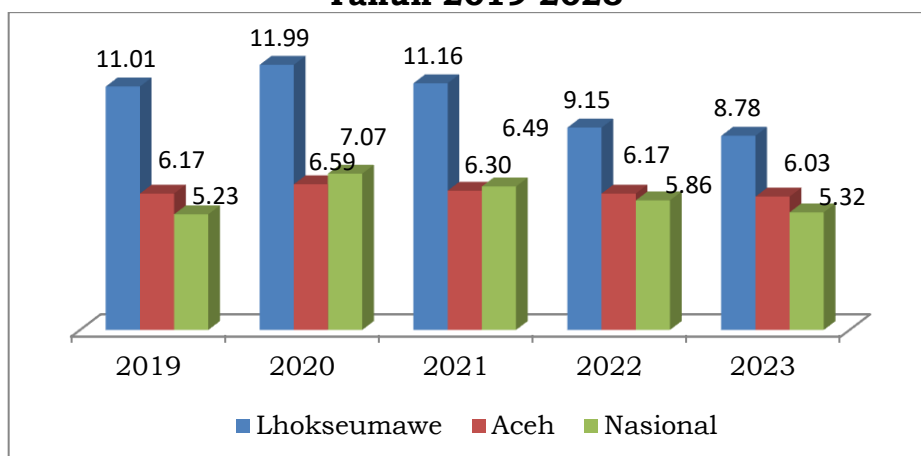
Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe diantaranya dengan memberikan bantuan modal usaha baik di sektor jasa, perdagangan, dan perindustrian, akan tetapi upaya tersebut tidak dapat mengatasi dampak pandemi yang terjadi.

2.1.2.1.7 Pengangguran

A. Tingkat Pengangguran Terbuka

Permasalahan pengangguran umumnya lebih banyak terdapat di daerah perkotaan sebagai efek dari kecinya lapangan pekerjaan yang tercipta pada kurun waktu 2019-2023.

Gambar 2.13
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Lhokseumawe
Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, 2024

Berdasarkan Gambar di atas Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Lhokseumawe Tahun 2019 sebesar 11.01% sedangkan untuk Aceh 6,17% dan Nasional 5,23%, selanjutnya pada Tahun 2023 terjadi penurunan untuk Kota Lhokseumawe menjadi 8.78%, sedangkan untuk Aceh sebesar 6.03 dan nasional sebesar 5.32%. Secara umum Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional kurun waktu 2019-2023 mengalami penurunan, hanya pada tahun 2020 mengalami kenaikan akibat dari pandemi covid 19.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1 Angka Melek Huruf

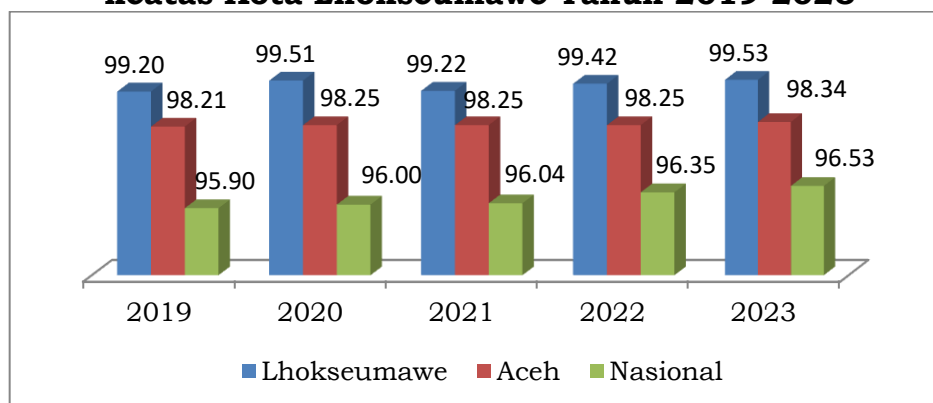
Pengukuran tingkat kualitas pendidikan dapat dilihat dari Angka Melek Huruf (AMH). Pencapaian AMH merupakan angka pendidikan dasar dan program pemberian keahlian melek huruf terhadap penduduk. Selain itu AMH dapat digunakan untuk:

1. mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD.
2. menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media.

- menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis.

Berikut gambar 2.14 menjelaskan Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15 tahun ke atas Tahun 2019-2023:

Gambar 2.14
Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 Tahun keatas Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, 2024

Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Lhokseumawe selama 2019-2023 mengalami peningkatan pada Tahun 2019 angka melek huruf Kota Lhokseumawe sebesar 99,20% dan pada Tahun 2023 meningkat menjadi 99.53% sehingga angka buta aksara tinggal sebesar 0,47% lagi yang diharapkan dapat tuntas pada tahun berikutnya sehingga Kota Lhokseumawe terbebas dari buta aksara. Hal ini menunjukkan bahwasanya perlu ditingkatkan program-program yang dapat menurunkan angka melek huruf sehingga Kota Lhokseumawe terbebas dari buta huruf.

2.1.2.2.2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

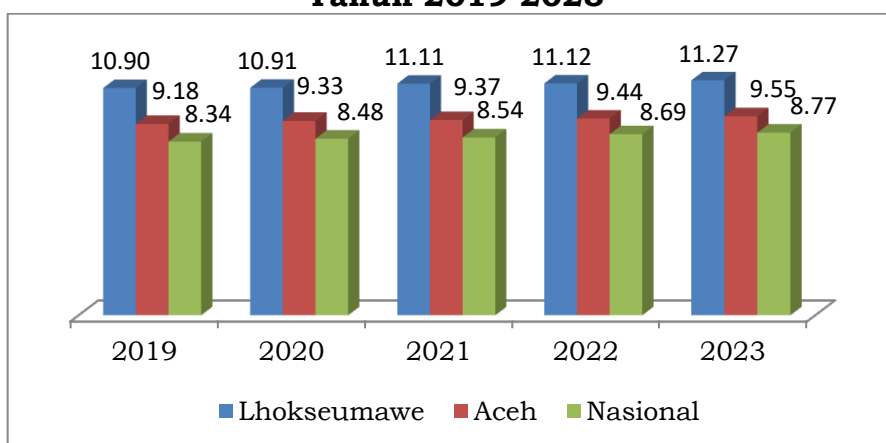
Lamanya sekolah atau *years of schooling* adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT). Pada prinsipnya angka ini merupakan transformasi dari bentuk kategori TPT menjadi bentuk numerik.

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu.

Angka rata-rata lama sekolah penduduk Kota Lhokseumawe pada Tahun 2019 adalah sebesar 10,90 tahun. Hal ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,37 pada Tahun 2023 sehingga menjadi sebesar 11,27 tahun. Rata-rata lama sekolah Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada Gambar 2.15 berikut ini:

Gambar 2.15
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Lhokseumawe
Tahun 2019-2023



Sumber : BPS, 2024.

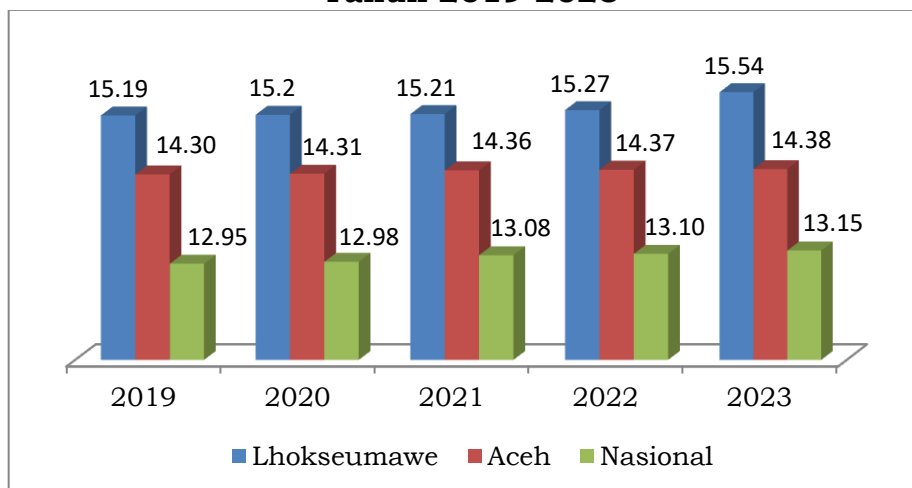
Dari Gambar 2.15 dapat dilihat bahwa sampai dengan Tahun 2023 Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Lhokseumawe masih berada di atas Rata-Rata Lama Sekolah tingkat provinsi Aceh, dimana di Kota Lhokseumawe tercatat 11,27 tahun sedangkan provinsi Aceh sebesar 9,55 tahun dan Nasional sebesar 8,77 tahun.

2.1.2.2.3 Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Angka Harapan Lama Sekolah Kota Lhokseumawe meningkat dari Tahun ke Tahun. Rata-rata angka harapan lama sekolah sudah berada di

atas rata-rata Aceh dan nasional. Berikut angka harapan lama sekolah Kota Lhokseumawe dalam gambar 2.16 berikut ini:

Gambar 2.16
Angka Harapan Lama Sekolah Kota Lhokseumawe
Tahun 2019-2023



Sumber : BPS, 2024.

Gambar 2.16 di atas menggambarkan bahwa Angka Harapan Lama Sekolah Kota Lhokseumawe pada Tahun 2019 sebesar 15,19 tahun meningkat menjadi 15,54 tahun pada akhir Tahun 2023. Angka ini juga menunjukkan bahwa bahwa Angka Harapan Lama Sekolah Kota Lhokseumawe masih di atas angka provinsi yang hanya mencapai 14,38 tahun pada Tahun 2023 dan 13,15 tahun pada Tahun 2023.

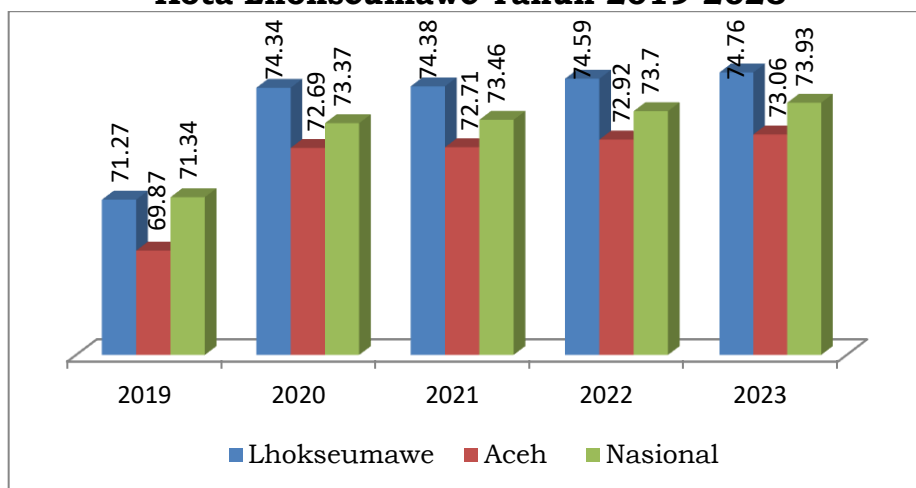
2.1.2.2.4 Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator dalam mengukur indeks pembangunan manusia (IPM). Selain AKB dan AKI, UHH juga digunakan untuk menilai derajat kualitas hidup masyarakat baik kabupaten/kota, propinsi maupun negara. Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya juga dapat dilihat dari peningkatan UHH penduduk dari satu negara.

Upaya untuk meningkatkan UHH menjadi 71 Tahun merupakan hal penting yang perlu dicermati melalui upaya-upaya peningkatan kegiatan yang berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat seperti penurunan resiko kesakitan pada keluarga rentan, trend penyakit degeneratif dan tidak menular, serta

peningkatan kesehatan kelompok usia lanjut yang dapat hidup produktif dan mandiri. Berikut gambar angka usia harapan hidup Kota Lhokseumawe Tahun 2019 s.d 2023

Gambar 2.17
Angka Usia Harapan Hidup
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023



Sumber : BPS, 2024.

Jika dilihat dari Gambar 2.17 rata-rata Angka Usia Harapan Hidup Kota Lhokseumawe dari Tahun 2019 s.d 2023 terjadi peningkatan setiap tahunnya. Angka Usia Harapan Hidup Kota Lhokseumawe pada Tahun 2019 sebesar 71,27 lebih baik dari Aceh sebesar 69,87 dan Nasional sebesar 71.34. Dan pada Tahun 2023 Angka Usia Harapan Hidup Kota Lhokseumawe sebesar 74,76 lebih baik dari Aceh sebesar 73.06 dan Nasional sebesar 73.93.

2.1.2.2.5 Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian ibu di Kota Lhokseumawe mengalami kenaikan dan penurunan. Pada Tahun 2019 Angka kematian Ibu 47.44 pada tahun 2020 meningkat mencapai 161.29 sedangkan di tahun 2021 terus meningkat mencapai 294.9 serta pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 77.88 namun pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 226.4. Untuk mengatasi peningkatan jumlah kematian ibu adalah meningkatkan pertolongan pasca persalinan oleh tenaga kesehatan professional di fasilitas kesehatan, serta meningkatkan penggunaan

kontrasepsi pasca persalinan dan penanganan komplikasi maternal.

Tabel 2.10
Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

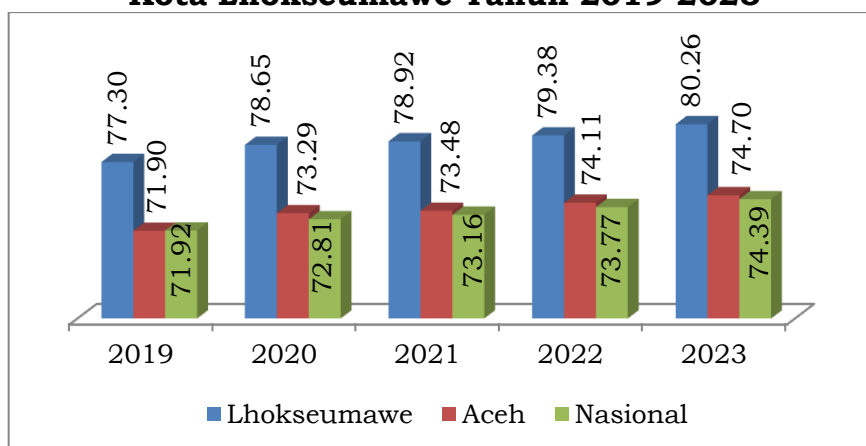
| Tahun | Kecamatan | Jumlah kematian Ibu Hamil | Jumlah kelahiran hidup per Tahun | AKI |
|--------------|------------------|----------------------------------|---|------------|
| 2019 | Banda Sakti | 1 | 1958 | 47.44 |
| | Muara Dua | 1 | 1144 | |
| | Muara Satu | 0 | 624 | |
| | Blang Mangat | 0 | 489 | |
| 2020 | Banda Sakti | 3 | 1945 | 161.29 |
| | Muara Dua | 2 | 1135 | |
| | Muara Satu | 1 | 792 | |
| | Blang Mangat | 1 | 468 | |
| 2021 | Banda Sakti | 4 | 1741 | 294.9 |
| | Muara Dua | 6 | 689 | |
| | Muara Satu | 1 | 841 | |
| | Blang Mangat | 1 | 257 | |
| 2022 | Banda Sakti | 1 | 1786 | 77.88 |
| | Muara Dua | 1 | 916 | |
| | Muara Satu | 0 | 669 | |
| | Blang Mangat | 1 | 481 | |
| 2023 | Banda Sakti | 3 | 1766 | 226.4 |
| | Muara Dua | 2 | 740 | |
| | Muara Satu | 1 | 591 | |
| | Blang Mangat | 2 | 436 | |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2024.

2.1.2.2.6 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) (IPM/HDI) adalah satuan untuk mengukur kesuksesan pembangunan suatu wilayah. IPM/HDI adalah angka yang diolah berdasarkan tiga dimensi: yaitu panjang usia (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup (*standard of living*) suatu wilayah. IPM yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Sebaliknya, IPM yang rendah menunjukkan ketidakberhasilan pembangunan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi suatu negara. Berikut gambar 2.18 perihal perkembangan IPM Kota Lhokseumawe antara Tahun 2019-2023:

Gambar 2.18
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023



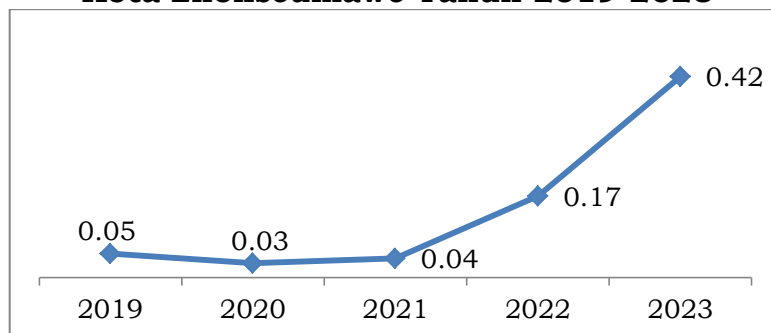
Sumber : BPS, 2023.

Jika dilihat dari nilainya, Provinsi Aceh memperoleh nilai IPM sebesar 74,70 pada Tahun 2023, sedangkan untuk IPM Kota Kota Lhokseumawe Pada Tahun 2023 adalah sebesar 80.26 dan nasional sebesar 74.39. IPM Kota Lhokseumawe lebih baik dari Aceh dan Nasional.

2.1.2.2.7 Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk adalah suatu kondisi yang ditandai dengan berat badan dan tinggi badan balita jauh di bawah rata-rata. Maka itu, untuk mengetahui status gizi yang satu ini, indikator yang digunakan adalah grafik berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Selain berat dan tinggi badan, lingkaran lengan atas (LILA) juga masuk ke dalam pemeriksaan klinis gizi buruk pada balita. Kondisi gizi buruk pada balita tidak terjadi secara instan atau singkat. Artinya, balita yang masuk ke dalam kategori gizi buruk sudah mengalami kekurangan berbagai zat gizi dalam jangka waktu yang sangat lama. Gagalnya anak untuk mencapai aspek akademis dan sosial akibat gizi buruk tentu saja memiliki dampak negatif yang berkelanjutan sepanjang hidupnya apabila tidak segera disembuhkan. Berikut gambar Persentase Balita Gizi Buruk Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 :

Gambar 2.19
Persentase Balita Gizi Buruk
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2024

Dari gambar 2.19 di atas dapat di lihat persentase balita gizi buruk Kota Lhokseumawe dari Tahun 2019 s.d 2023 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2019 persentase balita gizi buruk 0.05% dan 2020 persentase balita gizi buruk Kota Lhokseumawe menurun menjadi sebesar 0.03%, selanjutnya di Tahun 2020-2023 persentase balita gizi buruk Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan menjadi 0.42% pada tahun 2023.

2.1.2.2.8 Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Berdasarkan laporan harian Covid-19 Kota Lhokseumawe tanggal 20 Januari 2022 yaitu :

1. total suspek : 1.690 orang
2. suspek dalam pemantauan : 0 orang
3. suspek selesai pemantauan : 1.690 orang
4. jumlah proable meninggal hari ini : 0 orang
5. jumlah kasus konfirmasi positif : 1.694 orang
6. kasus konfirmasi positif dirawat di RS : 2 orang
7. kasus konfirmasi positif isolasi mandiri : orang
8. kasus konfirmasi positif selesai isolasi : 1612 orang
9. kasus konfirmasi positif meninggal : 80 orang

Capaian vaksinasi Covid-19 di Kota Lhokseumawe, Jum'at 21 Januari 2022 pukul 07:08 WIB tercatat bagi Tenaga Kesehatan (Nakes) yang sudah melakukan vaksinasi dosis pertama telah

mencapai 3.069 orang, atau 111,3 % dari target awal yang jumlahnya sekitar 2.757 orang. Lalu Nakes yang sudah melaksanakan vaksinasi dosis II sebanyak 2.812 orang atau 102,0 %. Sedangkan Nakes yang sudah mendapat dosis III sebanyak 1.872 orang atau 67,9%.

Sementara itu, vaksinasi dosis I bagi kelompok lanjut usia (Lansia) mencapai 7.197 orang, atau sekitar 66,02% dari target sebanyak 10.901. Lansia yang telah tuntas melakukan suntikan dosis II sebanyak 1.930 orang atau sekitar 17,7%. Pada kelompok Pelayanan Publik target vaksinasinya yaitu 18.397 orang. Pelayanan Publik yang sudah melakukan vaksinasi dosis I sebanyak 22.852 orang, atau setara 124,2%. Untuk Pelayanan Publik yang sudah melakukan vaksinasi dosis II sebanyak 17.632 Orang, atau 95,8%.

Kemudian Target vaksinasi pada kelompok Masyarakat umum berjumlah 91.336 orang. Sebanyak 79,183 orang telah melakukan vaksinasi dosis I, atau sekitar 86,69%. Sedangkan 24.149 orang, atau sekitar 26,4% telah mendapatkan dosis II sesuai waktu yang ditetapkan, dan sebanyak 27 orang atau 0,11% telah mendapatkan vaksin dosis ke III. Selanjutnya, sebanyak 17.746 orang remaja telah melakukan vaksinasi dosis I atau sekitar 83,73% dari target sasaran 21.194 orang. Sedangkan suntikan dosis II telah diberikan kepada 7.312 remaja, atau setara dengan 34,5 %, serta kelompok Anak yang sudah melakukan vaksinasi dosis I sebanyak 3.760 orang atau 18,13%, dan Kelompok Anak yang sudah melakukan vaksinasi dosis II sebanyak 13 orang atau 0,1.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya

A. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Festival seni di setiap daerah merupakan perayaan tahunan yang menjadi wadah untuk mempertunjukkan keunikan budaya dari berbagai daerah. Festival ini biasanya berlangsung selama

beberapa hari yang dimeriahkan dengan musik, tarian, hingga ritual dalam paradennya.

Kota Lhokseumawe memiliki berbagai jenis kesenian yang mengandung nilai-nilai islami, bersifat demokratis yang mencerminkan kehidupan masyarakat sehari-hari, misalnya jenis tarian dilakukan secara berkelompok sebagai simbol dari keanekaragaman masyarakat Aceh, dinamis iringannya yang disertai lagu dan pantun yang mengandung nasehat yang baik bagi kehidupan masyarakat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini,

Tabel 2.11
Penyelenggara Festival Seni Budaya Kota Lhokseumawe
Tahun 2023

| No | Kegiatan |
|----|---|
| 1 | Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) |
| 2 | Anugerah Budaya |
| 3 | Audisi Paduan Suara Gita Bahana Nusantara |
| 4 | Festival dan Lomba Karya Seni |
| 5 | Festival Permainan Rakyat |
| 6 | Hari Kesenian Daerah |
| 7 | Festival Rapai Uroeh |
| 8 | Festival Teluk Samawi |
| 9 | Pelatihan Pengembangan Kesenian |
| 10 | Temu Tokoh Seudati se-Aceh |
| 11 | Aceh culinary Festival |
| 12 | Parade Seudati |
| 13 | Tunang Seudati |
| 14 | Festival Lomba Mewarnai Antar Sekolah |
| 15 | Ahad Festival |
| 16 | Festival Lomba Mural |
| 17 | Festival Lomba Peuyon Aneuk |
| 18 | Pengiriman Tim Kesenian ke Luar Daerah |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024.

Dari Tabel 2.11 di atas dapat tergambar bahwa dalam wilayah Kota Lhokseumawe pada Tahun 2023 terdapat 18 jenis kegiatan seni budaya tarian Aceh dalam penyelenggaraan festival seni budaya yang dilaksanakan.

B. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya, bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya. Dengan adanya perubahan paradigma pelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.12 berikut ini:

Tabel 2.12
Situs/Bangunan Cagar Budaya Kota Lhokseumawe

| No. | Lokasi (Kecamatan) / Nama Situs | | | |
|-----|--|--|---|------------------------|
| | Banda Sakti | Muara Satu | Blang Mangat | Muara Dua |
| 1 | Makam Tgk. Chik Ditunong dan Tgk. Dibuah | Makam Putroe Neng | Makam Prajurit Tgk. Abd. Jalil Cot Plieng | Tugu Perlawanan TKR |
| 2 | Makam Tgk. Di Lhokseumawe | Makam Tgk. Syiah Hudam | Makam Mualem Taufiq Shaleh | Rumah Adat Ulee Balang |
| 3 | Makam Tgk. Maharaja Abdul Hamid dan Meriam Belanda | Makam Tgk. Chik Dipaloh | Makam Tgk. Batee Meutarah | - |
| 4. | Makam Tgk. Sayed Muhammad Nadir | Makam Tgk. Jrat Meuindram | Tugu Tgk. Abdul Jalil Cot Plieng | - |
| 5. | Makam Tgk. Ulei Utan | Makam Tgk. Chik Buket Bruek Kreung | - | - |
| 6. | Makam Tgk. Syaikh Al Kalaliy | Gua Jepang | - | - |
| 7. | Tugu Pahlawan TNI | Gua Tgk. Ibrahim Tapa dan Cot Bu Kulah | - | - |
| 8. | Rumoh Aceh Kota Lhokseumawe | - | - | - |
| 9. | Kurok-Kurok | - | - | - |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Dari tabel 2.12 di atas menggambarkan bahwa Kota Lhokseumawe memiliki 22 (dua puluh dua) unit situs/bangunan cagar budaya diantaranya situs makam sebanyak 9 (sembilan) makam yang terdapat di 3 (tiga) Kecamatan, situs tugu sebanyak 2 (dua) tugu di Kecamatan Banda Sakti dan Kecamatan Blang Mangat, situ benteng dan goa sebanyak 7 (tujuh) unit yang

terdapat di 2 (dua) Kecamatan dan tempat bersejarah sebanyak 4 (empat) yang terdapat di Kecamatan Muara Satu.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Keistimewaan Aceh dan Kekhususan

2.1.3.1.1 Penyelenggaraan Kehidupan Beragama

A. Syariat Islam

Indeks pembangunan Syariat Islam diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Tujuan dilaksanakan Survey Indeks Pembangunan Syariah adalah untuk mengukur persepsi masyarakat mengenai syariat islam dan mengukur sejauh mana penerapan dan pelaksanaannya agar tercapai maqasid syariah (kriteria dan indikator Indeks Pembangunan Syariah).

Tabel 2.13
Tipe Dayah, Kepemilikan, dan Jumlah Guru Dayah
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| Tipe | Kepemilikan | Tahun | | | | |
|---------------------------------|-------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A+ | Yayasan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Pribadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Yayasan | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| | Pribadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | Yayasan | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 |
| | Pribadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Yayasan | 23 | 23 | 8 | 29 | 27 |
| | Pribadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Yayasan | 12 | 12 | 4 | 12 | 13 |
| | Pribadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Type | | 43 | 43 | 18 | 55 | 56 |
| Non Type | | 22 | 27 | 54 | 20 | 14 |
| Jumlah Dayah Keseluruhan | | 65 | 70 | 72 | 75 | 70 |
| Jumlah Guru Dayah | | 550 | 559 | 567 | 1187 | 354 |

Sumber: Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah, 2024.

Tabel 2.13 di atas menggambarkan kondisi jumlah dayah dan guru dayah di Kota Lhokseumawe sejak Tahun 2019-2023. Dayah di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2019 berjumlah 65 dan

keseluruhan dayah tersebut berstatus dayah ber type sebanyak 43 dayah dan Non Type sebanyak 22 dayah, dengan jumlah guru berjumlah 550 orang. Tim akreditasi dayah terbentuk pada tahun 2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor. 451.44/770/2019 tentang Penetapan Type Dayah di Aceh. Pada Tahun 2020 tim akreditasi dayah tidak melaksanakan monitoring dikarenakan Pandemi Covid 19, maka jumlah type sama dalam kurun waktu 2 tahun tersebut dan Pada Tahun 2021 dan 2022 tim akreditasi dayah Aceh melakukan monitoring menentukan type dayah sesuai dengan kriteria dayah, jumlah tersebut menunjukkan peningkatan hingga Tahun 2022, jumlah dayah di Kota Lhokseumawe berjumlah 75 dayah, dengan type A+ sebanyak 1 dayah, Type A sebanyak 6 dayah, Type B 8 dayah, dan Type C sebanyak 29 dayah, dan dayah Type D 12 dayah dengan jumlah guru sebanyak 1187 orang. Keseluruhan dayah tersebut semuanya berada di bawah kepemilikan yayasan. Sementara jumlah dayah bertambah dikarenakan munculnya dayah baru dari balai pengajian naik status/grade ke dayah. Pada Tahun 2023 jumlah dayah type B dan D bertambah yang berjumlah 55 dayah menjadi 56 dayah.

Tabel 2.14
Jumlah Hafiz Hafizah yang dibina
Tahun 2019-2023

| NO | Uraian | Tahun | | | | |
|-----------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Hafizh hafizah | 15 | 10 | 13 | 10 | 10 |
| Jumlah Hafiz Hafizah | | 15 | 10 | 13 | 10 | 10 |

Sumber: Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah, 2024.

Dari Tabel 2.14 diatas dapat dilihat jumlah hafiz hafizah Kota Lhokseumawe yang mendapat pembinaan Tahun 2019 sebanyak 15 orang, Tahun 2020 sebanyak 10 orang dan Tahun 2021 sebanyak 13 orang. Dari Tahun 2019 sampai tahun 2022 mengalami pengurangan di karenakan hafiz tersebut ada yang pindah gampong, kelembaga lain, dan juga usianya sudah tidak sesuai lagi untuk di pembinaan/lembaga tersebut, yang di bina di lembaga hafiz untuk tingkatan SMP dan SMA dan tahun 2023

jumlah hafiz hafizah tetap sebanyak 10 orang. Salah satu kegiatan yang ada di Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah adalah Pembinaan Hafiz Hafizh yang di bina oleh lembaga pendidikan dan pengembangan Tilawatil Quran (PPTQ). Dengan tujuan untuk mengkader calon peserta MTQ untuk tingkat Kota Lhokseumawe maupun MTQ tingkat Provinsi.

Adapun Jumlah Zakat, Infak, Sadaqah yang disalurkan dan Jumlah Zakat, Infak, Sadaqah (ZIS) yang terkumpul di Kota Lhokseumawe dari periode Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.15.

Tabel 2.15
Rasio ZIS yang Disalurkan dan ZIS yang Terkumpul
Tahun 2019-2023

| Uraian | Tahun | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Jumlah ZIS yang tersalurkan | 8,929,010,000 | 6,611,208,400 | 6,815,193,600 | 8,449,648,975 | 6,528,600,000 |
| Jumlah ZIS yang Terkumpul | 7,644,838,340 | 7,645,219,592 | 6,862,029,359 | 7,012,469,033 | 6,726,500,196 |
| Rasio | 1.17 | 0.86 | 0.99 | 1.20 | 0.97 |

Sumber: Baitul Mal Kota Lhokseumawe, 2024

Dari tabel 2.15 di atas dapat dilihat bahwa Jumlah ZIS yang disalurkan secara rata-rata mengalami peningkatan, serta ZIS yang terkumpul juga mengalami kenaikan. Pada tahun 2022 jumlah ZIS mencapai rasio 1,20 yang berarti jumlah ZIS yang disalurkan melebihi jumlah yang terkumpul. Hal ini terjadi karena penyaluran ZIS Tahun 2018, 2020 dan 2021 lebih kecil penyalurannya dari ZIS yang terkumpul, menyebabkan terdapat sisa-sisa ZIS yang tidak habis dibagikan sehingga pada Tahun 2022 ZIS yang disalurkan lebih besar daripada ZIS yang terkumpul yaitu sebesar Rp.1.437.179.942,-. Pada tahun 2023 ZIS yang tersalurkan dan terkumpul mengalami penurunan. Jumlah ZIS tersalurkan pada tahun 2023 sebesar 6.528.600.000,- dari 6.726.500.196,- ZIS yang terkumpulkan.

B. Pelaksanaan Ibadah

Kondisi mesjid dalam Wilayah Kota Lhokseumawe yang melaksanakan sholat 5 waktu dan mesjid yang ada imam hafiz dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.16
Jumlah Mesjid yang melaksanakan Sholat 5 Waktu dan Jumlah Mesjid yang ada Imam Hafiz Tahun 2019-2023

| Tahun | Jumlah Mesjid yang ada imam hafiz | Jumlah Mesjid yang melaksanakan Sholat 5 Waktu | Jumlah Mesjid Se-Kota Lhokseumawe |
|-------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| 2019 | 2 | 51 | 51 |
| 2020 | 3 | 51 | 51 |
| 2021 | 3 | 52 | 52 |
| 2022 | 3 | 52 | 52 |
| 2023 | 3 | 52 | 52 |

Sumber : Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe, 2024

Berdasarkan tabel di atas jumlah mesjid yang melaksanakan sholat fardhu 5 (lima) waktu di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2019 sebanyak 51 mesjid, pada Tahun 2021 terjadi 1 penambahan mesjid yaitu mesjid Teuku Muda Kuala di Gampong Blang Panyang kecamatan Muara Satu dan pada Tahun 2023 jumlah mesjid di Kota Lhokseumawe masih berjumlah 52 mesjid.

Tabel 2.17
Data Mesjid Kota Lhokseumawe Tahun 2023

| No | Kecamatan | Mesjid Agung | Mesjid Jamik | Mesjid Kecamatan | Mesjid Gampong | Total |
|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|----------------|-------|
| 1. | Banda Sakti | 1 | 1 | 1 | 14 | 17 |
| 2. | Muara Dua | - | 2 | 1 | 7 | 10 |
| 3. | Muara Satu | - | 1 | 1 | 7 | 9 |
| 4. | Blang Mangat | - | 2 | 1 | 13 | 16 |
| Kota Lhokseumawe | | | | | | 52 |

Sumber : Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe, 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah mesjid di Kota Lhokseumawe Pada Tahun 2023 terbanyak di Kecamatan Banda Sakti yaitu 17 mesjid, sedangkan yang paling sedikit berada di Kecamatan Muara satu yaitu 9 mesjid. Jumlah Masjid di Kota Lhokseumawe berjumlah 52 semuanya aktif dalam melaksanakan shalat 5 waktu, namun demikian jamaah yang banyak terdapat pada masjid yang berada di Pinggir Jalan Raya

Medan Banda Aceh yaitu Masjid besar Al-Ikhlas batuphat, Masjid Al- Munawwarah Blang Pulo, Masjid Jamik Taqwa Paloh, Masjid Teuku Muda Kuala Blang Panyang, Masjid Jami' Babul Huda Panggoi, Masjid Meunasah Masjid, Masjid Al-Hikmah Cunda, Masjid Raudhatul Jannah Alue Awe, Masjid asyura Kandang, Masjid Jami' At Tahrir Ubudiyah Punteut. Selain masjid tersebut juga melaksanakan shalat 5 waktu. Selain Shalat 5 waktu juga mengadakan pengajian rutin untuk masyarakat, dan terdapat juga di sebagian Masjid lembaga pendidikan seperti TPA.

2.1.3.1.2 Majelis Ulama

Kondisi Pelayanan umum urusan Keistimewaan dan Kekhususan bidang Majelis Ulama dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain Pendidikan Kader Ulama, Musyawarah Ulama dan Sosialisasi Fatwa.

A. Pendidikan Kader Ulama (PKU)

Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe telah menyelenggarakan Pendidikan Kader Ulama (PKU) setiap tahun, dimana pada Tahun 2019 peserta yang mengikuti Pendidikan Kader Ulama (PKU) sebanyak 30 orang, peserta yang ikut berpartisipasi dalam PKU semuanya laki-laki. Pada Tahun 2023 Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe juga menyelenggarakan Pendidikan Kader Ulama (PKU), jumlah peserta yang ikut dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sebanyak 20 orang laki-laki. Pendidikan Kader Ulama (PKU) sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.18.

Tabel 2.18
Jumlah Peserta PKU Kota Lhokseumawe
Tahun 2019-2023

| No | Tahun | Jumlah Peserta | | Keterangan |
|----|-------|----------------|------------|------------|
| | | Lk | Pr | |
| 1 | 2019 | 30 (orang) | - | |
| 2 | 2020 | 20 (orang) | - | |
| 3 | 2021 | 20 (orang) | 20 (orang) | |
| 4 | 2022 | 20 (orang) | 20 (orang) | |
| 5 | 2023 | 20 (orang) | | |

Sumber : Sekretariat MPU 2024

B. Musyawarah Ulama

Islam memandang musyawarah sebagai salah satu hal yang amat penting bagi kehidupan insani, bukan saja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melainkan dalam kehidupan berumah tangga dan lain-lainnya. Ini terbukti dari perhatian Al-Qur'an dan Hadist yang memerintahkan atau menganjurkan umat pemeluknya supaya bermusyawarah dalam memecah berbagai persoalan yang mereka hadapi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.19 di bawah ini:

Tabel 2.19
Kegiatan Musyawarah Ulama
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Kegiatan | Tahun | | | | | Total |
|----|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | Sidang Paripurna Ulama | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 180 |
| 2 | Rapat koordinasi MPU | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | Nadwah/Mubahasah Ilmiah/Simposium | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Muzakarah masalah Keagamaan | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Pengkajian Aliran Sempalan | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 6 | Rapat Pimpinan MPU | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 7 | Eksistensi Peran Ulama | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | Jumlah | 50 | 48 | 49 | 40 | 39 | 226 |

Sumber : Sekretariat MPU, 2024.

Tabel di atas menunjukkan bahwa sejak Tahun 2019-2023 kegiatan musyawarah ulama di Kota Lhokseumawe telah dilakukan sebanyak 226 kali, dimana pada Tahun 2019 sebanyak 50 kali, Tahun 2020 sebanyak 48 kali, Tahun 2021 sebanyak 49 kali dan pada Tahun 2022 sebanyak 40 kali serta Tahun 2023 berkurang menjadi 39 kali. Kegiatan musyawarah tersebut meliputi Sidang Paripurna Ulama dilakukan sebanyak 180 kali, Rapat Koordinasi MPU sebanyak 10 kali, Nadwah/Muhasah Ilmiah sebanyak 3 kali, Muzakarah Masalah Keagamaan sebanyak 4 kali, dan Rapat Pimpinan MPU sebanyak 25 kali.

C. Sosialisasi Fatwa/Himbauan/Taushiah

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Lhokseumawe hingga saat ini telah melakukan kegiatan sosialisasi fatwa, Himbuan, Taushiah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan

Syariat Islam hasil dari MPU Aceh sebanyak 8 Fatwa/himbauan/Taushiah Tahun 2018, 7 Fatwa/himbauan/Taushiah pada Tahun 2019, 13 Fatwa/himbauan/Taushiah pada Tahun 2020 dan 12 Fatwa/himbauan/Taushiah pada Tahun 2021, 2 Fatwa/himbauan/Tausiah pada Tahun 2022.

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib

2.1.3.2.1 Layanan Urusan Wajib Dasar

2.1.3.2.1.1 Pendidikan

A. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Partisipasi sekolah dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah jumlah penduduk yang pada tahun pengamatan dari berbagai usia sedang sekolah pada jenjang pendidikan SD dan SMP per jumlah penduduk yang pada tahun pengamatan berada pada kelompok usia yaitu kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan SD dan SMP. Berikut tabel Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023.

Tabel 2.20
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Jenjang Pendidikan | Tahun | | | | |
|------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | SD/MI | | | | | |
| 1.3 | APK SD/MI | 103,49 | 101.74 | 99.77 | 107,71 | 107.05 |
| 2 | SMP/MS | | | | | |
| 2.3 | APK SMP/MS | 110.68 | 104.24 | 100.66 | 97,44 | 102.26 |
| 3 | SMA/MA/SMK | | | | | |
| 3.3 | APK SMA/MA/SMK | 95,22 | 95.79 | 92.97 | 87,25 | 97.16 |

Sumber : <http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/>, LDA 2024

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa angka partisipasi kasar pada tingkat SD/ MI tertinggi pada Tahun 2022 sebesar 107,71. Sedangkan terendah pada Tahun 2021 sebesar 99.77 artinya dari tabel diatas seluruh penduduk kelompok usia sekolah dasar telah memperoleh pendidikan sekolah dasar. Begitu juga terjadi pada tingkat SMP/MS seluruh penduduk Kota

Lhokseumawe usia Sekolah Menengah Pertama telah memperoleh pendidikan tertinggi terlihat pada Tahun 2019, yaitu angka partisipasi kasar sebesar 110,88 dan terendah pada Tahun 2022 sebesar 97,44. Untuk Tingkat Sekolah Menengah Atas, Angka Partisipasi Kasar SMA/ SMK/ MA tertinggi terjadi pada Tahun 2023 sebesar 97.16 dan terendah sebesar 87,25 yang terjadi pada Tahun 2022.

B. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan proporsi anak sekolah pada suatu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Realisasi kinerja indikatornya antara lain angka partisipasi murni SD/MI dan SMP/MTs adalah jumlah siswa usia 7-12 Tahun dijenjang SD/MI dan SMP/MTs usia 13-15 Tahun per jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun SD/MI dan usia 13-15 Tahun SMP/MTs.

Bila APM kurang dari APK berarti terdapat murid SD diluar usia 7-12 Tahun (*underage*) atau di atas umur (*overage*). Dari tabel 2.21 menunjukkan bahwa APM lebih kecil dari APK, berarti masih ada penduduk yang sekolah di luar usia sekolah yang bersesuaian. Berikut Tabel Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023.

Tabel 2.21
Angka Partisipasi Murni (APM)
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Jenjang Pendidikan | Tahun | | | | |
|-----|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | SD/MI | | | | | |
| 1,3 | APM SD/MI | 96,98 | 90,49 | 90,10 | 99,84 | 99.73 |
| 2 | SMP/MS | | | | | |
| 2,3 | APM SMP/MS | 88,79 | 78,10 | 74.63 | 96,69 | 89.43 |
| 3 | SMA/MA/SMK | | | | | |
| 3,3 | APM SMA/MA/SMK | 77,36 | 71.19 | 65.41 | 77,38 | 82.44 |

Sumber : <http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/>, LDA 2024

Dari Tabel 2.21 diatas, menunjukkan Angka Partisipasi Murni pada tingkat SD/MI tertinggi terjadi pada Tahun 2022 sebesar 99,84. Sedangkan angka terendah terjadi pada Tahun 2021 yaitu sebesar 90,48. Pada tingkat SMP/MTs angka

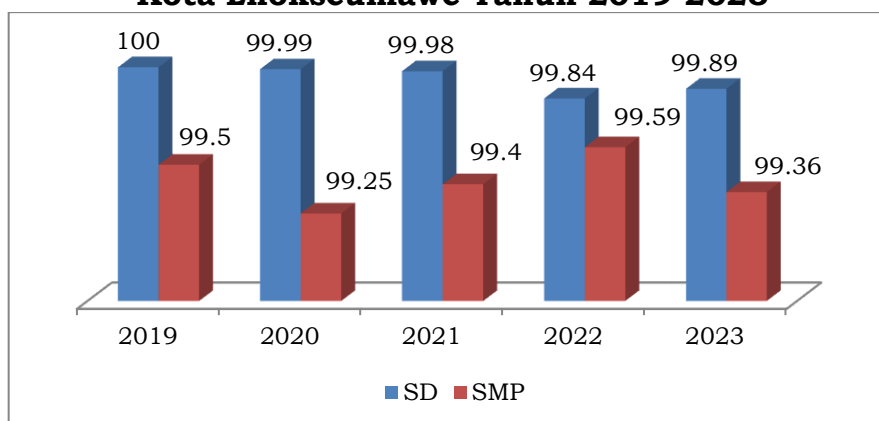
partisipasi murni tertinggi terjadi pada Tahun 2022 yaitu 96,69. Sedangkan angka terendah terjadi pada Tahun 2021 sebesar 78,10. Pada tingkatan SMA/MA/SMK angka partisipasi murni tertinggi pada Tahun 2023 yaitu sebesar 82,44. Sedangkan angka terendah terjadi pada Tahun 2020 yaitu sebesar 71,19.

C. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah menggambarkan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah jumlah siswa kelompok usia tertentu yang bersekolah ditingkat jenjang pendidikan tertentu pada tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah tersebut. Selama periode Tahun 2019-2023, capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut kelompok usia sekolah terus mengalami fluktuatif dengan rata-rata baik. Pada Tahun 2023, APS penduduk usia 13-15 (SMP) tahun mencapai 99,36 persen, ini berarti masih terdapat 0,64 persen penduduk usia 13-15 (SMP) tahun yang masih aktif bersekolah pada tingkat SMP/ sederajat namun tidak bersekolah lagi. APS terendah penduduk usia 13-15 (SMP) tahun terjadi pada tahun 2020 mencapai 99,25 persen sehingga terdapat 0,75 persen penduduk usia 13-15 (SMP) tahun yang masih aktif bersekolah pada tingkat SMP/ sederajat namun tidak bersekolah lagi.

Selanjutnya tahun 2023 APS SD sebesar 99,89 persen artinya masih terdapat 0,11 persen penduduk usia 7-12 (SD) tahun yang masih aktif bersekolah pada tingkat SD/ sederajat namun tidak bersekolah lagi. APS SD pada Tahun 2022 menunjukkan angka sebesar 99,84 persen artinya masih terdapat 0,16 persen penduduk usia 7-12 (SD) tahun yang masih aktif bersekolah pada tingkat SD/ sederajat namun tidak bersekolah lagi. Dan Berikut Gambar Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023.

Gambar 2.20
Angka Partisipasi Sekolah
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, Tahun 2024.

D. Angka Kelulusan

Angka Kelulusan adalah jumlah siswa yang lulus dan dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar/ijazah. Angka ini menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Angka Kelulusan di Kota Lhokseumawe di setiap tahunnya mengalami perubahan baik di tingkat SD/MI dan SMP/MTS, hal ini disebabkan ada murid yang pindah sekolah sebelum berakhir masa pendidikannya disekolah tersebut baik yang masuk ke Kota Lhokseumawe ataupun keluar dari Kota Lhokseumawe menuju ke Kabupaten/Kota lain sehingga jumlah dan lulusan murid di Kota Lhokseumawe berubah-ubah. untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.22 berikut ini:

Tabel 2.22
Angka Kelulusan
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Jenjang Pendidikan | Tahun | | | | |
|----|--------------------|--------|------|--------|------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | SD/MIN/MIS | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | SMP/MTS | 99.64% | 99 % | 99.50% | 100% | 100% |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024.

Tabel 2.22 di atas menggambarkan Angka Kelulusan siswa sesuai kelompok jenjang pendidikan SD/MI diwilayah Kota Lhokseumawe dari Tahun 2019-2023. Kelulusan tertinggi di tingkat SD/MI sebesar 100% pada Tahun 2019 sampai dengan

Tahun 2023. Sedangkan pada jenjang SMP/MTS, angka kelulusan sudah mencapai 100% Pada Tahun 2023. Angka kelulusan tertinggi terjadi pada Tahun 2022 dan 2023 dengan nilai mencapai 100% sedangkan terendah terjadi pada Tahun 2020 dengan nilai 99%.

E. Ruang Sekolah Pendidikan Kondisi Bangunan Baik

Sekolah atau bangunan Pendidikan dalam kondisi baik merupakan perbandingan antara Gedung atau bangunan dalam kondisi baik dengan total seluruh Gedung atau bangunan. Kondisi sekolah tingkat SD, SMP dan SMA dalam wilayah Kota Lhokseumawe masih terdapat ruang kelas dengan kondisi rusak berat dan rusak ringan. Kondisi ruang kelas sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI Pada Tahun 2019 terdapat 562 dengan kondisi baik dan 112 dengan kondisi rusak. Untuk Tahun 2019 terdapat 587 ruang kelas dengan kondisi baik dan 107 dengan kondisi rusak. Pada Tahun 2020 terdapat 587 ruang kelas dengan kondisi baik dan 107 dengan kondisi rusak. Pada Tahun 2021 kondisi ruang baik mencapai 270 ruang serta 427 rusak ringan dan pada Tahun 2022 kondisi ruang baik mencapai 406 ruang serta 415 ruang kondisi rusak. Tahun 2023 kondisi ruang baik SD sebanyak 534 ruang dan 226 ruang kondisi rusak.

Kondisi ruang kelas sekolah untuk jenjang Pendidikan SMP pada Tahun 2019 terdapat 365 dengan kondisi baik dan 55 dengan kondisi rusak. Pada Tahun 2020 terdapat 194 ruang kelas dengan kondisi baik dan 123 dengan kondisi rusak. Untuk Tahun 2021 terdapat 173 ruang kelas dengan kondisi baik dan 160 ruang dengan kondisi rusak. Tahun 2023 kondisi ruang kelas baik meningkat menjadi 322 dan kondisi rusakberkurang menjadi 63 ruang. Berikut Tabel Kondisi Ruang Kelas Kondisi baik dan rusak Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023.

Tabel 2.23
Kondisi Ruang Kelas Kondisi Baik
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

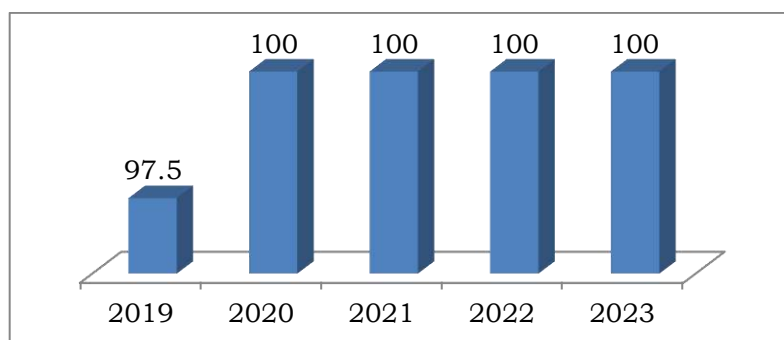
| No | Jenjang Pendidikan | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|----|--------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| | | Baik | Rusak | Baik | Rusak | Baik | Rusak | Baik | Rusak | Baik | Rusak |
| 1 | SD/MI | 587 | 107 | 587 | 107 | 270 | 427 | 406 | 415 | 534 | 226 |
| 2 | SMP | 365 | 55 | 194 | 123 | 173 | 160 | 188 | 161 | 322 | 63 |
| 3 | SMA | 426 | 15 | 426 | 15 | - | - | - | - | - | - |

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024.

F. Persentase Siswa Yang Memperoleh Pembinaan

Pembinaan pada siswa agar memperoleh prestasi baik di tingkat lokal, antar Kabupaten/Kota serta tingkat nasional selalu dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe. Pembinaan ini berupa pemberian tambahan pembelajaran maupun pelatihan khusus menyangkut keterampilan siswa tersebut. Pembinaan terhadap siswa yang ada di Kota Lhokseumawe rutin dilakukan serta telah mencakup seluruh kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pembina dari Sekolah yang ada di Kota Lhokseumawe.

Gambar 2.21
Persentase Siswa Yang Memperoleh Pembinaan
Tahun 2019-2023



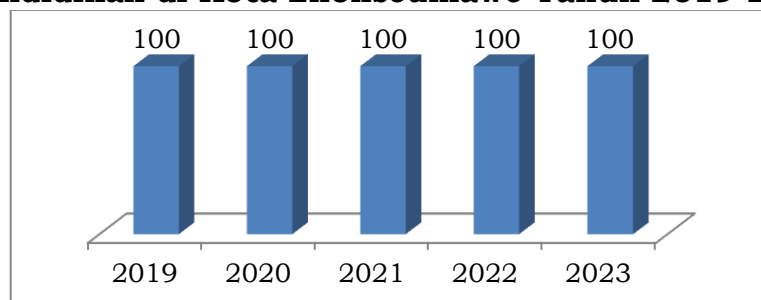
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2024.

G. Nilai Kelulusan Dan Ketercapaian Kurikulum di Satuan Pendidikan

Nilai kelulusan dan ketercapaian kurikulum pada Satuan pendidikan di Kota Lhokseumawe telah memenuhi target dengan

mencapai 100 persen kelulusan pada Ujian Nasional yang telah dilaksanakan selama ini.

Gambar 2.22
Nilai Kelulusan dan Ketercapaian Kurikulum di Satuan Pendidikan di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2024.

Dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimum bidang pendidikan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan terdapat penambahan 3 (tiga) indikator pencapaian SPM yaitu iklim keamanan SD dan SMP, iklim kebhinekaan SD dan SMP dan iklim inklusivitas SD dan SMP.

2.1.3.2.1.2 Kesehatan

A. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.

Angka kematian bayi (*Infant Mortality Rate/IMR*) adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 Tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada Tahun yang sama. AKB merupakan indikator yang biasa digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu banyak upaya kesehatan yang dilakukan dalam rangka menurunkan AKB.

Berbagai faktor dapat menyebabkan adanya penurunan AKB, diantaranya pemerataan pelayanan kesehatan berikut fasilitasnya. Hal ini disebabkan AKB sangat sensitif terhadap perbaikan pelayanan kesehatan. Selain perbaikan kondisi ekonomi yang tercermin dengan pendapatan masyarakat yang meningkat juga dapat berkontribusi melalui gizi yang berdampak pada daya tahan terhadap infeksi penyakit.

Pada tabel dibawah ini dapat dilihat dalam kurun waktu lima (5) Tahun terdapat Angka Kematian Bayi (AKB) Pada Tahun 2019 AKB kota Lhokseumawe 4.74% dan terjadi kenaikan pada Tahun 2021, mengalami kenaikan kembali di tahun 2022 menjadi 5.97% serta pada Tahun 2023 mengalami kenaikan mencapai 15.28%.

Tabel 2.24
Angka Kematian Bayi (AKB) (%)
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|------------------|-------|------|------|------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Kota Lhokseumawe | 4.74 | 0.51 | 4.51 | 5.97 | 15.28 |

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2024.

B. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka Kelangsungan Hidup Bayi adalah angka yang dihitung berdasarkan jumlah kematian bayi yang berumur kurang dari satu Tahun pada Tahun tertentu dibagi dengan jumlah kelahiran hidup pada Tahun tertentu untuk setiap seribu kelahiran.

Angka Kelangsungan Hidup Bayi merupakan peluang bayi hidup sampai dengan usia satu Tahun. Angka kelangsungan hidup bayi Kota Lhokseumawe pada Tahun 2019 sebesar 995.26 hari, namun pada Tahun 2020 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kota Lhokseumawe meningkat menjadi 999.77 hari sedangkan di Tahun 2021-2023 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kota Lhokseumawe mengalami penurunan menjadi 984.72 pada tahun 2023.

Tabel 2.25
Angka Kelangsungan Hidup Bayi
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| Tahun | Kecamatan | Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 Tahun | Jumlah kelahiran hidup per Tahun | AKB | AKHB |
|-------|--------------|---|----------------------------------|------|--------|
| 2019 | Banda Sakti | 7 | 1958 | 4.74 | 995.26 |
| | Muara Dua | 5 | 1144 | | |
| | Muara Satu | 5 | 624 | | |
| | Blang Mangat | 3 | 489 | | |
| 2020 | Banda Sakti | 1 | 1945 | 0.51 | 999.49 |
| | Muara Dua | 0 | 1135 | | |
| | Muara Satu | 0 | 792 | | |
| | Blang Mangat | 0 | 468 | | |

| Tahun | Kecamatan | Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 Tahun | Jumlah kelahiran hidup per Tahun | AKB | AKHB |
|-------|--------------|---|----------------------------------|-------|--------|
| 2021 | Banda Sakti | 3 | 1741 | 4.51 | 995.49 |
| | Muara Dua | 6 | 689 | | |
| | Muara Satu | 3 | 841 | | |
| | Blang Mangat | 4 | 257 | | |
| 2022 | Banda Sakti | 9 | 1786 | 5.97 | 994.03 |
| | Muara Dua | 4 | 916 | | |
| | Muara Satu | 6 | 669 | | |
| | Blang Mangat | 4 | 481 | | |
| 2023 | Banda Sakti | 19 | 1766 | 15.28 | 984.72 |
| | Muara Dua | 11 | 740 | | |
| | Muara Satu | 11 | 591 | | |
| | Blang Mangat | 13 | 436 | | |

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2024.

C. Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka kematian balita (AKABA) adalah jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 Tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. angka kematian balita mempresentasikan peluang terjadinya kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 Tahun. Menurunkan jumlah kematian anak dengan menghitung angka kematian balita dan angka kematian balita di suatu negara. Upaya percepatan penurunan Angka kematian balita dan Angka kematian balita menjadi prioritas Kementerian Kesehatan RI dan secara konsisten menjadi Rencana Aksi Daerah (RAD). Upaya ini dilakukan dengan kegiatan program yang fokus, terintegrasi secara sektoral dan berkesinambungan sehingga berdampak ungkit besar terhadap penurunan AKB dan AKABA di Kota Lhokseumawe.

AKABA Kota Lhokseumawe pada Tahun 2019 sebesar 4.98 dan pada Tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan menjadi masing-masing 0.92 dan 0.56 dan pada tahun 2022 menjadi 0.52. Pada tahun 2023 masih berada pada posisi 0.52.

Tabel 2.26
Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| Tahun | Kecamatan | Jumlah kematian BALITA usia 5 Tahun | Jumlah kelahiran hidup per Tahun | AKBA |
|-------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------|------|
| 2019 | Banda Sakti | 7 | 1958 | 4.98 |
| | Muara Dua | 6 | 1144 | |
| | Muara Satu | 5 | 624 | |
| | Blang Mangat | 3 | 489 | |

| Tahun | Kecamatan | Jumlah kematian BALITA usia 5 Tahun | Jumlah kelahiran hidup per Tahun | AKBA |
|-------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------|------|
| 2020 | Banda Sakti | 1 | 1945 | 0.92 |
| | Muara Dua | 2 | 1135 | |
| | Muara Satu | 1 | 792 | |
| | Blang Mangat | 0 | 468 | |
| 2021 | Banda Sakti | 1 | 1741 | 0.56 |
| | Muara Dua | 0 | 689 | |
| | Muara Satu | 0 | 841 | |
| | Blang Mangat | 1 | 257 | |
| 2022 | Banda Sakti | 1 | 1786 | 0.52 |
| | Muara Dua | 0 | 916 | |
| | Muara Satu | 1 | 669 | |
| | Blang Mangat | 0 | 481 | |
| 2023 | Banda Sakti | 0 | 1766 | 0.52 |
| | Muara Dua | 0 | 740 | |
| | Muara Satu | 2 | 591 | |
| | Blang Mangat | 0 | 436 | |

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2024.

D. Angka Kematian Neonatal (AKN)

Angka kematian neonatal (AKN) adalah jumlah bayi (umur 0–28 hari) yang meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Masalah utama penyebab kematian pada bayi dan balita adalah pada masa neonatus. Komplikasi yang menjadi penyebab kematian terbanyak adalah bayi berat lahir rendah dan infeksi. Pada Tahun 2018 angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup adalah 3 dimana jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 bulan) sebanyak 13 jiwa dan angka kelahiran hidup 4.199 jiwa. Pada Tahun 2019 Angka kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup adalah 3 dimana jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 bulan) sebanyak 12 jiwa dan Angka kelahiran hidup 4.215 jiwa. Perhatian terhadap upaya penurunan angka kematian neonatal menjadi penting. Untuk mencapai target penurunan kematian bayi, maka peningkatan akses dan kualitas pelayanan bagi bayi baru lahir menjadi prioritas utama.

E. Angka Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Posyandu adalah wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh masyarakat untuk masyarakat yang dibimbing petugas terkait. Rasio posyandu per satuan balita Kota

Lhokseumawe pada Tahun 2019 yaitu dengan rasio 6.67. Sedangkan rasio posyandu terendah tahun 2021 dengan rasio 4.99. Rasio tahun 2022 mengalami kenaikan kembali menjadi rasio 5.63 dan tahun 2023 menjadi 6.84. Posyandu per satuan balita Kota Lhokseumawe mengalami penurunan dikarenakan besarnya jumlah balita yang akan terus bertambah kurang diseimbangi oleh banyaknya jumlah posyandu.

Tabel 2.27
Rasio Posyandu Per Satuan Balita
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah Posyandu | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 |
| 2 | Jumlah Balita | 151266 | 21626 | 20231 | 19948 | 15677 |
| | Rasio | 6.67 | 6.67 | 4.99 | 5.63 | 6.84 |

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2024.

F. Rasio Posyandu Per Satuan Balita Per Kecamatan

Rasio posyandu per 1000 balita perkecamatan Tahun 2019 s.d Tahun 2023 tertinggi di Kecamatan Blang Mangat dengan rasio masing-masing pada Tahun 2019 rasionya 6.67 pada Tahun 2020 menurun menjadi rasionya 4.67 pada Tahun 2021 dan 2022 naik kembali rasionya menjadi 5.06 dan tahun 2023 meningkat kembali menjadi 6.37, hal ini dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk per kecamatan dan anggota KB aktif di kecamatan tersebut.

Tabel 2.28
Rasio Posyandu Per Satuan Balita Per Kecamatan
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| Tahun | Kecamatan | Jumlah Posyandu | Jumlah Balita | Rasio |
|-------|--------------|-----------------|---------------|-------|
| 2019 | Muara Dua | 24 | 3315 | 6.67 |
| | Banda Sakti | 33 | 6655 | |
| | Blang Mangat | 29 | 2260 | |
| | Muara Satu | 15 | 2896 | |
| 2020 | Muara Dua | 24 | 5589 | 4.67 |
| | Banda Sakti | 33 | 9292 | |
| | Blang Mangat | 29 | 2759 | |
| | Muara Satu | 15 | 3990 | |
| 2021 | Muara Dua | 24 | 5227 | 5.06 |
| | Banda Sakti | 33 | 8392 | |
| | Blang Mangat | 29 | 2562 | |
| | Muara Satu | 15 | 3750 | |

| Tahun | Kecamatan | Jumlah Posyandu | Jumlah Balita | Rasio |
|-------|--------------|-----------------|---------------|-------|
| 2022 | Muara Dua | 24 | 5236 | 5.06 |
| | Banda Sakti | 33 | 8352 | |
| | Blang Mangat | 29 | 2603 | |
| | Muara Satu | 15 | 3757 | |
| 2023 | Muara Dua | 24 | 4120 | 6.37 |
| | Banda Sakti | 32 | 6578 | |
| | Blang Mangat | 29 | 2021 | |
| | Muara Satu | 15 | 2958 | |

Sumber: Dinas Kesehatan, Kota Lhokseumawe 2024.

G. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan Penduduk

Puskesmas dan jaringannya, sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 tentang kebijakan dasar Puskesmas mendefinisikan Puskesmas adalah unit pelaksana teknis (UPT) Dinas Kesehatan kab/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Pembangunan kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pusat pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer, dan pusat pelayanan kesehatan perorangan primer. Puskesmas berkewajiban memberikan upaya kesehatan wajib yang terdiri :

1. upaya promosi kesehatan
2. upaya kesehatan lingkungan
3. upaya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana
4. upaya perbaikan gizi
5. upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
6. upaya pengobatan

Jumlah Puskesmas di Kota Lhokseumawe sebanyak 6 Puskesmas. Pada Tahun 2020 bertambah 1 Puskesmas menjadi 7 puskesmas. Adapun Rasio Puskesmas dari Tahun 2019-2023 semakin tinggi. Berdasarkan rasio kecukupan puskesmas secara nasional sebesar 28.000 penduduk/puskesmas. Berarti ketersediaan puskesmas di Kota Lhokseumawe belum memadai,

jumlah penduduk terus meningkat dari tahun ke tahun. Begitu juga dengan sarana kesehatan lainnya hal ini perlu mendapat perhatian untuk pembangunan sarana kesehatan yang mencukupi dan memelihara kondisi fisik bangunan dan sanitasinya.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dasar, Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan perorangan yang diberikan terdiri dari pelayanan rawat jalan dan rawat inap untuk Puskesmas tertentu jika dianggap diperlukan. Meskipun pelayanan kesehatan masyarakat merupakan inti dari puskesmas. pelayanan kesehatan perorangan juga menjadi perhatian dari pemerintah. Selain enam upaya kesehatan wajib yang harus diberikan puskesmas juga menyelenggarakan upaya kesehatan pengembangan. Upaya kesehatan pengembangan puskesmas dapat berupa pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi dasar (PONET). Pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR), upaya kesehatan kerja, upaya kesehatan olah raga, dan tata laksana kasus kekerasan terhadap anak (KIA). Upaya kesehatan pengembangan diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan yang ada diwilayah kerja.

Tabel 2.29
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah Puskesmas | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2 | Jumlah Poliklinik | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Jumlah Pustu | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 |
| 4 | Jumlah Penduduk | 207.202 | 188.713 | 189.941 | 191.396 | 196.067 |
| 5 | Rasio Puskesmas persatuan penduduk | 0.028 | 0.037 | 0.037 | 0.036 | 0.036 |
| 6 | Rasio Poliklinik persatuan penduduk | 0.048 | 0.052 | 0.053 | 0.052 | 0.051 |
| 7 | Rasio Pustu persatuan penduduk | 0.106 | 0.121 | 0.121 | 0.115 | 0.112 |

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2024.

H. Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengelompokkan Rumah Sakit berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan menjadi Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Adapun Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. Dalam wilayah Kota Lhokseumawe terdapat 11 (Sebelas) Rumah Sakit (RS), terdiri dari 1 Rumah sakit TNI AD/AU/AL/Polri dan 9 Rumah Sakit Swasta berikut data dimaksud.

Tabel 2.30
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Rumah Sakit Umum (Pemerintah) | - | - | - | - | - |
| 2 | Rumah Sakit Jiwa/ Paru dan Penyakit Khusus Lainnya Milik Pemerintah | - | - | - | - | - |
| 3 | Rumah Sakit AD/ AU/ AL/ Polri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Rumah Sakit Daerah | - | - | - | - | - |
| 5 | Rumah Sakit Swasta | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 6 | Jumlah Seluruh Rumah Sakit | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | Jumlah Penduduk | 207.202 | 188.713 | 189.941 | 191.396 | 196.067 |
| | Rasio | 0.043 | 0.053 | 0.053 | 0.052 | 0.051 |

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2024.

Untuk upaya peningkatan pelayanan kesehatan di Kota Lhokseumawe, Pemerintah Kota Lhokseumawe juga telah menganggarkan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Pemerintah Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 dan berlanjut pada tahun 2024 dari Dana Alokasi Umum bidang kesehatan.

I. Rasio Dokter per satuan Penduduk

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 21 menyebutkan bahwa pemerintah mengatur

perencanaan, pengadaan, pendaya gunaan, pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Dalam peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang sistem kesehatan Nasional dijelaskan bahwa untuk melaksanakan upaya kesehatan dalam rangka pembangunan kesehatan diperlukan sumber daya manusia kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitasnya serta terdistribusi secara adil dan merata. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan memutuskan bahwa tenaga kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik dan tenaga keteknisan medis. Gambaran mengenai jumlah, jenis dan kualitas serta penyebaran tenaga kesehatan di Kota Lhokseumawe dilakukan dengan cara pengumpulan data pada sarana pelayanan kesehatan. pengumpulan tenaga kesehatan meliputi tenaga kesehatan yang berstatus PNS, Pegawai Tidak Tetap, TNI/POLRI dan swasta.

Adapun rasio dokter persatuan penduduk di Kota Lhokseumawe berdasarkan pelayanan yang diberikan satu (1) orang dokter harus melayani pada Tahun 2019 rasio dokter 0.26 per 1.000 penduduk, pada Tahun 2020-2021 rasio dokter meningkat menjadi 0.35 per 1.000 penduduk pada tahun 2021. Namun pada tahun 2022 rasio dokter terjadi penurunan menjadi 0.17 per 1.000 penduduk di karenakan jumlah dokter yang berkurang dan pada tahun 2023 sedikit mengalami peningkatan menjadi 0.23 per 1.000 penduduk dikarenakan adanya penerimaan P3K.

Tabel 2.31
Rasio Dokter per Satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah Dokter Umum | 54 | 58 | 67 | 32 | 46 |
| 2 | Jumlah Penduduk | 207.202 | 188.713 | 189.941 | 191.396 | 196.067 |
| | Rasio | 0.26 | 0.31 | 0.35 | 0.17 | 0.23 |

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2024.

J. Rasio Tenaga Medis Per satuan Penduduk

Rasio tenaga medis Kota Lhokseumawe cenderung mengalami kenaikan. Pada Tahun 2019 rasio tenaga medis sebesar 0.32, Tahun 2020 mengalami kenaikan sehingga rasio tenaga medis menjadi 0.38 serta pada Tahun 2021 rasio tenaga medis menjadi 0.47 dan Tahun 2022 mengalami penurunan kembali menjadi 0.26, terjadinya penurunan karena tidak adanya penambahan penerimaan tenaga medis pada Kota Lhokseumawe. Namun pada Tahun 2023 sedikit mengalami peningkatan menjadi 0.33. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.32
Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah Tenaga Medis | 66 | 72 | 89 | 49 | 64 |
| 2 | Jumlah Penduduk | 207.202 | 188.713 | 189.941 | 191.396 | 196.067 |
| | Rasio | 0.32 | 0.38 | 0.47 | 0.26 | 0.33 |

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2024.

K. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Komplikasi kebidanan adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan atau janin dalam kandungan baik langsung maupun tidak langsung, termasuk penyakit menular dan tidak menular yang dapat mengancam jiwa ibu atau janin yang tidak disebabkan oleh trauma kecelakaan. Komplikasi kebidanan antara lain pecah ketuban dini, pendarahan, pervaginasi, hipertensi dalam kehamilan (systole > 140 mmHg, diastole > 90 mmHg) dengan atau tanpa edema pre tibial, ancaman persalinan prematur, infeksi berat dalam kehamilan, distosia (persalinan macet, persalinan tidak maju dan infeksi masa nifas).

Pencegahan dan penanganan komplikasi kebidanan adalah pelayanan kepada ibu dengan komplikasi kebidanan untuk mendapatkan perlindungan/pencegahan dan penanganan definitif sesuai standar oleh tenaga kesehatan kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan. Indikator yang digunakan untuk

mengukur keberhasilan pencegahan dan penanganan komplikasi kebidanan adalah cakupan penanganan komplikasi kebidanan (cakupan PK). Indikator ini mengukur kemampuan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada ibu hamil, bersalin nifas dengan komplikasi.

Berdasarkan data bahwa cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani pada Tahun 2019 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 55.5% dan Tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 67.3% sedangkan Tahun 2021-2022 mengalami penurunan menjadi 59.9% dan 54.4%, dan tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 64.05%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.33
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|-------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja | 549 | 649 | 499 | 481 | 563 |
| 2 | Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama | 989 | 964 | 833 | 879 | 879 |
| Persentase | | 55.5 | 67.3 | 59.9 | 54.7 | 64.05 |

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2024.

L. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi Kebidanan

Upaya kesehatan ibu bersalin dilaksanakan dalam rangka mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG), Dokter umum dan bidan serta diupayakan dilakukan difasilitas pelayanan kesehatan. Pertolongan persalinan adalah proses pelayanan persalinan yang dimulai pada kala I sampai dengan kala IV persalinan. Persalinan yang dilakukan disarana pelayanan kesehatan dapat menurunkan resiko kematian ibu saat persalinan karena ditempat tersebut persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan dan tersedia sarana kesehatan yang memadai sehingga

dapat menangani komplikasi yang mungkin terjadi pada saat persalinan yang membahayakan nyawa ibu dan bayi.

Pencapaian upaya kesehatan ibu bersalin diukur melalui indikator persentasi persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih (cakupan Pn). Indikator ini memperlihatkan diantaranya tingkat kemampuan pemerintah dalam menyediakan pelayanan persalinan berkualitas yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. peningkatan cakupan persalinan perlu dilakukan melalui upaya pelaksanaan program unggulan kesehatan Ibu diantaranya adalah kemitraan bidan dan dukun, peningkatan persalinan difasilitas pelayanan kesehatan melalui jaminan program persalinan, model rumah tunggu dengan puskesmas didaerah terpencil untuk pencegahan terhadap komplikasi yang terjadi selama persalinan.

Revitalisasi bidan koordinator melalui pelaksanaan supervise fasilitatif untuk peningkatan mutu dan kualitas tenaga penolong persalinan serta peningkatan kualitas surveilans kesehatan ibu melalui pelaksanaan pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak (PWS KIA). Bila ditelusuri dari tabel dibawah ini maka Kota Lhokseumawe menunjukkan peningkatan yang sangat baik untuk cakupan pertolongan persalinan. Peningkatan ini dihubungkan dengan semakin dekatnya akses kefasilitas kesehatan dan ketersediaan tenaga profesional yang memadai diikuti dengan sistem informasi yang lebih baik.

Cakupan jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan/nakes dari Tahun 2019 sebesar 89.38% dan pada tahun 2021 meningkat menjadi rasio 97.08% namun tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 91.50% dan tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 84.40%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh
Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi Kebidanan
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| Tahun | Kecamatan | Jumlah Ibu Bersalin Yang ditolong Oleh Nakes | Jumlah seluruh sasaran Ibu bersalin di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama | Persen |
|-------|--------------|--|--|--------|
| 2019 | Muara Dua | 1141 | 1209 | 89.38 |
| | Banda Sakti | 1957 | 2027 | |
| | Blang Mangat | 489 | 598 | |
| | Muara Satu | 622 | 875 | |
| 2020 | Muara Dua | 1133 | 1976 | 94.37 |
| | Banda Sakti | 1943 | 1188 | |
| | Blang Mangat | 468 | 583 | |
| | Muara Satu | 796 | 852 | |
| 2021 | Muara Dua | 612 | 707 | 97.08 |
| | Banda Sakti | 1737 | 1791 | |
| | Blang Mangat | 498 | 528 | |
| | Muara Satu | 840 | 772 | |
| 2022 | Muara Dua | 913 | 1084 | 91.50 |
| | Banda Sakti | 1784 | 1804 | |
| | Blang Mangat | 481 | 532 | |
| | Muara Satu | 663 | 778 | |
| 2023 | Muara Dua | 745 | 1084 | 84.40 |
| | Banda Sakti | 1767 | 1804 | |
| | Blang Mangat | 436 | 532 | |
| | Muara Satu | 595 | 778 | |

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2024.

M. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Indikator lain untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan imunisasi adalah *Universal Child Immunization* atau yang biasa disingkat UCI. Imunisasi dasar pada bayi seharusnya diberikan pada anak sesuai umurnya. Pada kondisi ini diharapkan sistem kekebalan tubuh dapat berkerja secara optimal. Namun demikian pada kondisi tertentu beberapa bayi tidak mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Kelompok inilah yang disebut *drop out (DO)* imunisasi. Bayi yang mendapat imunisasi DPT/ HB 1 awal pemberian imunisasi, namun tidak mendapatkan imunisasi campak disebut *drop out Rate DPT/ HB1 Campak*.

UCI adalah gambaran suatu desa atau kelurahan dalam keadaan tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi (anak dibawah umur 1 tahun) dimana pada Tahun 2019 terdapat 5 desa dari 68 desa di Kota Lhokseumawe yaitu

7.35% dan pada Tahun 2020 terdapat 13 desa dari 68 desa di Kota Lhokseumawe sehingga mencapai 19.1% serta pada Tahun 2021 terdapat 11 desa dari 68 desa di Kota Lhokseumawe sehingga mencapai 16.2%, dan tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 9 desa dari 68 desa dengan 13.52%, pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 15 desa dari 68 desa atau 22.06%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.35
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Jumlah Desa | Desa/Kelurahan UCI% | | | | |
|------------|--------------------------------|-------------|---------------------|------|------|-------|-------|
| | | | Tahun | | | | |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Cakupan Desa/ Kelurahan UCI | 68 | 5 | 13 | 11 | 9 | 15 |
| Persentase | | | 7.35 | 19.1 | 16.2 | 13.52 | 22.06 |

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2024.

N. Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Balita dengan gizi buruk berdampak pada pertumbuhan dan perkembangannya. Gejala awal sering tidak jelas hanya terlihat bahwa berat badan anak tersebut lebih rendah dari anak usianya. Rata-rata berat badannya hanya sekitar 60-80% dari berat badan ideal. Ciri-ciri klinis yang biasanya menyertainya antara lain: kenaikan berat badan berkurang bahkan terus menurun, ukuran lingkaran lengan atas menurun, maturasi tulang terlambat, rasio berat terhadap tinggi normal atau cenderung menurun, tebal lipit kulit normal atau semakin berkurang. Seluruh balita gizi buruk di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2019-2023 seluruhnya mendapat perawatan mencapai 100%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.36
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan | Tahun | | | | |
|--|---|-------|------|------|------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan | 4 | 7 | 8 | 33 | 61 |
| 2 | Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan | 4 | 7 | 8 | 33 | 61 |
| Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2024.

O. Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Di Imunisasi Campak

Kementerian Kesehatan menetapkan bahwa ada beberapa penyakit yang dapat di cegah dengan imunisasi diantaranya penyakit campak. Penyakit campak disebabkan oleh virus campak, golongan paramyxovirus penularan dapat terjadi melalui udara yang telah terkontaminasi oleh droplet (ludah) orang yang telah terinfeksi. Sebagian besar kasus campak menyerang anak-anak usia pra sekolah dan usia SD. Jika seseorang pernah menderita campak, maka dia akan mendapat kekebalan terhadap penyakit tersebut seumur hidupnya.

Jumlah bayi imunisasi campak usia 1 Tahun yang mendapat imunisasi campak pada pada Tahun 2019-2020 hanya 2574 bayi atau 22.31% dan sebanyak 2627 bayi atau 22.46%. Namun pada Tahun 2021-2023 terjadi peningkatan sehingga pada Tahun 2023 menjadi 57.15%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.37
Cakupan Persentase Anak Usia I Tahun Yang Mendapat Imunisasi Campak Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah bayi imunisasi campak usia 1 Tahun | 2574 | 2627 | 2406 | 2413 | 2214 |
| 2 | Jumlah anak usia I Tahun pada wilayah dan Tahun yang sama | 11540 | 11695 | 4299 | 4237 | 3874 |
| Persentase | | 22.31 | 22.46 | 55.97 | 56.95 | 57.15 |

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2024.

P. Cakupan penemuan dan penanganan penderita Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk

Polio disebabkan oleh infeksi virus yang menyerang sistem syaraf sehingga penderita mengalami kelumpuhan. Pada umumnya menyerang anak berusia 0-3 Tahun, ini ditandai dengan munculnya demam, lelah, sakit kepala, mual, kaku di leher, serta sakit di tungkai dan lengan. AFP merupakan kelumpuhan yang sifatnya flaccid yang bersifat lunglai, lemas atau layuh (bukan kaku), atau terjadi penurunan kekuatan otot secara mendadak. Sedangkan non polio AFP adalah kasus lumpuh layu

akut yang di duga kasus polio sampai di buktikan dengan pemeriksaan laboratorium bukan kasus polio. Pada Tahun 2019 kasus SFP non polio yang di laporkan di Kota Lhokseumawe sebanyak 2 kasus atau 0.003% dan Tahun 2020 terdapat 1 kasus atau 0.001% sedangkan di Tahun 2021 terjadinya kasus AFP meningkat menjadi 4 kasus atau 0.003% dan tahun 2022 dilaporkan tidak terdapat kasus SFP non polio, tahun 2023 terdapat 4 kasus atau 0.007% Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.38
Cakupan Persentase Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah kasus SFP non Polio yang dilaporkan | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | jumlah penduduk < 15 Tahun | 59014 | 64756 | 144294 | 58338 | 53.558 |
| Persentase | | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.007 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2024.

Q. Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani

Pneumonia adalah penyakit pada paru-paru di mana pulmonary alveolus (alveoli) yang bertanggung jawab menyerap oksigen dari atmosfer meradang dan terisi oleh cairan. Radang ini disebabkan oleh kuman pneumococcus, staphylococcus, streptococcus dan virus. Gejala penyakit pneumonia yaitu menggigil, demam, sakit kepala, batuk, mengeluarkan dahak dan sesak nafas. Populasi yang rentan terserang pneumonia adalah anak-anak usia kurang dari 2 Tahun, usia lanjut lebih dari 65 Tahun dan orang yang memiliki masalah kesehatan (malnutrisi, gangguan imonulogi).

Adapun cakupan balita pneumonia dapat di lihat pada tabel di bawah ini. Cakupan penemuan Pneumonia pada Balita Kota Lhokseumawe tertinggi terjadi pada Tahun 2019 sebesar 8.23% pada Tahun 2020 menurun menjadi 0.04% sedangkan di Tahun 2021 dengan jumlah balita pneumonia sebanyak 22 orang, maka persentasenya sebanyak 2.43% dan pada Tahun 2022 terjadi penurunan dari tahun 2021 menjadi 0.72%. Pada Tahun 2023

terdapat 24 balita dengan jumlah perkiraan 950 balita sehingga menjadi 2.53%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.39
Cakupan Penemuan Pneumonia Pada Balita
Kota Lhokseumawe Tahun 2019 - 2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|-------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah penderita balita pneumonia yang ditangani | 73 | 1 | 22 | 16 | 24 |
| 2 | Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama | 886 | 2222 | 902 | 2223 | 950 |
| Persentase | | 8.23 | 0.04 | 2.43 | 0.72 | 2.53 |

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2024.

R. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri *mycobacterium tuberculosis*, penyakit ini menyebar melalui droplet orang yang telah terinfeksi basil tuberkulosis. Beban penyakit Tuberkulosis dapat di ukur dengan case notification rate (CNR) dan prevalensi dan mortalitas. Pada Pada Tahun 2019 terdapat 136 kasus penderita baru TBC BTA (+) dari 238 perkiraan penderita baru TBC BTA (+) atau 0.57. Sementara pada Tahun 2020 terdapat 128 kasus penderita baru TBC BTA (+) dari 216 kasus perkiraan penderita baru TBC BTA (+) atau 59.2%. sedangkan tahun 2021 berjumlah 569 orang kasus dari perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dengan persentasenya 51.03% dan tahun 2022 meningkat menjadi 83.05% dengan 833 penderita baru TBC BTA (+) dari perkiraan penderita baru TBC BTA (+) sebanyak 1003 orang. Pada tahun 2023 meningkat menjadi 101.49% dengan jumlah penderita baru TBC 1087 orang melebihi jumlah perkiraan 1.071 orang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.40
Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita
Penyakit TBC BTA Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|-------------------|---|-------|------|-------|-------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 Tahun | 136 | 128 | 569 | 833 | 1087 |
| 2 | Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun wkt yang sama | 238 | 216 | 1115 | 1003 | 1071 |
| Persentase | | 57,1 | 59,2 | 51.03 | 83.05 | 101.49 |

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2024.

S. Tingkat Prevelensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Tingkat prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk di Kota Lhokseumawe tertinggi dengan jumlah kasus penderita TBC pada Tahun 2023 sebanyak 1.131 orang dengan jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama sebanyak 196.067 orang dengan tingkat prevalensi 576.8 dan kasus tingkat prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk di Kota Lhokseumawe terendah adalah pada Tahun 2019 sebesar 111 dengan jumlah kasus penderita TBC sebanyak 230 kasus dari jumlah penduduk 207.202 pada Tahun tersebut. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.41
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
Kota Lhokseumawe Tahun 2019 - 2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|-------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama) | 230 | 297 | 569 | 833 | 1131 |
| 2 | Jumlah Penduduk pada kurun waktu yang sama | 207.202 | 188.713 | 189.941 | 191.396 | 196.067 |
| Persentase | | 111 | 157.4 | 299.6 | 435.2 | 576.8 |

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2024.

T. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Tingkat kematian karena tuberkulosis per 100.000 tuberkulosis di Kota Lhokseumawe pada tahun 2018 terdapat 2

kasus pasien TB yang meninggal atau dengan tingkat kematian sebesar 0.98. Sedangkan pada tahun 2019 dan tahun 2020 tingkat kematian karena tuberkulosis menurun sebesar 0.48 dan 0.52 dengan kasus kematian hanya 1 kasus. Sedangkan Tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 6 kasus dengan tingkat kematian 3.15 dengan jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama berjumlah 189.941 orang. Tahun 2023 mengalami penurunan dengan jumlah pasien TB yang meninggal sebanyak 2 pasien atau tingkat kematian karena Tuberkulosis 1.02. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.42
Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah Paiseu TB yang meninggal | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| 2 | Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama | 207.202 | 188.713 | 189.941 | 191.396 | 196.067 |
| | Persentase | 0,48 | 0.52 | 3.15 | 1.04 | 1.02 |

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2024.

U. Proporsi Kasus Tuberculosis Yang Di Obati Dan Sembuh Dalam Program DOTS

Angka Keberhasilan Pengobatan Penderita TB Paru BTA(+) adalah salah satu upaya mengendalikan TB Paru yaitu dengan pengobatan. Indikator yang digunakan sebagai evaluasi pengobatan, Yaitu angka keberhasilan pengobatan ini di bentuk dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap ada. Pada Tahun 2019 dan 2020 pasien baru TB paru masing-masing sebesar 136 pasien dan 216 pasien dan pada tahun 2021 pasien baru TB paru sebesar 277 pasien BTA mendapat pengobatan sebanyak 312 pasien dengan persentase menurun 88%, pada tahun 2022 jumlah pasien meningkat menjadi 344 pasien BTA dan semuanya mendapat pengobatan melalui DOTS, dan pada Tahun 2023 jumlah pasien BTA sebanyak 1087 pasien dan melebihi jumlah pasien baru TB paru yang di perkirakan sebanyak 1028

sehingga menjadi 105.7%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.43
Proporsi Jumlah Kasus Tuberculosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Kota Lhokseumawe Tahun 2019 - 2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|------------|---|-------|------|------|------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah pasien tuberculosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS | 136 | 216 | 277 | 344 | 1087 |
| 2 | Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut | 136 | 216 | 312 | 344 | 1028 |
| Persentase | | 100 | 100 | 88 | 100 | 105.7 |

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2024.

V. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Penyakit Demam Berdarah Dengeu (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue, yang masuk keperedaran darah manusia melalui gigitan nyamuk dari genus *Aedes*, misalnya *Aedes aegypti* atau *Aedes albopictus*. Penyakit DBD dapat muncul sepanjang Tahun dan dapat menyerang seluruh kelompok umur. Penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat. Pada Tahun 2019-2023 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kota Lhokseumawe 100%. Jumlah penderita DBD yang ditemukan semua ditangani sesuai SOP dan jumlahnya setiap Tahun menurun. Kasus DBD tahun 2019 sebesar 84 orang, pada tahun 2020 sebesar 79 orang dan tahun 2021 terjadinya penurunan sebesar 46 orang. Pada tahun 2022 Jumlah penderita DBD yang ditemukan semua ditangani sesuai SOP menurun menjadi 47 orang. Namun tahun 2023 mengalami peningkatan jumlah penderita DBD menjadi 86 orang dan semua ditangani sesuai SOP. Kesimpulan dari jumlah kasus tersebut masih perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan di rumah sakit dan puskesmas (dokter, perawat dan lain-lain) termasuk peningkatan sarana-sarana penunjang diagnostik dan penatalaksanaan bagi penderita di fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.44
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|--|-------|------|------|------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 Tahun | 84 | 79 | 58 | 47 | 86 |
| 2 | Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun waktu yang sama | 84 | 79 | 58 | 47 | 86 |
| | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2024.

W. Penderita Diare Di Temukan Dan Ditangani

Diare merupakan penyakit endemis dan juga merupakan penyakit potensial KLB yang sering di sertai kematian. Seseorang di katakan menderita diare bila feses lebih berair dari biasanya atau air besar lebih dari tiga kali dan berair tapi tidak berdarah dalam waktu 24 jam. Salah satu penyebab diare pada masyarakat adalah prilaku hidup sehat yang belum baik masih banyak sampah yang buang bukan pada tempatnya, buang air besar tidak di jamban serta kebiasaan minum air mentah dan makan yang tidak di dahului dengan cuci tangan terlebih dahulu. Penderita diare yang ditangani adalah jumlah penderita yang datang dan dilayani di sarana kesehatan pada suatu wilayah.

Gambaran tabel di bawah ini menunjukkan cakupan penderita diare yang ditangani dengan kasus terendah terjadi pada Tahun 2019 sebesar 46.32% dengan jumlah penderita diare sebanyak 2555 kasus dari jumlah perkiraan penderita diare sebanyak 5516 kasus pada Tahun 2020 sebesar 33.07% dengan jumlah penderita diare sebanyak 1185 kasus dari jumlah perkiraan penderita diare sebanyak 5700 kasus pada Tahun 2021 sebesar 55.28% dengan jumlah penderita diare sebanyak 3071 kasus dari jumlah perkiraan penderita diare sebanyak 5555 kasus dan Tahun 2022 cakupan penderita Diare yang ditangani sebanyak 28.49% dengan jumlah penderita diare sebanyak 2568 kasus dari 9014 jumlah perkiraan penderita diare. Pada tahun 2023 jumlah penderita diare meningkat menjadi 5014 orang dengan jumlah perkiraan

sebanyak 16.108 orang sehingga menjadi 31.13%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.45
Cakupan Penderita Diare Yang Ditangani
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disaran kesehatan dan kader suatu wilayah tertentu dalam waktu satu Tahun | 2555 | 1885 | 3071 | 2568 | 5014 |
| 2 | Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk) | 5516 | 5700 | 5555 | 9014 | 16108 |
| | Persentase | 46.32 | 33.07 | 55.28 | 28.49 | 31.13 |

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2024.

X. Angka Kesakitan Malaria Per 100.000 Penduduk

Malaria adalah penyakit infeksi yang di sebabkan oleh plasmodium yang hidup dan berkembang baik dalam sel darah merah manusia, di tularkan oleh nyamuk malaria (Anopheles) betina, dapat menyerang semua orang baik laki-laki atau pun perempuan pada semua golongan umur dari bayi, anak – anak dan orang dewasa. Pengobatan malaria harus tepat waktu yang sesuai dengan acuan program pengendalian malaria. Pengobatan yang efektif adalah pemberian ACT (artemisin-based combination therapy) pada 24 jam pertama pasien panas dan obat harus di minum habis dalam 3 hari.

Pada Tahun 2019-2023 di Kota Lhokseumawe tidak ditemukan penduduk yang menderita malaria atau 0 kasus, hanya pada tahun 2022 terdapat 2 kasus penderita malaria. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.46
Cakupan Angka Kejadian Penderita Malaria
Kota Lhokseumawe Tahun 2019 - 2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Penduduk yang menderita malaria pada Tahun tertentu | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Jumlah penduduk pada pertengahan Tahun | 207.202 | 188.713 | 189.941 | 191.396 | 196.067 |
| | Persentase | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 |

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2024.

Y. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi

HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi Humam Immunodeficiency virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dahulu dinyatakan sebagai HIV positif. Jumlah HIV positif yang ada di masyarakat dapat di ketahui melalui 3 metode, yaitu pada layanan voluntary, counseling, and testing (VCT), sero survey, dan survei terpadu biologis dan perilaku (STBP).

Gambaran kasus HIV/AIDS di Kota Lhokseumawe dari Tahun 2019 s.d 2023 mengalami fluktuatif. Pada Tahun 2019 terdapat 7 kasus Pasien HIV/AIDS, Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 3 kasus. sedangkan Tahun 2021 Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu mencapai 8 kasus dan Tahun 2022 Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu mencapai 4 kasus. Pada tahun 2023 prevelensi HIV meningkat menjadi 0.013% dengan jumlah pasien HIV menjadi 25 orang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.47
Prevalensi HIV/AIDS Dari Total Populasi
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|-------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu x | 7 | 3 | 8 | 4 | 25 |
| 2 | Jumlah penduduk disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama | 207.202 | 188.713 | 189.941 | 191.396 | 196.067 |
| Persentase | | 0,003 | 0,001 | 0.004 | 0.002 | 0.013 |

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2024.

Z. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah kunjungan pasien rawat jalan masyarakat miskin, dan hampir miskin di sarana kesehatan strata dua dan strata tiga

di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2019 adalah 121%, pada Tahun 2020 menurun menjadi sebesar 83% dan pada Tahun 2021 kembali meningkat menjadi sebesar 85%, namun pada Tahun 2022 kembali menurun menjadi 71.31% dan Tahun 2023 mengalami penurunan lagi menjadi 23.06%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.48
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|-------------------|---|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Kunjungan Pasien miskin disarana kesehatan strata 1 | 27.895 | 18.923 | 19.953 | 16.422 | 19.927 |
| 2 | Jumlah seluruh penduduk miskin | 23.050 | 22.690 | 23.380 | 23.030 | 86.427 |
| Persentase | | 121 | 83 | 85 | 71.31 | 23.06 |

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2024.

AA. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi di Kota Lhokseumawe mengalami penurunan setiap Tahunnya. Pada Tahun 2019 Cakupan kunjungan bayi di Kota Lhokseumawe sebesar 56.7%, Tahun 2020 59.5%. sedangkan Tahun 2021 mencapai 2265 dan persentasenya 52.7 %, namun pada Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 51.4% dan tahun 2023 meningkat menjadi 54.7%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.49
Cakupan Kunjungan Bayi Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Kecamatan | Puskesmas | Kunjungan Bayi | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | | | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % |
| 1 | Banda Sakti | Banda Sakti | 940 | 72.2 | 965 | 75.9 | 769 | 59 | 777 | 63.1 | 645 | 52.4 |
| | | Mon geudong | 449 | 82.7 | 292 | 55.1 | 377 | 68 | 369 | 68.0 | 403 | 74.2 |
| 2 | Muara Dua | Muara Dua | 562 | 50.5 | 783 | 72.3 | 673 | 68.8 | 633 | 56.7 | 582 | 79.5 |
| | | Kandang | | | | | | | | | 190 | 49.4 |
| 3 | Muara Satu | Muara Satu | 285 | 35.9 | 281 | 36.1 | 311 | 40 | 269 | 33.7 | 190 | 23.7 |
| 4 | Blang Mangat | Blang Mangat | 110 | 29.7 | 86 | 24.0 | 77 | 21 | 101 | 27.6 | 238 | 65 |
| | | Blang Cut | 95 | 52.5 | 87 | 50.6 | 58 | 33 | 47 | 21.8 | 90 | 41.6 |
| Jumlah | | | 2441 | 56.7 | 2494 | 59.5 | 2268 | 52.7 | 2196 | 51.4 | 2338 | 54.7 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2024.

BB. Cakupan Puskesmas dan Pembantu Puskesmas

Pada Tahun 2021 jumlah Puskesmas di Kota Lhokseumawe sebanyak 7 unit yang tersebar di 4 (empat) kecamatan dan terdiri dari 68 Gampong, diantaranya Kecamatan Muara Dua sebanyak 2 (dua) unit dengan jumlah gampong sebanyak 17 gampong, Kecamatan Banda Sakti sebanyak 2 (dua) unit dengan jumlah gampong sebanyak 18 gampong, Kecamatan Blang Mangat sebanyak 2 (dua) unit dengan jumlah gampong sebanyak 22 gampong dan pada Kecamatan Muara Satu sebanyak 1 (satu) unit dengan jumlah gampong sebanyak 11 gampong. Jika dibandingkan jumlah puskesmas dengan jumlah kecamatan dalam Kota Lhokseumawe dapat mencapai hingga 175% kesediaan puskesmas dalam Kota Lhokseumawe.

Cakupan Pembantu Puskesmas dalam Wilayah Kota Lhokseumawe sebanyak 20 (dua puluh) unit yang tersebar di 68 gampong dengan persentase sebesar 29%. Adapun jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu dalam Wilayah Kota Lhokseumawe dapat dilihat 2.50 berikut:

Tabel 2.50
Cakupan Puskesmas dan Pembantu Puskesmas
Kota Lhokseumawe Tahun 2023

| No | Kecamatan | Jumlah Puskesmas | Jumlah Gampong | Jumlah Pembantu Puskesmas |
|-----------|------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1 | Muara Dua | 2 | 17 | 4 |
| 2 | Banda Sakti | 2 | 18 | 8 |
| 3 | Blang Mangat | 2 | 22 | 4 |
| 4 | Muara Satu | 1 | 11 | 4 |
| Jumlah | | 7 | 68 | 20 |
| Persen | | 175 | 34 | 29 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2024.

CC. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Pelayanan kesehatan ibu hamil di wujudkan melalui pemberian pelayanan antenatal sekurang-kurangnya 4 kali selama masa kehamilan, dengan distribusi waktu minimal 1 kali pada trisemester pertama (usia 0 - 12 minggu), minimal 1 kali pada trisemester kedua (usia kehamilan 12-24 minggu) dan minimal 2 kali pada trisemester ke tiga (usia kehamilan 24 minggu - lahir).

Standar waktu pelayanan tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan atau janin, berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan dan penanganan dini komplikasi kehamilan. Pelayanan antenatal di upayakan agar memenuhi standar kualitas yaitu:

- a. penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan
- b. pengukuran tekanan darah
- c. pengukuran lingkaran lengan atas (LILA)
- d. pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri)
- e. penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus toksoid sesuai status imunisasi
- f. pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan
- g. penentuan presentasi janin dan denyut jantung (DJJ)
- h. pelaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling termasuk keluarga berencana)
- i. pelayanan tes laboratorium sederhana, minimal tes hemoglobin darah (HB), pemeriksaan protein urin dan pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya) dan tatalaksana kasus.

Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil dapat di nilai dengan menggunakan indikator cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali oleh tenaga kesehatan, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu Tahun. Sedangkan cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali sesuai jadwal yang di anjurkan, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu Tahun. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilan ke tenaga kesehatan.

Dari tabel di bawah ini terlihat pada Tahun 2020 K4 meningkat menjadi sebesar 95.41% menunjukkan semakin baiknya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan ibu

hamil yang di berikan oleh tenaga kesehatan. Pada tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa cakupan K4 dari Tahun ke Tahun relatif tidak terlalu stabil. Tahun 2019 cakupan kunjungan ibu hamil sebesar 90.45% selanjutnya Tahun 2020 sebesar 95.41%, sedangkan Tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 96% namun tahun 2022 cakupan kunjungan ibu hamil k4 terjadi penurunan menjadi 92.5% dan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 83.87%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.51
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|-------------------|---|-------|------|------|------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah Ibu Hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 | 4472 | 4597 | 4191 | 4069 | 3643 |
| 2 | Jumlah sasaran Ibu Hamil | 4944 | 4818 | 4366 | 4397 | 4396 |
| Persentase | | 90,4 | 95,4 | 96 | 92.5 | 82.87 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2024.

DD. Cakupan Pelayanan Nifas

Nifas adalah periode mulai dari 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan. Pelayanan kesehatan ibu nifas sesuai standar yang di lakukan sekurang – kurangnya 3 (tiga) kali sesuai jadwal yang di anjurkan yaitu pada 6 jam sampai dengan 3 hari pasca persalinan pada hari ke – 4 sampai dengan hari ke – 28 pasca persalinan pada hari ke -29 sampai dengan hari ke – 42 pasca persalinan. Jenis pelayanan kesehatan ibu nifas yang diberikan meliputi :

- a. pemeriksaan tanda vital (tekanan darah,nadi,nafas dan suhu)
- b. pemeriksaan tinggi puncak rahim (fundus uteri)
- c. pemeriksaan lochia dan cairan pervaginam lain
- d. pemeriksaan payudara dan pemberian anjuran ASI eksklusif
- e. pemberian komunikasi informasi dan edukasi (KIE) kesehatan ibu nifas dan bayi baru lahir, termasuk keluarga berencana
- f. pelayanan keluarga berencana pasca persalinan
- g. keberhasilan upaya kesehatan ibu nifas di ukur melalui indikator cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas (KF3). Indikator ini menilai kemampuan dalam menyediakan

pelayanan kesehatan ibu nifas yang berkualitas sesuai standar.

Pada tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa cakupan kunjungan nifas (KF3) dalam kurun waktu 5 Tahun terakhir cenderung fluktuatif, pada Tahun 2019 cakupan pelayanan nifas sebesar 83.03% dan Tahun 2020 naik menjadi 90.1%. Sedangkan Tahun 2021 terus meningkat menjadi sebesar 97.5% dan tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 89% dan tahun 2023 kembali turun menjadi 82.37%. Capaian indikator KF merupakan hasil yang baik dari upaya yang di lakukan oleh petugas dan juga termasuk peran masyarakat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.52
Cakupan Pelayanan Nifas
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|-------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah Peserta Ibu Nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu | 3910 | 4146 | 4064 | 3736 | 3458 |
| 2 | Jumlah seluruh ibu nifas disatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu | 4709 | 4599 | 4167 | 4198 | 4198 |
| Persentase | | 83,03 | 90,1 | 97.5 | 89.0 | 82.37 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2024.

EE. Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani

Dengan melihat adanya resiko kematian yang tinggi dan berbagai serangan komplikasi pada minggu pertama, maka setiap bayi baru lahir harus mendapatkan pemeriksaan sesuai standar lebih sering (minimal 2 kali) dalam minggu pertama langkah ini di lakukan untuk menemukan secara dini jika terdapat penyakit-penyakit atau tanda bahaya pada neonatus sehingga pertolongan dapat segera diberikan untuk mencegah penyakit bertambah berat yang dapat menyebabkan kematian bayi. Kunjungan neonatus merupakan salah satu intervensi untuk menurunkan kematian bayi baru lahir.

Kunjungan neonatal pertama adalah (KN 1) adalah cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (umur 6 jam – 48 jam) di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan. Pelayanan yang di berikan saat kunjungan neonatal adalah pemeriksaan sesuai standar Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) serta konseling perawatan bayi baru lahir termasuk ASI eksklusif dan perawatan tali pusat. Pada kunjungan neonatal pertama (KN1), bayi baru lahir mendapatkan vitamin K1 injeksi dan imunisasi hepatitis BO bila belum di berikan pada saat lahir.

Selain KN1, indikator yang menggambarkan pelayanan kesehatan bagi neonatal adalah KN lengkap yang mengharuskan agar setiap bayi baru lahir memperoleh pelayanan kunjungan minimal 3 kali, yaitu 1 kali pada 6–48 jam, 1 kali pada 3–7 hari, 1 kali pada 8–28 hari sesuai standar di satu wilayah kerja satu Tahun. Capaian KN lengkap sesuai dengan tabel di bawah ini adalah Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2019 sebesar 40.8% dan Tahun 2020 sebesar 58.5%. Sedangkan Tahun 2021 menurun menjadi sebesar 48.6%. dan Tahun 2022 menurun kembali menjadi 44.6% namun tahun 2023 jumlah kasus neonatus yang ditangani menurun menjadi 274 kasus dari 274 kasus neonates yang ada sehingga mencapai 100%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.53
Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|-------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah neonatus dengan komplikasi yang ditangani | 258 | 381 | 314 | 285 | 274 |
| 2 | Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada | 632 | 651 | 648 | 639 | 274 |
| Persentase | | 40.8 | 58.5 | 48.6 | 44.6 | 100 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2024.

FF. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Kehidupan anak, usia di bawah lima Tahun memperoleh bagian yang sangat penting, usia tersebut merupakan landasan yang membentuk masa depan kesehatan, kebahagiaan, pertumbuhan perkembangan dan hasil pembelajaran anak di sekolah, keluarga masyarakat dan kehidupan secara umum.

Kesehatan bayi dan balita harus di pantau untuk memastikan kesehatan mereka selalu dalam kondisi optimal. Penilaian perkembangan gerak kasar, gerak halus bicara dan bahasa, sosialisasi dan kemandirian, pemeriksaan daya lihat. Bila ditemukan penyimpangan atau gangguan perkembangan harus dilakukan rujukan kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi. Untuk itu di pakai indikator-indikator yang bisa menjadi ukuran keberhasilan upaya peningkatan kesehatan bayi dan balita, salah satu di antaranya adalah pelayanan kesehatan anak balita. Adapun batasan anak balita adalah setiap anak yang berada pada kisaran umur 12 sampai dengan 59 bulan. Pelayanan kesehatan pada anak balita di lakukan oleh tenaga kesehatan dan memperoleh:

1. pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali seTahun (penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan 8 kali dalam setahun)
2. pemberian vitamin A, dua kali dalam setahun yakni setiap bulan Februari dan Agustus
3. stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang balita minimal 2x kali dalam setahun.
4. pelayanan anak balita sakit sesuai standar menggunakan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)

Adapun capaian indikator pelayanan kesehatan anak balita yang mendapat pelayanan kesehatan 8 kali yaitu pada Tahun 2019 sebesar 97.63% pada Tahun 2020 persentasenya menurun kembali menjadi sebesar 87.23% sedangkan pada Tahun 2021 data yang diperoleh sebesar 85.3% dan tahun 2022 terjadi penurunan kembali menjadi 81.0% dan tahun 2023 mengalami

peningkatan menjadi 84.16%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.54
Cakupan Pelayanan Anak Balita
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|-------------------|---|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali disatu wilayah kerja pada waktu tertentu | 15487 | 15200 | 13600 | 12698 | 13194 |
| 2 | Jumlah seluruh anak balita disatu wilayah kerja dalam waktu yang sama | 15863 | 17425 | 15933 | 15677 | 15677 |
| Persentase | | 97.63 | 87.23 | 85.3 | 81.0 | 84.16 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2024

GG. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Usia masuk sekolah merupakan hal yang penting bagi tahap perkembangan anak. Banyak masalah kesehatan terjadi pada anak usia sekolah. Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti menggosok gigi dengan baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun, karies gigi, kecacingan, kelainan refraksi ketajaman penglihatan dan masalah gizi. Pelayanan kesehatan pada anak termasuk pula intervensi pada anak usia sekolah.

Selain itu, usia anak sekolah merupakan sasaran yang strategis untuk pelaksanaan program kesehatan, karena selain jumlahnya yang besar, mereka juga merupakan sasaran yang mudah dijangkau karena terorganisir dengan baik. Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini diutamakan untuk siswa SD/ sederajat kelas 1. Pemeriksaan kesehatan di laksanakan oleh tenaga kesehatan bersama tenaga lainnya yang terlatih (guru UKS/UKSG dan dokter kecil).

Tenaga kesehatan disini adalah tenaga medis, tenaga keperawatan atau petugas puskesmas lainnya yang telah di latih sebagai tenaga pelaksana UKS/UKSG. Guru UKS/UKSG adalah guru kelas atau guru yang ditunjuk sebagai pembina UKS/UKSG di sekolah dan telah dilatih tentang UKS/UKSG. Dokter kecil adalah kader kesehatan sekolah yang biasanya berasal dari murid

kelas 4 dan 5 SD dan setingkat yang telah mendapatkan pelatihan dokter kecil. Hal ini dimaksud agar pembelajaran tentang kebersihan dan kesehatan gigi bisa dilaksanakan sedini mungkin. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut pada khususnya dan kesehatan tubuh serta lingkungan umumnya.

Kegiatan penjangkaran kesehatan selain untuk mengetahui secara dini masalah-masalah kesehatan anak sekolah sehingga dapat dilakukan tindakan secepatnya untuk mencegah keadaan yang lebih buruk, juga untuk memperoleh data atau informasi dalam menilai perkembangan kesehatan anak sekolah maupun untuk dijadikan pertimbangan dalam menyusun perencanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Kegiatan penjangkaran kesehatan ini terdiri dari :

1. Pemeriksaan kebersihan perorangan (rambut, kulit dan kuku)
2. Pemeriksaan status gizi melalui pengukuran antropometri
3. pemeriksaan ketajaman indera (penglihatan dan pendengaran)
4. Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut
5. pemeriksaan laboratorium untuk anemia dan kecacingan
6. Pengukuran kebugaran jasmani
7. Deteksi dini masalah mental emosional

Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat khususnya mulut dan gigi adalah pada Tahun 2019 sebesar 91.93 persen. Dan Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 65.59 persen. Sedangkan Tahun 2021 sebesar 85.37%. Tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 95.57%. dan Tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 95.73%. Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat khususnya mulut dan gigi berarti pengetahuan dan tingkat kepedulian masyarakat untuk mempertahankan gigi cukup baik melalui upaya pencegahan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.55
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| Tahun | Kecamatan | Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kes oleh tenaga terlatih disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu | Jumlah murid SD dan setingkat disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama | Persentase |
|--------------|------------------|---|---|-------------------|
| 2019 | Banda Sakti | 1817 | 1828 | 91.93 |
| | Muara Dua | 687 | 772 | |
| | Muara Satu | 541 | 762 | |
| | Blang Mangat | 610 | 614 | |
| 2020 | Banda Sakti | 2338 | 4200 | 65.59 |
| | Muara Dua | 2833 | 4205 | |
| | Muara Satu | 3352 | 4829 | |
| | Blang Mangat | 1422 | 1928 | |
| 2021 | Banda Sakti | 7022 | 10024 | 85.37 |
| | Muara Dua | 5835 | 6020 | |
| | Muara Satu | 5567 | 4325 | |
| | Blang Mangat | 1495 | 2963 | |
| 2022 | Banda Sakti | 9041 | 9651 | 95.57 |
| | Muara Dua | 6028 | 6043 | |
| | Muara Satu | 4227 | 4336 | |
| | Blang Mangat | 2686 | 2970 | |
| 2023 | Banda Sakti | 13900 | 15207 | 95.73 |
| | Muara Dua | 9382 | 9529 | |
| | Muara Satu | 6742 | 6835 | |
| | Blang Mangat | 4671 | 4671 | |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2024.

HH. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Penduduk atau masyarakat sasaran program yang telah di tetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan kab/kota setempat. Seluruh penduduk umumnya di Provinsi Aceh dan khususnya Kota Lhokseumawe terlindung oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan mendapat subsidi pemerintah dan pemda di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Kunjungan pasien baru adalah seseorang yang baru berkunjung ke sarana kesehatan dengan kasus penyakit baru. Sarana kesehatan strata pertama adalah tempat pelayanan kesehatan meliputi antara lain: puskesmas, balai pengobatan pemerintah dan swasta, praktek bersama dan perorangan.

Pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin adalah jumlah kunjungan pasien rawat jalan masyarakat miskin dan hampir miskin di sarana kesehatan strata pertama di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2019 sebesar 1290% kemudian pada tahun 2020 menurun

menjadi 868%, dan pada tahun 2021 menurun kembali menjadi 851% serta tahun 2022 menjadi 470% dan tahun 2023 menurun menjadi 33.93%. Kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan melebihi 100% dikarenakan kunjungan yang berulang-ulang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.56
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|--------------------------|---|-------------|------------|------------|------------|---------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Kunjungan Pasien miskin disarana kesehatan strata 1 | 297.507 | 197.068 | 198.986 | 108.274 | 218.629 |
| 2 | Jumlah seluruh penduduk miskin | 23.050 | 22.690 | 23.380 | 23.030 | 86.427 |
| Cakupan pelayanan | | 1290 | 868 | 851 | 470 | 252.73 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2024.

II. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)

Sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 741/VII/2008 SPM Bidang Kesehatan yang terdiri dari 4 jenis pelayanan dengan 18 Indikator. Salah satu Standart Pelayanan Minimal (SPM-K) adalah pelayanan kesehatan rujukan. Ada 2 Indikator untuk menilai pelayanan kesehatan rujukan yaitu :

1. cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan rumah sakit (RS), Puskesmas (PKM) dan sarana kesehatan lainnya.
2. cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.

Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat level 1 adalah tempat pelayanan gawat darurat yang memiliki Dokter Umum *on site* (berada di tempat) selama 24 jam dengan kualitas GELS (*General Emergency life support*) dan/atau ATLS (*Advance Trauma life support*) serta ACLS (*Advance Cardiac life support*) yang di lengkapi dengan alat transportasi dan komunikasi. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 Kota Lhokseumawe pada Tahun 2019-2021 adalah 90% bertambahnya rumah sakit namun tidak memiliki Pelayanan Gawat Darurat Level 1

yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS). Tahun 2022-2023 Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) sudah mencapai 100%.

Tabel 2.57
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|-------------------|--|-------|------|------|------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 2 | Jumlah Rumah Sakit | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Persentase | | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2024.

JJ. Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi \leq 24 Jam

Kejadian luar biasa (KLB) adalah kejadian atau peristiwa dalam masyarakat atau wilayah dari suatu kasus penyakit tertentu yang secara nyata melebihi dari jumlah yang di perkirakan. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Menteri menetapkan dan mencabut daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang berjangkit wabah sebagai daerah wabah (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 949 Tahun 2004).

Kriteria KLB adalah kriteria tentang kejadian luar biasa mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Nomor 451/91, tentang pedoman penyelidikan dan penanggulangan kejadian luar biasa. Menurut aturan itu suatu kejadian dinyatakan luar biasa jika unsur:

1. timbulnya suatu penyakit menular yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal
2. peningkatan kejadian penyakit/kematian terus menerus selama 3 kurun waktu berturut-turut menurut jenis penyakitnya (jam, hari, minggu)

3. peningkatan kejadian penyakit/kematian 2 kali lipat atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya (jam, hari, minggu, bulan, Tahun)
4. jumlah penderita baru dalam satu bulan menunjukkan kenaikan 2 kali lipat atau lebih bila dibandingkan dengan angka rata-rata perbulan dalam Tahun sebelumnya.

Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi ≤ 24 jam pada tabel di bawah ini menggambarkan ada terjadi KLB tertinggi pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 sebesar 0 dengan penanganan 0%. Sedangkan pada Tahun 2021 mencapai 100% dengan jumlah kasus 4 kasus dan Tahun 2022 terdapat 2 kasus dengan penanganan 100% dan tahun 2023 dengan jumlah kasus 4 kasus dengan penanganan 100%.

Tabel 2.58
Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan
Penyelidikan Epidemiologi ≤ 24 jam Kota Lhokseumawe
Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|--------|---|-------|------|------|------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah KLB didesa/kelurahan yang ditangani ≥ 24 jam dalam periode tertentu | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 2 | Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| Jumlah | | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |

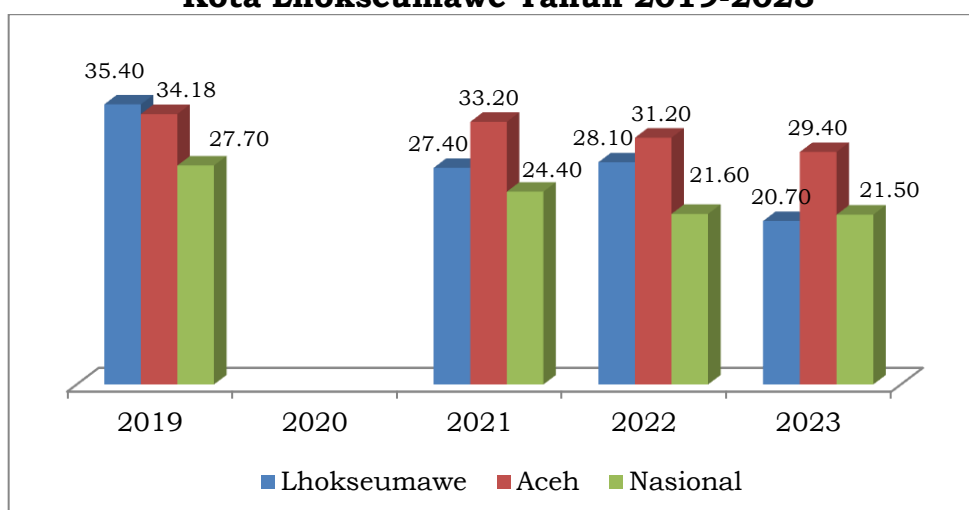
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2024.

M.M Stunting

Stunting adalah masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Anak yang menderita stunting akan lebih rentan terhadap penyakit dan ketika dewasa berisiko untuk mengidap penyakit degeneratif. Dampak stunting tidak hanya pada segi kesehatan tetapi juga mempengaruhi tingkat kecerdasan anak. Balita stunting disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Balita stunting di masa yang akan datang akan mengalami kesulitan dalam mencapai

perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Prevelensi Balita Stunting Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Gambar 2.23
Prevelensi Balita Stunting
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023



Sumber: Buku Saku Hasil SSGI 2023

Prevelensi Stunting Kota Lhokseumawe mengalami fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Pada Tahun 2019 Stunting Kota Lhokseumawe mencapai 35,40% persen, sedangkan Aceh sebesar 34.18 lebih tinggi diatas Nasional sebesar 27.70%. Prevelensi Stunting Lhokseumawe mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 27.40% dan meningkat 0.7 persen pada tahun 2023 menjadi 20.70 % dan Aceh mengalami penurunan menjadi 29.40% yang lebih rendah dari nasional sebesar 21.5%.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk menurunkan angka prevalensi Stunting Kota Lhokseumawe dengan peningkatan gizi masyarakat melalui program pemberian makanan tambahan dan dengan melakukan inovasi yang diluncurkan BKKBN salah satunya program Bapak asuh anak stunting yang melibatkan seluruh masyarakat, Forkopinda, institusi, perusahaan dan stakeholder dalam memberikan bantuan untuk penanganan stunting.

2.1.3.2.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap

Jalan sebagai suatu prasarana transportasi darat memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan suatu wilayah. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, tentang Jalan, menyatakan bahwa jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting dalam mendukung bidang-bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, serta dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah, agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional. Peran jalan yang sangat penting ini membawa implikasi pada upaya dan kerja keras Pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan infrastruktur jalan yang berkualitas.

Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Ketersediaan jalan dalam kondisi mantap mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Perkembangan aktifitas pembangunan ekonomi dan sosial di Kota Lhokseumawe cenderung menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dan terus diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang berkesimbangan dan berkelanjutan. Salah satu hal yang harus diberi perhatian dan menjadi prioritas adalah menyangkut penanganan ketersediaan sarana dan prasarana dasar seperti jalan dan jembatan.

Arah pengembangan prasarana transportasi jalan di Kota Lhokseumawe adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi

wilayah yang berdaya saing, melalui peningkatan prasarana angkutan barang massal yang terintegrasi untuk mewujudkan perluasan pasar dan menciptakan kompetisi melalui keamanan, kenyamanan dan kemudahan konektivitas menuju pusat-pusat aktivitas ekonomi agar dapat saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik telah mempunyai andil besar terhadap kemudahan mobilitas perdagangan barang, mobilitas penumpang, mobilitas sosial, kemudahan akses terhadap sarana- transportasi lainnya.

Kota Lhokseumawe memiliki panjang jalan 412.468 Km dengan jumlah ruas jalan mencapai 699 ruas yang tersebar pada 4 (empat) kecamatan dengan rincian sebagaimana dideskripsikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.59
Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 (Km)

| Tahun | Jalan Kota | | | | |
|-------|-----------------------|----------------|---------|---------|--------|
| | Panjang Jalan seluruh | Kondisi Mantap | | | |
| | | Baik | Sedang | Mantap | Persen |
| 2019 | 412,468 | 171,297 | 106,994 | 278,291 | 67.47 |
| 2020 | 412,468 | 171,297 | 106,994 | 278,291 | 67.47 |
| 2021 | 412,468 | 171,297 | 106,994 | 278,291 | 67.47 |
| 2022 | 412,468 | 279,983 | 37,493 | 317,476 | 76,97 |
| 2023 | 412,468 | 258,494 | 28,254 | 286,748 | 69,52 |

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2024

Meskipun proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap di Kota Lhokseumawe cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya, akan tetapi kondisi ini masih belum mampu mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Proporsi panjang jaringan jalan Kota Lhokseumawe pada Tahun 2019 persentase panjang jalan mantap sebesar 67.47% dari kondisi jalan mantap sepanjang 278.291 km. Tahun 2022 kondisi jalan mantap sepanjang 317.476 km mengalami peningkatan dengan capaian 76.97%. Sementara pada tahun 2023 persentase panjang jaringan jalan menurun menjadi 69.52 persen dengan panjang jalan mantap 286.748 km. Kerusakan jalan biasanya timbul akibat genangan yang terjadi karena kondisi *drain hole* (lubang

pembuangan) yang tidak memadai. Kerusakan lainnya juga ditimbulkan oleh kelebihan muatan *tonase* dari truck yang melintasi jalanan tersebut.

Kondisi jalan adalah suatu hal yang sangat perlu diperhatikan dalam menentukan program pemeliharaan jalan. Menurut Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Bina Marga 1992, kondisi jalan dapat diklasifikasikan sebagai berikut;

1. jalan dengan kondisi baik adalah jalan dengan permukaan perkerasan yang benar-benar rata, tidak ada gelombang dan tidak ada kerusakan permukaan;
2. jalan dengan kondisi sedang adalah jalan dengan kerataan permukaan perkerasan sedang, mulai dari gelombang tetapi tidak ada kerusakan permukaan;
3. jalan dengan kondisi rusak ringan adalah jalan dengan permukaan perkerasan sudah mulai bergelombang, mulai ada kerusakan permukaan dan penambalan kurang dari 20 dari luas jalan yang ditinjau;
4. jalan dengan kondisi rusak berat adalah jalan dengan permukaan perkerasan sudah banyak kerusakan seperti bergelombang, retak-retak buaya, dan terkelupas yang cukup besar 20-60 dari ruas jalan yang ditinjau disertai dengan kerusakan lapis pondasi seperti amblas, sungkur, dan sebagainya.

Pada tabel berikut terdapat jenis, kondisi, kelas dan panjang jalan Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.60
Jenis, Kondisi, Kelas dan Panjang Jalan (Km) Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| Jenis, Kondisi, Kelas | Status | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Jalan Nasional | | | | | Jalan Provinsi | | | | | Jalan Kabupaten/Kota | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Jalan Permukaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspal | 23.20 | 40.45 | 40.45 | 40,45 | 40,45 | 4.60 | 2.80 | 2.80 | 2,80 | 2,80 | 288.630 | 288.630 | 297.943 | 314,60 | 314,60 |
| Paklah (Kerikil) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.985 | 71.985 | 48.412 | 45,94 | 45,61 |
| Perkerasan Beton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.851 | 51.851 | 66.113 | 51,93 | 51,93 |
| Tanah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.240 | 2.240 | - | - | - |
| Jumlah | 23.20 | 40.45 | 40.45 | 40,45 | 40,45 | 4.60 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 412.468 | 412.468 | 412.468 | 412,468 | 412,468 |
| Kondisi Jalan | | | | | | | | | | | | | | | |
| .Baik | 23.20 | 40.45 | 40.45 | 40,45 | 40,45 | 4.60 | 2.80 | 2.80 | 2,80 | 2,80 | 108.157 | 108.157 | 225.342 | 280,01 | 258,51 |
| Sedang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131.595 | 131.595 | 96.447 | 39,57 | 28,27 |
| Rusak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.545 | 107.545 | 90.641 | 59,42 | 94,70 |
| Rusak Berat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.122 | 65.122 | 38.02 | 33,47 | 30,99 |
| Jumlah | 23.20 | 40.45 | 40.45 | 40,45 | 40,45 | 4.60 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 412.468 | 412.468 | 412.468 | 412,468 | 412,468 |
| Kelas Jalan | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kelas I | 23.20 | 40.45 | 40.45 | 40,45 | 40,45 | 4.60 | 2.80 | 2.80 | 2,80 | 2,80 | 286.389 | 286.389 | 290.386 | 286.389 | 286.389 |
| Kelas II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.988 | 71.988 | 73.900 | 71.988 | 71.988 |
| Kelas III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.851 | 51.851 | 55.851 | 51.851 | 51.851 |
| Tidak Terperinci | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.240 | 2.240 | 2.780 | 2.240 | 2.240 |
| Jumlah | 23.20 | 40.45 | 40.45 | 40,45 | 40,45 | 4.60 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 412.468 | 412.468 | 412.468 | 412,468 | 412,468 |

Sumber: Aceh Dalam Angka Tahun 2024 dan LDA 2024, Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2024

B. Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk

Berdasarkan pengelompokan jalan, terdapat lima kewenangan administrasi menurut statusnya. Pengelompokan tersebut dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan kota. Dalam Surat Keputusan Walikota Nomor 206 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 400 Tahun 2013 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kota Lhokseumawe disebutkan bahwa panjang jalan Kota Lhokseumawe sepanjang 412,468 Km. Berikut tabel rasio panjang jalan per satuan jumlah penduduk:

Tabel 2.61
Rasio Panjang Jalan Dengan Per Satuan Jumlah Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | URAIAN | Tahun | | | | |
|----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah Panjang Jalan (Km) | 412,468 | 412,468 | 412,468 | 412,468 | 412,468 |
| 2 | Jumlah Penduduk (Jiwa) | 207.202 | 188.713 | 189.941 | 191.396 | 196.067 |
| | Rasio | 1.99 | 2.18 | 2.17 | 2.15 | 2.10 |

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 sebesar 1.99 dan tahun 2023 menjadi 2.10, hal ini di pengaruhi oleh bertambahnya jumlah penduduk.

C. Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam)

Pengelompokan jalan kota dalam kondisi baik yang dapat dilalui dengan kecepatan > 40 Km/Jam termasuk dalam pengelompokan jalan kolektor. Pengertian jalan kolektor ialah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, jumlah jalan masuk dibatas serta melayani daerah-daerah di sekitarnya. Dengan cirinya kendaraan yang melaluinya yaitu kendaraan ringan <10 ton, kemudian dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan sedang (40-80 Km/Jam). Berikut data tentang panjang jalan kota dalam kondisi baik (>40 Km/Jam).

Tabel 2.62
Persentase Panjang Jalan Dilalui Roda 4
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jalan kota dalam kondisi baik (> 40 Km/ Jam) | 171.297 | 171.297 | 171.297 | 279.983 | 258.494 |
| 2 | Panjang Jalan Kota Lhokseumawe (Km) | 412,468 | 412,468 | 412,468 | 412,468 | 412.468 |
| Persentase | | 41.53 | 41.53 | 41.53 | 67.88 | 62.67 |

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2024

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa kondisi jalan di Kota Lhokseumawe semakin tahun semakin meningkat kondisi baiknya. Sedangkan pada tahun 2019-2021 kondisi jalan kota dalam kondisi baik sepanjang 171.297 km. Pada Tahun 2022 jalan kota dalam kondisi baik bertambah sepanjang 108.686 menjadi 279.983 km dari tahun 2021 dan pada tahun 2023 jalan kota dalam kondisi baik mengalami penurunan menjadi 258.494 km atau 62.67%.

D. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Terdapat tiga jenis pemakaman dalam wilayah Kota Lhokseumawe, Tempat Pemakaman Umum (TPU), Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU), dan Tempat Pemakaman Khusus (TPK). Berikut data dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.63
Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2023

| No | URAIAN | 2023 | | |
|--|------------------------------------|--------|--------|---------------|
| | | Jumlah | Luas | Daya Tampung |
| 1 | Tempat Pemakaman Umum (TPU) | 74 | 62.520 | 24.000 |
| 2 | Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) | 205 | 10.320 | 2.040 |
| 3 | Tempat Pemakaman Khusus (TPK) | 2 | 2.500 | 1.000 |
| 4 | Lain-Lain | - | - | - |
| 5 | Jumlah Tempat Pemakaman | 281 | 75.340 | 27.040 |
| 6 | Jumlah Penduduk (Jiwa) | | | 196.067 |
| Rasio TPU Per Satuan Penduduk (6/5) | | | | 275.82 |

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2024

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sampai dengan Tahun 2023 jumlah tempat pemakaman yang ada di Kota Lhokseumawe sebanyak 281 tempat dengan luas sebesar 75,340 ha dengan rincian 74 tempat pemakaman umum dengan luas lahan

62.520 ha, sementara tempat pemakaman bukan umum sejumlah 205 dengan luas lahan 10.320 ha, dan jumlah tempat pemakaman khusus sebanyak 2 dengan rasio TPU per satuan penduduk sebesar 275.82.

E. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Kebutuhan akan tempat ibadah bagi penduduk Kota Lhokseumawe dirasakan telah mencukupi. Jumlah kepadatan penduduk di Kecamatan Banda Sakti sebesar 7.104 jiwa/Km², Blang Mangat 502 jiwa/Km², Muara Satu 626 jiwa/Km², Muara Dua 918 jiwa/Km². Jumlah tempat ibadah pada Kecamatan Banda Sakti sebanyak 17 unit Masjid, 17 unit Mushalla, 18 Meunasah, 3 unit Gereja dan 1 unit Vihara. Pada kecamatan Muara Satu terdapat 9 unit Mesjid, 45 unit Mushalla dan 11 unit Meunasah. Sedangkan pada kecamatan Blang Mangat terdapat 16 unit Mesjid, 10 unit Mushalla dan 22 unit Meunasah, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.64
Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| NO | URAIAN | TAHUN | | | | |
|------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Mesjid | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 |
| 2 | Mushalla | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 3 | Meunasah | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 4 | Gereja | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Vihara | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| a | Jumlah Rumah Ibadah | 216 | 216 | 217 | 217 | 217 |
| b | Jumlah Penduduk (Jiwa) | 207.202 | 188.713 | 189.941 | 191.396 | 196.067 |
| b/a | Rasio | 1.03 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.11 |

Sumber : Kota Lhokseumawe Dalam Angka 2024

Dari tabel 2.64 di atas dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2019-2020 terdapat sebanyak 216 unit Rumah Ibadah yang tersebar di empat kecamatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe dan tahun 2021-2023 bertambah menjadi 217 unit rumah ibadah. Jumlah mesjid sebanyak 52 unit, Mushalla sebanyak 93 unit, Meunasah sebanyak 68 unit, Gereja 3 unit, dan Vihara sebanyak 1 Unit dengan rasio tempat ibadah sebesar 1.03 di tahun 2018 menjadi 1.11 pada tahun 2023 dengan bertambahnya jumlah penduduk.

2.1.3.2.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

A. Rasio Permukiman Layak Huni

Dari beberapa kawasan perumahan yang telah ada di kota ini, hanya beberapa kawasan saja yang memiliki prasarana dasar penting yang telah tersedia seperti, kompleks perumahan PT. Perta Arun Gas (PAG), perumahan Komplek Tsunami Blang Crum yang dibangun oleh *Save The Children*, Komplek Mutiara, dan Komplek Asrama TNI/Polri dan instansi vertikal yang layak. Tapi hanya Komplek PT. PAG saja yang memiliki pusat pelayanan kesehatan, pendidikan, kuliner serta sarana olah raga seperti stadion bola kaki, kolam renang, tenis *outdoor*, *volleyball*, basket, badminton, *jogging track* dan golf. Sedangkan Asrama TNI yang berlokasi di Kecamatan Banda Sakti hanya mempunyai pusat pelayanan kesehatan dan lapangan *volleyball*, basket, dan *jogging track* saja.

B. Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota-kota besar di Indonesia, bahkan kota-kota besar di negara berkembang lainnya. Telaah tentang permukiman kumuh (*slum*), pada umumnya mencakup tiga segi, yaitu, *pertama*, kondisi fisiknya. Kondisi fisik tersebut antara lain tampak dari kondisi bangunannya yang sangat rapat dengan kualitas konstruksi rendah, jaringan jalan tidak berpola dan tidak diperkeras, sanitasi umum dan drainase tidak berfungsi serta sampah belum dikelola dengan baik. *Kedua*, kondisi sosial ekonomi budaya komunitas yang bermukim di permukiman tersebut. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berada di kawasan permukiman kumuh antara lain mencakup tingkat pendapatan rendah, norma sosial yang longgar, budaya kemiskinan yang mewarnai kehidupannya yang antara lain tampak dari sikap dan perilaku yang apatis. *Ketiga*, dampak oleh kedua kondisi tersebut. Kondisi tersebut sering juga mengakibatkan kondisi kesehatan yang buruk, sumber pencemaran, sumber penyebaran penyakit dan perilaku menyimpang, yang berdampak pada kehidupan keseluruhannya.

Peningkatan permukiman kumuh lebih banyak disebabkan adanya urbanisasi yang terus menerus terjadi. Urbanisasi yang tidak

terkontrol ini mengakibatkan kurangnya lokasi hunian di perkotaan. Sehingga untuk keberlanjutan hidup para urban (penduduk kota) tinggal di daerah-daerah yang tidak layak huni.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe. Kecamatan Banda Sakti merupakan daerah yang paling luas kawasan kumuhnya. Pada Surat Keputusan tersebut terdapat 2 (dua) penanganan, yaitu skala kawasan dan skala gampong seluas 78,46 ha. Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) berharap kawasan kumuh dalam wilayah Kota Lhokseumawe dapat ditanggulangi secara komprehensif. Berikut tabel untuk lebih jelasnya:

Tabel 2.65
Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2023

| No. | Uraian | Luas Kumuh (Ha) | Gampong | Kecamatan | Tingkat Kekumuhan |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------------|
| Kawasan Prioritas Penanganan | | | | | |
| 1. | Kampung Jawa-Hagu (JAGU) | 22,51 | Kampung Jawa | Banda Sakti | Kumuh Sedang |
| | | | Hagu Selatan | | |
| 2. | Pusong | 32,56 | Pusong Lama | Banda Sakti | Kumuh Ringan |
| | | | Pusong Baru | | |
| Total Luas | | 55,07 | | | |
| Gampong Prioritas Penanganan | | | | | |
| 1. | Kuta Blang | 7,56 | Kuta Blang | Banda Sakti | Kumuh Ringan |
| 2. | Simpang Empat | 8,32 | Simpang Empat | Banda Sakti | Kumuh Ringan |
| 3. | Blang Naleung Mameh | 7,51 | Blang Naleung Mameh | Muara Satu | Kumuh Ringan |
| Total Luas | | 23,39 | | | |

Sumber : SK Walikota Lhokseumawe Nomor 35 Tahun 2020

Tujuan Pendataan Permukiman Kumuh ini ditujukan untuk:

1. Membantu Pemerintah Kabupaten/Kota memperoleh dan menyusun data dan profil permukiman kumuh di wilayahnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan

- dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
2. Menjadi panduan operasional bagi Pemerintah Kota/Kabupaten dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pendataan dan penyusunan profil permukiman kumuh;
 3. Memastikan hasil pendataan permukiman kumuh menjadi basis penetapan SK Kumuh Bupati/Walikota.

Indikator permukiman kumuh telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian, sedangkan permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Berikut dibawah ini terdapat tabel persentase penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Lhokseumawe dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023;

Tabel 2.66
Persentase Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Luas Kumuh (Ha) | 29,59 | 78,46 | 78,46 | 78,46 | 78,46 |
| 2 | Luas Wilayah (Ha) | 18,106 | 18,106 | 18,106 | 18,106 | 18,106 |
| Persentase | | 61,29 | 23,18 | 23,18 | 23,18 | 23,18 |

Sumber :

1. SK Walikota Lhokseumawe Nomor 395 Tahun 2019
2. SK Walikota Lhokseumawe Nomor 35 Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa pada Tahun 2019 terdapat 17 gampong yang masuk dalam delinasi kumuh dengan luas 29,59 ha. Delinasi kumuh untuk Tahun 2019 merujuk Surat Keputusan Walikota Nomor 395 Tahun 2019. Pada tahun 2022 kawasan JAGU melalui dana DOKA Tahun Anggaran 2022 adanya lanjutan penanganan, yaitu lanjutan pedestrian, dan timbunan pada

Gampong Kampung Jawa. Sedangkan Gampong Batuphat Timur ada pembangunan sumur bor, saluran dan jalan.

C. Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni

Rumah Layak Huni atau RLH adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuni. Dulu rumah dikatakan layak huni jika memenuhi satu faktor saja. Sedangkan saat ini berdasarkan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, ada empat faktor atau kriteria dan semuanya harus terpenuhi. yakni mulai dari strukturnya, luasannya, sanitasinya, juga air bersihnya. Beberapa alasannya adalah jumlah pengangguran yang tinggi dan pendapatan yang masih rendah, sehingga mereka mencari tempat tinggal atau membangun rumah tidak layak huni.

Berikut dibawah ini adalah tabel persentase ketersediaan rumah layak huni Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023;

Tabel 2.67
Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni
Kota Lhokseumawe 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|-------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah rumah layak huni | 35.610 | 35.678 | 35.858 | 37.074 | 37.126 |
| 2 | Jumlah rumah tinggal | 43.331 | 43.331 | 51.827 | 55.661 | 55.661 |
| Persentase | | 82,18 | 82,34 | 69,19 | 66.61 | 66.70 |

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase ketersediaan rumah layak huni dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 mengalami peningkatan jumlah rumah tinggal sebanyak 1516 unit rumah dengan persentase rumah layak huni sebanyak 66,70 persen, sedangkan rumah tidak layak huni mencapai 33,30 persen pada tahun 2023. Sebagian besar rumah tidak layak huni berada di daerah pesisir pantai Jagu dan Pusong.

D. Rasio Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Fasilitas umum dan fasilitas sosial

merupakan sebuah prasarana atau sarana penunjang layanan kegiatan yang ada dalam perumahan.

Penyediaan atau bantuan PSU adalah pemberian sebagian dari komponen PSU yang merupakan satu kesatuan jaringan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang fungsional (Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman).

Pada tahun 2023 jumlah PSU yang dibangun/direhab sebanyak 42 unit, diantaranya adalah Pemb. Jalan Paving Block Museum Kota Lhokseumawe Gp. Mon Geudong Kec. Banda Sakti, Pengaspalan Pelataran Parkir Pasar Batuphat, Revitalisasi Situs Sejarah Tempat Syahid Tgk Abdul Jalil Cot Plieng Gp. Blang Buloh Kec. Blang Mangat, Lanjutan Pembangunan Mushalla KP3 Gp. Kota Lhokseumawe Kec. Banda Sakti dan banyak lagi PSU yang dibangun dan direhab. Jumlah PSU yang tersedia sampai dengan tahun 2023 sebanyak 1.609 unit dengan rasio PSU dalam kondisi baik sebesar 0,03, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.68
Rasio PSU dalam Kondisi Baik
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah PSU yang dibangun/rehab dalam kurun waktu 4 tahun | 94 | 117 | 140 | 55 | 42 |
| 2 | Jumlah PSU yang tersedia | 1.474 | 1.474 | 1.512 | 1.567 | 1.609 |
| Rasio | | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,04 | 0.03 |

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2024

D. Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah

Penataan bangunan adalah serangkaian kegiatan yang diperlukan sebagai bagian dari upaya pengendalian pemanfaatan ruang, terutama untuk mewujudkan lingkungan binaan, baik di perkotaan maupun di perkampungan, khususnya wujud fisik bangunan gedung dan lingkungannya.

Bangunan gedung untuk kepentingan strategi daerah Kota Lhokseumawe terdiri dari bangunan sosial, keagamaan, kesehatan dan bangunan publik lainnya.

Tabel 2.69
Persentase Penataan Bangunan Gedung
untuk kepentingan strategis Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|-------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah bangunan gedung yang ditata | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Jumlah keseluruhan bangunan gedung | 21 | 25 | 25 | 27 | 27 |
| Persentase | | 9,52 | 4,00 | 4,00 | 3,70 | 0.0 |

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2024

Persentase penataan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 adalah 0 persen karena tidak ada kegiatan penataan bangunan gedung.

E. Persentase Tidak Terjadi Genangan > 2 kali Setahun

Pertumbuhan dan perkembangan kota sangat dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk. Peningkatan yang sangat pesat dari populasi perkotaan berdampak terhadap kebutuhan ruang dan lahan yang semakin meningkat. Kebutuhan ruang dan lahan yang meningkat terutama untuk kebutuhan permukiman, perekonomian, pemerintahan, sosial dan lainnya. Disisi lain, lahan perkotaan yang tersedia sangat terbatas sehingga mengakibatkan pengalihfungsian guna lahan untuk memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana yang mendukung kebutuhan ruang dan lahan kegiatan perkotaan tersebut. Pengembangan lahan terbangun dari proses pengalihfungsian lahan tersebut pada akhirnya akan meningkatkan aliran permukaan yang menjadi salah satu penyebab terjadinya genangan atau banjir di kawasan perkotaan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, menyebutkan bahwa standar pelayanan minimal sistem jaringan drainase skala kota adalah tidak terjadinya genangan lebih dari 2 kali setahun dengan ketinggian genangan lebih dari 30 cm selama 6

jam. Genangan (*inundation*) yang dimaksud adalah air buangan ataupun air hujan yang tidak dapat mengalir ke badan air terdekat sehingga terperangkap di daerah cekungan ataupun daerah yang lebih rendah dalam suatu kawasan. Genangan terjadi karena banyak faktor, salah satu penyebabnya adalah kurang berfungsinya drainase perkotaan.

Tabel 2.70
Persentase Tidak Terjadi Genangan > 2 kali Setahun
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Luasan daerah yang tergenang (ha) | 7,00 | 6,50 | 6,46 | 4,52 | 4.5 |
| 2 | Luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang (ha) | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 4,90 | 7 |
| Persentase | | 87,50 | 81,25 | 92,29 | 92,24 | 64.29 |

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2024

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa luasan daerah yang tergenang setiap tahunnya berkurang, begitu juga dengan luasan daerah rawan genangan yang berpotensi tergenang. Luasan daerah tergenang pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 mengalami pengurangan 3,28 ha dengan luasan daerah genangan atau berpotensi tergenang dari 8,00 ha menjadi 4,90 ha. Dan pada tahun 2023 luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang bertambah menjadi 7 ha dari 4.9 ha pada tahun 2022.

Daerah yang tergenang akibat curah hujan yang tinggi dan terjadi genangan selama ± 6 jam adalah Gampong Hagu Teungoh, Gampong Hagu Barat Laut, Gampong Tumpok Teungoh dan sebagian daerah Kota Lhokseumawe (Jalan Perdagangan Ujung sampai Jalan Sukaramai). Untuk Kecamatan Muara Satu pada Gampong Blang Pulo sepanjang Jalan Medan-Banda Aceh, Cot Trieng, Batuphat dan untuk Kecamatan Muara Dua terdapat pada Gampong Blang Poroh, dan Cunda. Daerah yang tergenang bertambah pada lokasi Kecamatan Banda Sakti di Gampong Hagu Selatan (Jalan Palapa) dan Gampong Kutablang, untuk Kecamatan Muara Dua di Gampong Uteunkot, untuk kecamatan Blang Mangat di Gampong Mesjid Punteut.

Dengan adanya Gerakan Masyarakat Lhokseumawe Bersih, yang dicanangkan oleh Pj. Walikota diharapkan drainase-drainase maupun saluran-saluran yang ada di Kota Lhokseumawe dapat bersih dari sedimen-sedimen. Kegiatan ini merupakan upaya Pemerintah Kota bersama masyarakat untuk menjaga, memelihara, dan meningkatkan kebersihan lingkungan masing-masing.

2.1.3.2.1.5 Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

A. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 bahwa Ketentraman, ketertiban Umum dan Pelindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Seiring dengan berjalannya waktu, bila ditelaah dari sisi kependudukan, maka masyarakat dalam suatu wilayah selalu tumbuh dan berkembang. Hal ini mengakibatkan perlu adanya pengaturan yang lebih baik dari sisi pemerintah untuk dapat mengantisipasi segala macam tantangan yang bermuara pada terancamnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah kerjanya. Berdasarkan hal tersebut, Menteri Dalam Negeri pada tanggal 3 Maret 1950 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor UR 32/2/21 tentang Perubahan Nama Detasemen Polisi Pamong Praja Menjadi Satuan Polisi Pamong Praja. Surat Keputusan tersebut menjadi dasar peringatan Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja yang diperingati setiap tanggal 3 Maret.

Dari tabel 2.71 dapat terlihat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lhokseumawe memiliki rasio 10,27 di Tahun 2019 dan pada Tahun 2020 dengan rasio 12,34 persatuan penduduk. Sedangkan Tahun 2021 terjadi peningkatan rasio jumlah polisi pamong praja sebesar 12.79 persatuan penduduk. Dan pada tahun

2022 rasio jumlah Polisi Pamong Praja mengalami kenaikan menjadi sebesar 13,06 persatuan penduduk. Dan tahun 2023 menjadi sebesar 14.17.

Berikutnya Rasio Jumlah Linmas Kota Lhokseumawe pada Tahun 2019 sebesar 50,19 persatuan penduduk. Selanjutnya di tahun 2020 rasio jumlah Linmas mengalami kenaikan menjadi sebesar 55,11 dan kembali terjadi penurunan pada tahun 2021 menjadi 54.75 persatuan penduduk. Sedangkan pada tahun 2022 rasio jumlah Linmas menurun kembali menjadi sebesar 54,33 persatuan penduduk, hal ini di pengaruhi jumlah linmas yang tidak bertambah sedangkan jumlah penduduk bertambah. Dan tahun 2023 mengalami peningkatan jumlah linmas sehingga rasio jumlah linmas menjadi 59.82. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.71 berikut ini:

Tabel 2.71
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja dan Linmas
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Jumlah Polisi Pamong Praja | 213 | 233 | 243 | 250 | 278 |
| 2. | Jumlah Linmas | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1173 |
| 3. | Jumlah Penduduk | 207.202 | 188.713 | 189.941 | 191.396 | 196.067 |
| Rasio Polisi Pamong Praja | | 10.27 | 12.34 | 12.79 | 13.06 | 14.17 |
| Rasio Jumlah Linmas | | 50.19 | 55.11 | 54.75 | 54.33 | 59.82 |

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, 2024.

B. Penegakan PERDA/QANUN

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) mempunyai tugas menegakkan Qanun dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penegakan syariat islam. Satpol PP Kota Lhokseumawe memiliki kewenangan untuk menertibkan dan menindak warga yang mengganggu ketertiban umum, melakukan pemeriksaan dan tindakan Represif non-yustisial terhadap warga atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Tabel 2.72
Jumlah Penegakan Peraturan Daerah/Qanun
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Jumlah Penegakan Perda/Qanun | 15 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| 2. | Jumlah Pelanggaran Perda/Qanun | 862 | 2129 | 4584 | 759 | 121 |
| Persentase | | 1.74 | 0.56 | 0.26 | 1.45 | 9.09 |

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, 2024.

Pada tabel 2.72 dapat dilihat jumlah Penegakan Peraturan Daerah/Qanun dan pelanggaran Peraturan Daerah/Qanun di Tahun 2019 jumlah Penegakan Peraturan Daerah/Qanun masih sebanyak 15 penegakan yang dilakukan namun jumlah pelanggaran mengalami peningkatan sebanyak 862 pelanggaran atau 1.7 persen. Di Tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebanyak 12 Penegakan Peraturan Daerah/Qanun yang telah dilakukan namun jumlah pelanggaran di tahun 2020 sebanyak 2129 pelanggaran dan sebanyak 4584 pelanggaran di tahun 2021 dengan persentase 0.56 persen untuk Tahun 2020 dan 0.26 persen di Tahun 2021. Untuk Tahun 2022 terjadi penurunan jumlah pelanggaran yaitu menjadi 759 pelanggaran dengan persentase 1.45 persen. Dan Tahun 2023 jumlah pelanggaran Perda/Qanun menurun menjadi sebesar 121 dengan persentase menjadi 9.09%.

C. Cakupan Patroli Petugas Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat melakukan kegiatannya dengan aman.

Cakupan Patroli Petugas Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe tetap dilakukan dalam proporsi yang sama. Patroli ini merupakan kegiatan rutin guna melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di badan jalan atau di trotoar, penertiban juga dilakukan di pasar tumpah, penertiban gelandangan dan pengemis (Gepeng), penertiban pemasangan baliho,

maupun penertiban yang terkait dengan masalah perizinan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.73 berikut ini.

Tabel 2.73
Jumlah Patroli Penegakan Peraturan Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|-------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Jumlah Waktu Patroli | 2 Jam | 2 Jam | 2 Jam | 2 Jam | 2 Jam |
| 2. | Jumlah Kegiatan Patroli | 3 x Sehari | 4 x Sehari | 4 x Sehari | 4 x Sehari | 4 x Sehari |
| Persentase | | 0,67 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, 2024.

Dari tabel 2.73 dapat dilihat bahwa patroli penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan rutin oleh Satpol PP dan Wilayahul Hisbah Kota Lhokseumawe berdurasi 2 jam dengan jumlah kegiatan patroli dilakukan sebanyak 3 kali sehari namun mengalami peningkatan menjadi 4 kali sehari di Tahun 2020 s.d 2023. Patroli ini sangat penting dilakukan untuk keberlangsungan penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah dalam rangka menciptakan nyaman ketertiban umum. Keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran Satpol PP dan Wilayahul Hisbah Kota Lhokseumawe perlu adanya dukungan dan komitmen bersama dari semua pihak.

D. Jumlah Pelanggaran Syariat Islam

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh diberikan beberapa kewenangan istimewa dalam mengurus daerahnya. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh adalah penerapan nilai-nilai syari'at Islam kepada masyarakat setempat yang diatur berdasarkan Qanun.

Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah dan akhlak. Adapun bagian-bagian lebih lanjut dari syari'at Islam ini meliputi ahwal al-syakshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. Khusus jinayah atau hukum pidana, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh telah

menerbitkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Qanun Jinayat merupakan kesatuan hukum pidana yang berlaku bagi masyarakat Aceh yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai syari'at Islam. Qanun Jinayat mengatur tentang Jarimah (perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam), pelaku jarimah, dan uqubat (hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah). Jumlah Pelanggaran Syariat Islam yang dilakukan masyarakat Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 2.74 berikut:

Tabel 2.74
Jumlah Pelanggaran Syariat Islam yang dilakukan Masyarakat Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Jenis Pelanggaran (Qanun Aceh No.6 Tahun 2014) | Tahun | | | | |
|-----|--|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Pasal 15 tentang Khamar | - | 13 | - | - | 1 |
| 2. | Pasal 16 tentang menyimpan, menimbun dan menjual Khamar | - | - | 2 | - | 1 |
| 3. | Pasal 18 tentang Maisir | - | 22 | - | - | - |
| 4. | Pasal 20 tentang Menyediakan Fasilitas Jarimah Maisir | 9 | 1 | 4 | 7 | - |
| 5. | Pasal 22 tentang Jarimah percobaan Maisir | 3 | - | - | - | - |
| 6. | Pasal 23 tentang Khalwat | 47 | 49 | 31 | 124 | 60 |
| 7. | Pasal 25 tentang Ikhtilath | 48 | 90 | 45 | - | 2 |
| 8. | Pasal 27 tentang Melakukan Jarimah Ikhtilath dengan berhubungan Mahran dengannya | - | - | - | - | - |
| 9. | Pasal 33 tentang Zina | 3 | 1 | 10 | 8 | - |
| 10. | Pasal 46 tentang Pelecahan Seksual | - | 2 | - | 2 | - |
| 11. | Pasal 47 Pelecahan seksual terhadap anak | - | - | - | - | - |
| 12. | Pasal 50 tentang melakukan Pemerkosaaan terhadap Anak | - | 1 | - | - | - |
| 13. | Pasal 64 tentang Musahaqah | 4 | - | - | - | - |
| | Jumlah Kasus | 114 | 179 | 92 | 141 | 64 |

Sumber: *Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, 2023.*

Berdasarkan tabel 2.74 di atas dapat dilihat jumlah Pelanggaran Syariat Islam sejak Tahun 2019-2023 menunjukkan angka yang menurun walaupun pada tahun 2020 dan 2022 mengalami kenaikan kembali. Tahun 2019 jumlah kasus pelanggaran syariat islam sebanyak 114 kasus dan menjadi 92 kasus

pada tahun 2021. Selanjutnya kasus Pelanggaran Khalwat menjadi kasus tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebanyak 124 kasus dimana pada tahun 2021 sebelumnya hanya ada 31 kasus. Sedangkan untuk kasus Ikhtilath mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat pada tahun 2020 terjadi sebanyak 90 kasus ikhtilath dan tidak ditemukan kasus ikhtilath sama sekali di tahun 2022. Pada tahun 2023 kasus pelanggaran syariat islam mengalami penurunan menjadi 64 kasus.

E. Jumlah Penertiban Untuk Menjaga Ketertiban dan Ketentraman

Untuk menjamin terciptanya ketentraman dan ketertiban, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) di wilayahnya masing-masing sesuai dengan kewenangannya. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melalui penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Data Penertiban yang dilakukan Satpol PP dan WH untuk menjaga Ketertiban dan Ketentraman Kota Lhokseumawe sebagai berikut :

Tabel 2.75
Jumlah Penertiban Untuk Menjaga Ketertiban dan Ketentraman Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Jenis Penertiban | Tahun | | | | |
|----|--|-------|------|------|------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Penertiban Pasar | 9 | 249 | 249 | 250 | 5 |
| 2. | Penertiban IMB dan HO | 1 | 2 | - | - | 10 |
| 3. | Penertiban Pedagang Kaki Lima | 93 | 249 | 249 | 250 | 6 |
| 4. | Penertiban Spanduk | 8 | 5 | - | 2 | - |
| 5. | Penertiban Pelajar Bolos Sekolah | 4 | 5 | 1 | 5 | - |
| 6. | Penertiban Café dan Tempat Hiburan Malam | - | - | - | - | - |
| 7. | Penertiban Keramaian Umum | 7 | 1 | - | - | - |

| No | Jenis Penertiban | Tahun | | | | |
|-----|--|-------|------|------|------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8. | Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak | - | 1 | - | - | - |
| 9. | Pengamanan Demo | - | - | - | - | 3 |
| 10. | Pengamanan Upacara dan Hari Besar Lainnya | - | - | - | 2 | - |
| 11. | Penertiban Pengelolaan Air Kotor/Limbah | - | - | - | - | - |
| 12. | Penertiban Penindakan PNS | 1 | - | - | - | - |
| 13. | Penertiban Ketertiban Sosial, Adab, Susila dan Premanisme, Tuna Wisma, Gepeng/Pengemis | 2 | 40 | 2 | 250 | - |
| 14. | Penertiban Izin Milik Ruang Jalan (Galian C dll) | - | 3 | - | - | - |
| | Jumlah Kasus | 125 | 555 | 501 | 759 | 25 |

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, 2024.

Penertiban yang dilakukan untuk menjaga Ketertiban dan Ketentraman yang dilakukan Tahun 2019 pada penertiban pasar sebanyak 9 penertiban dan tahun 2022 meningkat menjadi 250 penertiban. Dan tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 5 penertiban. Pada Tahun 2019 Penertiban Pedagang Kaki Lima sebanyak 93 penertiban dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 250 penertiban, dan tahun 2023 menurun menjadi 6 penertiban Penertiban Ketertiban Sosial, Adab, Susila dan Premanisme, Tuna Wisma, Gepeng/Pengemis pada tahun 2019 sebanyak 2 penertiban dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 250 penertiban dan tahun 2023 tidak ada dilakukan penertiban.

F. Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP

Pengawasan dan pembinaan terhadap Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ini bukan membatasi gerak Ormas dan LSM, tapi dalam rangka penguatan dan penyehatan bagi Ormas dan LSM itu sendiri. Pengawasan dan pembinaan ini, mempunyai arti penting karena Ormas dan LSM adalah bagian dari lembaga non-pemerintahan dan sebagai mitra bagi pemerintah dalam turut serta mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat demi terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Ormas dan LSM dituntut untuk terus melakukan peningkatan kualitas lembaga, baik dari sisi tertib administrasi, tertib anggota

maupun dalam peningkatan SDM yang ada, serta peningkatan kualitas program kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam AD/ART masing-masing ormas. Persentase pembinaan ormas yang ada di Kota Lhokseumawe dari tahun ke tahun bergerak secara fluktuatif, terlihat pada tahun 2019 sebesar 20% pembinaan terhadap ormas yang telah dilakukan namun mengalami penurunan menjadi 8% di Tahun 2020. Selanjutnya di Tahun 2021 dan 2022 persentase pembinaan ormas sebesar 11% dan 12% hingga di Tahun 2023 menjadi 8.82% untuk persentase pembinaan ormas yang telah dilakukan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.76
Persentase Pembinaan Ormas
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| NO | URAIAN | Tahun | | | | |
|----|------------------------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah Ormas yang mendapat bantuan | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 |
| 2 | Jumlah Ormas yang terdaftar | 20 | 50 | 54 | 54 | 68 |
| | Persentase | 20% | 8% | 11% | 12% | 8.82 |

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2024

G. Penanggulangan Bencana

Penanggulangan Bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

Laporan kejadian kebencanaan dalam beberapa tahun terakhir di Kota Lhokseumawe mengalami beberapa bencana alam seperti banjir, angin puting beliung, tanah longsor, gelombang ekstrim/abrasi. Statistik kebencanaan yang dihimpun oleh BPBD menunjukkan terjadi peningkatan jumlah kejadian bencana dari tahun 2019 hingga 2023. Kejadian Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 2.77 berikut:

Tabel 2.77
Kejadian Bencana Kota Lhokseumawe
Tahun 2019-2023

| Jenis Bencanas | Frekuensi Terjadinya Bencana (Kejadian) | | | | |
|--------------------------|---|-----------|----------|-----------|-----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Banjir | 1 | 6 | 5 | 3 | 8 |
| Puting Beliung | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| Tanah Longsor | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Gempa Bumi | - | - | - | - | - |
| Gelombang Ekstrim/Abrasi | - | 1 | 2 | - | - |
| Jumlah | 8 | 15 | 9 | 12 | 11 |

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2024.

Pada tabel 2.77 di atas dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2023 kejadian bencana banjir meningkat menjadi 8 kali, bencana puting beliung sebanyak 2 kali, bencana tanah longsor 1 kali, sedangkan gelombang ekstrim/abrasi juga tidak terjadi serta tidak ada kejadian gempa bumi yang menimbulkan kerugian/bencana di Kota Lhokseumawe.

F. Indeks Risiko Bencana

Kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana alam dan meningkatnya frekuensi kejadian bencana, memerlukan upaya antisipatif untuk mengurangi atau meminimalkan dampak kerugian ekonomi akibat bencana di masa mendatang. Pengurangan Risiko Bencana (PRB) adalah rangkaian upaya yang dilakukan secara sistematis untuk menganalisis risiko-risiko dampak bencana terhadap kehidupan dan penghidupan manusia. Risiko bencana dapat diartikan sebagai kerugian potensi akibat bencana seperti nyawa, harta, kesehatan, aset, mata pencaharian, layanan publik, dan lain-lain yang terjadi kepada masyarakat pada waktu tertentu.

Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut.

Indeks Risiko Bencana dihitung berdasarkan rumus berikut :

$$\text{Risk} = \text{hazard} \times \frac{\text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}$$

hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti frekuensi gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana. Indeks Risiko Bencana Kota Lhokseumawe dapat di lihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.78
Indeks Risiko Bencana Kota Lhokseumawe
Tahun 2019-2023

| No | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Kelas Resiko 2023 |
|----|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| 1. | Lhokseumawe | 143.20 | 143.20 | 138.73 | 130.44 | 124.22 | Sedang |

Sumber : <https://inarisk.bnnpb.go.id/irbi>

G. Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Penanggulangan Kebakaran adalah semua usaha yang dilakukan untuk mencegah, menyiagakan, memadamkan dan penanganan akibat kebakaran. Api dapat timbul jika terjalin interaksi ketiga unsur "segitiga api" yaitu: oksigen (dari udara), bahan yang dapat menyala (bahan bakar) dan panas

Metode pencegahan kebakaran pada dasarnya meliputi pengurangan atau penghapusan salah satu unsur diatas. Dalam hampir semua situasi, dua dari ketiga unsur yang ada yaitu oksigen dan bahan yang mudah terbakar. Karena itu penting dijaga agar

komponen ketiga yaitu panas jangan sampai cukup tinggi untuk menyalakan api.

Cakupan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat PPK adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran yang membentuk Wilayah Manajemen Kebakaran, selanjutnya disebut WMK oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai wilayah yurisdik urusan pemerintahannya. WMK bertujuan untuk mendukung pengurangan risiko kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran antara lain: permukiman, perindustrian/pabrik, bangunan gedung, hutan dan lahan maupun kebakaran lainnya seperti pada kawasan tertentu pertambangan, depot bahan bakar minyak dan/atau bahan yang sangat mudah terbakar, pelabuhan, bandara dan lingkungan yang memiliki potensi kebakaran lainnya.

Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan WMK adalah pelayanan Pemadam Kebakaran pada saat Tanggap Darurat yang efektif, dan bereaksi cepat dan tepat tiba dilokasi kejadian kebakaran untuk pengurangan risiko kebakaran dengan waktu minimal yang diperlukan, dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba ditempat kejadian kebakaran, yang langsung melakukan tindakan pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industry yang tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

Tabel 2.79
Persentase Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan
Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah kejadian kebakaran yang ditanggulangi | 97 | 196 | 75 | 44 | 143 |
| 2 | Jumlah kejadian kebakaran yg terjadi | 97 | 196 | 75 | 44 | 143 |
| Persentase | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2023.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Kota Lhokseumawe selalu dapat ditangani 100%. Pada tahun 2023 kejadian kebakaran yang terjadi 143 kasus, dapat ditangani seluruhnya.

2.1.3.2.1.6 Sosial

A. Cakupan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Keluarga Kurang Mampu.

Permasalahan di bidang sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada sebagian warga masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan hidup dalam kondisi kemiskinan dan ketidakberdayaan. Mereka umumnya mengalami hambatan fungsi sosial dalam hidup bermasyarakat, kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dasar dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Permasalahan yang dihadapi oleh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah belum terpenuhinya pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan sosial dasar lainnya, sehingga memerlukan koordinasi dan kemitraan

Memperhatikan hal tersebut di atas serta merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, diperlukan upaya peningkatan fungsi-fungsi sosial melalui pendekatan dan intervensi profesi pekerjaan sosial yang melibatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat sehingga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dapat ditingkatkan fungsi

sosialnya agar mampu mengakses pelayanan sosial dasar. Dari Tabel.1 dibawah ini dapat dijelaskan dengan data Cakupan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Keluarga Kurang Mampu di Tahun 2019 Jumlah Keluarga yang mendapatkan Bantuan untuk peningkatan kesejahteraan sosial terjadi peningkatan sebanyak 7.498 orang dan jumlah masyarakat yang terdata dalam DTKS sebanyak 17.654 orang dengan persentase 42.47% dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 71.31%, namun tahun 2023 menurun menjadi 35.32%.

Tabel.2.80
Cakupan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Keluarga Kurang Mampu Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ket |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 1. | Jumlah Keluarga yang mendapatkan Bantuan untuk Peningkatan Kesejahteraan Sosial | 7498 | 9598 | 17828 | 13514 | 10994 | KK |
| 2. | Jumlah Masyarakat yang terdata dalam DTKS | 17654 | 18516 | 25000 | 33198 | 31123 | KK |
| Pesentase | | 42.47 | 51.84 | 71.31 | 40.71 | 35.32 | |

Sumber : Dinas Sosial Kota Lhokseumawe Tahun 2024

1. Persentase Rehabilitasi Sosial yang tertangani

Penanganan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sudah seharusnya menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Dinas Sosial. Hal ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam Undang-Undang tersebut dijabarkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan langkah-langkah rehabilitasi sosial. Penyelenggaraan rehabilitasi sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, meningkatkan kemampuan dan

kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dari Tabel.2.80 dibawah ini dapat dijelaskan dengan data Persentase Rehabilitasi Sosial yang tertangani di Tahun 2023 Jumlah jenis PMKS yang tertangani 4 Jenis dan jumlah PMKS 4 Jenis tidak ada perubahan dari Tahun 2019-2023 dengan persentase 100%.

Tabel.2.81
Persentase Rehabilitasi Sosial yang tertangani
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ket |
|------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. | Jumlah Jenis PMKS yang tertangani | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Jenis PMKS |
| 2. | Jumlah PMKS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Jenis PMKS |
| Pesentase | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

Sumber: Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, Tahun 2024.

Untuk dapat melakukan usaha kesejahteraan sosial dalam menangani permasalahan sosial sangat dibutuhkan peran serta masyarakat dan sumber-sumber kesejahteraan sosial seperti Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial adalah semua hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial dapat berasal atau bersifat manusiawi, sosial dan alam.

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang terdapat di Kota Lhokseumawe terdiri dari Taruna Siaga Bencana (Tagana) sebanyak 10 orang, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Anak sebanyak 12 orang, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Lansia sebanyak 2 orang, Penyuluh Sosial sebanyak 6 orang, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 4 orang dengan 1 orang pada masing-masing kecamatan, Pekerja Sosial Masyarakat sebanyak 75 orang yang tersebar pada 68 desa di Kota Lhokseumawe.

2. Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial

a. Persentase Penanganan Anak Terlantar

Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang

mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Dimana Kriterianya berasal dari keluarga fakir miskin; anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. dibawah ini dapat dijelaskan dengan data Jumlah anak telantar yang tertangani di Tahun 2021 terjadi peningkatan sebanyak 40 orang, Jumlah anak telantar yang tertangani di Tahun 2022 terjadi penurunan sebanyak 25 orang, Jumlah anak telantar yang terdata mengalami kenaikan sebanyak 76 orang, Tahun 2022 dengan persentase terjadi penurunan sebanyak 32,89 %. Pada tahun 2023 jumlah anak terlantar yang di tangani sebanyak 20 orang dari 20 anak terlantar yang terdata sehingga 100%.

Tabel.2.82
Persentase Penanganan Anak Terlantar
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ket |
|------------------|---------------------------------------|-----------|------------|-----------|--------------|------------|-------|
| 1. | Jumlah Anak terlantar yang tertangani | 25 | 7 | 40 | 25 | 20 | Orang |
| 2. | Jumlah Anak terlantar yang terdata | 40 | 7 | 65 | 76 | 20 | Orang |
| Pesentase | | 63 | 100 | 62 | 32.89 | 100 | |

Sumber: Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, Tahun 2024.

b. Persentase Penanganan Fakir Miskin

Kemiskinan merupakan permasalahan yang multidimensional, baik dari aspek penyebab, maupun dampaknya sehingga diperlukan langkah penanggulangan dari berbagai perspektif dengan melibatkan banyak pihak sesuai dengan kewenangannya. Untuk mewujudkan proses ini, pemerintah melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan mengatur pembagian tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan kemiskinan mulai dari tingkat pusat sampai dengan kabupaten/kota. Hal ini setidaknya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat tentang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota dalam berbagai bidang termasuk bidang sosial.

Dinas Sosial provinsi merupakan bagian stakeholder dalam penanggulangan kemiskinan dalam tingkat regional. Salah satu

tugas pokoknya adalah mengsinergikan penanganan kemiskinan pada tingkat pusat dengan pihak kabupaten/kota sebagai pelaksana langsung program kemiskinan. Dengan posisi tersebut, maka dinas sosial provinsi harus mampu menciptakan kondisi agar komunikasi antara berbagai pihak tersebut dapat terlaksana dengan baik, sehingga program yang diluncurkan oleh pemerintah dapat dilaksanakan pada tingkat provinsi dan kabupaten kota, serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dari Tabel.2.82 dibawah ini dapat dijelaskan dengan jumlah fakir miskin berdasarkan data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tertangani di Tahun 2022 menjadi sebanyak 13.514 jiwa, jumlah fakir miskin yang terdata terjadi peningkatan menjadi 13.514 jiwa, dengan persentase penanganan sebesar 100%.

Tabel.2.83
Persentase Penanganan Fakir Miskin
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ket |
|----|-------------------------------------|-----------|-----------|--------------|------------|--------------|------|
| 1. | Jumlah Fakir Miskin yang tertangani | 7498 | 9598 | 17828 | 13514 | 10994 | Jiwa |
| 2. | Jumlah Fakir Miskin yang terdata | 17654 | 18516 | 113755 | 13514 | 31123 | Jiwa |
| | Pesentase | 42 | 52 | 15,67 | 100 | 35.32 | |

Sumber: Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, Tahun 2024.

c. Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial. Garis Kemiskinan Ekstrem diperkirakan sebesar Rp11.941,12/orang/hari atau Rp358.233,6/orang/bulan (BPS, 2021). Penghapusan miskin ekstrem menjadi salah satu indikator Tujuan 1 yaitu: Tanpa Kemiskinan di Sustainable Development Goals (SDGs). Persentase dan jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.2.84
Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem
Kota Lhokseumawe 2019-2023

| Tahun | Lhokseumawe | | Aceh | |
|-------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| | Persentase Penduduk Miskin Ekstrem (Persen) | Penduduk Miskin Ekstrem (Jiwa) | Persentase Penduduk Miskin Ekstrem (Persen) | Penduduk Miskin Ekstrem (Jiwa) |
| 2020 | 4,33 | 9.094,37 | 6,01 | 326.790 |
| 2021 | 3,23 | 6.757 | 3,47 | 188.772 |
| 2022 | 1,06 | 2.246 | 2,95 | 162.805 |
| 2023 | 3.25 | 6.990 | 1.83 | 102.190 |

Sumber: Kemenko PMK 2024

Jumlah miskin ekstrem Kota Lhokseumawe berdasarkan Kemenko PMK 2024 meningkat dari tahun 2022 sebanyak 2.246 ribu atau (1, 06%) menjadi 6.990 ribu atau (3.25%) pada tahun 2023.

3. Persentase Korban Bencana yang menerima Bantuan Masa Tanggap Darurat

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Secara umum dinas sosial dalam penanggulangan bencana berperan untuk memberikan bantuan logistik/dapur umum. Karena tupoksinya Dinas Sosial dalam penanggulangan bencana adalah merencanakan dan melaksanakan penyediaan kebutuhan logistik bencana. Dinas Sosial akan memberikan bantuan terhadap masyarakat yang tertimpa bencana, bantuan yang diberikan dinas sosial juga bisa berupa bantuan fisik, akan tetapi bantuan fisik yang diberikan terbatas karena berpatokan kepada anggaran yang didapat dinas sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .

Dalam memenuhi bahan yang berkaitan dengan bantuan sosial dan penanggulangan bencana, Dinas Sosial dibantu Relawan Sosial (Tagana, Pelopor dan TKSK) dalam mengumpulkan bahan dan data yang berkaitan dengan bencana.

Dari Tabel dibawah ini dapat dijelaskan dengan data Jumlah Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (Satu) Tahun di Tahun 2023 sebanyak 14053 jiwa, Jumlah Korban Bencana yang seharusnya Menerima Bantuan Sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (Satu) Tahun terjadi peningkatan sebanyak 14053 jiwa, dengan persentase mencapai 100%. Peningkatan ini terjadi karena di tahun 2023 ini banyak terjadi bencana alam, baik itu bencana Alam seperti Banjir, maupun Bencana Sosial Seperti Kebakaran dan Korban Tenggelam.

Tabel. 2.85
Persentase Korban Bencana yang menerima
Bantuan Masa Tanggap Darurat Kota Lhokseumawe
Tahun 2019-2023

| No | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ket |
|------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| 1. | Jumlah Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (Satu) Tahun | 55 | 65 | 60 | 4515 | 14053 | Jiwa |
| 2. | Jumlah Korban Bencana yang seharusnya Menerima Bantuan Sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (Satu) Tahun | 55 | 65 | 60 | 4515 | 14053 | Jiwa |
| Pesentase | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

Sumber: Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, Tahun 2024.

4. Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola

Taman Makam Pahlawan sendiri secara luas diartikan sebagai lokasi pemakaman khusus bagi para pejuang yang berjasa pada Negara Republik Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1, Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) adalah taman makam pahlawan nasional yang berada di provinsi dan kabupaten atau kota di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Sementara Makam Pahlawan Nasional (MPN) adalah makam di luar Taman Makam Nasional di mana jenazah Pahlawan Nasional dimakamkan. Dari Tabel 2.88 dibawah ini dapat dijelaskan dengan data Jumlah TMPN yang dikelola sebanyak 1 buah dan Jumlah TMP yang terdata sebanyak 1 buah di Tahun 2019 s.d 2023 tidak ada perubahan dengan persentase mencapai 100%.

Tabel. 2.86
Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. | Jumlah TMP yang dikelola | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Jumlah TMP yang terdata | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pesentase | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, Tahun 2024.

2.1.3.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

2.1.3.2.2.1 Ketenagakerjaan

A. Persentase Pencari Kerja

Jumlah pencari kerja yang dilatih akan ditempatkan menyesuaikan dengan lowongan kerja yang terdaftar, khususnya di

lapangan usaha yang bersifat formal. Selebihnya pencari kerja akan terdistribusi ke dalam lapangan usaha mandiri, yang bersifat tersier dan sebagian primer, seperti perdagangan dan *home industry*. Selama 5 tahun terakhir, Kota Lhokseumawe belum pernah memfasilitasi pihak lapangan usaha khususnya swasta untuk mengadakan bursa kerja swasta. Hal ini mungkin juga dikarenakan minimnya lowongan pekerjaan yang tersedia di sektor formal.

Tabel 2.87
Persentase Pencari Kerja
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah pencari kerja yang dilatih | 94 | 40 | 95 | 144 | 106 |
| 2 | Jumlah pencari kerja yang terdaftar | 189 | 695 | 482 | 549 | 402 |
| Persentase | | 49,7 | 5,76 | 19,7 | 26,2 | 26.37 |

Sumber : DPMTSP Kota Lhokseumawe, 2024

Dari tabel tersebut di atas dilihat bahwa jumlah pencari kerja yang dilatih pada Tahun 2019, jumlah pencari kerja yang dilatih berjumlah 94 orang, sedangkan jumlah pencari kerja yang terdaftar berjumlah 189 orang, sehingga diperoleh persentase 49,7 persen. Pada Tahun 2020 pencari kerja berjumlah 40 orang, sedangkan jumlah pencari kerja yang terdaftar berjumlah 695, sehingga diperoleh persentase 5,76 persen. Pada Tahun 2021, jumlah pencari kerja yang dilatih berjumlah 95 orang, sedangkan jumlah pencari kerja yang terdaftar berjumlah 482 orang, dengan demikian persentase yang diperoleh 19.7 persen, dan Tahun 2022 meningkat dengan jumlah pencari kerja yang dilatih berjumlah 144 orang dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar berjumlah 549 orang atau sebesar 26,2 persen. Dan pada tahun 2023 jumlah pencari kerja yang dilatih sebanyak 106 orang dari 402 pencari kerja yang terdaftar berjumlah 482 orang, dengan demikian persentase yang diperoleh 26.37 persen

B. Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar dan Ditempatkan

Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan. Penempatan Tenaga Kerja diukur berdasarkan beberapa

komponen, yakni adanya lowongan kerja terdaftar, pencari kerja terdaftar, dan pencari kerja ditempatkan. Dibawah ini dapat kita lihat persentase pencari kerja yang ditempatkan mulai dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023.

Tabel 2.88
Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar dan Ditempatkan
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah pencari kerja yang ditempatkan | 93 | 331 | 189 | 44 | 30 |
| 2 | Jumlah pencari kerja yang terdaftar | 189 | 695 | 482 | 549 | 402 |
| Persentase | | 49,21 | 47,63 | 39,21 | 8,01 | 7.46 |

Sumber : DPMTSP Kota Lhokseumawe, 2024.

Dari tabel tersebut diatas dapat kita lihat bahwa pada Tahun 2019, jumlah pencari kerja yang ditempatkan berjumlah 93 orang, sedangkan jumlah pencari kerja yang terdaftar berjumlah 189 orang, sehingga diperoleh persentase 49,21 persen. Pada Tahun 2020 pencari kerja yang ditempatkan berjumlah 331 orang, sedangkan jumlah pencari kerja yang terdaftar berjumlah 695, sehingga diperoleh persentase 47,63 persen. Pada Tahun 2021, jumlah pencari kerja yang ditempatkan berjumlah 189 orang, sedangkan jumlah pencari kerja yang terdaftar berjumlah 482 orang, dengan demikian persentase yang diperoleh 39,21 persen. Pada tahun 2022, jumlah pencari kerja yang ditempatkan berjumlah 44 orang dari pencari kerja yang terdaftar sebanyak 549 orang. Sehingga, persentase dari data tersebut didapat sebesar 8,01%. Pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 7.46%. Rendahnya jumlah pencari kerja yang ditempatkan karena tidak semua pencari kerja yang tercatat dilaporkan kembali setelah mendapatkan pekerjaan.

C. Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Hubungan Industrial pada awalnya dianggap merupakan hubungan perburuhan yang hanya membahas masalah hubungan antara pekerja/buruh dan pengusaha. Seiring dengan perkembangan dan kenyataan yang terjadi dilapangan bahwa

masalah hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha ternyata juga menyangkut aspek lain yang luas.

Demikian hubungan perburuhan tidaklah terbatas hanya pada hubungan antara pekerja dan buruh dan pengusaha tetapi perlu adanya kebijakan Pemerintah Kota Lhokseumawe, apalagi di kota Lhokseumawe hanya ada 1 orang mediator khusus hubungan industrial. Dibawah ini dapat kita lihat persentase perselisihan hubungan industrial mulai dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023.

Tabel 2.89
Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|--------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah perkara PPHI selesai dengan PB | 25 | 47 | 46 | 17 | 38 |
| 2 | Perkara PPHI yang dicatatkan | 25 | 50 | 46 | 29 | 42 |
| Persentase | | 100 | 94 | 100 | 58.6 | 88.37 |

Sumber : DPMTSP Kota Lhokseumawe, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa pada Tahun 2019, jumlah perkara PPHI selesai dengan PB berjumlah 25 orang, sedangkan jumlah perkara PPHI yang dicatatkan berjumlah 25 orang, sehingga diperoleh persentase 100 persen. Pada Tahun 2020 jumlah perkara PPHI selesai dengan PB berjumlah 47 orang, sedangkan jumlah perkara PPHI yang dicatatkan berjumlah 50, sehingga diperoleh persentase 94 persen. Pada Tahun 2021, jumlah perkara PPHI selesai dengan PB berjumlah 46 orang, sedangkan jumlah perkara PPHI yang dicatatkan berjumlah 46 orang, dengan demikian persentase yang diperoleh 100 persen. Pada tahun 2022, terdapat jumlah Perkara PPHI yang tercatat sebanyak 29 kasus. Dari 29 kasus tersebut terdapat 17 kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB), sedangkan lainnya ada yang belum terselesaikan dan ada kasus yang dilimpahkan ke tingkat provinsi. Untuk tahun 2023 dari 43 perkara PPHI yang dicatatkan 38 perkara selesai dengan persentase 88.37%.

D. Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal merupakan bagian dari penyelenggaraan perekonomian sebagai upaya untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah. Untuk mempersingkat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi melalui penanaman modal tersebut, pemerintah telah melakukan langkah-langkah untuk menarik investor dengan membuat kebijakan melalui Peraturan Daerah Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah kepada masyarakat dan/atau investor sesuai dengan kewenangan berdasarkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dapat berupa :

- a. pengurangan pajak daerah.
- b. pengurangan retribusi daerah.
- c. pemberian bantuan modal dan/atau peralatan kerja kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan /atau Koperasi di Daerah;
- d. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan/atau Koperasi di Daerah.
- e. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal.
- f. penyediaan sarana dan prasarana.
- g. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi.
- h. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu.
- i. kemudahan akses pemasaran hasil produksi.
- j. kemudahan Penanaman Modal di Kawasan Strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah.
- k. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah.
- l. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- m. kemudahan akses informasi lowongan pekerjaan dan pelaporan lowongan pekerjaan dari perusahaan.
- n. kemudahan akses pasokan bahan baku, dan
- o. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

2.1.3.2.2.2 Pangan

A. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan Pangan adalah ketersediaan pangan secara fisik di suatu wilayah dari segala sumber, baik itu produksi pangan domestik (netto), perdagangan pangan dan cadangan pangan. Ketersediaan pangan ditentukan oleh produksi pangan di wilayah tersebut, perdagangan pangan melalui mekanisme pasar di wilayah tersebut, stok yang dimiliki oleh pedagang dan cadangan pemerintah, dan bantuan pangan dari pemerintah atau organisasi lainnya. Ketersediaan pangan dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain produksi pangan di dalam daerah, perdagangan bahan pangan, kelancaran distribusi/akses pangan, pola konsumsi masyarakat, daya beli masyarakat dan kebijakan pemerintah dalam intervensi harga pasar.

Ketersediaan pangan utama dapat dilihat dengan menghitung rasio antara rata-rata ketersediaan pangan utama per Tahun (Kg) dengan jumlah penduduk. Berdasarkan data, penduduk Kota Lhokseumawe bergantung pada makanan pokok berupa beras (padi). Selain itu terdapat sejumlah kecil produksi jagung, ubi kayu dan ubi jalar yang diketahui sebagai sumber karbohidrat yang dapat menggantikan peran beras (padi).

Tabel 2.90
Ketersediaan Pangan Utama
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| Tahun | Rata-rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama per Tahun (Kg) | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Ketersediaan Pangan Utama (%) |
|--------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| 2019 | 23.180.220 | 207.202 | 111.87 |
| 2020 | 20.808.800 | 188.713 | 110.26 |
| 2021 | 23.610.220 | 189.941 | 124.30 |
| 2022 | 24.981.840 | 191.396 | 130.52 |
| 2023 | 26.689.340 | 196.067 | 136.12 |

Sumber : DKP3 Kota Lhokseumawe 2024

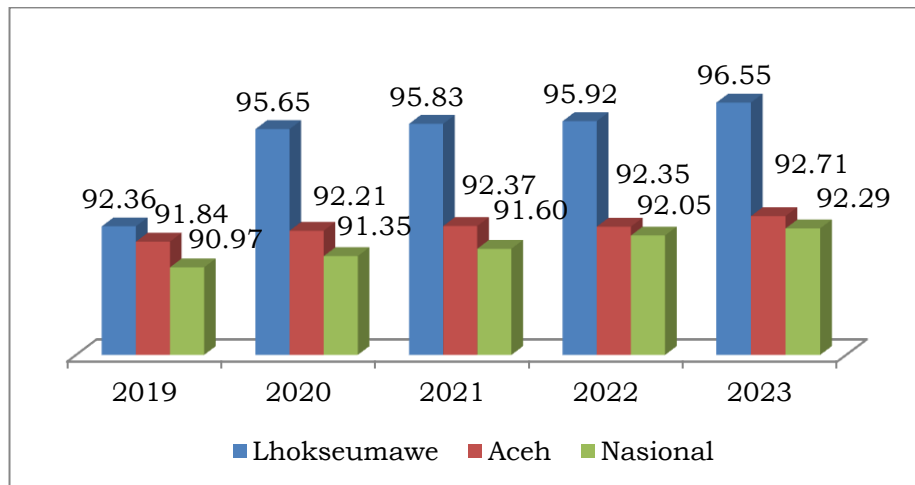
Ketersediaan pangan di Kota Lhokseumawe sebagian besar tergantung pada perdagangan pangan domestik. Hal ini disebabkan oleh luas lahan untuk produksi bahan pangan yang relative tidak mencukupi untuk kebutuhan konsumsi penduduk Kota Lhokseumawe. Sebagian besar pasokan bahan pangan untuk komoditas beras, jagung didatangkan dari Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bireuen sedangkan untuk komoditas Cabai Merah, Kentang, Bawang Merah banyak dipasok dari Kabupaten Bener Meriah dan Takengon. Untuk Komoditas Daging Ayam, Telur Ayam, Gula dan Minyak Goreng dipasok dari Propinsi Sumatera Utara.

2.1.3.2.2.3 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

A. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Kegunaan Indeks Pembangunan Gender untuk melengkapi penghitungan IPM dengan memberikan informasi capaian pembangunan manusia menurut gender. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan perbandingan pencapaian antara laki-laki dan perempuan. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna. Indeks Pembangunan Gender Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.24
Indeks Pembangunan Gender Kota Lhokseumawe
Tahun 2019-2023

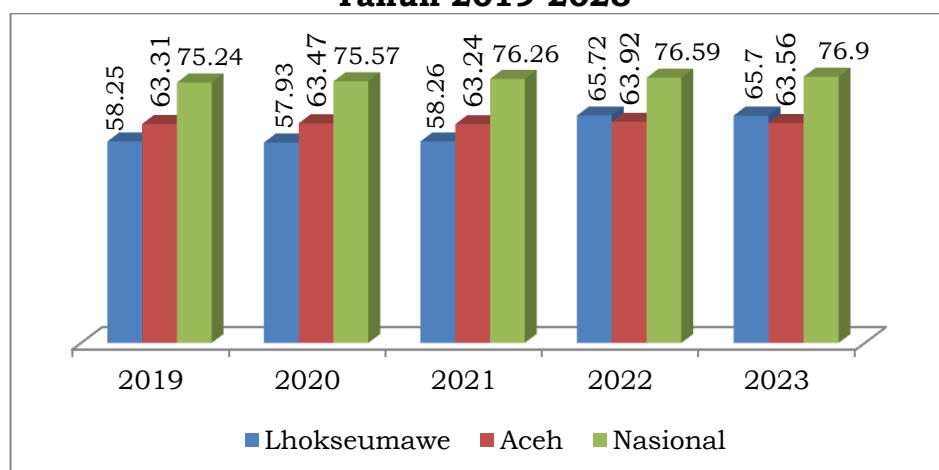


Sumber : BPS, 2024

B. Indeks Pemberdayaan Gender

Selain Indeks Pembangunan Gender (IPG), UNDP juga mengenalkan ukuran komposit lainnya yang terkait dengan gender, yakni Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Kedua ukuran ini, diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender yang telah dicapai melalui berbagai program pembangunan serta dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender. Indeks Pemberdayaan Gender Kota Lhokseumawe terlihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.25
Indeks Pemberdayaan Gender Kota Lhokseumawe
Tahun 2019-2023



Sumber : BPS, 2024

Indeks Pemberdayaan Gender Kota Lhokseumawe dari tahun 2019-2023 semakin membaik walaupun pada tahun 2020 IDG Lhokseumawe mengalami penurunan. Pada tahun 2019 IDG Lhokseumawe sebesar 58.25 lebih rendah dari Aceh sebesar 63.31 dan Nasional sebesar 75.24. Pada tahun 2020 IDG Lhokseumawe 57.93 masih lebih rendah dari Aceh sebesar 63.47 dan Nasional sebesar 75.57. Pada tahun 2021 IDG Lhokseumawe 58,26 lebih rendah dari Provinsi Aceh sebesar 63,24 dan Nasional sebesar 76,26 sedangkan tahun 2023 IDG Lhokseumawe meningkat menjadi 65.70, namun masih tetap lebih rendah dari Provinsi Aceh sebesar 63,56 dan Nasional sebesar 76,90.

C. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Peran perempuan menjadi semakin publik, perempuan kini menikmati kesempatan pendidikan yang sama dengan laki-laki dan merupakan bagian yang signifikan dari tenaga kerja. Perempuan yang bekerja di pelayanan publik hampir mencapai setengahnya, dan sekarang terdapat lebih banyak perempuan yang duduk di parlemen dibandingkan periode-periode sebelumnya.

Oleh karena itu partisipasi perempuan dalam lembaga Pemerintah sangat penting. baik Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Hal ini karena keberadaan perempuan dapat mewakili serta meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan yang diwakili, mengawal dan mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan. Partisipasi perempuan yang rendah di bidang politik dan pemerintah akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas kebijakan publik yang responsif terhadap gender yang menyangkut baik laki-laki maupun perempuan. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Meski demikian ada banyak kerangka peraturan yang berpihak kepada perempuan, reformasi kebijakan di bidang hukum, politik, pemilihan dan kelembagaan dapat membantu dalam menciptakan sebuah lingkungan yang lebih sensitif terhadap gender. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel persentase partisipasi perempuan di lembaga berikut ini:

Tabel 2.91
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|-------------------|---|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Jumlah pekerja perempuan di Instansi Pemerintah | 3.400 | 3.421 | 3.475 | 2.210 | 2.036 |
| 2. | Jumlah Pekerja Perempuan | 72.891 | 73.412 | 72.345 | 34.739 | 34.992 |
| Persentase | | 4.66 | 4.66 | 4.73 | 6.4 | 5.82 |

Sumber : DP3AP2KB Kota Lhokseumawe, 2024

Berdasarkan data tabel 2.89 diatas dapat dilihat jumlah pekerja perempuan di Instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe pada pada tahun 2019 sebanyak 3.400 orang, tahun 2020 sebanyak 3.421 orang dan pada tahun 2021 terus meningkat menjadi 3.475, sedangkan untuk jumlah pekerja perempuan untuk 2019 sebanyak 72.891, tahun 2020 terus meningkat menjadi sebanyak 73.412 orang sedangkan di tahun 2021 menurun menjadi sebanyak 72.345 orang. Dan pada tahun 2022 meningkat kembali menjadi 34.739. Dilihat dari persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan menjadi 5.83% atau 2.036 jumlah pekerja perempuan di Instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe dari 34.992 jumlah pekerja perempuan.

Partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Lhokseumawe didominasi oleh perempuan sebesar 66.75% sedangkan laki-laki 35% ini dapat dilihat dari keseluruhan jumlah ASN di Kota Lhokseumawe yaitu 3.050 jiwa, diantaranya yaitu laki-laki 1.014 jiwa dan perempuan 2.036 jiwa (sumber: Kota Lhokseumawe dalam angka 2022 Hal. 38).

A. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRK

Partisipasi politik perempuan saat ini semakin dibutuhkan dalam upaya pengintegrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik dan menghasilkan instrument hukum yang sensitif gender, yang selama ini terabaikan dan banyak menghambat kemajuan perempuan di berbagai sektor kehidupan.

Namun terkadang pada kenyataannya, dalam memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam politik ini menjadi sangat sulit untuk dipenuhi oleh partai politik dalam mendapatkan kader yang berkualitas. Sehingga partai politik menempatkan perempuan dalam pemenuhan kuota secara formalitas saja bukan sebagai peningkatan aktualisasi perempuan dalam ranah politik. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.92
Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPR
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Laki-laki | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 |
| 2. | Perempuan | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Jumlah | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Persentase | | 16 | 16 | 16 | 16 | 28 |

Sumber : DP3AP2KB Kota Lhokseumawe, 2024

Berdasarkan data tabel 2.90 diatas proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR pada 2019 sampai dengan 2022 proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR sebanyak 4 orang atau 16%. Pada tahun 2023 proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR sebanyak 7 orang atau sebesar 28%. Keterwakilan Perempuan di Parlemen di Kota Lhokseumawe masih rendah selain belum tercapainya kuota 30 persen anggota DPR perempuan, lemahnya keterwakilan kaum hawa di lembaga pembuat undang-undang ini terlihat dari tidak ada satu pun perempuan yang menjadi pimpinan DPR atau Ketua Komisi.

B. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga swasta terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Berikut data dapat dilihat pada tabel 2.91 berikut ini:

Tabel 2.93
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|-------------------|---|-------------|------------|-------------|------------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Jumlah Pekerja Perempuan di instansi Swasta | 1.366 | 1.542 | 1.215 | 1.421 | 1.421 |
| 2. | Jumlah Pekerja Perempuan | 72.891 | 73.412 | 72.345 | 73.456 | 73.456 |
| Persentase | | 1.87 | 2.1 | 1.67 | 1.9 | 1.9 |

Sumber : DP3AP2KB Kota Lhokseumawe, 2024

Berdasarkan data tabel 2.91 diatas dapat dilihat partisipasi jumlah pekerja perempuan di instansi swasta pada tahun 2018 sebanyak 1.085 orang, tahun 2019 sebanyak 1.366 orang, Tahun 2020 meningkat sebanyak 1.542 orang, tahun 2021 menurun menjadi 1.215 orang dan jumlah pekerja perempuan tahun 2018 sebanyak 71.645 orang, Tahun 2019 sebanyak 72.891 orang di Tahun 2020 terus meningkat menjadi 73.412 orang sedangkan Tahun 2021 menurun jumlah pekerja perempuan 73.421 menjadi 72.345 pekerja perempuan persentasenya 1.67% dan Tahun 2022 meningkat kembali menjadi 1.421 orang dengan jumlah pekerja perempuan 73.456 orang.

C. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Jenis kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, meliputi:

- kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, dan atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- penelantaran rumah tangga dimana setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau

pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) Tahun per 1.000 rumah tangga. Data rasio KDRT tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.94
Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|-------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Jumlah KDRT | 37 | 49 | 18 | 29 | 24 |
| 2. | Jumlah RT | 53.535 | 54.735 | 55.154 | 56.280 | 43.747 |
| Rasio KDRT | | 0.067% | 0.089% | 0.032% | 0.051% | 0.055% |

Sumber : DP3AP2KB Kota Lhokseumawe, 2024

Berdasarkan data Tabel 2.92 Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Lhokseumawe menunjukkan jumlah yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun demikian secara umum rasio KDRT di Kota Lhokseumawe bisa dikatakan masih sangat rendah. Hal ini bisa dilihat dari Rasio KDRT yang tidak mencapai angka 1 digit. Pada tahun 2019 angka Rasio KDRT 0,067% sedangkan tahun 2020 meningkat angka Rasio KDRT sebanyak 0.089% dan tahun 2021 angka Rasio KDRT menurun menjadi 0,032% di Kota Lhokseumawe namun pada tahun 2022 meningkat menjadi 0,051% di Kota Lhokseumawe. Dan pada tahun 2023 rasio kekerasan dalam rumah tangga sebesar 0.055% dengan jumlah KDRT 24 kasus turundari 2022 sebanyak 29 kasus.

D. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Didalam Unit Pelayanan Terpadu

Kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak setiap Tahun jumlahnya terus meningkat, yang dilaporkan jauh lebih sedikit dengan kasus yang sebenarnya karena pada umumnya perempuan dan anak korban kekerasan sering merasa ragu maupun takut dalam melaporkan kekerasan yang dialaminya, atau ada kendala lain seperti sulitnya akses dalam mencapai layanan

pengaduan dan kurangnya informasi yang dimiliki perempuan dan anak. Adapun penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan dapat dilihat pada tabel 2.93 berikut:

Tabel 2.95
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Kota Lhokseumawe 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|-------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Jumlah Pengaduan yang diselesaikan | 22 | 86 | 56 | 75 | 68 |
| 2. | Jumlah Pengaduan | 22 | 86 | 56 | 75 | 68 |
| Persentase | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : DP3AP2KB Kota Lhokseumawe, 2024

Berdasarkan data tabel 2.93 di atas terlihat bahwa jumlah pengaduan yang diselesaikan di Kota Lhokseumawe tahun 2019 sebanyak 22 orang, tahun 2020 meningkat sebanyak 86 orang dan di tahun 2021 menurun sebanyak 56 orang, namun pada tahun 2022 meningkat menjadi 75 kasus, sedangkan Jumlah Pengaduan di Kota Lhokseumawe tahun 2018 sebanyak 19 pengaduan dan meningkat menjadi 75 pengaduan pada Tahun 2022. Dan pada tahun 2023 sebanyak 68 pengaduan turun dari tahun sebelumnya. Rasio penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kota Lhokseumawe sangat baik, hal ini dapat dilihat dari seluruh pengaduan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi pada tahun 2019-2023 semuanya dapat diselesaikan.

2.1.3.2.2.4 Pertanahan

Pertanahan merupakan bagian dari kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam mengatur hubungan hukum antara tanah dengan orang sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Dalam urusan pertanahan terdapat beberapa elemen, diantaranya adalah Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

A. Sertifikat Hak Milik

Hak Milik (HM) adalah hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Sesuai dengan Undang-Undang Agraria bahwa Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Dari luas lahan wilayah Kota Lhokseumawe sebesar 18.106 m², Pemerintah Kota Lhokseumawe memiliki lahan bersertifikat hak milik sebesar 495,81 m² sedangkan lahan bersertifikat hak milik masyarakat sebesar 6.292,93 m², kondisi tersebut merupakan kondisi sampai dengan tahun 2023. Dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 2.96
Persentase Luas Lahan Bersertifikat Milik
Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Luas lahan bersertifikat milik pemerintah (m ²) | 1.083.630 | 682.430 | 1.433.330 | 3.550.630 | 4.958.100 |
| 2 | Total luas lahan Kota Lhokseumawe (m ²) | 181.060.000 | 181.060.000 | 181.060.000 | 181.060.000 | 181.060.000 |
| | Persentase | 0.60 | 0,38 | 0,79 | 1.96 | 2.74 |

Sumber : Kantor BPN Kota Lhokseumawe 2024.

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa luas lahan bersertifikat milik Pemerintah Kota Lhokseumawe. Pada Tahun 2019 lahan bersertifikat milik Pemerintah Kota Lhokseumawe seluas 1.083.630 m² atau 0.60% dari total luas wilayah Kota Lhokseumawe. Terakhir tahun 2023 luas lahan bersertifikat milik pemerintah seluas 4.958.100 m² yaitu sebesar 2.74% dari luas lahan yang ada di Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.97
Persentase Luas Lahan Bersertifikat Milik Masyarakat di
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Luas lahan bersertifikat milik masyarakat (m ²) | 5.459,640 | 1.713,953 | 2.932,830 | 1.964.782 | 6.292.930 |
| 2 | Total luas lahan Kota Lhokseumawe (m ²) | 181.060.000 | 181.060.000 | 181.060.000 | 181.060.000 | 181.060.000 |
| | Persentase | 3.01 | 0.95 | 1.62 | 1.08 | 3.5 |

Sumber : Kantor BPN Kota Lhokseumawe 2024.

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa luas lahan bersertifikat milik masyarakat di Kota Lhokseumawe. Terakhir tahun

2023 luas lahan bersertifikat milik masyarakat seluas 6.292.930 m² yaitu sebesar 3.5% dari luas lahan yang ada di Kota Lhokseumawe.

B. Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha

Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Tidak mengenai tanah pertanian, oleh karena itu dapat diberikan atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara maupun tanah milik seseorang, sampai dengan tahun 2023 luas lahan yang digunakan untuk Hak Guna Bangunan (HGB) Kota Lhokseumawe seluas 1.624.390 m².

Hak Guna usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 Tahun. Hak Guna Usaha merupakan hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri guna perusahaan, pertanian, perikanan dan peternakan.

Tabel 2.98
Persentase Luas Hak Guna Bangunan yang Dipetakan di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|---|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | Luas Hak Guna bangunan (m ²) | 819.760 | 633.870 | 203.990 | 73.624 | 1.624.390 |
| 2 | Total luas lahan Kota Lhokseumawe (m ²) | 181.060.000 | 181.060.000 | 181.060.000 | 181.060.000 | 181.060.000 |
| | Persentase | 0,45 | 0,35 | 0, 11 | 0,041 | 0.89 |

Sumber : Kantor BPN Kota Lhokseumawe 2024.

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa Luas Hak Guna Bangunan di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2019 sebesar 819.760 m² atau 0,45% dari luas lahan yang ada di Kota Lhokseumawe. Pada Tahun 2023 Luas Hak Guna Bangunan di Kota Lhokseumawe menjadi 1.624.390 m² atau 0.89% dari luas lahan yang ada di Kota Lhokseumawe.

C. Penyelesaian kasus Sengketa dan Konflik Pertanahan

Pengertian sengketa tanah tertera dalam Undang-Undang Sengketa Tanah yaitu Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia Nomor 3 Tahun 2011. Di dalamnya tertulis bahwa sengketa tanah atau sengketa adalah perselisihan tanah yang

melibatkan badan hukum, lembaga atau perseorangan dan secara sosio-politis tidak memiliki dampak luas.

Singkatnya, tanah sengketa adalah tanah yang kepemilikannya dipermasalahkan oleh dua pihak, dimana mereka saling berebut untuk mengklaim kepemilikan tanah tersebut. Tanah sengketa adalah kasus yang bisa dibilang sering terjadi di Indonesia.

Tabel 2.99
Persentase Penyelesaian Kasus Sengketa Dan Konflik Pertanahan Kota Lhokseumawe Tahun 2019–2023

| No | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| 1 | Jumlah Kasus yang Diselesaikan | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | Jumlah Kasus yang Terdaftar | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Persentase | | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |

Sumber : Kantor Pertanahan Negara Kota Lhokseumawe 2023.

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa penyelesaian kasus sengketa dan konflik pertanahan di Kota Lhokseumawe semuanya dapat diselesaikan. Dimana pada tahun 2019-2021 terjadi 1 kasus dan dapat diselesaikan 1 kasus. Namun Tahun 2022 dari 3 kasus yang terdaftar belum terselesaikan begitu juga tahun 2023 dari 5 kasus yang terdaftar telah terselesaikan.

2.1.3.2.2.5 Lingkungan Hidup

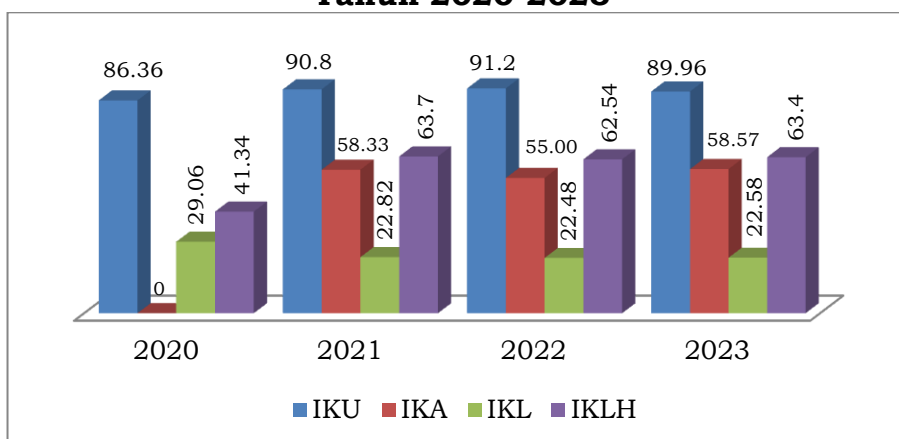
A. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, merupakan perpaduan antara konsep Indeks Kualitas Lingkungan dan konsep Environmental Performance Index (EPI). IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. Selain itu sebagai bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur berdasarkan parameter-parameter pH, TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan NO₃-N. Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO₂ dan NO₂, dan indeks tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan. Peningkatan nilai indeks kualitas lingkungan didasarkan pada target nilai indeks yang ditetapkan secara nasional pada tahun 2020, baik untuk nilai IKLH (68,71), IKA (55,10), IKU (84,10), IKL (61,66), dan IKAL (58,5). Indeks kualitas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada Gambar di bawah:

Gambar 2.26
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, IKL, IKLH)
Tahun 2020-2023



Sumber: DLH Kota Lhokseumawe, 2024

Dari Gambar di atas Indeks kualitas Lingkungan Hidup pada Tahun 2020 sebesar 41.34 dengan predikat buruk, pada Tahun 2021 meningkat menjadi 63.70 dengan predikat sedang dan Tahun 2022 menurun menjadi 62.54 masih dengan predikat sedang. Pada tahun 2023 sedikit meningkat menjadi 63.4. Indeks Kualitas Udara Lhokseumawe sebesar 86.36, pada Tahun 2022 meningkat menjadi 91.20. Namun pada tahun 2023 menurun menjadi 89.96. Untuk Indeks Kualitas Air pada Tahun 2021 sebesar 58.33 dan Tahun 2022 menurun menjadi 55.00. Dan Pada Tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 58.57. Sedangkan Indeks Kualitas Lahan Lhokseumawe sebesar 29.06 dan mengalami penurunan menjadi 22.48 pada Tahun 2022. Dan sedikit meningkat menjadi 22.58 di Tahun 2023.

B. Tersedianya Dokumen RPPLH dan KLHS

1. Dokumen RPPLH

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjabarkan kewajiban membuat perencanaan lingkungan yang berkekuatan hukum untuk melengkapi perencanaan pembangunan (RPJP/RPJM) dan perencanaan spasial (RTRW). Dokumen yang berisi rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersifat multi sektor dengan mempertimbangkan karakteristik, potensi, dan kewenangan daerah, serta terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah.

Dokumen RPPLH Lhokseumawe masih dalam proses pengusulan penetapan Qanun. Kehadiran Qanun RPPLH akan memberikan dampak positif bagi Pemerintah Lhokseumawe dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Lhokseumawe (RPJPK) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK).

2. Dokumen KLHS Kota

Perwujudan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan telah diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain dilakukan melalui upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terdiri dari pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Salah satu instrumen pertimbangan dalam pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Sampai saat ini Dokumen KLHS yang sudah tersedia adalah KLHS RPJMK 2017-2022, dan KLHS RTRW 2012-2032. Pada Tahun 2023 telah dilakukan penyusunan KLHS RPJPD 2025-2045 dan Tahun 2024 sedang dilakukan penyusunan KLHS RPJMK 2025-2030.

C. Persentase Jumlah Sampah yang tertangani

Lingkungan hidup hidup sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Lingkungan yang tercemar akan mengakibatkan hal yang fatal bagi manusia, misalnya air yang dicemari oleh limbah cair dari pabrik, udara yang dikotori oleh banyaknya asap kendaraan dan asap pabrik, dan juga limbah yang berasal dari medis ini akan mengakibatkan penyakit antara lain kanker, gangguan sistem syaraf, hepatitis, pembengkakan hati dan gejala depresi.

Kota Lhokseumawe mempunyai masalah dengan lingkungan, antara lain masih kurangnya penanganan masalah sampah maupun masalah pembuangan limbah baik padat maupun limbah cair. Masalah limbah cair antara lain limbah medis yang penanganannya masih sangat minim sekali.

Pengelolaan sampah suatu kota bertujuan untuk melayani sampah yang dihasilkan penduduk, secara tidak langsung turut memelihara kesehatan masyarakat serta menciptakan suatu lingkungan yang bersih, baik dan sehat. Saat ini pengelolaan persampahan menghadapi banyak tekanan terutama akibat semakin besarnya timbulan sampah yang dihasilkan masyarakat baik produsen maupun konsumen. Semua sampah dari sumber masing-masing akan bermuara ke tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) Alue Lim. Biasanya sumber sampah dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu :

1. sampah dari permukiman atau sampah rumah tangga;
2. sampah dari non permukiman yang sejenis sampah rumah tangga, seperti dari pasar, komersial dsb.

Sampah dari kedua jenis sumber tersebut dikenal sebagai sampah domestik, sedangkan sampah non-domestik adalah sampah

atau limbah yang bukan sejenis sampah rumah tangga misalnya limbah dari proses industri.

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan sebagai hasil dari aktivitas manusia maupun hasil aktivitas alam yang tidak/belum memiliki nilai ekonomis.. Jenis sampah yang dihasilkan bermacam-macam bentuk dan jenisnya. Secara garis besar sampah dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: sampah kering atau sampah anorganik, sampah basah atau sampah organik dan sampah berbahaya. Sampah-sampah tersebut perlu adanya penanganan yang serius. Tujuan dan manfaat penangan sampah/pengelolaan sampah merupakan langkah-langkah yang dilakukan dengan tujuan mengubah sampah material yang tidak berguna menjadi material yang memiliki nilai ekonomis dan mengolah sampah menjadi material yang tidak membahayakan lingkungan hidup.

Untuk Penanganan sampah di Kota Lhokseumawe setiap tahun mengalami peningkatan. Ini dapat dilihat dari jumlah sampah yang diproduksi dan jumlah sampah yang ditangani dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023. Pada Tahun 2019 dari jumlah timbulan sampah yang ada di Kota sebanyak 33.067 ton yang ditangani sebanyak 25.604 ton, dapat dilihat capaian penanganan sampah 77,43%. Tahun 2020 jumlah timbulan sampah yang ada di Kota sebanyak 33.729 ton sampah yang tertangani meningkat menjadi 27.396 ton, capaian penanganan menjadi 81,22% dan meningkat lagi pada tahun 2021 dengan jumlah timbulan sampah yang ada di Kota sebanyak 34.403 ton yang ditangani sebanyak 29.672 ton, sehingga mencapai 86,25% sampah tertangani ditahun 2021. Pada Tahun 2022 persentase sampah yang tertangani menurun menjadi 81.13%. Selanjutnya pada tahun 2023 jumlah timbulan sampah sebanyak 35.793 ton dan yang tertangani sebanyak 35.643 ton sehingga mencapai 99.58%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel 2.100
Persentase Jumlah Sampah yang tertangani
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah sampah yang tertangani | 25.604 | 27.396 | 29.672 | 28.470 | 35.643 |
| 2 | Total jumlah timbulan sampah di Kota | 33.067 | 33.729 | 34.403 | 35.091 | 35.793 |
| | Persentase | 77,43 | 81,22 | 86,25 | 81,13 | 99,58 |

Sumber : DLH Kota Lhokseumawe, 2024

D. Persentase Cakupan Area Pelayanan

Pengelolaan sampah di lingkungan permukiman sebagian besar diselesaikan di lokasi sumber sampah dengan cara dibakar dan hanya sebagian yang dikumpulkan oleh pengumpul sampah informal untuk didaur ulang. Penanganan sampah di Kota Lhokseumawe yang meliputi pertokoan dan pasar sudah mencapai 100%, artinya semua timbulan sampah setiap harinya sudah dapat diangkut ke TPA.

Untuk menciptakan lingkungan yang bersih serta memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang persampahan dibutuhkan sejumlah sarana dan prasarana, seperti tempat penampungan sampah sementara (kontainer, bin/tong, bak permanen), alat pengangkut (gerobak, dumptruck, becak sampah), dan sebagainya.

Upaya pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan upaya reduksi sampah di sumber penghasil sampah, yaitu di lingkungan rumah tangga. Salah satu cara melakukan reduksi sampah di lingkungan rumah tangga adalah dengan membentuk kelompok masyarakat pengolah sampah. Cakupan pelayanan sampah di kota juga makin tahun makin luas.

Tabel 2.101
Persentase Cakupan Area Pelayanan
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Luas area pelayanan pengelolaan sampah (km ² /ha) | 150,00 | 160,00 | 165,00 | 166,00 | 174 |
| 2. | Luas area kabupaten/kota (km ² /ha) | 181,06 | 181,06 | 181,06 | 181,06 | 181,06 |
| | Persentase | 82.84 | 88,36 | 91,13 | 91.68 | 96.10 |

Sumber : DLH Kota Lhokseumawe, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase cakupan area pelayanan di Kota Lhokseumawe terjadi peningkatan yang signifikan seperti terlihat pada Tahun 2019 persentase cakupan area pelayanan menjadi sebesar 82.84%, pada Tahun 2020 persentase cakupan area pelayanan sebesar 88.36%, dan pada Tahun 2021 persentase cakupan area pelayanan sebesar 91.13% dan Tahun 2022 meningkat menjadi 91.68% dan Tahun 2023 mengalami peningkatan kembali menjadi 96.10%.

2.1.3.2.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

A. Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk

Setiap warga negara Indonesia yang sudah berumur > 17 Tahun atau sudah menikah wajib akan kepemilikan KTP, karena Kepemilikan KTP adalah mutlak diperlukan. Dengan memiliki KTP maka seseorang telah dapat melakukan hak dan kewajiban sebagai warga Negara sepenuhnya.

Program KTP-el diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah dimulai sejak tahun 2009 dengan ditunjuknya empat kota sebagai proyek percontohan Nasional, adapun keempat kota tersebut adalah Padang, Makasar, Yogyakarta dan Denpasar.

Untuk mempermudah pencatatan penduduk di Kota Lhokseumawe telah mulai dirintis pembuatan KTP-El. Dengan menggunakan KTP-El identitas seseorang akan direkam secara digital pada chip, sengan menggunakan KTP Digital akan dapat diketahui hasilnya secara lebih cepat. Selain itu penggunaan Blangko secara otomatis akan lebih bisa dihemat, karena mencontreng dengan menggunakan media digital.

Tabel 2.102
Rasio Penduduk ber-KTP per satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP | 122.958 | 125.483 | 126.300 | 129.740 | 132.586 |
| 2 | Jumlah penduduk wajib KTP > 17 atau pernah/sudah menikah | 128.230 | 130.141 | 130.633 | 132.102 | 138.705 |
| | Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk | 0.96 | 0,96 | 0,97 | 0.98 | 0.96 |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024.

Dari tabel dapat dijelaskan selama 5 (lima) tahun terakhir 2019-2023, rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,96 sedangkan pada tahun 2019 hanya 0,98 ini terlihat terjadi peningkatan dikarenakan Kebutuhan untuk pengurusan administrasi pada instansi lain dengan menerapkan penggunaan dokumen kependudukan seperti dalam pengurusan (KUA, BPJS, Pendidikan). Dan juga sudah adanya kesadaran masyarakat untuk memiliki Dokumen Kependudukan. Namun pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan menjadi 0.96.

B. Rasio Bayi Ber Akta Kelahiran

Akte kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Selain itu Undang-Undang Dasar 1945 juga memberikan jaminan atas status kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam 28 D ayat (4) yang menyatakan, “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”. Rasio Jenis kelamin waktu lahir, Para demografis mengajukan bahwa perbandingan antara bayi laki-laki dengan bayi perempuan pada waktu lahir berkisar antara 103-105 bayi laki-laki per 100 bayi perempuan.

Setiap anak yg baru lahir perlu memiliki akte kelahiran untuk melindungi haknya sebagai anak. Namun saat ini terlihat bahwa pembuatan akte kelahiran masih minim dikarenakan kurangnya kepedulian dari orangtua anak dalam menguruske dinas terkait. Berikut tabel rasio bayi berkata kelahiran Kota Lhokseumawe dari Tahun 2019 sampai dengan 2023.

Tabel 2.103
Rasio Bayi ber Akta Kelahiran
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|--------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah Bayi ber Akta Kelahiran | 18.311 | 18.159 | 18.532 | 20.567 | 19.563 |
| 2 | Jumlah Bayi | 20.996 | 20.296 | 18.589 | 20.753 | 20.234 |
| Rasio | | 0.87 | 0,96 | 0,97 | 0.99 | 0.97 |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024.

Berdasarkan Tabel di atas Rasio Bayi berakta Kelahiran dari Tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi sehingga menyebabkan rasio yang tidak stabil tetapi pada tahun 2022 mengalami peningkatan ini dikarenakan adanya kebutuhan yang meningkat untuk keperluan BPJS, Imigrasi, Ibadah Umrah, Penambahan Penghasilan Gaji Orang Tua, dan lain-lain, namun pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan menjadi 0.97.

C. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Program KTP-elektronik dilatar belakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional/nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang dalam hal-hal tertentu dengan manggandakan KTP-nya. Sedangkan untuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK di kota Lhokseumawe telah mulai berlaku setelah pergantian KTP merah putih yaitu pada Tahun 2006. Pada Tahun 2012 terjadi pergantian KTP Nasional menjadi KTP elektronik atau e-KTP. Hampir 90 persen penduduk Kota Lhokseumawe telah memiliki dan/ atau telah mengaktifkan e-KTP. Dengan demikian penerapan KTP Nasional berbasis NIK di Kota Lhokseumawe telah berhasil dengan baik.

D. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan. Ayat (4) Persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalam rangka mewujudkan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk diperlukan kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan yang berbasis Nomor Induk Kependudukan. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 101 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006. KTP merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh NKRI. KTP wajib dimiliki oleh penduduk yang telah berumur 17 Tahun keatas atau telah kawin atau pernah menikah. Masa berlakunya KTP adalah 5 tahun kecuali penduduk yang berusia 60 tahun ke atas diberi KTP yang berlaku seumur hidup.

Tabel 2.104
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan | 122.988 | 125.483 | 126.300 | 129.740 | 132.586 |
| 2 | Jumlah penduduk wajib KTP | 128.230 | 130.141 | 130.633 | 132.102 | 138.705 |
| | Persentase | 95.9 | 96.4 | 96.6 | 98.2 | 95.5 |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024.

Dari tabel jelas sekali, bahwa untuk penggunaan NIK pada KTP yang diterbitkan dari tahun ke tahun (2019-2023) mengalami peningkatan dikarenakan Mutasi pindah datang penduduk dan sangat mempengaruhi jumlah NIK pada Kota Lhokseumawe. Jumlah penduduk yang berumur 17 tahun dari Tahun ke tahun semakin bertambah juga, sehingga terjadi penambahan penduduk untuk wajib KTP.

2.1.3.2.2.7 Komunikasi dan Informatika

A. Website Milik Pemerintah Daerah

Website milik Pemerintah Daerah sangat bermanfaat bagi publik agar publik dapat dengan mudah mengakses data maupun informasi mengenai Pemerintahan. Begitu juga sebaliknya, bagi Pemerintah sendiri website dapat menjadi sebuah instrumen dalam mewujudkan transparansi publik. Saat ini seluruh Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe telah memiliki website.

B. Pelaksanaan Satu Data Indonesia

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Satu Data Indonesia (SDI) adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Data memiliki peran penting dalam setiap tahapan pembangunan terutama dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Lhokseumawe berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan data dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembangunan daerah.

Untuk mewujudkan terselenggaranya SDI ini, dibutuhkan peran, kolaborasi serta dukungan dari berbagai pihak. Dalam Perpres No. 39 Tahun 2019 diatur pula mengenai penyelenggara SDI serta peran dan tugasnya. Pada tingkat daerah, Badan Pusat Statistik (BPS) berperan sebagai pembina data, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian berperan sebagai walidata, serta Perangkat Daerah berperan sebagai produsen data. Keterlibatan kepala daerah juga menjadi hal yang penting dalam mewujudkan penyelenggaraan SDI ini, salah satunya untuk dapat menjalankan koordinasi antara pembina data, walidata, dan produsen data.

Dalam mendukung pelaksanaan Satu Data Indonesia, Pemerintah Kota Lhoskeumawe telah menetapkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Lhokseumawe. Selanjutnya pada tahun 2024 juga telah ditetapkan Form Satu Data Indonesia Kota Lhokseumawe dengan Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 104 Tahun 2024 tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Kota Lhokseumawe. Untuk penyajian dan pengelolaan data, Pemerintah Kota Lhkseumawe melakukan penginputan data pada portal Satu Data Lhokseumawe yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe selaku Walidata

Kota Lhokseumawe, dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe selaku Produsen Data.

C. Pameran/Expo

Pameran/Expo bagi masyarakat sangat berguna karena merupakan event dimana publik dapat melihat informasi maupun perencanaan-perencanaan kedepan yang akan dilakukan bahkan dapat melihat berbagai produk-produk terbaru. Substansi pameran itu sendiri tergantung pada tema di saat melakukan pameran. Tema pameran dapat berbagai macam sehingga masyarakat sangat mendapatkan keuntungan dari dilakukannya sebuah pameran. Kota Lhokseumawe sendiri telah melakukan sebanyak 2 (dua) kegiatan pameran yaitu pada tahun 2017 Pameran Gampong Expo Kota Lhokseumawe dan tahun 2019 Lhokseumawe Expo.

D. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan program dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) yang diimplementasikan oleh seluruh instansi pemerintahan yang ada di Indonesia. KIM dijalankan dengan maksud mewujudkan masyarakat yang aktif dan peka akan informasi, serta menciptakan jaringan informasi media komunikasi dua arah dengan menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya agar bisa saling memberdayakan, salah satunya dalam mengumpulkan, mengelola dan menyebarkan informasi.

Melalui KIM, masyarakat diberdayakan guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingannya sendiri dan untuk kepentingan kebijakan pemerintah dalam melanjutkan informasi pembangunan agar tidak terjadi kesenjangan informasi. Tujuan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah sebagai mitra pemerintah dalam penyebarluasan, sosialisasi dan diseminasi informasi pembangunan kepada masyarakat sebagai mediator komunikasi informasi pembangunan secara timbal balik dan berkesinambungan serta menjadi forum media untuk pelayanan komunikasi dan informasi pemerintah dan pembangunan.

Selain dari tujuan tersebut, KIM berfungsi sebagai wahana informasi antar anggota KIM , dari KIM kepada pemerintah dan dari pemerintah kepada masyarakat, KIM sebagai mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik. KIM sebagai sarana peningkatan literasi anggota KIM dan masyarakat dibidang informasi dan media masa. KIM sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonomi. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tingkat Kecamatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.105
Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok
Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|-------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Jumlah Kecamatan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Persentase | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Diskominfo Kota Lhokseumawe, 2024.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2019-2023 terdapat empat (4) Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan empat (4) jumlah Kecamatan yang ada dalam Kota Lhokseumawe.

E. Penyebarluasan Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, searah dengan hal tersebut hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Melalui program penyebarluasan informasi dimaksud untuk memberikan, menyampaikan informasi yang sehat, akurat kepada masyarakat agar dapat diketahui dengan jelas tentang arah dan tujuan pembangunan yang akan ditempuh serta hasil yang telah dicapai. Selain itu juga ditujukan untuk meningkatkan pemerataan informasi/komunikasi timbal balik secara terbuka dan bertanggung jawab.

Berikut tabel di bawah ini menjelaskan presentase penyebarluasan informasi publik Kota Lhokseumawe dari Tahun 2019 sampai dengan 2023.

Tabel 2.106
Persentase Penyebarluasan Informasi Publik
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah Informasi publik yang tercatat | 3 | 8 | 10 | 27 | 140 |
| 2 | Jumlah informasi Publik yang tersedia | 52 | 55 | 60 | 81 | 493 |
| Persentase | | 5,8 | 14,5 | 16,7 | 33,3 | 28.39 |

Sumber : Diskominfo Kota Lhokseumawe, 2024.

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa jumlah informasi publik yang tercatat 3 informasi dan jumlah informasi publik yang tersedia 52 informasi dengan persentase penyebaran informasi publik sebesar 5.8% pada Tahun 2019 dan meningkat menjadi 28.39% pada Tahun 2023.

Melalui program penyebarluasan informasi dimaksudkan untuk memberikan, menyampaikan informasi yang sehat, akurat kepada masyarakat agar dapat diketahui dengan jelas tentang arah dan tujuan pembangunan yang akan ditempuh serta hasil yang telah dicapai. Persentase pelayanan publik yang terintegrasi Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 2.104 berikut:

Tabel 2.107
Persentase Pelayanan Publik yang Terintegrasi
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|------------|-----------------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah PD yang terintegrasi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Jumlah Seluruh PD | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Persentase | | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |

Sumber : Diskominfo Kota Lhokseumawe, 2024.

Pada tabel di atas dijelaskan bahwa jumlah PD yang pelayanan publik yang terintegrasi baru Dinas Informasi, Komunikasi dan Persandian dari 34 PD yang ada di Kota Lhokseumawe. Tahun 2019 persentase pelayanan publik yang terintegrasi sebanyak 2.9% dengan PD yang ada di Kota Lhokseumawe 34 PD dan 1 PD yang terintegrasi.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian kini memiliki kewenangan sebagai Wali Data statistik sektoral. Kewenangan

tersebut berdasarkan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Tabel 2.108

Persentase PD yang Melakukan Pengamanan Data dan Informasi Terintegrasi Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|-------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Jumlah Seluruh PD | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Persentase | | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |

Sumber : Diskominfo Kota Lhokseumawe, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi hanya satu Perangkat Daerah saja yaitu Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian. Sedangkan Perangkat Daerah yang ada di Kota Lhokseumawe terdapat 34 Perangkat Daerah. Diharapkan untuk tahun berikutnya akan bertambah jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi.

2.1.3.2.2.8 Penanaman Modal

A. Jumlah Investor Bersekala Nasional (PMDN/PMA).

PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan PMA (Penanaman Modal Asing) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Jumlah seluruh investor pada PMDN selama 5 Tahun mencapai 1.616 Investor dan khususnya untuk PMA (penanaman modal asing) tidak ada sama sekali investor. Pada Tahun 2019 jumlah investor PMDN sebesar 152, di Tahun 2020 jumlah investor PMDN/PMA terjadi kenaikan sebesar 434 dan di Tahun 2021 jumlah investor PMDN/PMA terjadi penurunan sebesar 432 namun Tahun 2022 terjadi kenaikan kembali menjadi 459. Dan tahun 2023

meningkat menjadi 470. Berikut tabel Jumlah Investor PMDN/PMA Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

Tabel 2.109
Jumlah Investor PMDN/PMA
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|-----------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah Investor | 152 | 434 | 432 | 459 | 470 |

Sumber : DPMTSPNAKER, 2024

B. Jumlah Investasi Bersekala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah Investasi pada Kota Lhokseumawe pada tahun 2019 jumlah Investasi PMDN sebesar 793 (milyar), di Tahun 2020 jumlah Investasi PMDN/PMA terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 1.268 (milyar) dan pada Tahun 2021 jumlah Investasi PMDN/PMA mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 5.303 (milyar) dan pada tahun 2022 menurun menjadi sebesar 1.107 milyar dan tahun 2023 menurun kembali sebesar 238 milyar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.110
Jumlah Investasi PMDN/PMA
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| Tahun | URAIAN | PMDN/PMA (Milyar) |
|-------|------------------|-------------------|
| 2019 | Jumlah Investasi | 205,9 |
| 2020 | Jumlah Investasi | 168,45 |
| 2021 | Jumlah Investasi | 2.489,5 |
| 2022 | Jumlah Investasi | 1.112,7 |
| 2023 | Jumlah Investasi | 249,5 |

Sumber : DPMTSPNAKER, 2023.

Jumlah investasi tahun 2022 Rp. 1.112.716.277.156,- dan Tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 249.539.799.410,- Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan K-UMKM dan Peraturan Kementrian Investasi/BKPM RI mengklasifikasikan UMKM berdasarkan Aset dan Omset Usaha dengan kategori : Usaha mikro < 1 M, Usaha kecil 1M-5 M, Usaha Menengah 5M-10 M dan Usaha Besar >10 M. maka pencatatan investasi berpengaruh pada klifikasi tersebut, sehingga terjadi penurunan nilai Investasi. Dengan berlakunya sistem OSS RBA, penambahan angka realisasi investasi hanya berlaku untuk pelaku usaha Non UMK (>1M), sementara

pelaku usaha UMK (<1M) tidak masuk kategori penambahan realisasi. Dengan tidak tercatatnya penambahan realisasi LKPM pelaku usaha UMK, maka terjadi penurunan realisasi investasi.

2.1.3.2.2.9 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

A. Indeks Desa Membangun

Desa mempunyai peran yang cukup besar dalam upaya menentukan arah visi membentuk sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik di masa depan. Upaya tersebut dapat dimulai dengan menggerakkan pembangunan, meningkatkan kualitas hidup, serta kesejahteraan masyarakat desa. Aspek yang penting untuk mencapai visi tersebut adalah pembangunan desa. Dalam hal pembangunan desa, instrumen yang perlu diketahui adalah bagaimana permasalahan yang sebenarnya dialami oleh desa dan seberapa besar dan kuat potensi desa yang dimiliki.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Permendesa Nomor 2 Tahun 2016, telah menetapkan beberapa indikator yang memberi kemudahan kepada desa untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemandirian desanya. Dengan adanya instrumen tersebut, desa dapat mengenali dan menggali informasi, sejauh mana permasalahan yang dialami dan potensi yang dimiliki untuk mendorong desa keluar dari jerat masalahnya. Perkembangan status desa di Kota Lhokseumawe per Kecamatan pada tahun 2019-2023 dapat kita lihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.111
Status Desa Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

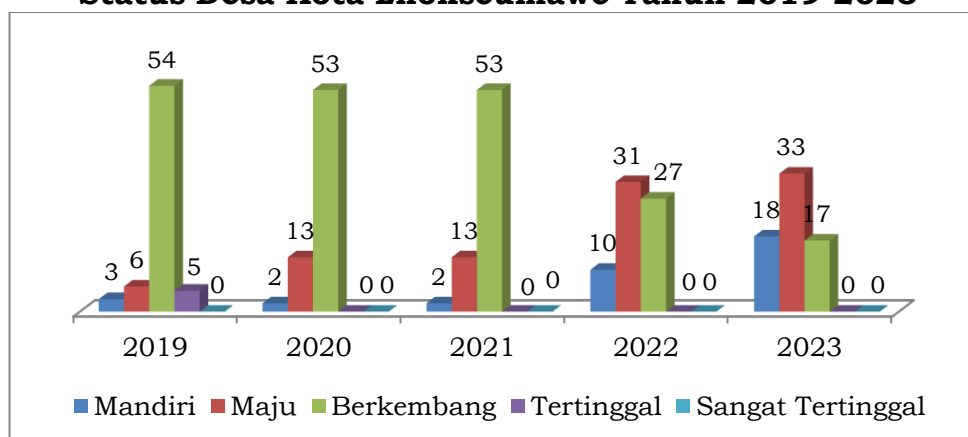
| No. | Nama Desa | Tahun | | | | |
|----------|---------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A | Muara Dua | | | | | |
| | - Mandiri | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | - Maju | 2 | 5 | 5 | 12 | 14 |
| | - Berkembang | 13 | 12 | 12 | 4 | 1 |
| | - Tertinggal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Sangat Tertinggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | Banda Sakti | | | | | |
| | - Mandiri | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 |
| | - Maju | 1 | 3 | 3 | 12 | 6 |
| | - Berkembang | 15 | 14 | 14 | 1 | 0 |
| | - Tertinggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Sangat Tertinggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Blang Mangat | | | | | |

| No. | Nama Desa | Tahun | | | | |
|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Mandiri | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | - Maju | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| | - Berkembang | 21 | 20 | 20 | 19 | 13 |
| | - Tertinggal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Sangat Tertinggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Muara Satu | | | | | |
| | - Mandiri | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | - Maju | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| | - Berkembang | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| | - Tertinggal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Sangat Tertinggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |

Sumber: Kementerian Desa, PDTT dan Transmigrasi, 2024

Untuk lebih jelas jumlah status desa di Kota Lhokseumawe tahun 2019-2023 dapat di lihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.27
Status Desa Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023



Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe Tahun 2024.

Dari Gambar di atas, terlihat bahwa status desa yang sangat tertinggal di Kota Lhokseumawe tidak ada, dan status desa tertinggal menurun dari tahun 2019 sebanyak 5 desa menjadi tidak ada desa tertinggal sejak tahun 2020. Sedangkan status desa berkembang dari tahun 2019 sebanyak 54 desa menurun menjadi 53 desa di tahun 2020 dan 2021, pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi 27 desa yang berstatus desa berkembang dan tahun 2023 menjadi 17 desa. Status desa maju terdapat pada 6 desa pada tahun 2019, pada tahun 2020 dan 2021 meningkat jumlah desa yang berstatus maju menjadi sebanyak 13 desa serta tahun 2022 juga terus mengalami peningkatan menjadi 31 desa yang berstatus desa maju dan tahun 2023 menjadi 33 desa maju. Status desa mandiri pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dimana terdapat 18 desa yang berstatus desa mandiri. Sedangkan tahun 2021 dan 2020 justru mengalami penurunan menjadi 2 desa yang berstatus mandiri, dari kondisi pada tahun 2019 yang terdapat sebanyak 3 desa berstatus mandiri.

Penurunan atau peningkatan status desa dari status mandiri menjadi status maju serta status desa maju menjadi berkembang dan sebaliknya dikarenakan adanya faktor-faktor yang tidak mampu dipertahankan ataupun dipenuhi oleh desa tersebut atau terdapat faktor-faktor yang mampu dipertahankan dan ditingkatkan. Untuk mengetahui nilai Indek Desa Membangun (IDM) di Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.112
Indeks Desa Membangun Kota Lhokseumawe Tahun 2023

| KECAMATAN | NAMA GAMPONG | IDM | STATUS |
|------------------|--------------------------|----------|------------|
| BANDA SAKTI | BANDA MASEN | 0.7219 | MAJU |
| | HAGU BARAT LAUT | 0.7813 | MAJU |
| | HAGU SELATAN | 0.8324 | MANDIRI |
| | HAGU TEUNGOH | 0.7951 | MAJU |
| | JAWA BAROE | 0.8375 | MANDIRI |
| | KAMPUNG JAWA LHOKSEUMAWE | 0.8959 | MANDIRI |
| | KEUDE ACEH | 0.8133 | MAJU |
| | KOTA LHOKSEUMAWE | 0.893 | MANDIRI |
| | KUTA BLANG | 0.8933 | MANDIRI |
| | LANCANG GARAM | 0.9048 | MANDIRI |
| | MON GEUDONG | 0.8635 | MANDIRI |
| | PUSONG BARU | 0.8229 | MANDIRI |
| | PUSONG LHOKSEUMAWE | 0.8168 | MANDIRI |
| | SIMPANG EMPAT | 0.8221 | MANDIRI |
| | TUMPOK TEUNGOH | 0.8511 | MANDIRI |
| | UJONG BLANG | 08263 | MANDIRI |
| | ULEE JALAN | 0.7638 | MAJU |
| | UTEUN BAYI | 0.7702 | MAJU |
| | BLANG MANGAT | ALUE LIM | 0.691 |
| ASAN KAREUNG | | 0.6651 | BERKEMBANG |
| BALOI | | 0.7157 | MAJU |
| BLANG BULOH | | 0.7068 | BERKEMBANG |
| BLANG CUT | | 0.7113 | MAJU |
| BLANG PUNTEUET | | 0.7202 | MAJU |
| BLANG TEUE | | 0.6817 | BERKEMBANG |
| BLANG WEU BAROH | | 0.6906 | BERKEMBANG |
| BLANG WEU PANJOE | | 0.6908 | BERKEMBANG |
| JAMBO MESJID | | 0.7276 | MAJU |
| JAMBO TIMU | | 0.7063 | BERKEMBANG |
| JEULIKAT | | 0.711 | MAJU |
| KEUDE PUNTEUET | | 0.8319 | MANDIRI |
| KUALA | 0.7108 | MAJU | |

| KECAMATAN | NAMA GAMPONG | IDM | STATUS |
|------------|---------------------|--------|------------|
| | KUMBANG PUNTEUET | 0.6797 | BERKEMBANG |
| | MANE KAREUNG | 0.684 | BERKEMBANG |
| | MESJID PUNTEUET | 0.8381 | MANDIRI |
| | RAYEUK KAREUNG | 0.6857 | BERKEMBANG |
| | SEUNEUBOK | 0.7 | BERKEMBANG |
| | TEUNGOH | 0,7035 | BERKEMBANG |
| | TUNONG | 0.7013 | BERKEMBANG |
| | ULEE BLANG MANE | 0.76 | MAJU |
| MUARA DUA | ALUE AWE | 0.8468 | MANDIRI |
| | BLANG CRUM | 0.7419 | MAJU |
| | BLANG POROH | 0.7394 | MAJU |
| | COT GIREK KANDANG | 0.7841 | MAJU |
| | CUT MAMPLAM | 0.7314 | MAJU |
| | KEUDE CUNDA | 0.8002 | MAJU |
| | LHOK MON PUTEH | 0.7575 | MAJU |
| | MEUNASAH ALUE | 0.721 | MAJU |
| | MEUNASAH BLANG | 0.7289 | MAJU |
| | MEUNASAH MANYANG | 0.7554 | MAJU |
| | MEUNASAH MEE | 0.8117 | MAJU |
| | MEUNASAH MESJID | 0.8529 | MANDIRI |
| | MNS. PANGGOI | 0.7783 | MAJU |
| | PALOH BATEE | 0.714 | MAJU |
| | PAYA BILI | 0,7035 | BERKEMBANG |
| | PAYA PUNTEUET | 0,7581 | MAJU |
| | UTEUNKOT | 0.7892 | MAJU |
| MUARA SATU | BATUPHAT BARAT | 0,8102 | MAJU |
| | BATUPHAT TIMUR | 0.8454 | MANDIRI |
| | BLANG NALEUNG MAMEH | 0.797 | MAJU |
| | BLANG PANYANG | 0,7171 | MAJU |
| | BLANG PULO | 0,8749 | MANDIRI |
| | COT TRIENG | 0.6952 | BERKEMBANG |
| | MEUNASAH DAYAH | 0,7063 | BERKEMBANG |
| | MEURIA PALOH | 0.7892 | MAJU |
| | PADANG SAKTI | 0.7843 | MAJU |
| | PALOH PUNTI | 0,7417 | MAJU |
| | UJONG PACU | 0.6921 | BERKEMBANG |

Sumber: Kementerian Desa, PDTT dan Transmigrasi, 2024

B. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik

Dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan menunjang kegiatan pemerintahan desa perlu tersedianya sarana prasarana kantor desa yang memadai. Termasuk ruangan untuk menunjang pelayanan dan kegiatan pemerintahan desa. Kota Lhokseumawe terdiri dari 68 gampong dimana sampai dengan Tahun 2022 hanya 1 gampong saja dengan kondisi kantor yang rusak dan 3 gampong yang belum memiliki kantor untuk urusan pemerintahan gampongnya. Pemerintahan gampong yang kondisi bangunannya rusak maupun yang tidak memiliki kantor dalam menjalankan kegiatan pemerintahan menggunakan sarana prasarana lainnya yang

ada di gampong seperti bangunan yang ada di mesjid, meunasah, gedung pertemuan maupun ruangan lain yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi Kantor Pemerintahan Desa selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.113
Data Kondisi Kantor Pemerintahan Desa
Tahun 2019-2023

| No | Kondisi Kantor | Jumlah Kondisi Kantor Geuchik | | | | | Keterangan (Gampong) |
|---------------|----------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | Kantor Dalam Kondisi Baik | 58 | 60 | 64 | 64 | 61 | |
| 2 | Kantor Dalam Kondisi Rusak | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | Kota Lhokseumawe, Ulee Blang Mane |
| 3 | Belum Memiliki Kantor | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | Hagu Teungoh, Jambo Timu, Batuphat Timur, Blang Panyang, Batuphat Timur, Cot Trieng |
| Jumlah | | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2024.

Selanjutnya cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik diperoleh dari perbandingan antara jumlah kantor pemerintahan desa yang baik dengan jumlah seluruh pemerintahan desa dikali 100%. Sejak Tahun 2019-2023 data cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.114
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa
yang Baik di Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No. | Kecamatan | Jumlah Gampong | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|---------------|--------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | Jumlah kantor yang baik | cakupan sarana prasarana | Jumlah kantor yang baik | cakupan sarana prasarana | Jumlah kantor yang baik | cakupan sarana prasarana | Jumlah kantor yang baik | cakupan sarana prasarana | Jumlah kantor yang baik | cakupan sarana prasarana |
| 1 | Banda Sakti | 18 | 16 | 88,88% | 16 | 88,88% | 16 | 88,88% | 16 | 88,88% | 17 | 100 |
| 2 | Muara Satu | 11 | 6 | 54,54% | 7 | 63,63% | 10 | 90,91% | 10 | 90,90% | 16 | 88.89 |
| 3 | Blang Mangat | 22 | 17 | 72,72% | 18 | 95,45% | 21 | 95,45% | 21 | 95,45% | 20 | 90.91 |
| 4 | Muara Dua | 17 | 13 | 76,47% | 13 | 94,11% | 17 | 100% | 17 | 100% | 8 | 72.73 |
| Jumlah | | 68 | 52 | 76,47% | 54 | 85% | 60 | 94,11% | 64 | 94.11% | 61 | 89.71 |

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2024.

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik di Kota Lhokseumawe pada

tahun 2018 sebesar 79,41%, terjadi penurunan di tahun 2019 menjadi sebesar 76,47% namun di Tahun 2020 dan 2021 kembali terjadi peningkatan sebesar 79,41% hingga mencapai 88,23% serta 94,11% pada tahun 2022. Peningkatan cakupan sarana prasarana perkantoran tersebut menjadi baik pembangunannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

C. Cakupan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Gampong Yang Baik

Dana Desa/Gampong adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa/Gampong yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Kota Lhokseumawe setiap Tahun telah memfasilitasi dana untuk gampong dengan pemerataan kemampuan keuangan antar Gampong yang dilaksanakan dari APBK melalui Alokasi Dana Gampong (ADG). Sejak Tahun 2015 pemerintah pusat mulai APBN menyalurkan Dana Desa (DD). Pada Tahun 2016 Pemerintah Kota Lhokseumawe mulai menyalurkan dana bagian dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHPRD) untuk mendukung pelaksanaan pembangunan gampong. Adapun besaran dana yang disalurkan untuk gampong sejak Tahun 2019 s.d 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.115
Data Penyaluran Dana Ke Gampong
Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Realisasi Penyaluran Dana ke Gampong | | | | |
|---------------|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Alokasi Dana Gampong (ADG) dan Kurang Bayar ADG | 49.971.344.117 | 40.846.685.523 | 44.587.713.353 | 43.990.585.700 | 45.048.128.300 |
| 2 | Dana Desa (DD) | 58.773.329.996 | 60.285.819.000 | 61.858.474.338 | 53.900.119.902 | 61.401.253.255 |
| 3 | Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPRD) | - | - | 1.542.801.500 | 1.659.031.000 | 2.843.458.400 |
| 4 | Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) | - | - | 251.267.448 | 198.394.770 | 340.108.444 |
| Jumlah | | 108.744.674.113 | 101.579.702.858 | 108.319.969.912 | 107.831.150.469 | 109.632.948.399 |

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2024

Dari tabel dapat dilihat bahwa dana yang menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) pada Tahun 2019 sebesar Rp. 108.714.030.915,- dan terus berfluktuasi hingga pada tahun 2023 menjadi Rp. 109.632.948.399,- Dana APBG tersebut digunakan untuk mendanai kebutuhan gampong dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, pemberdayaan masyarakat dan belanja tak terduga. Pemerintah desa/gampong diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan gampong dan kekayaan milik gampong.

Begitu besar peran yang diterima oleh gampong, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah gampong harus bisa menerapkan prinsip tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan gampong harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu perlu adanya pembinaan secara berkesinambungan guna peningkatan kapasitas SDM aparatur gampong yang baik di bidang pengelolaan keuangan.

Pemerintah Kota Lhokseumawe sejak Tahun 2019-2023 telah melakukan pembinaan kepada pemerintah gampong dengan melakukan penyusunan produk hukum gampong, pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan aset gampong serta penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Cakupan pembinaan pengelolaan keuangan dilakukan terhadap seluruh gampong yang ada di 4 kecamatan dalam wilayah kota Lhokseumawe sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut :

Tabel 2.116
Data Cakupan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Gampong
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No. | Kecamatan | Jumlah Gampong | Jumlah Gampong Yang Dibina | | | | |
|-----|-------------|----------------|----------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Banda Sakti | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 2. | Muara Satu | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |

| No. | Kecamatan | Jumlah Gampong | Jumlah Gampong Yang Dibina | | | | |
|-----|---------------|----------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 3. | Blang Mangat | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 4. | Muara Dua | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| | Jumlah | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2024.

Prioritas penggunaan Dana Desa salah satunya adalah pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dengan tujuan memberdayakan gampong dengan usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, peningkatan Pendapatan Asli Gampong (PAG), meningkatkan kemandirian dan kapasitas gampong serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di gampong. Pada Tahun 2018 pemerintah gampong melalui APBG menganggarkan Dana Desa (DD) untuk belanja penyertaan modal gampong guna mendukung modal awal Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Pembinaan dilakukan Pemerintah Kota Lhokseumawe terhadap BUMG sebagai upaya pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap tumbuh kembangnya usaha guna mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan warga gampong dan Pendapatan Asli Gampong (PAG). Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali. Selama Tahun 2019-2023 data pendirian Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.117
Data Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No. | Kecamatan | Tahun Pendirian dan Penyertaan Modal Gampong | | | | | Penyertaan Modal Gampong | BUMDESMA |
|-----|---------------|--|--------------------|------|------|------|--------------------------|----------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| 1 | Banda Sakti | 964.466.591 | - | - | - | - | 4.567.252.991 | - |
| 2 | Muara Satu | 188.000.000 | - | - | - | - | 2.727.410.020 | - |
| 3 | Blang Mangat | 431.000.000 | 257.892.700 | - | - | - | 4.918.607.810 | - |
| 4 | Muara Dua | 451.506.734 | 263.130.589 | - | - | - | 4.214.662.316 | 1.600.000.000 |
| | JUMLAH | 2.034.973.325 | 521.023.289 | - | - | - | 17.000.573.788 | 1.600.000.000 |

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2024.

Dari tabel dapat dilihat bahwa penyertaan modal untuk BUMG di awal Tahun 2018 sebesar Rp. 6.299.209.189,-, di tahun 2019 sebesar Rp. 2.034.973.325,- dan pada Tahun 2020 sebesar Rp. 521.023.289,- sedangkan untuk tahun 2021 dan 2022 belum ada data yang diberikan oleh dinas terkait. Hal ini menunjukkan bahwa penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah gampong kepada

BUMG sangat besar dan guna mencapai tujuan pendirian perlu adanya pembinaan BUMG tersebut dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Cakupan pembinaan Badan Usaha Milik Gampong dilakukan terhadap seluruh gampong yang ada di 4 kecamatan dalam wilayah kota Lhokseumawe sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.118
Cakupan Pembinaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No. | Kecamatan | Jumlah Gampong | Jumlah BUMG | | | | | BUMDESMA |
|---------------|--------------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | Banda Sakti | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | - |
| 2 | Muara Satu | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
| 3 | Blang Mangat | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | - |
| 4 | Muara Dua | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 |
| Jumlah | | 68 | 64 | 67 | 67 | 67 | 65 | 1 |

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2024

Dari tabel dapat dilihat bahwa jumlah BUMG yang ada di Kota Lhokseumawe terus bertumbuh, dimana pada Tahun 2019 sebanyak 64 unit BUMG dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 mencapai 68 unit. Pada Tahun 2019 telah berdiri Badan Usaha Milik Bersama (BUMDESMA) yang beranggotakan 16 gampong dan berada di wilayah Kecamatan Muara Dua. Dan pada Kecamatan Blang Mangat ada 3 (tiga) gampong yang tidak memiliki BUMG yaitu Gampong Alue Lim, Jambo Timu dan Tunong.

D. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut TP PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Lhokseumawe melaksanakan pembinaan secara berjenjang dari TP-PKK Kecamatan sampai TP-PKK Gampong dan dilakukan secara bergantian setiap Tahunnya. Selanjutnya TP-PKK Gampong membina kelompok PKK Dusun dan Kelompok Dasa Wisma. Kelompok binaan PKK merupakan Kelompok-kelompok Masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Gampong

yang terdiri dari Kelompok PKK Dusun, Kelompok Dasa Wisma dan lain-lain. Jumlah kelompok Dasa Wisma adalah bagian dari jumlah Kelompok PKK Dusun yang ada di Gampong.

Tabel 2.119
Data Kelompok Binaan PKK di Kota Lhokseumawe
Tahun 2019-2023

| No. | TP PKK Kecamatan | Jumlah TP-PKK Gampong | Kelompok Binaan | | | | |
|-----|------------------|-----------------------|-----------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Banda Sakti | 18 | 3 | 7 | 2 | 18 | 18 |
| 2. | Muara Satu | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 3. | Blang Mangat | 22 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22 |
| 4. | Muara Dua | 17 | 4 | 2 | 2 | 1 | 17 |
| | Jumlah | 68 | 10 | 12 | 7 | 19 | 68 |

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2023.

Dari tabel dapat dilihat bahwa jumlah kelompok binaan PKK berfluktuasi dan mengalami peningkatan di tahun 2023. Pada Tahun 2019 jumlah yang dibina sebanyak 9 kelompok dan menjadi 68 kelompok di tahun 2023 yang tersebar di 4 Kecamatan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe.

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK diperoleh dari perbandingan antara jumlah kelompok binaan PKK dengan jumlah PKK. Selama Tahun 2019-2023 data kelompok binaan PKK Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.120
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kota
Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Kecamatan | Jumlah TP-PKK | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|----|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | | | Jumlah Binaan | Rata-Rata | Jumlah Binaan | Rata-Rata | Jumlah Binaan | Rata-Rata | Jumlah Binaan | Rata-Rata | Jumlah Binaan | Rata-Rata |
| 1 | Banda Sakti | 18 | 4 | 0,22 | 7 | 0,38 | 2 | 0,28 | 17 | 0,81 | 18 | 100 |
| 2 | Muara Satu | 11 | 2 | 0,18 | 1 | 0,09 | 1 | 0,09 | 1 | 0,05 | 11 | 100 |
| 3 | Blang Mangat | 22 | 2 | 0,09 | 2 | 0,09 | 2 | 0,09 | 1 | 0,05 | 22 | 100 |
| 4 | Muara Dua | 17 | 2 | 0,11 | 2 | 0,11 | 2 | 0,11 | 2 | 0,09 | 17 | 100 |
| | Jumlah | 68 | 9 | 0,13 | 12 | 0,14 | 7 | 0,17 | 21 | 0,30 | 68 | 100 |

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2024.

E. Persentase PKK Aktif

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama PKK, hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan.

Pemberdayaan keluarga adalah segala upaya fasilitas yang bersifat noninstruktif, guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan keluarga untuk mengidentifikasi masalah, merencanakan dan melakukan pemecahan masalahnya, tanpa atau dengan bantuan pihak lain, dengan memanfaatkan potensi keluarga dan fasilitas yang ada di masyarakat. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dalam program kerjanya banyak berkiprah pada peningkatan pemberdayaan kemasyarakatan, kekeluargaan serta peningkatan kualitas perempuan.

TP-PKK Kota Lhokseumawe aktif menjalankan perannya di tengah-tengah masyarakat dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah dengan adanya dukungan dari pemerintah melalui Dana ADG dan Dana Desa sejak Tahun 2018 sampai dengan saat ini, sehingga lebih meningkatkan peran aktif TP-PKK dalam pembangunan gampong khususnya pembinaan perempuan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Persentase PKK aktif diperoleh dari perbandingan antara jumlah PKK aktif dengan jumlah PKK dikali 100%. Pada tahun 2019 persentase PKK aktif sebesar 59,18 persen dan terus berfluktuasi hingga mencapai 100 persen di tahun 2022, namun tahun 2023 menurun menjadi 54,41%. Untuk lebih jelasnya persentase PKK Aktif yang ada di Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.121
Persentase PKK Aktif di Kota Lhokseumawe
Tahun 2019-2023

| No. | Kecamatan | Jumlah TP-PKK Aktif | Persentase (%) | | | | |
|-----|----------------------------|---------------------|----------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Banda Sakti | 18 | 16,66 | 33,34 | 11,12 | 100 | 100 |
| 2. | Muara Satu | 11 | 9,09 | 9,09 | 9,09 | 100 | 45.45 |
| 3. | Blang Mangat | 22 | 9,09 | 9,09 | 9,09 | 100 | 31.82 |
| 4. | Muara Dua | 17 | 23,53 | 17,64 | 11,77 | 100 | 41.18 |
| | Jumlah / Persentase | 68 | 59,18 | 69,16 | 41,07 | 100 | 54.41 |

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2024.

F. Persentase Posyandu Aktif

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh

pelayanan kesehatan dasar/sosial dasar untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.

Posyandu adalah wujud peran serta masyarakat dalam bidang Kesehatan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana yang dikelola dan diselenggarakan untuk dan oleh masyarakat dengan dukungan teknis dari petugas kesehatan. Sasaran utama kegiatan posyandu ini adalah balita, ibu hamil, ibu menyusui serta wanita usia subur. Oleh karena itu kegiatan posyandu sangat penting dirasakan pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat.

Persentase posyandu aktif diperoleh dari perbandingan antara jumlah posyandu aktif dengan total posyandu dikali 100%. Selama Tahun 2019 s.d 2023 jumlah posyandu aktif Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.122
Persentase Posyandu Aktif di Kota Lhokseumawe
Tahun 2019-2023

| No. | Kecamatan | Jumlah Posyandu | Posyandu Aktif | Persentase (%) | | | | |
|-----|----------------------------|-----------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Banda Sakti | 32 | 32 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Muara Satu | 15 | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Blang Mangat | 29 | 29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Muara Dua | 24 | 24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Jumlah / Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2023.

Dari tabel terlihat bahwa persentase posyandu aktif Kota Lhokseumawe sampai dengan saat ini adalah 100 persen dan tersebar di 4 Kecamatan. Kecamatan Banda Sakti merupakan Kecamatan yang memiliki persentase posyandu aktif paling tinggi dibanding kecamatan lainnya mengingat jumlah penduduk yang banyak dan padat di kecamatan tersebut.

Posyandu menyelenggarakan minimal 5 program prioritas yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, imunisasi dan penanggulangan diare. Untuk memantau perkembangannya, Posyandu dikelompokkan ke dalam 4 strata posyandu yaitu strata pratama, strata madya, strata purnama dan strata mandiri.

Posyandu yang berada di wilayah Kota Lhokseumawe memiliki strata yang berbeda-beda, tergantung pada pencapaian indikator tingkat perkembangan posyandu. Pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 strata posyandu Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.123
Strata Posyandu Di Kota Lhokseumawe
Tahun 2019-2023

| No | Strata Posyandu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Pratama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Madya | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 |
| 3 | Purnama | 87 | 87 | 87 | 78 | 78 |
| 4 | Mandiri | 1 | 1 | 1 | 17 | 17 |
| | Jumlah | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 |

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2024.

G. Kerjasama Antar Gampong

Pembangunan kawasan perdesaan merupakan pembangunan antar Desa yang bertujuan untuk mendukung percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan. Pembangunan skala kawasan mengedepankan asas manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat di kawasan perdesaan. Prioritas pembangunan dalam skala kawasan meliputi, penggalian potensi kawasan serta perumusan masalah yang dihadapi oleh masyarakat di kawasan tersebut. Hal ini penting agar penyepakatan keputusan dalam upaya membangun kawasan perdesaan dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki dan sekaligus untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh mayoritas masyarakat serta membuka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut. Untuk melaksanakan pembangunan antar desa dalam skala kawasan ini, perlu dibentuk lembaga antar desa yang keanggotaannya mewakili desa-desa yang melaksanakan kegiatan kerjasama. Sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri Nomor 96 tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa, lembaga yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar desa ini disebut Badan Kerja Sama

Antar-Desa (BKAD). BKAD merupakan kelembagaan masyarakat yang proses pembentukannya atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa.

Tabel 2.124
Cakupan Pembinaan Kerjasama Antar Desa
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No. | Kecamatan | Jumlah Gampong | Target Pembentukan Kerjasama Antar Gampong | | | | |
|-----|--------------|----------------|--|------|------|------|------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Muara Dua | 17 | 17 | - | - | - | |
| 2 | Banda Sakti | 18 | - | - | - | - | |
| 3 | Blang Mangat | 22 | - | - | - | 21 | |
| 4 | Muara Satu | 11 | - | - | - | - | |

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2024.

Dari tabel di atas dilihat bahwa pada Tahun 2019 ada 17 Gampong di Kecamatan Muara Dua dan 21 Gampong di Kecamatan Blang Mangat untuk Tahun 2022 yang sudah membentuk kerjasama antar gampong dalam bentuk Badan Usaha Bersama Milik Gampong. Badan Usaha Bersama Milik Gampong tersebut bertujuan untuk mendukung percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/ atau pemberdayaan masyarakat desa.

2.1.3.2.2.10 Perhubungan

Permasalahan Transportasi di Kota Lhokseumawe kita hanya akan membicarakan Transporasi darat karena Kota Lhokseumawe tidak mempunyai Transportasi Laut dan Udara. Arus Transportasi Darat dalam hal ini Kota Lhokseumawe mempunyai armada Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dimana perkembangan jumlah unit dan penumpang setiap tahunnya sedikit mengalami fluktuasi.

Tabel 2.125
Jumlah Kendaraan dan Arus Penumpang Angkutan Umum
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| Tahun | Unit Kendaraan | Jumlah Penumpang | |
|-------|----------------|------------------|---------|
| | | Naik | Turun |
| 2019 | 129.575 | 172.154 | 165.189 |
| 2020 | 13.207 | 27.068 | 26.575 |
| 2021 | 15.151 | 33.160 | 31.176 |
| 2022 | 15.330 | 41.980 | 36.650 |
| 2023 | 17.155 | 171.550 | 137.550 |

Sumber: Dinas Perhubungan, 2024.

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah unit kendaraan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang menggambarkan situasi pandemic covid-19 sudah mulai berkurang yang menyebabkan mobilitas pergerakan orang menjadi naik kembali. Adapun jumlah kendaraan yang beroperasi di Kota Lhokseumawe tahun 2020 sewaktu awal pandemic covid-19 sebanyak 13.207 unit dengan jumlah penumpang naik 27.068 orang dan turun 26.575 orang, Tahun 2021 naik sedikit menjadi 15.151 unit dengan jumlah penumpang naik 33.160 orang dan turun 31.176 orang. Tahun 2022 mengalami kenaikan signifikan terhadap penumpang yang naik serta turun, jumlah kendaraan yang beroperasi sebanyak 15.330 unit dengan jumlah penumpang yang naik sebanyak 41.980 orang dan yang turun sebanyak 36.650 orang. Pada tahun 2023 mengalami kenaikan terhadap penumpang naik serta turun, jumlah kendaraan yang beroperasi sebanyak 17.155 unit dengan jumlah penumpang naik sebanyak 171.550 penumpang dan jumlah penumpang turun sebanyak 137.550 penumpang.

A. Rasio ijin trayek

Ijin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Jaringan trayek terdiri atas jaringan trayek lintas batas Negara, jaringan trayek antarkota antar provinsi, jaringan trayek antarkota dalam provinsi, jaringan trayek perkotaan dan jaringan trayek perdesaan. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Di Kota Lhokseumawe rasio ijin trayek pada Tahun 2018 sebesar 0,008, sedangkan pada Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,007, Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,008 dan tahun 2021 naik kembali menjadi sebesar 0.009 sedangkan untuk tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 0.008 Hal ini terjadi karena bertambahnya jumlah penduduk dari Tahun 2021.

Dan tahun 2023 jumlah ijin trayek tetap. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.126
Rasio Ijin Trayek di Kota Lhokseumawe
Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah Ijin Trayek | 1.636 | 1.636 | 1.636 | 1.636 | 1.636 |
| 2 | Jumlah Penduduk | 207.202 | 188.713 | 189.941 | 191.396 | 196.067 |
| Rasio Ijin Trayek | | 0,007 | 0,008 | 0,009 | 0,008 | 0,008 |

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

B. Jumlah uji kir angkutan umum

Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan atau dirakit di dalam negeri yang akan di operasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi:

- a. uji tipe yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap dan penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.
- b. uji berkala yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji.

Di Kota Lhokseumawe rasio uji kir angkutan umum tiap tahunnya cenderung stabil yakni pada Tahun 2019 sebesar 1,02, pada Tahun 2020 turn menjadi sebesar 0.52 sedangkan pada Tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi sebesar 1,04 dan untuk tahun 2022 sebesar 1.14. Dan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 1.13 yang dipengaruhi oleh banyaknya kendaraan yang diuji. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.127
Uji Kir Angkutan Umum Kota Lhokseumawe
Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah Kendaraan | 2.558 | 3.845 | 3.195 | 3.612 | 3.682 |
| 2 | Kendaraan yang di Uji | 2.496 | 2.006 | 3.078 | 3.154 | 3.252 |
| | Rasio | 1,02 | 0,52 | 1,04 | 1.14 | 1.13 |

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

C. Jumlah Pelabuhan Udara/Laut/Terminal Bis

Di Kota Lhokseumawe hanya terdapat Terminal Bis Prasarana Transportasi bagi penduduk Kota Lhokseumawe dikarenakan belum adanya Pelabuhan Udara dan Laut sebagai prasarana transportasi masyarakat Kota Lhokseumawe seperti yang telah dijelaskan pada sub Arus Penumpang Umum Kota Lhokseumawe diatas. Oleh Karena itu tidak ada penambahan fasilitas Pelabuhan Baik Udara maupun Laut di Kota Lhokseumawe pada setiap tahunnya Untuk lebih jelas dapat dilihat pada dibawah ini:

Tabel 2.128
Jumlah Pelabuhan Udara, Laut dan Terminal Bis
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|-----|-------------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Pelabuhan Udara | - | - | - | - | - |
| 2 | Pelabuhan Laut | - | - | - | - | - |
| 3 | Terminal Bis/ Barang | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

D. Kepemilikan KIR angkutan umum

Persentase kepemilikan KIR bagi setiap kendaraan yang ada di Kota Lhokseumawe mengalami penurunan setiap tahunnya terutama pada tahun 2020 seperti terlihat pada tabel dibawah ini bahwa pada tahun 2019 persentase Kir adalah 97% sedangkan pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 88%. Hal ini terjadi disebabkan oleh meningkatnya jumlah kendaraan dari tahun sebelumnya, sedangkan yang melakukan KIR sudah meningkat dari tahun lalu. Akan tetapi karena selisih jumlah kendaraan dengan kendaraan yang melakukan KIR menyebabkan terjadinya persentase. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.129
Kepemilikan KIR Angkutan Umum
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|--------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Angkutan Umum yang memiliki KIR | 2.496 | 2.006 | 3.078 | 3.154 | 3.252 |
| 2 | Jumlah Angkutan Umum | 2.558 | 3.845 | 3.195 | 3.612 | 3.682 |
| Peresentase | | 97 | 52 | 96 | 87 | 88 |

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

E. Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Lhokseumawe mengalami kendala karena tidak adanya peralatan yang memadai untuk melakukan global checking pada setiap kendaraan yang ada. Pada setiap tahunnya petugas yang berwenang dalam melakukan pengujian kelayakan Angkutan umum hanya mengecek administrasi saja, oleh karena itu proses berlangsungnya pengujian tersebut hanya membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit saja. Adapun Pengujian kelayakan Angkutan umum di kota Lhokseumawe dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.130
Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Periode Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan |
| 2 | Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) | 20 Menit | 20 Menit | 30 Menit | 30 Menit | 30 Menit |

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

F. Pemasangan Rambu-rambu

Rambu-rambu merupakan hal yang penting bagi kelancaran lalu lintas di Wilayah Kota Lhokseumawe. Yang mana Rambu-rambu lalu lintas merupakan bagian dari perlengkapan jalan yang berupa lambing, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Oleh karena itu rambu-rambu merupakan sebuah petunjuk maupun peringatan bagi setiap orang. Di Kota Lhokseumawe jumlah rambu-rambu belum tersedia dengan maksimal dimana dari jumlah rambu-rambu yang harusnya tersedia diseluruh elemen kota

Lhokseumawe yaitu jumlah rambu yang seharusnya tersedia 195, pada tahun 2019 jumlah pemasangan rambu-rambu sebanyak 60 ubit dan 2020 ada pemasangan rambu-rambu berjumlah 80 rambu, sedangkan tahun 2021 dan tahun 2022 tidak ada pemasangan rambu yang baru. Pada tahun 2023 ada pemasangan rambu-rambu sebanyak 6 unit dari 195 rambu yang seharusnya ada sehingga persentasenya hanya 3.1%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.131
Pemasangan Rambu-Rambu
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|-------------------|---|-----------|-----------|----------|----------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu | 60 | 80 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Jumlah Rambu-Rambu yang seharusnya tersedia | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Persentase | | 30 | 41 | 0 | 0 | 3.1 |

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

G. Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Kendaraan

Panjang jalan yang diperhitungkan adalah jalan nasional (belum termasuk jalan tol), jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan kota. Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan diperoleh dengan membagi jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (km). Nilai ini berarti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan. Kendaraan yang diperhitungkan disini terdiri dari mobil penumpang, bus truk, dan sepeda motor.

Panjang Jalan di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2018 yaitu 412 km, jumlah kendaraan 50.340 unit terjadi peningkatan ditahun 2021 panjang jalan tetap 412 km sedangkan jumlah kendaraan 55.461 unit sedangkan untuk tahun 2022 terjadi penurunan disebabkan oleh berkurangnya jumlah kendaraan bermotor di Kota Lhokseumawe sehingga Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan masih berkisar 0.008. Dan pada Tahun 2023 rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan tetap sebesar 0.008 karena jumlah kendaraan yang bertambah tidak terlalu signifikan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.132
Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Kendaraan
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Panjang Jalan | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| 2 | Jumlah Kendaraan | 52.402 | 59.064 | 55.461 | 50.546 | 50.646 |
| | Rasio | 0.008 | 0,007 | 0,007 | 0.008 | 0.008 |

Sumber : Dinas PUPR dan Samsat Kota Lhokseumawe, 2023

H. Jumlah Barang yang terangkut Angkutan Umum

Jumlah barang yang terangkut angkutan umum pada setiap tahunnya terjadi peningkatan kecuali pada tahun 2020 mengalami penurunan. Jumlah barang yang terangkut angkutan umum pada Tahun 2018 sebesar 7,236 ton, pada Tahun 2019 sebesar 7,510 ton, pada Tahun 2020 sebesar 5,805 ton pada Tahun 2021 sebesar 6,552 ton dan tahun 2022 mengalami peningkatan drastis sebesar 18.306 ton yang mana hal tersebut akibat meningkatnya aktifitas angkutan barang serta semakin bagusnya sistem pendataan barang pada Terminal Angkutan Barang Kota Lhokseumawe namun pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan menjadi 15.666 seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.133
Jumlah Barang yang Terangkut Angkutan Umum
Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|--|-------|-------|-------|--------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah Barang yang Terangkut Angkutan Umum (ton) | 7.510 | 5.805 | 6.552 | 18.306 | 15.666 |

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

I. Jumlah Orang melalui Dermaga/Bandara/Terminal Pertahun

Jumlah Orang melalui Dermaga/Bandara/Terminal per Tahun dikota Lhokseumawe dari Tahun 2019 sampai Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.134
Jumlah Orang melalui Dermaga/Bandara/Terminal per Tahun
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|---|---------|--------|--------|--------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun | 337.343 | 53.643 | 64.336 | 78.630 | 171.550 |

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah orang yang melalui Dermaga/Bandara/Terminal per tahun di Kota Lhokseumawe dari Tahun 2018 sampai Tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan. Pada Tahun 2019 sebanyak 337,343 orang, pada Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebanyak 53.643 orang, pada Tahun 2021 meningkat menjadi sebanyak 64.336 orang dan pada tahun 2022 bertambah kembali menjadi sebanyak 78.630 orang.

J. Fasilitas Keselamatan

Keselamatan jalan raya adalah suatu upaya mengurangi kecelakaan jalan raya dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kecelakaan, seperti: prasarana, faktor sekeliling, sarana, manusia dan rambu atau peraturan.

Perlengkapan jalan ini meliputi: rambu-rambu (termasuk nomor ruas jalan), marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), lampu jalan, alat pengendali dan alat pengamanan pengguna jalan, serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan seperti tempat parkir dan fasilitas pendukung dan lalu lintas angkutan jalan (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, pasal 25).

Pada tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa fasilitas keselamatan yang diadakan setiap tahunnya bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia. Sementara kebutuhan fasilitas keselamatan yang harusnya ada adalah 8 fasilitas keselamatan.

Tabel 2.135
Fasilitas Keselamatan Jalan
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Fasilitas keselamatan yang diadakan | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 2 | Fasilitas keselamatan yang seharusnya ada | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Persentase | | 75,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 25,00 |

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

2.1.3.2.2.11 Koperasi dan Usaha Kecil & Menengah

A. Persentase Koperasi Aktif

Jumlah Koperasi di Kota Lhokseumawe dari Tahun 2018 ke Tahun 2019 mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa koperasi Kota Lhokseumawe masih belum beraktifitas seperti yang diharapkan. Kemudian pada Tahun 2020 s.d 2022 koperasi aktif bertambah. Untuk lebih jelas dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel 2.136
Persentase Koperasi Aktif
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|-------------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah Koperasi Aktif | 100 | 104 | 107 | 108 | 108 |
| 2 | Jumlah Koperasi | 251 | 205 | 208 | 209 | 209 |
| Persentase | | 39,84 | 50,7 | 51,4 | 51,6 | 51,6 |

Sumber: Disperindagkop, 2024.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 persentase koperasi aktif di Kota Lhokseumawe hanya sebesar 39.84 persen dan tahun selanjutnya terus meningkat sehingga pada Tahun 2022 menjadi menjadi 51,6 persen.

2.1.3.2.2.12 Kepemudaan dan Olahraga

A. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Pemuda merupakan aset potensial yang dapat meneruskan cita-cita bangsa. Pemuda merupakan kader pemimpin bangsa. Pada era globalisasi, kegagalan dalam menyiapkan pemuda yang berkualitas dapat menyebabkan suatu negara mengalami kemunduran dan tidak mampu bersaing dengan negara lain. Organisasi pemuda di Kota Lhokseumawe hingga Tahun 2023 berjumlah 16 namun yang tidak aktif berjumlah 4 yang tergabung dalam wadah Karang Taruna

Gampong. Berikut data Organisasi Pemuda Yang Aktif Kota Lhokseumawe:

Tabel 2.137
Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | | Ket |
|-------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif | 50 | 50 | 50 | 16 | 16 | |
| 2 | Jumlah seluruh Organisasi Pemuda | 60 | 60 | 60 | 20 | 20 | |
| Persentase | | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 80 | 80 | |

Sumber: Disporapar, 2024

B. Cakupan Pembinaan Olahraga

Berikut data Cakupan Pembinaan Olahraga Kota Lhokseumawe dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.138
Cakupan Pembinaan Olahraga
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | | Ket |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | Jumlah cabang olahraga yang dibina | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | |
| 2 | Jumlah seluruh cabang olahraga yang terdaftar | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | |
| Persentase | | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 77,77 | 77,77 | |

Sumber: Disporapar, 2024.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa cakupan pembinaan cabang olahraga di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2023 sebesar 77,78 persen dari total cabang olahraga yang ada di Kota Lhokseumawe. Secara kuantitas jumlah cabang olahraga yang dibina di Kota Lhokseumawe mengalami penurunan sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023.

C. Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi

Penguatan kapasitas pelatih yang berkompeten atau bersertifikat menjadi indikator penting dalam hal pembinaan olahraga. Kota Lhokseumawe memiliki 60 pelatih yang bersertifikat, sedangkan jumlah seluruh pelatih yang ada hingga Tahun 2023 adalah 87. Terjadi penurunan persentase cakupan pelatih yang bersertifikasi pada tahun 2022 dibandingkan dengan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa cabang

olahraga yang tidak lagi aktif, pelatih yang meninggal dunia atau berpindah daerah.

Tabel 2.139
Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi
Kota Lhokseumawe Tahun 2019 s.d 2023

| No | Uraian | Tahun | | | | | Ket |
|-------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | Jumlah pelatih bersertifikat | 53 | 53 | 53 | 60 | 60 | |
| 2 | Jumlah seluruh pelatih | 146 | 146 | 146 | 87 | 87 | |
| Persentase | | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 68.9 | 68.9 | |

Sumber: Disporapar, 2024.

2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Pilihan

2.1.3.3.1 Pariwisata

A. Objek Wisata

Kunjungan wisata di Kota Lhokseumawe terdiri dari wisatawan domestik dan wisatawan manca negara. Pada umumnya wisatawan lebih banyak mengunjungi destinasi wisata alam, baik pada akhir pekan maupun saat liburan. Berikut ini adalah objek wisata Kota Lhokseumawe meliputi; 1. Objek wisata alam, 2. Objek Wisata budaya/spiritual, dan 3. Objek wisata buatan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.140
Objek Wisata Kota Lhokseumawe

| No | Uraian | Lokasi | Ket |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----|
| 1. | Wisata Alam | | |
| | a. Pantai Ujon Blang | Kecamatan Banda Sakti | |
| | b. Pulau semadu | Kecamatan Muara Satu | |
| | c. Pantai pulo daruet | Kecamatan Muara Dua | |

| No | Uraian | Lokasi | Ket |
|-----------|---|-------------------------------------|-----|
| 2. | Wisata Budaya/Spiritual | | |
| | a. Benteng (kurok-kurok) tentara Jepang | Gp. Ujong Blang (Banda Sakti) | |
| | b. Gua Jepang cot Panggoi | Gp. Blang Panyang (Muara Satu) | |
| | c. Meriam Belanda | Gp. Kuta Blang (Banda Sakti) | |
| | d. Tugu Pahlawan TKR | Gp. Peukan Cunda (Muara Dua) | |
| | e. Tugu lokasi syahid Tgk. Abdul Jalil Cot Plieng | Gp. Blang Buloh (Kec. Blang Mangat) | |
| | f. Tiang gantungan Tgk. Chik Ditungong | Gp. Jawa Lama (Banda Sakti) | |
| | g. Mon tujuh | Gp. Mesjid (Blang Mangat) | |
| | h. Makam Tgk. Dilhokseumawe | Gp. Banda Masen (Banda Sakti) | |
| | i. Makam Tgk. Chik Ditunong | Gp. Mon Geudong (Banda Sakti) | |
| | j. Makam prajurit Tgk. Abdul Jalil Cot Plieng | Gp. Blang Buloh (Blang Mangat) | |
| | k. Makam Mualim Taufik Shaleh | Gp. Blang Weu Panjo (Blang Mangat) | |
| | l. Makam Putroe Neng | Gp. Blang Pulo (Muara Satu) | |
| | m. Makam Tgk. Syiah Hudam | Gp. Blang Pulo (Muara Satu) | |
| | n. Makam Tgk. Chik Dipaloh | Gp. Cot Trieng (Muara Satu) | |
| | o. Makam Tgk. Jrad Meuindram | Gp. Cot Trieng (Muara Satu) | |
| | p. Makam Tgk. Chik Buket Krueng | Gp. Cot Trieng (Muara Satu) | |
| | q. Museum P. Ramli | Gp. Paloh (Muara Dua) | |
| 3. | Wisata Buatan | | |
| | a. Reservoir (Waduk) | Gp. Pusong (Banda Sakti) | |
| | b. Taman Riyadah | Kecamatan Banda Sakti | |
| | c. Taman Mangat Cerita | Kecamatan Blang Mangat | |
| | d. Waduk Jeulikat | Kecamatan Blang Mangat | |

Sumber: Lhokseumawe Dalam Angka, 2024.

2.1.3.3.2 Statistik

A. Buku “Kabupaten/Kota Dalam Angka”

Buku Lhokseumawe Dalam Angka yang diterbitkan pada setiap Tahun merupakan hasil kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Lhokseumawe dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Lhokseumawe. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Kepres RI Nomor 86 Tahun 1998 tentang BPS Bab V Pasal 26 Ayat (2), bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan data statistik regional bagi Pemerintah Daerah, penyediaan dana dan fasilitasnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setempat.

B. Buku “PDRB Kabupaten/Kota”

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Lhokseumawe yang juga merupakan kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Lhokseumawe dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Lhokseumawe sudah tersedia setiap Tahun guna memberikan gambaran mengenai struktur ekonomi Kota Lhokseumawe baik ekonomi secara keseluruhan maupun masing-masing sektor.

2.1.3.3.3 Perpustakaan

Kondisi Pelayanan umum Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang perpustakaan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain jumlah perpustakaan, jumlah pengunjung perpustakaan dan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah.

A. Jumlah Perpustakaan

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat dimana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistim tertentu, bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur dan menyajikan bahan pustaka untuk masyarakat umum. Pengunjung perpustakaan adalah pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam satu tahun. Pengunjung perpustakaan dihitung berdasarkan pengunjung yang mengisi daftar

kehadiran atau data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung. Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan menggambarkan tingginya budaya baca di daerah, sehingga jumlah pengunjung perpustakaan yang tinggi merupakan indikator efektifitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah. Rincian data jumlah gedung perpustakaan di Kota Lhokseumawe dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.141
Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Tahun | Jumlah Penduduk | Perpustakaan | | | | | Total | Rasio |
|----|-------|-----------------|--------------|-----|----|----|---------|-------|-------|
| | | | PU/PD | PS | PT | PK | PONTREN | | |
| 1 | 2019 | 207.202 | 15 | 163 | 13 | 14 | 8 | 213 | 1.028 |
| 2 | 2020 | 188.713 | 15 | 163 | 13 | 14 | 8 | 213 | 1.129 |
| 3 | 2021 | 189.941 | 15 | 163 | 13 | 14 | 8 | 213 | 1.121 |
| 4 | 2022 | 191.396 | 15 | 163 | 13 | 14 | 14 | 217 | 1.113 |
| 5 | 2023 | 196.067 | 15 | 158 | 14 | 12 | 8 | 207 | 1.081 |

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2024.

Tabel di atas menjelaskan bahwa sejak Tahun 2019-2022 jumlah perpustakaan di Kota Lhokseumawe terdapat 213 perpustakaan dan 2023 menjadi 207. Seiring dengan penambahan jumlah penduduk, rasio perpustakaan terhadap satuan penduduk mengalami fluktuasi setiap Tahunnya. Pada Tahun 2019 rasio sebesar 1.028, Tahun 2020 rasio sebesar 1.129 dan Tahun 2021 rasio sebesar 1.121, serta Tahun 2022 sebesar 1.113 dan tahun 2023 rasio perpustakaan mengalami penurunan menjadi sebesar 1.081 dikarenakan berkurangnya jumlah perpustakaan dan bertambahnya jumlah penduduk.

2.1.3.3.4 Kearsipan

A. Pengelolaan Arsip Secara Baku

Kearsipan memegang peran penting bagi kelancarannya organisasi, dimana pengelolaan arsip secara baku dapat menjadi sumber informasi dan sebagai pusat ingatan bagi organisasi. Kearsipan merupakan suatu proses penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pemeliharaan dan perawatan serta penyimpanan dokumen menurut sistem tertentu.

Menurut data dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe, pada tahun 2019 jumlah persentase pengelolaan

arsip secara baku sebesar 2.94% atau 1 SKPD dari Jumlah 34 SKPD. Persentase pengelolaan arsip ini meningkat dikarenakan jumlah OPD yang mengelola Arsip di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2021 menjadi 15 SKPD. Dan pada tahun 2022-2023 menurun menjadi 8 SKPD. Berikut tabel data jumlah pengelolaan arsip secara baku di Kota Lhokseumawe:

Tabel 2.142
Jumlah SKPD Yang Mengelola Arsip Secara Baku
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Jumlah Pengunjung | | | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah SKPD yang mengelola arsip secara baku | 1 | 10 | 15 | 8 | 8 |
| 2 | Jumlah SKPD | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Persentase | | 2.94 | 29.41 | 44.11 | 23.53 | 23.53 |

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2024.

2.1.3.3.5 Pertanian

A. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian Kota Lhokseumawe dalam 5 (lima) tahun terakhir berfluktuatif. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2020 dan terendah pada tahun 2023. Tahun 2019 memberikan kontribusi sebesar 9.37% dengan migas dan tanpa migas sebesar 11.24% terus meningkat sampai Tahun 2020 sebesar 10.10% dengan migas, sedangkan tanpa migas sebesar 12.12%. kemudian terjadi penurunan di Tahun 2021 sebesar 9.80% dengan migas dan tanpa migas sebesar 11.70%. Kontribusi dengan migas Tahun 2022 sebesar 9.40% dan tanpa migas sebesar 11.27% mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Dan pada tahun 2023 mengalami penurunan kembali sehingga menjadi 9.18% dan tanpa migas sebesar 10.84%. Untuk lebih detail data selama 5 (lima) tahun terakhir ada pada tabel berikut:

Tabel 2.143
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (ADHB)
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun (Juta Rupiah) | | | | |
|----|---|---------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 833.994.5 | 895.154.5 | 922.451.3 | 965.874.2 | 1.025.598.0 |
| 2 | Jumlah PDRB dengan Migas | 8.898.379,7 | 8.867.266,5 | 9.431.385.9 | 10.277.625.4 | 11.169.632.1 |
| 3 | Jumlah PDRB tanpa Migas | 7.417.143,2 | 7.386.928,9 | 7.890.150.1 | 8.567.858.1 | 9.457.579.4 |
| | Kontribusi terhadap PDRB dengan Migas (%) | 9.37 | 10.10 | 9.80 | 9.40 | 9.18 |
| | Kontribusi terhadap PDRB tanpa Migas (%) | 11.24 | 12.12 | 11.70 | 11.27 | 10.84 |

Sumber: PDRB 2018-2022, Lhokseumawe Dalam Angka, 2024

B. Produktifitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Produktivitas padi dan bahan pangan lainnya di Kota Lhokseumawe dalam lima Tahun terakhir secara keseluruhan menunjukkan fluktuasi sejak 2019-2023. Puncak produksi padi di Kota Lhokseumawe terjadi pada Tahun 2021, sementara itu, pada Tahun 2023 komoditi padi menurun dari kondisi sebelumnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.144
Produktivitas Komoditas Pangan (Kg)
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No. | Uraian | Tahun | | | | | Ha |
|-----|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | Padi | 9.954.000 | 10.345.000 | 10.362.000 | 8.882.500 | 7.294.710 | 1.326.31 |
| 2 | Jagung | - | - | - | - | - | 4.5 |
| 3 | Ubi Kayu | 1.764.000 | - | - | 328 | - | 50 |
| 4 | Ubi Jalar | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Kedelai | - | - | - | - | - | - |

Sumber : DKP3, 2023

2.1.3.3.6 Perdagangan

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Perdagangan adalah pengaman pembangunan nasional di bidang ekonomi yang disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan

kesatuan ekonomi nasional. Sedangkan kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor dan devisa, pemeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri demi kepentingan nasional Kondisi Pelayanan umum Urusan pemerintahan pilihan bidang perdagangan dapat dilihat dari kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.

Perdagangan merupakan salah satu pilar utama pembangunan yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan ekonomi Kota Lhokseumawe. Pada Tahun 2019 sektor ini mampu memberikan kontribusi sebesar 21,91% dengan migas, sedangkan tanpa migas memberikan kontribusi sebesar 26.29%. Terjadi kenaikan kontribusi hingga Tahun 2023 sebesar 22.93% dengan migas dan tanpa migas sebesar 27.08%, Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.145
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (ADHB)
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Sektor Perdagangan | 1.949.923,8 | 1.889.921,5 | 2.013.276,4 | 2.184.656,3 | 2.561.330,4 |
| 2 | Jumlah PDRB dengan Migas | 8.898.379,7 | 8.867.266,5 | 9.431.385,9 | 10.277.625,4 | 11.169.632,1 |
| 3 | Jumlah PDRB tanpa Migas | 7.417.143,2 | 7.386.928,9 | 7.890.150,1 | 8.567.858,1 | 9.457.579,4 |
| | Kontribusi terhadap PDRB dengan Migas (%) | 21.91 | 21.31 | 21.35 | 21.26 | 22.93 |
| | Kontribusi terhadap PDRB tanpa Migas (%) | 26.29 | 25.58 | 25.52 | 25.49 | 27.08 |

Sumber : PDRB Lhokseumawe 2018-2022, LDA 2024

2.1.3.3.7 Perindustrian

Kondisi Pelayanan umum Urusan pemerintahan pilihan bidang perindustrian dapat dilihat dari kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Kontribusi kegiatan usaha di sektor industri dalam pembentukan *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) Kota Lhokseumawe dengan migas yaitu sebesar 18.78% pada tahun 2019 dan menurun menjadi 18.12% pada tahun 2023. Dan mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 18.12%. Ini berbeda dengan

tanpa migas dalam sektor pengolahan industri yang memberikan kontribusi sebesar 22.53% pada tahun 2019 dan pada tahun 2023 sebesar 21.40%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.146
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (ADHB)
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Sektor Industri | 1,671,237.2 | 1,672,124.6 | 1.793.400.5 | 2.002.471.4 | 2.023.961.6 |
| 2 | Jumlah PDRB dengan Migas | 8.898.379,7 | 8.867.266,5 | 9.431.385.9 | 10.277.625.4 | 11.169.632.1 |
| 3 | Jumlah PDRB tanpa Migas | 7.417.143,2 | 7.386.928,9 | 7.890.150.1 | 8.567.858.1 | 9.457.579.4 |
| Kontribusi terhadap PDRB dengan Migas (%) | | 18.78 | 18.86 | 19.02 | 19.48 | 18.12 |
| Kontribusi terhadap PDRB tanpa Migas (%) | | 22.53 | 22.64 | 22.73 | 23.37 | 21.40 |

Sumber : PDRB Lhokseumawe 2018-2022, LDA 2024

2.1.3.3.8 Kelautan dan Perikanan

A. Produksi Perikanan Budidaya

Produksi perikanan budidaya didominasi oleh kelompok bandeng, udang, kerapu dan mujair. Berikut tabel produksi perikanan:

Tabel 2.147
Produksi Perikanan Budidaya
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| NO | URAIAN | Tahun | | | | |
|-------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah Produksi Ikan (ton) | 3.470 | 3.350 | 3.400 | 8.065,56 | 1.995.43 |
| 2 | Target Daerah (ton) | 4.450 | 4.895 | 5.385 | 8.085 | 5.864 |
| Persentase | | 77.97 | 68.44 | 63.14 | 99.76 | 34.03 |

Sumber: DKP3, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa produksi tertinggi perikanan budidaya sejak Tahun 2019-2023 terjadi pada Tahun 2022 yang mencapai 99.76% dan pada tahun 2023 produksi perikanan budidaya mengalami penurunan menjadi 34.03%. Penurunan produksi perikanan budidaya dikarenakan adanya cuaca ekstrim, banjir dan penyakit yang menyerang beberapa komoditi

unggulan seperti kerapu, udang, mujahir dan bandeng. Semakin tinggi produksi budidaya ikan akan memberikan nilai lebih terhadap perekonomian masyarakat. Untuk jenis ikan yang umumnya dilakukan petani tambak di wilayah Kota Lhokseumawe adalah udang, ikan bandeng, kerapu, nila, lele, mujahir selebihnya ikan kakap.

2.1.3.4 Fokus Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.3.4.1 Perencanaan

Kondisi Pelayanan umum Urusan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA, tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/Perkada, tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA dan tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA.

A. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA

Dalam pembangunan daerah, peran serta dan partisipasi masyarakat memiliki arti yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Melalui penyediaan ruang bagi publik ini diharapkan pembangunan daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 Tahun dihitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025. RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah. Kota Lhokseumawe telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan ditetapkan dengan Qanun Nomor 4 Tahun 2014.

Pada Tahun 2024 sedang dilakukan penyusunan RPJPK Lhokseumawe 2025-2045.

B. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) Tahun. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Walikota yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Perangkat Daerah, program lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Untuk Tahun 2017-2022 Kota Lhokseumawe telah menetapkan Qanun RPJM dengan Nomor 7 Tahun 2019. Dan pada tahun 2024 sedang disusun RPJMK Lhokseumawe 2025-2029 Teknokratik.

C. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimaksud guna mengidentifikasi permasalahan pembangunan secara rutin dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya baik yang berasal dari dinamika internal maupun eksternal. Atas dasar hal tersebut penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi suatu keharusan bagi daerah.

RKPD Kota Lhokseumawe yang akan dipergunakan oleh Organisasi pernagkat daerah sebagai acuan untuk melaksanakan Rencana Kerja pada setiap Tahun disusun dengan harapan dapat terjadi keseimbangan serta mempersempit egoisme sektoral dalam pelaksanaannya. Penyusunan RKPD mendasarkan pada fungsi-fungsi pelayanan dasar Pemerintah Daerah yang merupakan analisis usulan dari SKPD.

Selama periode 2019 sampai dengan 2023 dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Lhokseumawe setiap Tahunnya telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota (Perwal), dimana RKPD tersebut merupakan penjabaran dari program RPJMD

Lhokseumawe Tahun 2019-2023. Penjabaran RPJMD kedalam RKPD merupakan bahan penyusunan RAPBD. Penjabaran RPJMD diawali dengan penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD oleh Kepala Bappeda, yang diikuti secara bersamaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang merupakan penjabaran dari Renstra Organisasi Perangkat Daerah. RKPD berisi tujuan, sasaran, prioritas, program dan kegiatan adalah hasil dari suatu proses berjenjang yang dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Gampong, Kecamatan hingga Kota. Dengan demikian materi dalam RKPD adalah refleksi dari kebutuhan masyarakat secara *bottom up* yang dipaduserasikan dengan program dan kegiatan yang direncanakan OPD yang bersifat *top down* yang diselaraskan dengan program dan kegiatan dalam RPJMD.

D. Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan hasil perencanaan taarsipta ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Kota Lhokseumawe kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah. Dokumen RTRW digunakan juga sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan dokumen RTRW dimaksudkan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah serta menjadi acuan lokasi investasi kota baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta. Disamping itu, RTWR dimaksudkan sebagai acuan dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang serts arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi; dan acuan dalam administrasi pertanahan. Dokumen RTRW Kota Lhokseumawe telah ditetapkan dengan Qanun Nomor 1 Tahun 2014. Dan pada tahun 2024 RTRW Kota Lhokseumawe telah selesai di revisi dan sedang proses Qanun.

2.1.3.4.2 Keuangan

Kondisi Pelayanan umum Urusan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dapat dilihat dari Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Terhadap Laporan Keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP. Dalam batas tertentu terkait materialitasnya, hal ini mungkin mempengaruhi opini atas kewajaran LK secara keseluruhan, sehingga BPK harus mempertimbangkan secara cermat pengaruh *fraud* tersebut terhadap penyajian laporan keuangan.

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kota Lhokseumawe pada Tahun 2016 adalah wajar dengan pengecualian (WDP), berbeda dari Tahun sebelumnya, dimana pada LKPD TA 2015 Pemerintah Kota Lhokseumawe mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Penurunan opini dikarenakan terdapat permasalahan pada Tahun 2016 dalam pengendalian atas utang belanja dimana terdapat perbedaan saldo utang belanja antara Neraca *unaudited* dengan data SKPD yang tidak dapat dijelaskan dan perbedaan dengan hasil reviu Inspektorat.

2.1.3.4.3 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kondisi Pelayanan umum Urusan penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan jumlah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah.

A. Persentase ASN yang Mengikuti DIKLAT Formal

Sejak periode 2019-2023 jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural masih sangat kecil sekali. Hal ini terlihat dari tidak adanya pejabat ASN yang mengikuti diklat struktural di Tahun 2022 dari 305 jumlah total jabatan struktural. Pada Tahun 2019 persentase pejabat ASN mengikuti diklat struktural mencapai 15,64% dari 518 jumlah total jabatan hanya 81 orang saja yang mengikuti diklat struktural tersebut. Dan untuk Tahun 2020 mencapai 11,3% dari 495 jumlah total jabatan hanya 56 orang saja yang mengikuti diklat struktural. Pada Tahun 2021 mencapai 8,7% yang mengikuti diklat struktural. Tahun 2022 tidak ada yang mengikuti diklat struktural dan tahun 2023 pejabat ASN yang mengikuti diklat PKN dan PKA sebanyak 37 orang dan 38 orang Teknis Fungsional Lainnya (Satpol PP).

Berikut tabel persentase pejabat ASN mengikuti Diklat Struktural Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023;

Tabel 2.148
Persentase Pejabat ASN mengikuti DIKLAT Struktural
Kota Lhokseumawe Tahun 2019- 2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|---|--------------|-------------|------------|----------|--------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah Pejabat ASN yang mengikuti | | | | | |
| | - PIM II | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| | - PIM III | 17 | 8 | 6 | 0 | 30 |
| | - PIM IV | 62 | 47 | 37 | 0 | 0 |
| | - Teknis Fungsional Lainnya (Satpol PP) | - | - | - | - | 38 |
| 2 | Jumlah Total Jabatan | 518 | 495 | 513 | 305 | 208 |
| | Persentase | 15,64 | 11,3 | 8,7 | 0 | 17,78 |

Sumber : BKPSDM Kota Lhokseumawe, 2023.

B. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah

Jumlah jabatan struktural dan fungsional di lingkup Pemerintah Kota Lhokseumawe sejak Tahun 2019-2023 menunjukkan penambahan setiap tahunnya. Total jumlah jabatan dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pengawas dan jabatan fungsional tertentu pada Tahun 2019 mencapai 2.105 merupakan jumlah terendah, pada Tahun 2020 naik hingga mencapai 2.207 orang serta kembali naik pada Tahun 2021 menjadi 2.268 dan kembali terjadi penurunan pada Tahun 2022

menjadi 2.244. Posisi dan jumlah jabatan pada instansi pemerintah Kota Lhokseumawe ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Berikut tabel Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023.

Tabel 2.149
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|-----------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jabatan Pimpinan Tinggi | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 2 | Jabatan Administrasi | 120 | 131 | 132 | 132 | 132 |
| 3 | Jabatan Pengawas | 330 | 358 | 334 | 141 | 142 |
| 4 | Jabatan Fungsional Tertentu | 1.624 | 1.686 | 1770 | 1.939 | 1.749 |
| | Jumlah Jabatan | 2.105 | 2.207 | 2268 | 2244 | 2.055 |

Sumber : BKPSDM Kota Lhokseumawe, 2024.

2.1.3.4.4 Pengawasan

A. Level Kapabilitas APIP

Dengan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan *good governance* maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan intern ini dilakukan mulai dari proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Untuk itu, APIP harus terus melakukan transformasi dalam menjalankan tugasnya guna memberi nilai tambah bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan fungsi dan peran APIP, yaitu melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi. Pencapaian kapabilitas APIP Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 2.150,

dimana di tahun 2019 sampai dengan 2023 telah berada pada level 3 untuk Kapabilitas APIP Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.150
Capaian Kapabilitas APIP Pemerintah Kota Lhokseumawe
Tahun 2019-2023

| Uraian | Tahun | | | | |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Level Kapabilitas APIP | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 |

Sumber : Inspektorat Kota Lhokseumawe, 2024

B. Tingkat Maturitas SPIP

Tingkat maturasi penyelenggaraan SPIP didefinisikan sebagai kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Tingkat maturasi ini dapat digunakan paling tidak sebagai instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP dan panduan generik untuk meningkatkan maturasi sistem pengendalian intern.

Jadi tingkat maturasi penyelenggaraan SPIP tidak hanya berguna sebagai evaluasi, tetapi juga sebagai sarana untuk melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan SPIP. Tingkatan atau Level Maturasi sesuai Pedoman tersebut, terdiri atas 6 tingkatan dengan level 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Maturitas yang rendah mencerminkan kemungkinan yang lebih rendah dalam mencapai tujuan, sedangkan tingkat maturitas yang lebih tinggi mencerminkan kemungkinan keberhasilan yang lebih tinggi. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan.

Untuk capaian Tingkat Maturitas SPIP dapat dilihat pada tabel 2.151 berikut ini:

Tabel.2.151
Capaian Tingkat Maturitas SPIP
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| Uraian | Tahun | | | | |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Maturitas SPIP | Level 2 | Level 2 | Level 2 | Level 2 | Level 3 |

Sumber : Inspektorat Kota Lhokseumawe, 2024

Tabel 2.151 memperlihatkan Capaian Tingkat Maturitas SPIP Kota Lhokseumawe pada Tahun 2019 sampai Tahun 2022 berada

pada level 2. Dan pada tahun 2023 telah meningkat menjadi level 3. Diupayakan pada tahun-tahun berikutnya adanya peningkatan level dalam rangka mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah.

2.1.3.4.5 Sekretariat DPRK

A. Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan

Dalam proses penyusunan Qanun, Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang partisipatif memiliki kedudukan yang sangat penting karena akan menjadi acuan mengenai skala prioritas penyusunan Rancangan Qanun selama 1 tahun periode sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Oleh karena itu Pemerintahan Daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Kota dan DPRK sebagai pemegang kewenangan penyusunan Program Legislasi Daerah harus melalui mekanisme yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan stakeholder yang ada sehingga Program legislasi Daerah yang dihasilkan merupakan usulan-usulan Rancangan Qanun yang aspiratif dan partisipatif yang dalam pelaksanaannya usulan-usulan Rancangan Qanun tersebut dapat dibuat secara berencana, terpadu, dan sistematis.

Persentase Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 berfluktuasi setiap tahunnya sebagaimana terlihat pada tabel. Pada tabel tersebut terlihat bahwa Tahun 2019 persentase rancangan qanun yang ditetapkan sebesar 47.06% dan di Tahun 2020 semakin menurun menjadi 33.33%. Selanjutnya pada tahun 2021 persentase rancangan qanun yang ditetapkan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 41.18%, walaupun ditahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi 40.00% dan tahun 2023 meningkat menjadi 65.50%.

Tabel 2.152
Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Jumlah Rancangan Qanun yang ditetapkan | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 |
| 2 | Jumlah Prolegda | 17 | 21 | 17 | 10 | 8 |
| | Persentase | 47.06 | 33.33 | 41.18 | 40.00 | 65.50 |

Sumber : Sekretariat DPRK Lhokseumawe, 2024

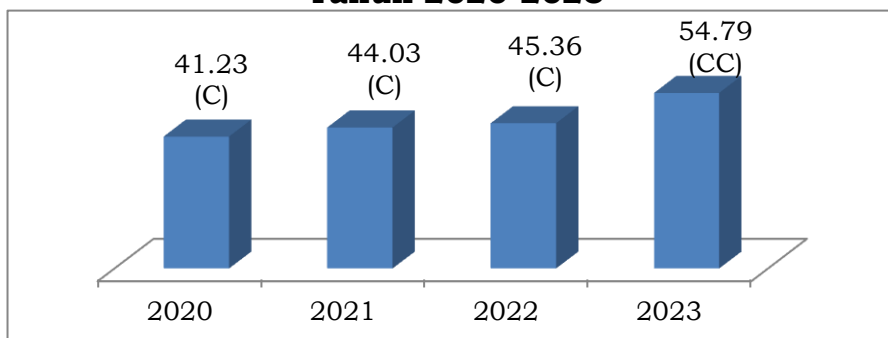
2.1.3.4.6 Sekretariat Daerah

A. Kategori Reformasi Birokrasi

Dewasa ini, pemerintahan menuntut setiap aparatur pemerintah untuk meningkatkan kualitas profesionalitas aparatur dalam mewujudkan pemerintahan yang baik salah satunya melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan penataan ulang atau pembaharuan dalam berbagai penyelenggaraan pemerintah agar mampu memenuhi tuntutan masyarakat dengan cara meningkatkan kinerja penguatan etos kerja aparatur dalam memperbaiki tatanan birokrasi pemerintah. Hal yang penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mind-set dan culture-set serta pengembangan budaya kerja. Reformasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintah yang bersih (*Clean Government*).

Sebagai dasar kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2020 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menpan dan RB Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi disusun dalam rangka mendukung program nasional untuk mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik.

Gambar 2.28
Indeks Reformasi Birokrasi Kota Lhokseumawe
Tahun 2020-2023



Sumber : Bagian Organisasi Setdako Lhokseumawe, 2024

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2020, Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Lhokseumawe

memperoleh nilai 41.23 atau (C/Agak Kurang) dari target nilai 50,01 atau (CC/Cukup Baik). Dan pada 2020-2023 Indeks Reformasi Birokrasi terus meningkat dan pada tahun 2023 mendapat nilai 54.79 atau (CC/Cukup Baik). Hasil tersebut menggambarkan pencapaian kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa kelemahan-kelemahan yang diungkapkan oleh evaluator Kemenpan dan RB, yaitu:

1. manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring hingga evaluasi belum dilakukan secara baik;
2. deregulasi kebijakan yang dilaksanakan belum mampu memetakan kebutuhan peraturan yang mendorong kinerja;
3. implementasi penyederhanaan birokrasi belum dilaksanakan menyeluruh;
4. peta proses bisnis yang ada belum sepenuhnya disusun dengan memperhatikan tugas dan fungsi;
5. belum optimalnya penguatan sistem manajemen SDM;
6. kurang pedulinya pimpinan OPD dalam perencanaan kinerja pada SAKIP;
7. implementasi kebijakan pengawasan internal terhadap penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, kebijakan berbenturan serta penerapan SPIP masih bersifat normatif; dan
8. hasil standar pelayanan belum sesuai dengan harapan masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Pemerintah Kota akan menindaklanjuti hasil rekomendasi Kemenpan dan RB dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. membentuk tim/ penanggungjawab reformasi birokrasi Pemerintah Kota Lhokseumawe serta menyusun dan menetapkan rencana kerja pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kerja;
3. melakukan sosialisasi/ internalisasi road map reformasi birokrasi;

4. melibatkan keikutsertaan pejabat struktural dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dari tahap awal sampai akhir;
5. pelaksanaan penyederhanaan reformasi birokrasi telah dilaksanakan secara menyeluruh;
6. penguatan sistem manajemen SDM dengan pengembangan karir SDM sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, penempatan pegawai pada suatu jabatan dengan mempertimbangkan sesuai standar kompetensi jabatan;
7. melibatkan pimpinan dengan mengadakan rapat tindaklanjut SAKIP bersama pimpinan OPD mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi; dan
8. melibatkan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan.

B. Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Bagi seorang pimpinan atau kepala daerah, SAKIP akan berguna untuk bisa mengukur setiap pembangunan atau kinerja yang dilakukan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, sistem ini bisa juga dijadikan sebagai tolak ukur untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan dalam pembangunan daerah.

Untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan negara. Salah satu azas penyelenggaraan good governance adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai

kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Tabel.2.153
Capaian Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | CC 54.87 | CC 55.00 | CC 55.40 | CC 55.80 | B 60.18 |

Sumber : Setdako Lhokseumawe, 2024

Tabel di atas memperlihatkan tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 masih mendapat kategori CC. Namun pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi kategori B dengan point 60.18. Oleh karena itu untuk dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas serta akuntabilitas kinerja birokrasi maka akan diupayakan perbaikan predikat untuk menjadi lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang.

C. Persentase perangkat daerah dengan nilai IKM yang baik

Salah satu tuntutan untuk mewujudkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah adanya peningkatan kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik merupakan bentuk totalitas pelayanan yang dilakukan oleh aparatur negara secara maksimal sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dalam rangka memenuhi kepuasan, kebutuhan dan harapan masyarakat sebagai penerima pelayanan.

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan, Pemerintah Kota Lhokseumawe melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Evaluasi tersebut dilakukan melalui tindakan survey, yaitu Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). SKM suatu survey yang disusun berdasarkan indikator-indikator unsur pelayanan dalam suatu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Unsur-unsur pelayanan publik yang menjadi kriteria pelayanan adalah:

- a. Persyaratan;

- b. Prosedur;
- c. Biaya/ Tarif;
- d. Waktu Pelayanan;
- e. Produk Pelayanan;
- f. Kompetensi Pelaksana;
- g. Perilaku Pelaksana;
- h. Sarana dan Prasarana; dan
- i. Penanganan pengaduan.

IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat terkait pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik. Selain hal tersebut, IKM berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan hasil survey, nilai IKM Pemerintah Kota Lhokseumawe meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat pada perolehan nilai IKM pada Tahun 2019 sebesar 80,23 (Baik), kemudian meningkat sebesar 1,63 poin dari perolehan Tahun 2020 sebesar 81,86 (Baik) dan kembali meningkat pada Tahun 2021 sebesar 0,66 poin atau sebesar 82,52 (Baik). Sedangkan untuk tahun 2022 sebesar 82.61 (baik) dan Tahun 2023 meningkat menjadi 83.51.

Tabel.2.154
Indeks Kepuasan Masyarakat
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| Uraian | Tahun | | | | |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 79.38 | 82.01 | 82.52 | 82.61 | 83.51 |

Sumber : Setdako Lhokseumawe, 2024

D. Nilai LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) menyajikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahun dan setiap akhir masa jabatan kepala daerah. LPPD berfungsi sebagai wahana sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah dan pemerintah dalam rangka mengevaluasi kinerja pelaksanaan

program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Nilai LPPD diukur dari skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi LPPD, pada Tahun 2019, Pemerintah Kota Lhokseumawe memperoleh nilai predikat Tinggi. Artinya capaian nilai hasil evaluasi LPPD untuk Tahun 2019 telah mencapai target RPJMK. Bila dibandingkan dengan Tahun 2018, perolehan nilai LPPD Tahun 2019 naik sebesar 0,09 poin, namun masih dalam predikat Tinggi. Hal ini didukung oleh mayoritas Perangkat Daerah telah memenuhi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan bukti pendukung pemenuhan IKK. Berikut tren capaian nilai LPPD Kota Lhokseumawe tahun 2019-2023:

Tabel 2.155
Nilai Hasil Evaluasi LPPD
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| Tahun | Target | Realisasi |
|--------------|---------------|------------------|
| 2019 | Tinggi | 2,82 (Tinggi) |
| 2020 | Tinggi | Tinggi |
| 2021 | Tinggi | 3,4290 (Tinggi) |
| 2022 | Tinggi | - |
| 2023 | Tinggi | 2.3546 (Rendah) |

Sumber: Bagian Pemerintahan, Setdako, 2024

Berdasarkan Tabel 2.153 di atas, tren perolehan nilai hasil evaluasi LPPD Kota Lhokseumawe menunjukkan hasil yang baik. Nilai perolehan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada Tahun tahun 2019 nilai LPPD Kota Lhokseumawe sebesar 2.82 (tinggi). Untuk Tahun 2021 nilai LPPD 3.4290 (tinggi), Kementrian Dalam Negeri melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional tahun 2023 menetapkan nilai LPPD Kota Lhokseumawe 2.3546 (rendah).

2.1.3.5 Fokus Urusan Penunjang Urusan Kewilayahan

2.1.3.5.1 Kecamatan

A. PKK Gampong

Pembinaan PKK Gampong dalam 4 (empat) kecamatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe dari tahun 2019-2023 terus mengalami

peningkatan dimana pada tahun 2019 dan tahun 2020 binaan 21 gampong, tahun 2021 binaan 33 gampong serta pada tahun 2022 terdapat binaan 51 gampong. Pada tahun 2020 tersebut tidak mengalami peningkatan pembinaan PKK gampong, hal ini disebabkan karena terjadinya *refocusing* anggaran namun pada tahun 2021 dan 2022 kembali mengalami peningkatan pembinaan PKK gampong dalam wilayah Kota Lhokseumawe. Pesentase Binaan PKK Gampong Tahun 2019-2023 dalam wilayah Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.156
Persentase Binaan PKK Gampong dalam Wilayah
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| NO | Kecamatan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Gampong |
|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 1 | Blang Mangat | 10 | 10 | 19 | 22 | 22 | 22 |
| 2 | Banda Sakti | 0 | 0 | 1 | 16 | 18 | 18 |
| 3 | Muara Dua | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 17 |
| 4 | Muara Satu | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Jumlah | | 21 | 21 | 33 | 51 | 68 | 68 |
| Persentase | | 0,31 | 0,31 | 0,49 | 0,75 | 100 | |

Sumber : Kecamatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe, 2023

B. Penertiban

Persentase penertiban dalam wilayah Kota Lhokseumawe dari tahun 2019-2023 dapat dihitung dengan membandingkan antar jumlah penertiban yang dilaksanakan berbanding dengan jumlah penertiban yang direncanakan dikali seratus persen. Dari data penertiban dalam masing-masing kecamatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe dapat disimpulkan bahwa penertiban dalam wilayah Kota Lhokseumawe dari tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

Pada tahun 2019 persentase penertiban naik sebesar 26% dari tahun sebelumnya sehingga persentase penertiban mencapai 66%, namun ditahun 2020 kembali turun sebesar 23% sehingga persentase penertiban menjadi 43%. Hal ini disebabkan karena tidak dilaksanakannya penertiban dalam Kecamatan Banda Sakti dari 8 kali penertiban yang direncanakan pada tahun tersebut. Tahun 2021 persentase penertiban naik menjadi 71% dan pada tahun 2022 Persentase penertiban dalam wilayah Kota Lhokseumawe merupakan capaian tertinggi dari 4 tahun sebelumnya yang mencapai 95%, ini

menggambarkan bahwa jumlah penertiban yang dilaksanakan hampir sebanding dengan jumlah penertiban yang direncanakan. Persentase penertiban dalam wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 2.157 berikut:

Tabel 2.157
Persentase Penertiban dalam Wilayah Kota Lhokseumawe
Tahun 2019-2023

| NO | Kecamatan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 | BLANG MANGAT | | | | | |
| | <i>Jumlah Penertiban yang Dilaksanakan</i> | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| | <i>Jumlah Penertiban yang Direncanakan</i> | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Persentase | 80% | 80% | 80% | 100% | 80% |
| 2 | BANDA SAKTI | | | | | |
| | <i>Jumlah Penertiban yang Dilaksanakan</i> | 8 | 0 | 20 | 71 | 40 |
| | <i>Jumlah Penertiban yang Direncanakan</i> | 8 | 8 | 20 | 71 | 40 |
| | Persentase | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | MUARA DUA | | | | | |
| | <i>Jumlah Penertiban yang Dilaksanakan</i> | 5 | 5 | 4 | 10 | 2 |
| | <i>Jumlah Penertiban yang Direncanakan</i> | 17 | 17 | 17 | 15 | 8 |
| | Persentase | 100% | 100% | 100% | 66.67% | 25% |
| 4 | MUARA SATU | | | | | |
| | <i>Jumlah Penertiban yang Dilaksanakan</i> | 8 | 7 | 7 | 11 | 3 |
| | <i>Jumlah Penertiban yang Direncanakan</i> | 8 | 7 | 7 | 11 | 6 |
| | Persentase | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
| KOTA LHOKSEUMAWE | | | | | | |
| | <i>Jumlah Penertiban yang Dilaksanakan</i> | 25 | 16 | 35 | 97 | 49 |
| | <i>Jumlah Penertiban yang Direncanakan</i> | 38 | 37 | 49 | 102 | 49 |
| | Persentase | 66% | 43% | 71% | 95% | 83% |

Sumber : Kecamatan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe, 2024

C. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan

Forkopimcam adalah unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan. Salah satu tugasnya melaksanakan rapat koordinasi setiap bulannya sehingga apa saja yang terjadi di kecamatan dapat segera ditangani. Adapun keanggotaan Forkopimcam berasal dari tiga unsur, yakni camat sebagai ketua, pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan TNI di kecamatan sebagai anggota.

Berdasarkan tabel berikut dapat dilihat bahwa kegiatan Forkopimcam ini baru dianggarkan pada tahun 2021 dan 2022, sedangkan untuk proyeksi pada tahun-tahun mendatang diharapkan

dapat mengalami peningkatan sehingga permasalahan yang terjadi di kecamatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe dapat ditangani dengan baik demi terwujudnya masyarakat yang damai dan tentram. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel;

Tabel 2.158
Persentase Penanganan di Kecamatan Kota Lhokseumawe
Tahun 2019-2023

| NO | Kecamatan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|---|--------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | BLANG MANGAT | | | | | |
| | <i>Jumlah penanganan di kecamatan</i> | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| | <i>Jumlah permasalahan di kecamatan</i> | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 |
| | Persentase | 0% | 0% | 0% | 100% | 22.72% |
| 2 | BANDA SAKTI | | | | | |
| | <i>Jumlah penanganan di kecamatan</i> | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 |
| | <i>Jumlah permasalahan di kecamatan</i> | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 |
| | Persentase | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% |
| 3 | MUARA DUA | | | | | |
| | <i>Jumlah penanganan di kecamatan</i> | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| | <i>Jumlah permasalahan di kecamatan</i> | 17 | 17 | 17 | 2 | 12 |
| | Persentase | 0% | 0% | 17,64% | 100% | 58.3% |
| 4 | MUARA SATU | | | | | |
| | <i>Jumlah penanganan di kecamatan</i> | 6 | 6 | 5 | 11 | 6 |
| | <i>Jumlah permasalahan di kecamatan</i> | 6 | 6 | 5 | 11 | 6 |
| | Persentase | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | <i>Jumlah penanganan di kecamatan</i> | 6 | 6 | 11 | 24 | 27 |
| | <i>Jumlah permasalahan di kecamatan</i> | 44 | 23 | 26 | 24 | 49 |
| | Persentase | 13,6% | 26,1% | 42,3% | 100% | 55.10% |

Sumber : Kecamatan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe, 2024

D. Pengawasan Dokumen Gampong

Kegiatan pengawasan dokumen gampong ini bertujuan melakukan evaluasi terhadap penyelesaian penyusunan RKPG (Rencana Kerja Pemerintah Gampong) dan RAPBG serta penyelesaian dokumen laporan pertanggungjawaban (LPJ) APBG terhadap gampong-gampong dalam 4 (empat) Kecamatan di Wilayah Kota Lhokseumawe. Evaluasi ini bertujuan agar gampong dapat segera menyelesaikan LPJ dan menyelesaikan dokumen RKPG dan RAPBG beserta penginputannya kedalam aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) untuk dapat di evaluasi menjadi APBG dengan lebih dulu menunggu Peraturan Walikota yang mengatur besaran sumber

dana untuk dimasukkan dalam dokumen tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel;

Tabel 2.159
Persentase Pengawasan Dokumen Gampong
Tahun 2019-2023

| NO | Kecamatan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | BLANG MANGAT | | | | | |
| | <i>Jumlah pengawasan dokumen gampong</i> | 2 | 2 | 2 | 22 | 22 |
| | <i>Jumlah gampong dalam kecamatan</i> | 2 | 2 | 2 | 22 | 22 |
| | Persentase | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | BANDA SAKTI | | | | | |
| | <i>Jumlah pengawasan dokumen gampong</i> | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| | <i>Jumlah gampong dalam kecamatan</i> | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| | Persentase | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | MUARA DUA | | | | | |
| | <i>Jumlah pengawasan dokumen gampong</i> | 0 | 0 | 3 | 12 | 17 |
| | <i>Jumlah gampong dalam kecamatan</i> | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| | Persentase | 0% | 0% | 17,64% | 70.59% | 100% |
| 4 | MUARA SATU | | | | | |
| | <i>Jumlah pengawasan dokumen gampong</i> | 6 | 6 | 5 | 11 | 10 |
| | <i>Jumlah gampong dalam kecamatan</i> | 6 | 6 | 5 | 11 | 11 |
| | Persentase | 100% | 100% | 100% | 100% | 90.90% |
| | <i>Jumlah pengawasan dokumen gampong</i> | 6 | 6 | 11 | 63 | 67 |
| | <i>Jumlah gampong dalam kecamatan</i> | 44 | 23 | 26 | 68 | 68 |
| | Persentase | 13,6% | 26,1% | 42,3% | 92,65% | 98.53 |

Sumber : Kecamatan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe, 2023

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiplier effect bagi peningkatan daya saing daerah. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan aspek kemampuan ekonomi daerah dari perannya mampu memicu daya saing daerah adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita.

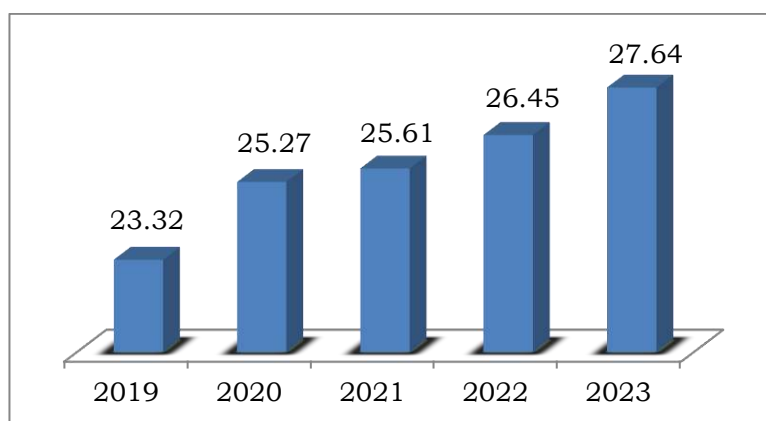
Kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat melalui Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita. PDRB penggunaan atau pengeluaran merupakan nilai pengeluaran atas penggunaan barang dan jasa yang digunakan sebagai konsumsi akhir oleh berbagai golongan dalam masyarakat baik untuk memenuhi modal, stok, maupun ekspor dan impor.

A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Konsumsi rumah tangga merupakan salah satu variabel makro ekonomi yang menggambarkan besarnya pendapatan yang dibelanjakan. Untuk memperoleh gambaran besarnya rata-rata konsumsi yang dilakukan rumah tangga maupun perorangan di suatu wilayah, perlu adanya nilai konsumsi rumah tangga perkapita maupun per-rumah tangga. Konsumsi rumah tangga per kapita merupakan representasi mengenai gambaran tingkat pendapatan per kapita suatu masyarakat, sehingga informasi mengenai konsumsi rumah tangga per kapita dapat digunakan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat.

Gambar 2.29

Nilai Komponen Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita ADHB (Juta Rupiah) Tahun 2019-2023 Kota Lhokseumawe



Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

Nilai konsumsi rumah tangga perkapita maupun per-rumah tangga di Lhokseumawe dalam kurun waktu 2019-2023 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya perubahan daya beli penduduk yang juga indikasi adanya perubahan rata-rata

pendapatan. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan pertumbuhan dibandingkan tahun 2022.

Nilai konsumsi rumah tangga perkapita meningkat sebesar 4,32 juta rupiah dalam kurun waktu 5 tahun, dari 23.32 juta rupiah di tahun 2019 menjadi 27.64 juta rupiah di tahun 2023. Konsumsi rumah tangga per-rumah tangga pun meningkat sebesar 1.44 juta rupiah dalam 5 tahun. Laju pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga per-kapita tahun 2023 sebesar 4.49 persen mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh sebesar 3.28 persen.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Kondisi kemampuan ekonomi daerah di Kota Lhokseumawe dapat juga dilihat melalui fasilitas wilayah/infrastruktur melalui beberapa pendekatan antara lain persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih dan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik.

A. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih

Jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih di Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 melalui jaringan PDAM adalah sebanyak 2.350 rumah tangga atau sebesar 4,0.7%. Minimnya persentase akses jaringan rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih ini dikarenakan jaringan pipa air PDAM baru terpasang untuk wilayah Kecamatan Banda Sakti dan Muara Satu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.160
Persentase Akses Jaringan Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah Pelanggan PDAM Ie Beusare Rata | 1.861 | 1.896 | 1.954 | 2.419 | 2.350 |
| 2 | Jumlah Rumah Tangga | 44.165 | 47.620 | 47.726 | 55.661 | 57.755 |
| | Persentase | 4.21 | 3.98 | 4.09 | 4.34 | 4.07 |

Sumber : PDAM Ie Beusare Rata Tahun 2024

Air merupakan kebutuhan dasar yang paling utama bagi keberlangsungan aktivitas ekonomi sehari-hari. Perbandingan kebutuhan air secara internasional menunjukkan kebutuhan

konsumsi air secara normal per orang sekitar 20 liter per hari dengan rincian 4 liter untuk konsumsi dan sisanya untuk aktivitas yang lainnya.

Persentase penduduk berakses air minum dari tahun 2019 terus meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk dan kebutuhan air minum. Untuk keperluan air minum, maka sumber air baku yang dapat digunakan untuk kebutuhan air minum dapat terdiri dari mata air, air permukaan (sungai, danau, waduk, dan sebagainya), air tanah (sumur gali, sumur bor) maupun air hujan.

Pada tahun 2019 persentase penduduk berakses air minum sebesar 17.11 %, dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2020 sebesar 19,59 %, pada tahun 2021 menjadi sebesar 20.35% dan tahun 2022 meningkat menjadi 22.57%. Namun pada tahun 2023 mengalami penurunan Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.161
Persentase Penduduk Berakses Air Minum
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Penduduk berakses air minum | 35.452 | 36.969 | 38.648 | 43.192 | 44.200 |
| 2 | Jumlah penduduk | 207.202 | 188.713 | 189.941 | 191.396 | 196.067 |
| | Persentase | 17,11 | 19,59 | 20.35 | 22.57 | 22.54 |

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2024

Semakin besar persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak menunjukkan semakin baiknya kondisi rumah tangga di suatu daerah. Dalam rangka pemenuhan infrastruktur dasar sebagai upaya pemenuhan SPM Pekerjaan Umum telah didukung dengan pendanaan yang bersumber dari APBK, DOKA dan DAK. Program yang mendukung pemenuhan infrastruktur dasar adalah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dan Sub kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan dan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan.

B. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Sanitasi adalah kondisi kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan penyediaan air minum yang bersih serta pengolahan dan pembuangan sampah dan air limbah, dimana tujuannya untuk melindungi kesehatan manusia dengan menyediakan lingkungan yang bersih. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga. Persentase rumah tinggal bersanitasi 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.162
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi | 31,651 | 32,709 | 34,969 | 39.563 | 40.453 |
| 2 | Jumlah rumah tinggal | 43.331 | 43.331 | 51.827 | 55.661 | 55.661 |
| Persentase | | 73,04 | 75,49 | 67,47 | 71.08 | 72.67 |

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase rumah tinggal berakses sanitasi dari tahun 2019 sampai tahun 2020 terus terjadi penambahan. Pada tahun 2019 jumlah rumah tinggal berakses sanitasi sebanyak 31.651 rumah atau sebesar 73.04% dan pada tahun 2020 menjadi 32.709 rumah atau 75.49%, pada tahun 2021 persentase rumah tinggal berakses sanitasi menurun menjadi 67.47% dikarenakan bertambahnya jumlah rumah tinggal maupun jumlah rumah tinggal berakses sanitasi dan pada tahun 2023 persentase rumah tinggal berakses sanitasi meningkat menjadi 72.67% .

C. Persentase Drainase dalam Kondisi Baik

Drainase memiliki peran yang sangat penting di kawasan berpenghuni. Sistem drainase yang baik membantu mencegah banyak persoalan, seperti mengurangi kemungkinan banjir, mengendalikan permukaan air tanah, erosi tanah dan mencegah kerusakan jalan dan bangunan yang ada. Sistem drainase bisa

dikatakan baik apabila bisa berhubungan secara sistematis antara satu dengan yang lainnya, yang bertujuan agar air mengalir atau berjalan dengan baik.

Identifikasi terhadap masalah-masalah drainase di perkotaan sangat penting untuk dilakukan demi menemukan solusi yang tepat. Identifikasi masalah-masalah drainase di perkotaan juga diperlukan untuk perencanaan drainase di kawasan perkotaan di masa depan supaya dapat dibuat dengan lebih baik. Berikut ini permasalahan yang kerap dihadapi sistem drainase di perkotaan.

- Bertambahnya jumlah penduduk
- Pengelolaan sampah yang tidak diperhatikan
- Tanah ambles
- Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dengan infrastruktur yang lain
- Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah

Pada tabel di bawah ini dapat dilihat persentase drainase dalam kondisi baik terhadap panjang seluruh drainase di Kota Lhokseumawe Tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.163
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Panjang drainase tidak tersumbat pembuangan aliran air (km) | 62,072 | 74,856 | 79,829 | 96.000 | 97.856 |
| 2 | Panjang seluruh drainase (km) | 116,408 | 116,408 | 115,408 | 115,408 | 117.408 |
| Persentase | | 53,32 | 64,30 | 68,58 | 83.18 | 83.34 |

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa panjang seluruh drainase Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 adalah 117.408 Km berkurang 2 Km dari tahun 2019-2022. Sedangkan panjang drainase yang tidak tersumbat semakin tahun semakin baik terlihat pada tahun 2018 persentase drainase dalam kondisi baik sebesar 48.74% dan pada tahun 2022 meningkat kembali menjadi 83.18% begitu juga 2023 meningkat menjadi 83.34%.

D. Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik

Proporsi rumah tangga dengan akses listrik di Kota Lhokseumawe pada tahun 2019 jumlah rumah tangga pengguna listrik sebesar 92.44 persen. Sedangkan pada Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 104 persen atau mengalami peningkatan 11,6 persen ini disebabkan karena sebagian rumah tangga ada yang menggunakan lebih dari 1 meteran listrik dan Tahun 2022-2023 mengalami penurunan menjadi 92.45% dan 96.20% hal ini dikarenakan penambahan jumlah rumah tangga pengguna listrik lebih kecil dari penambahan jumlah rumah tangga.

Tabel 2.164
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik
Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|-------------------|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik (Rayon Lhokseumawe) | 40.828 | 47.945 | 49.976 | 51.460 | 53.549 |
| 2 | Jumlah Rumah Tangga | 44.165 | 47.620 | 47.726 | 55.661 | 57.755 |
| Persentase | | 92,44 | 100.7 | 104 | 92.45 | 92.71 |

Sumber: Publikasi PLN 2024

2.1.4.3 Telaahan RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2044

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2044 yang disusun untuk kurun waktu 20 Tahun mendatang, pengembangan ruang Kota Lhokseumawe mengacu pada hierarki fungsional sesuai dengan RTRWN dan selaras dengan RTRW Provinsi antara lain:

- Dalam Konteks Nasional Kota Lhokseumawe adalah Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang membutuhkan keterkaitan aksesibilitas antar wilayah secara optimal.
- Fungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional dituntut adanya keterkaitan Kota Lhokseumawe dengan kota-kota *hinterland* disekitarnya yang berhimpitan untuk membagi beban dan fungsi-fungsi kegiatan perkotaan secara hirarkis dan terintegrasi.

Dengan demikian sistem pusat pelayanan yang ditetapkan di Kota Lhokseumawe dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.165
Pusat-Pusat Pelayanan Kegiatan Kota Lhokseumawe
Tahun 2023

| No | Fungsi Pelayanan | Pusat Kegiatan | Keterangan |
|----|--------------------------|--------------------------|--|
| 1 | Pusat Kegiatan Nasional | KEK Kec. Muara Satu | Kawasan Perbatasan Negara Kec. Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu dan Blang Mangat |
| 2 | Pusat Pelayanan Kota | Kampung Jawa Lhokseumawe | Kecamatan Banda Sakti |
| 3 | Sub Pusat Pelayanan Kota | Mon Geudong | Pusat Kecamatan Banda Sakti |
| | | Mns Panggoi | Pusat Kecamatan Muara Dua |
| | | Batuphat Barat | Pusat Kecamatan Muara Satu |
| | | Blang Peunteuet | Pusat Kecamatan Blang Mangat |
| 4 | Pusat Lingkungan | Ujong Blang | Pusat Kecamatan Banda Sakti |
| | | Alue Lim | Pusat Kecamatan Blang Mangat |
| | | Meunasah Blang | Pusat Kecamatan Muara Dua |

Sumber : Qanun RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2043

2.1.4.4 Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Lhokseumawe Tahun 2023

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, SPM diterapkan pada Urusan Wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam ketentuan umum Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal, dinyatakan bahwa SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah pada batas waktu yang ditentukan. Dengan kata lain, jenis pelayanan dasar di daerah dapat terlaksana. Penyusunan laporan dalam penerapan SPM di daerah adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban daerah dalam melaksanakan SPM sesuai dengan kebutuhan pelayanan dasar yang harus diberikan kepada masyarakat. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- f. Sosial.

Jenis-jenis SPM :

1. SPM Pendidikan
2. SPM Kesehatan
3. SPM Pekerjaan Umum
4. SPM Perumahan Rakyat
5. SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
6. SPM Sosial

Berikut merupakan realisasi Standar Pelayanan Minimal Kota Lhokseumawe Tahun 2023.

Tabel 2.166
Realisasi Standar Pelayanan Minimal Kota Lhokseumawe
Tahun 2023

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR | TARGET | REALISASI |
|-----------------------|--|--------|-----------|
| SPM PENDIDIKAN | | | |
| 1 | Pendidikan Dasar | 100 | 100 |
| 2 | Pendidikan Anak Usia Dini | 100 | 100 |
| 3 | Pendidikan Kesetaraan; | 100 | 100 |
| SPM KESEHATAN | | | |
| 1 | Pelayanan kesehatan ibu hamil | 100 | 82.87 |
| 2 | Pelayanan kesehatan ibu bersalin | 100 | 84.40 |
| 3 | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 100 | 83.84 |
| 4 | Pelayanan kesehatan balita | 100 | 77.86 |
| 5 | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | 100 | 67.35 |
| 6 | Pelayanan kesehatan pada usia produktif | 100 | 99.91 |
| 7 | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut | 100 | 97.00 |
| 8 | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi | 100 | 84.11 |
| 9 | Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus | 100 | 86.71 |
| 10 | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat | 100 | 93.97 |
| 11 | Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis | 100 | 91.18 |
| 12 | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) | 100 | 48.20 |

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR | TARGET | REALISASI |
|-----------------------------|--|---------------|------------------|
| SPM PEKERJAAN UMUM | | | |
| 1 | Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari- hari | 100 | 86.18 |
| 2 | Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik | 100 | 99.20 |
| SPM PERUMAHAN RAKYAT | | | |
| 1 | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota | 100 | 0 |
| 2 | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota | 100 | 0 |
| SPM TRANTIBUMLINMAS | | | |
| 1 | Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum | 100 | 100 |
| 2 | Pelayanan informasi rawan bencana | 100 | 100 |
| 3 | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 | 100 |
| 4 | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100 | 100 |
| 5 | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 100 | 100 |
| SPM SOSIAL | | | |
| 1 | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti | 100 | 100 |
| 2 | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti | 100 | 100 |
| 3 | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti | 100 | 100 |
| 4 | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti | 100 | 100 |
| 5 | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota | 100 | 100 |

Sumber : OPD Pengampu Masing-masing SPM, 2024

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPK dan Realisasi RPJMK sampai dengan Tahun 2023

2.2.1. Capaian Indikator Makro Kota Lhokseumawe

Penetapan indikator makro daerah bertujuan untuk memberi gambaran serta ukuran dalam pencapaian kinerja daerah. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya pertumbuhan ekonomi, Laju Inflasi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Selama lima tahun terakhir (2017-2022) pertumbuhan ekonomi Lhokseumawe mengalami peningkatan yang fluktuatif dari waktu ke waktu terutama tanpa migas. Pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2023 ditargetkan sebesar 3,50 persen dan yang ditargetkan di dalam Perubahan RKPK Tahun 2023 sebesar 4,11 persen, sedangkan untuk capaian untuk tahun 2023 sebesar 4,21 persen, mengalami kenaikan dari target yang telah di tetapkan.

B. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah. Tingkat kemiskinan di Kota Lhokseumawe pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 yaitu 10,84 persen. Untuk Tahun 2023 kemiskinan di Kota Lhokseumawe ditarget sebesar 11,10 persen dan yang ditargetkan dalam Perubahan RKPK Tahun 2023 sebesar 10,74 persen sedangkan untuk capaian sebesar 10,53 persen, mengalami penurunan dari target yang telah di tetapkan.

C. Tingkat Pengangguran

Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Secara general pengangguran terbuka dapat didefinisikan sebagai persentase jumlah

pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran di Kota Lhokseumawe sudah mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 11,16 persen menjadi di 9,15 persen di tahun 2022, Untuk Tahun 2023 Pengangguran di Kota Lhokseumawe di Target kan sebesar 11,12 persen, dan pada Perubahan RKPK ditargetkan sebesar 9,05 persen untuk capaian Tahun 2023 sebesar 8,68 persen, mengalami penurunan dari target yang telah di tetapkan.

D. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM juga merupakan penentu peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. Selain itu IPM juga merupakan data strategis karena sebagai ukuran kinerja pemerintah. IPM Kota Lhokseumawe tahun 2023 ditargetkan sebesar 77,62 dan pada Perubahan RKPK ditargetkan sebesar 78,90 sedangkan untuk capaian tahun 2023 sebesar 80,26 persen, mengalami kenaikan dari target yang telah di tetapkan

E. Inflasi

Selanjutnya inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi Kota Lhokseumawe untuk Tahun 2023 telah ditargetkan sebesar 2,30 persen dan pada Perubahan RKPK ditargetkn sebesar 2,30 persen sedangkan untuk capaian pada 2023, inflasi year on year (y-on-y) Kota Lhokseumawe sebesar 1,56 persen.

F. Indeks Gini (Gini Rasio)

Indeks Gini merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Adanya Indeks Gini maka dapat menjelaskan hubungan antar kelompok dengan tingkat pendapatan yang berbeda. Berdasarkan koefisien gini, kesenjangan pendapatan di Kota Lhokseumawe di tahun 2022 secara umum termasuk dalam kategori kesenjangan baik sebesar 0,348. Untuk Tahun 2023 Indeks gini Kota Lhokseumawe belum ditetapkan target nya dan pada Perubahan

RKPK di targetkan sebesar 0,338 sedangkan untuk capaian di Tahun 2023 sebesar 0.293.

Untuk Target dan capaian indikator makro lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.167
Target dan Capaian Indikator Makro Kota Lhokseumawe
Tahun 2023

| No. | Indikator Makro | Tahun 2023 | | | | Ket |
|-----|--------------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|-----|
| | | Target | Target P RKPK | Capaian s.d Smt I | Capaian s.d Smt 2 | |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | 3,50% | 4,11 | - | 4,21 | |
| 2 | Tingkat Kemiskinan | 11,10% | 10,74 | - | 10,53 | |
| 3 | Tingkat Pengangguran | 11,12% | 9,05 | - | 8,68 | |
| 4 | IPM | 77,62 | 78,90 | - | 80,26 | |
| 5 | Laju Inflasi | 2,30 | 2,30 | 2,69 | 1,56 | |
| 6 | Indeks Gini (Gini Rasio) | - | 0,338 | - | 0.293 | |

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, dan RKPK 2023

2.2.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Lhokseumawe

Indikator Kinerja Utama untuk Kota Lhokseumawe terdiri dari Indikator Kinerja yang menjadi kewenangan Kepala Daerah dan Indikator Kinerja Utama yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah.

Untuk indikator kinerja kepala daerah terdapat 31 indikator yang terdiri dari 6 indikator tujuan dan 25 indikator sasaran. Sebanyak 66,7 persen pada indikator tujuan dapat dicapai dan 33,3 persen indikator tujuan yang belum dapat di capai sesuai target yang telah di tetapkan seperti indeks pembangunan syariat islam dan indeks kualitas lingkungan hidup.

Sedangkan indikator kinerja sasaran sebanyak 76,0 persen telah dapat di capai dan 20,0 persen belum dapat di capai sesuai target yang telah di tetapkan seperti Nilai LPPD Kota Lhokseumawe; Persentase kegiatan pengembangan budaya; Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai "IKM" yang Baik; Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA); dan Persentase ketaatan terhadap RTRW. Secara garis besar capaian kinerja Kota Lhokseumawe sampai dengan tahun 2023 masih dibawah target, yaitu hanya

mencapai 74,19 persen atau sebanyak 23 indikator yang mencapai target dari 31 indikator tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026.

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebanyak 69 indikator kinerja utama perangkat daerah (IKU PD) yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, yang mencapai target sebanyak 30 indikator atau sebesar 43,5 persen dan yang tidak mencapai target sebanyak 39 indikator atau sebesar 56,5 persen.

Hal ini perlu menjadi perhatian semua pihak untuk mendorong perangkat daerah agar dapat mengejar ketertinggalan pembangunan daerah pada tahun 2023, serta menyusun rencana strategis baik secara kinerja maupun anggaran untuk perencanaan selanjutnya. Adapun gambaran umum capaian indikator kinerja utama Kota Lhokseumawe berdasarkan RPK Lhokseumawe 2023-2026 dapat dilihat pada tabel capaian indikator utama dan capaian indikator utama perangkat daerah sebagai berikut.

Tabel 2.168
Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Lhokseumawe
Tahun 2023

| No | Indikator | Cara Perhitungan Indikator | Satuan | Kondisi Awal (2021) | 2023 | | Kondisi Akhir 2026 | Perangkat Daerah / Sumber Data |
|-----|--|---|-----------------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|
| | | | | | Target Kinerja | Capaian | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (8) | (9) | (10) |
| 1. | Indeks Reformasi Birokrasi | Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kemenpan RB | Kategori /Poin | Proses | CC 50.00 | CC 54,79 | CC 51.50 | SETDAKO |
| 1.1 | Nilai LPPD Kota | Berita Acara Hasil Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Aceh dan Validasi terhadap Hasil EPPD Tim Daerah atas LPPD Kab/Kota Se-Aceh dari Kemendagri Direktorat Jenderal Otonomi Daerah | Kategori/ Poin | Tinggi 3,4290 | Tinggi 3,430 | Rendah 2,3546 | Sangat Tinggi 4,25 | SETDAKO |
| 1.2 | Nilai Evaluasi SAKIP | Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Kemenpan RB | Kategori/ Poin | CC 55.50 | B 60.00 | B 61.18 | B 61.50 | SETDAKO, BAPPEDA |
| 1.3 | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | Pernyataan Profesional BPK mengenai Kewajaran Informasi Keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan | Opini | WTP (Opini BPK atas Hasil Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2022) | WTP | WTP | WTP | BPKD, INSPEKTORAT |
| 1.4 | Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi | Hasil Evaluasi BPKP Pusat | Level | Level 2 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | BAPPEDA, INSPEKTORAT DAN BPKD |
| 1.5 | Tingkat Manajemen Risiko | Hasil Evaluasi BPKP Pusat | Level | Level 2 | Level 3 | Level 2 | Level 2 | BAPPEDA, INSPEKTORAT DAN BPKD |
| 1.6 | Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai "IKM" yang Baik | Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total Unsur yang terisi x Nilai Penyeimbang | Kategori/ Poin | B 82.52 | A 88.31 | B 83,51 | A 89.81 | SETDAKO, BAPPEDA (LITBANG), |

| No | Indikator | Cara Perhitungan Indikator | Satuan | Kondisi Awal (2021) | 2023 | | Kondisi Akhir 2026 | Perangkat Daerah / Sumber Data |
|-----------|---|---|---------------|---------------------|----------------|--------------|--------------------|--|
| | | | | | Target Kinerja | Capaian | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (8) | (9) | (10) |
| | | | | | | | | DISDUKCAPIL, SETWAN, KOMINFO, BKPSDM, PERPUS, KESBANGPOL, 4 KEC, DPMG, PERTANAHAN, DP3AP2KB (PP), SATPOL PP DAN WH, BPBD |
| 2. | Indeks Pembangunan Syariat Islam | Dimensi Akidah, Dimensi Lembaga Keuangan Syariah, Dimensi Zakat, Dimensi Melek Al Quran, Dimensi Manajemen Masjid, Dimensi Hukum Jinayat, dan Dimensi Akhlak | Indeks | 80,65 | 80,75 | 80,71 | 81,00 | DSI, MPU, BAITUL MAL |
| 2.1 | Persentase mesjid yang melaksanakan Shalat lima waktu | Jumlah Mesjid yang melaksanakan Shalat lima Waktu/ Jumlah Total Mesjid*100 | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | DSI, MPU |
| 2.2 | Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan | Jumlah Zis yang disalurkan/jumlah Zis yang dikumpulkan | Rasio | 0,74 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | BAITUL MAL |
| 2.3 | Persentase kegiatan pengembangan budaya | Jumlah kegiatan pengembangan budaya yang dilaksanakan / Jumlah kegiatan pengembangan budaya yg direncanakan * 100 | Persen | 46,15 | 53,85 | 23,38 | 76,92 | PK, MAA |

| No | Indikator | Cara Perhitungan Indikator | Satuan | Kondisi Awal (2021) | 2023 | | Kondisi Akhir 2026 | Perangkat Daerah / Sumber Data |
|-----|---|---|--------|---------------------|----------------|---------|--------------------|--------------------------------|
| | | | | | Target Kinerja | Capaian | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (8) | (9) | (10) |
| 3. | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | IPM = 1/3 [X(1) + X(2) + X(3)] X(1) : Indeks harapan hidup X(2) : Indeks pendidikan = 2/3 (indeks melek huruf) + 1/3(indeks rata-rata lama sekolah) X(3) : Indeks standar hidup layak | Indeks | 77,57 | 77,62 | 80,26 | 77,75 | BPS, PK, PP, DINKES |
| 3.1 | Harapan lama sekolah | Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. | Tahun | 15,21 | 15,22 | 15,54 | 15,25 | PK, MPD |
| 3.2 | Angka kelulusan | (Jumlah lulusan pada jenjang SD/ Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD pada tahun sebelumnya*100) + (Jumlah lulusan pada jenjang SMP/ Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP pada tahun sebelumnya*100)/2 | Persen | 99,01 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | PK, MPD |
| 3.3 | Persentase organisasi pemuda yang aktif | Jumlah organisasi pemuda yang aktif / Jumlah seluruh organisasi pemuda *100 | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | DISPORAPAR |
| 3.4 | Usia Harapan Hidup | Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur | Tahun | 71,64 | 71,66 | 72,02 | 71,75 | BPS, DINKES |
| 4. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Pencemaran Air *30% + (Indeks Pencemaran Udara * 30%) + (tutupan hutan*40%) | Persen | 63,7 | 64,9 | 63,4 | 66,25 | DLH |
| 4.1 | Persentase RTH Publik | Luas RTH Publik tersedia/luas RTH Publik yang seharusnya tersedia*100% | Persen | 1,62 | 1,67 | 1,93 | 2,79 | DLH |

| No | Indikator | Cara Perhitungan Indikator | Satuan | Kondisi Awal (2021) | 2023 | | Kondisi Akhir 2026 | Perangkat Daerah / Sumber Data |
|-----------|---|--|---------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | | | Target Kinerja | Capaian | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (8) | (9) | (10) |
| 5. | Persentase Pertumbuhan Ekonomi | PDRB tahun pengamatan - PDRB tahun sebelumnya/PDRB tahun sebelumnya*100% | Persen | 1,98 | 3,50 | 4,21 | 3,70 | BPS |
| 5.1 | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA) | Nilai Investasi Berskala Nasional | Rp. Miliar | 3.403 | 3.471 | 207.182.962.544 | 3.684 | DPMPTSP NAKER |
| 5.2 | Jumlah Investor (PMDN/ PMA) | Jumlah Perusahaan (Investor) | Perusahaan | 432 | 452 | 470 | 512 | DPMPTSP NAKER |
| 5.3 | Tingkat kemiskinan | Mengikuti data BPS | Persen | 11,16 | 11,10 | 10,73 | 10,95 | BPS, DINSOS |
| 5.4 | Tingkat Pengangguran Terbuka | Mengikuti data BPS | Persen | 11,16 | 11,12 | 8,78 | 11,04 | BPS, DMPTSP |
| 5.5 | PDRB Perkapita | PDRB/Penduduk Pertengahan Tahun | Rp. (Juta) | 33,20 | 33,35 | 56,60 | 33,40 | BPS, DKPPP, DISPORAPAR (PARIWISATA) |
| 5.6 | Laju Inflasi | Mengikuti data BPS | Persen | 1,97 | 2,30 | 1,56 | 2,05 | BPS, DISPERINDAG KOP &UKM |
| 6. | Cakupan Ketersediaan Infrastruktur Berkualitas | (Persen Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik + Persentase lingkungan pemukiman kumuh +)/2 | Persen | 32,74 | 34,32 | 34,90 | 39,56 | PUPR |
| 6.1 | Persen Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap | panjang jaringan jalan kondisi baik/panjang jalan seluruhnya*100% | Persen | 65,05 | 68,26 | 69,53 | 78,91 | PUPR |

| No | Indikator | Cara Perhitungan Indikator | Satuan | Kondisi Awal (2021) | 2023 | | Kondisi Akhir 2026 | Perangkat Daerah / Sumber Data |
|-----|--|--|--------|---------------------|----------------|---------|--------------------|--------------------------------|
| | | | | | Target Kinerja | Capaian | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (8) | (9) | (10) |
| 6.2 | Persentase lingkungan permukiman kumuh | Luas lingkungan permukiman kumuh / Luas wilayah *100 | Persen | 0,43 | 0,38 | 0,26 | 0,21 | PUPR |
| 6.3 | Persentase ketaatan terhadap RTRW | Realisasi RTRW/Rencana peruntukkan *100% | Persen | 47,80 | 54,47 | 23,68 | 74,47 | PUPR |
| 6.4 | Rasio Fasilitas Keselamatan Jalan | Jumlah Fasilitas Keselamatan Jalan yang Tersedia / Jumlah Fasilitas Keselamatan Jalan Yang Seharusnya Tersedia | Rasio | 0,50 | 0,25 | 100 | 0,25 | DISHUB |

Sumber : RPK Lhokseumawe dan Perangkat Daerah Tahun 2023

2.2.3. Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah alat yang digunakan untuk mengukur sejauh mana sebuah pemerintah daerah telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penggunaan IKD membantu pemerintah daerah dalam memantau dan mengevaluasi kinerja mereka secara terukur dan terstruktur. Dengan memiliki indikator yang jelas, pemerintah daerah dapat memperbaiki kebijakan dan program mereka, serta mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien dan efektif. IKD seringkali disusun dalam bentuk angka, persentase.

Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang ditetapkan dalam RPK dan dituangkan dalam RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 sebanyak 191 indikator kinerja. Dari 191 indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan, sebanyak 116 indikator atau 60,73 persen yang dapat dicapai dan sebesar 75 indikator atau 39,27 persen yang belum dapat di capai. Untuk mengetahui secara terperinci mengenai capaian Indikator Kinerja Daerah pada RKPK Lhokseumawe Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.169
Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Capaian Tahun 2023
Kota Lhokseumawe

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan / Indikator Kinerja Program (Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2022 | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|------|--|--------|-------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----|
| | | | | Target | Capaian Smstr 2 | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | |
| 1 | 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | MPD | |
| 1 | 01 01 Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 86 | 100 | MPD | M |
| 1 | 01 08 Persentase Sekolah yang Menerapkan Aseessment Kompetensi Minimum (AKM) | Persen | 64,96 | 75,21 | 132 | 100,00 | MPD | H |
| 1 | 01 01 Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 95 | 100 | PK | M |
| 1 | 01 02 Angka Partisipasi Kasar | Persen | 99,4 | 98,00 | 102,6 | 99,00 | PK | H |
| 1 | 01 03 Kelulusan Dan Ketercapaian Kurikulum di Satuan Pendidikan | Persen | 98,36 | 100 | 100 | 100,00 | PK | H |
| 1 | 01 04 Persentase Guru dan Tendik Yang Mendapatkan Pembinaan | Persen | 88,00 | 89,47 | 90,3 | 92,31 | PK | H |
| 1 | 01 05 Persentase Sekolah yang Memperoleh Izin | Persen | 100 | 100 | 90 | 100 | PK | M |
| 1 | 01 07 Persentase Dayah dengan Type A | Dayah | 5,56 | 8,11 | 9 | 12,50 | DSI-PD | H |
| 1 | 02 01 Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | DINKES | H |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan / Indikator Kinerja Program (Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2022 | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|------|----|----|---|--------|-------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----|
| | | | | | | Target | Capaian Smstr 2 | | | |
| 1 | 02 | 02 | Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat | Persen | 81,51 | 100,00 | 84 | 100,00 | DINKES | M |
| 1 | 02 | 03 | Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan | Persen | 2,43 | 3,20 | 11,0 | 22,03 | DINKES | H |
| 1 | 02 | 04 | Persentase Rekomendasi Usaha Kesehatan | Persen | 100,00 | 100,00 | 100 | 100,00 | DINKES | H |
| 1 | 02 | 05 | Cakupan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Persen | 64,98 | 70,73 | 81,0 | 100,00 | DINKES | H |
| 1 | 03 | 01 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | PUPR | H |
| 1 | 03 | 02 | Persentase tidak terjadi genangan > 2 kali setahun | Persen | 92,29 | 81,38 | 81,38 | 48,50 | PUPR | H |
| 1 | 03 | 03 | Persentase penduduk berakses air minum | Persen | 20,48 | 21,31 | 21,31 | 24,06 | PUPR | H |
| 1 | 03 | 05 | Persentase rumah tinggal bersanitasi | Persen | 67,47 | 69,61 | 66,81 | 76,69 | PUPR | M |
| 1 | 03 | 06 | Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat | Persen | 68,58 | 71,64 | 71,64 | 81,77 | PUPR | H |
| 1 | 03 | 08 | Persentase penataan bangunan gedung | Persen | 4,00 | 4,00 | 2,29 | 11,54 | PUPR | M |
| 1 | 03 | 10 | Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap | Persen | 65,05 | 68,26 | 69,53 | 78,91 | PUPR | H |
| 1 | 03 | 12 | Persentase ketaatan terhadap RTRW | Persen | 47,80 | 54,47 | 42,28 | 74,47 | PUPR | M |
| 1 | 04 | 03 | Rasio rumah layak huni | Persen | 69,19 | 69,38 | 66,76 | 70,15 | PUPR | M |
| 1 | 04 | 04 | Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh | Persen | 0,43 | 0,38 | 0,26 | 0,21 | PUPR | M |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan / Indikator Kinerja Program (Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2022 | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|------|----|----|---|--------|-------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----|
| | | | | | | Target | Capaian Smstr 2 | | | |
| 1 | 04 | 05 | Rasio PSU dalam kondisi baik | Rasio | 0,093 | 0,093 | 6,75 | 0,206 | PUPR | H |
| 1 | 05 | 01 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100,00 | 100 | BPBD | H |
| 1 | 05 | 03 | Persentase Penanggulangan Bencana | Persen | 100 | 100 | 100,00 | 100 | BPBD | H |
| 1 | 05 | 04 | Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | Persen | 100 | 100 | 100,00 | 100 | BPBD | H |
| 1 | 05 | 01 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 83,42 | 100 | SATPOL PP WH | M |
| 1 | 05 | 02 | Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban dan Ketentraman | Persen | 100 | 100 | 99,88 | 100 | SATPOL PP WH | M |
| 1 | 06 | 01 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | DINSOS | H |
| 1 | 06 | 02 | Cakupan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Keluarga Kurang Mampu | Persen | 71,31 | 73,09 | 92,92 | 78,72 | DINSOS | H |
| 1 | 06 | 04 | Persentase Penanganan Rehabilitasi Sosial | Persen | 100 | 100 | 75,0 | 100 | DINSOS | M |
| 1 | 06 | 05 | Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial | Persen | 38,61 | 40,76 | 45,92 | 50,56 | DINSOS | H |
| 1 | 06 | 06 | Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Masa Tanggap Darurat | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | DINSOS | H |
| 1 | 06 | 07 | Persentase Taman Makam Pahlawan Yang dikelola | Persen | 100 | 100 | - | 100 | DINSOS | M |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan / Indikator Kinerja Program (Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2022 | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|------|----|----|--|--------|-------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----|
| | | | | | | Target | Capaian Smstr 2 | | | |
| 2 | 07 | 01 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | DPMTSP NAKER | H |
| 2 | 07 | 03 | Persentase Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan | Persen | 19,71 | 13,33 | 26,37 | 15,56 | DPMTSP NAKER | H |
| 2 | 07 | 04 | Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang ditempatkan | Persen | 39,21 | 54,17 | 7,46 | 57,22 | DPMTSP NAKER | M |
| 2 | 07 | 05 | Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | Persen | 100 | 100 | 88,37 | 100 | DPMTSP NAKER | M |
| 2 | 08 | 01 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | DP3AP2 KB | H |
| 2 | 08 | 02 | Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender | Persen | 59,58 | 59,39 | 51,5 | 60,68 | DP3AP2 KB | M |
| 2 | 08 | 03 | Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak | Persen | 62,50 | 75,00 | 75,00 | 100,00 | DP3AP2 KB | H |
| 2 | 08 | 04 | Persentase Pembinaan Kelompok Perempuan | Persen | 91,67 | 91,67 | - | 94,12 | DP3AP2 KB | M |
| 2 | 08 | 05 | Persentase Perangkat Daerah yang Menyediakan Kebutuhan Data SIGA/SDGA | Persen | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 35,29 | DP3AP2 KB | H |
| 2 | 08 | 06 | Cakupan Pemenuhan Hak Anak | Persen | 30,49 | 33,46 | 36,40 | 43,38 | DP3AP2 KB | H |
| 2 | 08 | 07 | Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | DP3AP2 KB | H |
| 2 | 09 | 01 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 96,51 | 100 | DKPPP | M |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan / Indikator Kinerja Program (Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2022 | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|------|----|----|--|-----------|-------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----|
| | | | | | | Target | Capaian Smstr 2 | | | |
| 2 | 09 | 03 | Ketersediaan Pangan Utama | Persen | 39,45 | 39,65 | 37,68 | 45,00 | DKPPP | M |
| 2 | 09 | 04 | Persentase Ketersediaan Informasi Kerawanan Pangan | Persen | 33,33 | 44,44 | - | 77,78 | DKPPP | M |
| 2 | 09 | 05 | Persentase Pengawasan dan Pengendalian Konsumsi Pangan Segar | Persen | 45,45 | 45,45 | - | 90,91 | DKPPP | M |
| 2 | 10 | 01 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 91,65 | 100 | PERTANAHAN | M |
| 2 | 10 | 05 | Persentase Santunan Persertifikatan | Persen | NA | 66,67 | - | 86,67 | PERTANAHAN | M |
| 2 | 10 | 08 | Persentase Penanganan Tanah Kosong | Persen | NA | 15,00 | - | 25,00 | PERTANAHAN | M |
| 2 | 10 | 10 | Persentase Luas Lahan bersertifikat Milik Pemerintah | Persen | 0,51 | 0,55 | 0,62 | 0,67 | PERTANAHAN | H |
| 2 | 10 | 12 | Persentase Luas Lahan Bersertifikat Milik Masyarakat | Persen | 33,88 | 44,87 | 45,85 | 46,42 | PERTANAHAN | H |
| 2 | 10 | 13 | Persentase Tanah yang Dipetakan | Persen | 47,86 | 66,21 | - | 68,66 | PERTANAHAN | M |
| 2 | 10 | 14 | Persentase Pembinaan SDM Pertanahan | Persen | 35,09 | 43,86 | 95,36 | 70,18 | PERTANAHAN | H |
| 2 | 10 | 15 | Persentase Pemanfaatan Lahan Wilayah Pesisir dan Sempadan Pantai | Persen | NA | 54,17 | - | 66,67 | PERTANAHAN | M |
| 2 | 10 | 16 | Ketersediaan Sistem Informasi Pertanahan | Ada/Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | PERTANAHAN | H |
| 2 | 10 | 17 | Persentase Penyelesaian Kasus Sengketa Dan Konflik Pertanahan | Persen | 50 | 66,67 | 77,92 | 80 | PERTANAHAN | H |
| 2 | 11 | 01 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | DLH | H |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan / Indikator Kinerja Program (Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2022 | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket | | |
|------|--|--------|--|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------|--------------|---|
| | | | | Target | Capaian Smstr 2 | | | | | |
| 2 | 11 | 02 | Tersusunnya RPPLH Kab/Kota | Ada/Tidak | Ada | Ada | Ada | DLH | H | |
| 2 | 11 | 03 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Nilai | 63,7 | 64,9 | 63,40 | 66,25 | DLH | M |
| 2 | 11 | 04 | Persentase luasan taman | Persen | 28,91 | 48,97 | 28,91 | 88,50 | DLH | M |
| 2 | 11 | 05 | Persentase penanganan limbah B3 | persen | 75,00 | 80,00 | 75,00 | 95,00 | DLH | M |
| 2 | 11 | 06 | Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten / Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten / kota. | persen | 75,00 | 80,00 | 75,00 | 95,00 | DLH | M |
| 2 | 11 | 08 | Persentase aparatur desa yang terlatih | Persen | 1,47 | 7,35 | 1,47 | 29,41 | DLH | M |
| 2 | 11 | 09 | Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup | Ada/Tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | DLH | H |
| 2 | 11 | 10 | Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup | Persen | 100 | 100 | 100 | 100,00 | DLH | H |
| 2 | 11 | 11 | Persentase jumlah sampah yang ditangani | Persen | 86,25 | 87,60 | 99,57 | 93,74 | DLH | H |
| 2 | 12 | 01 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | DISDUK CAPIL | H |
| 2 | 12 | 02 | Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Persen | 58,24 | 66,16 | 77 | 71,07 | DISDUK CAPIL | H |
| 2 | 12 | 03 | Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil | Persen | 84,77 | 86,42 | 90 | 89,60 | DISDUK CAPIL | H |
| 2 | 12 | 04 | Cakupan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Persen | 58,3 | 100 | 100 | 100 | DISDUK CAPIL | H |
| 2 | 12 | 05 | Ketersediaan Profil Perkembangan Kependudukan | Ada/Tidak | Tidak | Ada | Ada | Ada | DISDUK CAPIL | H |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan / Indikator Kinerja Program (Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2022 | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|------|----|----|---|-------------|-------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----|
| | | | | | | Target | Capaian Smstr 2 | | | |
| 2 | 13 | 01 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100,00 | 100 | DPMG | H |
| 2 | 13 | 02 | Persentase Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Gampong yang Baik | Persen | 94,12 | 95,59 | 89,71 | 100,00 | DPMG | M |
| 2 | 13 | 03 | Persentase Kerjasama Gampong | Persen | 25,00 | 51,47 | 61,76 | 100,00 | DPMG | H |
| 2 | 13 | 04 | Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong | Persen | 57,61 | 67,13 | 67,96 | 98,75 | DPMG | H |
| 2 | 13 | 05 | Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan | Persen | 51,84 | 81,25 | 84,19 | 97,79 | DPMG | H |
| 2 | 14 | 02 | Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB | Persen | 47,06 | 55,88 | 55,82 | 73,53 | DP3AP2 KB | M |
| 2 | 14 | 03 | Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana | Persen | 29,94 | 52,28 | 50,00 | 50,66 | DP3AP2 KB | M |
| 2 | 14 | 04 | Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera | Persen | 90,07 | 97,43 | 90,07 | 119,49 | DP3AP2 KB | M |
| 2 | 15 | 01 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 93,58 | 100 | DISHUB | M |
| 2 | 15 | 02 | Cakupan Kualitas Layanan Transportasi | Persen | 41,67 | 29,17 | 100 | 45,83 | DISHUB | H |
| 2 | 15 | 03 | Ketersediaan Pelabuhan Laut | Ada / Tidak | Tidak | Tidak | - | Ada | DISHUB | M |
| 2 | 16 | 01 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | KOMINFO | H |
| 2 | 16 | 02 | Persentase Penyebaran Informasi Publik | Persen | 26,67 | 26,25 | 33 | 30,00 | KOMINFO | H |
| 2 | 16 | 03 | Persentase Pelayanan Publik Yang | Persen | 2,94 | 5,88 | 27 | 23,53 | KOMINFO | H |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan / Indikator Kinerja Program (Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2022 | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket | |
|------|--|---|-------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|---|
| | | | | Target | Capaian Smstr 2 | | | | |
| | Terintegrasi | | | | | | | | |
| 2 | 17 01 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100,00 | 100 | DISKOP | H |
| 2 | 17 02 | Persentase Koperasi yang memiliki USP | Persen | 0,48 | 0,94 | 94,00 | 1,34 | DISKOP | H |
| 2 | 17 03 | Persentase Koperasi Mandiri | Persen | 79,33 | 79,72 | 5,10 | 85,38 | DISKOP | M |
| 2 | 17 04 | Persentase Koperasi yang Sehat | Persen | 4,33 | 5,66 | 16,35 | 8,04 | DISKOP | H |
| 2 | 17 07 | Persentase Fasilitasi UMKM | Persen | 1,31 | 23,20 | 9,12 | 29,48 | DISKOP | M |
| 2 | 17 08 | Persentase Pengembangan UMKM | Persen | 6,08 | 6,72 | 5,09 | 8,40 | DISKOP | M |
| 2 | 18 02 | Persentase Kemudahan Penanaman Modal | Persen | NA | 33,33 | - | 46,67 | DPMTSP NAKER | M |
| 2 | 18 03 | Persentase Sektor pada Promosi Penanaman Modal | Persen | 10,00 | 20,00 | - | 20,00 | DPMTSP NAKER | M |
| 2 | 18 04 | Indeks Peningkatan Pelayanan Perizinan | Indeks | 87,02 | 87,34 | 100 | 88,30 | DPMTSP NAKER | H |
| 2 | 18 05 | Indeks Pemantauan dan Pengawasan Investasi | Indeks | 80,56 | 77,75 | 42,46 | 75,19 | DPMTSP NAKER | M |
| 2 | 18 06 | Ketersediaan Database Perizinan | Ada/Tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | DPMTSP NAKER | H |
| 2 | 19 01 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | DISPORAPAR | H |
| 2 | 19 02 | Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | DISPORAPAR | H |
| 2 | 19 03 | Jumlah prestasi olahraga | Cabor | 4 | 6 | 4 | 8 | DISPORAPAR | M |
| 2 | 19 04 | Pembinaan Pramuka | Persen | 42,86 | 42,86 | 44,44 | 42,86 | DISPORAPAR | H |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan / Indikator Kinerja Program (Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2022 | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|------|----|----|--|--------|-------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----|
| | | | | | | Target | Capaian Smstr 2 | | | |
| 2 | 21 | 02 | Persentase OPD yang melakukan pengamanan data dan informasi terintegrasi | Persen | 2,94 | 5,88 | 9,70 | 11,76 | KOMINFO | H |
| 2 | 22 | 02 | Persentase kegiatan pengembangan budaya | Persen | 46,15 | 53,85 | 42,9 | 76,92 | PK | M |
| 2 | 22 | 03 | Persentase pembinaan sanggar seni | Persen | 3,45 | 3,45 | 3,13 | 6,90 | PK | M |
| 2 | 22 | 04 | Persentase objek sejarah | Persen | 50,00 | 50,00 | 50 | 68,75 | PK | H |
| 2 | 22 | 05 | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan | Persen | 50,00 | 50,00 | 50 | 68,18 | PK | H |
| 2 | 22 | 01 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 72 | 68,18 | MAA | M |
| 2 | 22 | 07 | Persentase Fasilitasi sengketa adat | Persen | 100 | 100 | 62 | 68,18 | MAA | M |
| 2 | 23 | 01 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | ARPUS | H |
| 2 | 23 | 02 | Cakupan Pembinaan Perpustakaan | Persen | 4,34 | 6,85 | 77 | 13,09 | ARPUS | H |
| 2 | 24 | 02 | Persentase Pengelolaan arsip sesuai standar | Persen | 3,77 | 7,41 | 7,41 | 17,54 | ARPUS | H |
| 2 | 24 | 03 | Persentase Penyelamatan Arsip | Persen | 10,00 | 18,18 | 18,18 | 35,71 | ARPUS | H |
| 3 | 25 | 03 | Cakupan bina kelompok nelayan | Persen | 43,34 | 45,41 | 42,63 | 51,61 | DKPPP | M |
| 3 | 25 | 04 | Cakupan bina kelompok pembudidaya | Persen | 43,22 | 46,52 | 28,84 | 56,45 | DKPPP | M |
| 3 | 25 | 05 | Persentase Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | Persen | 41,67 | 44,17 | 41,62 | 51,67 | DKPPP | M |
| 3 | 25 | 06 | Cakupan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Persen | 100 | 100 | - | 100 | DKPPP | M |
| 3 | 26 | 02 | Persentase Peningkatan Daya Tarik Pariwisata | Persen | 25,00 | 40,00 | 25,00 | 90,00 | DISPORAPAR | M |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan / Indikator Kinerja Program (Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2022 | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket | | |
|------|--|--------|---|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------|------------|---|
| | | | | Target | Capaian Smstr 2 | | | | | |
| 3 | 26 | 03 | Peningkatkan Kunjungan Wisata | Persen | 75,15 | 95,00 | 97,70 | 97,06 | DISPORAPAR | H |
| 3 | 26 | 05 | Persentase Pembinaan SDM Pariwisata | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | DISPORAPAR | H |
| 3 | 27 | 02 | Cakupan Sarana Kelompok Tani | Persen | 17,68 | 25,57 | 19,01 | 49,24 | DKPPP | M |
| 3 | 27 | 03 | Cakupan Prasarana Kelompok Tani | Persen | 17,68 | 26,10 | 22,86 | 51,34 | DKPPP | M |
| 3 | 27 | 04 | Cakupan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Verternier | Persen | 37,75 | 39,87 | 38,01 | 46,24 | DKPPP | M |
| 3 | 27 | 05 | Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Persen | 41,76 | 46,07 | - | 58,99 | DKPPP | M |
| 3 | 27 | 07 | Cakupan Pembinaan Kelembagaan Penyuluhan dan Kelembagaan Petani | Persen | 38,74 | 38,88 | 37,23 | 44,87 | DKPPP | M |
| 3 | 30 | 03 | Cakupan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Persen | 0,37 | 0,44 | 0,1 | 0,92 | DISKOP | M |
| 3 | 30 | 04 | Cakupan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | Persen | 61,11 | 59,97 | 60,0 | 59,98 | DISKOP | H |
| 3 | 30 | 05 | Persentase Partisipasi pada Promosi Dagang | Persen | 50,00 | 50,00 | 50,0 | 83,33 | DISKOP | H |
| 3 | 30 | 06 | Persentase Tera Tera Ulang UTTP | Persen | 63,47 | 71,25 | 75,0 | 77,71 | DISKOP | H |
| 3 | 31 | 02 | Cakupan Pembinaan, Pengawasan dan Promosi Industri Kecil Menengah | Persen | 4,34 | 4,95 | 6,36 | 6,27 | DISKOP | H |
| 3 | 31 | 03 | Persentase IKM yang memiliki Izin | Persen | 4,73 | 4,74 | 4,50 | 5,65 | DISKOP | M |
| 3 | 31 | 04 | Ketersediaan Informasi yang | Ada/Tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | DISKOP | H |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan / Indikator Kinerja Program (Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2022 | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|------|----|----|---|-------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----|
| | | | | | | Target | Capaian Smstr 2 | | | |
| | | | dibutuhkan | | | | | | | |
| 4 | 01 | 01 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100,00 | 100 | SETDAKO | H |
| 4 | 01 | 02 | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat | Persen | 98,53 | 98,70 | 84,61 | 98,70 | SETDAKO | M |
| 4 | 01 | 03 | Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan | Persen | 91,11 | 97,00 | 77,27 | 92,00 | SETDAKO | M |
| 4 | 02 | 01 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | SETWAN | H |
| 4 | 02 | 02 | Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan | Persen | 41,18 | 70,00 | 63 | 83,33 | SETWAN | M |
| 5 | 01 | 01 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | BAPPEDA | H |
| 5 | 01 | 02 | Ketersediaan Dokumen Perencanaan: RKPK yang telah ditetapkan dengan Perkada | Ada/Tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | BAPPEDA | H |
| 5 | 01 | 03 | Penjabaran Konsistensi Program RPJMK ke dalam RKPK | Persen | 100 | 100 | 98,39 | 100 | BAPPEDA | M |
| 5 | 02 | 01 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | BPKD | H |
| 5 | 02 | 02 | Penetapan APBD Tepat Waktu | Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | BPKD | H |
| 5 | 02 | 02 | Opini BPK | Opini | WTP | WTP | Dalam proses | WTP | BPKD | H |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan / Indikator Kinerja Program (Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2022 | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|------|----|----|--|------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----|
| | | | | | | Target | Capaian Smstr 2 | | | |
| 5 | 02 | 03 | Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persen | 100,00 | 100,00 | 100 | 100,00 | BPKD | H |
| 5 | 02 | 04 | Persentase penerimaan PAD | Persen | 68,50 | 100 | 97 | 100 | BPKD | M |
| 5 | 03 | 01 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | BKPSDM | H |
| 5 | 03 | 02 | Persentase fasilitasi pelayanan Administrasi kepegawaian | Persen | 50,60 | 52,19 | 52,19 | 54,94 | BKPSDM | H |
| 5 | 04 | 02 | Persentase pejabat yang telah mengikuti diklat struktural | Persen | 8,77 | 9,36 | 14,30 | 10,33 | BKPSDM | H |
| 5 | 05 | 02 | Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan | Persen | 50,00 | 85,71 | 85,71 | 100,00 | BAPPEDA | H |
| 6 | 01 | 01 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | INSPEKTORAT | H |
| 6 | 01 | 02 | Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan | Persen | 78,35 | 80,02 | 83,74 | 83,56 | INSPEKTORAT | H |
| 6 | 01 | 03 | Kategori Penilaian Reformasi Birokrasi | Point / Kategori | WTP | CC 50.10 | CC 54.79 | CC 51.50 | INSPEKTORAT | H |
| 6 | 01 | 03 | Level Kapabilitas APIP | Level | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 4 | INSPEKTORAT | H |
| 6 | 01 | 03 | Tingkat Maturitas SPIP Pemko Lhokseumawe | Level | Level 2 | Level 3 3.2 | Level 3 3.031 | Level 3 3.5 | INSPEKTORAT | M |
| 7 | 01 | 01 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | B. SAKTI | H |
| 7 | 01 | 03 | Persentase pembinaan PKK Gampong | Persen | 5,56 | 33,33 | 100 | 55,56 | B. SAKTI | H |
| 7 | 01 | 04 | Persentase Penertiban | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | B. SAKTI | H |
| 7 | 01 | 05 | Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam | Persen | 75 | 100 | 100 | 100 | B. SAKTI | H |
| 7 | 01 | 06 | Persentase Pengawasan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | B. SAKTI | H |

| Kode | | | Bidang Urusan Pemerintahan / Indikator Kinerja Program (Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2022 | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|------|----|----|--|--------|-------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----|
| | | | | | | Target | Capaian Smstr 2 | | | |
| | | | Pemerintahan Gampong | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | B. MANGAT | H |
| 7 | 01 | 02 | Persentase Peningkatan Fasilitas Publik | Persen | 40 | 40 | 40 | 100 | B. MANGAT | H |
| 7 | 01 | 03 | Persentase pembinaan PKK Gampong | Persen | 86,36 | 86,36 | 86,37 | 90,91 | B. MANGAT | H |
| 7 | 01 | 04 | Persentase Penertiban | Persen | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00 | B. MANGAT | H |
| 7 | 01 | 05 | Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam | Persen | 13,64 | 22,73 | 22,74 | 22,73 | B. MANGAT | H |
| 7 | 01 | 06 | Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | B. MANGAT | H |
| 7 | 01 | 01 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | M. SATU | H |
| 7 | 01 | 03 | Persentase pembinaan PKK Gampong | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | M. SATU | H |
| 7 | 01 | 04 | Persentase Penertiban | Persen | 100 | 42,86 | 50 | 42,86 | M. SATU | H |
| 7 | 01 | 05 | Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | M. SATU | H |
| 7 | 01 | 06 | Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong | Persen | 100 | 100 | 91 | 100 | M. SATU | M |
| 7 | 01 | 01 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | M. DUA | H |
| 7 | 01 | 03 | Persentase pembinaan PKK Gampong | Persen | 17,65 | 17,65 | 17,65 | 17,65 | M. DUA | H |
| 7 | 01 | 04 | Persentase Penertiban | Persen | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | M. DUA | H |
| 7 | 01 | 05 | Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam | Persen | 17,65 | 17,65 | 17,65 | 17,65 | M. DUA | H |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan / Indikator Kinerja Program (Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2022 | Tahun 2023 | | Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket | |
|------|--|---|-------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---|
| | | | | Target | Capaian Smstr 2 | | | | |
| 7 | 01 06 | Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | M. DUA | H |
| 8 | 01 01 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 44,95 | 100 | KESBANGPOL | M |
| 8 | 01 02 | Persentase jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan wawasan kebangsaan | Persen | 0,82 | 1,44 | 48,59 | 2,21 | KESBANGPOL | M |
| 8 | 01 03 | Rasio partisipasi masyarakat dalam partai politik | Rasio | 75,94 | 78,76 | 49,97 | 81,98 | KESBANGPOL | M |
| 8 | 01 04 | Persentase Pembinaan Ormas | Persen | 12,96 | 15,00 | - | 20,27 | KESBANGPOL | M |
| 8 | 01 05 | Persentase pembinaan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba, PEKAT, serta Kerukunan Umat Beragama | Persen | NA | 1,46 | - | 4,37 | KESBANGPOL | M |
| 8 | 01 06 | Persentase konflik sosial yang tertangani | Persen | NA | 100 | - | 100 | KESBANGPOL | M |
| 9 | 01 01 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | MPU | H |
| 9 | 01 03 | Persentase Fatwa yang tersebarluaskan | Persen | 58,33 | 71,43 | 100 | 71,43 | MPU | H |
| 9 | 01 01 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | B. MAL | H |
| 9 | 01 04 | Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan | Rasio | 0,72 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | B. MAL | H |
| 9 | 01 01 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 96 | 100 | DSI-PD | M |
| 9 | 01 02 | Cakupan Pembinaan Syariat Islam | Persen | 43,70 | 48,50 | 44 | 59,43 | DSI-PD | M |

Sumber : RPK Lhokseumawe dan Perangkat Daerah Tahun 2023

2.2.4. Realisasi Terhadap Proyeksi Kebijakan Keuangan

2.2.4.1. Realisasi Pendapatan Tahun 2023

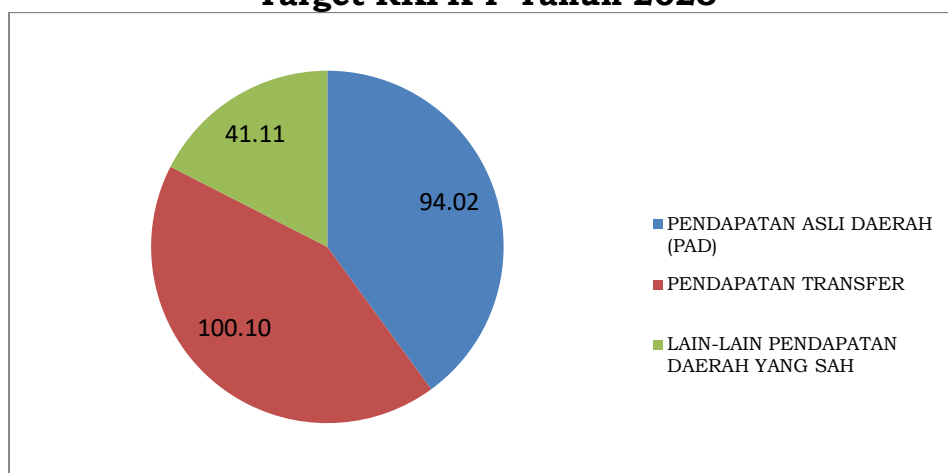
Pendapatan Kota Lhokseumawe dalam RKPK Tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp.752.709.000.000 dan telah tercapai sebesar Rp. 748.760.268.324 atau sebesar 99,48 persen. Capaian Realisasi terbesar yaitu pada objek pendapatan tranfer sebesar 100 persen dari target yang telah di tetapkan pada RKPK Tahun 2023. Rincin dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut

Tabel 2.170
Realisasi Pendapatan Tahun 2023 terhadap
Target RKPK-P Tahun 2023

| Kode Rek | URAIAN | TARGET RKPK-P 2023 | ANGGARAN PERGESERAN 2023 | REALISASI 2023 Semester 2 | % Realisasi terhadap DPA-Pergeseran 2023 | % Realisasi terhadap RKPK - P 2023 |
|-----------|---|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | 752.709.000.000 | 768.471.407.647 | 748.760.268.324,63 | 97,44 | 99,48 |
| 41 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 72.378.505.978 | 75.120.033.625 | 68.047.614.287 | 90,59 | 94,02 |
| 4101 | Pajak Daerah | 34.060.750.000 | 34.060.750.000 | 39.586.883.419 | 116,22 | 116,22 |
| 4102 | Retribusi Daerah | 4.087.500.000 | 4.087.500.000 | 3.733.420.512 | 91,34 | 91,34 |
| 4103 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5.200.000.000 | 5.200.000.000 | 3.236.124.545 | 62,23 | 62,23 |
| 4104 | Lain-lain PAD yang Sah | 29.030.255.978 | 31.771.783.625 | 21.491.185.810,23 | 67,64 | 74,03 |
| 42 | PENDAPATAN TRANSFER | 679.790.494.022 | 692.811.374.022 | 680.490.654.038 | 98,22 | 100,10 |
| 4201 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 618.674.463.383 | 631.695.343.383 | 623.571.392.268 | 98,71 | 100,79 |
| 420201 | Pendapatan Bagi Hasil | 31.274.106.455 | 31.220.106.455 | 34.250.277.597 | 109,71 | 109,52 |
| 420202 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi | 29.841.924.184 | 29.895.924.184 | 22.668.984.173 | 75,83 | 75,96 |
| 43 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 540.000.000 | 540.000.000 | 222.000.000 | 41,11 | 41,11 |
| 4301 | Pendapatan Hibah | 540.000.000 | 540.000.000 | 222.000.000 | 41,11 | 41,11 |

Sumber : RKPK-P Tahun 2023 dan LRA Tahun 2023

Gambar 2.30
Realisasi Pendapatan Tahun 2023 terhadap
Target RKPK-P Tahun 2023



Sumber : RKPK-P Tahun 2023 dan LRA Tahun 2023

2.2.4.2. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023

Belanja Daerah yang ditargetkan dalam RKPK Tahun 2023 sebesar Rp. 781.998.500.000,- dan telah dicapai sampai dengan bulan juni sebesar Rp. 720.820.494.369,- atau sebesar 92,18 persen, anggaran tersebut digunakan untuk membiayai program yang terbagi dalam kegiatan yang tersebar di 34 perangkat daerah di Kota Lhokseumawe. Serapan terbesar dari belanja daerah berada pada Belanja Transfer yang terserap sebesar Rp. 119.562.619.814,- atau 100,88 persen dari target sebesar Rp. 118.525.130.715,- yang telah ditetapkan dan yang terendah pada Belanja Tidak Terduga terserap sebesar Rp. 52.650.368,- atau 2,44 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 2.160.000.000,- rincian dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut

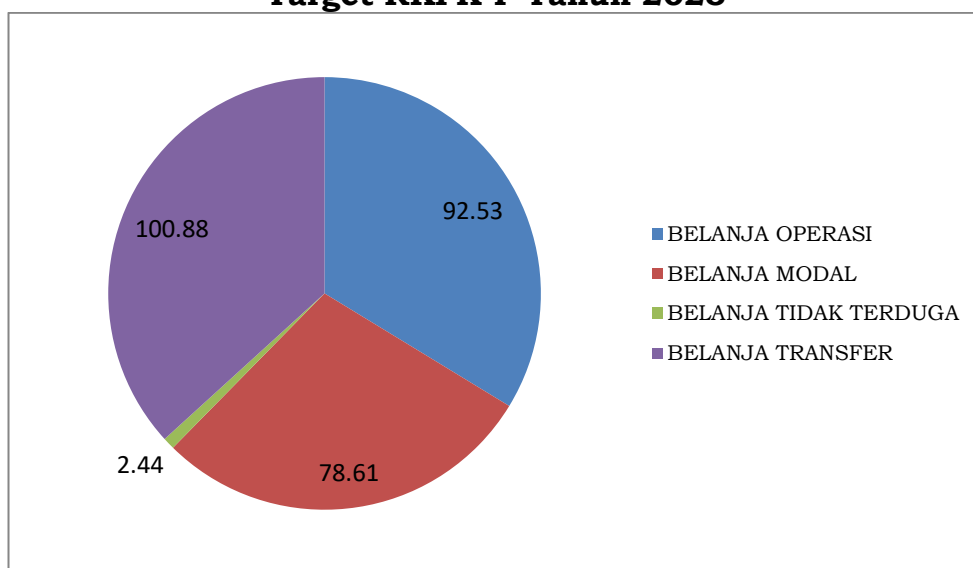
Tabel 2.171
Realisasi Belanja Tahun 2023 terhadap
Target RKPK-P Tahun 2023

| KoRe | URAIAN | TARGET RKPK P 2023 | ANGGARAN / DPA- PERGESERAN | REALISASI smstr 2 2023 | %Realisasi terhadap DPA smtr 2 Tahun 2023 | %Realisasi terhadap smtr 2 Tahun RKPK-P tahun 2023 |
|--------|------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | BELANJA DAERAH | 781.998.500.000 | 798.260.907.647 | 720.820.494.369 | 90,30 | 92,18 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 584.563.143.451 | 595.256.623.128 | 540.869.018.366 | 90,86 | 92,53 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 338.878.360.552 | 333.590.854.673 | 316.584.344.048,00 | 94,90 | 93,42 |

| KoRe | URAIAN | TARGET RPKP P 2023 | ANGGARAN / DPA- PERGESERAN | REALISASI smstr 2 2023 | %Realisasi terhadap DPA smtr 2 Tahun 2023 | %Realisasi terhadap smtr 2 Tahun RPKP-P tahun 2023 |
|------------|------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|---|--|
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 193.446.974.727 | 198.420.544.061 | 177.507.014.701,00 | 89,46 | 91,76 |
| 5.1.04 | Belanja Subsidi | 470.000.000 | 470.000.000 | 470.000.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 21.279.232.842 | 29.753.421.564 | 15.166.487.962,00 | 50,97 | 71,27 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 30.488.575.330 | 33.021.802.830 | 31.141.171.655,00 | 94,30 | 102,14 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 76.750.225.834 | 82.331.873.436 | 60.336.205.821,00 | 73,28 | 78,61 |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 2.160.000.000 | 52.650.368 | 52.650.368,00 | 100,00 | 2,44 |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | 118.525.130.715 | 120.619.760.715 | 119.562.619.814 | 99,12 | 100,88 |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 3.814.825.000 | 3.814.825.000 | 3.183.566.844,00 | 83,45 | 83,45 |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 114.710.305.715 | 116.804.935.715 | 116.379.052.970,00 | 99,64 | 101,45 |

Sumber: RPKP-P 2023 dan BPKD Lhokseumawe

Gambar 2.31
Realisasi Belanja Tahun 2023 terhadap Target RPKP-P Tahun 2023



Sumber: RPKP 2023 dan BPKD Lhokseumawe

2.2.4.3. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2023

Pembiayaan Daerah berasal dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan Kota Lhokseumawe yang telah di targetkan dalam RPKP Tahun 2023 sebesar Rp. 29.289.500.000,- yang berasal dari penerimaan pembiayaan Rp. 31.789.500.000 dan pengeluaran pembiayaan Rp2.500.000.000,-. Pada tahun 2023, penerimaan pembiayaan Kota Lhokseumawe yang berasal dari Sisa

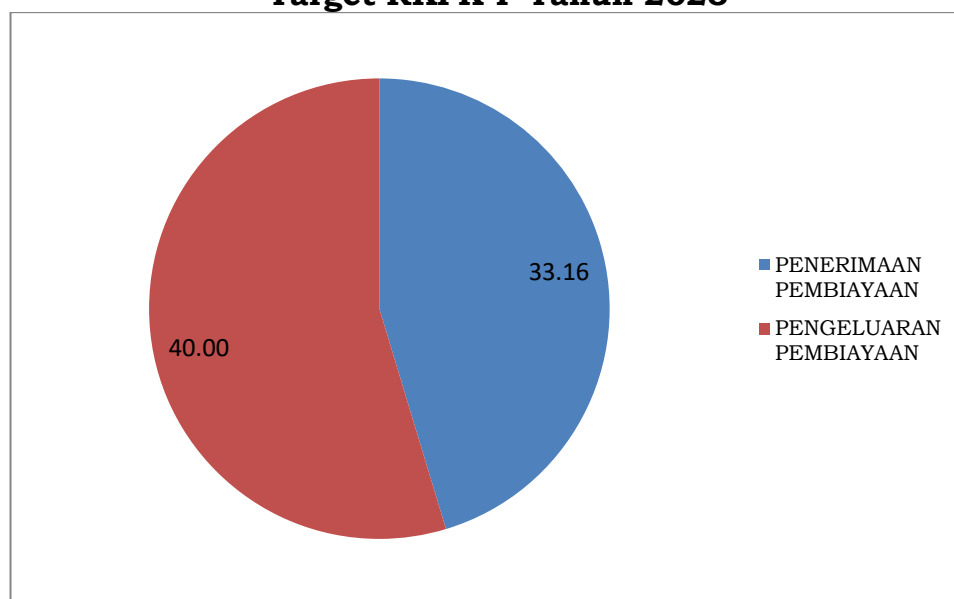
Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Lalu tercapai sebesar 10.541.034.674,37 atau tercapai sebesar 33,16 dari target yang ditetapkan dalam RKPK 2023 dan pengeluaran pembiayaan yang berasal dari penyertaan modal daerah tercapai sebesar 1.000.000.000 atau 40 persen dari target yang telah ditetapkan dalam RKPK Tahun 2023. Jadi secara keseluruhan Capaian Pembiayaan tahun 2023 sebesar 32,57 persen dari target yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui secara terperinci mengenai realisasi pembiayaan dimaksud, dapat dilihat pada Tabel

Tabel 2.172
Realisasi Pendapatan Tahun 2023 terhadap
Target RKPK-P Tahun 2023

| Korek | URAIAN | TARGET RKPK-P Tahun 2023 | ANGGARAN/DP A-PERGESERAN | REALISASI SMTR 2 Tahun 2023 | % Realisasi terhadap DPA-Pergeseran smtr 2 Tahun 2023 | % Realisasi terhadap smtr 2 Tahun RKPK-P tahun 2023 |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | 29.289.500.000 | 29.789.500.000 | 9.541.034.674 | 32,03 | 32,57 |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 31.789.500.000 | 31.789.500.000 | 10.541.034.674,37 | 33,16 | 33,16 |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 31.789.500.000 | 31.789.500.000 | 10.541.034.674,37 | 33,16 | 33,16 |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 2.500.000.000 | 2.000.000.000 | 1.000.000.000,00 | 50,00 | 40,00 |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 2.500.000.000 | 2.000.000.000 | 1.000.000.000,00 | 50,00 | 40,00 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 29.289.500.000 | 29.789.500.000 | 9.541.034.674 | 32,03 | 32,57 |

Sumber : RKPK-P Tahun 2023 dan LRA Tahun 2023 semester 2

Gambar 2.32
Realisasi Pembiayaan Tahun 2023 terhadap
Target RKPK-P Tahun 2023



Sumber : RKPK-P Tahun 2023 dan LRA Tahun 2023 semester 2

2.2.5. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Realisasi

2.2.5.1. Metode Evaluasi

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Tujuan evaluasi hasil RKPK adalah untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPK dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional.

Evaluasi hasil RKPK dilaksanakan setiap semester oleh Kepala Bappeda dengan menggunakan hasil evaluasi Renja SKPK. Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala OPD wajib melaksanakan evaluasi hasil Renja SKPK setiap semester berdasarkan realisasi DPA PD.

Bappeda melakukan Evaluasi Hasil RKPK setiap semester berdasarkan Hasil Evaluasi Renja SKPK yang dilaporkan/disampaikan Kepala SKPK. Evaluasi Hasil RKPK selanjutnya digunakan untuk penyusunan Perubahan RKPK tahun berjalan atau RKPK Tahun berikutnya. Formulir Evaluasi Hasil RKPK Provinsi/Kabupaten/Kota adalah yang menyerupai Formulir Evaluasi Hasil Renja.

Untuk lebih jelas mengenai mekanisme pengisian Evaluasi Hasil RKPK Provinsi/Kabupaten/Kota, dapat dilihat sebagai berikut:

- Baris rata-rata capaian kinerja (%) diisi dengan rata-rata capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) setiap program, dengan menjumlahkan persentase realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai seluruh kegiatan dibagi dengan jumlah kegiatan dalam program dimaksud.
- Baris predikat kinerja diisi dengan gradasi nilai (skala intensitas) berdasarkan kinerja yang dicapai pada baris rata-rata capaian kinerja dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

| Skala Nilai Peringkat Kinerja Semester 1 | | Skala Nilai Peringkat Kinerja Semester 2 | |
|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA | INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA |
| 45,5% ≤ 50% | Sangat tinggi | 91% ≤ 100% | Sangat tinggi |
| 38% ≤ 45% | Tinggi | 76% ≤ 90% | Tinggi |
| 33% ≤ 37,5% | Sedang | 66% ≤ 75% | Sedang |
| 25,5% ≤ 32,5% | Rendah | 51% ≤ 65% | Rendah |
| ≤ 25% | Sangat Rendah | ≤ 50% | Sangat Rendah |

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

(2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Catatan :

1. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan atas pelaksanaan RKPK pada triwulan I dan triwulan II, Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKPK untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Bappeda provinsi/kabupaten/kota dengan melakukan perubahan RKPK.
2. Dalam hal dilakukan perubahan RKPK, data dan informasi pada Kolom (7) disesuaikan dengan data dan informasi yang tercantum dalam perubahan RKPK.

2.2.5.2. Hasil Evaluasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Terhadap Target RKPK Tahun 2023

Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, capaian rata-rata realisasi anggaran terhadap target RKPK Tahun 2023 sebesar 67,57% persen atau predikat sedang (s), capaian sedang (s) tersebut di karenakan banyak perangkat daerah yang capaian rata-rata anggaran terhadap target RKPK 2023 juga rendah, hanya 11 perangkat daerah yang mencapai predikat sangat tinggi. Hal ini disebabkan, banyaknya kegiatan yang terdapat dalam Renstra dan RKPK Perangkat daerah yang tidak dilaksanakan dalam dokumen anggaran, sehingga ketika capaian di rata-ratakan tidak memperoleh predikat tinggi. Bila dilihat dari capaian realisasi anggaran RPK Tahun 2023-2026 juga masih sangat rendah sebesar 32,12 persen mengingat periode RPK Tahun 2023-2026 baru berjalan 1 Tahun di

di tahun 2023 sehingga pencapaian anggarannya masi dalam predikat sngat rendah, berikut ini disajikan hasil evaluasi Perangkat Daerah Tahun 2023 semester 2 terhadap target RKPK dan Realisasi RPK Lhokseumawe Tahun 2023 pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.173
Tingkat Capaian Rata-Rata Kinerja dan Realisasi Anggaran Terhadap Target RKPK Tahun 2023 dan Realisasi Anggaran terhadap RPK Tahun 2023-2026

| NO | Organisasi Perangkat Daerah | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Terhadap RKPK Tahun 2023 (%) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Terhadap RPJMD S/D Tahun 2023 (%) | |
|----|--|---|---------|--|--------|
| | | K | Rp | K | Rp |
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (DISPK) | 14,98% | 100,00% | 17,31% | 37,73% |
| | | SR | ST | SR | SR |
| 2 | DINAS KESEHATAN (DINKES) | 71,68% | 47,41% | 103,96 % | 66,60% |
| | | S | SR | ST | S |
| 3 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (DISPUPR) | 52,63% | 50,50% | 41,97% | 63,37% |
| | | R | R | SR | R |
| 4 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) | 39,16% | 44,05% | 9,79% | 20,79% |
| | | SR | SR | SR | SR |
| 5 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WH (SATPOLPP) | 47,68% | 100,00% | 19,75% | 26,33% |
| | | SR | ST | SR | SR |
| 6 | DINAS SOSIAL (DINSOS) | 29,94% | 22,86% | 6,96% | 68,09% |
| | | SR | SR | SR | S |
| 7 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) | 41,07% | 32,07% | 31,85% | 46,76% |
| | | SR | SR | SR | SR |
| 8 | DINAS PERTANAHAN | 19,45% | 27,66% | 3,99% | 5,87% |
| | | SR | SR | SR | SR |
| 9 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) | 31,00% | 70,22% | 23,19% | 11,18% |
| | | SR | S | SR | SR |
| 10 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DISDUKCAPIL) | 29,24% | 39,59% | 8,90% | 9,79% |
| | | SR | SR | SR | SR |
| 11 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMpong (DPMG) | 40,73% | 100,00% | 62,22% | 29,13% |
| | | SR | ST | R | SR |
| 12 | DINAS PERHUBUNGAN (DISHUB) | 24,26% | 35,95% | 10,71% | 8,32% |
| | | SR | SR | SR | SR |

| NO | Organisasi Perangkat Daerah | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Terhadap RKPK Tahun 2023 (%) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Terhadap RPJMD S/D Tahun 2023 (%) | |
|----|---|---|---------|--|--------|
| | | K | Rp | K | Rp |
| 13 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN (KOMINFO) | 61,11% | 100,00% | 14,87% | 33,48% |
| | | R | ST | SR | SR |
| 14 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA (DPMTSP NAKER) | 89,61% | 100,00% | 74,37% | 29,42% |
| | | T | ST | S | SR |
| 15 | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA (PORAPAR) | 19,56% | 35,12% | 4,89% | 3,30% |
| | | SR | SR | SR | SR |
| 16 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN (PUSIP) | 33,38% | 100,84% | 11,83% | 8,98% |
| | | S | ST | SR | SR |
| 17 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN (DKP3) | 15,95% | 22,86% | 4,43% | 9,35% |
| | | SR | SR | SR | SR |
| 18 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH (DISPRINDAGKOP) | 50,70% | 74,30% | 146,83 % | 22,12% |
| | | R | S | ST | SR |
| 19 | SETDAKO | 72,53% | 86,94% | 29,55% | 22,74% |
| | | S | T | SR | SR |
| 20 | SEKWAN | 65% | 87,94% | 33,05% | 22,16% |
| | | S | T | SR | SR |
| 21 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) | 35,05% | 35,65% | 39,97% | 12,35% |
| | | SR | SR | SR | SR |
| 22 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BPKD) | 71,79% | 68,52% | 18,12% | 16,27% |
| | | S | S | SR | SR |
| 23 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) | 30,80% | 100,00% | 8,68% | 23,03% |
| | | SR | ST | SR | SR |
| 24 | INSPEKTORAT | 83,53% | 64,15% | 83,53% | 21,01% |
| | | T | R | T | SR |
| 25 | KECAMATAN BANDA SAKTI | 61,54% | 86,10% | 17,60% | 22,52% |
| | | R | T | SR | SR |
| 26 | KECAMATAN BLANG MANGAT | 49,85% | 100,00% | 12,46% | 28,39% |
| | | SR | ST | SR | SR |
| 27 | KECAMATAN MUARA SATU | 72,78% | 100,00% | 120,50 % | 27,29% |
| | | S | ST | ST | SR |
| 28 | KECAMATAN MUARA DUA | 66,36% | 100,00% | 64,86% | 28,38% |

| NO | Organisasi Perangkat Daerah | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Terhadap RKPK Tahun 2023 (%) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Terhadap RPJMD S/D Tahun 2023 (%) | |
|----|---|---|---------|--|---------|
| | | K | Rp | K | Rp |
| | | S | ST | R | SR |
| 29 | BADAN KESBANGPOL (KESBANGPOL) | 68,38% | 100,00% | 1,03% | 0,73% |
| | | S | ST | SR | SR |
| 30 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH (DSI PD) | 31,37% | 42,57% | 38,74% | 100,00% |
| | | SR | SR | SR | ST |
| 31 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) | 100,00 % | 97,19% | 48,29% | 55,06% |
| | | T | T | T | T |
| 32 | SEKRETARIAT BAITUL MAL (BM) | 60,47% | 40,50% | 12,60% | 11,62% |
| | | R | SR | SR | SR |
| 33 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH (MAA) | 29,11% | 30,08% | 10,98% | 100,00% |
| | | SR | SR | SR | ST |
| 34 | SEKRETAARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH (MPD) | 33,93% | 54,36% | 7,23% | 100,00% |
| | | SR | R | SR | ST |

Sumber : Data Diolah

Untuk kesesuaian/konsistensi dokumen perencanaan antara RPK, RKPK dan DPA masih terjadi tidak konsisten. Dari 2.319 sub kegiatan masih terdapat 12 sub kegiatan atau 0,5 persen yang tidak direncanakan dalam renstra namun direncanakan dalam DPA, dan masih terdapat 1207 atau 52 persen sub kegiatan direncanakan dalam Renstra namun tidak direncanakan dalam DPA, sehingga menyebabkan capaian rata-rata kinerja dan anggaran setiap OPD menjadi sedang, serta terdapat 1100 subkegiatan atau 47,4 persen direncanakan dalam RKPD dan direncanakan dalam Renstra.

Selain belum adanya konsistensi dalam perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, permasalahan satuan dalam indikator kinerja yang di temukan masih tidak seragam dalam satu sub kegiatan, sehingga capaian realisasi untuk kinerja masih sangat sulit untuk di hitung, berikut ini disajikan kesesuaian dokumen anggaran pada tabel berikut

Tabel 2.174
Kesesuaian Dokumen Anggaran Tahun 2023

| NO | Organisasi Perangkat Daerah | direncanakan dalam RKPD dan direncanakan dalam Renstra | direncanakan dalam Renstra namun tidak direncanakan dalam renja | tidak direncanakan dalam renstra namun direncanakan dalam Renja |
|-----------|--|---|--|--|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (DISPK) | 68 | 139 | 0 |
| 2 | DINAS KESEHATAN (DINKES) | 78 | 14 | 0 |
| 3 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (DISPUPR) | 35 | 22 | 0 |
| 4 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) | 21 | 28 | 0 |
| 5 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WH (SATPOLPP) | 24 | 21 | 1 |
| 6 | DINAS SOSIAL (DINSOS) | 25 | 45 | 0 |
| 7 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) | 40 | 26 | 0 |
| 8 | DINAS PERTANAHAN | 19 | 28 | 0 |
| 9 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) | 25 | 17 | 0 |
| 10 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DISDUKCAPIL) | 31 | 69 | 0 |
| 11 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG (DPMG) | 32 | 22 | 0 |
| 12 | DINAS PERHUBUNGAN (DISHUB) | 31 | 35 | 1 |
| 13 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN (KOMINFO) | 21 | 8 | 1 |
| 14 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA (DPMTSP NAKER) | 32 | 5 | 0 |
| 15 | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA (PORAPAR) | 25 | 112 | 0 |
| 16 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN (PUSIP) | 26 | 45 | 0 |

| NO | Organisasi Perangkat Daerah | direncanakan dalam RKPD dan direncanakan dalam Renstra | direncanakan dalam Renstra namun tidak direncanakan dalam renja | tidak direncanakan dalam renstra namun direncanakan dalam Renja |
|-----------|---|---|--|--|
| 17 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN (DKP3) | 32 | 122 | 1 |
| 18 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH (DISPRINDAGKOP) | 39 | 48 | 2 |
| 19 | SETDAKO | 45 | 4 | 0 |
| 20 | SEKWAN | 51 | 29 | 6 |
| 21 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) | 41 | 53 | 0 |
| 22 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BPKD) | 61 | 32 | 0 |
| 23 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) | 32 | 47 | 0 |
| 24 | INSPEKTORAT | 30 | 9 | 0 |
| 25 | KECAMATAN BANDA SAKTI | 22 | 26 | 0 |
| 26 | KECAMATAN BLANG MANGAT | 24 | 17 | 0 |
| 27 | KECAMATAN MUARA SATU | 22 | 26 | 0 |
| 28 | KECAMATAN MUARA DUA | 21 | 26 | 0 |
| 29 | BADAN KESBANGPOL (KESBANGPOL) | 24 | 11 | 0 |
| 30 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH (DSI PD) | 47 | 62 | 0 |
| 31 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) | 17 | 0 | 0 |
| 32 | SEKRETARIAT BAITUL MAL (BM) | 24 | 18 | 0 |
| 33 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH (MAA) | 17 | 28 | 0 |
| 34 | SEKRETAARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH (MPD) | 15 | 16 | 0 |

Sumber : Data Diolah

Untuk serapan atau realisasi anggaran sesuai Target RKPK Tahun 2023 masih banyak yang belum mencapai 100%. Dapat dilihat yaitu sebanyak 1.968 atau 84,8 persen sub kegiatan untuk capaian realisasais anggaran terhadap RKPK 2023 kurang dari 100 persen (<100%) ini artinya bahwa penetapan pagu anggaran dalam RKPK lebih tinggi dari pada penetapan anggaran dalam DPA sehingga realisasinya dibawah 100 persen.

Kemudian sebanyak 328 atau 14,1 persen sub kegiatan dalam capaian realisasais anggaran terhadap RKPK 2023 lebih dari 100 persen (>100%) ini artinya bahwa penetapan pagu anggaran dalam RKPK rendah dari pada penetapan anggaran dalam DPA sehingga realisasinya diatas 100 persen. Selanjutnya sebanyak 23 atau 1,0 persen sub kegiatan yang serapan atau capaian realisasi anggaran terhadap RKPK Tahun 2023 sebesar 100 persen (=100%) ini artinya bahwa penetapan pagu anggaran dalam RKPK sesuai dengan penetapan anggaran dalam pagu DPA.

Dapat disimpulkan bahwa penetapan pagu anggaran dalam penyusunan RKPK Tahun 2023 memakai asumsi pendapatan dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, namun pada saat penyusunan APBK, Jumlah pendapatan yang di peroleh adalah pendapatan yang sebenarnya sehingga bila pendapatan berkurang makan pagu anggaran untuk setiap program kegiatan dan subkegiatan pun menyesuaikan dengan ketersediaan pagu.

Rekapitulasi Capaian Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2023 terhadap RKPK Tahun 2023, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.175
Rekapitulasi Capaian Realisasi Perangkat Daerah
Tahun 2023

| NO | Organisasi Perangkat Daerah | Realisasi = 100% | Realisasi < 100% | Realisasi > 100% |
|----|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (DISPK) | 1 | 171 | 35 |
| 2 | DINAS KESEHATAN (DINKES) | 1 | 73 | 18 |

| NO | Organisasi Perangkat Daerah | Realisasi = 100% | Realisasi < 100% | Realisasi > 100% |
|-----------|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (DISPUPR) | 0 | 48 | 9 |
| 4 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) | 2 | 42 | 5 |
| 5 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WH (SATPOLPP) | 1 | 33 | 12 |
| 6 | DINAS SOSIAL (DINSOS) | 0 | 64 | 6 |
| 7 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) | 1 | 58 | 7 |
| 8 | DINAS PERTANAHAN | 0 | 42 | 5 |
| 9 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) | 0 | 37 | 5 |
| 10 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DISDUKCAPIL) | 1 | 81 | 18 |
| 11 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG (DPMG) | 0 | 40 | 14 |
| 12 | DINAS PERHUBUNGAN (DISHUB) | 0 | 62 | 5 |
| 13 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN (KOMINFO) | 2 | 19 | 9 |
| 14 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA (DPMTSP NAKER) | 1 | 34 | 2 |
| 15 | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA (PORAPAR) | 1 | 123 | 13 |
| 16 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN (PUSIP) | 1 | 59 | 11 |
| 17 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN (DKP3) | 0 | 144 | 11 |

| NO | Organisasi Perangkat Daerah | Realisasi = 100% | Realisasi < 100% | Realisasi > 100% |
|-----------|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 18 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH (DISPRINDAGKOP) | 0 | 88 | 1 |
| 19 | SETDAKO | 1 | 32 | 16 |
| 20 | SEKWAN | 0 | 76 | 10 |
| 21 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) | 0 | 88 | 6 |
| 22 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BPKD) | 0 | 80 | 13 |
| 23 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) | 0 | 72 | 7 |
| 24 | INSPEKTORAT | 0 | 39 | 0 |
| 25 | KECAMATAN BANDA SAKTI | 0 | 41 | 7 |
| 26 | KECAMATAN BLANG MANGAT | 2 | 25 | 14 |
| 27 | KECAMATAN MUARA SATU | 1 | 38 | 9 |
| 28 | KECAMATAN MUARA DUA | 0 | 45 | 2 |
| 29 | BADAN KESBANGPOL (KESBANGPOL) | 0 | 23 | 12 |
| 30 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH (DSI PD) | 2 | 94 | 13 |
| 31 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) | 4 | 10 | 3 |
| 32 | SEKRETARIAT BAITUL MAL (BM) | 0 | 33 | 9 |
| 33 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH (MAA) | 1 | 38 | 6 |
| 34 | SEKRETAARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH (MPD) | 0 | 16 | 15 |

Sumber : Data diolah

2.2.5.3. Kesimpulan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi RKPK Tahun 2023 Semester II

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil Evaluasi terhadap RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 semester 2 sebagai berikut:

1. Untuk Capaian Realisasi Pendapatan Kota Lhokseumawe Tahun 2023 terhadap Target pendapatan yang ditetapkan dalam RKPK terealisasi sebesar 99,48 persen.
2. Untuk Capaian Realisasi Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2023 terhadap Target Belanja yang ditetapkan dalam RKPK terealisasi sebesar 92,18 persen.
3. Untuk Capaian Realisasi Pembiayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2023 terhadap Target Pembiayaan yang ditetapkan dalam RKPK terealisasi sebesar 32,57 persen.
4. Untuk capaian realisasi anggaran terhadap target anggaran yang telah di tetapkan dalam RKPK Tahun 2023 sampai dengan semester 2 sebesar 67,57 persen atau predikat sedang (S), hanya 11 perangkat daerah yang mencapai predikat sangat tinggi. Hal ini disebabkan masih banyaknya kegiatan yang terdapat dalam Renstra dan RKPK namun tidak dilaksanakan sehingga rata-rata capaian anggaran menjadi sedang (S).
5. Untul capaian realisasi RPK Tahun 2023-2026 sangat rendah (SR) sebesar 32,12 persen mengingat periode RPK Tahun 2023-2026 baru berjalan 1 Tahun di di tahun 2023 sehingga pencapaian anggaranya masih dalam predikat sangat rendah
6. Untuk kesesuain/konsistensi dokumen perencanaan antara RPK, RKPK dan DPA masih tidak konsisten, terdapat 2.319 sub kegiatan masih terdapat 12 sub kegiatan atau 0,5 persen yang tidak direncanakan dalam renstra namun direncanakan dalam DPA, dan masih terdapat 1207 atau 52 persen sub kegiatan direncanakan dalam Renstra namun tidak direncanakan dalam

DPA, sehingga menyebabkan capaian rata-rata kinerja dan anggaran setiap OPD menjadi sedang, serta terdapat 1100 subkegiatan atau 47,4 persen direncanakan dalam RKPD dan direncanakan dalam Renstra

7. Untuk serapan anggaran atau realisasi Tahun 2023 sampai dengan semester 2 sebanyak 1.968 atau 84,8 persen sub kegiatan untuk capaian realisas anggaran terhadap RKPK 2023 kurang dari 100 persen (<100%). Kemudian sebanyak 328 atau 14,1 persen sub kegiatan dalam capaian realisas anggaran terhadap RKPK 2023 lebih dari 100 persen (>100%). sebanyak 23 atau 1,0 persen sub kegiatan yang serapan atau capaian realisasi anggaran terhadap RKPK Tahun 2023 sebesar 100 persen (=100%).

B. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat disampaikan dari kesimpula hasil evaluasi terhadap RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 semester 1 sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah agar tetap menerapkan prinsip efektif dan efisien dalam pengelolaan anggaran;
2. Perangkat Daerah, dalam menyusun perencanaan Renstra, Renja dapat merencanakan kegiatan-kegiatan yang paling penting untuk di laksanakan, sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan seluruhnya dalam Dokumen Anggaran dan nantinya tidak ada kegiatan yang muncul di luar perencanaan.
3. Perangkat Daerah agar tetap memperhatikan kesesuaian dan sinkronisasi target pada semua dokumen perencanaan.

2.3 Permasalahan Pembangunan Kota Lhokseumawe

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Identifikasi permasalahan pembangunan didasarkan pada: (1) evaluasi capaian kinerja RPJMK Tahun 2017-2022, (2) evaluasi capaian kinerja bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau (3) Isu-isu terkini yang mempengaruhi jalannya pembangunan

Isu dan masalah mendesak yang dihadapi oleh Kota Lhokseumawe pada Tahun 2025 yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah antara lain sebagai berikut:

1. Prioritas Pertumbuhan Ekonomi dengan sasaran daerah pertama meningkatnya jumlah dan nilai investasi dengan permasalahan sebagai berikut:
 - Tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kota Lhokseumawe sangat terlihat jika dibandingkan dengan data pengangguran di tingkat Nasional maupun Provinsi. Angka pengangguran Kota Lhokseumawe masih berada di atas dua digit dari Tahun 2019 hingga Tahun 2021 yaitu 11.01%, 11.99% dan 11.16%. Tahun 2022-2023 TPT Kota Lhokseumawe turun menjadi 9.15% dan 8.78% namun tetap membuat Kota Lhokseumawe menjadi TPT tertinggi di Aceh. Sementara itu angka pengangguran nasional dan provinsi pada Tahun 2019 hingga Tahun 2023 berada dikisaran 5% sampai dengan 7%. Dan Angka Pengangguran Aceh di angka 6%

- Tingkat Inflasi Kota Lhokseumawe berada di atas inflasi Aceh dan di bawah inflasi nasional. Tingkat Inflasi Kota Lhokseumawe fluktuatif dari tahun 2019 yaitu sebesar 1.20, tahun 2023 sebesar 1.56. Sementara angka inflasi nasional 2019 sebesar 2.72 dan 2.61 pada tahun 2023, dan angka inflasi propinsi 1.69 pada tahun 2019 menjadi 2.61 pada tahun 2021.

Sasaran kedua yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan permasalahan sebagai berikut:

- Masih rendahnya penanganan fakir miskin, dari 31.123 fakir miskin yang terdata hanya 10.994 atau 35,32% yang tertangani.
- Meningkatnya jumlah penduduk miskin ekstrem Kota Lhokseumawe dari 2.246 jiwa atau (1.06%) di tahun 2022 menjadi 6.990 jiwa atau (3.25%) di tahun 2023.

Sasaran ketiga meningkatkan kesempatan kerja dengan permasalahan sebagai berikut

- Menurunnya tingkat pengangguran terbuka di Kota Lhokseumawe dari 9.15% tahun 2022 menjadi 8.78% di tahun 2023 masih menempatkan Kota Lhokseumawe sebagai daerah dengan TPT tertinggi di Aceh ;
- Persentase pencari kerja yang ditempatkan dan terdaftar menurun dari tahun 2019 sebesar 49.21% menjadi 7.46% di tahun 2023. Rendahnya jumlah pencari kerja yang ditempatkan karena tidak semua pencari kerja yang tercatat dilaporkan kembali setelah mendapatkan pekerjaan;

Sasaran keempat meningkatkan daya saing daerah dengan permasalahan sebagai berikut:

- Produksi perikanan budidaya Kota Lhokseumawe masih berada dibawah target dan jumlah produksi

menurun seiring target yang diharapkan terus meningkat. Jumlah produksi ikan budidaya tahun 2019 sebanyak 3.470 ton dari target 4.450 atau tercapai sebesar 77.97%. Pada tahun 2023, jumlah produksi sebesar 1.995,43 dari target 5.864 atau hanya 34.03% dari target yang ditetapkan. Kelautan dan perikanan seharusnya menjadi andalan Kota Lhokseumawe karena didukung oleh alam serta sarana yang cukup memadai.

- Produktivitas komoditi padi mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 9.954.000 kg menjadi 7.294.710 kg pada tahun 2023
- Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB (ADHB) Kota Lhokseumawe mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 9.40% menjadi 9.18%.
- Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (ADHB) Kota Lhokseumawe mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 19.48% menjadi 18.12% di tahun 2023.

2. Prioritas kesehatan dengan sasaran daerah pertama meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan permasalahan sebagai berikut:

- Meningkatnya angka kematian bayi (AKB) di Kota Lhokseumawe. Hal ini terlihat dari data Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2023, dimana pada Tahun 2019 terdapat angka kematian bayi (AKB) sebesar 4.74 per 1.000 kelahiran hidup. Pada Tahun 2020, nilai AKB cukup baik di angka 0.51 per 1.000 kelahiran hidup, tetapi pada Tahun 2021-2022 meningkat menjadi 4.51 per 1.000 kelahiran hidup, 5.97 per 1.000 kelahiran hidup. Dan tahun 2023 meningkat menjadi 15.28%. Idealnya AKB adalah 0%

atau pun ditekan serendah mungkin karena ini terkait dengan nyawa.

- Angka kematian Ibu (AKI) di Kota Lhokseumawe meningkat dari tahun 2022 sebesar 77.88 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 226.4 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2023
- Jumlah puskesmas di Kota Lhokseumawe belum mencukupi rasio 28.000 penduduk per puskesmas, karena Kota Lhokseumawe hanya memiliki 7 puskesmas di tahun 2023 atau setara untuk pelayanan 161.000 penduduk. Sedangkan pada tahun 2023, penduduk Kota Lhokseumawe sudah berjumlah 196.067 jiwa.
- Prevalensi Stunting Kota Lhokseumawe yang masih tinggi pada tahun 2019 prevalensi stunting sebesar 35.40% dan pada tahun 2022 sebesar 28.1%;
- Tingkat prevalensi Tuberculosis Kota Lhokseumawe meningkat pada tahun 2019 adalah 111 per 100.00 penduduk dan tahun 2023 meningkat menjadi 576 per 100.000 penduduk.
- Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi meningkat dari tahun 2019 sebesar 0.003% atau 7 pasien menjadi 0.013% atau 25 pasien pada tahun 2023.
- Cakupan persentase Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk meningkat, pada tahun 2022 tidak ditemukan kasus atau 0% dan pada tahun 2023 sebesar 0.007% atau terdapat 4 kasus SFP non polio.

3. Prioritas Pendidikan dengan sasaran pertama meningkatnya kualitas pendidikan

- Angka Partisipasi Murni di tingkat SD mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 99.84 dan menurun menjadi 99.73. Begitu juga di tingkat SMP

mengalami penurunan dari sebesar 96.69 di tahun 2022 menjadi sebesar 89.43 di tahun 2023.

- Angka Partisipasi Sekolah pada tahun 2018 sampai dengan 2019 cukup baik mencapai 100%. Artinya anak-anak di Kota Lhokseumawe mengikuti program wajib belajar yang telah dicanangkan pemerintah. Namun pada tahun 2020 dan 2022, Angka Partisipasi Sekolah SD menurun di bawah 100%, artinya masih ada anak usia sekolah dasar yang tidak ikut mengenyam pendidikan dasar sesuai program wajib belajar.

4. Prioritas Reformasi Birokrasi dengan sasaran pertama meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dengan permasalahan sebagai berikut:

- Tingkat pejabat ASN yang harus mengikuti diklat struktural masih sangat rendah. Pada tahun 2019, presentasi pejabat yang mengikuti diklat struktural sebesar 15.64%. Tapi pada tahun 2021, hanya 8,7% pejabat struktural yang sudah mengikuti diklat struktural dan tahun 2022 tidak ada pejabat yang mengikuti diklat struktural. Namun tahun 2023 telah sedikit meningkat menjadi 17.78%.
- Capaian Kapabilitas APIP Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023 masih stagnan di level 3 sejak tahun 2019
- Capaian Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe masih rendah dan stagnan di predikat CC dari tahun 2019-2022. Dan pada tahun 2023 telah meningkat menjadi B.
- Indeks Reformasi Birokrasi Kota Lhokseumawe pada tahun 2021 memperoleh nilai 44.03 atau (C/agak kurang) dari target nilai 50,1 atau (CC/cukup baik)

dan tahun 2023 meningkat menjadi CC dengan point 54.79.

Sasaran kedua meningkatnya pelayanan publik dengan permasalahan sebagai berikut:

Indeks Pemberdayaan Gender Kota Lhokseumawe masih rendah dibandingkan provinsi dan nasional. Pada tahun 2018, Indeks pemberdayaan gender Kota Lhokseumawe pada angka 51.06, sementara provinsi dan nasional berturut-turut pada angka 66,60 dan 72.10. Pada Tahun 2022 Indeks Pemberdayaan Gender Kota Lhokseumawe meningkat menjadi 58.45, namun masih lebih rendah dari angka provinsi dan nasional berturut-turut diangka 76.26 dan 76.32.

5. Prioritas Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya dengan sasaran pertama yaitu menguatnya penegakan syariat islam dalam bermasyarakat dengan permasalahan sebagai berikut:

- belum optimalnya pengelolaan ZISWAF Kota Lhokseumawe

Data rasio ZIS yang disalurkan dan ZIS yang terkumpul pada Tahun 2019-2023, menunjukkan belum optimalnya pengelolaan ZISWAF dimana masih terjadi rasio penyaluran dibawah angka 1 yang berarti, masih terdapat dana ZIS yang belum disalurkan pada tahun berkenaan. menurunnya akreditasi dayah di Kota Lhokseumawe.

- Sejumlah dayah di Kota Lhokseumawe mengalami penurunan nilai akreditasi pada Tahun 2021. Jika kita lihat secara umum, jumlah dayah yang memiliki tipe A, B, C atau D pada Tahun 2019 dan 2020 sebanyak 43 dayah. Namun pada Tahun 2021, jumlah dayah yang memiliki tipe hanya tinggal 18 dayah. Terjadi

penurunan yang sangat tajam lebih seratus 100%. Dan tahun 2022 meningkat menjadi 55 dayah.

- Masih tingginya pelanggaran syariat Islam di Kota Lhokseumawe.

Sasaran kedua meningkatnya pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap nilai budaya dengan permasalahan sebagai berikut:

- Jumlah pelanggaran qanun masih tinggi setiap tahunnya, pada Tahun 2018 tercatat hanya 165 pelanggaran, sedangkan pada Tahun 2022 sudah mencapai 141 pelanggaran.
- Jumlah penertiban pelanggaran ketentraman untuk menjaga ketertiban dan ketentraman Kota Lhokseumawe dari tahun 2018–2022 terus meningkat, dimana pada tahun 2018 tercatat 125 kasus dan pada tahun 2022 menjadi 759 kasus.

6. Prioritas Infrastruktur dengan sasaran pertama meningkatkan infrastruktur Kota Berkualitas dengan permasalahan sebagai berikut:

- Masih minimnya penegakkan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang
- Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar kawasan permukiman ditandai dengan masih tingginya persentase luas kawasan kumuh di Kota Lhokseumawe, dimana pada tahun 2019 terdapat kawasan kumuh seluas 61.29%, dan menurun pada Tahun 2023 menjadi 23,18%.
- Kota Lhokseumawe rentan mengalami banjir genangan yaitu air buangan ataupun air hujan yang tidak dapat mengalir ke badan air terdekat sehingga terperangkap di daerah cekungan ataupun daerah yang lebih rendah dalam suatu kawasan. Berdasarkan data Persentase

Tidak Terjadi Genangan > 2 kali Setahun Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023, masih terdapat luasan daerah yang tergenang pada Tahun 2019 sebesar 7. Ha yang terus menurun hingga Tahun 2022 pada luasan sebesar 4.52 Ha. Namun 2023 luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang meningkat menjadi 7 Ha.

- Persentase penduduk berakses air minum di Kota Lhokseumawe masih rendah. Pada tahun 2019 persentase penduduk berakses air minum sebesar 3.89% dan pada tahun 2022 hanya sedikit mengalami peningkatan yaitu menjadi sebesar 22.57%.
- Persentase rumah tinggal bersanitasi di Kota Lhokseumawe masih rendah dan mengalami kecenderungan menurun. Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sempat terus meningkat berturut-turut pada angka 68,23%, 73,04%, dan 75,49%. Namun pada tahun 2022 kembali menurun menjadi 71.08 pada tahun 2022;
- Masih terbatasnya ruang terbuka hijau;

7. Prioritas Lingkungan Hidup dengan sasaran pertama meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan permasalahan sebagai berikut:

- Masyarakat masih belum berperilaku 3 R dalam pengelolaan sampah dalam rumah tangga, sehingga upaya pengurangan sampah belum berjalan maksimal;
- Fasilitas pengurangan sampah yang disediakan oleh pemerintah Kota Lhokseumawe masih sangat terbatas dan operasional belum berjalan secara optimal;
- Peralatan modern pada armada pengangkutan sampah yang masih belum memadai;

- Belum tersedianya data tentang Indeks Pengelolaan Sampah.

2.3.1 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan

2.3.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.3.1.1.1 Bidang Pendidikan

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Lhokseumawe mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, APM SD tahun 2022 sebesar 99,84 dan tahun 2023 sebesar 99,73. Untuk APM SMP tahun 2022 sebesar 96,69 dan tahun 2023 menjadi sebesar 89,43
- b. Angka Partisipasi Sekolah pada tahun 2018 sampai dengan 2019 cukup baik mencapai 100%. Artinya anak-anak di Kota Lhokseumawe mengikuti program wajib belajar yang telah dicanangkan pemerintah. Namun pada tahun 2020 dan 2022, Angka Partisipasi Sekolah SD menurun di bawah 100%, artinya masih ada anak usia sekolah dasar yang tidak ikut mengenyam pendidikan dasar sesuai program wajib belajar.

2.3.1.1.2 Bidang Kesehatan

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Angka kematian bayi di Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 15.28 per 1000 kelahiran hidup dari tahun 2022 sebesar 5.97 per 1000 kelahiran hidup
- b. Angka kematian Ibu (AKI) di Kota Lhokseumawe meningkat dari tahun 2022 sebesar 77.88 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 226.4 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2023

- c. Prevalensi Stunting Kota Lhokseumawe yang masih tinggi pada tahun 2019 prevalensi stunting sebesar 35.40% dan pada tahun 2023 sebesar 20.79%;
- d. Tingkat prevalensi Tuberculosis Kota Lhokseumawe meningkat pada tahun 2019 adalah 111 per 100.00 penduduk dan tahun 2023 meningkat menjadi 576 per 100.000 penduduk.
- e. Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi meningkat dari tahun 2019 sebesar 0.003% atau 7 pasien menjadi 0.013% atau 25 pasien pada tahun 2023.
- f. Cakupan persentase Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk meningkat, pada tahun 2022 tidak ditemukan kasus atau 0% dan pada tahun 2023 sebesar 0.007% atau terdapat 4 kasus SFP non polio.

2.3.1.1.3 Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang masih ditemui di Kota Lhokseumawe meliputi:

- a. jalan kota dalam kondisi mantap sebesar 69,52% masih di bawah kondisi mantap jalan Aceh sebesar 86.13 dan mantap jalan nasional sebesar 97.72%
- b. pertumbuhan kendaraan tidak diikuti dengan penambahan jalan

2.3.1.1.4 Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang masih ditemui di Kota Lhokseumawe meliputi:

- a. belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar kawasan permukiman dimana luas kawasan kumuh pada tahun 2019 mengacu SK Walikota Lhokseumawe Nomor 395

Tahun 2019 sebesar 29.59 ha. Total luasan ini mengalami kenaikan menjadi 78,46 ha.

- b. masih rendahnya Persentase Penduduk berakses Air minum yaitu 22.54% pada tahun 2023 dan persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih sebesar 4,07%
- c. belum optimalnya rumah tinggal bersanitasi yaitu persentase rumah tinggal bersnitasi masih sebesar 72,67%
- d. belum optimalnya penerapan persyaratan pembangunan gedung atau sarana public lainnya yang ramah gender khususnya akses disabilitas, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 tentang persyaratan kemudahan bangunan gedung.

2.3.1.1.5 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang masih ditemui di Kota Lhokseumawe meliputi:

- a. jumlah penegakan peraturan daerah/ qanun di Kota Lhokseumawe masih sangat kecil, pada tahun 2023 dari 121 pelanggaran perda hanya 11 penegakan perda/ qanun yang diselesaikan.

2.3.1.1.6 Bidang Sosial

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang sosial tahun 2025 meliputi sebagai berikut:

- a. belum maksimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Cakupan peningkatan kesejahteraan sosial bagi keluarga kurang mampu pada tahun 2023 sebesar 35,32%.
- b. Belum optimalnya penanganan fakir miskin, pada tahun 2023 fakir miskin yang tertangani sebesar 35,32%.

2.3.1.2 Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar

2.3.1.2.1 Bidang Tenaga Kerja

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang tenaga kerja adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat pengangguran Kota Lhokseumawe tertinggi di Aceh, pada tahun 2023 TPT sebesar 8,78% berada di atas Aceh dan nasional.
- b. Persentase pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan masih rendah pada tahun 2023 sebesar 7,46%.
- c. Belum optimalnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pada tahun 2022 persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebesar 58,6% dan tahun 2023 sebesar 88,37%

2.3.1.2.2 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut:

- a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Lhokseumawe masih di bawah rata-rata Nasional, IDG Kota Lhokseumawe Tahun 2023 sebesar 65,7 berada di atas Aceh namun masih berada di bawah nasional
- b. belum optimalnya pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak serta masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2.3.1.2.3 Bidang Pangan

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang pangan adalah sebagai berikut:

- a. masih rendahnya kemandirian dan ketahanan pangan Kota Lhokseumawe, ketergantungan Lhokseumawe dengan daerah sekitar terhadap produk pangan masih tinggi

2.3.1.2.4 Bidang Pertanahan

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang pertanahan adalah sebagai berikut:

- a. belum optimalnya pengelolaan lahan bersertifikat, dimana persentase luas lahan bersertifikat milik pemerintah hanya sebesar 2,74%.

2.3.1.2.5 Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- a. belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan. Indeks kualitas lingkungan hidup Lhokseumawe sebesar 63,4 masih berada di bawah Propinsi dan Aceh.

2.3.1.2.6 Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

- a. masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melengkapi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil seperti persentase kepemilikan akte kematian, anak yang wajib memiliki KIA.

2.3.1.2.7 Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

- a. belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan dimana tingkat kemandirian desa di Kota Lhokseumawe sebesar 0.7678 berada di atas propinsi 0,6709 dan nasional 0,6935
- b. belum optimalnya pemanfaatan alokasi dana desa

2.3.1.2.8 Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

- a. belum meratanya persebaran dan mobilitas penduduk yang berdampak pada kesenjangan antar wilayah
- b. lemahnya wawasan dan pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi

2.3.1.2.9 Bidang Perhubungan

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Perhubungan adalah sebagai berikut:

- a. Masih minimnya sarana dan prasarana perhubungan darat dan belum optimalnya pemanfaatan angkutan umum untuk mobilitas masyarakat.

2.3.1.2.10 Bidang Komunikasi dan Informatika

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada setiap OPD

2.3.1.2.11 Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya kualitas dan tingkat keaktifan koperasi yaitu pada tahun 2023 sebanyak 108 koperasi yang aktif dari 209 koperasi yang ada sebesar 51,6 persen.

2.3.1.2.12 Bidang Penanaman Modal

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

- a. masih rendahnya jumlah investasi PMDN/PMA di Kota Lhokseumawe, pada tahun 2023 jumlah investasi hanya 249.5 milyar

2.3.1.2.13 Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan
- b. Belum optimalnya pembinaan olahraga, pada tahun 2023 cakupan pembinaan olahraga sebesar 77.77%

2.3.1.2.14 Bidang Statistik

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Statistik adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pemanfaatan data statistic dalam perencanaan pembangunan daerah

2.3.1.2.15 Bidang Persandian

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Persandian adalah sebagai berikut:

- a. Perlu adanya peningkatan system keamanan informasi dalam rangka keotentikan informasi
- b. Terbatasnya sumber daya di bidang persandian, baik dari segi SDM dan perangkat/peralatan persandian.

2.3.1.2.16 Bidang Kebudayaan

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Kebudayaan adalah sebagai berikut:

- c. Kurangnya sumber daya manusia bidang kebudayaan baik secara kuantitas maupun kualitas
- d. Belum adanya SK penetapan cagar budaya
- e. Belum optimalnya pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan sebagai sarana edukasi dan daya tarik wisata sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi.

2.3.1.2.17 Bidang Perpustakaan

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Perpustakaan adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya tingkat literasi masyarakat Kota Lhokseumawe yang ditandai dengan IPLM Kota Lhokseumawe tahun 2023 sebesar 68,25
- b. Masih sangat kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga fungsional pustakawan.

2.3.1.2.18 Bidang Kearsipan

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Kearsipan adalah sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya kesadaran akan pentingnya arsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik

2.3.1.3 Urusan Pilihan

2.3.1.3.1 Bidang Kelautan dan Perikanan

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya produksi perikanan budidaya, pada tahun 2023 produksi perikanan budidaya menurun menjadi 34,.3% dikarenakan cuaca ekstrim dan penyakit yang menyerang beberapa komoditi

2.3.1.3.2 Bidang Pariwisata

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Lhokseumawe
- b. Destinasi pariwisata belum berkembang disebabkan masih minimnya infrastruktur public dan promosi

2.3.1.3.3 Bidang Pertanian

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya produktivitas pertanian, hasil pertanian Kota Lhokseumawe masih dalam tingkat petik dan jual, belum diolah lebih lanjut untuk meningkatkan nilai tambah

2.3.1.3.4 Bidang Perdagangan

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Perdagangan adalah sebagai berikut:

- a. Kota Lhokseumawe masih bergantung pada pasokan barang-barang dari luar Kota Lhokseumawe, termasuk untuk kebutuhan pokok

2.3.1.3.5 Bidang Perindustrian

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Perindustriann adalah sebagai berikut:

- a. menurunnya kontribusi Industri terhadap PDRB Kota Lhokseumawe, dimana pada tahun 2022 kontribusi sektor industri terhadap PDRB sebesar 19.48% dan menurun menjadi sebesar 18.12% pada tahun 2023

2.3.1.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2.3.1.4.1 Bidang Perencanaan

Permasalahan bidang perencanaan adalah belum terintegrasinya data dengan system informasi perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi pembangunan. SIPD masih mencakup Perencanaan dan Penganggaran sedangkan integrasi dengan data serta hasil monitoring dan evaluasi belum terintegrasi.

2.3.1.4.2 Bidang Keuangan

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Berkurangnya dana otonomi khusus mulai tahun 2023 sebesar 50 persen atau 1 persen dari DAU nasional dan menjadi 0 pada tahun 2028

- b. Belum optimalnya penerimaan PAD dan potensi pendapatan lainnya.

2.3.1.4.3 Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pelaksanaan manajemen kepegawaian termasuk belum terselesaikannya masalah penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
- b. Masih rendahnya pendidikan dan pelatihan kompetensi bagi ASN.

2.3.1.4.4 Bidang Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pelaksanaan riset serta pemanfaatan hasil riset untuk mendukung pembangunan Kota Lhokseumawe
- b. Masih kecilnya anggaran untuk riset dan inovasi

2.3.1.4.5 Bidang Pengawasan

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Masih lemahnya implementasi reformasi birokrasi melalui penguatan pengawasan.

2.3.1.5 Urusan Keistimewaan Aceh

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Urusan Keistimewaan Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Masih tingginya pelanggaran syariat islam, pada tahun 2023 pelanggaran pasal 23 tentang khalwat tertinggi dengan 60 kasus, pasal 25 tentang ikhtilat sebanyak 2

kasus , pasal 15 tentang khamar 1 kasus dan pasal 16 tentang menyimpan dan menjual khamar 1 kasus.

- b. Masih rendahnya capaian standarisasi dayah dari 70 dayah di Kota Lhokseumawe 56 dayah bertipe dengan dayah tipe A+ sebanyak 1 dayah, dayah tipe A sebanyak 5 dayah, dayah tipe B sebanyak 10 dayah, dayah tipe C sebanyak 27 dayah dan Tipe D sebanyak 13 dayah.
- c. Belum optimalnya pemanfaatan ZISWAF, dikarenakan belum adanya database muzakki, mustahik, mualaf dan potensi harta agama lainnya.
- d. Belum optimalnya pelaksanaan adat istiadat meliputi kesenian, adat, hokum adat, lembaga adat dan kapasitas tokoh adat.

2.4 Isu Strategis Kota Lhokseumawe

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu permasalahan pembangunan Kota Lhokseumawe; dinamika internasional, nasional, provinsi, dan regional yang mempengaruhi pembangunan Kota Lhokseumawe; serta Isu-isu strategis yang juga termaktub pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi yaitu RPJPD.

Adapun Isu-Isu Strategis Internasional yang turut mempengaruhi isu strageis daerah meliputi:

1. globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas;
2. keterbukaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
3. pembangunan yang berorientasi pada SDGs;

4. sumber energi alternatif; dan
5. perubahan iklim global;
6. perang dagang dan ekonomi Amerika Serikat dan China;

Selanjutnya beberapa Isu Strategis Nasional yang dapat memberi pengaruh antara lain meliputi:

1. memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
2. meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
3. revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
4. memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
5. membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
6. memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
7. mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan

Disamping itu terdapat pula Isu Strategis Daerah Aceh antara lain meliputi:

1. peningkatan Kualitas Demokrasi
2. peningkatan Kualitas Kelembagaan, Tatalaksana dan Sumber Daya Aparatur
3. peningkatan Kualitas Penerapan Syariat Islam
4. peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
5. pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan
6. peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat
7. penurunan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem
8. peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
9. pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan;
10. optimalisasi Kemandirian Pangan
11. penciptaan Lapangan Kerja dan Penurunan Pengangguran

12. pengurangan Ketimpangan Antar Wilayah melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis
13. optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Pelestarian Hutan dan Penanganan Bencana
14. penguatan Perdamaian secara Berkelanjutan.

Berdasarkan uraian atas isu-isu strategis di tingkat nasional dan internasional dan permasalahan pembangunan di atas, maka ditetapkan isu-isu strategis yang mendukung pembangunan Kota Lhokseumawe tahun 2023-2026 sebagai berikut:

1. Reformasi Birokrasi

Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui Reformasi Birokrasi terus digaungkan mulai dari tingkat pusat sampai dengan pemerintah terkecil di tingkat gampong/desa. Kebijakan peningkatan kualitas birokrasi saat ini diarahkan pada dua agenda, yakni penyederhanaan birokrasi dan digitalisasi birokrasi. Kebijakan ini bertujuan untuk menjadikan birokrasi menjadi lebih adaptif, cepat melayani, dan cepat dalam mengambil keputusan. Penyederhanaan birokrasi telah dimulai dengan pemangkasan struktur organisasi pada pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya perlu diikuti dengan pemantapan digitalisasi sistem kerja untuk memangkas hierarki yang berbelit dan memakan waktu. Untuk itu perlu diperkuat dengan peningkatan kualitas kepemimpinan dan SDM aparatur.

Kota Lhokseumawe perlu terus meningkatkan kualitas reformasi birokrasinya karena sampai saat ini pencapaian reformasi birokrasi di Kota Lhokseumawe terbilang masih rendah. Indikator capaian tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe masih rendah dan stagnan di predikat CC tahun 2019-2022 dan tahun 2023 meningkat menjadi B serta indeks reformasi birokrasi Kota Lhokseumawe pada tahun 2020 memperoleh nilai 44.03 atau (C/agak kurang) dari target nilai 50,1 atau (CC/cukup baik).

Namun tahun 2023 meningkat menjadi CC. Namun, masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk perbaikan reformasi birokrasi di Indonesia.

2. Peningkatan Kualitas Demokrasi

Kota Lhokseumawe sebagaimana daerah lainnya di Indonesia, akan menghadapi Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara serentak pada tahun 2024. Oleh karena itu Pemerintah Kota Lhokseumawe perlu menyiapkan pendanaan yang mencukupi dan fasilitas yang memadai. Di samping itu Kota Lhokseumawe perlu mendorong pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak yang adil, transparan dan bebas *money politic* dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah memastikan keterwakilan perempuan dalam pesta demokrasi tersebut. Pada pilkada tahun 2019, proporsi kursi yang diduduki anggota dewan perempuan adalah 16% atau 4 kursi dari 25 kursi yang ada. Dan dengan adanya pergantian antar waktu pada tahun 2023 anggota dewan perempuan menjadi 7 kursi atau 28%.

3. Peningkatan Pelaksanaan Nilai-nilai Dinul Islam

Peningkatan pelaksanaan syariat Islam melalui pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam menjadi isu strategis dimana perilaku kehidupan sehari-hari individu, keluarga, lingkungan dan masyarakat harus mencerminkan nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, implementasi Qanun tentang pelaksanaan Dinul Islam harus dilaksanakan secara optimal.

Kota Lhokseumawe perlu terus meningkatkan pelaksanaan nilai-nilai dinul Islam khususnya dalam hal pengelolaan ZISWAF, peningkatan kualitas pendidikan dayah dan penegakan qanun syariat Islam di Kota Lhokseumawe. Penyaluran ZISWAF di Kota Lhokseumawe perlu dioptimalkan agar dana zakat yang terkumpul dapat tersampaikan untuk menyampaikan amanah muzakki dan juga sekaligus sebagai

salah satu upaya pengurangan kemiskinan di Kota Lhokseumawe. Kualitas pendidikan dayah di Kota Lhokseumawe juga perlu terus ditingkatkan tidak hanya sekedar menambah jumlah dayah namun disertai dengan peningkatan akreditasi dayah. Masalah pelanggaran syariat Islam juga harus diterus ditertibkan agar tujuan penegakan syariat Islam di Kota Lhokseumawe dapat tercapai.

4. Peningkatan Kualitas SDM

Kualitas SDM di Kota Lhokseumawe perlu terus ditingkatkan walaupun IPM Kota Lhokseumawe memang masih berada di atas IPM Nasional dan Provinsi. Misalnya pada tahun 2023, IPM Kota Lhokseumawe berada di angka 80.26 sementara IPM Provinsi dan IPM Nasional berada di angka 74.70 dan 74.39. Namun Kota Lhokseumawe masih kalah dari Kota Banda Aceh yang memperoleh nilai IPM sebesar 88.32 pada Tahun 2023.

Angka partisipasi Sekolah di tingkat SD maupun SMP harus tetap dijaga dan ditingkatkan untuk memastikan program wajib belajar yang merupakan program nasional. Selain itu, kualitas SDM juga sangat ditentukan oleh infrastruktur yang baik. Data ruang sekolah yang berkondisi baik perlu terus ditingkatkan agar pendidikan juga dapat berkualitas. Selain SDM di pendidikan dasar, SDM aparatur di Kota Lhokseumawe juga perlu diperhatikan karena hal ini diharapkan juga turut mempengaruhi peningkatan kualitas birokrasi di Kota Lhokseumawe.

5. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Kesehatan masyarakat juga merupakan tolok ukur kualitas sumber daya manusia di Kota Lhokseumawe sehingga menjadi isu strategis dalam pembangunan Kota Lhokseumawe. Fokus dilakukan pada perbaikan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan. Jumlah puskesmas di Kota Lhokseumawe belum mencukupi rasio 28.000 penduduk per

puskesmas, karena Kota Lhokseumawe hanya memiliki 7 puskesmas di tahun 2023. Sedangkan pada tahun 2023, penduduk Kota Lhokseumawe sudah berjumlah 196.067 jiwa.

Selain itu, penanganan pada ibu melahirkan dan bayi yang baru lahir juga perlu ditingkatkan dikarenakan angka kematian bayi idealnya adalah 0% atau pun ditekan serendah mungkin karena ini terkait dengan nyawa. Penanganan stunting yang lebih baik juga perlu terus ditingkatkan karena angka stunting di Kota Lhokseumawe tergolong cukup tinggi. Bahkan di tahun 2020, angka stunting di Kota Lhokseumawe mencapai 35%.

6. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada isu pemeliharaan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam dilakukan guna meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup. Pemeliharaan lingkungan dapat dilakukan dengan adanya dukungan serta partisipasi masyarakat. Pesatnya pembangunan, terutama yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam (pertambangan energi, mineral dan bebatuan) telah menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, seperti pada kegiatan tambang terbuka, baik yang dilakukan secara legal maupun illegal. Data kualitas lingkungan hidup di Kota Lhokseumawe menunjukkan bahwa Indeks kualitas Lingkungan Hidup pada Tahun 2020 sebesar 41.34 dengan predikat buruk dan Tahun 2021 meningkat menjadi 63.70 namun menurun kembali pada Tahun 2022 menjadi 62.54. Sedangkan Indeks Kualitas Udara Lhokseumawe sebesar 86.36 dengan predikat baik dan Tahun 2022 menjadi 91.20. Dan Indeks Kualitas Lahan Lhokseumawe sebesar 29.06 dengan predikat waspada dan semakin menurun menjadi 22.48 pada Tahun 2022. Dari data tersebut, memang fokus peningkatan kualitas lingkungan hidup Kota Lhokseumawe sangat relevan untuk dilakukan.

Disamping itu juga penanganan sampah di Kota Lhokseumawe perlu terus ditingkatkan. Di Kota Lhokseumawe

masih terdapat persentase sampah yang tidak tertangani di tahun 2022 sejumlah 18,87% dari total timbulan sampah yang ada. Untuk itu dibutuhkan penanganan yang lebih serius dengan manajemen limbah yang berkelanjutan (*sustainable waste management*).

7. Pertumbuhan Ekonomi

Beberapa poin yang menjadi isu strategis dalam lingkup Ekonomi, Industri dan Pariwisata di Kota Lhokseumawe meliputi:

➤ Kawasan Ekonomi Khusus.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017. Dengan adanya KEK ini diharapkan dapat menampung tenaga kerja untuk wilayah Kota Lhokseumawe.

➤ Pengembangan Industri.

Pengembangan industri di Kota Lhokseumawe difokuskan pada pengembangan industri jasa dan industri rumah tangga.

➤ Pengembangan Kawasan Pariwisata.

Terdapat beberapa objek wisata yang menarik untuk dikembangkan meliputi: Pantai Ujong Blang, Pulau Semadu, Pantai Meraksa, Bukit Goa Jepang, dan Waduk Jeulikat serta kawasan sekitaran waterboom di Kecamatan Blang Mangat.

➤ Pusat Pelayanan Skala Regional.

Berdasarkan letak geografis, Kota Lhokseumawe dapat dikembangkan sebagai pusat pelayanan perdagangan barang/ jasa, pendidikan, kesehatan dengan skala regional yang meliputi Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Timur.

➤ Peningkatan Investasi Sektor Riil dan Ekonomi Kreatif

Pelaksanaan pembangunan tidak bisa diharapkan pada andalan APBD saja, perlu adanya Investasi yang mampu menumbuhkan perekonomian dengan cepat. Investasi yang dapat dipromosikan dan dilakukan di Kota Lhokseumawe antara lain Investasi bidang Perikanan, Kelautan, Industri, Pariwisata, Perhotelan dan bidang-bidang lainnya.

Pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe harus digenjut dengan peningkatan skala ekonomi dan penumbuhan pusat-pusat ekonomi baru di berbasis kawasan dengan pendekatan terintegrasi hulu hilir. Ke depan, para pelaku ekonomi di Kota Lhokseumawe tidak boleh lagi menjual bahan mentah, akan tetapi harus diolah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Kota Lhokseumawe juga harus merubah orientasi pasar produknya dari pasar lokal ke ke pasar lintas daerah atau pasar internasional.

8. Pemenuhan Infrastruktur Dasar untuk peningkatan kualitas hidup

Peningkatan infrastruktur diharapkan dapat menurunkan kesenjangan antar kecamatan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan infrastruktur seperti perbaikan jalan, infrastruktur pemukiman, penyediaan akses air bersih dapat memberi manfaat nyata pada kualitas hidup masyarakat.

9. Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan

Dana Otonomi Khusus berkurang menjadi 1% dari DAU mulai Tahun 2023 dan akan menjadi nol pada Tahun 2027. Oleh karena itu perlu perjuangan untuk mendapatkan perpanjangan Dana Otonomi Khusus tersebut mengingat masih banyaknya pekerjaan rumah pembangunan Kota Lhokseumawe.

Di samping itu, efektivitas dari Dana Otsus juga perlu diperhatikan, berdasarkan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018

Tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. Pada pasal 10 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa Dana Otsus ditujukan untuk membiayai program pembangunan, terutama:

- (1) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur,
- (2) pemberdayaan ekonomi rakyat,
- (3) pengentasan kemiskinan,
- (4) pendanaan pendidikan,
- (5) sosial,
- (6) kesehatan,
- (7) keistimewaan Aceh dan
- (8) penguatan perdamaian.

Untuk mengatasi ketimpangan pendanaan menjelang berakhirnya Dana Otonomi Khusus Aceh, Pemerintah Kota Lhokseumawe perlu melakukan upaya untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk mendanai pembangunan di Kota Lhokseumawe, diantaranya dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan belanja pembangunan Non Pemerintah seperti CSR lewat Program Tanggung-jawab Sosial Perusahaan dan sumber-sumber pendanaan lainnya.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN KOTA

Ekonomi global melanjutkan pemulihan dari dampak pandemi Covid-19. Dicabutnya status *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) untuk Covid-19 oleh *World Health Organization* (WHO) telah mendorong perbaikan rantai pasok global dan biaya serta waktu pengiriman yang telah kembali ke level sebelum pandemi. Namun, faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan masih tetap ada. Inflasi yang masih tinggi terus membebani daya beli masyarakat, pengetatan kebijakan moneter oleh bank-bank sentral untuk merespon inflasi, berdampak pada melemahnya aktivitas ekonomi termasuk sektor industri, properti, dan perbankan.

Untuk meredam permintaan dan mengurangi inflasi inti, sebagian besar bank sentral di seluruh dunia telah menaikkan suku bunga sejak 2021. Umumnya, bank sentral mengkomunikasikan kebijakan moneter yang adaptif terhadap kondisi inflasi yang menandakan bahwa suku bunga masih mungkin untuk kembali naik. Walaupun prospek ekonomi masih tetap terbatas, perlambatan pertumbuhan global pada tahun 2023 kemungkinan tidak akan separah yang diantisipasi sebelumnya, terutama karena peningkatan pengeluaran rumah tangga di Amerika Serikat dan Uni Eropa dan pemulihan di Tiongkok.

Kinerja sektor-sektor jasa menjadi pendorong utama ekonomi global yang didukung oleh permintaan yang kuat disertai oleh penciptaan lapangan kerja dan optimisme bisnis yang membaik. Penyerapan tenaga kerja meningkat dengan laju tercepat sejak Juni 2022 karena perusahaan-perusahaan berupaya meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi peningkatan pekerjaan, peningkatan permintaan luar negeri, dan mengatasi peningkatan backlog pekerjaan. Di antara sektor jasa, pariwisata menjadi sektor yang menonjol pada awal Triwulan II-2023 terutama di Asia setelah penghapusan kebijakan *Zero Covid* di Tiongkok. Berbeda halnya dengan manufaktur yang termoderasi akibat lemahnya konsumsi

barang, meningkatnya ketidakpastian geo-ekonomi, produktivitas yang menurun dan tantangan finansial sebagai dampak kenaikan suku bunga acuan.

Pengeluaran konsumen tumbuh solid 2,3 persen (yoy) yang mencerminkan pertumbuhan pengeluaran untuk barang maupun jasa. Pengeluaran untuk barang menguat 1,5 persen (yoy) utamanya didorong oleh pengeluaran terhadap barang rekreasi dan barang untuk kendaraan seperti bensin dan komoditas energi lainnya. Pengeluaran untuk jasa menguat 2,6 persen (yoy) didorong oleh jasa permukiman dan utilitas, kesehatan, jasa keuangan dan asuransi, dan jasa transportasi.

Pertumbuhan investasi swasta domestik bruto menguat dibanding triwulan sebelumnya walaupun masih berkontraksi 3,1 persen (yoy). Investasi tetap melemah 0,8 persen (yoy) disebabkan oleh kontraksi yang dalam pada investasi residensial tetap sebesar 15,8 persen (yoy). Investasi non residensial dapat tumbuh menguat 4,6 persen (yoy) didukung oleh pertumbuhan pada infrastruktur, peralatan, dan produk kekayaan intelektual. Kinerja ekspor melemah tetapi masih dapat tumbuh positif 1,5 persen (yoy) dengan pertumbuhan ekspor barang tumbuh 0,6 persen (yoy) dan ekspor jasa sebesar 3,6 persen (yoy). Impor melemah 4,8 persen (yoy) melanjutkan kontraksi dari triwulan sebelumnya dengan impor barang yang turun 5,2 persen (yoy) dan impor barang melemah 2,8 persen (yoy).

Pengeluaran pemerintah dan investasi bruto tumbuh 3,8 persen (yoy) didukung oleh ekspansi pengeluaran pemerintah pusat maupun daerah. Pengeluaran pemerintah pusat naik 4,1 persen (yoy) dengan komponen pengeluaran yang menguat untuk pengeluaran pertahanan nasional dan pengeluaran bukan pertahanan. Pengeluaran pemerintah daerah terakselerasi 3,6 persen (yoy) yang melanjutkan peningkatan kompensasi pegawai pemerintah daerah. Secara umum ekonomi nasional tetap tumbuh di atas 5 persen selama tujuh triwulan berturut-turut, di tengah melambatnya ekonomi global dan menurunnya harga komoditas unggulan.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi

3.1.1. Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Pemulihan ekonomi nasional terus berlanjut, di tengah pertumbuhan ekonomi dunia yang menurun dan ketidakpastian pasar keuangan yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 tetap tinggi ditopang oleh permintaan domestik yang kuat. Stabilitas perekonomian juga tetap terjaga, baik stabilitas eksternal maupun internal.

Kinerja perekonomian domestik yang positif dicapai di tengah gejolak perekonomian dunia yang meningkat dan penuh tantangan. Berbagai perkembangan menunjukkan lima karakteristik mewarnai kinerja dan prospek ekonomi global tahun 2023. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang melemah dan disertai divergensi. Kedua, penurunan inflasi lambat. Ketiga, suku bunga tinggi dalam waktu lama. Keempat, arus modal keluar dari negara *Emerging Market and Developing Economies* (EMDEs). Kelima, nilai tukar dolar AS tetap kuat. Perkembangan global ini memberikan tekanan terhadap ekonomi negara berkembang sehingga diperlukan penguatan respons kebijakan untuk memitigasi dampak positif rambatan global tersebut terhadap ketahanan ekonomi domestik di negara-negara EMDEs, termasuk Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05 persen, lebih rendah dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan 5,31 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,96 persen. Ekonomi nasional mampu dipertahankan solid di atas 5,00 persen di tengah berbagai kondisi ketidakpastian, meskipun sedikit melambat dibandingkan tahun 2022. Faktor-faktor yang menjaga perekonomian domestik tahun 2023 diantaranya intensitas kegiatan partai politik menjelang pemilihan umum, terjaganya daya beli masyarakat karena tingkat inflasi yang terkendali, dan pertumbuhan ekspor positif. Selanjutnya, produk domestik bruto per kapita Indonesia tumbuh sebesar 2,82 persen, menjadi US\$.919,73 atau setara dengan Rp.74,96 juta di tahun 2023.

Dengan realisasi ini, *Gross National Income* per kapita Indonesia tahun 2023 diperkirakan sebesar US\$.750 mempertahankan predikat kategori *upper-middle income country* yang dicapai tahun 2022.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tahun 2023 tumbuh sebesar 4,82 persen, didukung oleh subkomponen konsumsi transportasi dan komunikasi serta restoran dan hotel karena faktor peningkatan aktivitas wisata dan tingginya mobilitas masyarakat. Selain itu, menjelang tahun pemilu 2024 konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga tahun 2023 tumbuh mencapai 9,83 persen. Tingginya aktivitas kampanye, distribusi logistik kebutuhan pemilu, dan sosialisasi pelaksanaan pemilu mempengaruhi tingginya realisasi ini. Kedua komponen tersebut menghasilkan realisasi pertumbuhan konsumsi masyarakat sebesar 4,93 persen di tahun 2023.

Pertumbuhan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto/ Investasi tumbuh sebesar 4,40 persen secara keseluruhan tahun 2023, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto terutama didorong oleh investasi pada pembangunan perumahan, serta infrastruktur jalan tol dan bendungan. Secara keseluruhan, pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto tersebut didukung terutama oleh komponen bangunan, diikuti kendaraan, serta mesin dan perlengkapan. Konsumsi pemerintah tumbuh positif di tahun 2023 sebesar 2,95 persen, setelah mengalami kontraksi pada tahun sebelumnya. Realisasi ini didukung oleh pendapatan dan belanja negara yang tumbuh positif di tahun 2023.

Ekspor barang dan jasa juga mencatatkan kontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 21,75 persen tahun 2023. Pertumbuhan ekspor barang dan jasa di tahun 2023 mengalami perlambatan, yaitu sebesar 1,32 persen utamanya disebabkan oleh penurunan harga komoditas. Namun demikian, neraca perdagangan barang masih mengalami surplus sebesar US\$.36,93 miliar di tahun 2023 yang didorong oleh peningkatan surplus barang nonmigas. Bahan bakar mineral serta lemak dan minyak hewani/nabati masih menjadi komoditi utama dengan nilai ekspor tertinggi. Berdasarkan

subkomponen, ekspor barang terkontraksi dipengaruhi oleh adanya penurunan harga 10 besar ekspor komoditas berdasarkan *Harmonized System Code* selain komoditas nikel. Sementara itu, kinerja impor di tahun 2023 mencatatkan kontraksi sebesar 1,65 persen. Dari sisi komponen impor, subkomponen impor barang nonmigas terkontraksi, sementara impor barang migas dan impor jasa tumbuh positif.

Dari sisi lapangan usaha, seluruh sektor mencatatkan realisasi pertumbuhan positif di tahun 2023. Beberapa sektor mampu tumbuh mencapai dua digit, diantaranya sektor transportasi dan pergudangan, jasa lainnya, dan penyediaan akomodasi dan makan minum, masing-masing sebesar 13,96; 10,52; dan 10,01 persen. Pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman sejalan dengan sektor transportasi, mengingat faktor tingginya mobilitas masyarakat, peningkatan kinerja sektor pariwisata, serta persiapan pemilihan umum sangat erat kaitannya dengan kedua sektor tersebut.

Terjaganya pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan PMTB, serta meningkatnya pertumbuhan sektor konstruksi tersebut merupakan implikasi dari upaya yang telah dijalankan Pemerintah dalam menstimulasi perekonomian nasional pada Triwulan IV-2023 lalu, seperti stimulus sektor perumahan melalui kebijakan PPN Perumahan Ditanggung Pemerintah dan pemberian subsidi biaya administrasi bagi perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah, penebalan bansos untuk mitigasi El Nino dan menjaga daya beli, serta akselerasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk penguatan UMKM.

Selama tahun 2023 perekonomian nasional dilihat secara spasial masih terus tumbuh. Kelompok provinsi menurut pulau yang mencatat pertumbuhan tertinggi adalah Maluku dan Papua, Sulawesi, serta Kalimantan dengan pertumbuhan (*c-to-c*) sebesar 6,94 persen; 6,37 persen; dan 5,43 persen. Sedangkan kelompok provinsi di Pulau Jawa yang berkontribusi sebesar 57,05 persen terhadap ekonomi nasional mencatat pertumbuhan 4,96 persen (*c-to-c*).

Secara spasial struktur perekonomian pulau Sumatera tahun 2023 didominasi oleh Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau dengan memberikan kontribusi masing-masing sebesar 23,25 persen

dan 22,71 persen terhadap PDRB. Sedangkan Provinsi Bengkulu memberikan kontribusi terkecil yaitu sebesar 2,14 persen. Sementara itu, Provinsi Aceh memberikan kontribusi sebesar 5,02 persen terhadap PDRB Sumatera pada tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi Sumatera pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 (yoy) tumbuh sebesar 4,69 persen. Berdasarkan wilayah regional Sumatera, semua wilayah mengalami pertumbuhan positif. Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi dengan pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 5,20 persen. Sementara, sumber pertumbuhan tertinggi pada Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,24 persen dan diikuti oleh Provinsi Riau sebesar 0,19 persen.

Seluruh wilayah di Indonesia juga terus mengalami penguatan dengan dominasi kontribusi terbesar kepada PDB Nasional berasal dari Pulau Jawa yakni mencapai 57,05 persen. Pertumbuhan ekonomi yang signifikan juga dicapai oleh Provinsi Maluku Utara 20,49 persen dan Sulawesi Tengah 11,91 persen, yang ditopang oleh kinerja industri pengolahan logam dasar sebagai implikasi dari kebijakan hilirisasi.

Dengan berbagai capaian kondisi perekonomian nasional tersebut, Indonesia mampu menjadi salah satu negara yang tumbuh kuat dan berada di level yang tinggi dibandingkan dengan sejumlah negara lain. Pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2023 mampu melampaui beberapa negara seperti Malaysia (3,77 persen) dan Korea Selatan (1,36 persen), serta lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi negara G-20 seperti AS (2,5 persen), Perancis (0,9 persen) maupun Jerman yang mengalami kontraksi (-0,3 persen).

Prospek perekonomian nasional juga dinilai masih akan memiliki capaian optimal dengan ditunjukkan oleh angka PMI Manufacturing Indonesia yang terus berada di level ekspansif pada Januari 2024 sebesar 52,9. Hal tersebut memberikan optimisme bahwa geliat ekonomi nasional semakin membaik, dan menjadi modal bagi pencapaian target ekonomi mendatang seiring dengan proyeksi perbaikan ekonomi global.

Dengan proyeksi yang ada, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu berbagai lembaga memprediksi pertumbuhan Indonesia sampai tahun

2025 seperti IMF masih memprediksi di angka 5 persen, kemudian World Bank antara 4,9 persen - 5 persen, dan OECD di angka 5,2 persen, jauh di atas rata-rata proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia dan di atas pertumbuhan ekonomi emerging market seperti Tiongkok. Oleh karena itu, kebijakan berkelanjutan yang diambil menjadi kunci pertumbuhan perekonomian ke depan walaupun kita menyadari ada risiko-risiko ke depan.

Guna memastikan stabilitas dan ketahanan ekonomi ke depan, sejumlah kebijakan prioritas telah disiapkan Pemerintah, seperti revitalisasi mesin konvensional melalui peningkatan produktivitas dan daya saing dengan Program Kartu Prakerja, pelatihan vokasi, dan implementasi UU Cipta Kerja, pembangunan infrastruktur dengan melanjutkan Proyek Strategis Nasional (PSN), pembangunan MRT dan kereta cepat, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Ibu Kota Nusantara (IKN), serta Reforma Agraria, perluasan kerja sama internasional, dan penguatan ketahanan pangan.

Selain itu, Pemerintah juga akan mendorong mesin perekonomian baru melalui digitalisasi, transisi energi berkelanjutan, industrialisasi dengan hilirisasi yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi. Selanjutnya, penguatan ketahanan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat juga akan dilakukan Pemerintah melalui berbagai perlindungan sosial termasuk menjaga daya beli masyarakat rentan, pembiayaan mikro, dan padat karya tunai.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada Quartal pertama tahun 2024 diprediksi tetap optimis. Berdasarkan analisis Lembaga Riset Danareksa Sekuritas, ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 5,16 persen (yoy) pada Q1 2024, meningkat dari pertumbuhan 5,04 persen (yoy) pada Q4 tahun 2023 dengan didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah. Konsumsi Rumah Tangga diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,02 persen (yoy) pada Q1 2024, lebih tinggi dari pertumbuhan 4,47 persen (yoy) pada Q4 2023 karena didorong oleh meningkatnya daya beli masyarakat akibat kenaikan upah minimum dan bantuan sosial dari pemerintah.

Belanja pemerintah juga diperkirakan akan meningkat pada Q1 2024, seiring dengan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu). Hal ini berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Investasi diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,10 persen (yoy) pada Q1 2024, lebih rendah dari pertumbuhan 5,02 persen (yoy) pada Q4 2023 yang disebabkan oleh faktor ketidakpastian menjelang pemilu.

Ekspor diperkirakan akan tumbuh terbatas sebesar 1,70 persen (yoy) pada Q1 2024, lebih tinggi dari pertumbuhan 1,64 persen (yoy) pada Q4 2023 yang disebabkan oleh permintaan yang diperkirakan masih positif dari Tiongkok dan negara-negara berkembang lainnya. Impor diperkirakan akan semakin berkontraksi sebesar minus 0,92 persen (yoy) pada Q1 2024, dibandingkan pertumbuhan minus 0,15 persen (yoy) pada Q4 2023 yang disebabkan pelemahan rupiah terhadap dolar AS.

Tahun 2024 akan diwarnai oleh tantangan global yang signifikan. Proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) menyebutkan pertumbuhan ekonomi global akan melambat menjadi 2,9 persen, dipicu oleh perang di Ukraina, inflasi tinggi, dan kenaikan suku bunga. IMF memperkirakan inflasi global akan mencapai 6,5 persen pada tahun 2023, turun dari 8,8 persen pada tahun 2022. Namun, inflasi masih diperkirakan akan tetap tinggi pada tahun 2024, sebesar 4,1 persen. Selain itu, IMF memperkirakan suku bunga kebijakan global akan mencapai 5,2 persen pada tahun 2024, naik dari 3,5 persen pada tahun 2022. Di sisi lain, menurut laporan Prospek Ekonomi Global (GEP) yang diterbitkan oleh Bank Dunia pada Januari 2024, ekonomi global diperkirakan akan mengalami perlambatan pertumbuhan dari 2,6 persen pada tahun 2023 menjadi 2,4 persen pada tahun 2024 yang merupakan perlambatan ketiga kalinya secara berturut-turut.

Selain tantangan global, Indonesia menghadapi tantangan domestik khusus pada tahun 2024, di antaranya: 1) Pemilu presiden dan legislatif yang akan digelar pada tahun 2024 dapat menimbulkan ketidakpastian politik dan ekonomi yang selanjutnya dapat memengaruhi keputusan investasi dan belanja konsumen; 2) Kenaikan harga pangan dan energi global dapat menyebabkan inflasi

di Indonesia meningkat dan menurunkan daya beli masyarakat serta memperlambat pertumbuhan ekonomi; 3) Defisit anggaran pemerintah diperkirakan akan meningkat pada tahun 2024 yang disebabkan meningkatnya belanja pemerintah untuk persiapan pemilu dan pembangunan infrastruktur sehingga dapat meningkatkan beban utang negara; 4) Rupiah diperkirakan berpotensi melemah terhadap dolar AS pada tahun 2024 sehingga dapat menyebabkan harga barang-barang impor menjadi lebih mahal dan meningkatkan biaya produksi bagi perusahaan.

Untuk menghadapi tantangan ekonomi tersebut, pemerintah telah dan akan terus mengambil langkah-langkah kebijakan seperti: 1) Menjaga stabilitas ekonomi dengan menjaga inflasi tetap rendah dan menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil; 2) Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan investasi dan mendorong ekspor; 3) Melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak perlambatan ekonomi global dengan memberikan bantuan sosial dan subsidi; dan 4) Melakukan reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia, yang meliputi penyederhanaan regulasi, peningkatan kualitas infrastruktur, dan peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja.

Pemerintah mengusung tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yaitu *Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*. RKP Tahun 2025 merupakan awal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pada tahun 2025 pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,3-5,6 persen. Selain itu pemerintah juga menargetkan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6-7 persen serta menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,5-5 persen.

Sebagaimana tema yang telah ditetapkan dalam RKP, pembangunan tahun 2025 akan difokuskan pada:

- (1) Sumber Daya Manusia Berkualitas melalui (a) penetapan Wajib Belajar 13 Tahun; (b) restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan; (c) penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan Stunting; (d)

penetapan Penggunaan Registrasi Sosial Ekonomi dan Pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif; (e) peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan *Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics* berkualitas; (f) pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual-system; serta (g) penetapan Kebijakan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa (pendidikan budi pekerti).

(2) Infrastruktur Berkualitas melalui (a) penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi, (b) penguatan infrastruktur digital, (c) pengembangan infrastruktur transisi energi, (d) Percepatan infrastruktur Ibu Kota Nusantara, serta (e) penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.

(3) Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan melalui (a) penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional; (b) pengembangan skema graduasi bantuan sosial; (c) peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya; (d) peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat; (e) peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja; (f) percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan; (g) peningkatan produksi industri pengolahan; (h) dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif; serta (i) penyediaan Infrastruktur untuk mendukung Transisi Energi.

Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 diarahkan untuk dapat mendorong pencapaian sasaran pembangunan lain yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Indeks Modal Manusia, dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan tercapainya sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025, diharapkan dapat mendorong tersedianya lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan, penurunan ketimpangan, dan pembangunan ramah lingkungan.

Dengan geopolitik tahun 2025 yang makin stabil dan fundamental makro yang kuat, pemerintah optimis menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,6 persen. Pencapaian ini tentu dapat dijalankan dengan beberapa strategi besar kebijakan pemerintah yang telah disiapkan guna memastikan ketahanan ekonomi nasional ke depan. Selain merevitalisasi mesin konvensional seperti produktivitas, daya saing, hingga infrastruktur, pemerintah juga ingin membangun mesin pertumbuhan ekonomi baru mulai dari industrialisasi, digitalisasi, hingga transisi energi berkelanjutan. Kemudian juga disiapkan strategi penguatan ketahanan sosial dan pemberdayaan melalui berbagai perlindungan sosial termasuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan, pembiayaan mikro, dan padat karya tunai.

3.1.2. Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi Aceh

Perekonomian Aceh tahun 2023 tumbuh sebesar 4,23 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,15 persen. Berdasarkan publikasi BPS Aceh dalam Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Aceh Tahun 2023, kenaikan terjadi pada semua kategori lapangan usaha, kecuali 7 (tujuh) kategori yang mengalami penurunan. Kategori yang mengalami peningkatan yaitu Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh sebesar 10,23 persen; diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman sebesar 9,16 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 8,85 persen; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 8,54 persen. Sedangkan kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,27 persen; Jasa Keuangan sebesar 5,14 persen; dan Real Estate sebesar 4,72 persen. Sementara 3 (tiga) lainnya tumbuh dibawah kategori Konstruksi sebesar 2,65 persen.

Berdasarkan PDRB Pengeluaran, hampir semua komponen mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Ekspor Barang Jasa yaitu sebesar 25,21 persen, komponen berikutnya yang mengalami pertumbuhan paling tinggi adalah komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT yaitu sekitar 21,88 persen.

Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga menjadi komponen tertinggi ketiga, yaitu mencapai 5,88 persen, diikuti oleh komponen PMTB yaitu sebesar 4,88 persen. Sementara itu, komponen Impor Barang Jasa sebagai komponen pengurang PDRB total mengalami pertumbuhan sebesar 11,84 persen.

Seiring dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional, arah kebijakan pembangunan ekonomi Aceh pada tahun 2025 secara mendasar mengusung tema “*Mengurangi Ketimpangan Wilayah Melalui Pembangunan Infrastruktur Strategis dan Peningkatan Ekonomi yang Berkelanjutan*”.

Berdasarkan kondisi eksisting perekonomian Aceh, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2025 arah kebijakan yang dapat diupayakan, yaitu:

1. Menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem Aceh serta peningkatan serapan tenaga kerja melalui sinergitas program kegiatan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian/Lembaga, Badan Usaha serta pemangku kepentingan lainnya;
2. Mendorong pengembangan dan implementasi *green economy* dalam pembangunan berkelanjutan di Aceh melalui pengembangan ekonomi berbasis komoditas hijau yang mencakup penerapan *good agriculture practies*, sertifikasi komoditas pertanian, perkebunan serta perikanan, pengembangan industri hilir dan usaha turunan, perbaikan rantai pasok dan rantai hilir, dukungan kemitraan dan permodalan, serta mendorong intervensi yang bersifat spesifik terhadap komoditas unggulan Aceh seperti kopi, kelapa sawit, nilai, pala dan karet;
3. Mengakselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan terutama dalam bidang keuangan syariah, industri halal, keuangan sosial syariah dan ekonomi pesantren;
4. Optimalisasi belanja pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) terutama belanja modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi;

5. Mendorong percepatan pemulihan ekonomi melalui penguatan lapangan usaha industri pengolahan dan optimalisasi potensi sektor hulu yang memiliki daya ungkit, menyerap tenaga kerja serta memberikan *multiplayer effect* yang besar;
6. Perlunya mendorong penyaluran KUR dan UMI yang ada di Aceh untuk meningkatkan pembiayaan Kredit Program. Penyaluran dapat diprioritaskan sesuai dengan program Pemerintah Aceh melalui peningkatan pembiayaan di sektor pertanian dan perikanan;
7. Mendorong model bisnis *sharing factory* dalam rangka mendorong UMKM dan Industri. Kawasan industri yang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah seperti KIA Ladong berpotensi untuk diarahkan menjadi *sharing factory* yang mana bisa menjadi rumah produksi bersama bagi UMKM di Aceh untuk menciptakan nilai tambah dan produk yang bersaing;
8. Perlunya kolaborasi peran pemerintah dan stakeholder dalam percepatan pertumbuhan ekonomi.

Merujuk pada arah kebijakan perekonomian tahun 2025, hasil evaluasi capaian indikator makro Aceh tahun 2022, target indikator makro Aceh dalam RPA serta berdasarkan kesepakatan pembahasan target indikator makro pembangunan tahun 2025 melalui Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan antara Kementerian/ Lembaga dengan Pemerintah Aceh tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari s.d. 07 Maret 2024, maka target ekonomi makro Aceh tahun 2025 yaitu Pertumbuhan Ekonomi 4,28-4,51 persen; Tingkat Kemiskinan 12,00-13,00 persen; Tingkat Pengangguran Terbuka 5,24 persen; dan Rasio Gini 0,290-0,293.

3.1.3. Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi Kota Lhokseumawe

Perekonomian Kota Lhokseumawe hingga akhir tahun 2023 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Lhokseumawe mencapai 4,21 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 4,01 persen. Meskipun dihadapkan pada ketidakpastian dan

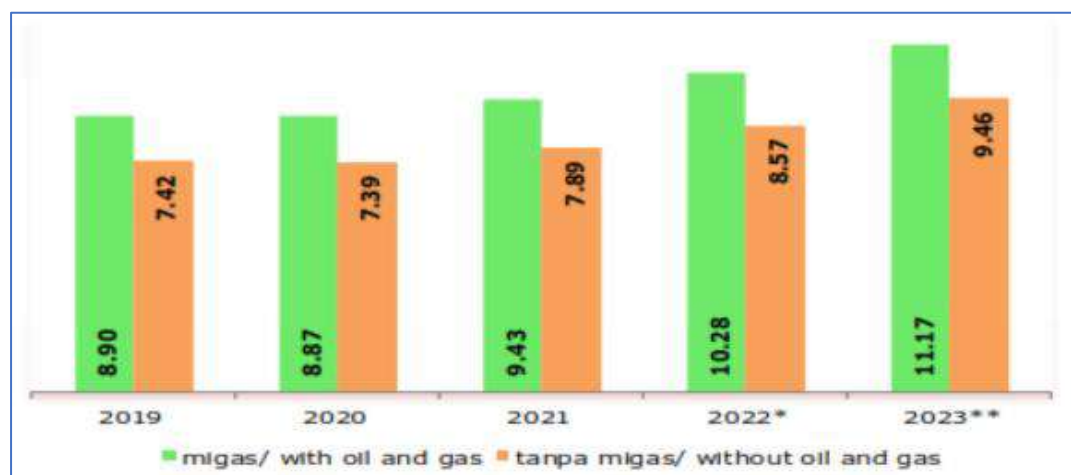
tren perlambatan ekonomi global serta tekanan inflasi yang masih terus berlanjut, pengendalian inflasi nasional menjadi agenda yang krusial.

Berdasarkan Lapangan Usaha struktur perekonomian Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 didominasi oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 22,93 persen, kemudian lapangan usaha Industri Pengolahan memberikan kontribusi sebesar 18,12 persen, lapangan usaha Konstruksi memberikan kontribusi sebesar 13,31 persen.

Dari sisi aktivitas perekonomian Kota Lhokseumawe yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Dari tahun 2019, PDRB meningkat sebesar 2,27 triliun rupiah dari 8,90 triliun menjadi 11,17 triliun rupiah pada tahun 2023.

Sejalan dengan PDRB memperhitungkan migas, PDRB ADHB tanpa memperhitungkan migas juga mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,49 triliun rupiah per tahun. PDRB ADHB tahun 2023 mencapai 9,46 triliun rupiah. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 0,89 triliun rupiah dari tahun 2022. Dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 PDRB ADHB mengalami peningkatan sebesar 2,04 triliun rupiah.

Gambar 3.1
PDRB ADHB Lhokseumawe Tahun 2019-2023
(triliun rupiah)



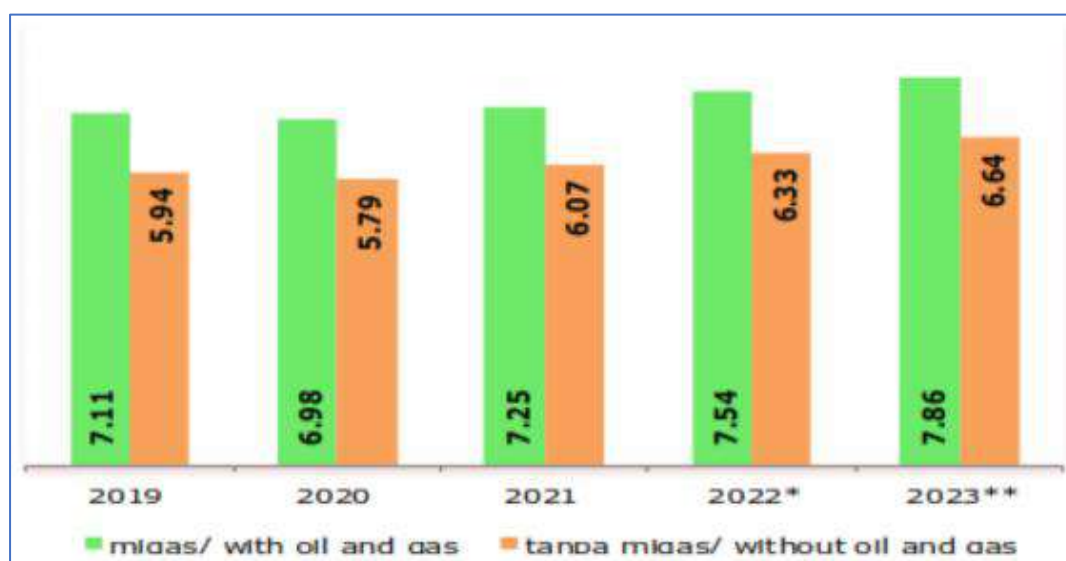
Sumber : PDRB Lhokseumawe (LU), BPS, Tahun 2024

Dalam perubahan nilai PDRB atas dasar harga berlaku masih terdapat pengaruh perubahan harga, sehingga untuk melihat perkembangan riil PDRB maka digunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dengan tahun dasar 2010.

Nilai PDRB ADHK Lhokseumawe tahun 2023 mencapai 7,86 triliun rupiah, mengalami peningkatan sebesar 0,75 triliun rupiah dari tahun 2019. PDRB ADHK tanpa migas pada tahun 2023 juga menunjukkan peningkatan sebesar 0,70 triliun rupiah dari sebesar 5,94 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 6,64 triliun rupiah pada tahun 2023.

Selama lima tahun terakhir (2019-2023) terlihat bahwa perubahan PDRB ADHB cenderung lebih besar daripada perubahan kenaikan PDRB ADHK. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan karena faktor harga lebih dominan daripada kenaikan karena faktor produktivitas.

Gambar 3.2
PDRB ADHK Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023
(triliun rupiah)



Sumber : PDRB Lhokseumawe (LU), BPS, Tahun 2024

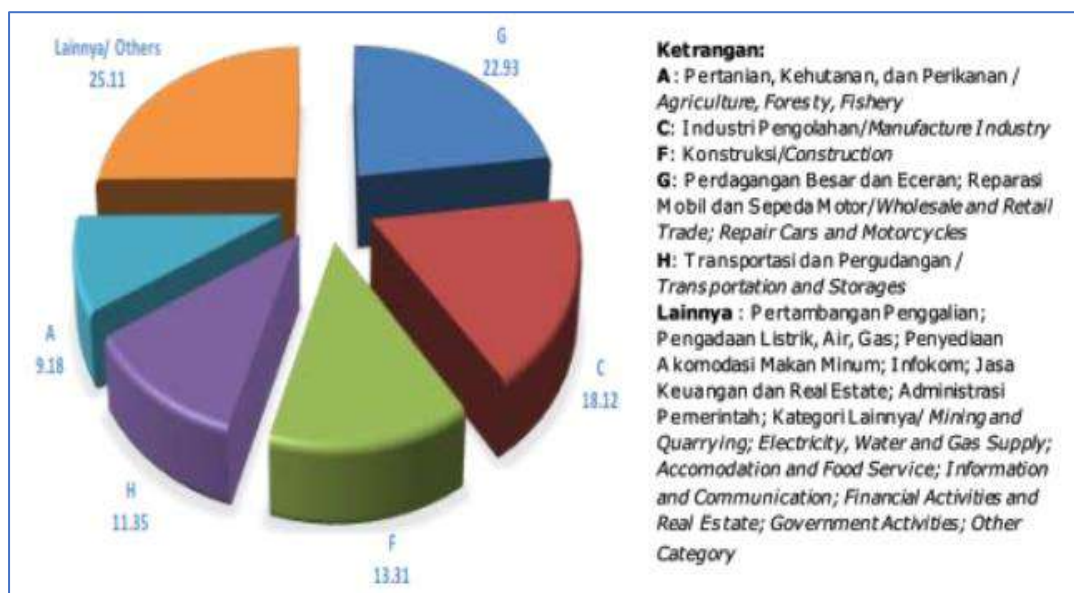
Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan

berproduksi dari setiap lapangan usaha. Sejak tahun 2019, struktur ekonomi Kota Lhokseumawe didominasi oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran. Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Peranan kategori ini pada tahun 2019 sebesar 21,91 persen menjadi 22,93 persen pada Tahun 2023, mengalami peningkatan nilai peranan sebesar 1,02 persen.

Kategori dengan peranan kedua terbesar hingga akhir tahun 2023 adalah industri pengolahan sebesar 18,12 persen. Kategori konstruksi menempati urutan ketiga pada Tahun 2023 dengan peranan sebesar 13,31 persen.

Kategori berikutnya yang cukup besar memberi kontribusi di tahun 2023 adalah kategori transportasi dan pergudangan serta kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dengan kontribusi kategori transportasi dan pergudangan sebesar 11,35 persen dan kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan berada pada angka 9,18 persen.

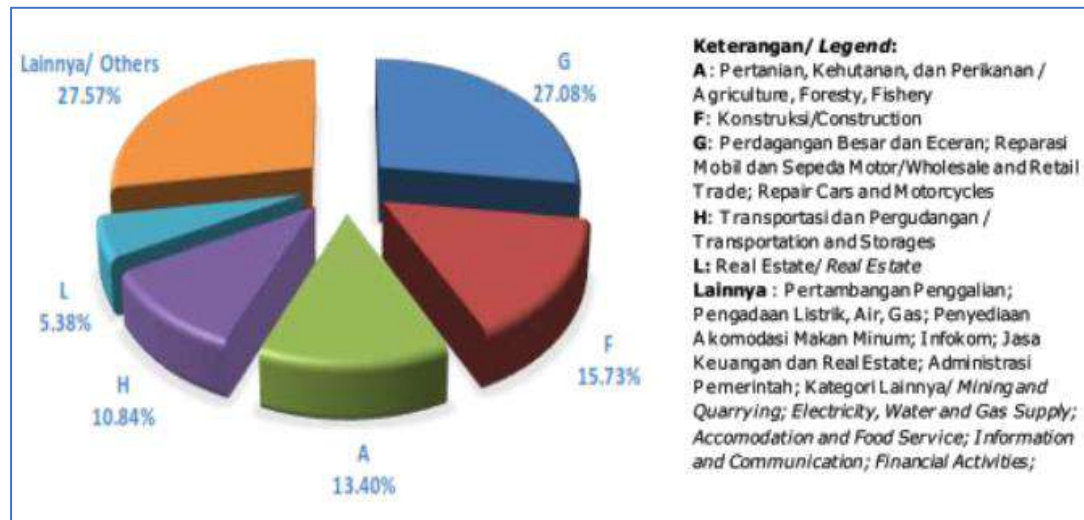
Gambar 3.3
Distribusi Persentase PDRB ADHB Lhokseumawe
dengan Migas Tahun 2023 (persen)



Sumber : PDRB Lhokseumawe (LU), BPS, Tahun 2024

Jika dipisahkan industri migas dari PDRB maka semakin terlihat bahwa kategori yang dominan di Lhokseumawe yaitu kategori perdagangan, disusul kategori konstruksi, dan pertanian.

Gambar 3.4
Distribusi Persentase PDRB ADHB Lhokseumawe
Tanpa Migas Tahun 2023 (persen)



Sumber : PDRB Lhokseumawe (LU), BPS, Tahun 2024

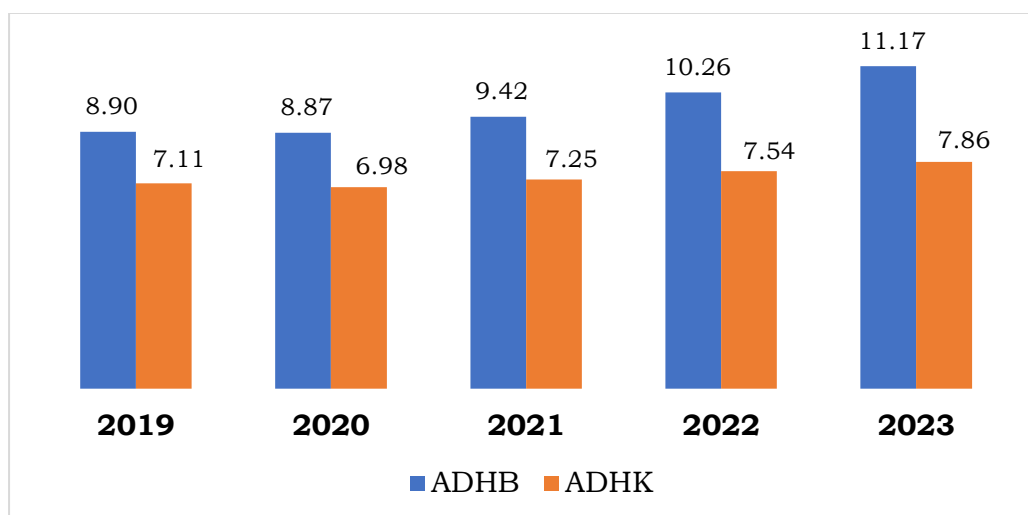
Pada tahun 2023 dapat dilihat bahwa kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memberi kontribusi mencapai 27,08 persen, lalu kategori konstruksi mencapai 15,73 persen, kategori pertanian mencapai 13,40 persen. Kategori transportasi dan pergudangan bahkan muncul dengan kontribusi sebesar 10,84 persen dan kategori real estate mencapai 5,38 persen.

Berdasarkan hasil penelitian Bank Indonesia Kpw Lhokseumawe, terdapat beberapa Komoditi/Produk/Jasa Unggulan (KPJU) yang berpotensi didorong untuk berkembang di Kota Lhokseumawe seperti toko sembako, jasa fotokopi, warung makan hingga wisata pantai dan kafe. Namun demikian masih terdapat tantangan dan isu yang perlu diatasi agar pengembangan KPJU tersebut dapat semakin terakselerasi. Disamping itu juga Kota Lhokseumawe memiliki potensi kuat dalam pengembangan sektor unggulan utama. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan pemerintah yaitu penguatan investasi dan modal kerja untuk hilirisasi komoditas; penciptaan iklim investasi yang mencakup berbagai dukungan kebijakan; penguatan klaster agroindustri yang didukung dengan pengembangan jaringan infrastruktur; penyediaan dan peningkatan sarana prasarana produksi, penanganan pasca panen, pengolahan maupun sistem logistik; fasilitasi pendampingan usaha; mendorong

digitalisasi bagi UMKM; penguatan kelembagaan dan pemberdayaan petani; pelaksanaan dan peningkatan layanan sertifikasi produk hasil usaha; dan percepatan diseminasi teknologi dan peningkatan kapasitas UMKM dalam adopsi teknologi.

Dari sisi pengeluaran perkembangan nilai PDRB ADHB dengan migas selama tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, nilai PDRB sebesar 11,7 triliun rupiah mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 dengan nilai PDRB sebesar 10,26 triliun rupiah. PDRB ADHB dari tahun 2019-2023 meningkat sebesar 2,27 triliun rupiah dengan rata-rata peningkatan setiap tahunnya sebesar 0,49 triliun rupiah.

Gambar 3.5
PDRB Lhokseumawe Menurut Pengeluaran Dengan Migas
Tahun 2019-2023 (triliun rupiah)



Sumber: PDRB Lhokseumawe (Pengeluaran), BPS, Tahun 2024

Perkembangan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010) dengan migas juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun selama periode 2019-2023. Pada tahun 2023, nilai PDRB sebesar 7,86 triliun rupiah, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 dengan nilai PDRB sebesar 7,54 triliun rupiah, dan rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar 0,37 triliun rupiah. Nilai PDRB ADHK terendah terjadi pada tahun 2020 dengan nilai PDRB sebesar 6,96 triliun rupiah. Penurunan PDRB pada tahun 2020 merupakan salah satu dampak dari kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi hampir di seluruh negara.

Jika ditinjau dari sisi pengeluaran, struktur ekonomi Kota Lhokseumawe tahun 2019 dan 2023 didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 53,54 persen dan 48,83 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu lima tahun terakhir masih terfokus pada pemenuhan kebutuhan pokok. Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan komponen dengan distribusi terbesar kedua yaitu sebesar 47,32 persen pada tahun 2019 dan 42,86 persen pada tahun 2023. Nilai PMTB menunjukkan penambahan barang modal di suatu wilayah dalam rangka peningkatan produktivitas.

Gambar 3.6
Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Pengeluaran
Tahun 2019 dan Tahun 2023



Sumber: PDRB Lhokseumawe (Pengeluaran), BPS, Tahun 2024

Konsumsi rumah tangga merupakan komponen penyumbang terbesar terhadap PDRB Lhokseumawe. Nilai PDRB ADHB komponen konsumsi rumah tangga tahun 2023 sebesar 5,48 triliun rupiah mengalami peningkatan dari tahun 2022 dengan nilai PDRB ADHB sebesar 5,14 triliun rupiah.

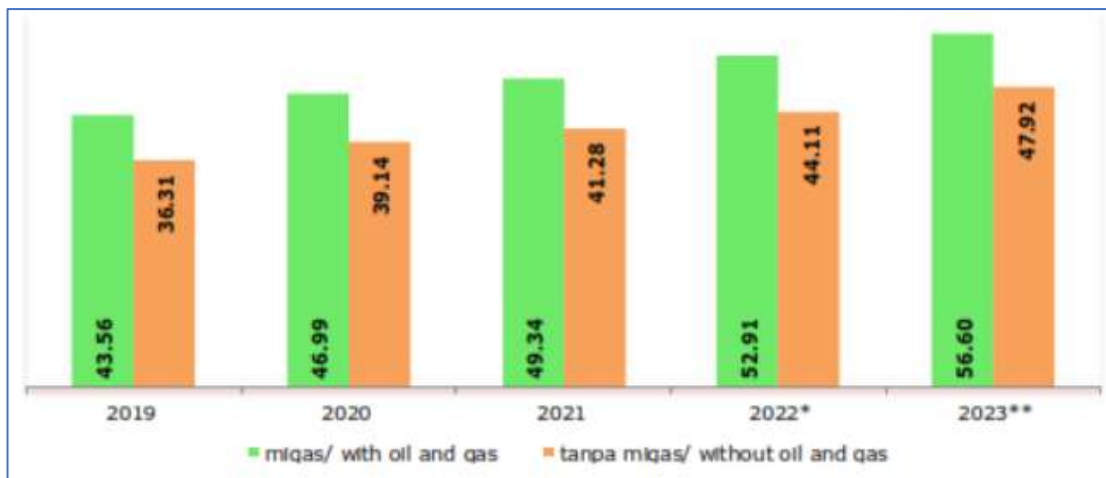
Selanjutnya nilai komponen PMTB ADHB tahun 2023 sebesar 4,79 triliun rupiah, mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 dengan nilainya sebesar 4,51 triliun rupiah. Secara umum dalam kurun waktu lima tahun terakhir, PMTB merupakan komponen dengan kontribusi terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga.

3.1.3.1. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di suatu daerah.

Selama lima tahun terakhir (2019-2023) PDRB per kapita Lhokseumawe ADHB terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 PDRB per kapita Lhokseumawe sebesar 56,60 juta rupiah setahun, meningkat sebesar 3,69 juga rupiah dari tahun 2022. Sedangkan PDRB per kapita Lhokseumawe tanpa migas tahun 2023 adalah sebesar 47,92 juta rupiah setahun, meningkat sebesar 3,82 juta rupiah dari tahun 2022.

Gambar 3.7
PDRB Per Kapita Lhokseumawe ADHB Tahun 2019-2023
(juta rupiah)



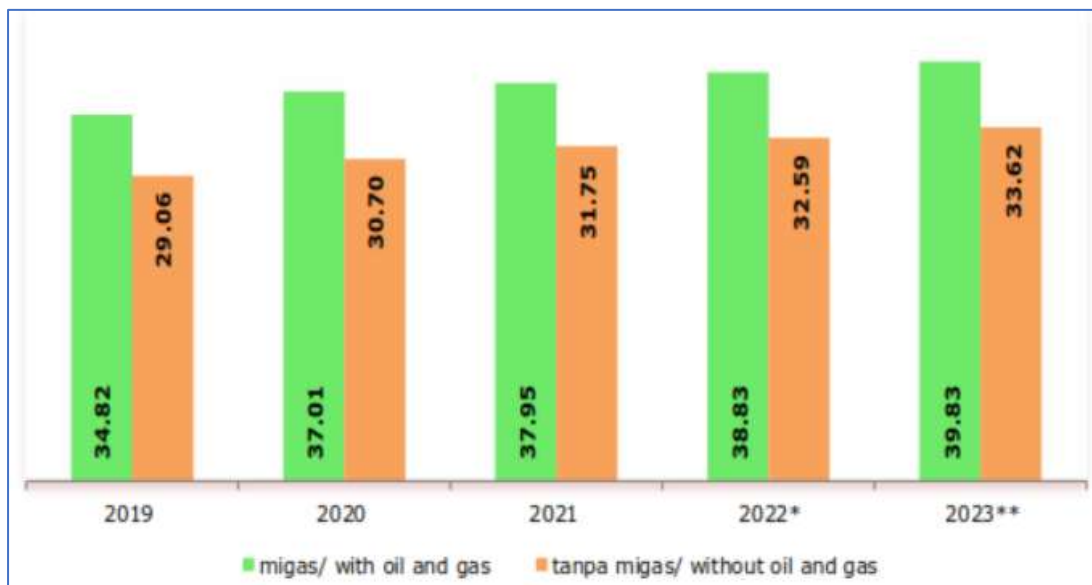
Sumber: PDRB Lhokseumawe (LU), BPS, Tahun 2024

Di sisi PDRB Atas Dasar Harga Konstan, PDRB per kapita Lhokseumawe juga terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 PDRB per kapita Lhokseumawe ADHK dengan migas adalah sebesar 39,83 juta rupiah setahun, meningkat sebesar 1,00 juta rupiah dari tahun 2022. Sedangkan PDRB per kapita Lhokseumawe ADHK tanpa

migas pada tahun 2023 adalah sebesar 33,62 juta rupiah setahun, meningkat sebesar 1,03 juta rupiah dari tahun 2022.

Secara rata-rata, PDRB per kapita Lhokseumawe ADHB dengan migas adalah 3,00 juta rupiah setahun, sedangkan PDRB per kapita Lhokseumawe ADHB tanpa migas sebesar 2,70 juta rupiah setahun. Untuk rata-rata PDRB per kapita Lhokseumawe ADHK dengan migas adalah sebesar 1,24 juta rupiah setahun, sedangkan PDRB per kapita Lhokseumawe ADHK tanpa migas sebesar 1,13 juta rupiah setahun.

Gambar 3.8
PDRB Per Kapita Lhokseumawe ADHK Tahun 2019-2023
(juta rupiah)

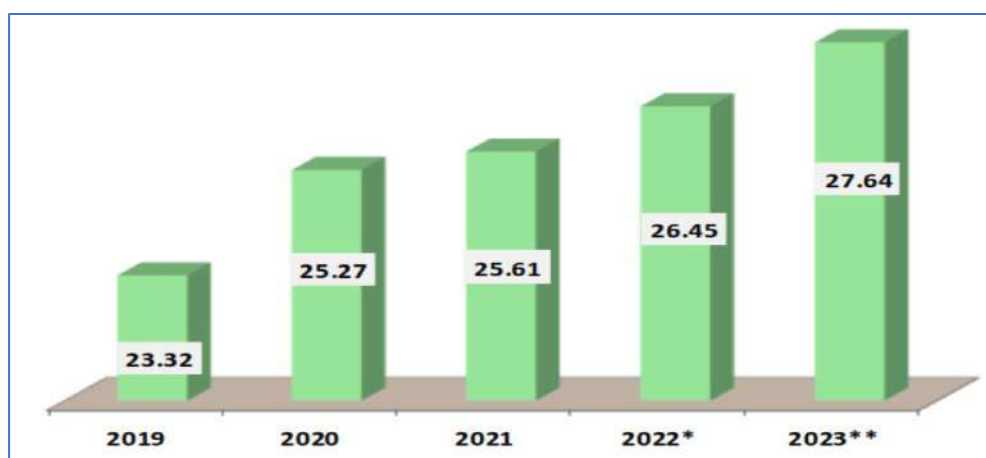


Sumber: PDRB Lhokseumawe (LU), BPS, Tahun 2024

Di sisi pengeluaran, nilai konsumsi rumah tangga per kapita maupun per-rumah tangga di Lhokseumawe selama kurun waktu 2019-2023 mengalami fluktuatif. Hal ini menunjukkan adanya perubahan daya beli penduduk yang juga indikasi adanya perubahan rata-rata pendapatan. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan pertumbuhan dibandingkan tahun 2022.

Nilai konsumsi rumah tangga per kapita meningkat sebesar 4,32 juta rupiah selama kurun waktu 5 tahun, dari 23,32 juta rupiah di tahun 2019 menjadi 27,64 juta rupiah di tahun 2023. Konsumsi rumah tangga per-rumah tangga pun meningkat sebesar 1,44 juta rupiah dalam 5 tahun.

Gambar 3.9
Nilai Komponen Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita ADHB
Tahun 2019-2023 (juta rupiah)



Sumber: PDRB Lhokseumawe (Pengeluaran), BPS, Tahun 2024

3.1.3.2. Pertumbuhan Ekonomi

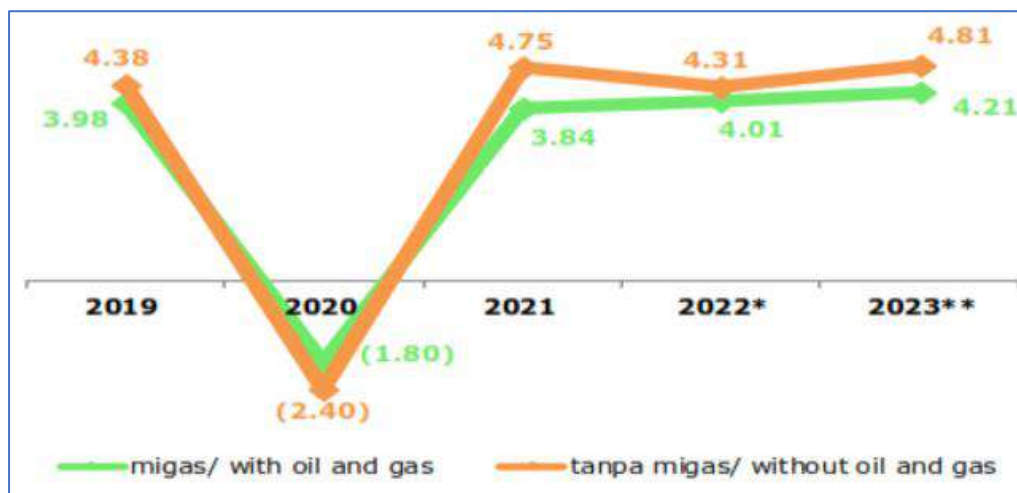
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi selama kurun waktu setahun.

Selama tahun 2019-2023, pertumbuhan ekonomi Lhokseumawe mengalami penurunan terdalam tahun 2020 disebabkan pandemi Covid-19. Dimana pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi sebesar 3,98 persen namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 1,80 persen. Pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe kembali meningkat tahun 2021 sebesar 3,84 persen hingga tahun 2023 sebesar 4,21 persen merupakan pertumbuhan tertinggi dalam waktu 5 tahun terakhir.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi Lhokseumawe dengan migas selama lima tahun terakhir adalah sebesar 2,85 persen per tahun, sedangkan rata-rata pertumbuhan tanpa migas 3,17 persen. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Lhokseumawe dengan migas sebesar 4,21 persen mengalami kenaikan dibandingkan tahun

sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,01 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi tanpa migas pada tahun 2023 tumbuh sebesar 4,81 persen mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,31 persen.

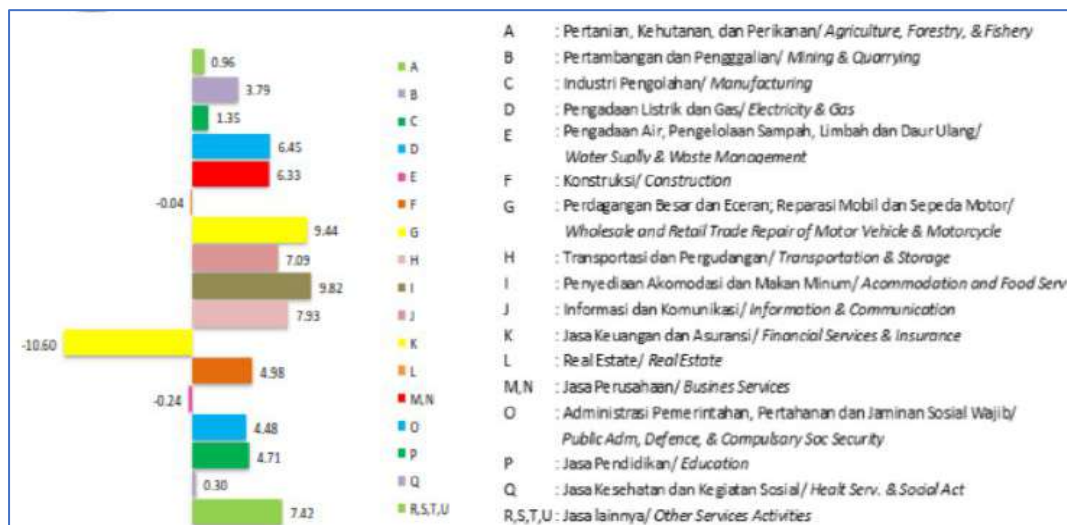
Gambar 3.10
Laju Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe
Tahun 2019-2023 (persen)



Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, Tahun 2024

Pada tahun 2023 kategori yang mengalami pertumbuhan terbesar adalah penyediaan akomodasi dan makan minum (I) tumbuh sebesar 9,82 persen dan kategori yang mengalami pertumbuhan terkecil adalah Jasa Keuangan dan Asuransi (K) yang tumbuh minus 10,60 persen.

Gambar 3.11
Laju Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023 (persen)

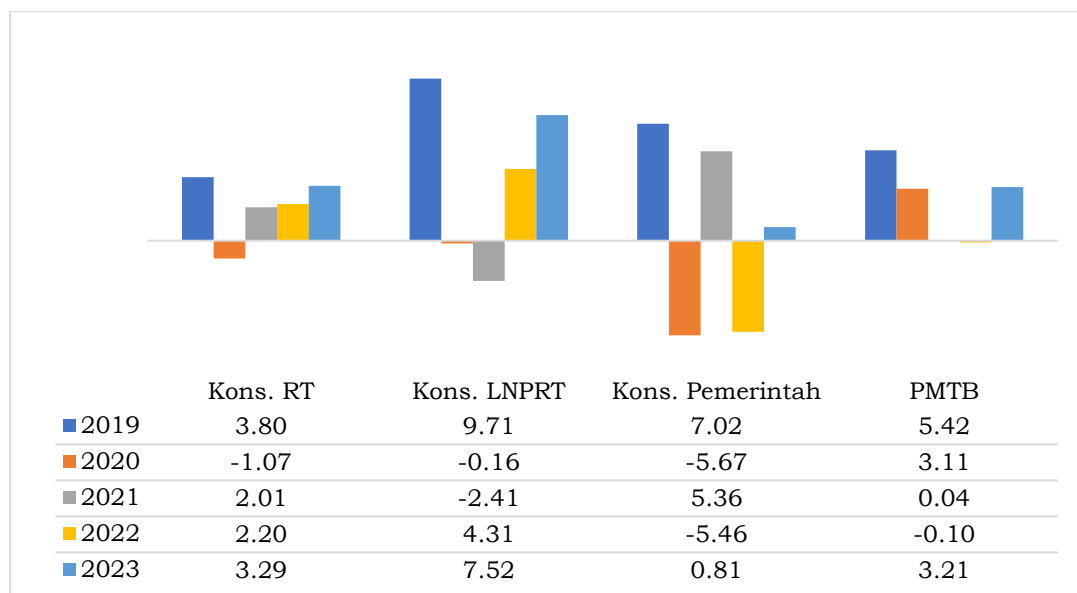


Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, Tahun 2024

Jika dilihat lebih rinci tahun 2023, pertumbuhan ekonomi per kategori mengalami pertumbuhan positif, pertumbuhan terbesar adalah kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (I) sebesar 9,82 persen, dan kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (G) sebesar 9,44 persen. Terdapat tiga kategori yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu kategori Konstruksi (F) sebesar minus (0,04 persen), Jasa Keuangan dan Asuransi (K) minus (10,60 persen), dan Jasa Perusahaan (M,N) minus (0,24 persen).

Dari sisi pengeluaran, laju pertumbuhan masing-masing komponen PDRB ADHK tumbuh berfluktuasi selama tahun 2019-2023, komponen Konsumsi Rumah Tangga pada tahun 2023 tumbuh sebesar 3,29 persen mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh sebesar 2,20 persen. Komponen Konsumsi LNPRT pada tahun 2023 tumbuh sebesar 7,52 persen mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh sebesar 4,31 persen. Komponen Konsumsi Pemerintah pada tahun 2023 tumbuh sebesar 0,81 persen mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh sebesar minus 5,46 persen. Komponen PMTB pada tahun 2023 tumbuh sebesar minus 3,21 persen mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh minus 0,10 persen.

Gambar 3.12
Laju Pertumbuhan PDRB Lhokseumawe ADHK
Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023 (persen)



Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, Tahun 2024

Jika dibandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi Aceh dan Nasional, pertumbuhan ekonomi Lhokseumawe masih berada dibawah Aceh dan Nasional, dimana pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun 2023 sebesar 4,23 persen dan Nasional sebesar 5,05 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih diperlukan intervensi pada berbagai sektor atau lapangan usaha untuk percepatan pertumbuhan ekonomi serta mencari lapangan usaha alternatif sebagai unggulan untuk pengembangan, serta terus melakukan inovasi melalui diversifikasi produk, ekspansi usaha, meningkatkan daya saing dan keberlanjutan.

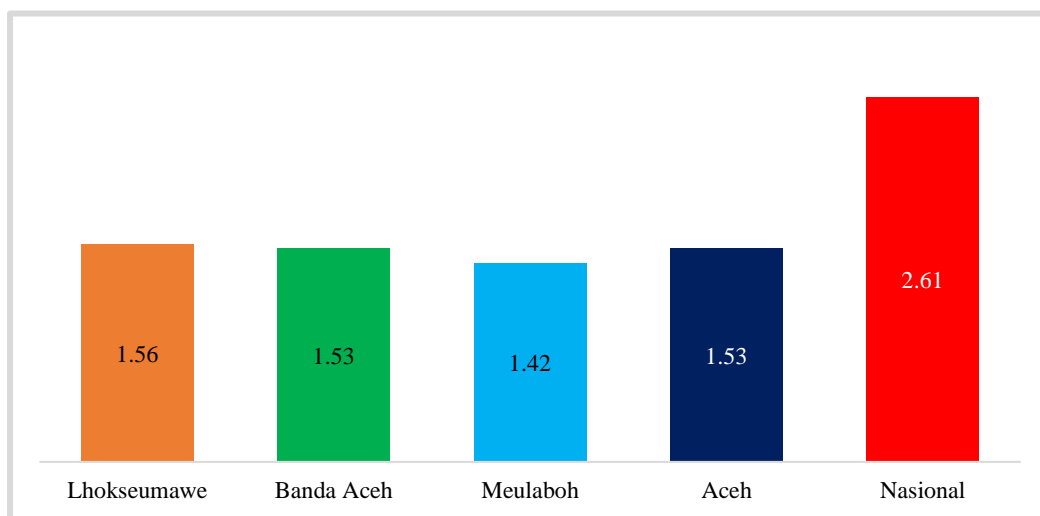
3.1.3.3. Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Secara umum angka inflasi yang menggambarkan kecenderungan umum tentang perkembangan harga dan perubahan nilai dapat dipakai sebagai informasi dasar untuk pengambilan keputusan. Peningkatan inflasi akan berdampak pada penurunan perkembangan ekonomi, dan secara umum akan menurunkan daya saing ekonomi. Dampak lain dari peningkatan inflasi ialah bertambahnya jumlah pengangguran, menurunnya pendapatan riil masyarakat, mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang.

Pengendalian inflasi menjadi hal penting dalam upaya memberikan pondasi yang kuat pada perkembangan perekonomian. Pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga daya beli masyarakat guna menjaga momentum pemulih ekonomi nasional. Anggaran pemerintah terus berperan meredam sebagian dampak inflasi akibat gejolak harga global serta fluktuasi harga akibat gangguan suplai. Selain itu pengendalian inflasi secara konsisten terus dilakukan melalui penguatan sinergi dengan Bank Indonesia di tingkat pusat dan daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Strategi-strategi terus ditempuh melalui kebijakan menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan, menjadi dan mengawasi kelancaran distribusi, serta melakukan komunikasi efektif untuk menekan ekspektasi inflasi.

Berdasarkan *Berita Resmi Statistik* yang dirilis oleh BPS Kota Lhokseumawe, pada Desember 2023 di Kota Lhokseumawe terjadi inflasi sebesar 1,56 persen (yoy). Untuk Kota Meulaboh dan Kota Banda Aceh masing-masing sebesar 1,42 persen dan 1,53 persen. Secara agregat inflasi gabungan tiga kota di Provinsi Aceh pada Desember 2022 tercatat sebesar 1,53 persen (yoy), dan Nasional sebesar 2,61 persen.

Gambar 3.13
Inflasi Lhokseumawe, Meulaboh, Banda Aceh,
Aceh dan Nasional Tahun 2023 (persen)



Sumber: BPS Lhokseumawe, BRS Edisi Januari 2024,

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks harga kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,34 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 4,20 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,47 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,81 persen; kelompok transportasi sebesar 1,86 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,28 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 8,93 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,52 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,59 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,45 persen. Sedangkan kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga mengalami deflasi sebesar 0,71 persen.

Pada Mei 2024 terjadi inflasi (yoy) Kota Lhoskeumawe sebesar 2,93 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,83. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 6,09 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,15 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,99 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,34 persen; kelompok transportasi sebesar 1,29 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 6,67 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,27 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,27 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,33 persen. Sementara perumahan, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,40 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,99 persen. Tingkat inflasi *mtm* dan tingkat inflasi *ytd* Kota Lhokseumawe bulan Mei masing-masing sebesar 0,14 persen dan 2,35 persen. Sedangkan tingkat inflasi *yoy* Kota Lhokseumawe sebesar 2,93 persen, tingkat inflasi *yoy* untuk Mei 2023 dan Mei 2024 masing-masing sebesar 3,08 persen dan 4,68 persen.

Gambar 3.14
Tingkat Inflasi Year on Year Lhokseumawe Bulan Mei
2022-2024 (persen)



Sumber: BPS Lhokseumawe, 2024

Gambar 3.15
Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK)
Kota Lhokseumawe, Mei 2024



Sumber: BPS Lhokseumawe, 2024

Inflasi pada tahun 2024 diperkirakan akan terjaga stabil dan terkendali dalam rentang sasaran. Namun demikian, beberapa risiko yang dapat memberikan tekanan inflasi tetap perlu diwaspadai utamanya fluktuasi harga komoditas global maupun fenomena El Nino yang mendorong panen mundur. Bebera strategi kebijakan dalam hal pengendalian inflasi yaitu kebijakan moneter *pro-stability* dan kebijakan lain yang *pro-growth*; serta optimalisasi anggaran baik APBN maupun APBD sebagai *shock absorber*. Selain itu juga hal-hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam menjaga inflasi agar tetap terkendali yaitu:

- Keterjangkauan harga: peningkatan pelaksanaan operasi pasar murah dan program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP); dan Bantuan pangan dan BLT Mitigasi Risiko Pangan.

- Ketersediaan pasokan: penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP); akses pembiayaan KUR dan kredit alsintan; serta penyediaan pupuk bersubsidi.
- Kelancaran distribusi: perluasan Kerjasama Antardaerah (KAD).
- Komunikasi efektif: pemantauan dan penyediaan data harga serta pasokan yang tepat waktu dan akuntabel; komunikasi upaya pengendalian inflasi termasuk pembinaan dari Kemendagri melalui Rakor Mingguan.

Selanjutnya langkah strategis untuk menjaga konsistensi inflasi dalam kisaran target nasional $2,5 \pm 1\%$ pada tahun 2024 yaitu:

1. Melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang konsisten dengan upaya mendukung pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi;
2. Mengendalikan inflasi kelompok *Volatile Food* agar dapat terkendali di bawah 5 persen, dengan fokus pada komoditas beras, aneka cabai, dan aneka bawang;
3. Menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan untuk memitigasi risiko jangka pendek, termasuk mengantisipasi pergeseran musim panen dan peningkatan permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
4. Memperkuat ketahanan pangan melalui upaya peningkatan produktivitas dan hilirasasi pangan;
5. Memperkuat ketersediaan data pasokan pangan untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi;
6. Memperkuat sinergi TPID-TPID antara lain melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP); serta
7. Memperkuat komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.

3.1.3.4. Gini Ratio

Gini ratio merupakan salah satu alat untuk mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Perkembangan gini ratio Kota Lhokseumawe selama periode lima tahun terakhir menunjukkan angka yang fluktuatif. Angka gini ratio Kota Lhokseumawe tahun 2023 sebesar 0,293. Masih berada di

bawah angka gini ratio Aceh yang sebesar 0,296. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kota Lhokseumawe masih termasuk dalam “kategori rendah” karena berada pada kisaran 0,291-0,324. Pada tahun 2021 gini ratio Kota Lhokseumawe sebesar 0,296, meningkat pada tahun 2022 menjadi 0,348. Seiring dengan pemulihan ekonomi pasca Covid-19 gini ratio Kota Lhokseumawe mengalami penurunan pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan gini ratio kabupaten/kota se Aceh, Kota Lhokseumawe berada pada urutan keenam belas pada tahun 2023. Kabupaten Nagan Raya merupakan kabupaten dengan gini ratio terendah se Aceh (0,207), sedangkan Kota Langsa merupakan kabupaten/kota tertinggi gini rasionya yang mencapai 0,330 pada tahun 2023.

3.1.3.5. Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan masih menjadi topik pembangunan, agenda utama, dan berkelanjutan di seluruh wilayah di Aceh tak terkecuali di Lhokseumawe. Dalam *Outcome Document Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development*, mengakhiri kemiskinan juga menjadi tujuan pertama dari tujuh belas yang disepakati dalam SGDs.

Untuk mengukur tingkat kemiskinan, diperlukan batas/garis kemiskinan. Garis kemiskinan mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun kebutuhan non makanan. Garis kemiskinan di Aceh (Perkotaan+Perdesaan) untuk makanan dan bukan makanan pada tahun 2023 (Maret) sebesar Rp.627.534,-, meningkat dari tahun sebelumnya (Maret 2022) sebesar Rp.579.227,-. Garis kemiskinan di Kota Lhokseumawe pada Maret 2023 sebesar Rp.498.431,-. Masih berada di bawah rata-rata garis kemiskinan Aceh.

Selanjutnya jika ditinjau dari jumlah penduduk miskin pada tahun 2023 di Aceh, pada Maret 2023 berjumlah 806,75 ribu orang atau sebesar 14,45 persen. Angka ini turun dibandingkan dengan Maret 2022 yang mencapai 806,82 ribu orang atau sebesar 15,64

persen. Selama periode Maret 2022-Maret 2023, penduduk miskin di daerah perkotaan di Aceh mengalami peningkatan sebesar 4,16 ribu orang, sedangkan di daerah perdesaan mengalami penurunan sebesar 4,09 ribu orang.

Di Kota Lhokseumawe jumlah penduduk miskin pada tahun 2023 berjumlah 23,10 ribu orang atau mencapai 10,73 persen. Angka ini menjadikan Kota Lhokseumawe berada pada peringkat ketiga penduduk miskin terendah setelah Kota Langsa sebesar 10,53 persen dan Kota Banda Aceh sebesar 7,04. Walaupun angka kemiskinan di Kota Lhokseumawe berada di bawah rata-rata kemiskinan Aceh (15,64 persen) namun kemiskinan di Kota Lhokseumawe masih berada di atas kemiskinan nasional yang hanya sebesar 9,36 persen dimana pada semester sebelumnya (September 2022) berada pada angka 9,57 persen. Penurunan kemiskinan dalam satu semester ini dikarenakan beberapa faktor baik dari stabilitas makro maupun program-program afirmasi. Selain penurunan inflasi pada Maret 2022-Maret 2023 dan konsumsi rumah tangga yang meningkat pada triwulan I-2023, penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan dan sembako juga sudah melebihi 85 persen pada triwulan I-2023.

Dari sisi kemiskinan ekstrem, berdasarkan Data P3KE Tahun 2024 yang berasal dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, jumlah penduduk yang masuk dalam Data P3KE sebanyak menurun menjadi 70.457 jiwa pada triwulan II-2024, dimana sebelumnya jumlah penduduk yang masuk dalam Data P3KE sebanyak 82.743 jiwa. Penurunan tersebut tidak terlepas dari upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk menangani kemiskinan ekstrem melalui belanja APBDK, intervensi langsung bersama pemangku kepentingan terkait dalam memverifikasi data miskin ekstrem tersebut. Selain itu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem diantaranya:

- a. Program Keluarga Harapan diprioritaskan di wilayah kantong kemiskinan;
- b. Mengupayakan pertumbuhan inklusif;

- c. Memfaatkan program kesehatan untuk memecahkan masalah lokal;
- d. Memanfaatkan program Pendidikan Aceh untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- e. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat;
- f. Meningkatkan efektivitas dana desa;
- g. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penanggulangan kemiskinan ekstrem di daerah.

3.1.3.6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Agenda nasional transformasi ekonomi memberikan dampak positif pada pencapaian tingkat pengangguran terbuka. Pada Agustus 2023, tingkat pengangguran terbuka nasional mengalami penurunan sebesar 0,54 persen dari 5,86 persen di tahun 2022 menjadi 5,32 persen. Pada tahun 2023, jumlah lapangan kerja baru yang tercipta cukup besar, yaitu mencapai 4,55 juta, tertinggi sejak tahun 2018. Jumlah pekerja di bidang pekerjaan dengan keahlian menengah dan tinggi pun mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 2,12 juta orang. Untuk meningkatkan jumlah pekerja di bidang pekerjaan dengan keahlian menengah dan tinggi, pemerintah terus berupaya melakukan reformasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Di Aceh distribusi penduduk yang bekerja pada Februari 2024 masih didominasi pada lapangan usaha pertanian yang mencapai 38,08 persen dan meningkat jika dibandingkan dengan Februari 2023 yang menyerap tenaga kerja sebesar 37,47 persen atau mengalami peningkatan sebesar 0,60 persen. Di urutan kedua, lapangan usaha perdagangan besar sebesar 16,19 persen dan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Februari 2023 sebesar 15,89 persen atau mengalami perubahan sebesar 0,30 persen. Urutan ketiga yaitu lapangan usaha industri pengolahan sebesar 10,03 persen pada Februari 2024 dan mengalami penurunan sebesar minus 1,53 persen atau menyerap tenaga kerja sebesar 8,51 persen pada Februari 2023.

Jika dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka menurut jenis kelamin di Aceh, Laki-laki sebesar 5,38 persen dan perempuan sebesar 5,88 persen atau lebih tinggi perempuan sebesar 0,5 persen. Selanjutnya Tingkat Pengangguran Terbuka menurut wilayah perkotaan sebesar 7,18 persen dan perdesaan sebesar 4,62 persen. Secara keseluruhan Tingkat Pengangguran Terbuka di Aceh pada Februari 2024 sebesar 5,56 persen atau sebanyak 144,67 ribu orang.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Lhokseumawe sangat terlihat jika dibandingkan dengan data pengangguran di tingkat nasional maupun provinsi Aceh. Angka pengangguran Kota Lhokseumawe masih berada di atas dua digit dari 2019 hingga tahun 2021 yaitu masing-masing sebesar 11,01 persen; 11,99 persen; dan 11,16 persen. Pada tahun 2022 TPT di Kota Lhokseumawe turun menjadi 9,15 persen, dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2023 menjadi 8,68 persen, akan tetapi penurunan tersebut masih menempatkan Kota Lhokseumawe pada posisi Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi di Aceh.

Untuk meningkatkan jumlah pekerja di bidang pekerjaan, pemerintah dapat berupaya untuk mendorong kewirausahaan dalam menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dengan mengutamakan tenaga kerja lokal untuk mengurangi tingkat pengangguran; memberikan bantuan insentif untuk membuka dan melakukan formalisasi usaha; termasuk gerakan ekonomi kerakyatan dengan membangun pusat kewirausahaan guna memperkuat produk-produk usaha mikro, kecil dan menengah. Mendorong pertumbuhan wirausaha yang inovatif, inklusif dan berkelanjutan dengan sinkronisasi program kewirausahaan.

3.1.3.7. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan pembangunan ekonomi Aceh, arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Lhokseumawe pada tahun 2025 yaitu Meningkatkan Infrastruktur, Ekonomi Kota Lhokseumawe Berkualitas dengan

Memperhatikan Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Baik serta Peningkatan Pelayanan Publik melalui Digitalisasi.

Melalui arah kebijakan pembangunan ekonomi tersebut telah ditetapkan indikator makro ekonomi baik secara nasional, Aceh, dan Kota Lhokseumawe sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1
Target Makro Ekonomi Tahun 2025

| No | Indikator | Nasional | Aceh | Kota Lhokseumawe |
|-----------|----------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|
| 1. | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,1-5,5 | 4.28-4.51 | 4.40-4.50 |
| 2. | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 4,5-5.00 | 5.24 | 7.98-7.48 |
| 3. | Rasio Gini | 0.379-0.382 | 0.290-0.293 | 0.293 |
| 4. | Indeks Pembangunan Manusia | 73.99-74.02 | 75.50-76.00 | 81.65-83.65 |
| 5. | Tingkat Kemiskinan (%) | 7.00-8.00 | 12.00-13.00 | 10.33-10.13 |
| 6. | Penurunan Emisi GRK (%) | 38.6 | 36.08 | 33.89 |

Sumber : Ranwal RKP 2025, Ranwal RKPA 2025, RPK 2023-2026

Dalam rangka pencapaian target perekonomian tahun 2025, maka secara garis besar kerangka Kebijakan Ekonomi Kota Lhokseumawe yang akan dilaksanakan antara lain:

1. Pemanfaatan sumber daya ekonomi lokal dengan mendorong pelaku usaha untuk menciptakan produk yang berdaya saing dan berstandarisasi, serta menyediakan lokasi bagi UMKM untuk memasarkan produk melalui *event Ahad Festival* setiap minggu;
2. Penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem melalui penyaluran bantuan yang tepat sasaran serta memberikan pelatihan ketenagakerjaan kepada warga miskin;
3. Menjaga keseimbangan inflasi melalui pelaksanaan Pasar Murah dan Pasar Tani untuk penyediaan bahan-bahan kebutuhan pokok yang terjangkau oleh masyarakat;

4. Melakukan Kerjasama Antar Daerah dalam rangka pengendalian inflasi dan pengendalian ketersediaan bahan pangan untuk kebutuhan pokok masyarakat;
5. Menjaga ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.

3.1.3.8. Tantangan dan Prospek Ekonomi Tahun 2025

Di tengah kondisi global yang masih diselimuti ketidakpastian, Bank Indonesia memperkirakan perekonomian dalam negeri mampu tumbuh positif pada tahun 2025. Berkaca dari pengalaman sebelumnya, sinergi di antara pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam menjaga momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.

Bank Indonesia memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap kuat berkisaran pada 4,8-5,6 persen pada tahun 2025. Pertumbuhan ini ditopang oleh peningkatan konsumsi dan investasi, kenaikan gaji aparatur sipil negara, pembangunan infrastruktur, serta hasil ekspor hilirisasi. Selain itu, tingkat inflasi diperkirakan tetap terjaga dalam sasaran 1,5-3,5 persen pada tahun 2025.

Disisi lain, Bank Indonesia juga memberikan bauran kebijakan yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, keuangan inklusif dan hijau. Kebangkitan ekonomi nasional memerlukan transformasi di sektor riil, seperti infrastruktur, konektivitas fisik dan digital, hilirisasi mineral batubara, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif dan digitalisasi. Selain itu, dibutuhkan pula perizinan yang ramah untuk iklim bisnis dan investasi.

Terdapat sejumlah aspek yang harus dipertimbangkan dalam menguraikan tantangan perekonomian Lhokseumawe. Memperhatikan perkembangan perekonomian global yang diwarnai ketidakpastian yang besar dan tantangan yang dihadapi, pemerintah merasa perlu mengarahkan kebijakan untuk mengoptimalkan

berbagai potensi domestik dalam rangka memperkuat ketahanan perekonomian Kota Lhokseumawe. Di sektor domestik, perlu terus ditingkatkan industri kecil menengah yang kuat dan berdaya saing, sementara di sektor eksternal perlu disiapkan berbagai sektor unggulan yang berdaya saing di pasar sekaligus mempunyai produktivitas tinggi.

Tantangan berikutnya yang dihadapi antara lain tingkat kemiskinan, inflasi, dan tingkat pengangguran di Kota Lhokseumawe yang berada di atas rata-rata Aceh, dan juga Pendapatan Asli Daerah yang masih rendah. Pemerintah perlu mendorong kinerja perekonomian sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diantaranya dengan:

- a. Menyediakan regulasi kemudahan investasi dan pemberian insentif;
- b. Pemanfaatan data P3KE dalam pengentasan kemiskinan;
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan;
- d. Meningkatkan penyaluran ZIS untuk pemberdayaan;
- e. Pendampingan dan pelatihan untuk UMKM dan IKM;
- f. Pelatihan berbasis kompetensi untuk tenaga kerja;
- g. Meningkatkan operasi pasar murah dan pasar tani;
- h. Mengembangkan objek-objek wisata yang ada;
- i. Menjaga dan meningkatkan keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Kota

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Kota Lhokseumawe

Keuangan daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe merupakan semua hak dan kewajiban Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Pemerintah Kota Lhokseumawe sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Terkait dengan hal tersebut serta dalam rangka mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat maka perlu dilakukan pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Pengelolaan keuangan Kota Lhokseumawe dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi dalam APBK yang setiap tahun ditetapkan dengan Qanun Kota Lhokseumawe. APBK merupakan suatu instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBK maka analisis pada bab ini terkait pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap realisasi APBK Lhokseumawe dan laporan keuangan selama 5 (lima) tahun sebelumnya.

Penyusunan gambaran pengelolaan keuangan daerah juga dilakukan untuk mengevaluasi capaian kinerja keuangan daerah dan untuk memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Gambaran capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud meliputi capaian kinerja pendapatan, tren realisasi belanja, dan capaian pembiayaan.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik.

Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya

penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah.

Kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, karena APBK merupakan salah satu instrumen penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal daerah mengandung tiga misi utama yaitu: a) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya; b) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat; c) serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan.

Kebijakan keuangan Kota Lhokseumawe Tahun 2025 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Kota (RPK) Lhokseumawe Tahun 2023-2026, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan Kota Lhokseumawe.

Prediksi kemampuan keuangan merupakan kapasitas keuangan yang bersifat indikatif, yaitu tidak statis dan disesuaikan dengan kondisi terkini pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Proyeksi pendapatan dan belanja serta pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rencana kerja pemerintah.

Untuk mengetahui tentang gambaran realisasi pendapatan dan target/proyeksi pendapatan Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Realisasi dan Target/Proyeksi Pendapatan Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2026

| NO. | URAIAN | REALISASI 2022 *) | REALISASI 2023 *) | APBK 2024 | TARGET 2025 | PROYEKSI 2026 |
|------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | PENDAPATAN DAERAH | 789,566,096,080 | 755,949,798,672 | 789,769,194,000 | 816,384,456,234 | 837,906,922,405 |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | 68,212,506,871 | 67,901,946,334 | 71,057,908,702 | 72,381,799,031 | 74,941,799,031 |
| 1.1.1 | Pajak Daerah | 40,032,463,310 | 39,586,915,813 | 38,171,908,702 | 40,610,299,031 | 43,070,299,031 |
| 1.1.2 | Retribusi Daerah | 3,022,508,323 | 3,733,420,512 | 3,866,000,000 | 3,451,500,000 | 3,501,500,000 |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 4,350,084,432 | 3,236,124,545 | 16,200,000,000 | 15,500,000,000 | 15,500,000,000 |
| 1.1.4 | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 20,807,450,806 | 21,345,485,464 | 12,820,000,000 | 12,820,000,000 | 12,870,000,000 |
| 1.2 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 622,773,568,549 | 630,906,590,568 | 639,267,008,000 | 655,218,442,940 | 683,520,846,076 |
| 1.2.1 | Dana Bagi Hasil (DBH) | 25,508,814,157 | 25,249,350,413 | 19,384,221,000 | 19,384,221,000 | 19,384,221,000 |
| 1.2.2 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 415,683,229,737 | 436,369,459,000 | 455,755,284,000 | 471,706,718,940 | 500,009,122,076 |
| 1.2.3 | Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | 33,292,658,226 | 22,632,985,556 | 20,409,944,000 | 20,409,944,000 | 20,409,944,000 |
| 1.2.4 | Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 59,943,665,527 | 79,522,976,344 | 83,302,489,000 | 83,302,489,000 | 83,302,489,000 |
| 1.2.5 | Dana Insentif Daerah (DID) | 34,445,081,000 | 5,730,566,000 | - | - | - |
| 1.2.6 | Dana Desa (DD) | 53,900,119,902 | 61,401,253,255 | 60,415,070,000 | 60,415,070,000 | 60,415,070,000 |
| 1.3 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 98,580,020,659 | 56,919,261,770 | 66,097,659,455 | 75,437,596,420 | 66,097,659,455 |
| 1.3.1 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi (DBH) | 29,261,429,715 | 34,250,277,597 | 31,220,106,455 | 40,560,043,420 | 31,220,106,455 |
| 1.3.2 | Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) | 69,318,590,944 | 22,668,984,173 | 34,877,553,000 | 34,877,553,000 | 34,877,553,000 |
| 1.3.3 | Bantuan Keuangan Provinsi | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | - | 222,000,000 | 13,346,617,843 | 13,346,617,843 | 13,346,617,843 |
| 1.4.1 | Pendapatan Hibah | - | 222,000,000 | - | - | - |
| 1.4.2 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | - | - | 13,346,617,843 | 13,346,617,843 | 13,346,617,843 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 789,566,096,080 | 755,949,798,672 | 789,769,194,000 | 816,384,456,234 | 837,906,922,405 |

Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe, Tahun 2024.

*) *Audited*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan pada Tahun 2022 sebesar Rp.789.566.096.080,-. Realisasi ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.68.212.506.871,- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.622.773.568.549,- dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.98.580.020.659,-.

Selanjutnya realisasi pendapatan Kota Lhokseumawe pada Tahun 2023 sebesar Rp.755.949.798.672,-,- yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.67.901.946.334,-; Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.630.906.590.568,-; dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.56.919.261.770,- serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.222.000.000,-. Besaran realisasi pendapatan tahun 2023 relatif lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2022. Penurunan realisasi pendapatan tersebut terutama berasal dari Pendapatan Transfer antar Daerah. Secara umum penurunan pendapatan Kota Lhokseumawe tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp.-33.616.297.408,-.

Sedangkan Tahun 2024 jumlah pendapatan Kota Lhokseumawe ditargetkan sebesar Rp.789.769.194.000,- yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.71.057.908.702,-; Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.639.267.008.000,-; Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.66.097.659.455,- dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.26.693.235.686,-. Pendapatan yang dianggarkan tersebut merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Dibandingkan dengan pendapatan tahun 2023, pendapatan Kota Lhokseumawe tahun 2024 mengalami kenaikan 4,47 persen atau sebesar Rp.33.819.395.328,-.

Berdasarkan perkembangan realisasi pendapatan daerah tahun 2023 dan target pendapatan 2024, pendapatan Kota Lhokseumawe tahun 2025 direncanakan sebesar Rp.816.384.456.234,-. Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.72.381.799.031,-; Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.655.218.442.940,-; dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.75.437.596.420,- serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.13.346.617.843,-.

Jumlah pendapatan yang direncanakan pada tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pendapatan tahun berjalan (2024). Perbedaan target pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.1.323.890.329,-; dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.15.951.434.940,-; serta Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.9.339.936.965,-. Secara umum Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan sebesar 3,37 persen atau sebesar Rp.26.615.262.234,- pada tahun 2025 dibandingkan 2024.

Pendapatan daerah yang telah ditargetkan harus dioptimalkan untuk menghasilkan kapasitas keuangan daerah yang makin tinggi guna mendukung pendanaan pembangunan daerah. Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan penerimaan daerah, maka perlu adanya usaha meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau laba atas penyertaan modal pada BUMD serta lain-lain PAD yang sah, serta penerimaan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan penopang bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Arah kebijakan pendapatan daerah dalam rangka optimalisasi atas pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan dengan sebagai berikut:

1. intensifikasi pajak dan retribusi daerah, ditujukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta memperkuat basis pajak daerah dan retribusi daerah dengan cara sebagai berikut :
 - a. melakukan pendekatan kepada wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyempurnaan landasan hukum serta melakukan penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;

- c. melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah;
 - e. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit satuan kerja terkait; dan
 - f. Peningkatan kualitas aparat pengelola pajak daerah dan retribusi daerah melakukan pendekatan
2. ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan potensi penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah dengan menambah jumlah wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta memperkuat basis pajak daerah dan retribusi daerah. Secara umum proses ini dilaksanakan dengan cara-cara sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan sosialisasi dan pemberian penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. melakukan pemutakhiran basis data pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan yang bersangkutan;
 - c. melakukan pendataan ke seluruh objek pajak dan subjek pajak yang dapat dikenakan pajak daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pengkajian terhadap potensi penerimaan pajak daerah;
 - e. pemungutan terhadap jenis retribusi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - f. meningkatkan peran seluruh stakeholder yang terkait dengan penerimaan pajak daerah terutama PBB dan BPHTB.

Dalam rangka optimalisasi pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah, kebijakan pendapatan difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan asli daerah melalui:

- a. pemantauan pajak daerah yang merupakan monitoring secara elektronik atas data transaksi usaha wajib pajak daerah berupa pemasangan/penerapan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak seperti *tapping box* dan sejenisnya dengan tujuan antara lain:

- Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak daerah;
 - Mempermudah Wajib Pajak Daerah dalam menghitung pajak yang harus disetorkan;
 - Meningkatkan efisiensi dan pemungutan pajak daerah;
 - Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak daerah;
 - Meningkatkan transparansi dan akurasi data pembayaran subjek pajak daerah;
 - Meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak daerah.
- b. Pemberian *Reward*, antara lain:
- Undian Berhadiah Pajak PBB bagi WP yang telah melunasi Pajak PBB sebelum jatuh tempo melalui non tunai (Action Bank Aceh);
 - Pemberian stimulus fiskal berupa keringanan/penghapusan denda keterlambatan;
 - Pemberian *doorprize*/souvenir bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pada event-event yang digelar Pemerintah Kota Lhokseumawe.
- c. Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk Pendapatan Asli Daerah selain Pajak Daerah;
- d. Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak;
- e. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah.

Dalam rangka optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Lhokseumawe, beberapa strategi yang dapat ditempuh untuk peningkatan Pajak Daerah yaitu:

- Peningkatan promosi pariwisata dan kerjasama dengan industri perhotelan;
- Mengidentifikasi lebih lanjut terkait rumah kos maupun jasa penginapan lainnya yang berpotensi menjadi sumber pendapatan daerah;
- Pemantauan pemasangan *tapping box*.
- Pendataan yang tepat dan akurat terhadap wajib pajak daerah;

- Melakukan audit rutin penggunaan *tapping box* oleh pihak independen;
- Meningkatkan pengawasan dan dukungan acara hiburan lokal;
- Pemantauan berkelanjutan untuk mengidentifikasi perubahan titik, jumlah dan jenis reklame;
- Melakukan audit menyeluruh terhadap ruang reklame yang ada di wilayah Kota Lhokseumawe;
- Memastikan bahwa semua iklan yang ada telah dikenai pajak dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Pembaharuan peraturan mengenai harga satuan listrik dan nilai jual tenaga listrik atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, dan menaikkan harga satuan listrik untuk klasifikasi industri;
- Menjalin dan menjaga komunikasi dengan baik dan keterbukaan informasi antara industri dan pemerintah;
- Melakukan pemeriksaan secara reguler terhadap perhitungan pajak konsumsi tenaga listrik dari sumber lain;
- Melakukan sosialisasi pajak, terutama pajak MBLB kepada objek pajak dan badan usaha untuk menyusun laporan keuangan yang memuat penjualan MBLB, sehingga pemerintah dapat memungut pajak MBLB berdasarkan penjualan riil;
- Memastikan kebenaran jumlah pembayaran pajak parkir yang dilaporkan oleh penyelenggara parkir;
- Melakukan pemasangan meteran air pada usaha-usaha menggunakan air tanah, sehingga dasar pajak pajak sesuai dengan nilai perolehan air tanah dan pembagian kelompok yang tertera di dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 49 tahun 2017;
- Melakukan pemutakhiran Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Jual Objek Pajak PBB-P2 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya strategi yang dapat ditempuh untuk pencapaian potensi Retribusi Daerah, yaitu:

- Melakukan diversifikasi layanan;
- Peningkatan kualitas layanan;
- Promosi pelayanan untuk objek retribusi baru;
- Melakukan Kemitraan dengan Pihak Lain;

- Penetapan tarif yang kompetitif dan transparan;
- Peningkatan infrastruktur dan fasilitas pelayanan kebersihan;
- Modernisasi dan integrasi pembayaran retribusi pelayanan kebersihan;
- Melakukan perluasan jangkauan layanan;
- Melakukan penertiban terhadap juru parkir liar dan titik parkir baru;
- Penataan tanda dan rambu parkir (*park signs*);
- Melakukan inovasi skema dan pembayaran parkir di tepi jalan umum;
- Meningkatkan penjualan di pasar melalui pendampingan, pemasaran dan penyediaan fasilitas penunjang yang memadai;
- Mempermudah proses pembayaran retribusi melalui pembayaran elektronik sekaligus mengurangi potensi praktik manipulasi;
- Melakukan optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa, Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

Pendapatan Transfer baik itu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat maupun Pendapatan Transfer Antar Daerah diarahkan pada program-program pembangunan yang mendorong perkembangan ekonomi daerah dalam upaya meningkatkan PAD dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa strategi perlu ditempuh dalam hal dana perimbangan diantaranya :

- mengalokasikan dana berdasarkan prioritas pembangunan;
- meningkatkan kesadaran Perangkat Daerah untuk menyusun rencana anggaran yang efisien dan efektif.

Peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah dan menjaga kestabilan politik dan keamanan daerah.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Kota Lhokseumawe

Arah kebijakan belanja Kota Lhokseumawe diarahkan pada pelaksanaan program yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran; penurunan prevalensi stunting; pengendalian inflasi, pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak, dan peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan. Selanjutnya alokasi anggaran belanja harus tetap mengedepankan azas efisiensi dan efektivitas dengan mengacu pada penyusunan anggaran berdasar *money follow program*.

Kebijakan pengelolaan belanja Kota Lhokseumawe dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. penyusunan alokasi belanja menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil yang direncanakan;
2. prioritas anggaran belanja adalah untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi kewenangan daerah;
3. setiap peningkatan alokasi belanja harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. besaran plafon anggaran harus realistis yaitu disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah dan prioritas kebutuhan daerah serta pertimbangan kinerja;
5. penentuan kebijakan belanja daerah selain didasarkan pada prioritas kegiatan perangkat daerah dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi penganggaran tahun sebelumnya dengan tetap berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra).

Dalam rangka mewujudkan sinergitas program dan kegiatan prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe, maka kebijakan belanja Kota Lhokseumawe diarahkan untuk :

- a. pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat;

- b. pemenuhan Dana Bagi Hasil Kepada Desa, serta pemenuhan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa;
- c. mengusahakan alokasi belanja fungsi pendidikan sebesar 20 persen dan fungsi kesehatan 10 persen;
- d. mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah;
- e. belanja sesuai dengan sumber dana yang diperuntukkan penggunaan, terutama yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat;
- f. untuk belanja yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik masih mengikuti pedoman dan pagu indikatif sebagaimana tahun 2024, dan akan disesuaikan kembali pada tahapan selanjutnya berdasarkan pendapatan DAK Fisik Tahun 2025 yang diterima;
- g. mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat; peningkatan pendapatan masyarakat; dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan;
- h. mendukung percepatan penurunan stunting antara lain: kegiatan yang mendukung intervensi gizi spesifik seperti pemberian suplemen dan makanan tambahan bagi ibu hamil, bayi dan balita; kegiatan yang mendukung intervensi gizi sensitive seperti penyediaan akses air minum layak, akses sanitasi layak, akses layanan kesehatan dan keluarga berencana dan pendampingan keluarga rawan stunting; kegiatan pendukung penanganan stunting, seperti kegiatan fasilitasi penataan dan pemberdayaan kelembagaan;
- i. mendukung pengendalian inflasi, antara lain melalui: peningkatan produksi dan ketersediaan pangan strategis; pengendalian laju alih fungsi lahan; pemberian bantuan sektor pertanian yang tepat sasaran; penguatan tata kelola logistik daerah; pengawasan harga dan operasi pasar;
- j. mendukung peningkatan investasi antara lain melalui: kemudahan usaha dan investasi melalui penguatan sistem *Online Single*

Submission (OSS); dan mendukung penguatan konektivitas dan kualitas sumber daya manusia;

Sesuai dengan arah kebijakan belanja daerah tersebut serta dengan mempertimbangkan realisasi kemampuan keuangan tahun-tahun sebelumnya, maka secara garis besar gambaran belanja daerah Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3
Realisasi dan Target/Proyeksi Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2026

| NO. | URAIAN | REALISASI 2022 *) | REALISASI 2023 *) | APBK 2024 | TARGET 2025 | PROYEKSI 2026 |
|------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2 | BELANJA DAERAH | 825,509,672,418 | 728,461,011,932 | 800,078,811,672 | 816,384,456,234 | 837,906,922,405 |
| 2.1 | Belanja Operasi | 576,374,939,708 | 548,509,273,989 | 589,100,205,373 | 599,279,401,985 | 606,490,259,185 |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 304,916,122,038 | 316,584,344,048 | 346,585,216,001 | 379,621,372,711 | 387,213,800,165 |
| 2.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 185,425,254,292 | 177,812,072,024 | 179,934,496,101 | 184,611,656,124 | 184,374,932,737 |
| 2.1.3 | Belanja Subsidi | 200,000,000 | 470,000,000 | 963,000,000 | 483,000,000 | 1,000,000,000 |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | 36,702,542,385 | 22,501,686,262 | 37,771,246,217 | 6,249,467,180 | 6,561,940,539 |
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 49,131,020,993 | 31,141,171,655 | 23,846,247,054 | 28,313,905,970 | 27,339,585,744 |
| 2.2 | Belanja Modal | 142,251,751,256 | 60,336,467,761 | 86,973,061,079 | 94,327,685,129 | 108,645,418,791 |
| 2.2.1 | Belanja Modal Tanah | 13,713,809,182 | - | - | - | - |
| 2.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 21,363,441,916 | 15,627,696,279 | 13,988,883,553 | 19,498,610,094 | 22,423,401,608 |
| 2.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 40,945,930,770 | 21,923,145,455 | 26,733,147,839 | 24,874,578,023 | 28,605,764,726 |
| 2.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 62,614,371,138 | 18,771,759,227 | 41,539,097,487 | 45,982,182,380 | 53,048,090,630 |
| 2.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 3,614,198,250 | 4,013,866,800 | 4,711,932,200 | 3,972,314,632 | 4,568,161,827 |
| 2.3 | Belanja Tak Terduga | 2,134,850,082 | 52,650,368 | 3,000,000,000 | 3,981,680,998 | 3,000,000,000 |
| 2.3.1 | Belanja Tak Terduga | 2,134,850,082 | 52,650,368 | 3,000,000,000 | 3,981,680,998 | 3,000,000,000 |
| 2.4 | Belanja Transfer | 104,748,131,372 | 119,562,619,814 | 121,005,545,220 | 118,795,688,122 | 119,771,244,429 |
| 2.4.1 | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa | 1,820,631,270 | 3,183,566,844 | 10,568,178,720 | 10,568,178,722 | 10,568,178,720 |
| 2.4.2 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa | 102,927,500,102 | 116,379,052,970 | 110,437,366,500 | 108,227,509,400 | 109,203,065,709 |
| | JUMLAH BELANJA | 825,509,672,418 | 728,461,011,932 | 800,078,811,672 | 816,384,456,234 | 837,906,922,405 |

Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe, dan <https://sipd-ri.kemendagri.go.id>. 2024

*) Audited

Dari tabel 3.3 dapat dilihat bahwa, realisasi belanja Kota Lhokseumawe pada Tahun 2022 sebesar Rp.825.509.672.418,-. Realisasi ini terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.576.374.939.708,- Belanja Modal sebesar Rp.142.251.751.256,- Belanja Tak Terduga sebesar Rp.2.134.850.082,- dan Belanja Transfer sebesar Rp.104.748.131.372,-. Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2023 realisasi belanja sebesar Rp.728.461.011.932,-. Realisasi ini terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.548.509.273.989,- Belanja Modal sebesar Rp.60.336.467.761,- Belanja Tak Terduga sebesar Rp.52.650.368,- dan selanjutnya Belanja Transfer sebesar Rp.119.562.619.814,-.

Untuk Tahun Anggaran 2024 total belanja Kota Lhokseumawe dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebesar Rp.800.078.811.672,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.589.100.205.373,-; Belanja Modal sebesar Rp.86.973.061.079,-; Belanja Tak Terduga sebesar Rp.3.000.000.000,-; dan Belanja Transfer sebesar Rp.121.005.545.220,-.

Berdasarkan rencana pendapatan daerah tahun 2025, belanja Kota Lhokseumawe direncanakan sebesar Rp.816.384.456.234,- yang terdiri dari:

- a. Belanja Operasi sebesar Rp.599.279.401.985,-;

Pada belanja operasi, alokasi sebesar Rp.379.621.372.711,- untuk memenuhi belanja pegawai yang digunakan untuk gaji, tunjangan, dan tambahan penghasilan yang diberikan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan PPPK yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; selanjutnya Belanja Barang dan Jasa dialokasikan sebesar Rp.184.611.656.124,-; Belanja Subsidi yang diperuntukan untuk pelaksanaan pasar murah dalam rangka penanggulangan inflasi dan menjamin keterjangkauan daya beli masyarakat sebesar Rp.483.000000,-; Belanja Hibah sebesar Rp.6.249.467.180,-; dan alokasi Belanja Bantuan Sosial direncanakan sebesar Rp.28.313.905.970,-.

- b. Belanja Modal sebesar Rp.94.327.685.129,- terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp.19.498.610.094,-; belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp.24.874.578.023,-; belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp.45.982.182.380,-; serta belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp.3.972.314.632,-.
- c. Belanja Tak Terduga Rp.3.981.680.998,- serta
- d. Belanja Transfer sebesar Rp.118.795.688.122,- yang terdiri atas belanja bagi hasil sebesar Rp.10.568.178.722,-; dan belanja bantuan keuangan sebesar Rp.108.227.509.400,-.

Disamping itu juga dalam belanja daerah tahun 2025 sudah dialokasikan untuk pemenuhan alokasi belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Kota Lhokseumawe

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan.

Realisasi penerimaan pembiayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2022 yang berasal dari sisa lebih belanja daerah sebesar Rp.48.484.611.013,-, dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.2.000.000.000,-. Pada tahun 2023 realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp.10.541.034.674, dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.1.000.000.000,-.

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Lhokseumawe Tahun 2024 Penerimaan Pembiayaan yang berasal dari

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya ditargetkan sebesar Rp.12.309.617.672,- sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan ditargetkan sebesar Rp.2.000.000.000,- yang diperuntukkan untuk penyertaan modal pada perusahaan daerah. Untuk lebih jelasnya tentang gambaran penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4
Realisasi dan Target/Proyeksi Pembiayaan
Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2025

| NO. | URAIAN | REALISASI 2022 *) | REALISASI 2023 *) | APBK 2024 | TARGET 2025 | PROYEKSI 2026 |
|-------|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------|---------------|
| 3 | PEMBIAYAAN DAERAH | 46,484,611,013 | 9,541,034,674 | 10,309,617,672 | - | - |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 48,484,611,013 | 10,541,034,674 | 12,309,617,672 | - | - |
| 3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya | 48,484,611,013 | 10,541,034,674 | 12,309,617,672 | - | - |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 2,000,000,000 | 1,000,000,000 | 2,000,000,000 | - | - |
| 3.2.1 | Penyertaan Modal Daerah | 2,000,000,000 | 1,000,000,000 | 2,000,000,000 | - | - |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) | 10,541,034,674 | 37,029,821,414 | - | - | - |

Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe, Tahun 2024.

*) *Audited*

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

KOTA LHOKSEUMAWE

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe disusun dengan berpedoman pada prioritas nasional dan prioritas Aceh untuk menjamin sinergisitas sasaran pokok pembangunan dan arah kebijakan pembangunan serta dalam rangka pencapaian sasaran pokok pembangunan nasional dengan tetap mengoptimalkan potensi dan keunggulan daerah.

Rencana kerja ini mempunyai peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, antara lain:

1. RKPK merupakan dokumen secara substansial merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program dalam RPK;
2. RKPK merupakan acuan dalam menentukan kebijakan umum dan prioritas program APBD; dan
3. RKPK berisi arahan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara strategi, arah kebijakan dan program pembangunan. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2025 diturunkan berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 serta target RPJPD Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025 pada periode ke-5. Selain itu perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kota

Lhokseumawe memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan nasional serta tujuan dan sasaran pembangunan Aceh dalam rangka mewujudkan keselarasan sasaran pembangunan antar tingkatan pemerintahan.

Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan pembangunan Kota Lhokseumawe sebagaimana tercantum dalam RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

| NO | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | KEBIJAKAN PEMBANGUNAN |
|-----------|---|--|--|---|--|
| 1. | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik | Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | Peningkatan tata kelola pemerintahan melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan yang terintegrasi | Melaksanakan reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan mengembangkan kebijakan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien |
| | | | | Menjamin sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah | |
| | | | | Penguatan sistem pengendalianintern pemerintah (SPIP) | |
| | | | | Penguatan system pengelolaankeuangan daerah yang efektif dan efisien | |
| | | | | Optimalisasi kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Publik | Meningkatkan sistem pelayanan publik | Meningkatkan manajemen pelayanan publik | |
| | | | | Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis e-government dan mendorong pemerintahan yang terbuka dan transparant (open government) | |
| | | | | Meningkatkan pembangunan demokrasi yang partisipatif | |

| NO | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | KEBIJAKAN PEMBANGUNAN |
|-----------|--------------------------------------|--|--|---|---|
| | | | | <p>Penataan kelembagaan, administrasi pemerintahan dan penyediaan serta peningkatan sarana prasarana pemerintahan</p> <p>Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;</p> <p>Peningkatan kapasitas PUG dan perlindungan perempuan dan anak.</p> <p>Peningkatan upaya pengamanan dan penertiban.</p> <p>Peningkatan mitigasi bencana dan peningkatan pelayanan tanggap darurat bencana.</p> | |
| 2. | Memperkuat pelaksanaan syariat islam | Menguatnya Penegakan Syariat Islam Dalam Bermasyarakat | <p>Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Syariat Islam</p> <p>Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf</p> | <p>Mensosialisasikan qanun dan aturan yang berkenaan dengan pelaksanaan nilai-nilai keislaman</p> <p>Peningkatan kapasitas instansi dan lembaga terkait dalam mendukung pengumpulan ZIS</p> | Memperkuat pelaksanaan syariat islam melalui penguatan kapasitas lembaga keagamaan, lembaga adat dan kemasyarakatan serta pengembangan budaya yang berazaskan nilai-nilai keislaman |

| NO | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | KEBIJAKAN PEMBANGUNAN |
|-----------|--|---|--|---|--|
| | | Meningkatnya Pemahaman dan Penghayatan masyarakat terhadap nilai Budaya | Peningkatan pemahaman dan penghayatan terhadap sejarah aceh dan nilai budaya dalam tatanan kehidupan | Pengembangan nilai budaya aceh dan penyebarluasan informasi sejarah kepada masyarakat | |
| 3. | Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia | Meningkatnya kualitas pendidikan | <p>Meningkatkan mutu infrastruktur dan proses pembelajaran pendidikan</p> <p>Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pendidikan</p> <p>Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan</p> | <p>Peningkatan kuantitas dan kualitas mutu sarana prasarana pendidikan dasar 9 tahun sesuai dengan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan.</p> <p>Penguatan Kelembagaan dan pengelolaan pendidikan secara berkelanjutan dengan prinsip-prinsip manajemen yang lebih jelas</p> <p>Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar</p> | Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan Mutu Pendidikan dan Kesehatan |
| | | Meningkatnya kualitas generasi muda | Membangun generasi muda yang handal dan berdaya saing tinggi melalui penguatan karakter, prestasi, | Peningkatan peran serta pemuda dalam mengisi pembangunan | |

| NO | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | KEBIJAKAN PEMBANGUNAN |
|-----------|---------------|---|---|---|------------------------------|
| | | | kreatifitas dan Inovasi generasi muda | | |
| | | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan | Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada fasilitas kesehatan dasar | |
| | | | | Peningkatan Ketersediaan sumber daya Kesehatan yang berkualitas dalam aspek sumber daya manusia (SDM) kesehatan, aspek pembiayaan, aspek perbekalan kesehatan dan farmasi serta aspek pemenuhan sarana prasarana fasilitas kesehatan sesuai standar | |
| | | | Meningkatkan budaya hidup sehat | Menjalin kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan | |
| | | | Meningkatkan pelayanan, Advokasi dan KIE Keluarga Berencana | Peningkatan kualitas pelayanan, Advokasi dan KIE keluarga berencana | |

| NO | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | KEBIJAKAN PEMBANGUNAN |
|-----------|--|---|--|---|---|
| 4. | Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Meningkatkan pengelolaan lingkungan dan penanganan sampah | Peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup melalui Perencanaan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup |
| 5. | Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing | Meningkatnya jumlah dan nilai investasi | Meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi yang kondusif | Peningkatan fasilitas dan promosi Investasi | Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing melalui Peningkatan kontinuitas, kuantitas dan kualitas produk pangan, pertanian dan perikanan serta Peningkatkan kapasitas tenaga kerja, pengembangan kesempatan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan |
| | | Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat | Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat | Menjamin adanya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin | |
| | | Meningkatkan Kesempatan Kerja | Meningkatkan Kompetensi, produktivitas dan Perlindungan Tenaga Kerja | Peningkatkan kapasitas tenaga kerja, pengembangan kesempatan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan | |
| | | Meningkatkan Daya Saing Daerah | Meningkatkan Usaha Perdagangan Industri UMKM yang kompetitif untuk penguatan Ekonomi | Peningkatan pemberdayaan usaha perdagangan, industri, koperasi, dan UMKM | |

| NO | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | KEBIJAKAN PEMBANGUNAN |
|-----------|--|---|---|--|--|
| | | | Mewujudkan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | Peningkatan kontinuitas, kuantitas dan kualitas produk pangan, pertanian dan perikanan | |
| | | | Mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal (syariat islam) | Meningkatkan kapasitas pelaku dan sarana prasarana pariwisata; | |
| 6. | Meningkatkan infrastruktur berkualitas | Meningkatnya Infrastruktur kota berkualitas | Meningkatkan aksesibilitas sarana prasarana jalan dan jembatan | Memastikan tersedianya kondisi jalan dan jembatan guna menunjang aktivitas perekonomian masyarakat | Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan dasar melalui perbaikan kualitas infrastruktur |
| | | | Meningkatkan kualitas kawasan permukiman | Melakukan Penanganan kawasan kumuh perkotaan secara terpadu | |
| | | | Meningkatkan akses sanitasi | Meningkatkan cakupan sanitasi layak | |
| | | | Meningkatkan kapasitas saluran drainase | Meningkatkan Pengendalian dan kapasitas drainase | |
| | | | Meningkatkan akses air minum | Meningkatkan ketersediaan dan pasokan sumber daya air minum | |
| | | | Menguatkan | Meningkatkan Pengelolaan dan | |

| NO | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | KEBIJAKAN PEMBANGUNAN |
|-----------|---------------|----------------|---|---|------------------------------|
| | | | Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung | |
| | | | | Peningkatan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang | |
| | | | Penataan dan pengembangan sistem keselamatan transportasi secara merata | Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi. | |

Sumber: RPK Lhokseumawe 2023-2026

4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional, Aceh dan Kota Lhokseumawe

Arah Kebijakan dan target makro Pembangunan Nasional, Aceh dan Kota Lhokseumawe dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Sasaran dan Target Makro Pembangunan Nasional, Aceh dan Kota Lhokseumawe

| No | Indikator | Target 2025 | | |
|----|----------------------------------|-------------|---------------|------------------|
| | | Nasional | Aceh | Kota Lhokseumawe |
| 1. | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5.3-5.6 | 4,28-4,51 | 4.40-4.50 |
| 2. | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 4.5-5.00 | 5,24 | 7.98-7.48 |
| 3. | Indeks Modal Manusia /IPM | 0.56 | 75,50-76,00 | 81.65-83.65 |
| 4. | Tingkat Kemiskinan (%) | 7.0-8.0 | 12,00 – 13,00 | 10.33-10.13 |
| 5. | Gini Rasio (indeks) | 0.379-0.382 | 0,290-0,293 | 0.293 |
| 6. | Intensitas Emisi GRK (%) | 38.6 | 36.08 | 33.89 |

Sumber: Rancangan RKP 2025, Ranwal RKPA 2025

Target yang tertera dalam tabel di atas tercantum dalam Rancangan RKP 2025 dan Rancangan Awal RKPA 2025. Sedangkan Target Kota Lhokseumawe Tahun 2025 merujuk pada capaian indikator makro tahun 2023 yang di publikasikan oleh BPS Kota Lhokseumawe dan Rankhir RPJPK Lhokseumawe 2025-2045.

4.3 Tema Pembangunan

Kebijakan pada RPKP Lhokseumawe Tahun 2025 memperhatikan tema Pembangunan Daerah yang telah tercantum pada RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026 yang mana pada Tahun 2025 telah ditetapkan yaitu: **“Meningkatkan Infrastruktur, Ekonomi Kota Lhokseumawe berkualitas dengan memperhatikan tata kelola lingkungan hidup yang baik serta peningkatan layanan publik melalui digitalisasi”**. Tema Pembangunan Daerah untuk RPKP

Tahun 2025 telah memperhatikan dan mempertimbangkan tema Pembangunan Aceh yang tercantum dalam RKPA 2025 yaitu: **“Mengurangi Ketimpangan Wilayah Melalui Pembangunan Infrastruktur Strategis dan Peningkatan Ekonomi yang Berkelanjutan”**. Tema Pembangunan ini juga sejalan dengan Tema RKP 2025 yang mengusung Tema **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**

4.4 Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari indikator meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan pencapaian pembangunan perlu fokus pada penanganan permasalahan yang spesifik dan sangat mendasar, sehingga diperlukan prioritas pembangunan untuk setiap tahunnya. Dalam merumuskan prioritas pembangunan selain mendukung kebijakan Rencana Pembangunan Kota, juga mempertimbangkan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta mensinergikan dengan rencana pembangunan Pemerintah Aceh.

Prioritas pembangunan pada RKPK 2025 disusun juga dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideology Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan industry Kreatif serta Mengembangkan

Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.

4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Dnerasi Z) dan Penyandang Disabilitas.
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemertaan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan.
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan.
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

sedangkan prioritas pembangunan Aceh pada RKPA Tahun 2025 adalah :

1. Memperkuat Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian memperkuat kemandirian pangan, ketahanan ekonomi yang produktif dan kompetitif
2. Memantapkan Kemandirian Pangan, Energi, Air serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif,koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi.
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Riset Inovasi pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda.

5. Memperkuat Hilirisasi Komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan.
6. Memperkuat Reformasi Birokrasi dan Tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah Aceh yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan RPK, serta isu strategis di tahun 2025, maka prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe untuk Tahun 2025 yaitu:

1. Infrastruktur
2. Lingkungan Hidup
3. Reformasi Birokrasi
4. Kesehatan
5. Pendidikan
6. Pertumbuhan Ekonomi
7. Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya

Adapun penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Lhokseumawe diarahkan dengan kebijakan yang telah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Aceh. Arah kebijakan tersebut adalah untuk memberikan perhatian pada upaya untuk bangkitnya perekonomian yang diarahkan pada penurunan tingkat kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran terbuka.

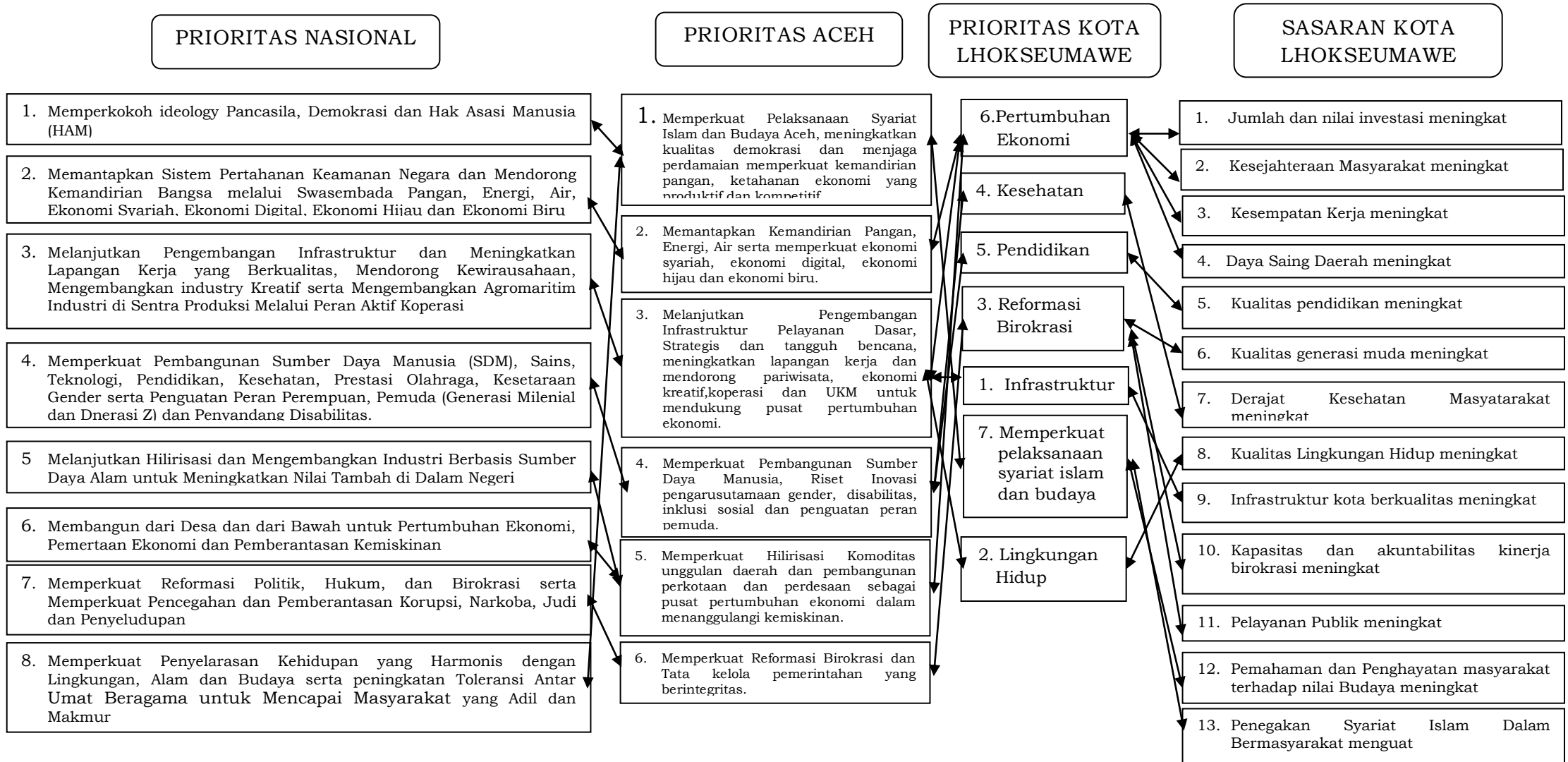
Selanjutnya sasaran daerah untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

1. jumlah dan nilai investasi meningkat
2. kesejahteraan Masyarakat meningkat
3. kesempatan Kerja meningkat
4. daya Saing Daerah meningkat
5. kualitas pendidikan meningkat
6. kualitas generasi muda meningkat

7. derajat Kesehatan Masyarakat meningkat
8. kualitas lingkungan hidup meningkat
9. infrastruktur kota berkualitas meningkat
10. kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi meningkat
11. pelayanan publik meningkat
12. pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap nilai budaya meningkat
13. penegakan syariat islam dalam bermasyarakat menguat

Secara lebih jelas pengelompokan sasaran pembangunan Kota Lhokseumawe berdasarkan pendekatan prioritas pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.1
Sinkronisasi Prioritas dan Sasaran Kota Lhokseumawe



Prioritas Kota Lhokseumawe telah selaras dengan prioritas nasional. Keselarasan dari masing masing prioritas dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.3
Penyandingan Prioritas Nasional dan Prioritas Kota Lhokseumawe

| No. | Prioritas Nasional | Prioritas Kota Lhokseumawe |
|------------|---|---|
| 1. | Memperkokoh ideology Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). | Reformasi Birokrasi |
| 2. | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru | Pertumbuhan Ekonomi |
| 3 | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan industry Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Infrastruktur |
| | | Pertumbuhan Ekonomi |
| 4. | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Dnerasi Z) dan Penyandang Disabilitas | Kesehatan |
| | | Pendidikan |
| 5. | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri | Pertumbuhan Ekonomi |
| 6. | Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemertaan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan | Infrastruktur |
| | | Pertumbuhan Ekonomi |
| 7. | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Reformasi Birokrasi |
| 8. | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur | Lingkungan Hidup |
| | | Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya |

Sumber: Hasil Olahan 2024

Adapun Prioritas Kota Lhokseumawe sasaran pembangunan Kota Lhokseumawe berdasarkan pendekatan prioritas pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Penyandingan Prioritas dan Sasaran Kota Lhokseumawe

| No. | Prioritas Kota Lhokseumawe | Sasaran Daerah | Indikator | Capaian 2023 | Target 2025 | |
|-----|---|---|--|--|--------------------|-----------|
| 1. | Infrastruktur | Meningkatnya Infrastruktur kota berkualitas | Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap | 69.52 | 75.19 | |
| | | | Persentase lingkungan permukiman kumuh | 0.26 | 0.27 | |
| | | | Persentase ketaatan terhadap RTRW | 86.00 | 98.00 | |
| | | | Indeks Layanan Infrastruktur Perhubungan | 0.41 | 0.50 | |
| 2. | Lingkungan Hidup | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Air | 58.57 | 61.23 | |
| | | | Indeks Kualitas Udara | 89.96 | 94.00 | |
| | | | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | 22.58 | 25.00 | |
| 3 | Reformasi Birokrasi | Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi | Nilai LPPD Kota | Rendah 2.3546 | Sangat Tinggi 4,22 | |
| | | | Nilai Evaluasi SAKIP | B 60.18 | B 61.00 | |
| | | | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | WTP | WTP | |
| | | | Tingkat Maturitas SPIP terintegrasi | Level 3 | Level 3 | |
| | | | Tingkat Manajemen Risiko | Level 3 | Level 3 | |
| | | | Meningkatnya Pelayanan Publik | A 83.51 | A 89.31 | |
| | | | | | | |
| 4 | Kesehatan | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Usia Harapan Hidup | 74.76 | 74.95 | |
| | | | | | | |
| 5 | Pendidikan | Meningkatnya kualitas pendidikan | Harapan lama sekolah | 15.54 | 15.92 | |
| | | | | | | |
| | | | Rata-rata lama sekolah | 11.27 | 11.50 | |
| 6 | Pertumbuhan Ekonomi | Meningkatnya kualitas generasi muda | Persentase Pemuda Berprestasi dan Atlit Berprestasi | 60.37 | 65.20 | |
| | | | Meningkatnya jumlah dan nilai investasi | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA) | 249.5 | 500 |
| | | | | Jumlah Investor (PMDN/ PMA) | 470 | 492 |
| | | | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | Tingkat kemiskinan | 10.73 | 10.33 |
| | | | Meningkatnya Kesempatan Kerja | Tingkat Pengangguran Terbuka | 8.78 | 7.98-7.48 |
| 7 | Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Meningkatnya Daya Saing Daerah | Meningkatnya Penegakan Syariat Islam Dalam Bermasyarakat | PDRB Perkapita | 56.60 | 59.08 |
| | | | | Laju Inflasi | 1.56 | 1.35 |
| | | | | Persentase Penegakan Pelanggaran Syariat Islam dalam Bermasyarakat | 100 | 100 |
| | | | | Persentase Penerima ZIS | 12.79 | 14.50 |
| | | Meningkatnya Pemahaman dan Penghayatan masyarakat terhadap nilai Budaya | Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah | 50.00 | 59.09 | |

Sumber: RPK Lhokseumawe 2023-2026, hasil Olahan

4.5 Sasaran Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Target sasaran pembangunan Kota Lhokseumawe pada Tahun 2025 ditetapkan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Target Sasaran Pembangunan Kota Lhokseumawe
Tahun 2025

| No | Tujuan / Sasaran | Indikator | Satuan | Target 2025 | Kondisi Akhir (2026) |
|-----------|---|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik | Indeks reformasi birokrasi | Kategori/Poin | B 60.01 | B 62.00 |
| 1.1 | Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi | Nilai LPPD Kota | Kategori/Poin | Sangat Tinggi 4,22 | Sangat Tinggi 4,25 |
| | | Nilai Evaluasi SAKIP | Kategori/Poin | B 61.00 | B 61.50 |
| | | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | Opini | WTP | WTP |
| | | Tingkat Maturitas SPIP terintegrasi | Level | Level 3 | Level 3 |
| | | Tingkat Manajemen Risiko | Level | Level 2 | Level 2 |
| 1.2 | Meningkatnya Pelayanan Publik | Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai "IKM" yang Baik | Kategori/Poin | A 89.31 | A 89.81 |
| 2. | Memperkuat pelaksanaan syariat islam | Indeks Pembangunan syariat islam | Indeks | 80.95 | 81.00 |
| 2.1 | Menguatnya Penegakan Syariat Islam Dalam Bermasyarakat | Persentase Penegakan Pelanggaran Syariat Islam dalam Bermasyarakat | Persen | 100 | 100 |
| | | Persentase Penerima ZIS | Rasio | 14.50 | 15.00 |
| 2.2 | Meningkatnya Pemahaman dan Penghayatan masyarakat terhadap nilai Budaya | Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah | Persen | 59.09 | 68.18 |
| 3. | Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indeks | 81.65- 83.65 | 83.65 |
| 3.1 | Meningkatnya kualitas pendidikan | Harapan lama sekolah | Tahun | 15.39 | 15.51 |
| | | Rata-rata lama sekolah | Persen | 11.50 | 11.75 |
| 3.2 | Meningkatnya kualitas generasi muda | Persentase organisasi pemuda yang aktif | Persen | 100 | 100 |
| 3.3 | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Usia Harapan Hidup | Tahun | 74.95 | 75.10 |
| 4. | Meningkatkan Tata Kelola Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Persen | 65.80 | 66.25 |

| No | Tujuan / Sasaran | Indikator | Satuan | Target 2025 | Kondisi Akhir (2026) |
|-----------|---|--|---------------|--------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.1 | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Air | Persen | 61.23 | 62.35 |
| | | Indeks Kualitas Udara | Persen | 94.00 | 95.00 |
| | | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | Persen | 25.00 | 26.00 |
| 5. | Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing | Persentase pertumbuhan ekonomi | Persen | 4.40 | 4.50 |
| 5.1 | Meningkatnya jumlah dan nilai investasi | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA) | Rp. Miliar | 500 | 500 |
| | | Jumlah Investor (PMDN/ PMA) | Perusahaan | 492 | 512 |
| 5.2 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | Tingkat kemiskinan | Persen | 10.33 | 10..13 |
| 5.3 | Meningkatnya Kesempatan Kerja | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 7.98 | 7.48 |
| 5.4 | Meningkatnya Daya Saing Daerah | PDRB Perkapita | Rp. (Juta) | 59.08 | 60.20 |
| | | Laju Inflasi | Persen | 1.35-2.00 | 2.05 |
| 6. | Meningkatkan infrastruktur berkualitas | Cakupan ketersediaan infrastruktur berkualitas | Persen | 37.73 | 39.56 |
| 6.1 | Meningkatnya Infrastruktur kota berkualitas | Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap | Persen | 75.19 | 78.91 |
| | | Persentase lingkungan permukiman kumuh | Persen | 0.27 | 0.21 |
| | | Persentase ketaatan terhadap RTRW | Persen | 90 | 95 |
| | | Indeks Layanan Infrastruktur Perhubungan | Rasio | 0.50 | 0.50 |

Sumber: RPK Lhokseumawe 2023-2026

Dalam pencapaian 13 sasaran, Pemerintah Kota menggunakan kerangka logis tiap sasaran dengan pembagian peran masing-masing bagi Perangkat Daerah sesuai aspek yang dibutuhkan sasaran. Perangkat Daerah ini juga yang sekaligus melakukan koordinasi lintas sektor untuk turut serta berbagi peran dalam mempercepat peningkatan pencapaian target sasaran dan arah kebijakan, intervensi kegiatan/sub kegiatan untuk masing-masing prioritas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Intervensi Mendukung Prioritas Kota Lhokseumawe

| No | Prioritas | Intervensi | OPD |
|-----------|---------------------|---|----------------|
| 1 | Reformasi Birokrasi | Pelayanan Informasi Publik | Diskominfo |
| | | Pembangunan dan/atau Pengembangan arsitektur dan peta rencana SPBE | Diskominfo |
| | | Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE | Diskominfo |
| | | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Bag Organisasi |
| | | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Inspektorat |
| | | Reviu Dokumen Perencanaan | Inspektorat |
| | | Kerjasama Pengawasan Internal | Inspektorat |
| | | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Inspektorat |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | BPKD |
| | | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah | BPKD |
| | | Pengelolaan Barang Milik Daerah | BPKD |
| | | Pelayanan pendaftaran penduduk | Disdukcapil |
| | | | |
| 2 | Pendidikan | Pembangunan Ruang Guru/kepala Sekolah/TU | Dinas PK |
| | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Dinas PK |
| | | Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah | Dinas PK |
| | | Pengadaan Mebel Sekolah | Dinas PK |
| | | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Dinas PK |
| | | Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah | Dinas PK |
| | | Pembangunan Ruang Kelas Baru | Dinas PK |
| | | Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah | Dinas PK |
| | | Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium | Dinas PK |

| No | Prioritas | Intervensi | OPD |
|-----------|---------------------|---|-------------------|
| | | Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah untuk Pengendalian Mutu Pendidikan | Sekretariat MPD |
| | | Evaluasi Pencapaian Standar Pendidikan Aceh pada setiap Satuan Pendidikan | Sekretariat MPD |
| 3 | Kesehatan | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Dinkes |
| | | Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Dinkes |
| | | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Dinkes |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Dinkes |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Dinkes |
| | | Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal | DP3AP2KB |
| | | Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | DP3AP2KB |
| | | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana | DP3AP2KB |
| | | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | DP3AP2KB |
| 4 | Pertumbuhan Ekonomi | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan klaster Kompetensi | DPMPTSP dan Naker |
| | | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | DPMPTSP dan Naker |
| | | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | DPMPTSP dan Naker |
| | | Penguatan Promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya | Disporapar |
| | | Pelaksanaan Operasi Pasar | Disperindagkop |
| | | Bantuan Pemberdayaan UMKM) | Disperindagkop |
| | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembibitan untuk masyarakat guna pengendalian inflasi | DKPPP |

| No | Prioritas | Intervensi | OPD |
|----|---|---|------------------------|
| | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Gerai Sehat dan Dapur Pangan Kota Lhokseumawe | DKPPP |
| | | Pengadaan Bibit Pisang Kepok pola parsial | DKPPP |
| | | Pembinaan Kelompok dan Pengadaan Sarpras Pengolahan dan Pengemasan Teri Lhokseumawe | DKPPP |
| 5 | Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Pembinaan Kelmbagaan Tilawatil Quran | DISPD |
| | | Pelaksanaan MTQ | DISPD |
| | | Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakkan Syariat Islam | DISPD |
| | | Pelatihan Penyelenggaraan Fardu Kifayah/Tajhiz Mayat | DISPD |
| | | Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Mesjid Agung Daerah | DISPD |
| | | Pemberdayaan dan Pendidikan Santri | DISPD |
| | | Pembinaan Manajemen Dayah | DISPD |
| | | Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Dayah/Pesantren | DISPD |
| | | Pendidikan Kader Ulama | Sekretariat MPU |
| | | Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam | Sekretariat MPU |
| | | Pengelolaan ZIS | Sekretariat Baitul Mal |
| | | Pembinaan Adat Seumapa/Narit maja, meunasib | Sekretariat MAA |
| | | Pemasyarakatan Adat Do Da Idi | Sekretariat MAA |
| | | Penguatan Peradilan Adat | Sekretariat MAA |
| | | Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat | Sekretariat MAA |
| 6 | Infrastruktur | Peningkatan Jalan Dsn. C Blang Poroh-Paya Punteut | PUPR |
| | | Pembangunan Jalan Blang Crum | PUPR |
| | | Pembangunan Saluran Jalan Listrik | PUPR |
| | | Pembangunan Saluran Jalan Merdeka Barat | PUPR |

| No | Prioritas | Intervensi | OPD |
|----|------------------|---|--------|
| | | Lanjutan Pembangunan Islamic Center | PUPR |
| | | Peningkatan Bangunan Gedung Terminal Penumpang Keude Aceh | Dishub |
| | | Pembangunan Prasarana Jalan Kota | Dishub |
| | | Penyediaan Perlengkapan Jalan | Dishub |
| 7 | Lingkungan Hidup | Sanitary Landfill TPA Alue Lim | DLH |
| | | Pengadaan Alat Berat Excavator | DLH |
| | | Pengadaan Bin Container | DLH |
| | | Peningkatan Pembangunan Taman Hiraq | DLH |

Sumber : SIPD-RI 2025

4.6 Penetapan Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe

Perumusan prioritas pembangunan daerah Kota Lhokseumawe yang akan dilaksanakan Tahun 2025, mempertimbangkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPK Tahun 2023, Target RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026 untuk Tahun 2025, Prioritas Nasional Tahun 2025 dan Prioritas Aceh Tahun 2025. Prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2025 yang telah ditetapkan tersebut, dicapai melalui pelaksanaan program-program prioritas. Program prioritas merupakan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang *outcome* nya ditujukan untuk mewujudkan sasaran daerah.

Anggaran untuk program prioritas dimaksud dipenuhi secara optimal sebelum mengalokasikan anggaran untuk program non prioritas atau program yang sifatnya mendukung (*supporting*). Berikut ini adalah Prioritas Pembangunan, Sasaran serta Program Prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 4.7
Program Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2025

| Prioritas | Sasaran | Program | Perangkat Daerah |
|---------------------|-------------------------------|---|------------------|
| Reformasi Birokrasi | Meningkatnya Pelayanan Publik | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | BPBD |
| | | Program Penanggulangan Bencana | BPBD |
| | | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non | BPBD |

| Prioritas | Sasaran | Program | Perangkat Daerah |
|------------------|----------------|---|-------------------------|
| | | Kebakaran | |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Satpol PP dan WH |
| | | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | Satpol PP dan WH |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | DP3AP2KB |
| | | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | DP3AP2KB |
| | | Program Perlindungan Perempuan | DP3AP2KB |
| | | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | DP3AP2KB |
| | | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak | DP3AP2KB |
| | | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | DP3AP2KB |
| | | Program Perlindungan Khusus Anak | DP3AP2KB |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Pertanian |
| | | Program Pengelolaan Tanah kosong | Dinas Pertanian |
| | | Program Penatagunaan Tanah | Dinas Pertanian |
| | | Program Pengurusan Hak Atas Tanah | Dinas Pertanian |
| | | Program Survei, Pengukuran Dan Pemetaan | Dinas Pertanian |
| | | Program Pengembangan Dan Pembinaan SDM Dan Kelembagaan Pertanian | Dinas Pertanian |
| | | Program Pengelolaan Sistem Informasi Pertanian | Dinas Pertanian |
| | | Program Penanganan Konflik, Sengketa Dan Perkara Pertanian | Dinas Pertanian |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Disdukcapil |
| | | Program Pendaftaran Penduduk | Disdukcapil |
| | | Program Pencatatan Sipil | Disdukcapil |
| | | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Disdukcapil |
| | | Program Pengelolaan Profil Kependudukan | Disdukcapil |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | DPMG |
| | | Program Administrasi Pemerintahan Desa | DPMG |
| | | Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | DPMG |

| Prioritas | Sasaran | Program | Perangkat Daerah |
|-----------|---|--|------------------|
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Diskominfo |
| | | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | Diskominfo |
| | | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Diskominfo |
| | | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | Diskominfo |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Disporapar |
| | | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Disporapar |
| | | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Disporapar |
| | | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | Disporapar |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Dispursip |
| | | Program Pembinaan Perpustakaan | Dispursip |
| | | Program Pengelolaan Arsip | Dispursip |
| | Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Setdako |
| | | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Setdako |
| | | Program Perekonomian Dan Pembangunan | Setdako |
| | Meningkatnya Pelayanan Publik | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Setwan |
| | | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | Setwan |
| | Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Bappeda |
| | | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Bappeda |
| | | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Bappeda |
| | | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah | Bappeda |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | BPKD |
| | | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | BPKD |

| Prioritas | Sasaran | Program | Perangkat Daerah |
|-----------|---|---|------------------------|
| | | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | BPKD |
| | | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | BPKD |
| | Meningkatnya Pelayanan Publik | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | BKPSDM |
| | | Program Kepegawaian Daerah | BKPSDM |
| | | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | BKPSDM |
| | Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Inspektorat |
| | | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Inspektorat |
| | | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | Inspektorat |
| | Meningkatnya Pelayanan Publik | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kecamatan Banda Sakti |
| | | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Kecamatan Banda Sakti |
| | | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Kecamatan Banda Sakti |
| | | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Kecamatan Banda Sakti |
| | | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kecamatan Banda Sakti |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kecamatan Blang Mangat |
| | | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Kecamatan Blang Mangat |
| | | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Kecamatan Blang Mangat |
| | | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Kecamatan Blang Mangat |
| | | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Kecamatan Blang Mangat |
| | | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kecamatan Blang Mangat |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kecamatan Muara Satu |
| | | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Kecamatan Muara Satu |
| | | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Kecamatan Muara Satu |
| | | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Kecamatan Muara Satu |
| | | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kecamatan Muara Satu |
| | | Program Penunjang Urusan | Kecamatan |

| Prioritas | Sasaran | Program | Perangkat Daerah |
|----------------------------|--|--|-------------------------|
| | | Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Muara Dua |
| | | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Kecamatan Muara Dua |
| | | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Kecamatan Muara Dua |
| | | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Kecamatan Muara Dua |
| | | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kecamatan Muara Dua |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kesbangpol |
| | | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | Kesbangpol |
| | | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Kesbangpol |
| | | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Kesbangpol |
| | | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | Kesbangpol |
| | | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Kesbangpol |
| Pendidikan | Meningkatnya kualitas pendidikan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Sekretariat MPD |
| | | Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh | Sekretariat MPD |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Dinas PK |
| | | Program Pengelolaan Pendidikan | Dinas PK |
| | | Program Pengembangan Kurikulum | Dinas PK |
| | | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | Dinas PK |
| | | Program Pengendalian Perizinan Pendidikan | Dinas PK |
| Pertumbuhan Ekonomi | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Sosial |
| | | Program Pemberdayaan Sosial | Dinas Sosial |
| | | Program Rehabilitasi Sosial | Dinas Sosial |
| | | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Dinas Sosial |
| | | Program Penanganan Bencana | Dinas Sosial |
| | | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | Dinas Sosial |

| Prioritas | Sasaran | Program | Perangkat Daerah |
|------------------|--|--|-------------------------|
| | Meningkatnya Kesempatan Kerja | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | DMPTSP dan Naker |
| | | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | DMPTSP dan Naker |
| | | Program Penempatan Tenaga Kerja | DMPTSP dan Naker |
| | | Program Hubungan Industrial | DMPTSP dan Naker |
| | Meningkatnya jumlah dan nilai investasi | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | DMPTSP dan Naker |
| | | Program Promosi Penanaman Modal | DMPTSP dan Naker |
| | | Program Pelayanan Penanaman Modal | DMPTSP dan Naker |
| | | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | DMPTSP dan Naker |
| | | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | DMPTSP dan Naker |
| | Meningkatnya Daya Saing Daerah | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | DKPPP |
| | | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | DKPPP |
| | | Program Penanganan Kerawanan Pangan | DKPPP |
| | | Program Pengawasan Keamanan Pangan | DKPPP |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Disperindagkop |
| | | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | Disperindagkop |
| | | Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi | Disperindagkop |
| | | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | Disperindagkop |
| | | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | Disperindagkop |
| | | Program Pengembangan UMKM | Disperindagkop |
| | | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Disporapar |
| | | Program Pemasaran Pariwisata | Disporapar |
| | | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Disporapar |
| | | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | DKPPP |
| | | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | DKPPP |

| Prioritas | Sasaran | Program | Perangkat Daerah |
|--|---|---|-------------------------|
| | | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | DKPPP |
| | | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | DKPPP |
| | | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | DKPPP |
| | | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | DKPPP |
| | | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | DKPPP |
| | | Program Penyuluhan Petanian | DKPPP |
| | | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Disperindagkop |
| | | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | Disperindagkop |
| | | Program Pengembangan Ekspor | Disperindagkop |
| | | Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen | Disperindagkop |
| | | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | Disperindagkop |
| | | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | Disperindagkop |
| Kesehatan | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Kesehatan |
| | | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | Dinas Kesehatan |
| | | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | | Program Pengendalian Penduduk | DP3AP2KB |
| | | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | DP3AP2KB |
| | | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | DP3AP2KB |
| Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Menguatnya Penegakan Syariat Islam Dalam Bermasyarakat | Program Pendidikan Dayah | DSIPD |

| Prioritas | Sasaran | Program | Perangkat Daerah |
|----------------------|--|--|-------------------------|
| | Meningkatnya Pemahaman dan Penghayatan masyarakat terhadap nilai Budaya | Program Pengembangan Kebudayaan | Dinas PK |
| | | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | Dinas PK |
| | | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | Dinas PK |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Sekretariat MAA |
| | | Program Majelis Adat Aceh (MAA) | Sekretariat MAA |
| | Menguatnya Penegakan Syariat Islam Dalam Bermasyarakat | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Sekretariat MPU |
| | | Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh | Sekretariat MPU |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Sekretariat Baitul Mal |
| | | Program Baitul Mal | Sekretariat Baitul Mal |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | DSIPD |
| | | Program Syariat Islam Aceh | DSIPD |
| Infrastruktur | Meningkatnya Infrastruktur kota berkualitas | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Dinas PUPR |
| | | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Dinas PUPR |
| | | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Dinas PUPR |
| | | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | Dinas PUPR |
| | | Program Penataan Bangunan Gedung | Dinas PUPR |
| | | Program Penyelenggaraan Jalan | Dinas PUPR |
| | | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Dinas PUPR |
| | | Program Kawasan Permukiman | Dinas PUPR |
| | | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | Dinas PUPR |
| | | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) | Dinas PUPR |

| Prioritas | Sasaran | Program | Perangkat Daerah |
|-------------------------|---|---|------------------|
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | DISHUB |
| | | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | DISHUB |
| Lingkungan Hidup | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | DLH |
| | | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | DLH |
| | | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | DLH |
| | | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) | DLH |
| | | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | DLH |
| | | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | DLH |
| | | Program Pengelolaan Persampahan | DLH |

Sumber: RPK Lhokseumawe 2023-2026, diolah

4.7 Sinkronisasi Prioritas Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal mengamanatkan Pemerintah Daerah melaksanakan SPM dalam memberikan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar kepada setiap warga negara. Dalam peraturan tersebut diamanatkan 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas: (1) pendidikan; (2) kesehatan; (3) pekerjaan umum dan penataan ruang; (4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (5) ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan (6) sosial. Untuk tahun 2025, Kota Lhokseumawe melaksanakan SPM tersinkronisasi dengan prioritas yang tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.8
Sinkronisasi SPM dan Prioritas Kota Lhokseumawe 2025

| No | Jenis SPM | Jenis Pelayanan Dasar Pada SPM Kota | Prioritas Kota Lhokseumawe | Perangkat Daerah |
|----|------------------|---|----------------------------|------------------|
| 1. | Pendidikan | 1. Pendidikan Dasar | Pendidikan | Dinas PK |
| | | 2. Pendidikan Kesetaraan | | |
| | | 3. Pendidikan Anak Usia Dini | | |
| 2. | Kesehatan | 1. Pelayanan kesehatan ibu hamil | Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | | 2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin | | |
| | | 3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir | | |
| | | 4. Pelayanan kesehatan balita | | |
| | | 5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | | |
| | | 6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif | | |
| | | 7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut | | |
| | | 8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi | | |
| | | 9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus | | |
| | | 10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat | | |
| | | 11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis | | |
| | | 12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) | | |
| 3. | Pekerjaan Umum | 1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari | Infrastruktur | Dinas PUPR |
| | | 2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik | | |
| 4. | Perumahan Rakyat | 1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota | Infrastruktur | Dinas PUPR |

| No | Jenis SPM | Jenis Pelayanan Dasar Pada SPM Kota | Prioritas Kota Lhoksemawe | Perangkat Daerah |
|----|------------------|--|---------------------------|------------------|
| | | 2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota | | |
| 5. | Trantibum linmas | 1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum | Reformasi Birokrasi | Satpol PP dan WH |
| | | 2. Pelayanan informasi rawan bencana | | BPBD |
| | | 3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | | |
| | | 4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | | |
| | | 5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | | |
| 6. | Sosial | 1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti | Pertumbuhan Ekonomi | Dinas Sosial |
| | | 2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti | | |
| | | 3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti | | |
| | | 4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti | | |
| | | 5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kabupaten/ kota | | |

Sumber: Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 dan Hasil Olahan 2024

4.8 Inovasi Pembangunan Tahun 2025

Inovasi daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya

saing Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, inovasi didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah melalui konsep *good governance*, Pemerintah Kota Lhokseumawe telah mengembangkan berbagai kreativitas dan inovasi. Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini telah menjadi sebuah keniscayaan. Pelayanan yang cepat, tepat dan efisien hanya akan dapat dipenuhi dengan kreasi dan terobosan yang inovatif. Data Inovasi Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe skala kota serta mendukung Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Kota Lhokseumawe Tahun 2024 terdapat pada Tabel berikut:

Tabel 4.9
Data Inovasi Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe
Tahun 2019-2024

| Prioritas Pembangunan Daerah | Nama Inovasi Daerah | | Uraian Singkat |
|--|----------------------------|---|---|
| Inovasi dalam rangka Reformasi Birokrasi (Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) | 1 | E-Kinerja Kota Lhokseumawe | Aplikasi pencatatan yang berbasis elektronik untuk melihat kegiatan kerja harian ASN di Kota Lhokseumawe. Melalui aplikasi ini atasan dapat menilai kinerja dan memonitoring kerja harian bawahannya. Atasan Langsung juga dapat menyetujui atau menolak pekerjaan harian yang dilakukan bawahannya apabila tidak sesuai dengan tupoksi dan arahan yang diberikan. Aplikasi e-Kinerja ini terintegrasi dengan Aplikasi Presensi Kota Lhokseumawe , apabila data kehadiran tidak tercatat di aplikasi presensi maka ASN tidak bisa mengisi kerja harian pada sistem sehingga dapat mempengaruhi pembayaran Tunjangan Prestasi Pegawai (TPP).hitung langsung oleh sistem yang memberi manfaat bagi Pegawai diLingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe |
| | 2 | Absensi Pegawai Berbasis Aplikasi Presensi Kota Lhokseumawe | Aplikasi Presensi Kota Lhokseumawe merupakan alat untuk mencatat jam kehadiran pegawai. Dalam mengisi aplikasi presensi, harus dilakukan di lokasi kantor masing-masing sehingga tercatat secara digital. Aplikasi ini terkoneksi dengan Aplikasi e-Kinerja Kota Lhokseumawe sehingga apabila ASN tidak tercatat kehadiran pada aplikasi presensi maka tidak dapat mengisi e-kinerja harian sehingga mempengaruhi kinerja ASN dan dapat dikontrol oleh atasan langsung untuk kehadiran pegawai melalui aplikasi e-kinerja Kota Lhokseumawe. |

| Prioritas Pembangunan Daerah | Nama Inovasi Daerah | Uraian Singkat |
|------------------------------|---|--|
| | 3 Percepatan Pencapaian Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan (PEKAD 3 IN 1 PLUS) | Pekad 3 in 1 Plus merupakan program pelayanan dalam meningkatkan pelayanan administrasi khususnya dalam kepemilikan dokumen kependudukan berupa perubahan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak plus Akta Kematian. Untuk saat ini Disdukcapil Kota Lhokseumawe memberikan pelayanan ini bekerjasama dengan pihak Rumah Sakit Ibu dan Anak "ABBY". Pihak Rumah Sakit bertugas membantu mengumpulkan kelengkapan persyaratan pembuatan dokumen kependudukan. Ketika pasien/keluarga pasien keluar dari Rumah Sakit, pasien/keluarga pasien sudah memiliki dokumen kependudukan yang diperlukan. |
| | 4 Layanan CAWAPRES (Chat WA Pajak dan Retribusi) | Layanan CAWAPRES adalah layanan untuk memberikan informasi kepada Wajib Pajak yang akan membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tanpa harus mendatangi Kantor layanan PBB atau Kantor Geuchik. Pembayaran PBB dapat dilakukan secara online pada Aplikasi Action Bank Aceh. |
| | 5 Sistem Informasi Gampong dan Layanan Online (SIGAMLON) | SIGAMLON merupakan layanan Website yang menunjukkan informasi publik kegiatan Gampong Kuta Blang serta informasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan SIGAMLON dapat mengurus surat menyurat yang menjadi kewenangan Keuchik dengan berbekal NIK dan masyarakat Gampong Kuta Blang dapat memantau tahapan proses pelayanan surat sampai dengan selesai. |
| | 6 SISTEM PERIZINAN DAN LAYANAN ANTAR JEMPUT IZIN (SIPERI WET WET) | Siperi Wet-Wet adalah pelayanan perizinan jemput bola untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan edukasi terkait perizinan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat sehingga pelayanan perizinan lebih optimal. |

| Prioritas Pembangunan Daerah | Nama Inovasi Daerah | | Uraian Singkat |
|------------------------------|---------------------|---|--|
| | 7 | Klinik Pelayanan Perizinan Sistem Online dan Verifikasi Cepat (KLIPPER SINOVAC) | Layanan untuk mendapatkan informasi tentang Perizinan Reklame, izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Usaha serta Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Chat WA untuk memberikan informasi, bantuan dan konsultasi mengenai prosedur permohonan perizinan. |
| | 8 | WHATSAPP DAN ON CALL | Whatsaap & On Call adalah pelayanan bagi masyarakat untuk membuat izin usaha secara online melalui fitur Sistem Online Submission dan si Cantik Cloud sehingga pelaku usaha mendapatkan informasi secara detil melalui fitur tracking sistem untuk mengetahui status permohonan secara real time. |
| | 9 | Database Hasil Penelitian, Informasi Pembangunan dan Inovasi Daerah (DasiBangSida) | <p>Pelaksanaan Pembangunan di Kota Lhokseumawe saat ini sering tidak mengacu pada dokumen-dokumen kajian perencanaan yang telah disusun. Banyak terjadi ketidaksinkronan antara dokumen perencanaan pembangunan dengan program kegiatan yang dilakukan. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan untuk mengikuti keinginan kepala daerah. Selain itu juga belum adanya data dan informasi terkini dan terintegrasi, sehingga menyebabkan semakin rendahnya peran penelitian dan pengembangan dalam mendorong terciptanya pola <i>research-based policy</i> di Kota Lhokseumawe. akurat sebagai bahan pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan. Untuk penyediaan data dan informasi yang akurat, perlu dilakukan secara terintegrasi melalui media online.</p> <p>Atas dasar tersebut, disusunlah layanan Database Hasil Penelitian, Informasi Pembangunan dan Inovasi Daerah yang disingkat dengan DasiBangSida dengan alamat website : https://dasibangsida.lhokseumawekota.go.id/.</p> |

| Prioritas Pembangunan Daerah | Nama Inovasi Daerah | Uraian Singkat |
|------------------------------|---|---|
| | 10 Belanja Berbasis Kinerja dan Capaian Program yang Terarah “BEK CAPRAH” Melalui Kamus Usulan Perangkat Daerah | Inovasi atau Aksi Perubahan dengan Moto “Bek Caprah” dapat diartikan Jangan Sembarangan terinspirasi oleh hasil Evaluasi RKPK/ Renja Perangkat Daerah yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan yang berkinerja. Kamus Usulan adalah daftar kegiatan yang terperinci yang diusulkan oleh Perangkat Daerah yang tercantum dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang dapat dipilih untuk diusulkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun terobosan yang dilakukan adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Membatasi Kamus Usulan pada perumusan masalah pada tahapan penyusunan rancangan awal RKPK/Renja. • Program dan Kegiatan prioritas tahunan Perangkat Daerah harus didahulukan karena keterbatasan Pagu Indikatif akibat Kapasitas Riil Keuangan Daerah yang rendah. |

Sumber : Hasil Olahan Bappeda Kota Lhokseumawe, 2024

4.9 Pokok-Pokok Pikiran DPRK Lhokseumawe

Pokok-pokok pikiran DPRK dalam kerangka penyusunan RKPK Tahun 2025 berisi saran dan pendapat DPRK yang merupakan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaiansasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPD. Pentingnya pokok-pokok pikiran ini adalah untuk memastikan aspirasi masyarakat yang ditampung anggota DPRK dapat menjadi Rencana Kerja Pemerintah Kota di tahun yang akan datang.

Tujuan disusunnya pokok-pokok pikiran DPRD adalah sebagai berikut:

1. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam menyusun dokumen RKPK Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe 2025;
2. Mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan RPJPK dan RPK;
3. Mewujudkan aspirasi masyarakat Kota Lhokseumawe dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRK Lhokseumawe; dan
4. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Lhokseumawe yang lebih baik.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

KOTA LHOKSEUMAWE

Rencana kerja dan pendanaan dalam RKPK Lhokseumawe Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Kota (RPK) Lhokseumawe Tahun 2023-2026 dan evaluasi pembangunan dan capaian kinerja yang telah dicapai dalam RKPK Lhokseumawe Tahun 2023. Disamping itu, rencana kerja dirumuskan atas aspirasi dan kepentingan masyarakat yang dirangkum dari hasil Musrenbang dan dituangkan ke dalam program, kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang diperoleh dari sistem perencanaan terpadu berbasis elektornik dalam Aplikasi SIPD sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang mengharuskan terwujudnya integrasi proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut dirangkum dan disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Kueangan Daerah, sehingga memberi manfaat dan memiliki nilai kegunaan yang memadai dalam proses perencanaan pembangunan untuk masyarakat.

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2025 diprioritaskan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota dalam memberikan perhatian pada upaya peningkatan perekonomian yang diarahkan pada penurunan tingkat kemiskinan dan penurunan tingkat

pengangguran terbuka, peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum yang layak. Pemenuhan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian program dan kegiatan untuk memenuhi target capaian kinerja pembangunan yang optimal.

Prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tertuang di dalam RKPK ini bersifat indikatif dan tentatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku. Perencanaan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan dalam RPK Lhokseumawe 2023-2026 baik indikator sasaran maupun program. Usulan juga memperhatikan hal-hal strategis sesuai dengan ketugasan Perangkat Daerah masing-masing. Sedangkan usulan pada sub kegiatan dan output sesuai urutan prioritas, yang nantinya juga bisa menjadi dasar pemilihan saat terjadi efisiensi pada output maupun target, ketika ada keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

Prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam RKPK ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran untuk Tahun 2025. Prioritas Program dalam RKPK tahun 2025 terdiri dari program internal dan program eksternal yang akan dilaksanakan secara terpadu meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Di sisi lain, dalam RKPK juga memuat mengenai program dan kegiatan dengan pendanaan yang bersumber dari Dana Kekhususan Aceh dengan Program dan Kegiatan Kekhususan Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.1

Rekapitulasi Usulan Program dan Kegiatan Kekhususan Aceh Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025

| No | Urusan | Perangkat Daerah | Anggaran (Rp) |
|----|------------|---------------------------------------|---------------|
| 1. | Pendidikan | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | 150.000.000 |

| No | Urusan | Perangkat Daerah | Anggaran (Rp) |
|--------------|-----------------|---|-----------------------|
| | | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah | 5.626.886.400 |
| 2. | Pertanahan | Dinas Pertanahan | 405.000.000 |
| 3. | Kebudayaan | Sekretariat Majelis Adat Aceh | 195.000.000 |
| 4. | Kewilayahan | Kecamatan Banda Sakti | 15.000.000 |
| | | Kecamatan Blang Mangat | 15.000.000 |
| | | Kecamatan Muara Satu | 15.000.000 |
| | | Kecamatan Muara Dua | 17.000.000 |
| 5. | Kekhususan Aceh | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | 155.917.000 |
| | | Sekretariat Baitul Mal | 7.127.160.050 |
| | | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah | 3.154.861.600 |
| TOTAL | | | 16.876.825.050 |

Sumber : SIPD-RI, diolah 2024

Untuk mengetahui rincian usulan program, kegiatan dan sub kegiatan Kekhususan Aceh Tahun 2025 beserta indikasi pendanaan dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut.

Tabel 5.2
Usulan Program dan Kegiatan Kekhususan Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2025

| No | Perangkat Daerah | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Keluaran | Usulan Anggaran |
|--|--|---|--|---|---------------------|-----------------|
| | | | | | Target Kinerja | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | |
| 1 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH | Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh | Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh | 1 Satuan Pendidikan | 30,000,000 |
| | | | | Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah | 1 Dokumen | 20,000,000 |
| | | | Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh | Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dayah Salafiah dan Diniyah | 35 Orang | 40,000,000 |
| | | | Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh | Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh | 2 Satuan Pendidikan | 25,000,000 |
| | | | | Evaluasi Pencapaian Standar Pendidikan Aceh pada Setiap Satuan Pendidikan di Aceh | 3 Satuan Pendidikan | 25,000,000 |
| | | | | Penilaian Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | 2 Satuan Pendidikan | 10,000,000 |
| 2 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah | PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH | Pengelolaan Pendidikan Dayah | Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah | 5 Unit | 613,644,800 |

| No | Perangkat Daerah | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Keluaran | Usulan Anggaran |
|--|------------------|----------------------------------|---|--|----------------------|----------------------|
| | | | | | Target Kinerja | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| | | | | Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah | 2346 Orang | 4,428,241,600 |
| | | | | Pemberdayaan dan Pendidikan Santri | 55 Peserta Didik | 425,000,000 |
| | | | | Pembinaan Manajemen Dayah | 50 Satuan Pendidikan | 25,000,000 |
| | | | | Penelitian dan Pengembangan Dayah | 88 Satuan Pendidikan | 30,000,000 |
| | | | | Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaan Dayah | 10 Satuan Pendidikan | 20,000,000 |
| | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah | 2 Dokumen | 25,000,000 |
| | | | | Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Dayah/Pesantren | 10 Satuan Pendidikan | 25,000,000 |
| | | | | Fasilitasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian | 20 Satuan Pendidikan | 15,000,000 |
| | | | | Fasilitasi Penyusunan Kurikulum Dayah Salafiah | 2 Dokumen | 10,000,000 |
| | | | | Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh | 2 Dokumen | 10,000,000 |
| JUMLAH USULAN URUSAN PENDIDIKAN | | | | | | 5,776,886,400 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | | | | | |
| 1 | Dinas Pertanahan | PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG | Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong | Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong | 3 Laporan | 35,000,000 |
| | | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | 4 Laporan | 25,000,000 |
| | | | | Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota | 4 Dokumen | 50,000,000 |

| No | Perangkat Daerah | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Keluaran | Usulan Anggaran |
|--|------------------|---|---|---|----------------|--------------------|
| | | | | | Target Kinerja | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota | 4 Dokumen | 25,000,000 |
| | | PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH | Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah | Inventarisasi Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah | 5 Laporan | 35,000,000 |
| | | PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN | Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Gampong | Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda | 5 Dokumen | 50,000,000 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN | Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan Pertanahan Kabupaten | Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanahan | 5 Dokumen | 20,000,000 |
| | | | Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan SDM Pertanahan | Pembinaan Pertanahan bagi Imeum Mukim/Keuchik | 20 Orang | 20,000,000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN | Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH) | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH) | 4 Dokumen | 50,000,000 |
| | | | | Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH) | 1 Dokumen | 25,000,000 |
| | | PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN | Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan | Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 35,000,000 |
| | | | | Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan | 7 Layanan | 35,000,000 |
| JUMLAH USULAN URUSAN PERTANAHAN | | | | | | 405,000,000 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | | | |

| No | Perangkat Daerah | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Keluaran | Usulan Anggaran |
|--|-------------------------------|--|---|--|----------------|--------------------|
| | | | | | Target Kinerja | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA) | Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat | Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional | 3 Laporan | 45,000,000 |
| | | | | Pemasyarakatan Adat Do Da Idi | 2 Lembaga | 30,000,000 |
| | | | | Sosialisasi Adat Istiadat | 50 Orang | 25,000,000 |
| | | | | Pembinaan Keluarga Meudadab dan Adat Perkawinan | 2 Keluarga | 10,000,000 |
| | | | | Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang | 2 Dokumen | 20,000,000 |
| | | | Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat | Penguatan Peradilan Adat | 50 Orang | 20,000,000 |
| | | | | Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas) | 5 Dokumen | 15,000,000 |
| | | | | Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat | 50 Orang | 10,000,000 |
| | | | Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat | Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat | 50 Orang | 20,000,000 |
| JUMLAH USULAN URUSAN KEBUDAYAAN | | | | | | 195,000,000 |
| UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | |
| 1 | Kecamatan Banda Sakti | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Pemberdayaan Mukim | Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim | 12 Orang | 15,000,000 |
| 2 | Kecamatan Blang Mangat | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Pemberdayaan Mukim | Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim | 1 Orang | 15,000,000 |

| No | Perangkat Daerah | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Keluaran | Usulan Anggaran |
|--|---|--|--|---|----------------|-------------------|
| | | | | | Target Kinerja | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 3 | Kecamatan Muara Satu | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Pemberdayaan Mukim | Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim | 8 Orang | 15,000,000 |
| 4 | Kecamatan Muara Dua | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Pemberdayaan Mukim | Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim | 6 Orang | 17,000,000 |
| JUMLAH USULAN UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | 62,000,000 |
| UNSUR KEKHUSUSAN ACEH | | | | | | |
| 1 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH | Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama | Pendidikan Kader Ulama | 100 Orang | 70,917,000 |
| | | | | Muzakarah Masalah Keagamaan | 1 Laporan | 30,000,000 |
| | | | | Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam | 1 Laporan | 30,000,000 |
| | | | | Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah | 40 Orang | 25,000,000 |
| 2 | Sekretariat Baitul Mal | PROGRAM BAITUL MAL | Pengelolaan ZISWAF | Penyusunan Perencanaan ZISWAF | 1 Dokumen | 10,000,000 |
| | | | Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal | Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran ZISWAF | 1000 Orang | 20,000,000 |
| | | | | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM | 6 Dokumen | 25,000,000 |
| | | | | Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal | 5 Dokumen | 20,000,000 |
| | | | Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir | 1145 Orang | 1,145,000,000 |

| No | Perangkat Daerah | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Keluaran | Usulan Anggaran |
|----|--|----------------------------|---|--|----------------|-----------------|
| | | | | | Target Kinerja | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| | | | | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin | 1349 Orang | 2,520,000,000 |
| | | | | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil | 120 Orang | 694,508,119 |
| | | | | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf | 15 Orang | 30,000,000 |
| | | | | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin | 6 Orang | 12,500,000 |
| | | | | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah | 60 Orang | 60,000,000 |
| | | | | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil | 1040 Orang | 1,120,000,000 |
| | | | | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq | 330 Orang | 1,470,151,931 |
| 3 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah | PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH | Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam | Pelatihan Mawaris | 68 Orang | 25,000,000 |
| | | | | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariat Islam | 85 Orang | 35,000,000 |
| | | | | Seminar Problematika Syariat Islam | 80 Orang | 25,000,000 |
| | | | | Pembinaan Mental Spritual Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat | 85 Orang | 50,000,000 |
| | | | Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran | Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran | 2 Lembaga | 25,000,000 |
| | | | | Pelaksanaan MTQ | 699 Orang | 860,000,000 |
| | | | Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama | Working Group Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam | 2 Dokumen | 20,000,000 |

| No | Perangkat Daerah | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Keluaran | Usulan Anggaran |
|---|------------------|---------|--|---|----------------|-----------------------|
| | | | | | Target Kinerja | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| | | | Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam | Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakkan Syariat Islam | 1 Dokumen | 230,000,000 |
| | | | | Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyrakatan | 100 Orang | 50,000,000 |
| | | | | Pelaksanaan Cerdas Cermat Syariat Islam | 100 Orang | 50,000,000 |
| | | | | Penyediaan, Pendistribusian dan Pengawasan Sarana Peribadatan | 111 Unit | 139,631,600 |
| | | | Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam | Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman | 1 Laporan | 25,000,000 |
| | | | | Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imeum Masjid/Meunasah dalam Pelaksanaan Syariat Islam | 100 Orang | 35,000,000 |
| | | | | Pelatihan Penyelenggaraan Fardu Kifayah/Tajhiz Mayat | 145 Orang | 50,000,000 |
| | | | | Pembinaan Badan Kemakmuran Masjid/Meunasah/Mushalla | 20 Orang | 900,230,000 |
| | | | | Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam | 6 Laporan | 225,000,000 |
| | | | | Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah | 300 Orang | 280,000,000 |
| | | | Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Agung Daerah | Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Agung Daerah | 2 Lembaga | 80,000,000 |
| | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Masjid Agung Daerah | 8 Unit | 50,000,000 |
| JUMLAH USULAN UNSUR KEKHUSUSAN ACEH | | | | | | 10,437,938,650 |
| TOTAL USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN KEKHUSUSAN ACEH TAHUN 2025 | | | | | | 16,876,825,050 |

Rencana program tahun 2025 pada Bab V disusun berdasarkan prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2025 sebagaimana dijabarkan pada Bab IV, sedangkan uraian rencana program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2025 disusun berdasarkan urusan yang ditangani oleh masing-masing Perangkat Daerah, maka diperlukan sinkronisasi antara pembagian rencana program per prioritas pembangunan dengan pembagian rencana program/kegiatan/sub kegiatan per Perangkat Daerah. Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.

Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah mengacu pada program prioritas pembangunan RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026 tahun kedua, di mana prioritas program tersebut telah menggambarkan target indikator capaian kinerja selama 4 (empat) tahun. Program prioritas pembangunan daerah dalam RPK Lhokseumawe dijabarkan oleh Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah, masing-masing program dijabarkan kedalam kegiatan disertai pagu dan target kinerja.

Tabel 5.3

Rekapitulasi Pagu Anggaran Kota Lhokseumawe Tahun 2025 Pendukung Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe

| No | Prioritas Pembangunan | Pagu Anggaran | Persen |
|--------------|---|------------------------|---------------|
| 1 | Reformasi Birokrasi | 308.149.287.092 | 37,75 |
| 2 | Pendidikan | 209.690.217.108 | 25,69 |
| 3 | Pertumbuhan Ekonomi | 33.145.391.706 | 4,06 |
| 4 | Kesehatan | 108.266.309.068 | 13,26 |
| 5 | Memperkuat Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya | 27.875.533.826 | 3,41 |
| 6 | Infrastruktur | 83.485.465.367 | 10,23 |
| 7 | Lingkungan Hidup | 45.772.252.067 | 5,61 |
| Total | | 816.772.252.067 | 100 |

Sumber: Data diolah 2024

Untuk lebih jelas program prioritas pembangunan untuk Prioritas Reformasi Birokrasi beserta Perangkat Daerah dan Pagu Anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4
Program Prioritas Reformasi Birokrasi
Kota Lhokseumawe Tahun 2025

| Prioritas | Sasaran | Program | RKPK | Perangkat Daerah |
|---------------------|-------------------------------|---|---------------|-------------------------|
| Reformasi Birokrasi | Meningkatnya Pelayanan Publik | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 3,764,366,445 | BPBD |
| | | Program Penanggulangan Bencana | 950,000,000 | BPBD |
| | | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | 175,000,000 | BPBD |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 5,999,379,659 | Satpol PP dan WH |
| | | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | 738,022,400 | Satpol PP dan WH |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 3,779,992,000 | DP3AP2KB |
| | | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | 45,000,000 | DP3AP2KB |
| | | Program Perlindungan Perempuan | 230,000,000 | DP3AP2KB |
| | | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | 15,000,000 | DP3AP2KB |
| | | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak | 20,000,000 | DP3AP2KB |
| | | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | 122,000,000 | DP3AP2KB |
| | | Program Perlindungan Khusus Anak | 323,000,000 | DP3AP2KB |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 3,460,195,200 | Dinas Pertanahan |
| | | Program Pengelolaan Tanah kosong | 35,000,000 | Dinas Pertanahan |
| | | Program Penatagunaan Tanah | 100,000,000 | Dinas Pertanahan |
| | | Program Pengurusan Hak Atas Tanah | 35,000,000 | Dinas Pertanahan |
| | | Program Survei, Pengukuran Dan Pemetaan | 50,000,000 | Dinas Pertanahan |
| | | Program Pengembangan Dan Pembinaan SDM Dan Kelembagaan Pertanahan | 40,000,000 | Dinas Pertanahan |
| | | Program Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan | 75,000,000 | Dinas Pertanahan |

| Prioritas | Sasaran | Program | RKPK | Perangkat Daerah |
|-----------|---|---|----------------|------------------|
| | | Program Penanganan Konflik, Sengketa Dan Perkara Pertanahan | 70,000,000 | Dinas Pertanahan |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 3,632,825,424 | Disdukcapil |
| | | Program Pendaftaran Penduduk | 205,000,000 | Disdukcapil |
| | | Program Pencatatan Sipil | 135,000,000 | Disdukcapil |
| | | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 650,000,000 | Disdukcapil |
| | | Program Pengelolaan Profil Kependudukan | 15,000,000 | Disdukcapil |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 2,960,838,812 | DPMG |
| | | Program Administrasi Pemerintahan Desa | 230,000,000 | DPMG |
| | | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | 494,923,821 | DPMG |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 2,406,915,138 | Diskominfo |
| | | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | 90,000,000 | Diskominfo |
| | | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | 2,023,806,796 | Diskominfo |
| | | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | 90,000,000 | Diskominfo |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 3,182,833,915 | Disporapar |
| | | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | 800,000,000 | Disporapar |
| | | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | 2,351,000,000 | Disporapar |
| | | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | 1,375,000,000 | Disporapar |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 2,727,808,624 | Dispursip |
| | | Program Pembinaan Perpustakaan | 190,000,000 | Dispursip |
| | | Program Pengelolaan Arsip | 30,000,000 | Dispursip |
| | Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 29,474,606,520 | Setdako |
| | | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | 1,370,000,000 | Setdako |
| | | Program Perekonomian Dan Pembangunan | 635,000,000 | Setdako |
| | Meningkatnya Pelayanan Publik | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 20,088,773,240 | Setwan |
| | | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | 4,056,000,000 | Setwan |

| Prioritas | Sasaran | Program | RKPK | Perangkat Daerah |
|-----------|---|--|-----------------|------------------------|
| | Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 6,077,368,140 | Bappeda |
| | | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 1,017,276,700 | Bappeda |
| | | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 850,061,630 | Bappeda |
| | | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah | 600,000,000 | Bappeda |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 17,096,672,934 | BPKD |
| | | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | 124.734.132.920 | BPKD |
| | | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | 1.070.000.000 | BPKD |
| | | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | 2,235,000,000 | BPKD |
| | Meningkatnya Pelayanan Publik | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 27,350,176,037 | BKPSDM |
| | | Program Kepegawaian Daerah | 1,599,998,400 | BKPSDM |
| | | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | 960,500,000 | BKPSDM |
| | Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 7,380,633,505 | Inspektorat |
| | | Program Penyelenggaraan Pengawasan | 1,395,000,000 | Inspektorat |
| | | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | 410,000,000 | Inspektorat |
| | Meningkatnya Pelayanan Publik | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 2,826,706,800 | Kecamatan Banda Sakti |
| | | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 190,000,000 | Kecamatan Banda Sakti |
| | | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | 15,000,000 | Kecamatan Banda Sakti |
| | | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 35,000,000 | Kecamatan Banda Sakti |
| | | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 75,000,000 | Kecamatan Banda Sakti |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 2,090,276,924 | Kecamatan Blang Mangat |
| | | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 10,000,000 | Kecamatan Blang Mangat |
| | | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 190,000,000 | Kecamatan Blang Mangat |
| | | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | 20,000,000 | Kecamatan Blang Mangat |

| Prioritas | Sasaran | Program | RKPK | Perangkat Daerah |
|--------------|---------|--|------------------------|------------------------|
| | | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 35,000,000 | Kecamatan Blang Mangat |
| | | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 80,000,000 | Kecamatan Blang Mangat |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 2,246,683,473 | Kecamatan Muara Satu |
| | | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 190,000,000 | Kecamatan Muara Satu |
| | | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | 15,000,000 | Kecamatan Muara Satu |
| | | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 30,000,000 | Kecamatan Muara Satu |
| | | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 80,000,000 | Kecamatan Muara Satu |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 2,413,983,155 | Kecamatan Muara Dua |
| | | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 192,000,000 | Kecamatan Muara Dua |
| | | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | 15,000,000 | Kecamatan Muara Dua |
| | | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 35,000,000 | Kecamatan Muara Dua |
| | | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 70,000,000 | Kecamatan Muara Dua |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 2,585,528,480 | Kesbangpol |
| | | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | 1,000,000,000 | Kesbangpol |
| | | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | 680,000,000 | Kesbangpol |
| | | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 250,000,000 | Kesbangpol |
| | | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | 220,000,000 | Kesbangpol |
| | | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial | 540,000,000 | Kesbangpol |
| Total | | | 308,149,287,092 | 37.75 |

Sumber: Data diolah 2024

Selanjutnya program prioritas pembangunan untuk Prioritas Pendidikan beserta Perangkat Daerah dan Pagu Anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5
Program Prioritas Pendidikan
Kota Lhokseumawe Tahun 2025

| Prioritas | Sasaran | Program | RKPK | Perangkat Daerah |
|--------------|----------------------------------|---|------------------------|------------------|
| Pendidikan | Meningkatnya kualitas pendidikan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1,560,038,870 | Sekretariat MPD |
| | | Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh | 150,000,000 | Sekretariat MPD |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 151,137,857,638 | Dinas PK |
| | | Program Pengelolaan Pendidikan | 56,477,320,600 | Dinas PK |
| | | Program Pengembangan Kurikulum | 200,000,000 | Dinas PK |
| | | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | 100,000,000 | Dinas PK |
| | | Program Pengendalian Perizinan Pendidikan | 65,000,000 | Dinas PK |
| Total | | | 209,690,217,108 | 25.69 |

Sumber: Data diolah 2024

Program prioritas pembangunan untuk Prioritas Pertumbuhan Ekonomi beserta Perangkat Daerah dan Pagu Anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.6
Program Prioritas Pertumbuhan Ekonomi
Kota Lhokseumawe Tahun 2025

| Prioritas | Sasaran | Program | RKPK | Perangkat Daerah |
|---------------------|--|---|---------------|------------------|
| Pertumbuhan Ekonomi | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 3,264,523,880 | Dinas Sosial |
| | | Program Pemberdayaan Sosial | 190,000,000 | Dinas Sosial |
| | | Program Rehabilitasi Sosial | 863,000,000 | Dinas Sosial |
| | | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | 40,000,000 | Dinas Sosial |
| | | Program Penanganan Bencana | 25,000,000 | Dinas Sosial |
| | | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | 15,000,000 | Dinas Sosial |
| | Meningkatnya Kesempatan Kerja | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 5,842,556,333 | DMPTSP dan Naker |
| | | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | 115,000,000 | DMPTSP dan Naker |
| | | Program Penempatan Tenaga Kerja | 115,000,000 | DMPTSP dan Naker |

| Prioritas | Sasaran | Program | RKPK | Perangkat Daerah |
|-----------|--|--|---------------|------------------|
| | | Program Hubungan Industrial | 50,000,000 | DMPTSP dan Naker |
| | Meningkatnya jumlah dan nilai investasi | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | 15,000,000 | DMPTSP dan Naker |
| | | Program Promosi Penanaman Modal | 30,000,000 | DMPTSP dan Naker |
| | | Program Pelayanan Penanaman Modal | 100,000,000 | DMPTSP dan Naker |
| | | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | 669,159,000 | DMPTSP dan Naker |
| | | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | 10,000,000 | DMPTSP dan Naker |
| | Meningkatnya Daya Saing Daerah | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 8,148,510,690 | DKPPP |
| | | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | 255,000,000 | DKPPP |
| | | Program Penanganan Kerawanan Pangan | 40,000,000 | DKPPP |
| | | Program Pengawasan Keamanan Pangan | 10,000,000 | DKPPP |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 4,686,401,368 | Disperindagkop |
| | | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | 10,000,000 | Disperindagkop |
| | | Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi | 10,000,000 | Disperindagkop |
| | | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | 13,733,875 | Disperindagkop |
| | | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | 437,733,875 | Disperindagkop |
| | | Program Pengembangan UMKM | 534,000,000 | Disperindagkop |
| | | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | 100,000,000 | Disporapar |
| | | Program Pemasaran Pariwisata | 200,000,000 | Disporapar |
| | | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | 30,000,000 | Disporapar |
| | | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | 930,000,000 | DKPPP |
| | | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | 505,000,000 | DKPPP |
| | | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | 75,000,000 | DKPPP |
| | | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | 655,000,000 | DKPPP |
| | | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | 1,103,096,035 | DKPPP |
| | | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 20,000,000 | DKPPP |

| Prioritas | Sasaran | Program | RKPK | Perangkat Daerah |
|--------------|---------|---|-----------------------|------------------|
| | | Program Pengendalian dan Penaggulangan Bencana Pertanian | 75,000,000 | DKPPP |
| | | Program Penyuluhan Petanian | 1,000,000,000 | DKPPP |
| | | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | 1,470,000,000 | Disperindagkop |
| | | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | 554,000,000 | Disperindagkop |
| | | Program Pengembangan Ekspor | 320,000,000 | Disperindagkop |
| | | Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen | 60,000,000 | Disperindagkop |
| | | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | 523,677,250 | Disperindagkop |
| | | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | 34,999,400 | Disperindagkop |
| TOTAL | | | 33,145,391,706 | 4.06 |

Sumber: Data diolah 2024

Program prioritas pembangunan untuk Prioritas Kesehatan beserta Perangkat Daerah dan Pagu Anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.7
Program Prioritas Kesehatan
Kota Lhokseumawe Tahun 2025

| Prioritas | Sasaran | Program | RKPK | Perangkat Daerah |
|--------------|---|---|------------------------|------------------|
| Kesehatan | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 74,969,485,610 | Dinas Kesehatan |
| | | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 29,510,590,447 | Dinas Kesehatan |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | 1,052,262,211 | Dinas Kesehatan |
| | | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | 245,480,800 | Dinas Kesehatan |
| | | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | 191,490,000 | Dinas Kesehatan |
| | | Program Pengendalian Penduduk | 179,200,000 | DP3AP2KB |
| | | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | 1,329,400,000 | DP3AP2KB |
| | | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | 788,400,000 | DP3AP2KB |
| Total | | | 108,266,309,068 | 13.26 |

Sumber: Data diolah 2024

Program prioritas pembangunan untuk Prioritas Memperkuat Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya beserta Perangkat Daerah dan Pagu Anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.8

Program Prioritas Memperkuat Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya Kota Lhokseumawe Tahun 2025

| Prioritas | Sasaran | Program | RKPK | Perangkat Daerah |
|---|---|---|-----------------------|-------------------------|
| Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Menguatnya Penegakan Syariat Islam Dalam Bermasyarakat | Program Pendidikan Dayah | 5,626,886,400 | DSIPD |
| | Meningkatnya Pemahaman dan Penghayatan masyarakat terhadap nilai Budaya | Program Pengembangan Kebudayaan | 200,000,000 | Dinas PK |
| | | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | 522,000,000 | Dinas PK |
| | | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | 745,000,000 | Dinas PK |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1,357,781,760 | Sekretariat MAA |
| | | Program Majelis Adat Aceh (MAA) | 195,000,000 | Sekretariat MAA |
| | Menguatnya Penegakan Syariat Islam Dalam Bermasyarakat | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 2,922,459,960 | Sekretariat MPU |
| | | Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh | 155,917,000 | Sekretariat MPU |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1,776,201,056 | Sekretariat Baitul Mal |
| | | Program Baitul Mal | 7,127,160,050 | Sekretariat Baitul Mal |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 4,092,266,000 | DSIPD |
| | | Program Syariat Islam Aceh | 3,154,861,600 | DSIPD |
| Total | | | 27,875,533,826 | 3.41 |

Sumber: Data diolah 2024

Program prioritas pembangunan untuk Prioritas Infrastruktur beserta Perangkat Daerah dan Pagu Anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.9**Program Prioritas Infrastruktur
Kota Lhokseumawe Tahun 2025**

| Prioritas | Sasaran | Program | RKPK | Perangkat Daerah |
|------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|
| Infrastruktur | Meningkatnya Infrastruktur kota berkualitas | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 8,087,463,037 | Dinas PUPR |
| | | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | 6,473,799,000 | Dinas PUPR |
| | | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | 7,271,578,000 | Dinas PUPR |
| | | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | 3,887,733,825 | Dinas PUPR |
| | | Program Penataan Bangunan Gedung | 4,914,287,100 | Dinas PUPR |
| | | Program Penyelenggaraan Jalan | 38,800,510,110 | Dinas PUPR |
| | | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | 225,000,000 | Dinas PUPR |
| | | Program Kawasan Permukiman | 819,478,920 | Dinas PUPR |
| | | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | 4,330,000,000 | Dinas PUPR |
| | | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) | 2,500,000,000 | Dinas PUPR |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 4,655,306,000 | DISHUB |
| | | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | 1,520,309,375 | DISHUB |
| Total | | | 83,485,465,367 | 10.23 |

Sumber: Data diolah 2024

Program prioritas pembangunan untuk Prioritas Lingkungan Hidup beserta Perangkat Daerah dan Pagu Anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.10**Program Prioritas Lingkungan Hidup
Kota Lhokseumawe Tahun 2025**

| Prioritas | Sasaran | Program | Pagu Indikatif | Perangkat Daerah |
|------------------|--|---|-----------------------|-------------------------|
| Lingkungan Hidup | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 28,929,213,825 | DLH |
| | | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | 150,000,000 | DLH |
| | | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 8,653,820,000 | DLH |

| Prioritas | Sasaran | Program | Pagu Indikatif | Perangkat Daerah |
|--------------|---------|---|-----------------------|------------------|
| | | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHAYATI) | 719,218,242 | DLH |
| | | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) | 110,000,000 | DLH |
| | | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | 25,000,000 | DLH |
| | | Program Pengelolaan Persampahan | 7,185,000,000 | DLH |
| Total | | | 45,772,252,067 | 5.61 |

Sumber: Data diolah 2024

Program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah tahun 2025 merupakan rekapitulasi dari hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang disusun menggunakan matrik program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah yang diperoleh dari sistem perencanaan terpadu berbasis elektornik dalam Aplikasi SIPD, memuat informasi mengenai:

1. Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan.
2. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan;
3. Nama Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;
4. Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
5. Target Kinerja Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
6. Lokasi Kegiatan;
7. Besaran dana yang dibutuhkan;
8. Sumber dana;
9. Sinergitas terhadap Prioritas Nasional dan Daerah;
10. Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026;
11. Perangkat Daerah Penanggung Jawab.

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Kota Lhokseumawe dituangkan dalam bentuk Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2025 yang disajikan dalam tabel 5.11 berikut ini:

Tabel 5.11**Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2025**

| No | Perangkat Daerah | Jumlah Program | Jumlah Pagu Indikatif |
|-----------|---|-----------------------|------------------------------|
| 1 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | 2 | 1.710.038.870 |
| 2 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 8 | 209,447,178,238 |
| 3 | Dinas Kesehatan | 5 | 105,969,309,068 |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 10 | 77.309849.992 |
| 5 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 3 | 4.889.366.445 |
| 6 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 2 | 6.737.402.059 |
| 7 | Dinas Sosial | 6 | 4.397.523.880 |
| 8 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian | 10 | 6.831.992.000 |
| 9 | Dinas Pertanahan | 8 | 3.865.195.200 |
| 10 | Dinas Lingkungan Hidup | 7 | 45,772,252,067 |
| 11 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 5 | 4.637.825.424 |
| 12 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | 3 | 3.685.762.633 |
| 13 | Dinas Perhubungan | 2 | 6.185.615.375 |
| 14 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | 4 | 4.610.721.934 |
| 15 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | 9 | 6.946.715.333 |
| 16 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 7 | 8.038.833.915 |
| 17 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | 2 | 1.552.781.760 |
| 18 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 3 | 2.947.808.624 |
| 19 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan | 12 | 12,816,606,725 |
| 20 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | 12 | 8.654.545.768 |
| 21 | Sekretariat Daerah | 3 | 31.479.606.520 |
| 22 | Sekretariat DPRK | 2 | 24,144,773,240 |

| No | Perangkat Daerah | Jumlah Program | Jumlah Pagu Indikatif |
|---------------------|--|-----------------------|------------------------------|
| 23 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 4 | 8.544.706.470 |
| 24 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | 4 | 145.135.805.854 |
| 25 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 3 | 29.910.674.437 |
| 26 | Inspektorat | 3 | 9.185.633.505 |
| 27 | Kecamatan Banda Sakti | 5 | 3.141.706.800 |
| 28 | Kecamatan Blang Mangat | 6 | 2.425.276.924 |
| 29 | Kecamatan Muara Satu | 5 | 2.561.683.473 |
| 30 | Kecamatan Muara Dua | 5 | 2.725.983.155 |
| 31 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 6 | 5.275.528.480 |
| 32 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | 2 | 3.078.376.960 |
| 33 | Sekretariat Baitul Mal | 2 | 8.978.376.960 |
| 34 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah | 3 | 12.874.014.000 |
| Jumlah Total | | 173 | 816.384.456.234 |

Sumber: SIPD-RI, diolah 2024

Penjelasan lebih rinci terkait program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe pada tahun 2025 disajikan pada Tabel 5.12 sebagai berikut.

**TABEL 5.12
PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA LHOEKSEUMAWE
TAHUN 2025**

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|----|------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|-------------|---|--------------------------------------|---|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | | | | | | | 1,710,038,870 | | | | | | | 2,085,631,593 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | |
| 1 | | | | | | | | 1,710,038,870 | | | | | | | 2,085,631,593 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | |
| 1 | 01 | | | | | | | 1,710,038,870 | | | | | | | 2,085,631,593 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | |
| 1 | 1 | 01 | 01 | | | | | 100 Persen | | | | | | | 1,383,292,890 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | |
| 1 | 01 | 01 | 2.01 | | | | | 10 Dokumen | 8,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | MPD Kota Lhokseumawe | | 9,810,000 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah |
| 1 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | | | | 10 Dokumen | 8,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | MPD Kota Lhokseumawe | | 9,810,000 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah |
| 1 | 01 | 01 | 2.02 | | | | | 168 OB | 930,250,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | ASN MDD Kota Lhokseumawe | | 881,386,892 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah |
| 1 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | | | | 168 Orang/bulan | 930,250,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | ASN MPD Kota Lhokseumawe | | 881,386,892 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | | | | | 5 Jenis | 80,140,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | MPD Kota Lhokseumawe | | 52,095,998 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | | | | 40 Paket | 19,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | MPD Kota Lhokseumawe | | 3,000,000 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | | | | 230 Paket | 5,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | MPD Kota Lhokseumawe | | 5,250,000 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | | | | 3 Paket | 5,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Pendidikan | MPD Kota Lhokseumawe | | 5,000,000 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | | | | 380 Dokumen | 1,140,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | MPD Kota Lhokseumawe | | 1,197,000 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | | | | 37 Laporan | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | MPD Kota Lhokseumawe | | 37,648,998 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|------|------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---|--------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | 1 Jenis | 32,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | MPD Kota Lhokseumawe | - | 10,000,000 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | |
| 1 | 01 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | - | | 32 Unit | 32,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | MPD Kota Lhokseumawe | - | 10,000,000 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | |
| 1 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | 3 Jenis | 390,048,870 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | MPD Kota Lhokseumawe | - | 293,500,000 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | |
| 1 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - | | 2 Laporan | 1,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | MPD Kota Lhokseumawe | - | 500,000 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | |
| 1 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | - | | 372 Laporan | 389,048,870 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | MPD Kota Lhokseumawe | - | 290,000,000 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | |
| 1 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | 4 Jenis | 119,600,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | MPD Kota Lhokseumawe | - | 51,500,000 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | |
| 1 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | - | | 1 Unit | 33,100,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | MPD Kota Lhokseumawe | - | 12,000,000 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | |
| 1 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | - | | 3 Unit | 76,500,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | MPD Kota Lhokseumawe | - | 36,000,000 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | |
| 1 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | - | | 1 Unit | 5,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | MPD Kota Lhokseumawe | - | 1,000,000 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | |
| 1 | 01 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | - | | 16 Unit | 5,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | MPD Kota Lhokseumawe | - | 2,500,000 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | |
| 2 | 1 | 01 | 08 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH | Persentase Sekolah yang Menerapkan Assesment Kompetensi Minimum (AKM) | - | | 94.02 Persen | 150,000,000 | | | | | | - | 702,338,703 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | |
| 1 | 01 | 08 | 7.01 | | Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh | Jumlah Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan aceh | - | | 2 Jenis | 30,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Satuan Pendidikan di Kota Lhokseumawe | - | 108,113,535 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | |
| 1 | 01 | 08 | 7.01 | 0002 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh | Jumlah Satuan Pendidikan yang Telah Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh | - | | 1 Satuan Pendidikan | 30,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Satuan Pendidikan di Kota Lhokseumawe | - | 83,113,535 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|------|------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---|--------------------------------------|---|--|--|---|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 08 | 7.03 | | Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh | Jumlah Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh | - | | 3 Jenis | 20,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Satuan Pendidikan di Kota Lhokseumawe | - | 234,225,168 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | |
| 1 | 01 | 08 | 7.03 | 0002 | Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah | Jumlah Dokumen Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah | - | | 1 Dokumen | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Satuan Pendidikan di Kota Lhokseumawe | - | 99,225,168 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | |
| 1 | 01 | 08 | 7.04 | | Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh | Jumlah Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh | - | | 2 Jenis | 40,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kota Lhokseumawe | - | 90,000,000 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | |
| 1 | 01 | 08 | 7.04 | 0001 | Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dayah Salafiah dan Diniyah | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah Salafiah dan Diniyah yang Meningkatkan Kompetensinya | - | | 45 Orang | 40,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kota Lhokseumawe | - | 90,000,000 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | |
| 1 | 01 | 08 | 7.05 | | Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh | Jumlah Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh | - | | 4 Jenis | 60,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Satuan Pendidikan di Kota Lhokseumawe | - | 270,000,000 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | |
| 1 | 01 | 08 | 7.05 | 0002 | Supervisi dan Fasilitas Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh | Jumlah Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh | - | | 2 Satuan Pendidikan | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Satuan Pendidikan di Kota Lhokseumawe | - | 85,000,000 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | |
| 1 | 01 | 08 | 7.05 | 0003 | Evaluasi Pencapaian Standar Pendidikan Aceh pada Setiap Satuan Pendidikan di Aceh | Jumlah Satuan Pendidikan di Aceh yang Dievaluasi Pencapaian Standar Pendidikannya | - | | 3 Satuan Pendidikan | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Satuan Pendidikan di Kota Lhokseumawe | - | 85,000,000 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | |
| 1 | 01 | 08 | 7.05 | 0004 | Penilaian Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | Jumlah Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Telah Dilakukan Penilaian Terkait Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal | - | | 2 Satuan Pendidikan | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Satuan Pendidikan di Kota Lhokseumawe | - | 100,000,000 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | |
| | | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | | | 209,447,178,238 | | | | | | | 192,960,000,973 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | 207,980,178,238 | | | | | | | 191,285,708,165 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | 207,980,178,238 | | | | | | | 191,285,708,165 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 3 | 1 | 01 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | - | | 100 Persen | 151,137,857,638 | | | | | | | 134,248,821,272 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 1 | 01 | 01 | 2.01 | | <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | <i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i> | - | | 7 Dokumen | 193,845,218 | | | | <i>Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas</i> | <i>Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan</i> | <i>ADM Dinas P dan K Kota Lhokseumawe</i> | - | 80,000,000 | <i>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</i> |
| 1 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | | 10 Dokumen | 193,845,218 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | ADM Dinas P dan K Kota Lhokseumawe | - | 50,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 1 | 01 | 01 | 2.02 | | <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | <i>Periode penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah</i> | - | | 12 Bulan | 149,114,699,420 | | | | <i>Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas</i> | <i>Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan</i> | <i>ASN Dinas P dan K Kota Lhokseumawe</i> | - | 124,043,000,000 | <i>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</i> |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|----|------|----|------|------|--|--|---|----------------------------------|--|---|--|---|--------------------------------------|--|--|---|------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|----|----|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | 14 | 15 | | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 1300 Orang/bulan | 149,114,699,420 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | ASN Dinas P dan K Kota Lhokseumawe | | 124,006,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Periode pelaksanaan adm umum perangkat daerah | | | | 12 Bulan | 150,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda | ASN Dinas P dan K Kota Lhokseumawe | | 200,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 30,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | ASN Dinas P dan K Kota Lhokseumawe | | 50,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 4 Paket | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | ASN Dinas P dan K Kota Lhokseumawe | | 20,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 80 Laporan | 100,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | ASN Dinas P dan K Kota Lhokseumawe | | 120,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | | | | 9 Jenis | 404,547,400 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | ASN Dinas P dan K Kota Lhokseumawe | | 880,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 3 Unit | 100,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | ASN Dinas P dan K Kota Lhokseumawe | | 150,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 10 Unit | 304,547,400 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | ASN Dinas P dan K Kota Lhokseumawe | | 25,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Periode penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | | | | 12 Bulan | 1,145,765,600 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | ASN Dinas P dan K Kota Lhokseumawe | | 8,475,853,568 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 4 Laporan | 5,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | ASN Dinas P dan K Kota Lhokseumawe | | 5,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 3 Laporan | 130,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | ASN Dinas P dan K Kota Lhokseumawe | | 260,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 5 Laporan | 1,010,765,600 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | ASN Dinas P dan K Kota Lhokseumawe | | 8,160,853,568 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|----|------|----|------|------|--|---|---|----------------------------------|--|---|--|---|--|---|---|--------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----|----|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | 14 | 15 | | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0011 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 4 Ruang | 684,910,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik Kota Lhokseumawe | | 250,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0014 | Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia | | | | 6 Paket | 965,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik Kota Lhokseumawe | | 250,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0015 | Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah | Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia | | | | 3 Paket | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik Kota Lhokseumawe | | 100,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0016 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | | | | 2 Paket | 150,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik Kota Lhokseumawe | | 100,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0019 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | | | | 2 Unit | 200,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik Kota Lhokseumawe | | 1,000,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 2352 Peserta Didik | 500,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik Kota Lhokseumawe | | 500,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0026 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | 1000 Orang | 3,794,400,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik Kota Lhokseumawe | | 500,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | 500 Orang | 500,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik Kota Lhokseumawe | | 1,000,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah | | | | 74 Satuan Pendidikan | 125,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik Kota Lhokseumawe | | 150,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | | | | 75 Satuan Pendidikan | 17,820,600,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOS REGULER | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Peserta Didik Kota Lhokseumawe | | 15,000,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0030 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | 75 Orang | 5,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik Kota Lhokseumawe | | 150,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0031 | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar | Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun | | | | 1 Ruang | 270,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik Kota Lhokseumawe | | 1,400,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|------|------|--|--|---|----------------------------------|--|---|--|---|--|--|---|---|------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0032 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar | Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 1 Ruang | 100,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik Kota Lhokseumawe | | 300,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0046 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | | | | 74 Paket | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik Kota Lhokseumawe | | 120,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | | | | 3 Ruang | 1,060,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik Kota Lhokseumawe | | 550,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0048 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 5 Unit | 702,100,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik Kota Lhokseumawe | | 250,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0050 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar | | | | 35 Satuan Pendidikan | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik Kota Lhokseumawe | | 50,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 20 Ruang | 4,361,010,600 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik Kota Lhokseumawe | | 540,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0055 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | | | | 2 Paket | 200,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik Kota Lhokseumawe | | 500,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang di kelola | | | | 35 Sekolah | 15,868,300,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda | Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe | | 20,478,328,800 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 3 Unit | 300,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe | | 1,000,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 5 Ruang | 1,200,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe | | 500,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0017 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 1 Ruang | 250,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe | | 200,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0018 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 2 Ruang | 336,600,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe | | 200,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|------|------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|--|---|---|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0021 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 2 Unit | 300,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe | | 100,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0025 | Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | | | | 10 Paket | 500,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe | | 250,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0027 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | | | | 1 Paket | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe | | 100,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0030 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | | | | 1 Unit | 200,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN, REGULIER-SMP, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe | | 300,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 1822 Peserta Didik | 500,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe | | 550,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0039 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | 600 Orang | 1,618,800,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe | | 50,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | 200 Orang | 250,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe | | 500,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan | | | | 35 Satuan Pendidikan | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe | | 50,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | | | | 35 Satuan Pendidikan | 9,327,900,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOS REGULIER | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe | | 6,000,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0043 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | | 35 Orang | 5,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe | | 20,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0046 | Pemeliharaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | | | | 1 Unit | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe | | 50,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0058 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar | | | | 35 Satuan Pendidikan | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe | | 50,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|------|------|---|--|---|----------------------------------|--|---|--|---|---|--|--|---|------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0059 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | | | | 1 Ruang | 320,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe | | 610,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0061 | Perfengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik | | | | 1000 Buku | 100,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe | | 1,000,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0064 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 2 Ruang | 300,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe | | 650,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0067 | Pengadaan Alat Praktis dan Peraga Peserta Didik | Jumlah Alat Praktis dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | | | | 2 Paket | 200,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe | | 450,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikelola | Jumlah Satuan Pendidikan PAUD yang dikelola | | | | 134 Satuan PAUD | 5,162,300,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe | | 5,935,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun | | | | 7 Unit | 1,025,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe | | 550,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0007 | Pengadaan Mebel PAUD | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia | | | | 3 Paket | 150,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe | | 250,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0009 | Pengadaan Perlengkapan PAUD | Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia | | | | 9 Paket | 250,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe | | 100,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0015 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD | | | | 37 Orang | 217,200,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe | | 300,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0016 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | 100 Orang | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe | | 250,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | | | | 76 Satuan Pendidikan | 100,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe | | 20,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP | | | | 152 Satuan Pendidikan | 2,690,100,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOP PAUD | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe | | 2,000,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|----|------|----|------|------|---|---|----------------------------------|--|---|--|----------------------|---|---|--|--|---|---------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0019 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD | | | | 350 Orang | 5,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe | | 100,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0042 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | | | | 4 Unit | 200,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe | | 400,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0045 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 3 Unit | 200,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe | | 200,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0046 | Pengadaan Alat Praktis dan Peraga Peserta Didik PAUD | Jumlah Alat Praktis dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia | | | | 1 Paket | 100,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe | | 500,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0049 | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | | | | 1 Ruang | 100,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe | | 250,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 1 Ruang | 100,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe | | 200,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 02 | 2.04 | | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang dikelola | | | | 3 Satuan Pendidikan | 1,414,500,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe | | 3,795,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 02 | 2.04 | 0014 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | 2 Orang | 155,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe | | 20,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 02 | 2.04 | 0015 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | 20 Orang | 175,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe | | 30,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 02 | 2.04 | 0016 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | | | | 5 Satuan Pendidikan | 456,900,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe | | 15,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 02 | 2.04 | 0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | | | | 2 Satuan Pendidikan | 192,600,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN, KESETARAAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe | | 20,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 02 | 2.04 | 0018 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | 20 Orang | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe | | 20,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|----|------|----|------|------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|---|--|--|---|--------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Kelompok Sasaran | Target | | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.04 | 0040 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | | | | 150 Paket | 180,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe | | 250,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 02 | 2.04 | 0041 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 4 Unit | 100,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe | | 750,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 02 | 2.04 | 0046 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 225 Peserta Didik | 5,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe | | 20,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 02 | 2.04 | 0049 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | | | | 4 Unit | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe | | 500,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 02 | 2.04 | 0055 | Pengadaan Alat Praktis dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan | Jumlah Alat Praktis dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia | | | | 225 Paket | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe | | 250,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 5 | 1 | 01 | 03 | | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | Kelulusan Dan Ketercapaian Kurikulum di Satuan Pendidikan | - | | | 100 Persen | 200,000,000 | | | | | | - | 280,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 03 | 2.02 | | <i>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</i> | <i>Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini yang ditetapkan</i> | - | | | 4 Dokumen | 200,000,000 | | | <i>Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas</i> | <i>Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan</i> | <i>Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe</i> | - | 280,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia | | | | 300 Buku | 200,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe | | 200,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 6 | 1 | 01 | 04 | | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Persentase Guru dan Tendik yang Mendapatkan Pembinaan | - | | | 91.94 Persen | 100,000,000 | | | | | | - | 60,171,142 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 04 | 2.01 | | <i>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i> | <i>"Jumlah Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan"</i> | - | | | 2 Laporan | 100,000,000 | | | <i>Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas</i> | <i>Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan</i> | <i>Meningkatnya Kualitas Pendidikan</i> | - | 60,171,142 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | 4 Dokumen | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Meningkatnya Kualitas Pendidikan | | 30,171,142 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 04 | 2.01 | 0002 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | 4 Laporan | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Meningkatnya Kualitas Pendidikan | | 30,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 7 | 1 | 01 | 05 | | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | Persentase Sekolah yang Memeroleh Izin | - | | | 100 Persen | 65,000,000 | | | | | | - | 120,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1 | 01 | 05 | 2.01 | | <i>Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i> | <i>Jumlah dokumen hasil penilaian kelayakan usul perizinan</i> | - | | | 2 Dokumen | 15,000,000 | | | <i>Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas</i> | <i>Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan</i> | <i>Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe</i> | - | 30,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|------|------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---|---|--|--|---|------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 01 | 05 | 2.01 | 0001 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | - | - | 4 Dokumen | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe | - | 30,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 1 | 01 | 05 | 2.02 | | Penerbitan Isin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah dokumen hasil penilaian kelayakan usul perizinan PAUD dan Pendidikan non formal | - | - | 2 Dokumen | 50,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe | - | 90,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 1 | 01 | 05 | 2.02 | 0001 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | - | - | 4 Dokumen | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe | - | 30,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 1 | 01 | 05 | 2.02 | 0002 | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | - | - | 4 Dokumen | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe | - | 30,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 1 | 01 | 05 | 2.02 | 0003 | Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | - | - | 1 Dokumen | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pendidikan | Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe | - | 30,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | - | - | | 1,467,000,000 | | | | | | - | 1,674,292,808 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 2 | 22 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | - | - | | 1,467,000,000 | | | | | | - | 1,674,292,808 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 8 | 2 | 22 | 02 | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Persentase kegiatan pengembangan budaya | - | - | 61.54 Persen | 200,000,000 | | | | | | - | 616,782,728 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 2 | 22 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah objek kebudayaan yang dikelola | - | - | 4 Objek | 100,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 116,782,728 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 2 | 22 | 02 | 2.01 | 0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan | - | - | 3 Objek | 100,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 16,782,728 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 2 | 22 | 02 | 2.02 | | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Objek kesenian tradisional yang dilestarikan | - | - | 4 Objek | 100,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 500,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 2 | 22 | 02 | 2.02 | 0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | - | - | 13 Objek | 100,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 450,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 9 | 2 | 22 | 03 | | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Persentase pembinaan sanggar seni | - | - | 6.90 Persen | 522,000,000 | | | | | | - | 80,228,189 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 2 | 22 | 03 | 2.01 | | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah objek kesenian daerah yang memperoleh pembinaan | - | - | 2 objek | 522,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 80,228,189 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 2 | 22 | 03 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) | - | - | 100 Orang | 522,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 50,228,189 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|---|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 11 | 2 22 05 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan | - | | | 59,09 Persen | 745,000,000 | | | | | | - | 812,281,891 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | 2 22 05 2.01 | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Jumlah objek cagar budaya yang ditetapkan | - | | | 2 Objek | 45,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 122,281,891 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | 2 22 05 2.01 0001 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya | Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan | - | | | 5 Objek | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 62,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | 2 22 05 2.01 0002 | Penetapan Cagar Budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan | - | | | 5 Objek | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 60,281,891 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | 2 22 05 2.02 | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Jumlah objek cagar budaya yang dikelola | - | | | 3 Objek | 700,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 600,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | 2 22 05 2.02 0002 | Pengembangan Cagar Budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan | - | | | 2 Objek | 700,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 500,000,000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | Dinas Kesehatan | | | | | | 105,969,309,068 | | | | | | | 98,300,239,134 | Dinas Kesehatan |
| | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 105,969,309,068 | | | | | | | 98,300,239,134 | Dinas Kesehatan |
| | 1 02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | 105,969,309,068 | | | | | | | 98,300,239,134 | Dinas Kesehatan |
| 12 | 1 02 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | - | | | 100 Persen | 74,969,485,610 | | | | | | - | 63,358,745,188 | Dinas Kesehatan |
| | 1 02 01 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | 3 Dokumen | 15,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda | OPD | - | 25,000,000 | Dinas Kesehatan |
| | 1 02 01 2.01 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | | | 3 Dokumen | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda | OPD | - | 25,000,000 | Dinas Kesehatan |
| | 1 02 01 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Periode Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | 12 Bulan | 72,788,365,050 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda | ASN | - | 55,174,369,188 | Dinas Kesehatan |
| | 1 02 01 2.02 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | - | | | 11100 Orang/bulan | 72,788,365,050 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda | ASN | - | 55,174,369,188 | Dinas Kesehatan |
| | 1 02 01 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Periode Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | 12 Bulan | 25,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda | ASN | - | 185,000,000 | Dinas Kesehatan |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|----|------|----|------|------|---|--|----------------------------------|--|---|--|----------------------|---|--------------------------------------|--|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 1 | 02 | 01 | 2.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 10 Dokumen | 5,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | ASN | | 25,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 30 Orang | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | ASN | | 60,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Periode Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 12 Bulan | 202,280,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | OPD | | 522,500,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | OPD | | 250,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | OPD | | 50,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | OPD | | 100,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | | | | 2 Dokumen | 2,280,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | OPD | | 2,500,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 40 Laporan | 75,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | OPD | | 120,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 12 Bulan | 1,135,540,560 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | OPD | | 6,591,876,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 30 Laporan | 1,500,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | OPD | | 1,500,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 250 Laporan | 549,400,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | OPD | | 650,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 10000 Laporan | 584,640,560 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | OPD | | 5,940,376,000 | Dinas Kesehatan |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|------|------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|--|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 1 | 02 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Periode Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | 12 Bulan | 803,300,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | OPD | - | 860,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 33,300,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | OPD | - | 35,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 35 Unit | 660,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | OPD | - | 595,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi | | | | 4 Unit | 70,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | OPD | - | 150,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi | | | | 30 Unit | 40,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | OPD | - | 80,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 13 | 1 | 02 | 02 | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat Jumlah Faskes yang melaksanakan pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah kab/kota | - | | | 100 Porsen 7 Faskes | 29,510,590,447 | | | | | | - | 34,008,841,247 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Faskes Yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | 7 Faskes | 6,279,030,879 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 12,015,166,247 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas | | | | 7 Unit | 300,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 1,250,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | 20 Unit | 404,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 1,500,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan | | | | 2 Unit | 200,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 20,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | | | | 50 Unit | 2,521,331,645 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 1,500,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | | | | 100 Unit | 140,285,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 105,000,000 | Dinas Kesehatan |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|------|------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---|---|--|---|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | | | 250 Paket | 2,070,958,039 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 2,500,000,000 | Dinas Kesehatan | |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0026 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan | | | 250 Paket | 642,456,195 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 210,000,000 | Dinas Kesehatan | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Faskes yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota | | | 7 Faskes | 23,041,855,568 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 21,680,250,000 | Dinas Kesehatan | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | 4476 Orang | 613,205,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 262,500,000 | Dinas Kesehatan | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | 4272 Orang | 127,300,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 105,000,000 | Dinas Kesehatan | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | 4069 Orang | 121,220,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 84,000,000 | Dinas Kesehatan | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | 19613 Orang | 350,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 367,500,000 | Dinas Kesehatan | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | 51512 Orang | 229,500,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 262,500,000 | Dinas Kesehatan | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | 152964 Orang | 104,722,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 231,000,000 | Dinas Kesehatan | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | 15281 Orang | 60,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 315,000,000 | Dinas Kesehatan | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | 41837 Orang | 40,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 210,000,000 | Dinas Kesehatan | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | 4566 Orang | 250,876,320 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 367,500,000 | Dinas Kesehatan | |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|----|------|----|------|------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|--|---|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | | | | 448 Orang | 40,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 63,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 5205 Orang | 830,033,700 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 420,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 8805 Orang | 192,700,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 210,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | | | | 10 Dokumen | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 52,500,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar | | | | 100 Dokumen | 85,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 100,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | 10 Dokumen | 1,569,140,505 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 367,500,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | 10 Dokumen | 30,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 63,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | 10 Dokumen | 402,135,200 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 73,500,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | 10 Dokumen | 240,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 199,500,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | | | | 10 Dokumen | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 84,000,000 | Dinas Kesehatan |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|------|------|--|---|---|----------------------------------|--|---|--|---|---|---|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | 10 Dokumen | 397,340,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 52,500,000 | Dinas Kesehatan | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 100 Orang | 30,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 52,500,000 | Dinas Kesehatan | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 50 Orang | 230,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 105,000,000 | Dinas Kesehatan | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 10 Dokumen | 1,074,753,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 525,000,000 | Dinas Kesehatan | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | 7 Dokumen | 13,346,617,843 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 12,950,000,000 | Dinas Kesehatan | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang Didistribusikan | | | | 100 Paket | 15,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 26,250,000 | Dinas Kesehatan | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0029 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | | | | 1 Dokumen | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 73,500,000 | Dinas Kesehatan | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | 7 Dokumen | 671,912,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 2,850,000,000 | Dinas Kesehatan | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | 2 Dokumen | 1,785,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 840,000,000 | Dinas Kesehatan | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | 2 Laporan | 50,400,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 52,500,000 | Dinas Kesehatan | |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|------|------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|---|--|---|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0037 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | - | - | 1 | Dokumen | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 42,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0038 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | - | - | 1 | Unit | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 52,500,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.03 | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Jumlah Faskes yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | - | 7 | Faskes | 169,704,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Puskesmas dan Jaringannya | - | 236,250,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | - | - | 1 | Dokumen | 169,704,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Puskesmas dan Jaringannya | - | 236,250,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.04 | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Faskes yang memperoleh Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 10 | Faskes | 20,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan | - | 77,175,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 2.04 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya | Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya | - | - | 10 | Unit | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan | - | 44,100,000 | Dinas Kesehatan |
| 14 | 1 | 02 | 03 | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan | - | - | 5.41 | Persen | 1,052,262,211 | | | | | | - | 335,955,542 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 03 | 2.01 | | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | - | - | 2 | Dokumen | 30,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Tenaga Kesehatan | - | 67,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 03 | 2.01 | 0001 | Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | - | - | 1 | Dokumen | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Tenaga Kesehatan | - | 26,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 03 | 2.01 | 0002 | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | - | - | 1 | Dokumen | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Tenaga Kesehatan | - | 41,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 03 | 2.02 | | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | - | - | 2 | Dokumen | 80,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | SDM Kesehatan | - | 72,500,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 03 | 2.02 | 0001 | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | - | - | 1 | Dokumen | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | SDM Kesehatan | - | 26,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 03 | 2.02 | 0003 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | - | - | 1 | Dokumen | 70,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | SDM Kesehatan | - | 46,500,000 | Dinas Kesehatan |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | | |
|----|------|----|------|------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---|---|---|--|--|-----------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Kelompok Sasaran | Target | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 1 | 02 | 03 | 2.03 | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | 40 SDMK | 942,262,211 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | SDM Kesehatan | - | 196,455,542 | Dinas Kesehatan | |
| 1 | 02 | 03 | 2.03 | 0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | - | | 40 Orang | 942,262,211 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | SDM Kesehatan | - | 196,455,542 | Dinas Kesehatan | |
| 15 | 1 | 02 | 04 | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase Rekomendasi Usaha Kesehatan | - | | 100 Porsen | 245,480,800 | | | | | | - | 361,026,851 | Dinas Kesehatan | |
| 1 | 02 | 04 | 2.01 | | Pemberian Isin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah Sarana Pemberian Isin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | - | | 10 Tempat | 30,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Apotek, Toko Obat, Toko ALKES dan Optikal dan UMOT | - | 90,100,000 | Dinas Kesehatan | |
| 1 | 02 | 04 | 2.01 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | - | | 1 Dokumen | 30,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Apotek, Toko Obat, Toko ALKES dan Optikal dan UMOT | - | 90,100,000 | Dinas Kesehatan | |
| 1 | 02 | 04 | 2.02 | | Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | - | | 2 Dokumen | 5,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Sarana Produksi ALKES dan PKRT | - | 65,926,851 | Dinas Kesehatan | |
| 1 | 02 | 04 | 2.02 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | - | | 1 Dokumen | 5,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Sarana Produksi ALKES dan PKRT | - | 65,926,851 | Dinas Kesehatan | |
| 1 | 02 | 04 | 2.03 | | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Isin Produksi, untuk Produk Makanan dan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Isin Produksi, untuk Produk Makanan dan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | - | | 1 Dokumen | 140,480,800 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | P-IRT | - | 25,000,000 | Dinas Kesehatan | |
| 1 | 02 | 04 | 2.03 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Isin Produksi, untuk Produk Makanan dan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Isin Produksi, untuk Produk Makanan dan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | - | | 1 Dokumen | 140,480,800 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | P-IRT | - | 25,000,000 | Dinas Kesehatan | |
| 1 | 02 | 04 | 2.04 | | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Jumlah Dokumen Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | - | | 1 Dokumen | 10,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | TPM dan DAM | - | 60,000,000 | Dinas Kesehatan | |
| 1 | 02 | 04 | 2.04 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | - | | 1 Dokumen | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | TPM dan DAM | - | 60,000,000 | Dinas Kesehatan | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|-----------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|--|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | 02 04 2.05 | Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | Jumlah Dokumen Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | - | - | - | 1 Dokumen | 10,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Pedagog makanan jajanan | - | 50,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 04 2.05 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | - | - | - | 1 Dokumen | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Pedagog makanan jajanan | - | 50,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 04 2.06 | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | Jumlah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | - | - | - | 10 Produk | 50,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Industri Rumah tangga | - | 70,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 04 2.06 0001 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan | - | - | - | 10 Unit | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Industri Rumah tangga | - | 70,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 16 | 02 05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Cakupan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | - | - | - | 93.17 Persen | 191,490,000 | | | | | | - | 235,670,306 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 05 2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | - | 1 Dokumen | 30,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 80,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 05 2.01 0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | - | - | - | 1 Dokumen | 30,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 80,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 05 2.02 | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang berprilaku Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | - | 20 Keluarga | 40,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 95,670,306 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 05 2.02 0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | - | - | - | 1 Dokumen | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 55,670,306 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 05 2.02 0002 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | - | - | - | 20 Keluarga | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 40,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 05 2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | - | 1 Dokumen | 121,490,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 60,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 05 2.03 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | - | - | - | 1 Dokumen | 121,490,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK BOKOK-PELAYANAN KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 60,000,000 | Dinas Kesehatan |

| No | Kode | Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|----|------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|---|---|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | | | | 77,309,849,992 | | | | | | | 72,979,048,860 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| 1 | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 77,309,849,992 | | | | | | | 72,979,048,860 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| 1 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | 69,660,371,072 | | | | | | | 59,835,301,287 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| 17 | 1 | 03 | 01 | | | | | | | | | | | | | |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | - | | | 100 Persen | 8,072,463,037 | | | | | | | 7,961,356,302 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 2 | 03 | 01 | 2.01 | | | | | | | | | | | 127,306,767 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | 5 Dokumen | 102,000,000 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | | | | |
| | 1 | 03 | 01 | 2.01 | 0001 | | | | | | | | | | 125,206,767 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | | | 2 Dokumen | 100,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | | | | |
| | 1 | 03 | 01 | 2.01 | 0006 | | | | | | | | | | 2,100,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - | | | 1 Laporan | 2,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | | | | |
| | 1 | 03 | 01 | 2.02 | | | | | | | | | | | 5,155,918,047 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Periode Pengediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | 12 Bulan | 5,338,763,140 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | | | | |
| | 1 | 03 | 01 | 2.02 | 0001 | | | | | | | | | | 5,155,918,047 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | - | | | 55 Orang/bulan | 5,338,763,140 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | | | | |
| | 2 | 03 | 01 | 2.06 | | | | | | | | | | | 236,253,390 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | 100 % | 176,140,000 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | | | | |
| | 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0002 | | | | | | | | | | 74,250,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | - | | | 1 Paket | 40,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | | | | |
| | 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0004 | | | | | | | | | | 22,050,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | - | | | 1 Paket | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | | | | |
| | 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0005 | | | | | | | | | | 17,017,088 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | - | | | 5 Paket | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | | | | |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|----|------|----|------|------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---|---|--|---|------------------|-----------------------------------|----------------------|--|--------|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | 365 Dokumen | 1,140,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | - | | 1,385,677 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | |
| 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 56 Laporan | 100,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | - | | 121,550,625 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | |
| 1 | 03 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | 6 Unit | 1,575,644,897 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | - | | 810,229,380 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | |
| 1 | 03 | 01 | 2.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | 1 Unit | 1,500,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | - | | 542,818,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | |
| 1 | 03 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | 12 Unit | 75,644,897 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | - | | 267,411,380 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | |
| 1 | 03 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | 12 Bulan | 673,815,000 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | - | | 1,055,984,960 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | |
| 1 | 03 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 96 Laporan | 2,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | - | | 2,431,013 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | |
| 1 | 03 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | 240 Laporan | 360,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | - | | 270,766,172 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | |
| 1 | 03 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | 3408 Laporan | 311,815,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | - | | 782,787,775 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | |
| 1 | 03 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | 9 Unit | 206,100,000 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | - | | 454,113,133 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | |
| 1 | 03 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | | 4 Unit | 33,300,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | - | | 40,476,358 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|----|------|----|------|------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|-----------------------|--|---|-----------------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 1 | 03 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | - | - | 8 Unit | 102,800,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | - | 68,433,002 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | |
| 1 | 03 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi | - | - | 8 Unit | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | - | 284,428,463 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | |
| 1 | 03 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi | - | - | 16 Unit | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | - | 60,775,310 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | |
| 18 | 1 | 03 | 03 | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase Penduduk Berakses Air Minum | - | - | 23.10 Persen | 6,473,799,000 | | | | | 10,624,562,500 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | |
| 1 | 03 | 03 | 2.01 | | <i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</i> | <i>Persentase Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Minum melalui SPAM Jaringan Pipa dan Bukan Jaringan Pipa</i> | - | - | <i>16.06 Persen</i> | <i>6,473,799,000</i> | | <i>Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi</i> | <i>Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur</i> | <i>Masyarakat</i> | <i>10,624,562,500</i> | <i>Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</i> | | | |
| 1 | 03 | 03 | 2.01 | 0022 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun | - | - | 110 Unit | 500,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Masyarakat | 1,736,437,500 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | |
| 1 | 03 | 03 | 2.01 | 0025 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun | - | - | 2 Dokumen | 75,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Masyarakat | 100,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | |
| 1 | 03 | 03 | 2.01 | 0028 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun | - | - | 350 Liter/Detik | 5,522,242,980 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Masyarakat | 3,000,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | |
| 1 | 03 | 03 | 2.01 | 0032 | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | - | - | 848 SR | 376,556,020 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Masyarakat | 5,788,125,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | |
| 19 | 1 | 03 | 05 | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi | - | - | 74.21 Persen | 7,271,578,000 | | | | | 3,552,947,325 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | |
| 1 | 03 | 05 | 2.01 | | <i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</i> | <i>Persentase Jumlah Rumah Tangga Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik</i> | - | - | <i>73.14 Persen</i> | <i>7,271,578,000</i> | | <i>Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi</i> | <i>Infrastruktur</i> | | <i>3,552,947,325</i> | <i>Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</i> | | | |
| 1 | 03 | 05 | 2.01 | 0032 | Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan | - | - | 553 M ³ /Hari | 7,246,578,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Infrastruktur | 3,309,846,075 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | | |
| 1 | 03 | 05 | 2.01 | 0041 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun | - | - | 1 Dokumen | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | - | 243,101,250 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|--|---|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | 1 03 06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembersihan Aliran Air Tidak Terhambat | - | - | - | 78.22 Persen | 3,887,733,825 | | | | | | - | 3,012,441,706 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1 03 06 2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Drainase dalam Kondisi Baik | - | - | - | 68.88 Persen | 3,887,733,825 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 3,012,441,706 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1 03 06 2.01 0028 | Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi | - | - | - | 324 Sistem Drainase Perkotaan | 398,754,400 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 462,109,391 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1 03 06 2.01 0029 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun | - | - | - | 13 Sistem Drainase Perkotaan | 3,458,979,425 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 2,478,257,749 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1 03 06 2.01 0030 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun | - | - | - | 1 Dokumen | 30,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | - | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 72,074,566 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| 21 | 1 03 08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Persentase penataan bangunan gedung | - | - | - | 7.69 Persen | 4,914,287,100 | | | | | | - | 3,200,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1 03 08 2.01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | - | - | - | 1 Dokumen | 4,914,287,100 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 3,200,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1 03 08 2.01 0017 | Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan | - | - | - | 3 Bangunan Gedung | 4,914,287,100 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | - | - | 3,200,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| 22 | 1 03 10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap | - | - | - | 75.19 Persen | 38,815,510,110 | | | | | | - | 30,538,993,454 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1 03 10 2.01 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Persentase Tingkat Kemantapan Jalan | - | - | - | 75.19 Persen | 38,815,510,110 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | - | - | 30,538,993,454 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1 03 10 2.01 0029 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun | - | - | - | 100% Dokumen | 125,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | - | - | 82,449,954 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1 03 10 2.01 0032 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | - | - | - | 100% KM | 17,874,404,427 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | - | - | 18,852,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | 1 03 10 2.01 0033 | Rekonstruksi Jalan | Panjang Jalan yang Direkonstruksi | - | - | - | 100% KM | 10,500,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | - | - | 8,283,212,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|------|------|---|--|---|----------------------------------|--|---|--|---|--|--|---|--------|------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Panjang Jalan /Jembatan yang Disturvey Kondisinya | - | - | - | 100% KM | 100,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | - | - | 321,331,500 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0044 | Rehabilitasi Jalan | Panjang Jalan yang Dirhabilitasi | - | - | - | 100% KM | 10,216,105,683 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM, DBH SAWIT | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | - | - | 3,000,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | |
| 23 | 1 | 03 | 12 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Persentase ketaatan terhadap RTRW | - | - | - | 67.8 Persen | 225,000,000 | | | | | | | 945,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | |
| 1 | 03 | 12 | 2.01 | | <i>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota</i> | <i>Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota</i> | - | - | - | <i>3 Dokumen</i> | <i>125,000,000</i> | | | <i>Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi</i> | <i>Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi</i> | - | - | <i>420,000,000</i> | <i>Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</i> | |
| 1 | 03 | 12 | 2.01 | 0006 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota | - | - | - | 1 Dokumen | 100,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | - | - | 210,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | |
| 1 | 03 | 12 | 2.01 | 0013 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang | Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. | - | - | - | 1 Laporan | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | - | - | 210,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | |
| 1 | 03 | 12 | 2.03 | | <i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i> | <i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i> | - | - | - | <i>1 Dokumen</i> | <i>100,000,000</i> | | | <i>Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi</i> | <i>Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi</i> | - | - | <i>525,000,000</i> | <i>Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</i> | |
| 1 | 03 | 12 | 2.03 | 0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang | Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang | - | - | - | 1 Dokumen | 100,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | - | - | 525,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | |
| 1 | 04 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | 7,649,478,920 | | | | | | | 13,143,747,573 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | |
| 24 | 1 | 04 | 03 | | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Rasio Rumah Layak Huni | - | - | - | 69.88 Rasio | 819,478,920 | | | | | | | 1,157,625,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | |
| 1 | 04 | 03 | 2.03 | | <i>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i> | <i>Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni</i> | - | - | - | <i>30.03 Persen</i> | <i>819,478,920</i> | | | <i>Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi</i> | <i>Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi</i> | - | - | <i>1,157,625,000</i> | <i>Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</i> | |
| 1 | 04 | 03 | 2.03 | 0002 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki | - | - | - | 28 Unit Rumah | 819,478,920 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | - | - | 1,157,625,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | |
| 25 | 1 | 04 | 04 | | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh | - | - | - | 0.27 Persen | 4,330,000,000 | | | | | | | 6,902,014,582 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|----|-----------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|--------------------------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | 04 04 2.01 | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni | - | - | - | 30.03 Persen | 4,330,000,000 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | - | - | 6,902,014,582 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| 1 | 04 04 2.01 0001 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | - | - | - | 75 Unit Rumah | 1,330,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | - | - | 3,000,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| 1 | 04 04 2.01 0004 | Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru | Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh | - | - | - | 47 Unit | 3,000,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | - | - | 3,902,014,582 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| 26 | 1 04 05 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Rasio PSU Dalam Kondisi Baik | - | - | - | 0.143 Rasio | 2,500,000,000 | | | | | - | - | 5,084,107,991 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| 1 | 04 05 2.01 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Persentase Unit Rumah Terfasilitasi PSU | - | - | - | 71.84 Persen | 2,500,000,000 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | - | - | 5,084,107,991 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| 1 | 04 05 2.01 0002 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | - | - | - | 4 Lokasi | 2,500,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | - | - | 5,084,107,991 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | | | | | 4,889,366,445 | | | | | | | 8,590,280,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 4,889,366,445 | | | | | | | 8,590,280,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | 4,889,366,445 | | | | | | | 8,590,280,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 27 | 1 05 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | - | - | - | 100 Persen | 3,764,366,445 | | | | | - | - | 6,690,280,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 01 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | - | 5 Dokumen | 10,000,000 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | BPBD Kota Lhokseumawe | - | 20,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 01 2.01 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | - | - | 15 Dokumen | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | BPBD Kota Lhokseumawe | - | 20,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 01 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | - | - | - | 490 OB | 2,326,670,445 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Aparatur BPBD Kota Lhokseumawe | - | 3,000,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 01 2.02 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | - | - | - | 30 Orang/bulan | 2,326,670,445 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Aparatur BPBD Kota Lhokseumawe | - | 3,000,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|----|------|----|------|------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|-------------|---|--------------------------------------|---|--|--------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | | | | | Daerah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Periode Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | - | - | 12 Bulan | 87,000,000 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Aparatur BPBD Kota Lhokseumawe | - | 120,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | - | - | - | - | 1 Paket | 77,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Aparatur BPBD Kota Lhokseumawe | - | 100,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | - | - | - | - | 2 Orang | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Aparatur BPBD Kota Lhokseumawe | - | 20,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Periode Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | - | - | 12 Bulan | 481,140,000 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | BPBD Kota Lhokseumawe | - | 642,280,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | - | - | - | - | 2 Paket | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | BPBD Kota Lhokseumawe | - | 20,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | - | - | - | - | 3 Paket | 380,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | BPBD Kota Lhokseumawe | - | 450,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | - | - | - | - | 1 Paket | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | BPBD Kota Lhokseumawe | - | 20,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | - | - | - | - | 1 Dokumen | 1,140,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | BPBD Kota Lhokseumawe | - | 2,280,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - | - | - | - | 1 Laporan | 75,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | BPBD Kota Lhokseumawe | - | 150,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | - | - | 2 Jenis | 100,000,000 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | BPBD Kota Lhokseumawe | - | 100,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | - | - | - | - | 2 Unit | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | BPBD Kota Lhokseumawe | - | 50,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|----|------|----|------|------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|--------------------------------------|--|---|-----------------------------------|--|--|--------|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | BPBD Kota Lhokseumawe | 50,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 3 Jenis | 240,756,000 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | BPBD Kota Lhokseumawe | 2,153,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1,500,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | BPBD Kota Lhokseumawe | 3,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 120,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | BPBD Kota Lhokseumawe | 150,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 119,256,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | BPBD Kota Lhokseumawe | 2,000,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 4 Jenis | 518,800,000 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | BPBD Kota Lhokseumawe | 655,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 33,300,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | BPBD Kota Lhokseumawe | 35,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 10 Unit | 365,500,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | BPBD Kota Lhokseumawe | 400,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi | | | | 2 Unit | 100,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | BPBD Kota Lhokseumawe | 200,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi | | | | 5 Unit | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | BPBD Kota Lhokseumawe | 20,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| 28 | 1 | 05 | 03 | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Persentase Penanggulangan Bencana | - | | | 100 Persen | 950,000,000 | | | | | 1,650,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|----|-----------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|--------------------------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | 05 03 2.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | - | - | - | 2 Jenis | 350,000,000 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi Reformasi Birokrasi | Kota Lhokseumawe | - | 600,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 03 2.01 0007 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun | - | - | - | 5000 Orang | 85,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi Reformasi Birokrasi | Kota Lhokseumawe | - | 100,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 03 2.01 0008 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legat paling lama dalam 1 (satu) tahun | - | - | - | 1 Dokumen | 265,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Kota Lhokseumawe | - | 500,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 03 2.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | - | - | - | 10 Jenis | 350,000,000 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi Reformasi Birokrasi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 850,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 03 2.02 0015 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya | - | - | - | 10 Unit | 100,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 100,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 03 2.02 0018 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per tahun) | - | - | - | 200 Orang | 75,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Memperkuat infrastruktur untuk Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan dan Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Reformasi Birokrasi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 400,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 03 2.02 0019 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | - | - | - | 50 Keluarga | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 100,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 03 2.02 0021 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana | - | - | - | 10 Orang | 40,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 100,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 03 2.02 0026 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdaops) dengan Maktumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya | - | - | - | 1 laporan | 45,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 50,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 03 2.02 0028 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana | - | - | - | 4 Kawasan | 40,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 100,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 03 2.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | - | - | - | 3 Jenis | 200,000,000 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi Reformasi Birokrasi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 150,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|------|------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---|--------------------------------------|--|---|---|------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 05 | 03 | 2.03 | 0003 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | - | - | 50 Orang | 150,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 100,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| 1 | 05 | 03 | 2.03 | 0009 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | - | - | 50 Orang | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 50,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| 1 | 05 | 03 | 2.04 | | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | - | - | 3 Jenis | 50,000,000 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | Kota Lhokseumawe | - | 50,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| 1 | 05 | 03 | 2.04 | 0010 | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan | - | - | 1 Kegiatan | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | Kota Lhokseumawe | - | 50,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| 29 | 1 | 05 | 04 | | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | - | - | 100 Persen | 175,000,000 | | | | | | - | 250,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| 1 | 05 | 04 | 2.01 | | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 4 Jenis | 175,000,000 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Reformasi Birokrasi | Kota Lhokseumawe | - | 250,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| 1 | 05 | 04 | 2.01 | 0002 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1 Laporan | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Reformasi Birokrasi | Kota Lhokseumawe | - | 50,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| 1 | 05 | 04 | 2.01 | 0007 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran | - | - | 10 Orang | 75,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | Kota Lhokseumawe | - | 100,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| 1 | 05 | 04 | 2.01 | 0017 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait | - | - | 2 Unit | 85,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | Kota Lhokseumawe | - | 100,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | | | | | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah | | | | | 6,737,402,059 | | | | | | - | 9,195,815,940 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah | |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | 6,737,402,059 | | | | | | - | 9,195,815,940 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah | |
| 1 | 05 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | 6,737,402,059 | | | | | | - | 9,195,815,940 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah | |
| 30 | 1 | 05 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | - | - | 100 Persen | 5,999,379,659 | | | | | | - | 8,558,458,636 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah | |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 6 Dokumen | 9,088,200 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Satpol PPWII Kota Lhokseumawe | - | 4,970,224 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah | |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | - | 10 Dokumen | 8,371,200 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Satpol PPWII Kota Lhokseumawe | - | 1,270,224 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah | |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|----|------|----|------|------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---|--------------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | | | 5 Laporan | 717,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Satpol PPWH Kota Lhokseumawe | 700,000 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Periode Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 12 Bulan | 4,510,509,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Satpol PPWH Kota Lhokseumawe | 3,546,933,000 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | 52 Orang/bulan | 4,510,509,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Satpol PPWH Kota Lhokseumawe | 3,545,593,000 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 4 Jenis | 17,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Satpol PPWH Kota Lhokseumawe | 224,500,000 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.05 | 0003 | Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | 4 Dokumen | 5,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Satpol PPWH Kota Lhokseumawe | 6,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | 1 Orang | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Satpol PPWH Kota Lhokseumawe | 25,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 35 Orang | 2,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Satpol PPWH Kota Lhokseumawe | 12,500,000 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Periode Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 12 Bulan | 113,640,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Satpol PPWH Kota Lhokseumawe | 143,640,000 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | 80 Paket | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Satpol PPWH Kota Lhokseumawe | 22,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | 1050 Paket | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Satpol PPWH Kota Lhokseumawe | 11,500,000 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | 2 Paket | 7,500,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Satpol PPWH Kota Lhokseumawe | 12,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | 12 Dokumen | 1,140,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Satpol PPWH Kota Lhokseumawe | 1,140,000 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 30 Laporan | 75,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Satpol PPWH Kota Lhokseumawe | 90,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 3 Jenis | 50,351,600 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Satpol PPWH Kota Lhokseumawe | 250,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | 5 Unit | 50,351,600 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Satpol PPWH Kota Lhokseumawe | 100,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Penyelenggaraan Jasa Penunjang Umum Pemerintahan Daerah | | | 3 Jenis | 1,081,290,859 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Satpol PPWH Kota Lhokseumawe | 4,128,915,412 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 12 Laporan | 1,500,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Satpol PPWH Kota Lhokseumawe | 2,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | 12 Laporan | 125,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Satpol PPWH Kota Lhokseumawe | 122,800,000 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | 12 Laporan | 954,790,859 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Satpol PPWH Kota Lhokseumawe | 4,004,115,412 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Periode Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 12 Bulan | 217,500,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Satpol PPWH Kota Lhokseumawe | 258,100,000 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah | | |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|----|------|----|------|------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---|--------------------------------------|--|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---|--|--------|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak | | | 1 Unit | 33,300,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Satpol PPWH Kota Lhokseumawe | 33,300,000 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan | | | 5 Unit | 154,200,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Satpol PPWH Kota Lhokseumawe | 167,800,000 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi | | | 2 Unit | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Satpol PPWH Kota Lhokseumawe | 44,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi | | | 16 Unit | 5,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Satpol PPWH Kota Lhokseumawe | 7,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi | | | 16 Unit | 5,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Satpol PPWH Kota Lhokseumawe | 6,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah | | |
| 31 | 1 | 05 | 02 | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | 100 Persen | 738,022,400 | | | | | | | 637,357,304 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah | |
| 1 | 05 | 02 | 2.01 | | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Periode Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | 12 Bulan | 390,196,700 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 213,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah | |
| 1 | 05 | 02 | 2.01 | 0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | | | 1 Dokumen | 95,001,500 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | 10,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah | | |
| 1 | 05 | 02 | 2.01 | 0004 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | 1 Dokumen | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | 10,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah | | |
| 1 | 05 | 02 | 2.01 | 0005 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas dan Bertanggung Jawab Asasi Manusia | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | 37 Orang | 15,155,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | 18,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah | | |
| 1 | 05 | 02 | 2.01 | 0015 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Ditegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | | | 12 laporan | 250,000,200 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | 170,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah | | |
| 1 | 05 | 02 | 2.01 | 0016 | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan | | | 3 Laporan | 5,040,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | 5,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah | | |
| 1 | 05 | 02 | 2.02 | | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Periode Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | | | 12 Bulan | 20,010,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 35,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah | |
| 1 | 05 | 02 | 2.02 | 0011 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Sesuai SOP | | | 60 Laporan | 20,010,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | 35,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah | | |
| 1 | 05 | 02 | 7.04 | | Pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh | Periode Pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh | | | 12 Bulan | 327,815,700 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Satpol PPWH, Masyarakat | | 364,857,304 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah | |
| 1 | 05 | 02 | 7.04 | 0002 | Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariah Islam | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariah Islam | | | 12 Laporan | 227,100,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Satpol PPWH, Masyarakat | 137,357,304 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah | | |
| 1 | 05 | 02 | 7.04 | 0003 | Pengawasan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariah Islam | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Telah Dilakukan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariah Islam | | | 12 Laporan | 25,000,400 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Satpol PPWH, Masyarakat | 80,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah | | |
| 1 | 05 | 02 | 7.04 | 0004 | Penyuluhan dan Sosialisasi Qanun dan Peraturan Perundang-Undangan Syariah Islam | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penyuluhan dan sosialisasi Qanun dan peraturan Perundang-undangan Syariah Islam | | | 3 Laporan | 25,033,700 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Satpol PPWH, Masyarakat | 25,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah | | |
| 1 | 05 | 02 | 7.04 | 0007 | Pelaksanaan Eksekusi Cembuk sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Eksekusi Cembuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku | | | 6 Laporan | 40,681,600 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Satpol PPWH, Masyarakat | 110,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah | | |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|----|------|----|------|------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---|--------------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 1 | 05 | 02 | 7.04 | 0009 | Pemberdayaan untuk Penyelesaian Qanun Syariah Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong dan Mukim | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pemberdayaan Penyelesaian Qanun Syariah Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong dan Mukim | | | 6 Laporan | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Satpol PPWH, Masyarakat | 12,500,000 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah | | |
| | | | | | Dinas Sosial | | | | | | | | | | 8,675,318,882 | Dinas Sosial | | | |
| | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | 4,397,523,880 | | | | | 8,675,318,882 | Dinas Sosial | | | |
| | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | 4,397,523,880 | | | | | 8,675,318,882 | Dinas Sosial | | | |
| 32 | 1 | 06 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | - | | 100 Persen | 3,264,523,880 | | | | | 3,771,988,893 | Dinas Sosial | | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah | - | | 20 Dokumen | 10,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pertumbuhan Ekonomi | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | 17,000,000 | Dinas Sosial | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | | 7 Dokumen | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pertumbuhan Ekonomi | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | 11,000,000 | Dinas Sosial | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Periode Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | 12 Bulan | 2,801,235,240 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pertumbuhan Ekonomi | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | 2,800,000,000 | Dinas Sosial | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | - | | 300 Orang/bulan | 2,801,235,240 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pertumbuhan Ekonomi | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | 2,800,000,000 | Dinas Sosial | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Periode Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | 12 Bulan | 79,140,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pertumbuhan Ekonomi | Dinas Sosial Kota Lhokseumawe | 232,635,082 | Dinas Sosial | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | - | | 90 Paket | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pertumbuhan Ekonomi | Dinas Sosial Kota Lhokseumawe | 50,142,618 | Dinas Sosial | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | - | | 200 Paket | 8,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pertumbuhan Ekonomi | Dinas Sosial Kota Lhokseumawe | 15,042,785 | Dinas Sosial | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | - | | 35 Paket | 5,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pertumbuhan Ekonomi | Dinas Sosial Kota Lhokseumawe | 24,569,883 | Dinas Sosial | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | - | | 365 Dokumen | 1,140,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pertumbuhan Ekonomi | Dinas Sosial Kota Lhokseumawe | 1,905,419 | Dinas Sosial | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - | | 30 Laporan | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pertumbuhan Ekonomi | Dinas Sosial Kota Lhokseumawe | 133,452,984 | Dinas Sosial | | |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|------|------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|--------------------------------------|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 17 Unit | 40,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda | Dinas Sosial Kota Lhokseumawe | 150,427,854 | Dinas Sosial | |
| 1 | 06 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | - | | | 10 Unit | 40,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda | Dinas Sosial Kota Lhokseumawe | 75,213,927 | Dinas Sosial | |
| 1 | 06 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 12 Bulan | 235,348,640 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda | Dinas Sosial Kota Lhokseumawe | 378,526,624 | Dinas Sosial | |
| 1 | 06 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - | | | 10 Laporan | 1,200,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda | Dinas Sosial Kota Lhokseumawe | 2,456,988 | Dinas Sosial | |
| 1 | 06 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | - | | | 30 Laporan | 56,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda | Dinas Sosial Kota Lhokseumawe | 75,213,927 | Dinas Sosial | |
| 1 | 06 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | - | | | 230 Laporan | 178,148,640 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda | Dinas Sosial Kota Lhokseumawe | 300,855,709 | Dinas Sosial | |
| 1 | 06 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 15 Unit | 98,800,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda | Dinas Sosial Kota Lhokseumawe | 123,199,666 | Dinas Sosial | |
| 1 | 06 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | - | | | 1 Unit | 33,300,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda | Dinas Sosial Kota Lhokseumawe | 33,000,000 | Dinas Sosial | |
| 1 | 06 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinnannya | - | | | 2 Unit | 25,500,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda | Dinas Sosial Kota Lhokseumawe | 60,171,142 | Dinas Sosial | |
| 1 | 06 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi | - | | | 5 Unit | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda | Dinas Sosial Kota Lhokseumawe | 20,000,000 | Dinas Sosial | |
| 1 | 06 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi | - | | | 7 Unit | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda | Dinas Sosial Kota Lhokseumawe | 10,028,524 | Dinas Sosial | |
| 33 | 1 | 06 | 02 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Cakupan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Keluarga Kurang Mampu | - | | | 76.80 Persen | 190,000,000 | | | | | | 790,669,004 | Dinas Sosial | |
| 1 | 06 | 02 | 2.03 | | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial | - | | | 76.80 Persen | 190,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda | Masyarakat Kota Lhokseumawe | 790,669,004 | Dinas Sosial | |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|------|------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|---|--|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 1 | 06 | 02 | 2.03 | 0001 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 50 Orang | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 110,000,000 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 02 | 2.03 | 0002 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 50 Orang | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 110,000,000 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 02 | 2.03 | 0003 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 50 Keluarga | 110,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 220,000,000 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 02 | 2.03 | 0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 5 Lembaga | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 317,310,123 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 02 | 2.03 | 0005 | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 4 Sertifikat | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 33,358,881 | Dinas Sosial |
| 34 | 1 | 06 | 04 | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase Penanganan Rehabilitasi Sosial | - | | | 100 Persen | 863,000,000 | | | | | | - | 2,067,861,433 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantli Sosial | Persentase PMS yang Memperoleh Bantuan Sosial | - | | | 100 Persen | 745,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 1,215,436,925 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0002 | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 100 Orang | 525,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 150,427,855 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0003 | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 50 Orang | 75,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 501,426,182 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0004 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 50 Orang | 5,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 18,051,343 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 50 Orang | 30,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 18,051,343 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0006 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 50 Orang | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 40,114,095 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0007 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 50 Orang | 30,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 77,169,489 | Dinas Sosial |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|----|------|----|------|------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|--------------------------------------|--|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----|----|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | 14 | 15 | | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0009 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 50 Orang | 5,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 18,051,343 | Dinas Sosial | | |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0011 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 50 Orang | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 30,085,571 | Dinas Sosial | | |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0012 | Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 50 Orang | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 30,085,571 | Dinas Sosial | | |
| 1 | 06 | 04 | 2.02 | | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial | - | | | 100 Persen | 118,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 852,424,508 | Dinas Sosial | | |
| 1 | 06 | 04 | 2.02 | 0001 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 50 Orang | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 25,071,309 | Dinas Sosial | | |
| 1 | 06 | 04 | 2.02 | 0005 | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 100 Orang | 78,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 150,427,855 | Dinas Sosial | | |
| 1 | 06 | 04 | 2.02 | 0008 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA | Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 50 Orang | 30,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 25,071,309 | Dinas Sosial | | |
| 35 | 1 | 06 | 05 | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial | - | | | 47.00 Persen | 40,000,000 | | | | | | - | 1,592,368,200 | Dinas Sosial | | |
| 1 | 06 | 05 | 2.02 | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | 142414 Orang | 40,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 1,191,854,037 | Dinas Sosial | | |
| 1 | 06 | 05 | 2.02 | 0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata | | | | 113755 Orang | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 270,000,000 | Dinas Sosial | | |
| 1 | 06 | 05 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota | | | | 28439 Keluarga | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 270,000,000 | Dinas Sosial | | |
| 36 | 1 | 06 | 06 | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Masa Tanggap Darurat | - | | | 100 Persen | 25,000,000 | | | | | | - | 402,288,734 | Dinas Sosial | | |
| 1 | 06 | 06 | 2.02 | | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Persentase Sosialisasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | - | | | 100 Persen | 25,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 56,159,732 | Dinas Sosial | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|-----------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|--------------------------------------|---|--|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | 06 06 2.02 0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | - | - | - | 25 Orang | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 28,079,866 | Dinas Sosial |
| 37 | 1 06 07 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Persentase Taman Makam Pahlawan Yang dikelola | - | - | - | 100 Persen | 15,000,000 | | | | | | - | 50,142,618 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 07 2.01 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara | - | - | - | 1 Makam | 15,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pertumbuhan Ekonomi | Taman Makam Pahlawan Kota Lhokseumawe | - | 50,142,618 | Dinas Sosial |
| 1 | 06 07 2.01 0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota | - | - | - | 1 Makam | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pertumbuhan Ekonomi | Taman Makam Pahlawan Kota Lhokseumawe | - | 50,142,618 | Dinas Sosial |
| | | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | | | | | 6,831,992,000 | | | | | | | 8,704,220,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 6,831,992,000 | | | | | | | 8,704,220,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 08 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | 4,534,992,000 | | | | | | | 6,315,220,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 38 | 2 08 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | - | - | - | 100 Persen | 3,779,992,000 | | | | | | - | 5,206,220,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 08 01 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | - | - | 14 Dokumen | 15,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | DP3AP2KB | - | 27,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 08 01 2.01 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | - | - | 14 Dokumen | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | DP3AP2KB | - | 27,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 08 01 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Periode Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - | - | - | 12 Bulan | 3,137,064,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | DP3AP2KB | - | 3,800,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 08 01 2.02 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | - | - | - | 29 Orang/bulan | 3,137,064,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | DP3AP2KB | - | 3,800,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 08 01 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Periode Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian | - | - | - | 12 Bulan | 8,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | DP3AP2KB | - | 250,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|------|------|--|--|---|--|---|--|---------------------|---|--------------------------------------|--|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 08 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | 3 Orang | 8,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | DP3AP2KB | | 140,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Periode Pengediaan Administrasi Umum OPD | | | 12 Bulan | 121,678,720 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | DP3AP2KB | | 282,700,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 0002 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | 3 Paket | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | DP3AP2KB | | 70,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 0004 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | 2 Paket | 15,538,720 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | DP3AP2KB | | 28,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 0005 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | 2 Paket | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | DP3AP2KB | | 30,600,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 0006 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | 1 Dokumen | 1,140,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | DP3AP2KB | | 1,400,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 0009 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 10 Laporan | 75,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | DP3AP2KB | | 152,700,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 08 | 01 | 2.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | 7 Unit | 60,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | DP3AP2KB | | 180,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 08 | 01 | 2.07 | 0011 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | 8 Unit | 60,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | DP3AP2KB | | 180,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 08 | 01 | 2.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 12 Bulan | 280,149,280 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | DP3AP2KB | | 471,520,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 08 | 01 | 2.08 | 0001 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 3 Laporan | 1,200,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | DP3AP2KB | | 1,520,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 08 | 01 | 2.08 | 0002 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | 1 Laporan | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | DP3AP2KB | | 70,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|--------------------------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 08 01 2.08 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | - | - | - | 2 Laporan | 228,949,280 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | DP3AP2KB | - | 400,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 08 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Periode Pemeliharaan Barang Milik Daerah | - | - | - | 12 Bulan | 158,100,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | DP3AP2KB | - | 195,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 08 01 2.09 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | - | - | - | 1 Unit | 33,300,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | DP3AP2KB | - | 40,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 08 01 2.09 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | - | - | - | 4 Unit | 84,800,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | DP3AP2KB | - | 60,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 08 01 2.09 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | - | - | - | 1 Unit | 30,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | DP3AP2KB | - | 60,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 08 01 2.09 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | - | - | - | 8 Unit | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | DP3AP2KB | - | 35,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 39 | 2 08 02 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender | - | - | - | 58.58 Persen | 45,000,000 | | | | | - | 172,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| 2 | 08 02 2.01 | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah OPD yang mengikuti Sosialisasi PUG dan PPRG | - | - | - | 15 OPD | 10,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | Instansi Pemerintah | - | 67,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 08 02 2.01 0008 | Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota | Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota | - | - | - | 15 Orang | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | Instansi Pemerintah | - | 27,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 08 02 2.02 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perempuan yang Terlibat di Partai Politik Yang Mendapatkan Penguatan Kapasitas | - | - | - | 15 Orang | 15,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | - | - | 25,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 08 02 2.02 0001 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | - | - | - | 1 Dokumen | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | - | - | 25,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 08 02 2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | - | - | - | 1 Lembaga | 20,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | Perempuan Kota Lhokseumawe | - | 80,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|------|------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---|---|--|---|--|------------------|--|--|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 2 | 08 | 02 | 2.03 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | - | - | 15 Orang | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | Perempuan Kota Lhokseumawe | - | 30,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| 40 | 2 | 08 | 03 | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Cakupan Perlindungan Perempuan | - | - | 87.50 Persen | 230,000,000 | | | | | - | 285,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | |
| 2 | 08 | 03 | 2.01 | | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan | - | - | 90 Orang | 65,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | Perempuan Korban Kekerasan | - | 95,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| 2 | 08 | 03 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | - | - | 4 Dokumen | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | Perempuan Korban Kekerasan | - | 70,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| 2 | 08 | 03 | 2.01 | 0002 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | - | - | 15 Perangkat Daerah | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | Perempuan Korban Kekerasan | - | 25,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| 2 | 08 | 03 | 2.02 | | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan bagi perempuan korban kekerasan | - | - | 65 Layanan | 130,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | Perempuan Korban Kekerasan | - | 140,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| 2 | 08 | 03 | 2.02 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | - | - | 65 Layanan | 130,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | Perempuan Korban Kekerasan | - | 140,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| 2 | 08 | 03 | 2.03 | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan | - | - | 40 Layanan | 35,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | Lembaga Pemerintah, Lembaga Masyarakat dan Aparatur Gampong | - | 50,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| 2 | 08 | 03 | 2.03 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | - | - | 30 Orang | 35,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | Lembaga Pemerintah, Lembaga Masyarakat dan Aparatur Gampong | - | 50,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| 41 | 2 | 08 | 04 | | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Persentase Pembinaan Kelompok Perempuan/Persentase Pembinaan kelompok perempuan | - | - | 93.83 Persen | 15,000,000 | | | | | - | 30,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | |
| 2 | 08 | 04 | 2.01 | | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Melalui PUSPAGA | - | - | 1 Layanan | 15,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 30,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| 2 | 08 | 04 | 2.01 | 0003 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | - | - | 1 Dokumen | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 30,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|---|---|--|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 2 08 05 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Persentase Perangkat Daerah yang Menyediakan Kebutuhan Data SIGA/SDGA | - | - | - | 32.35 Persen | 20,000,000 | | | | | | - | 30,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 2 08 05 2.01 | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Pengajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pengajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota | - | - | - | 1 Dokumen | 20,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | Instansi Pemerintah | - | 30,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 2 08 05 2.01 0002 | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota | - | - | - | 15 Dokumen | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | Instansi Pemerintah | - | 30,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 43 | 2 08 06 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Cakupan Pemenuhan Hak Anak | - | - | - | 39.86 Persen | 122,000,000 | | | | | | - | 192,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 2 08 06 2.01 | Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | - | - | - | 7 Organisasi | 50,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | Anak Kota Lhokseumawe | - | 70,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 2 08 06 2.01 0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | - | - | - | 7 Organisasi | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | Anak Kota Lhokseumawe | - | 70,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 2 08 06 2.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Tersedanya layanan untuk peningkatan kualitas hidup anak | - | - | - | 4 Layanan PHA | 72,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | - | - | 122,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 2 08 06 2.02 0001 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | - | - | - | 69297 Orang | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | - | - | 35,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 2 08 06 2.02 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | - | - | - | 1 Dokumen | 6,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | - | - | 12,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 2 08 06 2.02 0003 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | - | - | - | 1 Dokumen | 36,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi | - | - | 45,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 2 08 06 2.02 0004 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | - | - | - | 1 Dokumen | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | - | - | 30,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 44 | 2 08 07 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Persentase Anak Memenuhi Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | - | - | - | 100 Persen | 323,000,000 | | | | | | - | 400,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|-----------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|---|---|--|---|-----------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2 | 08 07 2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Kekerasan Terhadap Anak | - | - | - | 3 Kegiatan | 93,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | Anak Korban Kekerasan | - | 130,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 08 07 2.01 0003 | Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA | Jumlah kegiatan pencegahan KTA terpadu | - | - | - | 1 Kegiatan | 13,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | Anak Korban Kekerasan | - | 30,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 08 07 2.01 0004 | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA | Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA | - | - | - | 700 Orang | 80,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi | Anak Korban Kekerasan | - | 100,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 08 07 2.02 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapat layanan Komprehensif | - | - | - | 60 orang | 175,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | Anak Korban Kekerasan | - | 200,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 08 07 2.02 0005 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan | - | - | - | 60 Orang | 175,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | Anak Korban Kekerasan | - | 200,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 08 07 2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya Pengetahuan Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan khusus | - | - | - | 40 Orang | 55,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | Lembaga Penyedia Layanan | - | 70,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 08 07 2.03 0006 | Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ | Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK | - | - | - | 40 Orang | 55,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | Lembaga Penyedia Layanan | - | 70,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | 2,297,000,000 | | | | | | | 2,389,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 45 | 2 14 02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Persentase Perangkat Daerah yang Berperan aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB | - | - | - | 67.65 Persen | 179,200,000 | | | | | | - | 210,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14 02 2.01 | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Jumlah Kebijakan Daerah dalam melaksanakan kuantitas pengendalian penduduk | - | - | - | 1 Dokumen | 15,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe, Stakeholders | - | 25,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14 02 2.01 0021 | Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal | Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan | - | - | - | 1 Kegiatan | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe, Stakeholders | - | 25,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14 02 2.02 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pemetaan Pengendalian Penduduk | - | - | - | 1 Dokumen | 164,200,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 185,000,000 | Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|------|------|--|--|---|----------------------------------|--|---|---|--|---|--|---|-----------------------------|------------------|---|--|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 14 | 02 | 2.02 | 0012 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | - | - | 1 Laporan | 61,200,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 70,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | 0013 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | - | - | 1 Dokumen | 103,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKB-KB | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 115,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | |
| 46 | 2 | 14 | 03 | | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana | - | - | 51.08 Persen | 1,329,400,000 | | | | | | | 1,630,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | | | <i>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</i> | <i>Jumlah Laporan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</i> | - | - | <i>1 Laporan</i> | <i>788,400,000</i> | | | <i>Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas</i> | <i>Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan</i> | | | <i>845,000,000</i> | <i>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</i> | |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 0008 | Pengendalian Program KKBPK | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK | - | - | 3 Laporan | 130,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKB-KB | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | | | 150,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 0010 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | - | - | 1 Laporan | 198,400,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | | | 210,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 0011 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | - | - | 1 Laporan | 60,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | | | 65,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 0012 | Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media | - | - | 1 Dokumen | 200,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | | | 210,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 0014 | Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | - | - | 10 Organisasi | 200,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | | | 210,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | |
| 2 | 14 | 03 | 2.02 | | | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD | - | - | 238 orang | 219,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | PPKBD dan Sub PPKBD | | 250,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| 2 | 14 | 03 | 2.02 | 0004 | Penggerakan Kader institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | - | - | 20 Orang | 219,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB, DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | PPKBD dan Sub PPKBD | | 250,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | | | <i>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</i> | <i>Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i> | - | - | <i>23 Pakes</i> | <i>234,000,000</i> | | | <i>Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas</i> | <i>Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan</i> | <i>Aseptor KB</i> | | <i>400,000,000</i> | <i>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</i> | |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|------|------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---|--|--|---|-------------------------------|--------------------|--|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 0001 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | - | - | 1 Laporan | 31,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Aseptor KB | 40,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 0003 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | - | - | 700 Orang | 133,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Aseptor KB | 170,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 0006 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB | - | - | 4 Unit | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Aseptor KB | 110,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 0008 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | - | - | 1 Laporan | 30,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Aseptor KB | 40,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 0010 | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | - | - | 20 Orang | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Aseptor KB | 40,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | |
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Peningkatan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB | - | - | 4 Kampung KB | 88,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Kampung KB | 135,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | |
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | 0002 | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | - | - | 1 Dokumen | 5,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Kampung KB | 15,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | |
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | 0004 | Pembinaan Terpadu Kampung KB | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB | - | - | 4 Laporan | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Kampung KB | 40,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | |
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | 0006 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas | Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | - | - | 52 Kampung | 63,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Kesehatan | Kampung KB | 80,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | |
| 47 | 2 | 14 | 04 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Cakupan Pemberdayaan dan Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera/Peningkatan Keluarga Sejahtera | - | - | 112.13 Persen | 788,400,000 | | | | | | 549,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dihentuk | - | - | 61 Kelompok | 358,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | GENRE KOTA LHKOSEUMAWE | 69,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 0016 | Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | - | - | 1 Laporan / Dokumen | 18,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | GENRE KOTA LHKOSEUMAWE | 22,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|--|---|----------------------------------|---|--|---|---------------------|---|---|---|---|--|-----------------------------------|---|---|
| | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 14 | 04 | 2.01 | 0017 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | 1 Laporan | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | GENRE KOTA LHOKEUMAWA | 17,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 0018 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang tersedia | 1 Unit | 300,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | GENRE KOTA LHOKEUMAWA | - | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 0021 | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | 1 Laporan | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | GENRE KOTA LHOKEUMAWA | 30,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| 2 | 14 | 04 | 2.02 | | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Tenaga Penyuluh PKB/PLKB | 204 Orang | 430,400,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Calon Pengantin, Keluarga Berisiko Stunting dan Balita | 480,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| 2 | 14 | 04 | 2.02 | 0005 | Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | 1 laporan | 204,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Calon Pengantin, Keluarga Berisiko Stunting dan Balita | 230,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| 2 | 14 | 04 | 2.02 | 0006 | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan | 1 laporan | 226,400,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Kesehatan | Calon Pengantin, Keluarga Berisiko Stunting dan Balita | 250,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| 2 | | | | | Dinas Pertanahan | | | 3,865,195,200 | | | | | | | 4,289,703,513 | Dinas Pertanahan |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | 3,865,195,200 | | | | | | | 4,289,703,513 | Dinas Pertanahan |
| 2 | 10 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | | 3,865,195,200 | | | | | | | 4,289,703,513 | Dinas Pertanahan |
| 48 | 2 | 10 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | 100 Persen | 3,460,195,200 | | | | | | | 2,914,703,438 | Dinas Pertanahan |
| 2 | 10 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Dokumen | 10,000,000 | | | | | | | 17,655,508 | Dinas Pertanahan |
| 2 | 10 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | | | | 15,574,708 | Dinas Pertanahan |
| 2 | 10 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Periode Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 12 Bulan | 3,054,172,000 | | | | | | | 2,478,533,260 | Dinas Pertanahan |
| 2 | 10 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 490 Orang/bulan | 3,054,172,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | | | | 2,472,533,260 | Dinas Pertanahan |
| 2 | 10 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Periode Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | 115,140,000 | | | | | | | 93,219,840 | Dinas Pertanahan |
| 2 | 10 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | | | | 2,034,900 | Dinas Pertanahan |
| 2 | 10 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 370 Paket | 9,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | | | | 7,497,000 | Dinas Pertanahan |
| 2 | 10 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | | | | 7,497,000 | Dinas Pertanahan |
| 2 | 10 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 365 Dokumen | 1,140,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | | | | 1,220,940 | Dinas Pertanahan |
| 2 | 10 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 24 Laporan | 70,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | | | | 74,970,000 | Dinas Pertanahan |
| 2 | 10 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 2 Jenis | 23,000,000 | | | | | | | 54,381,979 | Dinas Pertanahan |
| 2 | 10 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 4 Unit | 23,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | | | | 26,950,991 | Dinas Pertanahan |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|-----------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|--------------------------------------|-----------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2 | 10.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | - | 3 Jenis | 154,783,200 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | - | - | 193,618,781 | Dinas Pertanahan |
| 2 | 10.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - | - | - | 80 Laporan | 1,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | - | - | 1,071,000 | Dinas Pertanahan |
| 2 | 10.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - | - | - | 48 Laporan | 60,500,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | - | - | 109,670,400 | Dinas Pertanahan |
| 2 | 10.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | - | - | - | 48 Laporan | 93,283,200 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | - | - | 82,877,381 | Dinas Pertanahan |
| 2 | 10.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | - | 4 Jenis | 103,100,000 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | - | - | 70,739,550 | Dinas Pertanahan |
| 2 | 10.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan | - | - | - | 1 Unit | 33,300,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | - | - | 35,664,300 | Dinas Pertanahan |
| 2 | 10.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan | - | - | - | 1 Unit | 44,800,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | - | - | 2,142,000 | Dinas Pertanahan |
| 2 | 10.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelembaga/Direhabilitasi | - | - | - | 1 Unit | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | - | - | 16,065,000 | Dinas Pertanahan |
| 2 | 10.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelembaga/Direhabilitasi | - | - | - | 15 Unit | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | - | - | 16,868,250 | Dinas Pertanahan |
| 50 | 2.10.08 | PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG | Persentase Penanganan Tanah Kosong | - | - | - | 25.00 Persen | 35,000,000 | | | - | | - | - | 100,000,000 | Dinas Pertanahan |
| 2 | 10.08.2.02 | Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong | Jumlah Laporan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong | - | - | - | 1 Laporan | 35,000,000 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | - | - | 70,000,000 | Dinas Pertanahan |
| 2 | 10.08.2.02.0001 | Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong | Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | - | - | - | 3 Laporan | 35,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | - | - | 35,000,000 | Dinas Pertanahan |
| 51 | 2.10.10 | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | Persentase Luas Lahan bersertifikat Milik Pemerintah | - | - | - | 0.63 Persen | 100,000,000 | | | - | | - | - | 200,000,000 | Dinas Pertanahan |
| 2 | 10.10.2.01 | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | Jenis Koordinasi Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | - | - | - | 3 Jenis | 100,000,000 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | - | - | 145,000,000 | Dinas Pertanahan |
| 2 | 10.10.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | - | - | - | 4 Laporan | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | - | - | 50,000,000 | Dinas Pertanahan |
| 2 | 10.10.2.01.0002 | Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelaksanaan Pendaftaran Lahan | - | - | - | 4 Dokumen | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | - | - | 45,000,000 | Dinas Pertanahan |
| 2 | 10.10.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota | - | - | - | 4 Dokumen | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | - | - | 50,000,000 | Dinas Pertanahan |
| 52 | 2.10.12 | PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH | Persentase Luas Lahan Bersertifikat Milik Masyarakat | - | - | - | 46.42 Persen | 35,000,000 | | | - | | - | - | 150,000,000 | Dinas Pertanahan |
| 2 | 10.12.7.01 | Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah | Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah | - | - | - | 1 Kegiatan | 35,000,000 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | - | - | 75,000,000 | Dinas Pertanahan |
| 2 | 10.12.7.01.0001 | Inventarisasi Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah | Jumlah Data Aset Tanah Pemerintah | - | - | - | 5 Laporan | 35,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | - | - | 75,000,000 | Dinas Pertanahan |
| 53 | 2.10.13 | PROGRAM SURVEL, PENGUKURAN DAN PEMETAAN | Persentase Tanah yang Dipetakan | - | - | - | 67.07 Persen | 50,000,000 | | | - | | - | - | 200,000,000 | Dinas Pertanahan |
| 2 | 10.13.7.01 | Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Gampong | Jenis Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah | - | - | - | 3 Jenis | 50,000,000 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | - | - | 200,000,000 | Dinas Pertanahan |
| 2 | 10.13.7.01.0001 | Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Permuda | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Permuda | - | - | - | 5 Dokumen | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | - | - | 80,000,000 | Dinas Pertanahan |
| 54 | 2.10.14 | PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN | Persentase Pembinaan SDM Pertanian | - | - | - | 57.02 Persen | 40,000,000 | | | - | | - | - | 200,000,000 | Dinas Pertanahan |
| 2 | 10.14.7.01 | Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan Pertanian Kabupaten | Jumlah Dokumen Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan Pertanian Kabupaten | - | - | - | 2 Dokumen | 20,000,000 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | - | - | 135,000,000 | Dinas Pertanahan |
| 2 | 10.14.7.01.0002 | Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanian | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanian | - | - | - | 5 Dokumen | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | - | - | 60,000,000 | Dinas Pertanahan |
| 2 | 10.14.7.02 | Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan SDM Pertanian | Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan SDM Pertanian | - | - | - | 1 Kegiatan | 20,000,000 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | - | - | 65,000,000 | Dinas Pertanahan |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|----|------|----|------|------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---|--------------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 2 | 10 | 14 | 7.02 | 0001 | Pembinaan Pertanahan bagi Imeum Mukim/Keuchik | Jumlah Imeum Mukim/Keuchik yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan Pertanahan | - | | 20 Orang | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | - | 65,000,000 | Dinas Pertanahan | | |
| 56 | 2 | 10 | 16 | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN | Ketersediaan Sistem Informasi Pertanahan | - | | Tidak Ada/Tidak | 75,000,000 | | | - | | - | 75,000,075 | Dinas Pertanahan | | |
| | 2 | 10 | 16 | 7.01 | Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH) | Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH) | - | | 2 Dokumen | 75,000,000 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | - | 75,000,075 | Dinas Pertanahan | | |
| 2 | 10 | 16 | 7.01 | 0001 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH) | Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH) | - | | 4 Dokumen | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | - | 75 | Dinas Pertanahan | | |
| 2 | 10 | 16 | 7.01 | 0002 | Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH) | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH) | - | | 1 Dokumen | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | - | 75,000,000 | Dinas Pertanahan | | |
| 57 | 2 | 10 | 17 | | PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN | Persentase Penyelesaian Kasus Sengketa Dan Konflik Pertanahan | - | | 60 Persen | 70,000,000 | | | - | | - | 100,000,000 | Dinas Pertanahan | | |
| | 2 | 10 | 17 | 7.01 | Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan | Jenis Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan | - | | 2 Jenis | 70,000,000 | | | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | - | 100,000,000 | Dinas Pertanahan | | |
| 2 | 10 | 17 | 7.01 | 0001 | Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | | 1 Dokumen | 35,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | - | 50,000,000 | Dinas Pertanahan | | |
| 2 | 10 | 17 | 7.01 | 0002 | Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan | Jumlah Layanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan | - | | 7 Layanan | 35,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | - | 50,000,000 | Dinas Pertanahan | | |
| | | | | | Dinas Lingkungan Hidup | | | | | 45,772,252,067 | | | | | | 33,268,660,600 | Dinas Lingkungan Hidup | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | 45,772,252,067 | | | | | | 33,268,660,600 | Dinas Lingkungan Hidup | | |
| 2 | 11 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | | 45,772,252,067 | | | | | | 33,268,660,600 | Dinas Lingkungan Hidup | | |
| 58 | 2 | 11 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | - | | 100 persen | 28.929,213,825 | | | | | | 29,086,547,780 | Dinas Lingkungan Hidup | | |
| 2 | 11 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | - | | 100 persen | 75,000,000 | | | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi Linkungan Hidup | Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | - | 127,570,275 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 2 | 11 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | | 5 Dokumen | 75,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | 127,570,275 | Dinas Lingkungan Hidup | | |
| 2 | 11 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | - | | 100 persen | 3,372,684,000 | | | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi Linkungan Hidup | Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | - | 2,906,801,006 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 2 | 11 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | - | | 434 Orang/bulan | 3,372,684,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | 2,906,801,006 | Dinas Lingkungan Hidup | | |
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | - | | 100 persen | 1,361,140,000 | | | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi Linkungan Hidup | Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | - | 1,584,950,693 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | - | | 1 Paket | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | 15,468,185 | Dinas Lingkungan Hidup | | |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|----|------|----|------|------|--|--|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|---|--|--|---|--|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1,250,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | | 1,447,031,250 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | | 2,083,725 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 1,140,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | | 1,319,693 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 80,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | | 109,974,375 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | | | | 100 persen | 50,000,000 | | | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | | 461,250,000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA BAGI HASIL (DBH) MINYAK DAN GAS OTONOMI KHUSUS ACEH | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | | 461,250,000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | | | | 100 persen | 22,260,030,625 | | | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Hidup | Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | | 20,917,946,643 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1,500,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Hidup | Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | | 1,736,438 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 21,576,382,250 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | | 10,625,422,725 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 682,148,375 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | | 10,290,787,480 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | | | | 100 persen | 1,810,359,200 | | | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | | 2,624,979,163 | Dinas Lingkungan Hidup |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|------|------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---|--------------------------------------|--|---|---|------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 2 | 11 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | - | - | 1 Unit | 33,300,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | - | 38,548,913 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 2 | 11 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | - | - | 23 Unit | 1,727,059,200 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | - | 2,501,430,250 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 2 | 11 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | - | - | 1 Unit | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | - | 85,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 59 | 2 | 11 | 02 | | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Termusnya RPPLH Kab/Kota | - | - | Ada | 150,000,000 | | | | | - | 281,525,000 | Dinas Lingkungan Hidup | | |
| 2 | 11 | 02 | 2.01 | | <i>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</i> | <i>Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota</i> | - | - | Ada/Tidak | 100,000,000 | | | <i>Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur</i> | <i>Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi</i> | <i>Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Udara, Tanah, dan Air</i> | - | 231,525,000 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 2 | 11 | 02 | 2.01 | 0002 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota | - | - | 1 Dokumen | 100,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Udara, Tanah, dan Air | - | 115,762,500 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 2 | 11 | 02 | 2.02 | | <i>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</i> | <i>Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Udara, Tanah, dan Air</i> | - | - | 65,35 IKLH | 50,000,000 | | | <i>Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur</i> | <i>Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi</i> | <i>Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Udara, Tanah, dan Air</i> | - | 50,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 2 | 11 | 02 | 2.02 | 0002 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun | - | - | 1 Dokumen | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Udara, Tanah, dan Air | - | 50,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 60 | 2 | 11 | 03 | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | - | - | 65,80 | 8,653,820,000 | | | | | - | 420,169,000 | Dinas Lingkungan Hidup | | |
| 2 | 11 | 03 | 2.01 | | <i>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i> | <i>Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Udara, Tanah, dan Air</i> | - | - | 65,80 IKLH | 8,573,820,000 | | | | <i>Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi</i> | <i>Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Udara, Tanah, dan Air</i> | - | 50,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 2 | 11 | 03 | 2.01 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | - | - | 1 Dokumen | 8,573,820,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Udara, Tanah, dan Air | - | 50,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 2 | 11 | 03 | 2.02 | | <i>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i> | <i>Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Udara, Tanah, dan Air</i> | - | - | 65,80 IKLH | 80,000,000 | | | <i>Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur</i> | <i>Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi</i> | <i>Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Udara, Tanah, dan Air</i> | - | 370,169,000 | Dinas Lingkungan Hidup | |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|------|------|--|---|---|--|---|--|---|--|---|--|---|---|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 11 | 03 | 2.02 | 0001 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan | | | 1 Laporan | 49,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Udara, Tanah, dan Air | | 220,500,000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 03 | 2.02 | 0003 | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan | | | 1 Titik | 31,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Udara, Tanah, dan Air | | 149,669,000 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 61 | 2 | 11 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Persentase luasan taman | - | | 76.70 persen | 719,218,242 | | | | | | | 1,122,537,570 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 04 | 2.01 | | | Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | Persentase RTH Publik | - | | 2,49 persen | 719,218,242 | | | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | Persentase RTH Publik | - | 1,122,537,570 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 04 | 2.01 | 0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 0.25 Ha | 30,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | Persentase RTH Publik | | 55,125,000 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 2 | 11 | 04 | 2.01 | 0007 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati | Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola | | | 1 Unit | 639,218,242 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA BAGI HASIL (DBH) MINYAK DAN GAS OTONOMI KHUSUS ACEH | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | Persentase RTH Publik | | 857,882,445 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 2 | 11 | 04 | 2.01 | 0008 | Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya | Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 2 Unit | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | Persentase RTH Publik | | 209,530,125 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 63 | 2 | 11 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten / Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten / kota. | - | | 90 persen | 110,000,000 | | | | | | | 350,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 06 | 2.01 | | | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Udara, Tanah, dan Air | - | | 65,80 IKLH | 110,000,000 | | | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Udara, Tanah, dan Air | - | 350,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 | 06 | 2.01 | 0001 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan | | | 1 Dokumen | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Udara, Tanah, dan Air | | 150,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 2 | 11 | 06 | 2.01 | 0007 | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya | | | 1 Orang | 30,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Udara, Tanah, dan Air | | 50,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 2 | 11 | 06 | 2.01 | 0009 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | | | 10 Badan Usaha | 55,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Udara, Tanah, dan Air | | 150,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 64 | 2 | 11 | 10 | | | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup | - | | 100 persen | 25,000,000 | | | | | | | 100,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|-----------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|--|--|--|--|-----------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2 | 11 10 2.01 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Udara, Tanah, dan Air | - | - | - | 65,80 IKLH | 25,000,000 | | | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Udara, Tanah, dan Air | - | 100,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 10 2.01 0004 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani | - | - | - | 5 Pengaduan | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Udara, Tanah, dan Air | - | 100,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 65 | 2 11 11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase jumlah sampah yang ditangani | - | - | - | 91,08 persen | 7,185,000,000 | | | | | | - | 1,657,881,250 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 11 2.01 | Pengelolaan Sampah | Persentase sampah yang tertangani | - | - | - | 91,08 persen | 7,155,000,000 | | | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Udara, Tanah, dan Air | - | 1,600,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 11 2.01 0004 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat | - | - | - | 34 Kelompok | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Udara, Tanah, dan Air | - | 50,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 11 2.01 0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada | - | - | - | 1 Dokumen | 150,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA BAGI HASIL (DBH) MINYAK DAN GAS OTONOMI KHUSUS ACEH | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Udara, Tanah, dan Air | - | 600,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 11 2.01 0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | - | - | - | 2 Unit | 6,700,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA BAGI HASIL (DBH) MINYAK DAN GAS OTONOMI KHUSUS ACEH | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Udara, Tanah, dan Air | - | 300,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 11 2.01 0020 | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | - | - | - | 85 Ton | 250,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH MINYAK DAN GAS OTONOMI KHUSUS ACEH | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Udara, Tanah, dan Air | - | 600,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 11 2.01 0021 | Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan | Jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan | - | - | - | 1 Dokumen | 30,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Udara, Tanah, dan Air | - | 50,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 11 2.03 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Udara, Tanah, dan Air | - | - | - | 65,80 IKLH | 30,000,000 | | | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Udara, Tanah, dan Air | - | 57,881,250 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | 11 11 2.03 0002 | Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah | Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan | - | - | - | 1 Unit | 30,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Udara, Tanah, dan Air | - | 57,881,250 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | | | 4,637,825,424 | | | | | | | 3,999,422,676 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 4,637,825,424 | | | | | | | 3,999,422,676 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | 4,637,825,424 | | | | | | | 3,999,422,676 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|----|-----------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|------------------|-----------------------------------|---------------|---|----|----|
| | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | 14 | 15 | | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | | | |
| 66 | 2 12 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | - | - | - | 100 Persen | 3,632,825,424 | | | | | - | - | 3,651,320,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | |
| 2 | 12 01 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | - | 6 Dokumen | 15,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | - | 15,000,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | |
| 2 | 12 01 2.01 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | - | - | 6 Dokumen | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | - | 15,000,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | |
| 2 | 12 01 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Periode Pengediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | - | 1 Tahun | 2,684,286,864 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | - | 2,200,000,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | |
| 2 | 12 01 2.02 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | - | - | - | 30 Orang/bulan | 2,684,286,864 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | - | 2,200,000,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | |
| 2 | 12 01 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Periode Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | - | 12 Bulan | 10,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | - | 60,000,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | |
| 2 | 12 01 2.05 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | - | - | - | 5 Orang | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | - | 30,000,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | |
| 2 | 12 01 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Periode Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | - | 12 Bulan | 136,140,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | - | 188,800,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | |
| 2 | 12 01 2.06 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | - | - | - | 3 Paket | 30,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | - | 50,000,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | |
| 2 | 12 01 2.06 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | - | - | - | 2 Paket | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | - | 15,000,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | |
| 2 | 12 01 2.06 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | - | - | - | 1 Paket | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | - | 20,000,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | |
| 2 | 12 01 2.06 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | - | - | - | 1 Dokumen | 1,140,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | - | 1,800,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | |
| 2 | 12 01 2.06 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - | - | - | 20 Laporan | 80,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | - | 100,000,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | |
| 2 | 12 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | - | 20 Unit | 262,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | - | 385,000,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | |
| 2 | 12 01 2.07 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | - | - | - | 20 Unit | 262,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | - | 200,000,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | |
| 2 | 12 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Periode Pengediaan Jasa Penunjang Umum Pemerintahan Daerah | - | - | - | 12 Bulan | 372,698,560 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | - | 531,600,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | |
| 2 | 12 01 2.08 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - | - | - | 2 Laporan | 1,500,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | - | 5,000,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | |
| 2 | 12 01 2.08 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | - | - | - | 4 Laporan | 162,210,102 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | - | 146,600,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | |
| 2 | 12 01 2.08 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | - | - | - | 4 Laporan | 208,988,458 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | - | 330,000,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | |
| 2 | 12 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Periode Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | - | 12 Bulan | 142,700,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | - | 267,420,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|----|------|--|---|----------------------------------|--|---|---|---------------------|--------------------|--|--|--|---|--|----|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | 14 | 15 | | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | | | |
| 1 | 2 | 12 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak | - | 1 Unit | 33,300,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | - | 40,000,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | 12 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan | - | 2 Unit | 49,400,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | - | 77,420,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| 2 | 12 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi | - | 1 Unit | 40,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | - | 75,000,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| 2 | 12 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dirhabilitasi | - | 45 Unit | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | - | 70,000,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| 2 | 12 | 01 | 2.13 | | Penataan Organisasi | Jumlah Dokumen Penataan Organisasi | - | 1 Dokumen | 10,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | - | 3,500,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| 2 | 12 | 01 | 2.13 | 0004 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | - | 1 Dokumen | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | - | 3,500,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| 67 | 2 | 12 | 02 | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | - | 74.88 Persen | 205,000,000 | | | | | - | - | 114,000,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| 2 | 12 | 02 | 2.01 | | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Layanan Kependudukan Yang Terdaftar | - | 12 Layanan | 70,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | - | 45,000,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| 2 | 12 | 02 | 2.01 | 0001 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | - | 2 Dokumen | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | - | 10,000,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| 2 | 12 | 02 | 2.01 | 0004 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | - | 1 Laporan | 40,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | - | 20,000,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| 2 | 12 | 02 | 2.01 | 0008 | Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk | Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk | - | 20160 Dokumen | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | - | 15,000,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| 2 | 12 | 02 | 2.02 | | Penataan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Blangko KIA Yang Diterbitkan | - | 12000 Keping | 80,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | - | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| 2 | 12 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan kebutuhan | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan kebutuhan | - | 1 Dokumen | 80,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | - | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| 2 | 12 | 02 | 2.03 | | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | Frekuensi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | - | 5 Dokumen | 45,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | - | 64,000,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| 2 | 12 | 02 | 2.03 | 0001 | Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | - | 2 Laporan | 30,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | - | 30,000,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| 2 | 12 | 02 | 2.03 | 0008 | Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Ditampilkan | - | 46800 Dokumen | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | - | 4,000,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| 2 | 12 | 02 | 2.04 | | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | Periode Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | - | 12 Bulan | 10,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | - | 5,000,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| 2 | 12 | 02 | 2.04 | 0001 | Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk | - | 2 Dokumen | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | - | 5,000,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| 68 | 2 | 12 | 03 | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil | - | 88.85 Persen | 135,000,000 | | | | | - | - | 71,604,349 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| 2 | 12 | 03 | 2.01 | | Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil | - | 5 Dokumen | 60,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | - | 19,604,349 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| 2 | 12 | 03 | 2.01 | 0002 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan | - | 1 Layanan | 40,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | - | 9,604,349 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|----|------|----|------|------|--|---|----------------------------------|--|---|--|--|--------------------------------------|--|---|------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 2 | 12 | 03 | 2.01 | 0003 | Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil | Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil | - | - | 5 Dokumen | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | 10,000,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | |
| 2 | 12 | 03 | 2.02 | | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | Jumlah Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | - | - | 11 Laporan | 75,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | 42,000,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | |
| 2 | 12 | 03 | 2.02 | 0003 | Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil | - | - | 5 Laporan | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | 10,000,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | |
| 2 | 12 | 03 | 2.02 | 0004 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | - | - | 12 Laporan | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | 5,000,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | |
| 2 | 12 | 03 | 2.02 | 0008 | Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil | - | - | 5 Laporan | 30,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | 27,000,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | |
| 69 | 2 | 12 | 04 | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Cakupan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | - | - | 100 Persen | 650,000,000 | | | | | - | 137,355,709 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | |
| 2 | 12 | 04 | 2.01 | | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | Jumlah Dokumen Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | - | - | 4 Dokumen | 30,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | 23,500,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | |
| 2 | 12 | 04 | 2.01 | 0001 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan | - | - | 4 Dokumen | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | 10,000,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | |
| 2 | 12 | 04 | 2.01 | 0002 | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | - | - | 34 Dokumen | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | 8,500,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | |
| 2 | 12 | 04 | 2.01 | 0003 | Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah | - | - | 2 Laporan | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | 5,000,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | |
| 2 | 12 | 04 | 2.03 | | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Administrasi Kependudukan | - | - | 8 Laporan | 600,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | 103,855,709 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | |
| 2 | 12 | 04 | 2.03 | 0003 | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | - | - | 12 Laporan | 540,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | 15,855,709 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | |
| 2 | 12 | 04 | 2.03 | 0005 | Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | - | - | 4 Laporan | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | 30,000,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | |
| 2 | 12 | 04 | 2.03 | 0007 | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | - | - | 4 Laporan | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | 38,000,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | |
| 2 | 12 | 04 | 2.03 | 0008 | Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan | - | - | 2 Dokumen | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | 20,000,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | |
| 2 | 12 | 04 | 2.04 | | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | - | - | 1 Laporan | 20,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | 10,000,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | |
| 2 | 12 | 04 | 2.04 | 0001 | Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | - | - | 1 Laporan | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | 10,000,000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | |
| 70 | 2 | 12 | 05 | | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | Ketersediaan Profil Perkembangan Kependudukan | - | - | Ada Ada | 15,000,000 | | | | | - | 25,142,618 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | |
| 2 | 12 | 05 | 2.01 | | Penyusunan Profil Kependudukan | Jumlah Buku Profil Kependudukan | - | - | 2 Dokumen | 15,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | 25,142,618 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | |
| 2 | 12 | 05 | 2.01 | 0002 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang terasah | - | - | 1 Dokumen | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | 25,142,618 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | |
| | | | | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | | | | | 3,685,762,633 | | | | | - | 3,334,780,926 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | 3,685,762,633 | | | | | - | 3,334,780,926 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | | |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|----|------|----|------|------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---|--------------------------------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|--|--|----|----|--------|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | 14 | 15 | | 16 | 17 | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | | | | | | | Daerah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | |
| 2 | 13 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | - | - | 12 Laporan | 108,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotatan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan | - | 173,643,750 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | | | | |
| 2 | 13 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | - | - | 12 Laporan | 189,732,480 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotatan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan | - | 307,221,080 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | | | | |
| 2 | 13 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Milik Daerah | - | - | 1 Unit | 128,300,000 | | | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotatan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan | - | 280,978,740 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | | | | |
| 2 | 13 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | - | - | 1 Unit | 33,300,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotatan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan | - | 55,751,220 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | | | | |
| 2 | 13 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan | - | - | 1 Unit | 35,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotatan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan | - | 34,219,395 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | | | | |
| 2 | 13 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | - | - | 1 Unit | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotatan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan | - | 173,643,750 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | | | | |
| 2 | 13 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | - | - | 22 Unit | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotatan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan | - | 17,364,375 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | | | | |
| 74 | 2 | 13 | 04 | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong | - | - | 81.84 Persen | 230,000,000 | | | | | - | 290,428,940 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | | | | |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | - | - | 68 Gampong | 230,000,000 | | | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Reformasi Birokrasi | Pemerintahan Gampong | - | 290,428,940 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | | | |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | - | - | 1 Dokumen | 5,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotatan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan | Pemerintahan Gampong | 2,000,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | | | | |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0003 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | - | - | 3 Dokumen | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotatan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan | Pemerintahan Gampong | 25,000,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | | | | |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0004 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | - | - | 5 Dokumen | 90,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotatan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan | Pemerintahan Gampong | 100,000,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | | | | |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0005 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | - | - | 68 Orang | 5,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotatan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan | Pemerintahan Gampong | 35,000,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | | | | |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0006 | Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa | Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa | - | - | 1 Laporan | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotatan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan | Pemerintahan Gampong | 10,000,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | | | | |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0008 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | - | - | 10 Dokumen | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotatan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan | Pemerintahan Gampong | 30,000,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | | | | |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0009 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | - | - | 1 Laporan | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotatan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan | Pemerintahan Gampong | 1,428,940 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | | | | |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|----|------|----|------|------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|--------------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0010 | Fasilitas Pengangkutan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Laporan Fasilitas Pengangkutan dan Pemberhentian Perangkat Desa | | | 1 | Laporan | 5,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemerantasan Kemiskinan | Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan | Pemerintahan Gampong | | 3,000,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0011 | Fasilitas Penyusunan Profil Desa | Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun | | | 1 | Dokumen | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemerantasan Kemiskinan | Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan | Pemerintahan Gampong | | 10,000,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0012 | Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa | | | 1 | Dokumen | 5,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemerantasan Kemiskinan | Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan | Pemerintahan Gampong | | 5,000,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0013 | Fasilitas Pengelolaan Aset Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa | | | 1 | Dokumen | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemerantasan Kemiskinan | Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan | Pemerintahan Gampong | | 30,000,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0014 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | | | 68 | Orang | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemerantasan Kemiskinan | Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan | Pemerintahan Gampong | | 2,000,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0018 | Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | | | 1 | Dokumen | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemerantasan Kemiskinan | Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan | Pemerintahan Gampong | | 25,000,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong |
| 75 | 2 | 13 | 05 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan | - | - | 91.54 | Persen | 494,923,821 | | | | | | | 272,987,468 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 68 | Gampong | 494,923,821 | | | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemerantasan Kemiskinan | Reformatasi Birokrasi | Lembaga Kemasyarakatan Gampong | - | 272,987,468 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 0002 | Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | 1 | Dokumen | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemerantasan Kemiskinan | Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan | Lembaga Kemasyarakatan Gampong | | 30,000,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan | | | 1 | Lembaga | 30,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemerantasan Kemiskinan | Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan | Lembaga Kemasyarakatan Gampong | | 20,000,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 0005 | Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | | | 1 | Dokumen | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemerantasan Kemiskinan | Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan | Lembaga Kemasyarakatan Gampong | | 3,000,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 0006 | Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | 1 | Laporan | 154,923,821 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemerantasan Kemiskinan | Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan | Lembaga Kemasyarakatan Gampong | | 25,000,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 0007 | Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | | | 1 | Laporan | 5,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemerantasan Kemiskinan | Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan | Lembaga Kemasyarakatan Gampong | | 3,000,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 0008 | Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa | | | 1 | Dokumen | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemerantasan Kemiskinan | Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan | Lembaga Kemasyarakatan Gampong | | 3,000,000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|------|------|---|--|---|----------------------------------|--|---|--|---|--------------------------------------|--|---|--|----------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 0009 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | - | - | - | 2 Dokumen | 260,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perikanan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan | Lembaga Kemasyarakatan Gampong | - | 176,987,468 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | |
| | | | | | Dinas Perhubungan | | | | | | 6,175,615,375 | | | | | | 7,583,800,000 | Dinas Perhubungan | | |
| | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERTKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 6,175,615,375 | | | | | | 7,583,800,000 | Dinas Perhubungan | | |
| 2 | 15 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | | | 6,175,615,375 | | | | | | 7,583,800,000 | Dinas Perhubungan | | |
| 76 | 2 | 15 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | - | - | - | 100 Persen | 4,655,306,000 | | | | | | 5,543,800,000 | Dinas Perhubungan | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.01 | | <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah</i> | - | - | - | 2 Dokumen | 20,000,000 | | | <i>Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi</i> | <i>Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi</i> | <i>Dinas Perhubungan</i> | - | 25,000,000 | <i>Dinas Perhubungan</i> | |
| 2 | 15 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | - | - | 1 Dokumen | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | Dinas Perhubungan | - | 25,000,000 | Dinas Perhubungan | |
| 2 | 15 | 01 | 2.02 | | <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | <i>Periode Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | - | - | - | 12 Bulan | 2,438,766,000 | | | <i>Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi</i> | <i>Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi</i> | <i>Karyawan dan Karyawati Dinas Perhubungan</i> | - | 2,981,800,000 | <i>Dinas Perhubungan</i> | |
| 2 | 15 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | - | - | - | 26 Orang/bulan | 2,438,766,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | Karyawan dan Karyawati Dinas Perhubungan | - | 2,981,800,000 | Dinas Perhubungan | |
| 2 | 15 | 01 | 2.04 | | <i>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</i> | <i>Jumlah Dokumen Administrasi pendapatan pada Perangkat Daerah</i> | - | - | - | 2 Dokumen | 5,000,000 | | | <i>Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi</i> | <i>Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan</i> | <i>Retribusi Asli Daerah Kota Kota Lhokseumawe</i> | - | 100,000,000 | <i>Dinas Perhubungan</i> | |
| 2 | 15 | 01 | 2.04 | 0002 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah | - | - | - | 1 Dokumen | 5,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Retribusi Asli Daerah Kota Kota Lhokseumawe | - | 100,000,000 | Dinas Perhubungan | |
| 2 | 15 | 01 | 2.05 | | <i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> | <i>Periode Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> | - | - | - | 12 Bulan | 70,000,000 | | | <i>Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi</i> | <i>Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi</i> | <i>Karyawan dan Karyawati Dinas Perhubungan</i> | - | 80,000,000 | <i>Dinas Perhubungan</i> | |
| 2 | 15 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | - | - | - | 1 Paket | 55,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | Karyawan dan Karyawati Dinas Perhubungan | - | 55,000,000 | Dinas Perhubungan | |
| 2 | 15 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | - | - | - | 2 Orang | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Karyawan dan Karyawati Dinas Perhubungan | - | 25,000,000 | Dinas Perhubungan | |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|------|------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|--------------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | 14 | 15 | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Periode Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | - | 12 Bulan | 161,140,000 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Karyawan dan Karyawati Dinas Perhubungan | - | 252,000,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Karyawan dan Karyawati Dinas Perhubungan | | 35,000,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Karyawan dan Karyawati Dinas Perhubungan | | 30,000,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 30,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Karyawan dan Karyawati Dinas Perhubungan | | 35,000,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 1,140,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Karyawan dan Karyawati Dinas Perhubungan | | 2,000,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 50 Laporan | 90,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Karyawan dan Karyawati Dinas Perhubungan | | 150,000,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | - | 12 Bulan | 1,311,500,000 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Layanan administrasi pemerintahan Daerah | - | 1,331,700,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1,500,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Layanan administrasi pemerintahan Daerah | | 1,700,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 110,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Layanan administrasi pemerintahan Daerah | | 130,000,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 1,200,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Layanan administrasi pemerintahan Daerah | | 1,200,000,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | - | 57 Unit | 648,900,000 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Peralatan dan Mesin Intra yang terpelihara | - | 773,300,000 | Dinas Perhubungan |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|----|------|----|----|------|--|---|--|--|---|--|----------------------|--|--|--|---|--|----------------------|-----------------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 | 2 | 15 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | 1 Unit | 33,300,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Peralatan dan Mesin lainnya yang terpelihara | 33,300,000 | Dinas Perhubungan | |
| | | | | | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | 15 Unit | 575,600,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Peralatan dan Mesin lainnya yang terpelihara | 620,000,000 | Dinas Perhubungan | |
| | | | | | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | 36 Unit | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Peralatan dan Mesin lainnya yang terpelihara | 20,000,000 | Dinas Perhubungan | |
| | | | | | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | 1 Unit | 30,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Peralatan dan Mesin lainnya yang terpelihara | 100,000,000 | Dinas Perhubungan | |
| 77 | 2 | 15 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Cakupan Kualitas Layanan Transportasi | - | | 45.83 Persen | 1,520,309,375 | | | | | | 2,040,000,000 | Dinas Perhubungan | |
| | 2 | 15 | 02 | 2.02 | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia | - | | 141 Unit | 135,000,000 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Masyarakat Pengguna Jalan | 310,000,000 | Dinas Perhubungan | |
| | 2 | 15 | 02 | 2.02 | 0001 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun | | | 1 Unit | 25,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Masyarakat Pengguna Jalan | 80,000,000 | Dinas Perhubungan | |
| | 2 | 15 | 02 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | | | 120 Unit | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Masyarakat Pengguna Jalan | 180,000,000 | Dinas Perhubungan | |
| | 2 | 15 | 02 | 2.02 | 0003 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | | | 1 Unit | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Masyarakat Pengguna Jalan | 50,000,000 | Dinas Perhubungan | |
| | 2 | 15 | 02 | 2.02 | 0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | | | 19 Unit | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Masyarakat Pengguna Jalan | - | Dinas Perhubungan | |
| | 2 | 15 | 02 | 2.03 | | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | Jumlah terminal yang dikelola | - | | 2 Unit | 977,423,655 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Infrastruktur | Masyarakat Pengguna terminal | 1,200,000,000 | Dinas Perhubungan | |
| | 2 | 15 | 02 | 2.03 | 0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) | Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara | | | 2 Unit | 977,423,655 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH) MINYAK DAN GAS OTONOMI KHUSUS ACEH | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif | Infrastruktur | Masyarakat Pengguna terminal | 1,200,000,000 | Dinas Perhubungan | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|-----------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|--------------------------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2 | 15 02 2.05 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Periode penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor | - | - | - | 12 Bulan | 75,000,000 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | Layanan transportasi | - | 105,000,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 02 2.05 0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya | - | - | - | 1 Orang | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | Layanan transportasi | - | 15,000,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 02 2.05 0004 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | - | - | - | 2600 Dokumen | 40,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | Layanan transportasi | - | 65,000,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 02 2.05 0007 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | - | - | - | 8 Unit | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Layanan transportasi | - | 25,000,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 02 2.05 0010 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | - | - | - | 1 Laporan | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Layanan transportasi | - | - | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 02 2.06 | Pelaksanaan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Periode penyelenggaraan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas | - | - | - | 12 Bulan | 107,885,720 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | Layanan transportasi | - | 145,000,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 02 2.06 0015 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | - | - | - | 1 Laporan | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | Layanan transportasi | - | 25,000,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 02 2.06 0016 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan | - | - | - | 35 Dokumen | 82,885,720 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Layanan transportasi | - | 120,000,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 02 2.08 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | Periode pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan | - | - | - | 12 Bulan | 185,000,000 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | Masyarakat Pengguna Jalan | - | 220,000,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 02 2.08 0007 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | - | - | - | 4 Laporan | 185,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | Masyarakat Pengguna Jalan | - | 220,000,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 02 2.14 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kota | - | - | - | 2 Dokumen | 40,000,000 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | Layanan transportasi | - | 60,000,000 | Dinas Perhubungan |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|----|-----------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|----------------------|--|--------------------------------------|---|--|--|--------|-----------------------------------|---|
| | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Kelompok Sasaran | Target | | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2 | 15 02 2.14 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | - | - | - | 1 Laporan | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | Layanan transportasi | - | 20,000,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 02 2.14 0003 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | - | - | - | 1 Unit | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Layanan transportasi | - | 40,000,000 | Dinas Perhubungan |
| | | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | | | | | | 4,610,721,934 | | | | | | | 4,768,000,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERRKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 4,610,721,934 | | | | | | | 4,768,000,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | 4,620,721,934 | | | | | | | 4,658,000,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 78 | 2 16 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | - | - | - | 100 Persen | 2,406,915,138 | | | | | | - | 2,163,000,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 2 | 16 01 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | - | 6 Dokumen | 7,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe | - | 14,000,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 2 | 16 01 2.01 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | - | - | 6 Dokumen | 7,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe | - | 14,000,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 2 | 16 01 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Periode Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | - | 1 Tahun | 1,920,692,098 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe | - | 1,500,000,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 2 | 16 01 2.02 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | - | - | - | 30 Orang/bulan | 1,920,692,098 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe | - | 1,500,000,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 2 | 16 01 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Periode Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | - | 1 Tahun | 25,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe | - | 60,000,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 2 | 16 01 2.05 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | - | - | - | 5 Orang | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe | - | 30,000,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 2 | 16 01 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Periode Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | - | 1 Tahun | 149,840,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe | - | 180,000,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 2 | 16 01 2.06 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | - | - | - | 2 Paket | 39,840,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe | - | 40,000,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 2 | 16 01 2.06 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | - | - | - | 1 Paket | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe | - | 25,000,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 2 | 16 01 2.06 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | - | - | - | 1 Paket | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe | - | 15,000,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 2 | 16 01 2.06 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - | - | - | 20 Laporan | 80,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe | - | 100,000,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 2 | 16 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | - | 26 Laporan | 235,783,040 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe | - | 274,000,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 2 | 16 01 2.08 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - | - | - | 1 Laporan | 3,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe | - | 4,000,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|----|-----------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|----------------------|--|--------------------------------------|--|---|--|---------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2 | 16 01 2.08 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | - | - | - | 1 Laporan | 65,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe | - | 75,000,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 2 | 16 01 2.08 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | - | - | - | 1 Laporan | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe | - | 20,000,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 2 | 16 01 2.08 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | - | - | - | 1 Laporan | 157,783,040 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe | - | 175,000,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 2 | 16 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | - | 33 Unit | 68,600,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe | - | 85,000,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 2 | 16 01 2.09 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | - | - | - | 2 Unit | 33,600,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe | - | 35,000,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 2 | 16 01 2.09 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | - | - | - | 4 Unit | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe | - | 30,000,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 2 | 16 01 2.09 0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | - | - | - | 1 Unit | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe | - | 20,000,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 79 | 2 16 02 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase Penyebaran Informasi Publik | - | - | - | 26.32 Persen | 90,000,000 | | | | | | - | 85,000,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 2 | 16 02 2.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Periode Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - | - | - | 1 Tahun | 90,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe | - | 85,000,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 2 | 16 02 2.01 0017 | Pelayanan Informasi Publik | Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan | - | - | - | 30 Permohonan | 40,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe | - | 50,000,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 2 | 16 02 2.01 0019 | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik | Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah | - | - | - | 5 Rekomendasi | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe | - | 20,000,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 2 | 16 02 2.01 0021 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kebijakan/aturan | - | - | - | 10 Media | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe | - | 15,000,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 80 | 2 16 03 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Persentase Pelayanan Publik Yang Terintegrasi | - | - | - | 17.65 Persen | 2,023,806,796 | | | | | | - | 2,410,000,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 2 | 16 03 2.01 | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sistem Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - | - | - | 1 Unit | 20,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah dan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe | - | 30,000,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 2 | 16 03 2.01 0004 | Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa | Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa | - | - | - | 2 Dokumen | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah dan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe | - | 30,000,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 2 | 16 03 2.02 | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Periode Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - | - | - | 1 Tahun | 2,003,806,796 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe | - | 2,380,000,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 2 | 16 03 2.02 0017 | Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi | Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah | - | - | - | 2 Dokumen | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe | - | 70,000,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 2 | 16 03 2.02 0018 | Koordinasi penyusunan dan/atau revu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah | - | - | - | 2 Dokumen | 300,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe | - | 500,000,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 2 | 16 03 2.02 0020 | Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah | Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah | - | - | - | 2 Aplikasi | 300,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe | - | 350,000,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|-----------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|----------------------|--|--------------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|----------------------|---|
| | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2 | 16 03 2.02 0021 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | - | - | - | 4 Aplikasi | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe | - | 60,000,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 2 | 16 03 2.02 0024 | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | - | - | - | 34 Perangkat Daerah | 1,223,806,796 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe | - | 1,300,000,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 2 | 16 03 2.02 0025 | Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi | Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, | - | - | - | 4 Layanan | 80,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe | - | 100,000,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 2 | 21 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | | | 90,000,000 | | | | | | | 110,000,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 81 | 2 21 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Persentase OPD yang melakukan pengamanan data dan informasi terintegrasi | - | - | - | 11.76 Persen | 90,000,000 | | | | | | - | 110,000,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 2 | 21 02 2.01 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Periode Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - | - | - | 1 Tahun | 90,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe | - | 110,000,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 2 | 21 02 2.01 0001 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan | - | - | - | 34 Dokumen | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe | - | 60,000,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 2 | 21 02 2.01 0004 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi | - | - | - | 34 Perangkat Daerah | 40,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe | - | 50,000,000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| | | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | | | | | | 6,946,715,333 | | | | | | | 6,032,069,324 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| 2 | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 6,946,715,333 | | | | | | | 6,032,069,324 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| 2 | 07 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | | | 6,122,556,333 | | | | | | | 5,217,469,324 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| 82 | 2 07 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | - | - | - | 100 Persen | 5,842,556,333 | | | | | | - | 4,958,869,324 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| 2 | 07 01 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Capaian Laporan Kinerja | - | - | - | 4 Dokumen | 15,000,000 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendukung Keunggulan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | DPMPTSP dan NAKER | - | 16,000,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| 2 | 07 01 2.01 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | - | - | 4 Dokumen | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendukung Keunggulan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | DPMPTSP dan NAKER | - | 16,000,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| 2 | 07 01 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Periode Pelaksanaan Administrasi Keuangan | - | - | - | 12 Bulan | 4,904,723,245 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendukung Keunggulan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | DPMPTSP dan NAKER | - | 4,071,629,324 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| 2 | 07 01 2.02 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | - | - | - | 700 Orang/bulan | 4,904,723,245 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendukung Keunggulan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | DPMPTSP dan NAKER | - | 4,071,629,324 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|----|------|----|------|------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---|--------------------------------------|---|--|-------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 2 | 07 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Periode Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian | - | | 12 Bulan | 12,000,000 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | DPMPTSP dan NAKER | 16,000,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | | |
| 2 | 07 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | 4 Orang | 12,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | DPMPTSP dan NAKER | 16,000,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | | |
| 2 | 07 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Periode Pelaksanaan Administrasi umum | - | | 12 Bulan | 137,140,000 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | DPMPTSP dan NAKER | 223,140,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | | |
| 2 | 07 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | 3 Paket | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | DPMPTSP dan NAKER | 50,000,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | | |
| 2 | 07 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | 2 Paket | 11,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | DPMPTSP dan NAKER | 17,000,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | | |
| 2 | 07 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | 3 Paket | 30,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | DPMPTSP dan NAKER | 55,000,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | | |
| 2 | 07 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | | | 1 Dokumen | 1,140,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | DPMPTSP dan NAKER | 1,140,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | | |
| 2 | 07 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 100 Laporan | 75,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | DPMPTSP dan NAKER | 100,000,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | | |
| 2 | 07 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah | - | | 12 Bulan | 150,000,000 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | DPMPTSP dan NAKER | 55,000,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | | |
| 2 | 07 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | 5 Unit | 150,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | DPMPTSP dan NAKER | 55,000,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|-----------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2 | 07 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang | - | - | - | 12 Bulan | 539,093,088 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | DPMPTSP dan NAKER | - | 471,500,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| 2 | 07 01 2.08 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - | - | - | 1 Laporan | 1,500,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | DPMPTSP dan NAKER | - | 1,500,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| 2 | 07 01 2.08 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | - | - | - | 2 Laporan | 333,353,088 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | DPMPTSP dan NAKER | - | 170,000,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| 2 | 07 01 2.08 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | - | - | - | 2 Laporan | 204,240,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | DPMPTSP dan NAKER | - | 300,000,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| 2 | 07 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah | - | - | - | 12 Bulan | 84,600,000 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | DPMPTSP dan NAKER | - | 105,600,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| 2 | 07 01 2.09 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | - | - | - | 1 Unit | 34,100,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | DPMPTSP dan NAKER | - | 34,300,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| 2 | 07 01 2.09 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | - | - | - | 1 Unit | 25,500,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | DPMPTSP dan NAKER | - | 31,300,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| 2 | 07 01 2.09 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | - | - | - | 15 Unit | 5,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | DPMPTSP dan NAKER | - | 15,000,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| 2 | 07 01 2.09 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | - | - | - | 1 Unit | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | DPMPTSP dan NAKER | - | 25,000,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| 83 | 2 07 03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan | - | - | - | 15.00 Persen | 115,000,000 | | | | | | - | 128,100,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| 2 | 07 03 2.01 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Jumlah Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | - | - | - | 2 Kegiatan | 105,000,000 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Masyarakat, Angkatan Kerja | - | 116,000,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|----|------|----|------|------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---|--|--|---|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|---|---------------------|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 2 | 07 | 03 | 2.01 | 0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | - | - | 30 Orang | 100,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Masyarakat, Angkatan Kerja | - | 110,000,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | |
| 2 | 07 | 03 | 2.01 | 0002 | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n | - | - | 5 Lembaga | 5,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Masyarakat, Angkatan Kerja | - | 6,000,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | |
| 2 | 07 | 03 | 2.02 | | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | - | - | 2 Lembaga | 10,000,000 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | - | 12,100,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | |
| 2 | 07 | 03 | 2.02 | 0001 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina | - | - | 11 Lembaga | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | - | 12,100,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | |
| 84 | 2 | 07 | 04 | | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang ditempatkan | - | - | 55.63 Persen | 115,000,000 | | | | | | - | 33,000,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | |
| 2 | 07 | 04 | 2.02 | | Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penerbitan Izin atau Tanda Daftar LPTKS | - | - | 5 Lembaga | 100,000,000 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | LPTKS atau BKK | - | 17,500,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | |
| 2 | 07 | 04 | 2.02 | 0002 | Pengawasan dan Pengendalian LPTKS | Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku | - | - | 5 Lembaga | 100,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | LPTKS atau BKK | - | 17,500,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | |
| 2 | 07 | 04 | 2.03 | | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | Periode Informasi Pasar Kerja | - | - | 12 Bulan | 15,000,000 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Pencari Kerja | - | 15,500,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | |
| 2 | 07 | 04 | 2.03 | 0002 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) | - | - | 500 Orang | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Pencari Kerja | - | 15,500,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | |
| 85 | 2 | 07 | 05 | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | - | - | 100 Persen | 50,000,000 | | | | | | - | 97,500,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | |
| 2 | 07 | 05 | 2.02 | | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penyelesaian Perselisihan | - | - | 45 Kasus | 50,000,000 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Perusahaan dan Pekerja | - | 97,500,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|------|------|--|--|--|--|---|--|---------------------|---|--------------------------------------|--|---|------------------------|-----------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 07 | 05 | 2.02 | 0002 | Penyelesaian Perselesaian Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perkara Perselesaian yang terselesaikan | - | - | 20 Perkara | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendukung Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Perusahaan dan Pekerja | - | 97,500,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| 2 | 18 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | | 824,159,000 | | | | | | | 814,600,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| 86 | 2 | 18 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Persentase Kemudahan Penanaman Modal | - | - | 40.00 Persen | 15,000,000 | | | | | | | 15,000,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| 2 | 18 | 02 | 2.01 | | | <i>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i> | <i>Jumlah Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif</i> | - | - | 1 Dokumen | 15,000,000 | | | <i>Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendukung Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi</i> | <i>Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi</i> | <i>Pelaku Usaha</i> | - | 15,000,000 | <i>Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja</i> |
| 2 | 18 | 02 | 2.01 | 0001 | | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | - | - | 1 Dokumen | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendukung Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Pelaku Usaha | - | 15,000,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| 87 | 2 | 18 | 03 | | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Persentase Sektor pada Promosi Penanaman Modal | - | - | 30.00 Persen | 30,000,000 | | | | | | | 30,600,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| 2 | 18 | 03 | 2.01 | | | <i>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i> | <i>Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal</i> | - | - | 2 Dokumen | 30,000,000 | | | <i>Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendukung Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi</i> | <i>Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi</i> | <i>Pelaku Usaha</i> | - | 30,600,000 | <i>Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja</i> |
| 2 | 18 | 03 | 2.01 | 0002 | | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | - | - | 1 Dokumen | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendukung Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Pelaku Usaha | - | 15,100,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| 2 | 18 | 03 | 2.01 | 0003 | | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota | - | - | 1 Dokumen | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendukung Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Pelaku Usaha | - | 15,500,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| 88 | 2 | 18 | 04 | | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Indeks Peningkatan Pelayanan Perizinan | - | - | 87.98 Indeks | 100,000,000 | | | | | | | 169,000,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| 2 | 18 | 04 | 2.01 | | | <i>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i> | <i>Jumlah Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</i> | - | - | 4 Kegiatan | 100,000,000 | | | <i>Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendukung Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi</i> | <i>Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi</i> | <i>Pelaku Usaha</i> | - | 169,000,000 | <i>Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja</i> |
| 2 | 18 | 04 | 2.01 | 0005 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota | - | - | 1 Dokumen | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendukung Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Pelaku Usaha | - | 18,000,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| 2 | 18 | 04 | 2.01 | 0006 | | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | - | - | 340 Pelaku Usaha | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendukung Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Pelaku Usaha | - | 31,500,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | | |
|----|------|----|------|------|--|--|---|----------------------------------|--|---|---|--|--|---|---------------------------------|--------|-----------------------------------|---|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Kelompok Sasaran | Target | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| 2 | 18 | 04 | 2.01 | 0007 | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | - | - | 120 Pelaku Usaha | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Pelaku Usaha | - | 31,000,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | | |
| 2 | 18 | 04 | 2.01 | 0008 | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha | - | - | 275 Kegiatan Usaha | 40,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Pelaku Usaha | - | 88,500,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | | |
| 89 | 2 | 18 | 05 | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Indeks Pemantauan dan Pengawasan Investasi | - | - | 75.98 Indeks | 669,159,000 | | | | | - | - | 563,000,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | | |
| 2 | 18 | 05 | 2.01 | | <i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kevenangan Daerah Kabupaten/Kota</i> | <i>Jumlah Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</i> | - | - | 3 Kegiatan | 669,159,000 | | | <i>Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi</i> | <i>Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi</i> | <i>Pelaku Usaha</i> | - | 563,000,000 | <i>Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja</i> | | |
| 2 | 18 | 05 | 2.01 | 0004 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | - | - | 11 Kegiatan Usaha. | 91,373,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Pelaku Usaha | - | 68,000,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | | |
| 2 | 18 | 05 | 2.01 | 0005 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | - | - | 290 Pelaku Usaha | 335,039,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Pelaku Usaha | - | 340,000,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | | |
| 2 | 18 | 05 | 2.01 | 0006 | Pengawasan Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan | - | - | 79 Kegiatan Usaha | 242,747,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Pelaku Usaha | - | 155,000,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | | |
| 90 | 2 | 18 | 06 | | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Ketersediaan Database Perizinan | - | - | Ada Ada/Tidak | 10,000,000 | | | | | - | - | 37,000,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | | |
| 2 | 18 | 06 | 2.01 | | <i>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i> | <i>Ketersediaan Data Base Perizinan</i> | - | - | 1 Dokumen | 10,000,000 | | | <i>Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi</i> | <i>Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi</i> | <i>Pelaku Usaha, Pemerintah</i> | - | 37,000,000 | <i>Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja</i> | | |
| 2 | 18 | 06 | 2.01 | 0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | - | - | 2 Dokumen | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Pelaku Usaha, Pemerintah | - | 37,000,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | | |
| | | | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | | | | | | | | | | 8,038,833,915 | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | 7,708,833,915 | | | |
| 2 | 19 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA | | | | | | | | | | | | 7,708,833,915 | | | |
| 91 | 2 | 19 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | - | - | 100 Persen | 3,182,833,915 | | | | | - | - | 3,518,900,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|----|------|----|------|--|--|--|----------------------------------|--|---|--|---|--------------------------------------|---|--|------------|------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|----|----|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | 14 | 15 | | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 19 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan | - | | 7 dokumen | 15,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | - | - | 35,000,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | |
| 2 | 19 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | | 6 Dokumen | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | - | - | 35,000,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | |
| 2 | 19 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Periode Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - | | | 12 Bulan | 2,667,927,675 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | Disporapar | - | 2,700,000,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | |
| 2 | 19 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | - | | 22 Orang/bulan | 2,667,927,675 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | Disporapar | - | 2,700,000,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | |
| 2 | 19 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Penyediaan Kegiatan Administrasi Kantor | - | | | 5 Kegiatan | 96,140,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | Disporapar | - | 152,700,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | |
| 2 | 19 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | - | | 4 Paket | 35,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | Disporapar | - | 36,000,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | |
| 2 | 19 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | - | | 12 Paket | 5,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | Disporapar | - | 8,000,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | |
| 2 | 19 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | - | | 5 Paket | 5,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | Disporapar | - | 7,500,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | |
| 2 | 19 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | - | | 12 Dokumen | 1,140,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | Disporapar | - | 1,200,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | |
| 2 | 19 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - | | 15 Laporan | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | Disporapar | - | 100,000,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | |
| 2 | 19 | 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen laporan | - | | | 8 dokumen | 90,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | Disporapar | - | 120,000,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | |
| 2 | 19 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | - | | 5 Unit | 90,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | Disporapar | - | 120,000,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | | |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|----|------|----|------|------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---|---|---|--|---------------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 2 | 19 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penjangkuran Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah dokumen laporan | - | | | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | Disporapar | - | 332,400,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | |
| 2 | 19 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - | | | | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | Disporapar | - | 3,000,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | |
| 2 | 19 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | - | | | | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | Disporapar | - | 79,400,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | |
| 2 | 19 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | - | | | | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | Disporapar | - | 250,000,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | |
| 2 | 19 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah dokumen laporan | - | | | | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | Disporapar | - | 178,800,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | |
| 2 | 19 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | - | | | | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | Disporapar | - | 33,300,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | |
| 2 | 19 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | - | | | | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | Disporapar | - | 25,500,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | |
| 2 | 19 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi | - | | | | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | Disporapar | - | 120,000,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | |
| 92 | 2 | 19 | 02 | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DATA SAING KEPEMUDAAN | Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif | - | | | | | | | | - | 1,200,000,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | |
| 2 | 19 | 02 | 2.01 | | Pengadangan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen laporan | - | | | | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | Wirausaha muda dalam kota Lhokseumawe | - | 550,000,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | |
| 2 | 19 | 02 | 2.01 | 0011 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota | Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda | - | | | | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | Wirausaha muda dalam kota Lhokseumawe | - | 250,000,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | |
| 2 | 19 | 02 | 2.01 | 0012 | Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda | Jumlah yang menerima penghargaan pemuda | - | | | | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | Wirausaha muda dalam kota Lhokseumawe | - | 150,000,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | |
| 2 | 19 | 02 | 2.01 | 0014 | Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota | Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi | - | | | | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | Wirausaha muda dalam kota Lhokseumawe | - | 150,000,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|--|---|----------------------------------|--|--|--|---------------------|---|--------------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|---|---|
| | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2 | 19 | 02 | 2.02 | | | | 1 dokumen | 500,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | Pemuda dan Organisasi Kepemudaan (OKP) Kota Lhokseumawe | - | 650,000,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| 2 | 19 | 02 | 2.02 | 0003 | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya | 1 Organisasi | 500,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | Pemuda dan Organisasi Kepemudaan (OKP) Kota Lhokseumawe | - | 650,000,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| 93 | 2 | 19 | 03 | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Jumlah prestasi olahraga | 7 Cabor | 2,351,000,000 | | | | | | - | 1,980,000,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| 2 | 19 | 03 | 2.01 | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen laporan | 2 dokumen | 150,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | - | 350,000,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | |
| 2 | 19 | 03 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota | Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia | 18 Unit | 150,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | - | 350,000,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | |
| 2 | 19 | 03 | 2.02 | | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen laporan | 2 dokumen | 200,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | - | 350,000,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | |
| 2 | 19 | 03 | 2.02 | 0004 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | 3 Kegiatan | 200,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | - | 350,000,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | |
| 2 | 19 | 03 | 2.03 | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah dokumen laporan | 3 dokumen | 250,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | - | 260,000,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | |
| 2 | 19 | 03 | 2.03 | 0007 | Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga | Jumlah penerima Penghargaan olahraga | 100 Orang | 250,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | - | 260,000,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | |
| 2 | 19 | 03 | 2.04 | | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | Jumlah dokumen laporan | 2 dokumen | 1,501,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | - | 680,000,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | |
| 2 | 19 | 03 | 2.04 | 0006 | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1,501,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | - | 680,000,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | |
| 2 | 19 | 03 | 2.05 | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | Jumlah dokumen laporan | 3 dokumen | 250,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | - | 340,000,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|------|------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---|--------------------------------------|--|---|---|----------------------|--|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 2 | 19 | 03 | 2.05 | 0006 | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | - | - | 2 Laporan | 150,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | - | 220,000,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | |
| 2 | 19 | 03 | 2.05 | 0010 | Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional | Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi | - | - | 2 Lembaga | 100,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | - | 120,000,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | |
| 94 | 2 | 19 | 04 | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | Pembinaan Pramuka | - | - | 42.86 Persen | 1,375,000,000 | | | | | - | 1,500,000,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | |
| 2 | 19 | 04 | 2.01 | | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | Jumlah Gugus Depan (Gudep) binaan Tingkat SMP dan SMA Kota Lhokseumawe | - | - | 30 gudep | 1,375,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | - | 1,500,000,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | |
| 2 | 19 | 04 | 2.01 | 0003 | Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah | Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya | - | - | 25 Orang | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | Gugus depan tingkat SMP dan SMA di Kota Lhokseumawe | 70,000,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | |
| 2 | 19 | 04 | 2.01 | 0005 | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | - | - | 1 Laporan | 75,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | Gugus depan tingkat SMP dan SMA di Kota Lhokseumawe | 85,000,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | |
| 2 | 19 | 04 | 2.01 | 0006 | Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah | Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan | - | - | 10 Unit | 1,150,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | Gugus depan tingkat SMP dan SMA di Kota Lhokseumawe | 1,200,000,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | |
| 2 | 19 | 04 | 2.01 | 0007 | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah | Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan | - | - | 1 Unit | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | Gugus depan tingkat SMP dan SMA di Kota Lhokseumawe | 75,000,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | |
| 2 | 19 | 04 | 2.01 | 0008 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan | Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan | - | - | 1 Organisasi | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Reformasi Birokrasi | Gugus depan tingkat SMP dan SMA di Kota Lhokseumawe | 70,000,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | 330,000,000 | | | | | | 415,000,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | |
| 3 | 26 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | | | 330,000,000 | | | | | | 415,000,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | |
| 95 | 3 | 26 | 02 | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Persentase Peningkatan Daya Tarik Pariwisata | - | - | 70.00 Persen | 100,000,000 | | | | | - | 100,000,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | |
| 3 | 26 | 02 | 2.03 | | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen laporan | - | - | 5 dokumen | 100,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pertumbuhan Ekonomi | - | 100,000,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | |
| 3 | 26 | 02 | 2.03 | 0008 | Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kab/Kota | - | - | 1 Dokumen | 100,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda Pertumbuhan Ekonomi | - | 100,000,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | |
| 96 | 3 | 26 | 03 | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Persentase Kunjungan Wisata | - | - | 96.97 Persen | 200,000,000 | | | | | - | 245,000,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | |
|----|------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|--------------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 26 | 03 | 2.01 | | | | 3 dokumen | 200,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda | | | 245,000,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| 3 | 26 | 03 | 2.01 | 0003 | | | 3 Dokumen | 25,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda | | | 35,000,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| 3 | 26 | 03 | 2.01 | 0006 | | | 1 Kegiatan | 160,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda | | | 180,000,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| 3 | 26 | 03 | 2.01 | 0007 | | | 3 Promosi | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda | | | 30,000,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| 97 | 3 | 26 | 05 | | | | 100.00 Persen | 30,000,000 | | | | | | | 70,000,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| 3 | 26 | 05 | 2.01 | | | | 5 dokumen | 30,000,000 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda | | | 70,000,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| 3 | 26 | 05 | 2.01 | 0006 | | | 20 Orang | 30,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda | | | 70,000,000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| | | | | | | | | 1,552,781,760 | | | | | | | 1,300,842,374 | Sekretariat Majelis Adat Aceh |
| 2 | | | | | | | | 1,552,781,760 | | | | | | | 1,300,842,374 | Sekretariat Majelis Adat Aceh |
| 2 | 22 | | | | | | | 1,552,781,760 | | | | | | | 1,300,842,374 | Sekretariat Majelis Adat Aceh |
| 98 | 2 | 22 | 01 | | | | 100 Persen | 1,357,781,760 | | | | | | | 1,127,868,302 | Sekretariat Majelis Adat Aceh |
| 2 | 22 | 01 | 2.01 | | | | 6 dokumen | 7,000,000 | | | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Aparatur Sekretariat Majelis Adat Aceh | | 2,683,282 | Sekretariat Majelis Adat Aceh |
| 2 | 22 | 01 | 2.01 | 0001 | | | 17 Dokumen | 7,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Aparatur Sekretariat Majelis Adat Aceh | | 2,683,282 | Sekretariat Majelis Adat Aceh |
| 2 | 22 | 01 | 2.02 | | | | 12 Bulan | 803,292,000 | | | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe | | 664,395,260 | Sekretariat Majelis Adat Aceh |
| 2 | 22 | 01 | 2.02 | 0001 | | | 112 Orang/bulan | 803,292,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe | | 664,395,260 | Sekretariat Majelis Adat Aceh |
| 2 | 22 | 01 | 2.06 | | | | 12 Bulan | 60,140,000 | | | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Aparatur Sekretariat Majelis Adat Aceh | | 12,240,000 | Sekretariat Majelis Adat Aceh |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|----|------|----|------|------|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 | 2 | 22 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | 6 Paket | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Aparatur Sekretariat Majelis Adat Aceh | 2,100,000 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | |
| 2 | 22 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | 5 Paket | 4,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Aparatur Sekretariat Majelis Adat Aceh | 1,500,000 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | | |
| 2 | 22 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | 5 Paket | 5,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Aparatur Sekretariat Majelis Adat Aceh | 2,000,000 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | | |
| 2 | 22 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | | | 14 Dokumen | 1,140,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Aparatur Sekretariat Majelis Adat Aceh | 1,240,000 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | | |
| 2 | 22 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 10 Laporan | 40,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Aparatur Sekretariat Majelis Adat Aceh | 5,400,000 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | | |
| 2 | 22 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 12 Bulan | 423,549,760 | | | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Aparatur Sekretariat Majelis Adat Aceh | | 406,849,760 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | |
| 2 | 22 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 1 Laporan | 1,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Aparatur Sekretariat Majelis Adat Aceh | 1,000,000 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | | |
| 2 | 22 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | 134 Laporan | 422,549,760 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Aparatur Sekretariat Majelis Adat Aceh | 399,849,760 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | | |
| 2 | 22 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Periode Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 12 Bulan | 63,800,000 | | | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Aparatur Sekretariat Majelis Adat Aceh | | 41,000,000 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | |
| 2 | 22 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | 1 Unit | 33,200,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Aparatur Sekretariat Majelis Adat Aceh | 20,000,000 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | | |
| 2 | 22 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya | | | 1 Unit | 25,600,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Aparatur Sekretariat Majelis Adat Aceh | 19,000,000 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | | |
| 2 | 22 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | 1 Unit | 5,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Aparatur Sekretariat Majelis Adat Aceh | 2,000,000 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | | |
| 99 | 2 | 22 | 07 | | PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA) | Persentase Fasilitas sengketa adat | | | 100 persen | 195,000,000 | | | | | | | | 172,974,072 | Sekretariat Majelis Adat Aceh |
| 2 | 22 | 07 | 7.01 | | Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat yang diLestarkan | Jumlah Pembinaan Adat Istiadat yang diLestarkan | | | 5 Jenis | 130,000,000 | | | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Masyarakat dan Tokoh Adat | | 60,403,878 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | |
| 2 | 22 | 07 | 7.01 | 0001 | Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional | Jumlah Laporan Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional | | | 3 Laporan | 45,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Masyarakat dan Tokoh Adat | 11,000,000 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|-----|------|--|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------|----------------------|---|--|--|---|--|---|-------------------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | | | | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | | | | | Daerah | | |
| 1 | 2 | 22 | 07 | 7.01 | 0002 | Pemasyarakatan Adat Do Da Idi | Jumlah Lembaga Pemasyarakatan Adat Do Da Idi | - | 2 Lembaga | 30,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Masyarakat dan Tokoh Adat | - | 2,000,000 | Sekretariat Majelis Adat Aceh |
| 2 | 22 | 07 | 7.01 | 0003 | Sosialisasi Adat Istiadat | Jumlah Peserta Sosialisasi Adat Istiadat | - | 50 Orang | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Masyarakat dan Tokoh Adat | - | 25,000,000 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | |
| 2 | 22 | 07 | 7.01 | 0004 | Pembinaan Keluarga Meudab dan Adat Perkawinan | Jumlah Keluarga Meudab dan Adat Perkawinan yang Dibina | - | 2 Keluarga | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Masyarakat dan Tokoh Adat | - | 2,403,878 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | |
| 2 | 22 | 07 | 7.01 | 0006 | Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang | Jumlah Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang yang Dipublikasikan | - | 2 Dokumen | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Masyarakat dan Tokoh Adat | - | 20,000,000 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | |
| 2 | 22 | 07 | 7.02 | | Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat | Jumlah Pengembangan hukum Adat yang dibina | - | 3 Jenis | 45,000,000 | | | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Masyarakat dan Tokoh Adat | - | 65,000,000 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | |
| 2 | 22 | 07 | 7.02 | 0001 | Penguatan Peradilan Adat | Jumlah Peserta Pelatihan Peradilan Adat | - | 50 Orang | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Masyarakat dan Tokoh Adat | - | 30,000,000 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | |
| 2 | 22 | 07 | 7.02 | 0002 | Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas) | Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas) | - | 5 Dokumen | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Masyarakat dan Tokoh Adat | - | 25,000,000 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | |
| 2 | 22 | 07 | 7.02 | 0004 | Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat | Jumlah Peserta Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat | - | 50 Orang | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Masyarakat dan Tokoh Adat | - | 10,000,000 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | |
| 2 | 22 | 07 | 7.03 | | Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat | Jumlah Lembaga Adat dan tokoh yang dibina | - | 5 Jenis | 20,000,000 | | | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Masyarakat dan Tokoh Adat | - | 47,570,194 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | |
| 2 | 22 | 07 | 7.03 | 0002 | Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat | Jumlah Peserta Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat | - | 50 Orang | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Masyarakat dan Tokoh Adat | - | 2,570,194 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | |
| | | | | | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | | | | 2,947,808,624 | | | | | | | | 4,230,677,494 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | 2,947,808,624 | | | | | | | | 4,230,677,494 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | 23 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | | | 2,917,808,624 | | | | | | | | 3,866,025,619 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 100 | 2 | 23 | 01 | | PROGRAM FENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | - | 100 Persen | 2,727,808,624 | | | | | | | | 3,379,494,486 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | 23 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | 3 Dokumen/Laporan | 10,000,000 | | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeledupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe | - | 16,785,563 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | 23 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | 2 Dokumen | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeledupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe | - | 15,049,125 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| 2 | 23 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | 3 Dokumen | 2,198,802,864 | | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeledupan | Reformasi Birokrasi | Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe | - | 1,970,991,350 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | 23 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | - | 336 Orang/bulan | 2,198,802,864 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeledupan | Reformasi Birokrasi | Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe | - | 1,967,750,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |

| No | Kode | Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----|-----------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|--------------------------------------|---|--|--|--------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Kelompok Sasaran | Target | | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2 | 23 01 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | - | 9 Dokumen | 78,640,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penuluduan | Reformasi Birokrasi | Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe | - | 249,736,759 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | 23 01 2.06 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | - | - | - | 1 Paket | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penuluduan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe | - | 13,370,569 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | 23 01 2.06 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | - | - | - | 1 Paket | 5,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penuluduan | Reformasi Birokrasi | Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe | - | 7,900,791 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | 23 01 2.06 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | - | - | - | 1 Paket | 7,500,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penuluduan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe | - | 9,724,050 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | 23 01 2.06 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | - | - | - | 1 Dokumen | 1,140,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penuluduan | Reformasi Birokrasi | Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe | - | 1,385,678 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | 23 01 2.06 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - | - | - | 1 Laporan | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penuluduan | Reformasi Birokrasi | Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe | - | 97,240,500 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | 23 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | - | 18 Unit | 50,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penuluduan | Reformasi Birokrasi | Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe | - | 340,000,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | 23 01 2.07 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | - | - | - | 1 Unit | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penuluduan | Reformasi Birokrasi | Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe | - | 225,000,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | 23 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah | Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Pada Perangkat Daerah | - | - | - | 4 Dokumen | 249,165,760 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penuluduan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe | - | 401,301,356 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | 23 01 2.08 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - | - | - | 1 Laporan | 1,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penuluduan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe | - | 1,215,506 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | 23 01 2.08 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | - | - | - | 12 Laporan | 80,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penuluduan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe | - | 110,854,170 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | 23 01 2.08 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | - | - | - | 1 Laporan | 5,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penuluduan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe | - | 13,370,569 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | 23 01 2.08 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | - | - | - | 12 Laporan | 163,165,760 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penuluduan | Reformasi Birokrasi | Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe | - | 275,861,111 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | 23 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah | Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | - | - | 21 Unit | 141,200,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penuluduan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe | - | 285,039,132 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | 23 01 2.09 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak | - | - | - | 1 Unit | 33,300,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penuluduan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe | - | 37,194,491 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | 23 01 2.09 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan | - | - | - | 1 Unit | 51,400,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penuluduan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe | - | 35,978,985 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | 23 01 2.09 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi | - | - | - | 5 Unit | 31,500,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penuluduan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe | - | 125,000,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | 23 01 2.09 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi | - | - | - | 2 Unit | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penuluduan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe | - | 75,000,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 101 | 2 23 02 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Cakupan Pembinaan Perpustakaan | - | - | - | 11.10 Persen | 190,000,000 | | | | | | - | 486,531,133 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | 23 02 2.01 | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | - | 10 Dokumen | 130,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penuluduan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat | - | 381,242,552 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | 23 02 2.01 0004 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | - | - | - | 25 Perpustakaan | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penuluduan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat | - | 34,728,750 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----|------|----|------|------|---|--|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|--------------------------------------|--|---|---|--------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Kelompok Sasaran | Target | | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 2 | 23 | 02 | 2.01 | 0011 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai | | | 1 | Perpustakaan | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat | 17,138,639 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| 2 | 23 | 02 | 2.01 | 0012 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan | | | 3 | Layanan | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pendidikan | Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat | 28,940,625 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| 2 | 23 | 02 | 2.01 | 0013 | Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional | | | 15 | Perpustakaan | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat | 17,364,475 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| 2 | 23 | 02 | 2.01 | 0016 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan | | | 4 | Orang | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pendidikan | Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat | 46,305,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| 2 | 23 | 02 | 2.01 | 0017 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan | Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan | | | 1 | Dokumen | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat | 12,155,063 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| 2 | 23 | 02 | 2.01 | 0018 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan | Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi | | | 1000 | Eksemplar | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat | 132,000,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| 2 | 23 | 02 | 2.01 | 0019 | Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan | | | 10 | Eksemplar | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pendidikan | Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat | 34,728,750 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| 2 | 23 | 02 | 2.02 | | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | 4 | Dokumen | 60,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat | 105,288,581 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| 2 | 23 | 02 | 2.02 | 0006 | Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya | | | 6 | Orang | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat | 28,940,625 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| 2 | 23 | 02 | 2.02 | 0007 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang | | | 2 | Perpustakaan | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Pendidikan | Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat | 34,728,750 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| 2 | 23 | 02 | 2.02 | 0009 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/Kota | | | 6 | Orang | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat | 28,940,625 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| 2 | 23 | 02 | 2.02 | 0010 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | | | 80 | Lokus | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat | 12,678,581 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| 2 | 24 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | | | | | 30,000,000 | | | | | | 364,651,875 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| 102 | 2 | 24 | 02 | | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Persentase Pengelolaan arsip sesuai standar | - | | 14.29 | Persen | 30,000,000 | | | | | | | 138,915,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | 24 | 02 | 2.03 | | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | - | | 2 | Dokumen | 30,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | OPD, Bagian Setdako dan Lembaga Kearsipan Kota Lhokseumawe | 52,093,125 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| 2 | 24 | 02 | 2.03 | 0001 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JKN | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JKN | | | 1 | Pengguna | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | OPD, Bagian Setdako dan Lembaga Kearsipan Kota Lhokseumawe | 17,364,375 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| 2 | 24 | 02 | 2.03 | 0002 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | | | 1 | Laporan | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | OPD, Bagian Setdako dan Lembaga Kearsipan Kota Lhokseumawe | 34,728,750 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| | | | | | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan | | | | | | 12,816,606,725 | | | | | | | 16,684,923,256 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 8,453,510,690 | | | | | | | 9,092,265,150 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 2 | 09 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | | | 8,453,510,690 | | | | | | | 9,092,265,150 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 104 | 2 | 09 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | - | | 100 | Persen | 8,148,510,690 | | | | | | | 8,199,265,150 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|-----------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|--------------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2 | 09 01 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah | - | - | - | 15 Dokumen | 50,000,000 | | | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 214,516,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 2 | 09 01 2.01 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | - | - | 15 Dokumen | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 214,516,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 2 | 09 01 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Periode Pengediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | - | 12 Bulan | 6,763,370,690 | | | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 5,397,028,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 2 | 09 01 2.02 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | - | - | - | 840 Orang/bulan | 6,763,370,690 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 5,387,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 2 | 09 01 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Periode Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | - | 12 Bulan | 141,140,000 | | | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 265,927,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 2 | 09 01 2.06 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | - | - | - | 80 Paket | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 21,060,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 2 | 09 01 2.06 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | - | - | - | 1150 Paket | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 64,766,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 2 | 09 01 2.06 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | - | - | - | 30 Paket | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 50,143,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 2 | 09 01 2.06 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | - | - | - | 730 Dokumen | 1,140,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 2,888,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 2 | 09 01 2.06 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - | - | - | 60 Laporan | 75,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 100,036,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 2 | 09 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | - | 13 Unit | 80,000,000 | | | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe | - | 1,032,964,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 2 | 09 01 2.07 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | - | - | - | 2 Unit | 30,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe | - | 197,467,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 2 | 09 01 2.07 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | - | - | - | 3 Unit | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe | - | 207,808,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 2 | 09 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Periode Pengediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | - | 12 Bulan | 823,700,000 | | | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe | - | 855,847,150 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----|-----------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|--------------------------------------|---|--|---|---------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2 | 09 01 2.08 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - | - | - | 30 Laporan | 2,500,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe | - | 1,579,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 2 | 09 01 2.08 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | - | - | - | 84 Laporan | 205,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe | - | 262,766,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 2 | 09 01 2.08 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | - | - | - | 708 Laporan | 616,200,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe | - | 591,502,150 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 2 | 09 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | - | 45 Unit | 290,300,000 | | | | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe | - | 315,065,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 2 | 09 01 2.09 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | - | - | - | 12 Unit | 33,300,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe | - | 35,065,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 2 | 09 01 2.09 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | - | - | - | 24 Unit | 157,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe | - | 160,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 2 | 09 01 2.09 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | - | - | - | 1 Unit | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe | - | 60,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 2 | 09 01 2.09 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | - | - | - | 8 Unit | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe | - | 60,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 105 | 2 09 03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Ketersediaan Pangan Utama | - | - | - | 43.47 Persen | 255,000,000 | | | | | | - | 778,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 2 | 09 03 2.01 | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan | Frekuensi Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan | - | - | - | 5 Kali | 95,000,000 | | | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 198,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 2 | 09 03 2.01 0002 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia | Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia | - | - | - | 1 Laporan | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 80,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 2 | 09 03 2.01 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | - | - | - | 2 Laporan Laporan | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 18,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 2 | 09 03 2.01 0007 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | - | - | - | 1 Keluarga | 30,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 50,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 2 | 09 03 2.02 | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | Jumlah Keseimbangan Cadangan Pangan yang dikelola | - | - | - | 3 Kali | 75,000,000 | | | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru | Pemerintah dan Masyarakat | - | 425,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 2 | 09 03 2.02 0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal | Rencana Kebutuhan Pangan Lokal | - | - | - | 1 kali Dokumen | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru | Pemerintah dan Masyarakat | - | 30,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 2 | 09 03 2.02 0003 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | - | - | - | 20 Ton | 30,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru | Pemerintah dan Masyarakat | - | 350,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----|------|----|------|------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|--------------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------|--|--------|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 2 | 09 | 03 | 2.02 | 0004 | Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara | - | - | - | 20 Ton | 30,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | 45,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan | |
| 2 | 09 | 03 | 2.03 | | Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi | Jumlah Keseimbangan Cadangan Pangan yang dikelola | - | - | - | 3 Kali | 15,000,000 | | | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | 30,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan | |
| 2 | 09 | 03 | 2.03 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal | - | - | - | 20 Laporan | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | 30,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan | |
| 2 | 09 | 03 | 2.04 | | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Jumlah Capaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun yang Terlaksana | - | - | - | 2 Dokumen | 70,000,000 | | | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | 125,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan | |
| 2 | 09 | 03 | 2.04 | 0001 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | - | - | - | 1 Dokumen | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | 20,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan | |
| 2 | 09 | 03 | 2.04 | 0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | - | - | - | 2 Laporan | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | 90,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan | |
| 2 | 09 | 03 | 2.04 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun | - | - | - | 1 Laporan | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | 15,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan | |
| 106 | 2 | 09 | 04 | | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Persentase Ketersediaan Informasi Kerawanan Pangan | - | - | - | 66.67 Persen | 40,000,000 | | | | | | 85,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan | |
| 2 | 09 | 04 | 2.01 | | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan yang di susun | - | - | - | 1 Kali | 10,000,000 | | | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | 20,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan | |
| 2 | 09 | 04 | 2.01 | 0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan | - | - | - | 1 Dokumen | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | 20,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan | |
| 2 | 09 | 04 | 2.02 | | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Kerawanan Pangan yang ditangani | - | - | - | 2 Kali | 30,000,000 | | | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | 65,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan | |
| 2 | 09 | 04 | 2.02 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota | - | - | - | 1 Laporan | 30,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | 65,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan | |
| 107 | 2 | 09 | 05 | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Persentase Pengawasan dan Pengendalian Konsumsi Pangan Segar | - | - | - | 63.64 Persen | 10,000,000 | | | | | | 30,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan | |
| 2 | 09 | 05 | 2.01 | | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar yang Terlaksana | - | - | - | 4 Kali | 10,000,000 | | | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | 30,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan | |
| 2 | 09 | 05 | 2.01 | 0004 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | - | 1 unit Dokumen | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | 30,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------------|-----------|---|---|----------------------------------|--|---|--|--------------------------|--------|-------------|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|----------------------|---|---|
| | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | 4,363,096,035 | | | | | | | 7,592,658,106 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan | |
| | 25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | 1,510,000,000 | | | | | | | 2,047,930,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan | |
| 108 | 3 | 25 | 03 | | | | | 49.54 Persen | | | | | | | 930,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Cakupan bina kelompok nelayan | - | | | | | | | | | | | | 841,920,000 | |
| | | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawo, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Hasil Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawo, dan Genangan Air Lainnya yang dikelola | - | | | | 2 Do.kumen | | | | | | | 35,000,000 | 81,760,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| | | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/ Kota yang Tersedia | - | | | | 12 Dokumen | | | | | | | 5,000,000 | 40,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| | | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia | - | | | | 15 Unit | | | | | | | 30,000,000 | 41,760,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| | | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pemberdayaan Nelayan yang Terfasilitasi | - | | | | 11 Kelompok | | | | | | | 870,000,000 | 680,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| | | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kelompok Nelayan Kota Lhokseumawe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya | - | | | | 200 Orang | | | | | | | 850,000,000 | 650,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| | | Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya | - | | | | 8 Kelompok | | | | | | | 20,000,000 | 30,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| | | Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawo, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Tanda Daftar Kapal Perikanan yang di Terbitkan | - | | | | 100 Dokumen | | | | | | | 25,000,000 | 45,010,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| | | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT | Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota | - | | | | 8 Dokumen | | | | | | | 5,000,000 | 15,010,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| | | Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT | Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan | - | | | | 300 Rekomendasi | | | | | | | 20,000,000 | 30,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 109 | 3 | 25 | 04 | | | | | 53.14 Persen | | | | | | | 505,000,000 | 1,041,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Cakupan bina kelompok pembudidaya | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Jumlah Pembudidaya Ikan Kecil yang di Berdayakan | - | | | | 10 Kelompok | | | | | | | 70,000,000 | 126,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| | | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kelompok Pembudidaya Kota Lhokseumawe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas | - | | | | 12 Bulan Kelompok | | | | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| | | Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan | - | | | | 30 Kelompok | | | | | | | 20,000,000 | 51,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----|------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|--------------------------------------|--|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 25 | 04 | 2.03 | | | | 2 Dokumen | 5,000,000 | | | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 8,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 3 | 25 | 04 | 2.03 | 0001 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 5 Rekomendasi | 5,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 8,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 3 | 25 | 04 | 2.04 | | | | 2 Dokumen | 430,000,000 | | | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Kelompok Pembudidaya Kota Lhokseumawe | - | 845,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 3 | 25 | 04 | 2.04 | 0001 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 10 Dokumen | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Kelompok Pembudidaya Kota Lhokseumawe | - | 110,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 3 | 25 | 04 | 2.04 | 0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 kegiatan Unit | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Kelompok Pembudidaya Kota Lhokseumawe | - | 75,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 3 | 25 | 04 | 2.04 | 0009 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 177 Unit | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Kelompok Pembudidaya Kota Lhokseumawe | - | 30,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 3 | 25 | 04 | 2.04 | 0012 | Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan | 2 Dokumen Dokumen | 350,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memperkuat Kemandirian Pangan, Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Kelompok Pembudidaya Kota Lhokseumawe | - | 500,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 111 | 3 | 25 | 06 | | | | 100 Persen | 75,000,000 | | | | | | - | 95,010,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 3 | 25 | 06 | 2.01 | | | | 75 Dokumen | 25,000,000 | | | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 35,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 3 | 25 | 06 | 2.01 | 0005 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko | Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko | 12 Dokumen | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 35,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 3 | 25 | 06 | 2.03 | | | | 6 Unit | 50,000,000 | | | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat | - | 60,010,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 3 | 25 | 06 | 2.03 | 0001 | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 5 Ton | 30,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat | - | 35,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 3 | 25 | 06 | 2.03 | 0002 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi | 30 Pelaku Usaha | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat | - | 25,010,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 3 | 27 | | | | | | | 2,853,096,035 | | | | | | - | 5,544,728,106 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 112 | 3 | 27 | 02 | | | | 41.35 Persen | 655,000,000 | | | | | | - | 617,748,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----|------|--|---|----------------------------------|---|---|--|---------------------|---|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 27 | 02 | 2.01 | | | | 4 Kali | 600,000,000 | | | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 126,133,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 3 | 27 | 02 | 2.01 | 0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 5 Laporan | 600,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA BAGI HASIL (DBH) MINYAK DAN GAS OTONOMI | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 126,133,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 3 | 27 | 02 | 2.02 | | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme yang dikelola | 15 Jenis | 15,000,000 | | | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 106,235,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 3 | 27 | 02 | 2.02 | 0002 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | 5 Dokumen | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 30,653,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 3 | 27 | 02 | 2.03 | | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Frekuensi Pengawasan Peredaran Pakan dan Benih Serta Mutu | 5 Kali | 25,000,000 | | | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat | - | 35,110,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 3 | 27 | 02 | 2.03 | 0001 | Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | 3 Laporan | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat | - | 20,100,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 3 | 27 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak | Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar | 5 Laporan | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat | - | 15,010,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 3 | 27 | 02 | 2.05 | | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Penyediaan an Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak yang diawasi | 2 Dokumen | 15,000,000 | | | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat | - | 65,160,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 3 | 27 | 02 | 2.05 | 0002 | Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak | Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak | 6 Dokumen | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat | - | 30,100,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 113 | 3 | 27 | 03 | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Cakupan Prasarana Kelompok Tani | 42.93 Persen | 1,103,096,035 | | | | | | - | 2,846,006,603 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 3 | 27 | 03 | 2.02 | | Pembangunan Prasarana Pertanian | Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun | 5 Unit | 753,096,035 | | | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | | - | 2,425,500,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 3 | 27 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 3 Unit | 100,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | | - | 110,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 3 | 27 | 03 | 2.02 | 0003 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 10 Unit | 200,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | | - | 500,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| 3 | 27 | 03 | 2.02 | 0008 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya | Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 3 Unit | 100,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | | - | 255,500,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----|------|----|------|------|---|---|--|----------------------------------|--|---|--|---|--------------------------------------|---|--|-----------------------------|------------------|---|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 3 | 27 | 03 | 2.02 | 0009 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | | | 1 Unit | 353,096,035 | Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Paloh Batee | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | - | 120,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan | | |
| 3 | 27 | 03 | 2.03 | | | Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang dikelola | | | 3 Dokumen | 350,000,000 | | | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat | 370,506,603 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan | | |
| 3 | 27 | 03 | 2.03 | 0001 | Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak | Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan | | | | 5 Laporan | 350,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat | 370,506,603 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan | | |
| 114 | 3 | 27 | 04 | | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Cakupan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | | | 44.12 Persen | 20,000,000 | | | | | | 230,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan | | |
| 3 | 27 | 04 | 2.03 | | | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laboratorium dan Medik Veteriner yang dikelola | | | 1 Unit | 20,000,000 | | | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | 100,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan | | |
| 3 | 27 | 04 | 2.03 | 0002 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner | | | | 5 Laporan | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | 50,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan | | |
| 115 | 3 | 27 | 05 | | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | 54.68 Persen | 75,000,000 | | | | | | 200,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan | | |
| 3 | 27 | 05 | 2.01 | | | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | Jumlah Bencana Pertanian yang ditanggulangi | | | 1 Kali | 75,000,000 | | | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | 200,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan | | |
| 3 | 27 | 05 | 2.01 | 0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | | | | 2 Ha | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | 15,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan | | |
| 3 | 27 | 05 | 2.01 | 0002 | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani | | | | 50 Ha | 30,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | 50,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan | | |
| 3 | 27 | 05 | 2.01 | 0004 | Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis | Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis | | | | 4 laporan | 30,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | 120,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan | | |
| 116 | 3 | 27 | 07 | | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Cakupan Pembinaan Kelembagaan Penyuluhan dan Kelembagaan Petani | | | 42.93 Persen | 1,000,000,000 | | | | | | 1,650,973,503 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan | | |
| 3 | 27 | 07 | 2.01 | | | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan yang di fasilitasi | | | 1 Unit | 1,000,000,000 | | | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | 1,650,973,503 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan | | |
| 3 | 27 | 07 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | | 3 Unit | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | 54,264,188 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan | | |
| 3 | 27 | 07 | 2.01 | 0002 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | | 3 Unit | 300,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | 895,250,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|--------------------------------------|---|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 3 27 07 2.01 0003 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | | | | 4 Unit | 650,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Memantapkan kemandirian pangan , energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 671,000,000 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| | | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | 8,654,545,768 | | | | | | | 12,519,858,016 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERTKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 5,691,869,118 | | | | | | | 6,573,774,692 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| | 2 17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | | | 5,691,869,118 | | | | | | | 6,573,774,692 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| 117 | 2 17 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | - | | | 100 Persen | 4,686,401,368 | | | | | | | 5,919,802,655 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| | 2 17 01 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah | - | | | 8 Dokumen | 50,000,000 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Disperdagkop & UKM Kota Lhokseumawe | - | 155,997,452 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| | 2 17 01 2.01 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | | | 3 Dokumen | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Disperdagkop & UKM Kota Lhokseumawe | | 144,531,452 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| | 2 17 01 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Periode Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | 12 Bulan | 3,627,946,488 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Disperdagkop & UKM Kota Lhokseumawe | - | 3,349,794,498 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| | 2 17 01 2.02 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | - | | | 420 Orang/bulan | 3,627,946,488 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Disperdagkop & UKM Kota Lhokseumawe | | 3,347,501,298 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| | 2 17 01 2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | 6 Dokumen | 25,000,000 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Disperdagkop & UKM Kota Lhokseumawe | - | 42,466,000 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| | 2 17 01 2.03 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | - | | | 1 Dokumen | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Disperdagkop & UKM Kota Lhokseumawe | | 33,293,200 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| | 2 17 01 2.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Periode Penyediaan Administrasi Pendapatan Daerah | - | | | 12 Bulan | 20,000,000 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Disperdagkop & UKM Kota Lhokseumawe | - | 28,586,400 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| | 2 17 01 2.04 0004 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah | - | | | 1 Dokumen | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Disperdagkop & UKM Kota Lhokseumawe | | 14,293,200 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|----|------|----|------|------|--|--|----------------------------------|--|---|--|--|--------------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|---------------------|--|--------|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 2 | 17 | 01 | 2.04 | 0005 | Pengolahan Data Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah | - | - | 1 Laporan | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Disperdagkop & UKM Kota Lhokseumawe | - | 14,293,200 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | |
| 2 | 17 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Periode Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 12 Bulan | 15,000,000 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Disperdagkop & UKM Kota Lhokseumawe | - | 56,358,422 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | |
| 2 | 17 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | - | - | 35 Orang | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Disperdagkop & UKM Kota Lhokseumawe | - | 33,426,422 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Periode Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 12 Bulan | 131,140,000 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Disperdagkop & UKM Kota Lhokseumawe | - | 288,083,053 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | - | - | 8 Paket | 30,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Disperdagkop & UKM Kota Lhokseumawe | - | 51,954,210 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | - | - | 1 Paket | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Disperdagkop & UKM Kota Lhokseumawe | - | 16,044,683 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | - | - | 1 Paket | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Disperdagkop & UKM Kota Lhokseumawe | - | 33,426,000 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | - | - | 1 Dokumen | 1,140,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Disperdagkop & UKM Kota Lhokseumawe | - | 1,944,810 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - | - | 1 Laporan | 80,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Disperdagkop & UKM Kota Lhokseumawe | - | 167,076,000 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | |
| 2 | 17 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan | - | - | 11 Unit | 50,000,000 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Memperkuat Kemandirian Pangan, Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Disperdagkop & UKM Kota Lhokseumawe | - | 345,046,408 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | |
| 2 | 17 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | - | - | 4 Unit | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Memperkuat Kemandirian Pangan, Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Disperdagkop & UKM Kota Lhokseumawe | - | 100,279,266 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | | | |
|-----|------|----|------|------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|--------------------------------------|---|--|-------------------------------------|--------|---------------------|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Kelompok Sasaran | Target | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| 2 | 17 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 12 Bulan | 571,614,880 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Memperkuat Kemandirian Pangan, Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Disperdagkop & UKM Kota Lhokseumawe | - | 925,597,116 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | |
| 2 | 17 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 15 Laporan | 1,500,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif | Memperkuat Kemandirian Pangan, Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Disperdagkop & UKM Kota Lhokseumawe | | 4,254,272 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | |
| 2 | 17 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 84 Laporan | 200,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif | Memperkuat Kemandirian Pangan, Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Disperdagkop & UKM Kota Lhokseumawe | | 417,690,000 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | |
| 2 | 17 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 708 Laporan | 370,114,880 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif | Memperkuat Kemandirian Pangan, Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Disperdagkop & UKM Kota Lhokseumawe | | 436,800,000 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | |
| 2 | 17 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Mitik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Mitik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 91 Unit | 195,700,000 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Memperkuat Kemandirian Pangan, Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Disperdagkop & UKM Kota Lhokseumawe | - | 683,544,538 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | |
| 2 | 17 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 14 Unit | 36,600,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif | Memperkuat Kemandirian Pangan, Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Disperdagkop & UKM Kota Lhokseumawe | | 80,223,413 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | |
| 2 | 17 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya | | | | 24 Unit | 79,100,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | Disperdagkop & UKM Kota Lhokseumawe | | 104,498,809 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | |
| 2 | 17 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi | | | | 1 Unit | 30,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | Disperdagkop & UKM Kota Lhokseumawe | | 238,990,628 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | |
| 2 | 17 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi | | | | 1 Unit | 50,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | Disperdagkop & UKM Kota Lhokseumawe | | 97,461,000 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | |
| 118 | 2 | 17 | 02 | | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | Persentase Koperasi yang memiliki USP | - | | | 1.36 Persen | 10,000,000 | | | | | | | | 50,111,704 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| 2 | 17 | 02 | 2.01 | | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | | | 1 Laporan | 10,000,000 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | Lembaga Koperasi | | 25,055,851 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | |
| 2 | 17 | 02 | 2.01 | 0001 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | | | 1 Unit Usaha | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | Lembaga Koperasi | | 25,055,851 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|--|--|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 119 | 2 17 03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Persentase Koperasi Mandiri | - | - | - | 83.49 Persen | 10,000,000 | | | | | | - | 26,500,000 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| | 2 17 03 2.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Periode Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi | - | - | - | 12 Bulan | 10,000,000 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendukung Keunggulan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | Anggota Koperasi | - | 26,500,000 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| | 2 17 03 2.01 0004 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan | - | - | - | 20 Unit Usaha | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendukung Keunggulan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | Anggota Koperasi | - | 26,500,000 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| 120 | 2 17 04 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Persentase Koperasi yang Sehat | - | - | - | 7.27 Persen | 13,733,875 | | | | | | - | 110,000,000 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| | 2 17 04 2.01 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi Berprestasi yang Dapat penilaian | - | - | - | 20 Koperasi | 13,733,875 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendukung Keunggulan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | Lembaga Koperasi | - | 110,000,000 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| | 2 17 04 2.01 0001 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan | - | - | - | 10 Unit Usaha | 13,733,875 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendukung Keunggulan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | Lembaga Koperasi | - | 110,000,000 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| 121 | 2 17 07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase Fasilitas UMKM | - | - | - | 27.26 Persen | 437,733,875 | | | | | | - | 412,360,333 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| | 2 17 07 2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Penambahan Jumlah UMKM yang terdata dalam satu tahun | - | - | - | 92 UMKM | 437,733,875 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendukung Keunggulan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | Pelaku UMKM | - | 412,360,333 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| | 2 17 07 2.01 0002 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro | - | - | - | 100 Unit Usaha | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendukung Keunggulan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | Pelaku UMKM | - | 73,370,569 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| | 2 17 07 2.01 0003 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan | - | - | - | 20 Unit Usaha | 5,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendukung Keunggulan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | Pelaku UMKM | - | 13,370,569 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| | 2 17 07 2.01 0004 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | - | - | - | 20 Unit Usaha | 282,733,875 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendukung Keunggulan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | Pelaku UMKM | - | 290,000,000 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| | 2 17 07 2.01 0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | - | - | - | 20 Orang | 100,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendukung Keunggulan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | Pelaku UMKM | - | 35,619,195 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| 122 | 2 17 08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase Pengembangan UMKM | - | - | - | 7.87 Persen | 534,000,000 | | | | | | - | 55,000,000 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----|-----------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|---|---|--|--|---------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2 | 17 08 2.01 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Jumlah UMKM yang difasilitasi | - | | | 100 UMKM | 534,000,000 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | Pelaku UMKM | - | 55,000,000 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| 2 | 17 08 2.01 0002 | Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | - | | | 50 Unit Usaha | 534,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | Pelaku UMKM | - | 55,000,000 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| 3 | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | 2,962,676,650 | | | | | | | 5,945,783,324 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| 3 | 30 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | | | 2,404,000,000 | | | | | | | 4,654,565,383 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| 123 | 3 30 03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Cakupan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | - | | | 0.40 Persen | 1,470,000,000 | | | | | | | 1,519,737,506 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| 3 | 30 03 2.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah sarana dsitribusi perdagangan yang dibangun | - | | | 3 Unit | 1,455,000,000 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Memperkuat Kemandirian Pangan, Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Aset Fisik Disperdagkop & UKM Kota Lhokseumawe | - | 1,500,000,000 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| 3 | 30 03 2.01 0001 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | - | | | 1 Unit | 1,450,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif | Memperkuat Kemandirian Pangan, Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Aset Fisik Disperdagkop & UKM Kota Lhokseumawe | - | 1,436,330,625 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| 3 | 30 03 2.01 0002 | Facilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | - | | | 2 Unit | 5,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif | Memperkuat Kemandirian Pangan, Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Aset Fisik Disperdagkop & UKM Kota Lhokseumawe | - | 63,669,375 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| 3 | 30 03 2.02 | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | Jumlah pembinaan terhadap Penagih Retribusi Pasar | - | | | 2 kali | 15,000,000 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Memperkuat Kemandirian Pangan, Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Pedagog | - | 19,737,506 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| 3 | 30 03 2.02 0001 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | - | | | 1 Dokumen | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif | Memperkuat Kemandirian Pangan, Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Pedagog | - | 19,737,506 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| 124 | 3 30 04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Cakupan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | - | | | 59.98 Persen | 554,000,000 | | | | | | | 547,556,627 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| 3 | 30 04 2.02 | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | Periode Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | - | | | 12 Bulan | 549,000,000 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | Pedagog Kota Lhokseumawe | - | 452,052,563 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| 3 | 30 04 2.02 0002 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | - | | | 56 Laporan | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | Pedagog Kota Lhokseumawe | - | 44,568,563 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----|------|----|------|------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---|---|--|---|--|-----------------------------------|---------------------|--|--------|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 3 | 30 | 04 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | - | - | 2 Laporan | 524,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif | Memperkuat Kemandirian Pangan, Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Pedagang Kota Lhokseumawe | - | 407,484,000 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | |
| 3 | 30 | 04 | 2.03 | | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah periode pengawasan terhadap Pupuk bersubsidi di Tingkat Kota Lhokseumawe | - | - | 12 Bulan | 5,000,000 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | Pedagang Grosir Pupuk | - | 95,504,064 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | |
| 3 | 30 | 04 | 2.03 | 0001 | Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan | Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan | - | - | 3 Dokumen | 5,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | Pedagang Grosir Pupuk | - | 31,834,688 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | |
| 125 | 3 | 30 | 05 | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Persentase Partisipasi pada Promosi Dagang | - | - | 80.00 Persen | 320,000,000 | | | | | | - | 1,087,271,250 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | |
| 3 | 30 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Event Pameran dagang dan promosi dagang yang diikuti | - | - | 6 Kegiatan/kal i | 320,000,000 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Memperkuat Kemandirian Pangan, Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Pedagang Produk Unggulan Kota Lhokseumawe | - | 1,087,271,250 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | |
| 3 | 30 | 05 | 2.01 | 0002 | Pameran Dagang Nasional | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang | - | - | 3 Pelaku Usaha | 150,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif | Memperkuat Kemandirian Pangan, Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Pedagang Produk Unggulan Kota Lhokseumawe | - | 665,271,250 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | |
| 3 | 30 | 05 | 2.01 | 0003 | Pameran Dagang Lokal | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal | - | - | 2 Pelaku Usaha | 150,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif | Memperkuat Kemandirian Pangan, Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Pedagang Produk Unggulan Kota Lhokseumawe | - | 400,000,000 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | |
| 3 | 30 | 05 | 2.01 | 0004 | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan | - | - | 40 Pelaku Usaha | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif | Memperkuat Kemandirian Pangan, Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Pedagang Produk Unggulan Kota Lhokseumawe | - | 22,000,000 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | |
| 126 | 3 | 30 | 06 | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Persentase Tera Tera Ulang UTTP | - | - | 74.07 Persen | 60,000,000 | | | | | | - | 1,500,000,000 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | |
| 3 | 30 | 06 | 2.01 | | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan pengawasan | - | - | 17 Kali | 60,000,000 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Memperkuat Kemandirian Pangan, Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Pedagang Kota Lhokseumawe | - | 1,500,000,000 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | |
| 3 | 30 | 06 | 2.01 | 0001 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perengkapan Ditera Ulang | - | - | 4 Unit | 30,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif | Memperkuat Kemandirian Pangan, Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Pedagang Kota Lhokseumawe | - | 451,672,398 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | |
| 3 | 30 | 06 | 2.01 | 0002 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina | - | - | 12 Orang | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif | Memperkuat Kemandirian Pangan, Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Pedagang Kota Lhokseumawe | - | 1,016,492,914 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | |
| 3 | 30 | 06 | 2.01 | 0003 | Penyidikan Metrologi Legal | Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal | - | - | 1 Unit | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif | Memperkuat Kemandirian Pangan, Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Pedagang Kota Lhokseumawe | - | 31,834,688 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----|------|----|------|------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---|--------------------------------------|---|--|------------------|---|---|-----------------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 3 | 31 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | | | | | | | 1,291,217,941 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | | | |
| 127 | 3 | 31 | 02 | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Cakupan Pembinaan, Pengawasan dan Promosi Industri Kecil Menengah | - | | 5,77 Persen | 523,677,250 | | | | | 1,141,217,941 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | | | |
| 3 | 31 | 02 | 2.01 | | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kota Lhokseumawe | - | | 3 Dokumen | 523,677,250 | | | | | 1,141,217,941 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | | | |
| 3 | 31 | 02 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri | - | | 1 Dokumen | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Memperkuat Kemandirian Pangan, Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Pelaku IKM | 106,338,750 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | | |
| 3 | 31 | 02 | 2.01 | 0002 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | - | | 1 Dokumen | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Pelaku IKM | 38,201,625 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | | |
| 3 | 31 | 02 | 2.01 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | - | | 1 Dokumen | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi | Pelaku IKM | 41,761,099 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | | |
| 3 | 31 | 02 | 2.01 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | - | | 1 Dokumen | 33,677,250 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Memperkuat Kemandirian Pangan, Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Pelaku IKM | 419,247,092 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | | |
| 3 | 31 | 02 | 2.01 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | - | | 1 Dokumen | 400,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Memperkuat Kemandirian Pangan, Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Pelaku IKM | 472,000,000 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | | |
| 3 | 31 | 02 | 2.01 | 0006 | Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | - | | 1 Dokumen | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Memperkuat Kemandirian Pangan, Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Pelaku IKM | 63,669,375 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | | |
| 128 | 3 | 31 | 04 | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Ketersediaan Informasi yang dibutuhkan | - | | Ada Ada/Tidak | 34,999,400 | | | | | 150,000,000 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | | | |
| 3 | 31 | 04 | 2.01 | | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | - | | 2 Dokumen | 34,999,400 | | | | | 150,000,000 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | | | |
| 3 | 31 | 04 | 2.01 | 0001 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional | - | | 1 Dokumen | 14,999,400 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Memperkuat Kemandirian Pangan, Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Pelaku IKM | 63,669,375 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | | |
| 3 | 31 | 04 | 2.01 | 0002 | Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas | Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas | - | | 1 Dokumen | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Memperkuat Kemandirian Pangan, Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Pelaku IKM | 33,808,841 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----|------|----|------|------|--|---|---|----------------------------------|--|---|--|---|--------------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|---|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| 3 | 31 | 04 | 2.01 | 0003 | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SINas | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SINas | | | | 1 Dokumen | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendukung KeWirusahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi | Pelaku IKM | 52,521,784 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | | |
| | | | | | Sekretariat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 31,479,606,520 | | | | | | 37,937,662,698 | Sekretariat Daerah | | |
| | | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | 31,479,606,520 | | | | | | 37,937,662,698 | Sekretariat Daerah | | |
| 129 | 4 | 01 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | - | | | 100 Persen | 29,474,606,520 | | | | | | 34,389,105,000 | Sekretariat Daerah | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | 3 Dokumen | 20,000,000 | | | | | | 25,000,000 | Sekretariat Daerah | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 8 Dokumen | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | 25,000,000 | Sekretariat Daerah | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Periode Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | 12 Bulan | 12,403,118,000 | | | | | | 14,000,000,000 | Sekretariat Daerah | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 2408 Orang/bulan | 12,403,118,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | ASN di Sekretariat Daerah | 14,000,000,000 | Sekretariat Daerah | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Periode Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | 12 Bulan | 205,000,000 | | | | | | 175,000,000 | Sekretariat Daerah | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 180,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | 140,000,000 | Sekretariat Daerah | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 8 Orang | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | 35,000,000 | Sekretariat Daerah | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Periode Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | 12 Bulan | 6,010,000,000 | | | | | | 6,030,000,000 | Sekretariat Daerah | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 180,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | 180,000,000 | Sekretariat Daerah | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 300,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | 300,000,000 | Sekretariat Daerah | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1,350,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | 1,350,000,000 | Sekretariat Daerah | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 80,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | 100,000,000 | Sekretariat Daerah | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | | | | 1 Laporan | 600,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | 600,000,000 | Sekretariat Daerah | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 500 Laporan | 3,500,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | 3,500,000,000 | Sekretariat Daerah | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | 10 Unit | 3,600,000,000 | | | | | | 3,950,000,000 | Sekretariat Daerah | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | | 9 Unit | 2,500,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | 1,000,000,000 | Sekretariat Daerah | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1,100,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | 650,000,000 | Sekretariat Daerah | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|-----------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|--------------------------------------|---|--|--------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4 | 01 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | - | 12 Bulan | 2,310,783,520 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | - | 4,390,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 01 2.08 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | | 15,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 01 2.08 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 700,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | | 900,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 01 2.08 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | | 175,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 01 2.08 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 1,585,783,520 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | | 3,300,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | - | 5 Jenis | 2,406,600,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | - | 2,850,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 01 2.09 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Biaya Pemeliharaan | | | | 18 Unit | 790,600,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | | 800,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 01 2.09 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Biaya Pemeliharaan | | | | 19 Unit | 216,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | | 300,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 01 2.09 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 5 Unit | 800,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | | 700,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 01 2.09 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 6 Unit | 300,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | | 600,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 01 2.09 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 4 Unit | 300,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | | 450,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 01 2.11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Periode Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | - | - | - | 12 Bulan | 579,105,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | - | 579,105,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 01 2.11 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 28 Orang/Bulan | 179,105,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | | 179,105,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 01 2.11 0004 | Penyediaan Dana Pemungut Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Pemungut Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 24 Orang/Bulan | 400,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | | 400,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 01 2.12 | Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Periode Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | - | - | - | 12 Bulan | 345,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | - | 345,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 01 2.12 0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | | | | 1 Paket | 140,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | | 140,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 01 2.12 0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | | | | 1 Paket | 120,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | | 120,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 01 2.12 0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | | | | 1 Paket | 85,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | | 85,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 01 2.13 | Penataan Organisasi | Jumlah Dokumen Penataan Organisasi | - | - | - | 3 Dokumen | 445,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | - | 545,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 01 2.13 0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | | 6 Dokumen | 105,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | | 150,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 01 2.13 0002 | Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | 7 Laporan | 190,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | | 220,000,000 | Sekretariat Daerah |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----|-----------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|----------------------|---|--------------------------------------|--|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4 | 01 01 2.13 0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | - | - | - | 5 Dokumen | 150,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | - | 175,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 01 2.14 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Periode Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | - | - | - | 12 Bulan | 1,150,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | - | 1,500,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 01 2.14 0001 | Fasilitasi Keprotokolan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | - | - | - | 1 Laporan | 200,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | - | 300,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 01 2.14 0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | - | - | - | 1 Laporan | 800,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | - | 900,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 01 2.14 0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | - | - | - | 1 Laporan | 150,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | - | 300,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 130 | 4 01 02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat | - | - | - | 98.70 Persen | 1,370,000,000 | | | | | | - | 2,055,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 02 2.01 | Administrasi Tata Pemerintahan | Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan | - | - | - | 3 Dokumen | 470,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pemerintah | - | 800,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 02 2.01 0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | - | - | - | 4 Dokumen | 230,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pemerintah | - | 300,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 02 2.01 0002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | - | - | - | 4 Dokumen | 110,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pemerintah | - | 250,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 02 2.01 0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | - | - | - | 3 Dokumen | 130,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pemerintah | - | 250,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 02 2.02 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Periode Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | - | - | - | 12 Bulan | 450,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | - | 635,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 02 2.02 0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | - | - | - | 1 Dokumen | 190,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | - | 290,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 02 2.02 0002 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk | - | - | - | 1 Dokumen | 140,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | - | 70,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 02 2.02 0003 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum | - | - | - | 1 Dokumen | 120,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | - | 275,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 02 2.03 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | - | - | - | 3 Dokumen | 450,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | - | 620,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 02 2.03 0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | - | - | - | 6 Dokumen | 150,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | - | 220,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 02 2.03 0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | - | - | - | 16 Kasus | 250,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | - | 300,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 02 2.03 0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | - | - | - | 70 Dokumen | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | - | 100,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 131 | 4 01 03 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan | - | - | - | 92.00 Persen | 635,000,000 | | | | | | - | 1,493,557,698 | Sekretariat Daerah |

| No | Kode | Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----|-----------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|--------------------------------------|---|--|---|---------------------|-----------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4 | 01 03 2.01 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | - | | | 3 Dokumen | 270,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | - | 475,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 03 2.01 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD, Asa, dan BLUD | | | | 4 Dokumen | 130,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 175,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 03 2.01 0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | | | | 5 Laporan | 100,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 200,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 03 2.01 0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | | | | 2 Dokumen | 40,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 100,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 03 2.02 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | - | | | 2 Dokumen | 170,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah | - | 174,759,098 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 03 2.02 0002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | | | | 4 Laporan | 85,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah | | 85,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 03 2.02 0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | | | | 12 Laporan | 85,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah | | 89,759,098 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 03 2.03 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | - | | | 3 Dokumen | 195,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | - | 843,798,600 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 03 2.03 0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 15 Dokumen | 85,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 339,037,800 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 03 2.03 0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | | 5 Dokumen | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 193,333,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 03 2.03 0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 5 Orang | 60,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 311,427,800 | Sekretariat Daerah |
| 4 | | Sekretariat DPRK | | | | | | 24,144,773,240 | | | | | | | 26,375,109,182 | Sekretariat DPRK |
| 4 | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 24,144,773,240 | | | | | | | 26,375,109,182 | Sekretariat DPRK |
| 4 | 02 | SEKRETARIAT DPRD | | | | | | 24,144,773,240 | | | | | | | 26,375,109,182 | Sekretariat DPRK |
| 132 | 4 02 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | - | | | 100 Persen undefined | 20,088,773,240 | | | | | | - | 20,404,907,984 | Sekretariat DPRK |
| 4 | 02 01 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | 6 Dokumen undefined | 10,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRK | - | 16,048,049 | Sekretariat DPRK |
| 4 | 02 01 2.01 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 20 Dokumen | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRK | | 3,009,009 | Sekretariat DPRK |
| 4 | 02 01 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Periode gaji dan Tunjangan ASN | - | | | 1 Tahun | 5,830,141,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRK | - | 4,529,030,964 | Sekretariat DPRK |
| 4 | 02 01 2.02 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 868 Orang/bulan | 5,830,141,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRK | | 4,529,030,964 | Sekretariat DPRK |
| 4 | 02 01 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Periode Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | 12 Bulan | 666,640,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | DPRK Lhokseumawe | - | 863,485,283 | Sekretariat DPRK |
| 4 | 02 01 2.06 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 25 Paket | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | DPRK Lhokseumawe | | 18,054,054 | Sekretariat DPRK |
| 4 | 02 01 2.06 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 75 Paket | 120,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | DPRK Lhokseumawe | | 150,450,450 | Sekretariat DPRK |
| 4 | 02 01 2.06 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 2 Paket | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | DPRK Lhokseumawe | | 11,033,033 | Sekretariat DPRK |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|----|------|----|------|------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---|--------------------------------------|--|---|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|----|-----------------------------------|----|----|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | 14 | 15 | | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | 180 Paket | 230,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | DPRK Lhokseumawe | 270,810,810 | Sekretariat DPRK | | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | 2 Paket | 65,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | DPRK Lhokseumawe | 90,270,270 | Sekretariat DPRK | | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | 150 Dokumen | 86,640,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | DPRK Lhokseumawe | 97,190,991 | Sekretariat DPRK | | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 200 Laporan | 30,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | DPRK Lhokseumawe | 50,150,150 | Sekretariat DPRK | | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 40 Laporan | 100,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | DPRK Lhokseumawe | 115,345,345 | Sekretariat DPRK | | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah undefined | | | 3 Jenis undefined undefined | 50,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRK | 125,375,375 | Sekretariat DPRK | | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | 12 Unit | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRK | 50,150,150 | Sekretariat DPRK | | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah undefined | | | 3 Jenis undefined undefined | 2,032,392,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRK | 2,696,879,203 | Sekretariat DPRK | | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 500 Laporan | 5,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRK | 5,015,015 | Sekretariat DPRK | | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | 3 Laporan | 425,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRK | 358,334,858 | Sekretariat DPRK | | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | 7 Laporan | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRK | 28,084,084 | Sekretariat DPRK | | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | 260 Laporan | 1,587,392,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRK | 2,305,445,246 | Sekretariat DPRK | | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah undefined | | | 5 Jenis undefined undefined | 366,067,240 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRK | 786,755,553 | Sekretariat DPRK | | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak | | | 48 Unit | 209,567,240 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRK | 70,210,210 | Sekretariat DPRK | | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak | | | 60 Unit | 76,500,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRK | 240,118,918 | Sekretariat DPRK | | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi | | | 1 Unit | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRK | 426,276,275 | Sekretariat DPRK | | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi | | | 1 Unit | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRK | 20,060,060 | Sekretariat DPRK | | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi | | | 3 Unit | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRK | 30,090,090 | Sekretariat DPRK | | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.14 | | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Jumlah Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | | | 3 Jenis | 180,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | DPRK Lhokseumawe | 260,780,780 | Sekretariat DPRK | | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.14 | 0001 | Fasilitasi Keprotokolan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | | | 30 Laporan | 30,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | DPRK Lhokseumawe | 20,060,060 | Sekretariat DPRK | | | | |
| 4 | 02 | 01 | 2.14 | 0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | 3 Laporan | 100,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | DPRK Lhokseumawe | 220,660,660 | Sekretariat DPRK | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----|------------|--|--|--|--|---|--|---------------------|---|--|---|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4 | 02 01 2.14 | 0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | - | - | 3 Laporan | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | DPRK Lhokseumawe | - | 20,060,060 | Sekretariat DPRK |
| 4 | 02 01 2.15 | | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | - | - | 3 Jenis | 10,443,533,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | DPRK Lhokseumawe | - | 9,823,483,458 | Sekretariat DPRK |
| 4 | 02 01 2.15 | 0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD | - | - | 350 Orang/Bulan | 10,010,073,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | DPRK Lhokseumawe | - | 9,374,540,468 | Sekretariat DPRK |
| 4 | 02 01 2.15 | 0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan | - | - | 25 Paket | 308,460,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | DPRK Lhokseumawe | - | 323,567,615 | Sekretariat DPRK |
| 4 | 02 01 2.15 | 0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD | - | - | 25 Orang | 125,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | DPRK Lhokseumawe | - | 125,375,375 | Sekretariat DPRK |
| 4 | 02 01 2.16 | | Layanan Administrasi DPRD | Jumlah Layanan Administrasi DPRD undefined | - | - | 4 Jenis undefined undefined | 510,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | DPRK Lhokseumawe | - | 1,267,964,214 | Sekretariat DPRK |
| 4 | 02 01 2.16 | 0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | - | - | 25 Dokumen | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | DPRK Lhokseumawe | - | 10,030,030 | Sekretariat DPRK |
| 4 | 02 01 2.16 | 0002 | Fasilitasi Fraksi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD | - | - | 48 Laporan | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | DPRK Lhokseumawe | - | 20,060,060 | Sekretariat DPRK |
| 4 | 02 01 2.16 | 0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | - | - | 48 Laporan | 470,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | DPRK Lhokseumawe | - | 1,222,829,079 | Sekretariat DPRK |
| 4 | 02 01 2.16 | 0004 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan | - | - | 4 Paket | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | DPRK Lhokseumawe | - | 15,045,045 | Sekretariat DPRK |
| 133 | 4 02 02 | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan | - | - | 81.82 Persen | 4,056,000,000 | | | | | | - | 5,970,201,198 | Sekretariat DPRK |
| 4 | 02 02 2.01 | | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Jumlah Rancangan Rancangan Qanun dan Peraturan Daerah | - | - | 5 Jenis | 480,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | DPRK Lhokseumawe | - | 807,715,852 | Sekretariat DPRK |
| 4 | 02 02 2.01 | 0001 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | - | - | 1 Dokumen | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | DPRK Lhokseumawe | - | 19,718,618 | Sekretariat DPRK |
| 4 | 02 02 2.01 | 0002 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | - | - | 15 Dokumen | 350,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | DPRK Lhokseumawe | - | 613,764,449 | Sekretariat DPRK |
| 4 | 02 02 2.01 | 0003 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan | - | - | 2 Dokumen | 60,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | DPRK Lhokseumawe | - | 99,007,560 | Sekretariat DPRK |
| 4 | 02 02 2.01 | 0004 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/stau Naskah Akademik yang Difaasilitasi | - | - | 3 Dokumen | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | DPRK Lhokseumawe | - | 35,105,105 | Sekretariat DPRK |
| 4 | 02 02 2.01 | 0005 | Penyusunan Tata Tertib DPRD | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun | - | - | 1 Dokumen | 30,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | DPRK Lhokseumawe | - | 40,120,120 | Sekretariat DPRK |
| 4 | 02 02 2.02 | | Pembahasan Kebijakan Anggaran | Jumlah Pelaksanaan Rapat Rapat Alat Kelengkapan Dewan | - | - | 6 Laporan | 530,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | DPRK/ TAPK/ SKPD | - | 935,592,925 | Sekretariat DPRK |
| 4 | 02 02 2.02 | 0001 | Pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS | - | - | 10 Dokumen | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | DPRK/ TAPK/ SKPD | - | 29,747,565 | Sekretariat DPRK |
| 4 | 02 02 2.02 | 0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | - | - | 10 Dokumen | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | DPRK/ TAPK/ SKPD | - | 29,794,756 | Sekretariat DPRK |
| 4 | 02 02 2.02 | 0003 | Pembahasan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | - | - | 1 Dokumen | 350,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | DPRK/ TAPK/ SKPD | - | 715,097,509 | Sekretariat DPRK |
| 4 | 02 02 2.02 | 0004 | Pembahasan APBD Perubahan | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan | - | - | 1 Dokumen | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | DPRK/ TAPK/ SKPD | - | 29,795,508 | Sekretariat DPRK |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|----|------|----|------|------|---|--|----------------------------------|--|---|--|----------------------|---|--------------------------------------|--|---|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 4 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pembahasan Laporan Semester | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester | | | | 2 Dokumen | 5,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | DPRK / TAPK/ SKPD | 5,015,015 | Sekretariat DPRK | |
| 4 | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | | | | 1 Dokumen | 100,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | DPRK / TAPK/ SKPD | 126,142,572 | Sekretariat DPRK | |
| 4 | 02 | 02 | 2.03 | | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | - | | | 8 Jenis | 635,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | DPRK Lhokseumawe | 992,872,239 | Sekretariat DPRK | |
| 4 | 02 | 02 | 2.03 | 0001 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | | | | 10 Laporan | 250,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | DPRK Lhokseumawe | 433,319,964 | Sekretariat DPRK | |
| 4 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | | | | 10 Laporan | 100,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | DPRK Lhokseumawe | 160,365,135 | Sekretariat DPRK | |
| 4 | 02 | 02 | 2.03 | 0003 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | | | | 10 Laporan | 100,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | DPRK Lhokseumawe | 160,361,123 | Sekretariat DPRK | |
| 4 | 02 | 02 | 2.03 | 0004 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | | | | 10 Laporan | 120,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | DPRK Lhokseumawe | 160,365,536 | Sekretariat DPRK | |
| 4 | 02 | 02 | 2.03 | 0005 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | | | | 10 Laporan | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | DPRK Lhokseumawe | 10,030,030 | Sekretariat DPRK | |
| 4 | 02 | 02 | 2.03 | 0006 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | | | | 10 Dokumen | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | DPRK Lhokseumawe | 12,207,850 | Sekretariat DPRK | |
| 4 | 02 | 02 | 2.03 | 0007 | Pengawasan Penggunaan Anggaran | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran | | | | 10 Dokumen | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | DPRK Lhokseumawe | 24,072,072 | Sekretariat DPRK | |
| 4 | 02 | 02 | 2.03 | 0008 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | | | | 10 Dokumen | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | DPRK Lhokseumawe | 32,150,529 | Sekretariat DPRK | |
| 4 | 02 | 02 | 2.04 | | Peningkatan Kapasitas DPRD | Jumlah Bimbingan Teknis dan Kelompok Pakar/Tenaga Ahli | - | | | 7 Jenis | 1,236,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pimpinan/Anggota DPRD | 1,790,716,212 | Sekretariat DPRK | |
| 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0002 | Pendalaman Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD | | | | 25 Dokumen | 200,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pimpinan/Anggota DPRD | 501,501,501 | Sekretariat DPRK | |
| 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli | | | | 36 Orang | 150,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pimpinan/Anggota DPRD | 167,775,150 | Sekretariat DPRK | |
| 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | | | | 48 Orang | 181,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pimpinan/Anggota DPRD | 184,859,210 | Sekretariat DPRK | |
| 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0006 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | | | | 12 Dokumen | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pimpinan/Anggota DPRD | 10,030,030 | Sekretariat DPRK | |
| 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0007 | Penyusunan Program Kerja DPRD | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD | | | | 2 Dokumen | 5,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pimpinan/Anggota DPRD | 5,015,015 | Sekretariat DPRK | |
| 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD | | | | 4 Dokumen | 650,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pimpinan/Anggota DPRD | 921,535,306 | Sekretariat DPRK | |
| 4 | 02 | 02 | 2.05 | | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Periode Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | - | | | 3 Kali | 955,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | DPRK Lhokseumawe | 1,285,899,997 | Sekretariat DPRK | |
| 4 | 02 | 02 | 2.05 | 0001 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD | | | | 3 Laporan | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | DPRK Lhokseumawe | 50,150,150 | Sekretariat DPRK | |
| 4 | 02 | 02 | 2.05 | 0002 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Diausun | | | | 3 Dokumen | 5,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | DPRK Lhokseumawe | 5,015,015 | Sekretariat DPRK | |
| 4 | 02 | 02 | 2.05 | 0003 | Pelaksanaan Reses | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | | | | 3 Dokumen | 900,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | DPRK Lhokseumawe | 1,230,734,832 | Sekretariat DPRK | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----|-----------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|----------------------|--|--------------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|---|
| | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4 | 02 02 2.06 | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik undefined | - | - | - | 2 Jenis undefined undefined | 5,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | DPRK Lhokseumawe | - | 5,015,015 | Sekretariat DPRK |
| 4 | 02 02 2.06 0002 | Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | - | - | - | 6 Laporan | 5,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | DPRK Lhokseumawe | - | 5,015,015 | Sekretariat DPRK |
| 4 | 02 02 2.07 | Pembahasan Kerja Sama Daerah | Jumlah Fasilitas Kerjasama daerah dan Bahan Komunikasi/Publikasi undefined | - | - | - | 2 Jenis undefined undefined | 70,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | DPRK dan Pemko Lhokseumawe | - | 72,148,718 | Sekretariat DPRK |
| 4 | 02 02 2.07 0001 | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | - | - | - | 6 Dokumen | 5,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | DPRK dan Pemko Lhokseumawe | - | 5,015,015 | Sekretariat DPRK |
| 4 | 02 02 2.07 0002 | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun | - | - | - | 2 Dokumen | 65,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | DPRK dan Pemko Lhokseumawe | - | 67,133,703 | Sekretariat DPRK |
| 4 | 02 02 2.08 | Fasilitasi Tugas DPRD | Jumlah Fasilitas Penyusunan dan Koordinasi Tugas DPRD | - | - | - | 4 Jenis | 145,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pimpinan/Anggota DPRK | - | 80,240,240 | Sekretariat DPRK |
| 4 | 02 02 2.08 0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | - | - | - | 6 Dokumen | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pimpinan/Anggota DPRK | - | 10,030,030 | Sekretariat DPRK |
| 4 | 02 02 2.08 0002 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun | - | - | - | 6 Laporan | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pimpinan/Anggota DPRK | - | 10,030,030 | Sekretariat DPRK |
| 4 | 02 02 2.08 0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | - | - | - | 12 Dokumen | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pimpinan/Anggota DPRK | - | 50,150,150 | Sekretariat DPRK |
| 4 | 02 02 2.08 0004 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | - | - | - | 18 Dokumen | 100,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pimpinan/Anggota DPRK | - | 10,030,030 | Sekretariat DPRK |
| | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | 8,544,706,470 | | | | | | | 8,215,132,663 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 8,544,706,470 | | | | | | | 8,215,132,663 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 | PERENCANAAN | | | | | | 7,944,706,470 | | | | | | | 7,735,752,038 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 134 | 5 01 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | - | - | - | 100 Persen | 6,077,368,140 | | | | | | | 6,468,666,509 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 01 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | - | 15 Dokumen | 15,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Bappeda Kota Lhokseumawe | - | 25,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 01 2.01 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | - | - | 15 Dokumen | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Bappeda Kota Lhokseumawe | - | 25,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 01 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Periode Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | - | 12 Bulan | 4,584,718,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Bappeda Kota Lhokseumawe | - | 4,543,842,184 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 01 2.02 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | - | - | - | 840 Orang/bulan | 4,584,718,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Bappeda Kota Lhokseumawe | - | 4,533,842,184 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 01 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Periode Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | - | 12 Bulan | 20,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Bappeda Kota Lhokseumawe | - | 129,755,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 01 2.05 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | - | - | - | 10 Orang | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Bappeda Kota Lhokseumawe | - | 40,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 01 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Periode Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | - | 12 Bulan | 206,140,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Bappeda Kota Lhokseumawe | - | 377,121,651 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----|------|----|----|------|--|---|---|--|---|---|--------------------------------------|--|---|------------------------------------|--------------------|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 80 Paket | 45,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Bappeda Kota Lhokseumawe | 52,710,200 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | |
| | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1150 Paket | 30,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Bappeda Kota Lhokseumawe | 44,581,451 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | |
| | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 30 Paket | 30,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Bappeda Kota Lhokseumawe | 30,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | |
| | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 1,140,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Bappeda Kota Lhokseumawe | 2,880,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | |
| | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 60 Laporan | 100,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Bappeda Kota Lhokseumawe | 234,950,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | |
| | 5 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 13 Unit | 425,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Bappeda Kota Lhokseumawe | 510,053,500 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | |
| | 5 | 01 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 125,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Bappeda Kota Lhokseumawe | 135,053,500 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | |
| | 5 | 01 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | 300,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kel/Desa Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Bappeda Kota Lhokseumawe | 75,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | |
| | 5 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | 365,910,140 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Bappeda Kota Lhokseumawe | 584,659,104 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | |
| | 5 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 30 Laporan | 2,988,700 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Bappeda Kota Lhokseumawe | 5,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | |
| | 5 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 84 Laporan | 164,600,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong, Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Bappeda Kota Lhokseumawe | 266,200,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | |
| | 5 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 708 Laporan | 198,321,440 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong, Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Bappeda Kota Lhokseumawe | 313,459,104 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | |
| | 5 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 45 Unit | 460,600,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Bappeda Kota Lhokseumawe | 280,235,070 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | |
| | 5 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak | 12 Unit | 34,600,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Bappeda Kota Lhokseumawe | 47,916,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | |
| | 5 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak | 24 Unit | 126,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Bappeda Kota Lhokseumawe | 72,819,070 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | |
| | 5 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi | 1 Unit | 200,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Bappeda Kota Lhokseumawe | 100,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | |
| | 5 | 01 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi | 8 Unit | 100,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Bappeda Kota Lhokseumawe | 59,500,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | |
| 135 | 5 | 01 | 02 | | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Ketersediaan Dokumen Perencanaan: RKPK yang telah ditetapkan dengan Perkada | Ada Ada/Tidak | 1,017,276,700 | | | | | | 621,775,104 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | |
| | 5 | 01 | 02 | 2.01 | | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | 17 Dokumen | 705,872,200 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | 288,684,235 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | |
| | 5 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Seuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) | 2 Dokumen | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | 32,590,788 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|-----------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|--------------------------------------|--|---|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 5 | 01 03 2.01 0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | 13 Laporan | 30,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 15,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 03 2.01 0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | 13 Laporan | 30,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 30,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 03 2.01 0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | | | | 2 Laporan | 100,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 40,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 03 2.02 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Periode Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam) | | | | 12 Bulan | 245,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 220,725,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 03 2.02 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | 1 Dokumen | 105,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 30,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 03 2.02 0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | | 1 Laporan | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 20,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 03 2.02 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | | 1 Laporan | 20,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 30,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 03 2.02 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian | | | | 1 Laporan | 50,000,000 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 60,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 03 2.02 0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | | | | 1 Laporan | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 15,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 03 2.02 0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | | | | 1 Laporan | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 20,725,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 03 2.02 0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang SDA | | | | 1 Laporan | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 20,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 03 2.03 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Periode Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | | | | 12 Bulan | 275,061,630 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 245,750,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 03 2.03 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | 2 Dokumen | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 25,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 03 2.03 0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | | 2 Laporan | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 20,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 03 2.03 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | | 1 Laporan | 35,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 100,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 03 2.03 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur | | | | 2 Laporan | 175,061,630 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 30,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 03 2.03 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | 2 Dokumen | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 25,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----|------|----|------|------|--|---|---|----------------------------------|--|---|--|---|---|--|---|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|---------------------|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Kelompok Sasaran | Target | | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| 5 | 01 | 03 | 2.03 | 0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | | 2 Laporan | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 15,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| 5 | 01 | 03 | 2.03 | 0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan | | | | 1 Laporan | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 30,750,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| 5 | 05 | | | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | 600,000,000 | | | | | | | 479,380,625 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| 137 | 5 | 05 | 02 | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan | - | | | 75.00 Persen | 600,000,000 | | | | | | | 479,380,625 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| 5 | 05 | 02 | 2.01 | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | - | | | 3 Dokumen | 200,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 158,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| 5 | 05 | 02 | 2.01 | 0001 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | | | | 1 Laporan | 75,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENYELUDUPAN | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 30,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| 5 | 05 | 02 | 2.01 | 0012 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik | | | | 1 Laporan | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENYELUDUPAN | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 35,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| 5 | 05 | 02 | 2.01 | 0014 | Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan | | | | 1 Laporan | 75,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENYELUDUPAN | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 20,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| 5 | 05 | 02 | 2.02 | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | - | | | 1 Dokumen | 50,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 71,380,625 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| 5 | 05 | 02 | 2.02 | 0006 | Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENYELUDUPAN | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | - | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| 5 | 05 | 02 | 2.03 | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | - | | | 1 Dokumen | 50,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Kota Lhokseumawe | | 100,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| 5 | 05 | 02 | 2.03 | 0001 | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | | 1 Dokumen | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENYELUDUPAN | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Kota Lhokseumawe | | 50,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| 5 | 05 | 02 | 2.04 | | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi di Daerah | - | | | 2 Dokumen | 300,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 150,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| 5 | 05 | 02 | 2.04 | 0001 | Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | | | | 1 Dokumen | 250,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENYELUDUPAN | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 100,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| 5 | 05 | 02 | 2.04 | 0003 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | | | | 1 Laporan | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 50,000,000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | | | | | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | | | 145,135,805,854 | | | | | | | 131,934,716,853 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | |
| 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 145,135,805,854 | | | | | | | 131,934,716,853 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | |
| 5 | 02 | | | | KEUANGAN | | | | | | 145,135,805,854 | | | | | | | 131,934,716,853 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | |
| 138 | 5 | 02 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | - | | | 100 Persen | 17,096,672,934 | | | | | | | 13,127,645,135 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | 8 Dokumen | 17,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe | | 29,885,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 17,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe | | 18,060,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | |

| No | Kode | Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|-----------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|--------------------------------------|---|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 5 | 02 01 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | - | 100 % | 15,222,909,094 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe | - | 10,142,788,487 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5 | 02 01 2.02 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | - | - | - | 80 Orang/bulan | 15,222,909,094 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe | - | 10,077,788,487 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5 | 02 01 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | - | 100 % | 15,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe | - | 123,673,035 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5 | 02 01 2.05 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | - | - | - | 5 Orang | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe | - | 15,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5 | 02 01 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | - | 100 % | 417,280,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe | - | 742,394,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5 | 02 01 2.06 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | - | - | - | 3 Paket | 75,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe | - | 75,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5 | 02 01 2.06 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | - | - | - | 2 Paket | 65,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe | - | 80,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5 | 02 01 2.06 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | - | - | - | 2 Paket | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe | - | 15,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5 | 02 01 2.06 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | - | - | - | 2 Dokumen | 2,280,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe | - | 2,394,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5 | 02 01 2.06 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - | - | - | 4 Laporan | 110,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe | - | 170,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5 | 02 01 2.06 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | - | - | - | 4 Dokumen | 150,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe | - | 350,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5 | 02 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah | - | - | - | 25 Unit | 50,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe | - | 416,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5 | 02 01 2.07 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | - | - | - | 15 Unit | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe | - | 150,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5 | 02 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | - | 100 % | 1,001,963,840 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe | - | 1,445,904,613 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5 | 02 01 2.08 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - | - | - | 1 Laporan | 2,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe | - | 5,250,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5 | 02 01 2.08 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | - | - | - | 3 Laporan | 400,500,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe | - | 440,500,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5 | 02 01 2.08 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | - | - | - | 2 Laporan | 599,463,840 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe | - | 985,154,613 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5 | 02 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah | - | - | - | 42 Unit | 372,520,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe | - | 187,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5 | 02 01 2.09 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya | - | - | - | 8 Unit | 237,520,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe | - | 45,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5 | 02 01 2.09 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | - | - | - | 2 Unit | 100,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe | - | 100,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5 | 02 01 2.09 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | - | - | - | 30 Unit | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe | - | 21,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|------------------------|---|--------------------------------------|--|---|---|------------------------|--|--------|
| | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 | 5 02 01 2.09 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diralihkan/Disubstitusikan | - | - | - | 2 Unit | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe | 21,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | |
| 139 | 5 02 02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Penetapan APBD Tepat Waktu Opini BPK | - | - | - | Tepat Waktu Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu WTP Opini | 124,734,132,920 | | | | | - | 110,985,968,490 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | |
| 5 | 02 02 2.01 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | - | - | - | 60 Dokumen | 1,550,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe | 2,846,237,715 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | |
| 5 | 02 02 2.01 0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | - | - | - | 2 Dokumen | 75,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe | 85,085,438 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | |
| 5 | 02 02 2.01 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | - | - | - | 2 Dokumen | 75,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe | 85,085,438 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | |
| 5 | 02 02 2.01 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | - | - | - | 2 Dokumen | 250,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe | 243,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | |
| 5 | 02 02 2.01 0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | - | - | - | 2 Dokumen | 200,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe | 265,388,389 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | |
| 5 | 02 02 2.01 0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | - | - | - | 4 Dokumen | 200,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe | 238,178,450 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | |
| 5 | 02 02 2.01 0013 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | - | - | - | 44 Orang | 750,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe | 1,729,500,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | |
| 5 | 02 02 2.02 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Jumlah Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | - | - | - | 464 Dokumen | 400,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe | 634,528,887 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | |
| 5 | 02 02 2.02 0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | - | - | - | 105 Dokumen | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe | 27,500,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | |
| 5 | 02 02 2.02 0003 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | - | - | - | 105 Dokumen | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe | 139,105,099 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | |
| 5 | 02 02 2.02 0005 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | - | - | - | 29 Dokumen | 70,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe | 139,105,099 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | |
| 5 | 02 02 2.02 0006 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | - | - | - | 35 Dokumen | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe | 20,593,909 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | |
| 5 | 02 02 2.02 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Fihak | - | - | - | 12 Laporan | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe | 16,624,722 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | |
| 5 | 02 02 2.02 0009 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | - | - | - | 68 Dokumen | 100,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe | 150,010,002 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | |
| 5 | 02 02 2.02 0010 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | - | - | - | 5 Dokumen | 30,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe | 37,099,499 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----|------------|--|---|--|--|---|--|------------------------|---|--------------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|------------------------|--|
| | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 5 | 02 02 2.02 | 0011 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | - | - | 105 Orang | 100,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe | - | 104,490,557 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5 | 02 02 2.03 | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | - | - | 2075 Dokumen | 465,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe | - | 705,201,888 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5 | 02 02 2.03 | 0001 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | - | - | 80 Laporan | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe | - | 35,978,985 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5 | 02 02 2.03 | 0002 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | - | - | 1150 Dokumen | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe | - | 36,951,390 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5 | 02 02 2.03 | 0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Trivulanan dan Semesteran | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Trivulanan dan Semesteran | - | - | 650 Laporan | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe | - | 61,261,515 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5 | 02 02 2.03 | 0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Disahkan | - | - | 40 Laporan | 80,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe | - | 119,848,916 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5 | 02 02 2.03 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | - | - | 4 Dokumen | 140,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe | - | 213,685,999 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5 | 02 02 2.03 | 0006 | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | - | - | 1 Dokumen | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe | - | 69,283,856 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5 | 02 02 2.03 | 0007 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | - | - | 7 Dokumen | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe | - | 29,050,599 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5 | 02 02 2.03 | 0009 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | - | - | 2 Dokumen | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe | - | 31,454,017 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5 | 02 02 2.03 | 0010 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | - | - | 1 Dokumen | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe | - | 49,686,611 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5 | 02 02 2.03 | 0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | - | - | 140 Orang | 35,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe | - | 58,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5 | 02 02 2.04 | | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah Pelaksanaan Pengaluran Bantuan Keuangan | - | - | 272 Laporan | 122,319,132,920 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Desa/Gampong dalam Lingkup Kota Lhokseumawe | - | 106,800,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5 | 02 02 2.04 | 0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | - | - | 272 Laporan | 122,319,132,920 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Desa/Gampong dalam Lingkup Kota Lhokseumawe | - | 106,800,000,000 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 140 | 5 02 03 | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah | - | - | 100 PERS | 1,070,000,000 | | | | | | - | 6,352,425,941 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5 | 02 03 2.01 | | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah | - | - | 56 Dokumen | 1,070,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe | - | 6,352,425,941 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5 | 02 03 2.01 | 0002 | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | - | - | 1 Dokumen | 40,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe | - | 96,979,409 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5 | 02 03 2.01 | 0003 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | - | - | 2 Dokumen | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe | - | 47,980,042 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5 | 02 03 2.01 | 0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | - | - | 5 Laporan | 250,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe | - | 290,123,230 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5 | 02 03 2.01 | 0006 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | - | - | 1 Laporan | 80,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe | - | 168,683,095 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5 | 02 03 2.01 | 0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | - | - | 10 Laporan | 525,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe | - | 5,370,756,474 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----|-----------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|---|--------------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 5 | 02 03 2.01 0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | | | 1 Dokumen | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe | | 42,922,321 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5 | 02 03 2.01 0011 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | | 1 Laporan | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe | | 185,975,130 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5 | 02 03 2.01 0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | | | | 1 Laporan | 75,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe | | 88,206,010 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 141 | 5 02 04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Persentase penerimaan PAD | - | | | 100 Persen | 2,235,000,000 | | | | | | | 1,468,677,287 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5 | 02 04 2.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Besaran Penerimaan PAD | - | | | 70.39 Milyar | 2,235,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Masyarakat dan Para Pelaku Usaha | - | 1,468,677,287 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5 | 02 04 2.01 0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | | | | 3 Dokumen | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Masyarakat dan Para Pelaku Usaha | | 259,537,974 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5 | 02 04 2.01 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | 10 Laporan | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Masyarakat dan Para Pelaku Usaha | | 28,940,625 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5 | 02 04 2.01 0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | | | | 5 Unit | 1,210,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Masyarakat dan Para Pelaku Usaha | | 60,775,313 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5 | 02 04 2.01 0005 | Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | | | | 10 Laporan | 125,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Masyarakat dan Para Pelaku Usaha | | 208,372,500 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5 | 02 04 2.01 0006 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | | | | 10 Laporan | 75,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Masyarakat dan Para Pelaku Usaha | | 98,398,125 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5 | 02 04 2.01 0007 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya | | | | 5000 Obyek Pajak | 60,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Masyarakat dan Para Pelaku Usaha | | 71,772,750 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5 | 02 04 2.01 0008 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | | | | 100 Dokumen | 90,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Masyarakat dan Para Pelaku Usaha | | 143,545,500 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5 | 02 04 2.01 0010 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi | | | | 10 Dokumen | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Masyarakat dan Para Pelaku Usaha | | 34,728,750 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5 | 02 04 2.01 0011 | Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah | | | | 300 Dokumen | 200,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Masyarakat dan Para Pelaku Usaha | | 208,372,500 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5 | 02 04 2.01 0012 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | | | | 10 Dokumen | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Masyarakat dan Para Pelaku Usaha | | 72,930,375 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5 | 02 04 2.01 0013 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | | | | 40 Dokumen | 180,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Masyarakat dan Para Pelaku Usaha | | 208,372,500 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5 | 02 04 2.01 0014 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | | | | 10 Laporan | 180,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Masyarakat dan Para Pelaku Usaha | | 72,930,375 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | | | | | | 29,910,674,437 | | | | | | | 13,688,322,632 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 29,910,674,437 | | | | | | | 13,688,322,632 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | KEPEGAWAIAN | | | | | | 28,920,174,437 | | | | | | | 12,545,294,198 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 142 | 5 03 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | - | | | 100 Persen | 27,320,176,037 | | | | | | | 10,045,267,311 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 01 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | 6 Dokumen | 10,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur BKPSDM Kota Lhokseumawe | - | 28,344,448 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 01 2.01 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 10 Dokumen | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur BKPSDM Kota Lhokseumawe | | 19,083,448 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | |
|-----|------|--|---|----------------------------------|---|--|--|---------------------|---|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 5 | 03 | 01 | 2.02 | | | | 12 Bulan | 26,587,896,677 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur BKPSDM Kota Lhokseumawe | - | 8,417,312,006 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 3080 Orang/bulan | 26,587,896,677 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur BKPSDM Kota Lhokseumawe | - | 8,414,996,756 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 01 | 2.06 | | | | 12 Bulan | 111,140,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur BKPSDM Kota Lhokseumawe | - | 408,866,205 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1650 Paket | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur BKPSDM Kota Lhokseumawe | - | 30,561,300 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 40 Paket | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur BKPSDM Kota Lhokseumawe | - | 25,467,750 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 365 Dokumen | 1,140,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur BKPSDM Kota Lhokseumawe | - | 1,451,662 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 40 Laporan | 90,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur BKPSDM Kota Lhokseumawe | - | 347,287,500 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 01 | 2.07 | | | | 2 Jenis | 150,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur BKPSDM Kota Lhokseumawe | - | 351,787,767 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 20 Unit | 150,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur BKPSDM Kota Lhokseumawe | - | 270,754,017 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 01 | 2.08 | | | | 12 Bulan | 286,539,360 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur BKPSDM Kota Lhokseumawe | - | 542,929,019 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 40 Laporan | 3,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur BKPSDM Kota Lhokseumawe | - | 3,556,803 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 Laporan | 120,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur BKPSDM Kota Lhokseumawe | - | 179,431,875 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | 163,539,360 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur BKPSDM Kota Lhokseumawe | - | 359,940,341 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 01 | 2.09 | | | | 4 Jenis | 174,600,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur BKPSDM Kota Lhokseumawe | - | 182,580,616 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibawakan Dinas | 1 Unit | 34,100,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur BKPSDM Kota Lhokseumawe | - | 38,548,913 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak | 1 Unit | 25,500,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur BKPSDM Kota Lhokseumawe | - | 38,548,913 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi | 5 Unit | 100,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur BKPSDM Kota Lhokseumawe | - | 69,457,500 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi | 5 Unit | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur BKPSDM Kota Lhokseumawe | - | 36,025,290 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 143 | 5 | 03 | 02 | | | | 54.02 Persen | 1,599,998,400 | | | | | | - | 2,500,026,887 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 02 | 2.01 | | | | 12 Jenis | 445,038,300 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | CASN dan Aparatur BKPSDM Lhokseumawe | - | 620,571,762 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 | 02 | 2.01 | 0001 | Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN | Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN | 1 Dokumen | 5,004,700 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelesaian | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | CASN dan Aparatur BKPSDM Lhokseumawe | - | 11,576,250 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|----|------|----|----|------|--|--|---|--|---|--|---------------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 | 5 | 03 | 02 | 2.01 | 0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | | | 1 | Dokumen | 20,000,100 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | CASN dan Aparatur BKPSDM Lhokseumawe | 45,216,833 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 5 | 03 | 02 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | | | 1 | Dokumen | 10,020,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | CASN dan Aparatur BKPSDM Lhokseumawe | 11,576,250 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 5 | 03 | 02 | 2.01 | 0004 | Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN | | | 1 | Laporan | 220,002,700 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | CASN dan Aparatur BKPSDM Lhokseumawe | 459,592,429 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 5 | 03 | 02 | 2.01 | 0005 | Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN | Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN | | | 1 | Dokumen | 5,000,800 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | CASN dan Aparatur BKPSDM Lhokseumawe | 11,576,250 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 5 | 03 | 02 | 2.01 | 0006 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | | | 1 | Dokumen | 5,007,200 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | CASN dan Aparatur BKPSDM Lhokseumawe | 11,576,250 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 5 | 03 | 02 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Pemberhentian ASN | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN | | | 1 | Dokumen | 5,002,500 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | CASN dan Aparatur BKPSDM Lhokseumawe | 11,576,250 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 5 | 03 | 02 | 2.01 | 0008 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi | | | 1 | Lembaga | 150,000,500 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | CASN dan Aparatur BKPSDM Lhokseumawe | 11,576,250 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 5 | 03 | 02 | 2.01 | 0009 | Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN | | | 1 | Dokumen | 4,999,800 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | CASN dan Aparatur BKPSDM Lhokseumawe | 11,576,250 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 5 | 03 | 02 | 2.01 | 0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | 1 | Dokumen | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | CASN dan Aparatur BKPSDM Lhokseumawe | 11,576,250 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 5 | 03 | 02 | 2.01 | 0011 | Pengelolaan Data Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian | | | 1 | Dokumen | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | CASN dan Aparatur BKPSDM Lhokseumawe | 11,576,250 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 5 | 03 | 02 | 2.02 | | Mutasi dan Promosi ASN | Periode Pengelolaan Mutasi dan Promosi ASN | | | | 12 Bulan | 125,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemko Lhokseumawe | 297,924,663 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 5 | 03 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Mutasi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana | | | 100 | Dokumen | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemko Lhokseumawe | 11,576,250 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 5 | 03 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | | | 1000 | Dokumen | 60,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemko Lhokseumawe | 145,695,210 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 5 | 03 | 02 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Promosi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN | | | 10 | Dokumen | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemko Lhokseumawe | 140,653,203 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 5 | 03 | 02 | 2.03 | | Pengembangan Kompetensi ASN | Jumlah Pengembangan Kompetensi ASN | | | | 15 Jenis | 689,939,700 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemko Lhokseumawe | 828,905,199 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 5 | 03 | 02 | 2.03 | 0001 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya | | | 200 | Orang | 125,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemko Lhokseumawe | 235,215,393 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 5 | 03 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Assessment Center | Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center | | | 1 | Dokumen | 349,939,700 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemko Lhokseumawe | 324,640,720 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 5 | 03 | 02 | 2.03 | 0003 | Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | | | 1 | Dokumen | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemko Lhokseumawe | 54,634,941 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 5 | 03 | 02 | 2.03 | 0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan | | | 100 | Orang | 125,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemko Lhokseumawe | 87,075,395 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 5 | 03 | 02 | 2.03 | 0005 | Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat | | | 1 | Dokumen | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemko Lhokseumawe | 11,576,250 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 5 | 03 | 02 | 2.03 | 0006 | Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan | | | 50 | Orang | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemko Lhokseumawe | 11,576,250 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | 5 | 03 | 02 | 2.03 | 0007 | Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN | | | 1 | Laporan | 5,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemko Lhokseumawe | 11,576,250 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----|-----------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|--------------------------------------|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 5 | 03 02 2.04 | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Periode Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | - | - | - | 12 Bulan | 340,020,400 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemko Lhokseumawe | - | 752,625,263 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 02 2.04 0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | 1 Dokumen | 250,000,900 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemko Lhokseumawe | - | 578,812,500 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 02 2.04 0004 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan | | | | 250 Orang | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemko Lhokseumawe | - | 46,474,013 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 02 2.04 0005 | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai | Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa | | | | 150 Orang | 30,003,600 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemko Lhokseumawe | - | 34,728,750 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 02 2.04 0006 | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur | | | | 1 Dokumen | 5,001,800 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemko Lhokseumawe | - | 11,576,250 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 02 2.04 0007 | Pembinaan Disiplin ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan | | | | 20 Orang | 5,004,900 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemko Lhokseumawe | - | 11,576,250 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 02 2.04 0008 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | | | | 20 Laporan | 5,004,700 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemko Lhokseumawe | - | 11,576,250 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 02 2.04 0009 | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai | Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani | | | | 20 Dokumen | 5,004,400 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemko Lhokseumawe | - | 11,576,250 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 03 02 2.04 0010 | Evaluasi Disiplin ASN | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN | | | | 1 Laporan | 30,000,100 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemko Lhokseumawe | - | 11,576,250 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 04 | | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | | 990,500,000 | | | | | | | 1,143,028,434 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 144 | 5 04 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | - | - | - | 100 Persen | 30,000,000 | | | | | | | 330,718,019 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 04 01 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Periode Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | - | 12 Bulan | 10,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur BKPSDM Kota Lhokseumawe | - | 237,313,125 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 04 01 2.05 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 15 Orang | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur BKPSDM Kota Lhokseumawe | - | 233,840,250 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 04 01 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Periode Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | - | 12 Bulan | 20,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | | - | 91,089,644 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 04 01 2.06 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 80 Paket | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | | - | 91,089,644 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 145 | 5 04 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Persentase pejabat yang telah mengikuti diklat struktural | - | - | - | 10.14 Persen | 960,500,000 | | | | | | | 812,310,415 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 04 02 2.01 | Pengembangan Kompetensi Teknis | Jumlah Pengembangan Kompetensi Teknis | - | - | - | 4 Jenis | 100,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemko Lhokseumawe | - | 46,305,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 04 02 2.01 0001 | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun | | | | 1 Dokumen | 100,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemko Lhokseumawe | - | 11,576,250 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 04 02 2.02 | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | Jumlah Pelaksanaan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | - | - | - | 8 Jenis | 860,500,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemko Lhokseumawe | - | 766,005,415 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | 04 02 2.02 0003 | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota | | | | 100 Orang | 45,500,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemko Lhokseumawe | - | 11,576,250 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----|------|----|----|------|--|--|--|--|---|--|---|--------------------------------------|--|---|-------------------------------------|------------------|--|-------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | 14 | 16 | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 5 | 04 | 02 | 2.02 | 0008 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Pengelolaan Sumber Belajar, dan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Pengelolaan Sumber Belajar, dan | - | 1 Dokumen | 815,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemko Lhokseumawe | 11,576,250 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | | |
| | | | | | | | | | | 9,185,633,505 | | | | | | 8,507,729,516 | Inspektorat | | |
| | | | | | | | | | | 9,185,633,505 | | | | | | 8,507,729,516 | Inspektorat | | |
| | | | | | | | | | | 9,185,633,505 | | | | | | 8,507,729,516 | Inspektorat | | |
| 146 | 6 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | - | 100 Persen | 7,380,633,505 | | | | | | 6,656,214,286 | Inspektorat | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | 7 Dokumen | 10,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Inspektorat Kota Lhokseumawe | - | 15,020,550 | Inspektorat | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | 6 Dokumen | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Inspektorat Kota Lhokseumawe | 15,020,550 | Inspektorat | | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Periode Pelayanan Administrasi Keuangan | - | 12 Bulan | 6,035,520,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Inspektorat Kota Lhokseumawe | - | 5,294,018,519 | Inspektorat | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | - | 57 Orang/bulan | 6,035,520,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Inspektorat Kota Lhokseumawe | 5,294,018,519 | Inspektorat | | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | - | 100 Persen | 115,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Inspektorat Kota Lhokseumawe | - | 125,171,250 | Inspektorat | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | - | 1 Dokumen | 5,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Inspektorat Kota Lhokseumawe | 15,020,550 | Inspektorat | | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | - | 4 Orang | 110,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Inspektorat Kota Lhokseumawe | 110,150,700 | Inspektorat | | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Periode Pelaksanaan Administrasi Umum | - | 12 Bulan | 212,280,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Inspektorat Kota Lhokseumawe | - | 212,570,824 | Inspektorat | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | - | 1 Paket | 33,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Inspektorat Kota Lhokseumawe | 33,045,210 | Inspektorat | | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | - | 1 Paket | 13,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Inspektorat Kota Lhokseumawe | 13,017,810 | Inspektorat | | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | - | 1 Paket | 9,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Inspektorat Kota Lhokseumawe | 9,012,330 | Inspektorat | | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | - | 2 Dokumen | 2,280,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Inspektorat Kota Lhokseumawe | 2,283,124 | Inspektorat | | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - | 1 Laporan | 155,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Inspektorat Kota Lhokseumawe | 155,212,350 | Inspektorat | | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Periode Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | 12 Bulan | 100,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Inspektorat Kota Lhokseumawe | - | 100,137,000 | Inspektorat | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | - | 6 Unit | 100,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Inspektorat Kota Lhokseumawe | 100,137,000 | Inspektorat | | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | 12 Bulan | 248,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Inspektorat Kota Lhokseumawe | - | 379,521,743 | Inspektorat | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - | 1 Laporan | 2,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Inspektorat Kota Lhokseumawe | 2,002,740 | Inspektorat | | |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----|------|----|------|------|---|--|----------------------------------|--|---|--|----------------------|---|--------------------------------------|--|---|--|---------------------|-----------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 6 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 105,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Inspektorat Kota Lhokseumawe | | 107,104,632 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 30,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Inspektorat Kota Lhokseumawe | | 30,085,571 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 111,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Inspektorat Kota Lhokseumawe | | 240,328,800 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Periode Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 12 Bulan | 659,833,505 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Inspektorat Kota Lhokseumawe | - | 529,774,370 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak | | | | 1 Unit | 33,300,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Inspektorat Kota Lhokseumawe | | 33,394,984 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan | | | | 1 Unit | 128,500,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Inspektorat Kota Lhokseumawe | | 121,345,136 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 12 Unit | 498,033,505 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Inspektorat Kota Lhokseumawe | | 25,034,250 | Inspektorat |
| 147 | 6 | 01 | 02 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan | - | | | 82,6 Persen | 1,395,000,000 | | | | | | - | 1,411,940,700 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah Laporan Pengawasan Internal | - | | | 226 Laporan | 1,150,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | OPD, Sekolah, Puskesmas, dan Gampoeng yang dilakukan pengawasan | - | 1,166,596,050 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | 9 Laporan | 100,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | OPD, Sekolah, Puskesmas, dan Gampoeng yang dilakukan pengawasan | | 100,137,000 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | 50 Laporan | 175,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | OPD, Sekolah, Puskesmas, dan Gampoeng yang dilakukan pengawasan | | 180,246,600 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Revisi Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja | | | | 10 Laporan | 180,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | OPD, Sekolah, Puskesmas, dan Gampoeng yang dilakukan pengawasan | | 180,246,600 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0004 | Revisi Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan | | | | 10 Laporan | 200,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | OPD, Sekolah, Puskesmas, dan Gampoeng yang dilakukan pengawasan | | 210,287,700 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0005 | Pengawasan Desa | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | | | | 11 Laporan | 260,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | OPD, Sekolah, Puskesmas, dan Gampoeng yang dilakukan pengawasan | | 260,356,200 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0006 | Kerja Sama Pengawasan Internal | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | | | | 1 Kesepakatan | 100,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | OPD, Sekolah, Puskesmas, dan Gampoeng yang dilakukan pengawasan | | 100,137,000 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | | | | 100 Dokumen | 135,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | OPD, Sekolah, Puskesmas, dan Gampoeng yang dilakukan pengawasan | | 135,184,950 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 02 | 2.02 | | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | - | | | 16 Laporan | 245,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | OPD, Sekolah, Puskesmas, dan Gampoeng yang dilakukan pengawasan | - | 245,344,650 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | | | | 1 Laporan | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | OPD, Sekolah, Puskesmas, dan Gampoeng yang dilakukan pengawasan | | 25,034,250 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | | | | 15 Laporan | 220,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | OPD, Sekolah, Puskesmas, dan Gampoeng yang dilakukan pengawasan | | 220,310,400 | Inspektorat |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----|-----------------|---|---|----------------------------------|--|---|---|----------------------|---|--------------------------------------|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 148 | 6 01 03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Kategori Penilaian Reformasi Birokrasi Tingkat Maturitas SPIP Pemko Lhokseumawe Level Kapabilitas APIP | - | | | CC/51.00 Kategori/Point Level 3 (3,5) Level (Point) Level 4 Level | 410,000,000 | | | | | | - | 439,574,560 | Inspektorat |
| 6 | 01 03 2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan | Jumlah Rekomendasi yang Dihadiskan | - | | | 36 Rekomendasi | 155,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | - | 156,366,534 | Inspektorat |
| 6 | 01 03 2.01 0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | - | | | 35 Rekomendasi | 130,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | - | 130,178,100 | Inspektorat |
| 6 | 01 03 2.01 0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun | - | | | 1 Rekomendasi | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | - | 26,188,434 | Inspektorat |
| 6 | 01 03 2.02 | Pendampingan dan Asistensi | Persentase Pendampingan dan Asistensi | - | | | 100 Persen | 255,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | OPD Kota Lhokseumawe | - | 283,208,026 | Inspektorat |
| 6 | 01 03 2.02 0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 34 perangkat daerah | 90,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | OPD Kota Lhokseumawe | - | 92,947,726 | Inspektorat |
| 6 | 01 03 2.02 0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | - | | | 2 Kegiatan | 75,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | OPD Kota Lhokseumawe | - | 100,137,000 | Inspektorat |
| 6 | 01 03 2.02 0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | - | | | 34 perangkat daerah | 30,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | OPD Kota Lhokseumawe | - | 30,041,100 | Inspektorat |
| 6 | 01 03 2.02 0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | - | | | 34 perangkat daerah | 30,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | OPD Kota Lhokseumawe | - | 30,041,100 | Inspektorat |
| | | Kecamatan Banda Sakti | | | | | | 3,141,706,800 | | | | | | | 3,556,423,800 | Kecamatan Banda Sakti |
| 7 | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | 3,141,706,800 | | | | | | | 3,556,423,800 | Kecamatan Banda Sakti |
| 7 | 01 | KECAMATAN | | | | | | 3,141,706,800 | | | | | | | 3,556,423,800 | Kecamatan Banda Sakti |
| 149 | 7 01 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | - | | | 100 Persen | 2,826,706,800 | | | | | | - | 3,285,423,800 | Kecamatan Banda Sakti |
| 7 | 01 01 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | 6 Dokumen | 14,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Banda Sakti | - | 16,000,000 | Kecamatan Banda Sakti |
| 7 | 01 01 2.01 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | | | 6 Dokumen | 14,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Banda Sakti | - | 16,000,000 | Kecamatan Banda Sakti |
| 7 | 01 01 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Periode Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | 12 Bulan | 2,248,418,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pegawai Kantor Camat Banda Sakti | - | 2,284,875,000 | Kecamatan Banda Sakti |
| 7 | 01 01 2.02 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | - | | | 28 Orang/bulan | 2,248,418,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Pegawai Kantor Camat Banda Sakti | - | 2,278,875,000 | Kecamatan Banda Sakti |
| 7 | 01 01 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Periode Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | 12 Bulan | 143,140,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Banda Sakti | - | 170,200,000 | Kecamatan Banda Sakti |
| 7 | 01 01 2.06 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | - | | | 49 Paket | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Banda Sakti | - | 30,000,000 | Kecamatan Banda Sakti |
| 7 | 01 01 2.06 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | - | | | 6 Paket | 12,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Banda Sakti | - | 15,000,000 | Kecamatan Banda Sakti |
| 7 | 01 01 2.06 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | - | | | 11 Paket | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Banda Sakti | - | 18,000,000 | Kecamatan Banda Sakti |
| 7 | 01 01 2.06 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | - | | | 1 Dokumen | 1,140,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Banda Sakti | - | 1,200,000 | Kecamatan Banda Sakti |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----|------|----|------|------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---|--------------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - | - | 27 Laporan | 90,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Banda Sakti | 100,000,000 | Kecamatan Banda Sakti | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 8 Jenis | 75,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Banda Sakti | 185,000,000 | Kecamatan Banda Sakti | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | - | - | 16 Unit | 75,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Banda Sakti | 120,000,000 | Kecamatan Banda Sakti | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 12 Bulan | 227,348,800 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Banda Sakti | 392,348,800 | Kecamatan Banda Sakti | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - | - | 247 Laporan | 1,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Banda Sakti | 4,000,000 | Kecamatan Banda Sakti | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | - | - | 36 Laporan | 46,200,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Banda Sakti | 49,200,000 | Kecamatan Banda Sakti | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | - | - | 12 Laporan | 180,148,800 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Banda Sakti | 339,148,800 | Kecamatan Banda Sakti | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Periode Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 12 Bulan | 118,800,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Banda Sakti | 202,000,000 | Kecamatan Banda Sakti | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | - | - | 1 Unit | 48,800,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Banda Sakti | 50,000,000 | Kecamatan Banda Sakti | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi | - | - | 1 Unit | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Banda Sakti | 105,000,000 | Kecamatan Banda Sakti | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi | - | - | 36 Unit | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Banda Sakti | 17,000,000 | Kecamatan Banda Sakti | | |
| 150 | 7 | 01 | 03 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase pembinaan PKK Gampong | - | - | 55.56 Persen | 190,000,000 | | | | | - | 184,000,000 | Kecamatan Banda Sakti | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | - | 2 Laporan | 160,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Masyarakat Gampong dalam Kecamatan Banda Sakti | 157,000,000 | Kecamatan Banda Sakti | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | - | - | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 30,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Masyarakat Gampong dalam Kecamatan Banda Sakti | 27,000,000 | Kecamatan Banda Sakti | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | - | - | 1 Laporan | 130,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Masyarakat Gampong dalam Kecamatan Banda Sakti | 130,000,000 | Kecamatan Banda Sakti | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.03 | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | - | - | 1 Laporan | 15,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Tim Penggerak PKK Gampong dan PKK Kecamatan Banda Sakti | 15,000,000 | Kecamatan Banda Sakti | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | - | - | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Tim Penggerak PKK Gampong dan PKK Kecamatan Banda Sakti | 15,000,000 | Kecamatan Banda Sakti | | |
| 7 | 01 | 03 | 7.04 | | Pemberdayaan Mukim | Periode Pemberdayaan Mukim | - | - | 12 Bulan | 15,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Mukim dalam Kecamatan Banda Sakti | 12,000,000 | Kecamatan Banda Sakti | | |
| 7 | 01 | 03 | 7.04 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim | Jumlah Mukim dan Tuha Peut Mukim yang Ditingkatkan Kapasitasnya | - | - | 12 Orang | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Mukim dalam Kecamatan Banda Sakti | 12,000,000 | Kecamatan Banda Sakti | | |
| 151 | 7 | 01 | 04 | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Penertiban | - | - | 100 Persen | 15,000,000 | | | | | - | 20,000,000 | Kecamatan Banda Sakti | | |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | - | 1 Laporan | 15,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan Banda Sakti | 20,000,000 | Kecamatan Banda Sakti | | |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----|------|----|------|------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---|--------------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | - | | 22 Laporan | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan Banda Sakti | 20,000,000 | Kecamatan Banda Sakti | | |
| 152 | 7 | 01 | 05 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam | - | | 100 Persen | 35,000,000 | | | | | 35,000,000 | Kecamatan Banda Sakti | | | |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | | 1 Laporan | 35,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan Banda Sakti | 35,000,000 | Kecamatan Banda Sakti | | |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | - | | 1 Dokumen | 35,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan Banda Sakti | 35,000,000 | Kecamatan Banda Sakti | | |
| 153 | 7 | 01 | 06 | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong | - | | 100 Persen | 75,000,000 | | | | | 32,000,000 | Kecamatan Banda Sakti | | | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | | 2 Dokumen | 75,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Gampong dalam Kecamatan Banda Sakti | 32,000,000 | Kecamatan Banda Sakti | | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | - | | 18 Dokumen | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Gampong dalam Kecamatan Banda Sakti | 17,000,000 | Kecamatan Banda Sakti | | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | - | | 18 Laporan | 55,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Gampong dalam Kecamatan Banda Sakti | 15,000,000 | Kecamatan Banda Sakti | | |
| | | | | | Kecamatan Blang Mangat | | | | | 2,425,276,924 | | | | | 2,470,223,757 | Kecamatan Blang Mangat | | | |
| 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | 2,425,276,924 | | | | | 2,470,223,757 | Kecamatan Blang Mangat | | | |
| 7 | 01 | | | | KECAMATAN | | | | | 2,425,276,924 | | | | | 2,470,223,757 | Kecamatan Blang Mangat | | | |
| 154 | 7 | 01 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | - | | 100 Persen | 2,090,276,924 | | | | | 2,260,072,292 | Kecamatan Blang Mangat | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | 7 Dokumen | 14,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Kecamatan Blang Mangat | 2,205,000 | Kecamatan Blang Mangat | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | | 7 Dokumen | 14,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Kecamatan Blang Mangat | 2,205,000 | Kecamatan Blang Mangat | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Periode Administrasi Keuangan Daerah | - | | 12 Bulan | 1,590,473,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Kecamatan Blang Mangat | 1,568,949,771 | Kecamatan Blang Mangat | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | - | | 276 Orang/bulan | 1,590,473,000 | Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Kecamatan Blang Mangat | 1,568,370,959 | Kecamatan Blang Mangat | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Periode Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | 12 Bulan | 133,140,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Kecamatan Blang Mangat | 90,679,719 | Kecamatan Blang Mangat | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | - | | 316 Paket | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Kecamatan Blang Mangat | 10,800,000 | Kecamatan Blang Mangat | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | - | | 564 Paket | 12,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Kecamatan Blang Mangat | 4,630,500 | Kecamatan Blang Mangat | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | - | | 20 Paket | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Kecamatan Blang Mangat | 8,508,543 | Kecamatan Blang Mangat | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | - | | 365 Dokumen | 1,140,000 | Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur Kecamatan Blang Mangat | 1,385,676 | Kecamatan Blang Mangat | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - | | 30 Laporan | 90,000,000 | Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Kecamatan Blang Mangat | 60,000,000 | Kecamatan Blang Mangat | | |

| No | Kode | Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----|-----------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|--------------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 7 | 01 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah | Periode Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah | - | - | - | 12 Bulan | 40,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur Kecamatan Blang Mangat | - | 52,955,000 | Kecamatan Blang Mangat |
| 7 | 01 01 2.07 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | - | - | - | 10 Unit | 40,000,000 | Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Kecamatan Blang Mangat | - | 6,930,000 | Kecamatan Blang Mangat |
| 7 | 01 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah | Periode Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah | - | - | - | 12 Bulan | 248,863,924 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Kecamatan Blang Mangat | - | 425,200,000 | Kecamatan Blang Mangat |
| 7 | 01 01 2.08 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - | - | - | 115 Laporan | 1,000,000 | Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Kecamatan Blang Mangat | - | 1,200,000 | Kecamatan Blang Mangat |
| 7 | 01 01 2.08 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | - | - | - | 72 Laporan | 45,298,644 | Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur Kecamatan Blang Mangat | - | 40,000,000 | Kecamatan Blang Mangat |
| 7 | 01 01 2.08 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | - | - | - | 888 Laporan | 202,565,280 | Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur Kecamatan Blang Mangat | - | 384,000,000 | Kecamatan Blang Mangat |
| 7 | 01 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah | Periode Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah | - | - | - | 12 Bulan | 63,800,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur Kecamatan Blang Mangat | - | 51,212,500 | Kecamatan Blang Mangat |
| 7 | 01 01 2.09 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibersihkan/Direhabilitasi | - | - | - | 1 Unit | 33,800,000 | Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur Kecamatan Blang Mangat | - | 25,700,000 | Kecamatan Blang Mangat |
| 7 | 01 01 2.09 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | - | - | - | 1 Unit | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Kecamatan Blang Mangat | - | 20,000,000 | Kecamatan Blang Mangat |
| 7 | 01 01 2.09 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | - | - | - | 21 Unit | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur Kecamatan Blang Mangat | - | 5,512,500 | Kecamatan Blang Mangat |
| 155 | 7 01 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Peningkatan Fasilitas Publik | - | - | - | 100 Persen | 10,000,000 | | | | | | - | 5,000,000 | Kecamatan Blang Manat |
| 7 | 01 02 2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | - | 1 Dokumen | 10,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Masyarakat Gampong dalam Kecamatan Blang Mangat | - | 5,000,000 | Kecamatan Blang Mangat |
| 7 | 01 02 2.01 0002 | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | - | 1 Dokumen | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Masyarakat Gampong dalam Kecamatan Blang Mangat | - | 5,000,000 | Kecamatan Blang Mangat |
| 156 | 7 01 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase pembinaan PKK Gampong | - | - | - | 90.91 Persen | 190,000,000 | | | | | | - | 134,951,800 | Kecamatan Blang Mangat |
| 7 | 01 03 2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | - | - | 2 Laporan | 160,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Masyarakat Gampong dalam Kecamatan Blang Mangat | - | 118,900,000 | Kecamatan Blang Mangat |
| 7 | 01 03 2.01 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | - | - | - | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 30,000,000 | Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Masyarakat Gampong dalam Kecamatan Blang Mangat | - | 18,900,000 | Kecamatan Blang Mangat |
| 7 | 01 03 2.01 0003 | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | - | - | - | 1 Laporan | 130,000,000 | Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Masyarakat Gampong dalam Kecamatan Blang Mangat | - | 100,000,000 | Kecamatan Blang Mangat |
| 7 | 01 03 2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | - | - | - | 1 Laporan | 15,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Masyarakat Gampong dalam Kecamatan Blang Mangat | - | 11,121,272 | Kecamatan Blang Mangat |
| 7 | 01 03 2.03 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | - | - | - | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Masyarakat Gampong dalam Kecamatan Blang Mangat | - | 11,121,272 | Kecamatan Blang Mangat |
| 7 | 01 03 7.04 | Pemberdayaan Mukim | Periode Pemberdayaan Mukim | - | - | - | 12 Bulan | 15,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Mukim Kecamatan Blang Mangat | - | 4,930,528 | Kecamatan Blang Mangat |
| 7 | 01 03 7.04 0002 | Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim | Jumlah Mukim dan Tuha Peut Mukim yang Ditingkatkan Kapasitasnya | - | - | - | 12 Orang | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Mukim Kecamatan Blang Mangat | - | 4,930,528 | Kecamatan Blang Mangat |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----|------|----|----|------|--|---|--|--|---|--|---|--------------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 157 | 7 | 01 | 04 | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Penertiban | - | | 100,00 Persen | 20,000,000 | | | | | - | 15,042,785 | Kecamatan Blang Manat | | |
| | 7 | 01 | 04 | 2.01 | <i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i> | <i>Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i> | - | | 2 Laporan | 20,000,000 | | | <i>Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan</i> | <i>Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas</i> | <i>Masyarakat Gampong dalam Kecamatan Blang Manat</i> | - | 15,042,785 | Kecamatan Blang Manat | |
| | 7 | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | 1 Laporan | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas | Masyarakat Gampong dalam Kecamatan Blang Manat | | 10,042,785 | Kecamatan Blang Manat | |
| | 7 | 01 | 04 | 2.01 | 0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | 1 Laporan | 5,000,000 | Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas | Masyarakat Gampong dalam Kecamatan Blang Manat | | 5,000,000 | Kecamatan Blang Manat | |
| 158 | 7 | 01 | 05 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase penanganan permasalahan oleh Forkoicimcam | - | | 22,73 Persen | 35,000,000 | | | | | - | 20,057,047 | Kecamatan Blang Manat | | |
| | 7 | 01 | 05 | 2.01 | <i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i> | <i>Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i> | - | | 1 Dokumen | 35,000,000 | | | <i>Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan</i> | <i>Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas</i> | <i>Aparatur Kecamatan Blang Manat</i> | - | 20,057,047 | Kecamatan Blang Manat | |
| | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | 1 Dokumen | 35,000,000 | Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas | Aparatur Kecamatan Blang Manat | | 20,057,047 | Kecamatan Blang Manat | |
| 159 | 7 | 01 | 06 | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Pengawasan Pemerintah Gampong | - | | 100 Persen | 80,000,000 | | | | | - | 35,099,833 | Kecamatan Blang Manat | | |
| | 7 | 01 | 06 | 2.01 | <i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i> | <i>Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i> | - | | 4 Dokumen | 80,000,000 | | | <i>Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan</i> | <i>Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas</i> | <i>Masyarakat Gampong dalam Kecamatan Blang Manat</i> | - | 35,099,833 | Kecamatan Blang Manat | |
| | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | | 2 Dokumen | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas | Masyarakat Gampong dalam Kecamatan Blang Manat | | 15,000,000 | Kecamatan Blang Manat | |
| | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | 2 Laporan | 60,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas | Masyarakat Gampong dalam Kecamatan Blang Manat | | 20,099,833 | Kecamatan Blang Manat | |
| | 7 | | | | Kecamatan Muara Satu | | | | | 2,561,683,473 | | | | | | | 2,519,730,178 | Kecamatan Muara Satu | |
| | 7 | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | 2,561,683,473 | | | | | | | | 2,519,730,178 | Kecamatan Muara Satu |
| | 7 | 01 | | | KECAMATAN | | | | | 2,561,683,473 | | | | | | | | 2,519,730,178 | Kecamatan Muara Satu |
| 160 | 7 | 01 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | - | | 100 Persen | 2,246,683,473 | | | | | - | 2,356,770,177 | Kecamatan Muara Satu | | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | - | | 10 Dokumen | 14,000,000 | | | <i>Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan</i> | <i>Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas</i> | <i>Kantor Camat Muara Satu</i> | - | 23,567,722 | Kecamatan Muara Satu | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 10 Dokumen | 14,000,000 | Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas | Kantor Camat Muara Satu | | 23,567,722 | Kecamatan Muara Satu | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | <i>Periode Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | - | | 12 Bulan | 1,628,169,641 | | | <i>Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan</i> | <i>Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas</i> | <i>Aparatur Kantor Camat</i> | - | 1,531,901,914 | Kecamatan Muara Satu | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | 12 Orang/bulan | 1,628,169,641 | Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas | Aparatur Kantor Camat | | 1,531,901,914 | Kecamatan Muara Satu | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | <i>Terlaksananya Kegiatan Urusan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | - | | 12 Bulan | 131,140,000 | | | <i>Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan</i> | <i>Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas</i> | <i>Kantor Camat Muara Satu</i> | - | 117,838,610 | Kecamatan Muara Satu | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | 22 Paket | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas | Kantor Camat Muara Satu | | 14,140,633 | Kecamatan Muara Satu | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | 240 Paket | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas | Kantor Camat Muara Satu | | 7,070,317 | Kecamatan Muara Satu | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | 12 Paket | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas | Kantor Camat Muara Satu | | 9,073,573 | Kecamatan Muara Satu | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | | 365 Dokumen | 1,140,000 | Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas | Kantor Camat Muara Satu | | 2,474,611 | Kecamatan Muara Satu | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | 15 Laporan | 90,000,000 | Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas | Kantor Camat Muara Satu | | 85,079,476 | Kecamatan Muara Satu | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----|-----------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 7 | 01 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Sarana Pendukung Kegiatan Kantor | - | - | - | 5 Unit | 35,303,217 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Muara satu | - | 35,351,583 | Kecamatan Muara Satu |
| 7 | 01 01 2.07 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | - | - | - | 6 Unit | 35,303,217 | Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Muara satu | - | 35,351,583 | Kecamatan Muara Satu |
| 7 | 01 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - | - | - | 12 Bulan | 253,057,746 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | - | 400,651,269 | Kecamatan Muara Satu |
| 7 | 01 01 2.08 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - | - | - | 12 Laporan | 1,000,000 | Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | - | 2,003,256 | Kecamatan Muara Satu |
| 7 | 01 01 2.08 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | - | - | - | 12 Laporan | 98,025,266 | Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | - | 98,159,561 | Kecamatan Muara Satu |
| 7 | 01 01 2.08 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | - | - | - | 12 Laporan | 154,032,480 | Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | - | - | 300,488,452 | Kecamatan Muara Satu |
| 7 | 01 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Kegiatan Perawatan Kendaraan Dinas, Rehabilitasi Bangunan/ Sarana dan Prasarana Lainnya | - | - | - | 12 Bulan | 185,012,869 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Muara Satu | - | 235,675,218 | Kecamatan Muara Satu |
| 7 | 01 01 2.09 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | - | - | - | 1 Unit | 33,800,000 | Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Muara Satu | - | 81,306,640 | Kecamatan Muara Satu |
| 7 | 01 01 2.09 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | - | - | - | 1 Unit | 141,212,869 | Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Muara Satu | - | 141,406,331 | Kecamatan Muara Satu |
| 7 | 01 01 2.09 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | - | - | - | 1 Unit | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Muara Satu | - | 12,962,247 | Kecamatan Muara Satu |
| 161 | 7 01 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase pembinaan PKK Gampong | - | - | - | 100 Persen | 190,000,000 | | | | | - | - | 119,960,001 | Kecamatan Muara Satu |
| 7 | 01 03 2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Tersedianya Usulan Kegiatan Pemberdayaan Desa di 11 Gampong | - | - | - | 4 Dokumen | 160,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | 11 Gampong | - | 60,000,000 | Kecamatan Muara Satu |
| 7 | 01 03 2.01 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | - | - | - | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 30,000,000 | Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | 11 Gampong | - | 20,400,000 | Kecamatan Muara Satu |
| 7 | 01 03 2.01 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | - | - | - | 5 Laporan | 130,000,000 | Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | 11 Gampong | - | 39,600,000 | Kecamatan Muara Satu |
| 7 | 01 03 2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Terlaksananya Kegiatan PKK dalam Wilayah Kecamatan Muara Satu | - | - | - | 11 Gampong | 15,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Desa, Masyarakat | - | 36,000,000 | Kecamatan Muara Satu |
| 7 | 01 03 2.03 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | - | - | - | 12 Lembaga Kemasyarakatan | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Desa, Masyarakat | - | 36,000,000 | Kecamatan Muara Satu |
| 7 | 01 03 7.04 | Pemberdayaan Mukim | Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim | - | - | - | 6 Orang | 15,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Desa, Masyarakat | - | 23,960,001 | Kecamatan Muara Satu |
| 7 | 01 03 7.04 0002 | Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim | Jumlah Mukim dan Tuha Peut Mukim yang Ditingkatkan Kapasitasnya | - | - | - | 8 Orang | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Desa, Masyarakat | - | 23,960,001 | Kecamatan Muara Satu |
| 162 | 7 01 04 | PROGRAM KOORDINASI KETETRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Penertiban | - | - | - | 42.86 Persen | 15,000,000 | | | | | - | - | 8,000,000 | Kecamatan Muara Satu |
| 7 | 01 04 2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | - | - | 12 Bulan | 15,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Desa, Masyarakat | - | 8,000,000 | Kecamatan Muara Satu |
| 7 | 01 04 2.01 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | - | - | - | 6 Laporan | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Desa, Masyarakat | - | 8,000,000 | Kecamatan Muara Satu |
| 163 | 7 01 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam | - | - | - | 100 Persen | 30,000,000 | | | | | - | - | 15,000,000 | Kecamatan Muara Satu |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----|-----------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 7 | 01 05 2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Terseleenggaranya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | - | - | - | 12 Bulan | 30,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Muara satu | - | 15,000,000 | Kecamatan Muara Satu |
| 7 | 01 05 2.01 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | - | - | - | 12 Dokumen | 30,000,000 | Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Muara satu | - | 15,000,000 | Kecamatan Muara Satu |
| 164 | 7 01 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong | - | - | - | 100 Persen | 80,000,000 | | | | | | - | 20,000,000 | Kecamatan Muara Satu |
| 7 | 01 06 2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Terlaksananya Kunjungan Saweu Gampong Dalam Rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | - | - | - | 12 Bulan | 80,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Muara Satu | - | 20,000,000 | Kecamatan Muara Satu |
| 7 | 01 06 2.01 0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | - | - | - | 11 Dokumen | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Muara Satu | - | 5,000,000 | Kecamatan Muara Satu |
| 7 | 01 06 2.01 0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | - | - | - | 11 Laporan | 60,000,000 | Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Muara Satu | - | 15,000,000 | Kecamatan Muara Satu |
| | | | | | | | | 2,725,983,155 | | | | | | | 1,239,473,600 | Kecamatan Muara Dua |
| 7 | 01 | UNSUB KEWILAYAHAN | | | | | | 2,725,983,155 | | | | | | | 1,239,473,600 | Kecamatan Muara Dua |
| 165 | 7 01 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | - | - | - | 100 Persen | 2,413,983,155 | | | | | | - | 972,473,600 | Kecamatan Muara Dua |
| 7 | 01 01 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | - | 7 Dokumen | 14,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Muara Dua | - | 18,000,000 | Kecamatan Muara Dua |
| 7 | 01 01 2.01 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | - | - | 6 Dokumen | 14,000,000 | Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Muara Dua | - | 18,000,000 | Kecamatan Muara Dua |
| 7 | 01 01 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Periode Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | - | 12 Bulan | 1,801,976,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Jumlah Pegawai Kecamatan Muara Dua | - | 2,000,000 | Kecamatan Muara Dua |
| 7 | 01 01 2.02 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | - | - | - | 25 Orang/bulan | 1,801,976,000 | Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Jumlah Pegawai Kecamatan Muara Dua | - | - | Kecamatan Muara Dua |
| 7 | 01 01 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Periode Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | - | 12 Bulan | 135,926,795 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Muara Dua | - | 138,140,000 | Kecamatan Muara Dua |
| 7 | 01 01 2.06 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | - | - | - | 30 Paket | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Muara Dua | - | 28,000,000 | Kecamatan Muara Dua |
| 7 | 01 01 2.06 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | - | - | - | 5 Paket | 17,786,795 | Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Muara Dua | - | 20,000,000 | Kecamatan Muara Dua |
| 7 | 01 01 2.06 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | - | - | - | 5 Paket | 7,000,000 | Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Muara Dua | - | 9,000,000 | Kecamatan Muara Dua |
| 7 | 01 01 2.06 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | - | - | - | 1 Dokumen | 1,140,000 | Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Muara Dua | - | 1,140,000 | Kecamatan Muara Dua |
| 7 | 01 01 2.06 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - | - | - | 5 Laporan | 90,000,000 | Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Muara Dua | - | 80,000,000 | Kecamatan Muara Dua |
| 7 | 01 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Jents Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | - | 8 Jents | 100,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Muara Dua | - | 160,000,000 | Kecamatan Muara Dua |
| 7 | 01 01 2.07 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | - | - | - | 5 Unit | 100,000,000 | Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Muara Dua | - | 160,000,000 | Kecamatan Muara Dua |
| 7 | 01 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Periode Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | - | 12 Bulan | 248,480,360 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Muara Dua | - | 420,333,600 | Kecamatan Muara Dua |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----|------|----|------|------|---|--|----------------------------------|--|---|--|--|--------------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - | - | 200 Laporan | 1,000,000 | Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Muara Dua | 3,000,000 | Kecamatan Muara Dua | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | - | - | 15 Laporan | 83,365,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Muara Dua | 84,000,000 | Kecamatan Muara Dua | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | - | - | 12 Laporan | 164,115,360 | Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Muara Dua | 333,333,600 | Kecamatan Muara Dua | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Periode Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 12 Bulan | 113,600,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Muara Dua | 211,000,000 | Kecamatan Muara Dua | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | - | - | 3 Unit | 43,600,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Muara Dua | 46,000,000 | Kecamatan Muara Dua | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | - | - | 3 Unit | 60,000,000 | Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Muara Dua | 150,000,000 | Kecamatan Muara Dua | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | - | - | 3 Unit | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Muara Dua | 15,000,000 | Kecamatan Muara Dua | | |
| 166 | 7 | 01 | 03 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase pembinaan PKK Gampong | - | - | 17.65 Persen | 192,000,000 | | | | | - | 190,000,000 | Kecamatan Muara Dua | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | - | 2 Laporan | 160,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Masyarakat Gampong Dalam Wilayah Kecamatan Muara Dua | 155,000,000 | Kecamatan Muara Dua | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | - | - | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 30,000,000 | Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Masyarakat Gampong Dalam Wilayah Kecamatan Muara Dua | 35,000,000 | Kecamatan Muara Dua | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | - | - | 1 Laporan | 130,000,000 | Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Masyarakat Gampong Dalam Wilayah Kecamatan Muara Dua | 120,000,000 | Kecamatan Muara Dua | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.03 | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | - | - | 1 Laporan | 15,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Kelompok PKK | 15,000,000 | Kecamatan Muara Dua | | |
| 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Di selenggarakan | - | - | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Kelompok PKK | 15,000,000 | Kecamatan Muara Dua | | |
| 7 | 01 | 03 | 7.04 | | Pemberdayaan Mukim | Periode Pemberdayaan Mukim | - | - | 12 Bulan | 17,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Mukim Dalam Kecamatan Muara Dua | 20,000,000 | Kecamatan Muara Dua | | |
| 7 | 01 | 03 | 7.04 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim | Jumlah Mukim dan Tuha Peut Mukim yang Ditingkatkan Kapasitasnya | - | - | 6 Orang | 17,000,000 | Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Aparatur Mukim Dalam Kecamatan Muara Dua | 20,000,000 | Kecamatan Muara Dua | | |
| 167 | 7 | 01 | 04 | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Penertiban | - | - | 23.53 Persen | 15,000,000 | | | | | - | 15,000,000 | Kecamatan Muara Dua | | |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | - | - | 5 Kali | 15,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Masyarakat Dalam Kecamatan Muara Dua | 15,000,000 | Kecamatan Muara Dua | | |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | - | - | 3 Laporan | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Masyarakat Dalam Kecamatan Muara Dua | 15,000,000 | Kecamatan Muara Dua | | |
| 168 | 7 | 01 | 05 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam | - | - | 17.65 Persen | 35,000,000 | | | | | - | 35,000,000 | Kecamatan Muara Dua | | |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | - | - | 1 Dokumen | 35,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Masyarakat Dalam Kecamatan Muara Dua | 35,000,000 | Kecamatan Muara Dua | | |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | - | - | 3 Dokumen | 35,000,000 | Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Masyarakat Dalam Kecamatan Muara Dua | 35,000,000 | Kecamatan Muara Dua | | |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----|------|----|------|------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---|--------------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|--|--|--------|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 169 | 7 | 01 | 06 | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong | - | | 100 Persen | 70,000,000 | | | | | - | 27,000,000 | Kecamatan Muara Dua | | |
| | | | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Laporan Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | | 2 Laporan | 70,000,000 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Masyarakat Dalam Kecamatan Muara Dua | - | 27,000,000 | Kecamatan Muara Dua | |
| | | | 2.01 | 0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | | | 1 Dokumen | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Masyarakat Dalam Kecamatan Muara Dua | | 15,000,000 | Kecamatan Muara Dua | |
| | | | 2.01 | 0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | 17 Laporan | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas Reformasi Birokrasi | Masyarakat Dalam Kecamatan Muara Dua | | 12,000,000 | Kecamatan Muara Dua | |
| | | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | | 5,275,528,480 | | | | | | 4,760,556,521 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | |
| | | | | | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | | 5,275,528,480 | | | | | | 4,760,556,521 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | |
| | | | | | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | 5,275,528,480 | | | | | | 4,760,556,521 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | |
| 170 | 8 | 01 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | - | | 100 Persen | 2,585,528,480 | | | | | - | 2,380,556,521 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | |
| | | | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | 15 Dokumen | 50,000,000 | | | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian Reformasi Birokrasi | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe | - | 55,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| | | | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 100 Dokumen | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian Reformasi Birokrasi | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe | | 45,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| | | | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Periode Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | 12 Bulan | 2,048,456,000 | | | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian Reformasi Birokrasi | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe | - | 2,000,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| | | | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | 306 Orang/bulan | 2,048,456,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian Reformasi Birokrasi | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe | | 2,000,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| | | | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Periode Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | 12 Bulan | 141,140,000 | | | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian Reformasi Birokrasi | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe | - | 137,556,521 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| | | | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | 1 Paket | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian Reformasi Birokrasi | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe | | 15,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| | | | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | 1 Paket | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian Reformasi Birokrasi | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe | | 10,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| | | | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | 1 Paket | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe | | 25,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| | | | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | | | 12 Dokumen | 1,140,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian Reformasi Birokrasi | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe | | 2,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| | | | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 20 Laporan | 90,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe | | 85,556,521 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| | | | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | 3 Jenis | 10,000,000 | | | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian Reformasi Birokrasi | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe | - | 10,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| | | | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | 4 Unit | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian Reformasi Birokrasi | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe | | 10,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| | | | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah undefined | - | | 12 Bulan | 226,632,480 | | | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian Reformasi Birokrasi | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe | - | 100,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----|------|----|------|------|--|---|----------------------------------|--|---|--|--|--------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--------------------|--|---------------------|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Kelompok Sasaran | Target | | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 8 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | - | - | 12 Laporan | 75,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian Reformasi Birokrasi | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe | - | 50,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| 8 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | - | - | 204 Laporan | 151,632,480 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian Reformasi Birokrasi | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe | - | 50,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| 8 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah undefined | - | - | 12 Bulan undefined undefined | 109,300,000 | | | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian Reformasi Birokrasi | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe | - | 68,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| 8 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | - | - | 1 Unit | 33,300,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian Reformasi Birokrasi | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe | - | 32,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| 8 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | - | - | 1 Unit | 26,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian Reformasi Birokrasi | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe | - | 26,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| 8 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi | - | - | 1 Unit | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian Reformasi Birokrasi | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe | - | 10,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| 171 | 8 | 01 | 02 | | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Persentase jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan wawasan kebangsaan undefined | - | - | 2.20 Persen undefined undefined | 1,000,000,000 | | | | | | - | 620,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| 8 | 01 | 02 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Persentase jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan wawasan kebangsaan undefined | - | - | 220 Persen undefined undefined | 1,000,000,000 | | | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe | - | 620,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| 8 | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | - | - | 100 Orang | 100,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe | - | 20,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| 8 | 01 | 02 | 2.01 | 0008 | Pembentukan Paskibraka | Jumlah Paskibraka | - | - | 40 Orang | 900,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kota Lhokseumawe | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe | - | 600,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| 172 | 8 | 01 | 03 | | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Rasio partisipasi masyarakat dalam partai politik undefined | - | - | 0.81 Rasio undefined undefined | 680,000,000 | | | | | | - | 850,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| 8 | 01 | 03 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik undefined | - | - | 8102 Persen undefined undefined | 680,000,000 | | | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Kestimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe | - | 850,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| 8 | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | - | - | 20 Dokumen | 600,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Kestimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe | - | 500,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| 8 | 01 | 03 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | - | - | 100 Orang | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe | - | 200,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----|------|----|------|------|--|---|---|----------------------------------|--|---|--|---|--------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Kelompok Sasaran | Target | | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| 8 | 01 | 03 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi | - | - | - | 12 Laporan | 30,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe | - | 150,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| 173 | 8 | 01 | 04 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Persentase Pembinaan Ormas undefined | - | - | - | 18.57 Persen undefined undefined | 250,000,000 | | | | | - | 260,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | |
| 8 | 01 | 04 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan undefined | - | - | - | 4 Laporan undefined undefined | 250,000,000 | | | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe | - | 260,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| 8 | 01 | 04 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | - | - | - | 12 Orang | 250,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe | - | 260,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| 174 | 8 | 01 | 05 | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Persentase pembinaan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba, PEKAT, serta Kerukunan Umat Beragama undefined | - | - | - | 3.61 Persen undefined undefined | 220,000,000 | | | | | - | 150,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | |
| 8 | 01 | 05 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Jumlah Laporan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya undefined | - | - | - | 2 Laporan undefined undefined | 220,000,000 | | | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe | - | 150,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| 8 | 01 | 05 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | - | - | - | 150 Orang | 220,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe | - | 150,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| 175 | 8 | 01 | 06 | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Persentase konflik sosial yang tertangani undefined | - | - | - | 100 Persen undefined undefined | 540,000,000 | | | | | - | 500,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | |
| 8 | 01 | 06 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial undefined | - | - | - | 5 Laporan undefined undefined | 540,000,000 | | | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe | - | 500,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| 8 | 01 | 06 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | - | - | - | 30 Orang | 75,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe | - | 50,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| 8 | 01 | 06 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | - | - | - | 30 Orang | 75,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe | - | 300,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| 8 | 01 | 06 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | - | - | - | 12 Laporan | 90,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe | - | 100,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| 8 | 01 | 06 | 2.01 | 0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | - | 12 Dokumen | 300,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe | - | 50,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|--------------------------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | | | | | | 3,078,376,960 | | | | | | | 3,276,064,465 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama |
| | | UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN | | | | | | 3,078,376,960 | | | | | | | 3,276,064,465 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama |
| | 01 | KEKHUSUSAN ACEH | | | | | | 3,078,376,960 | | | | | | | 3,276,064,465 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama |
| 176 | 9 01 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | - | | | 100 Persen | 2,922,459,960 | | | | | | - | 2,666,064,465 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama |
| | 9 01 01 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah | - | | | 3 Dokumen | 10,000,000 | | | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | MPU Kota Lhokseumawe | - | 10,000,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama |
| | 9 01 01 2.01 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | | | 3 Dokumen | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Keude Aceh Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | MPU Kota Lhokseumawe | | 10,000,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama |
| | 9 01 01 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Periode Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | 12 Bulan | 1,432,487,000 | | | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | MPU Kota Lhokseumawe | - | 1,058,443,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama |
| | 9 01 01 2.02 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | - | | | 228 Orang/bulan | 1,432,487,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | MPU Kota Lhokseumawe | | 1,058,443,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama |
| | 9 01 01 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Periode Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | 12 Bulan | 70,140,000 | | | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | MPU Kota Lhokseumawe | - | 89,140,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama |
| | 9 01 01 2.06 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | - | | | 3 Paket | 9,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | MPU Kota Lhokseumawe | | 9,000,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama |
| | 9 01 01 2.06 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | - | | | 2 Paket | 5,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | MPU Kota Lhokseumawe | | 4,000,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama |
| | 9 01 01 2.06 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | - | | | 3 Paket | 5,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | MPU Kota Lhokseumawe | | 5,000,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama |
| | 9 01 01 2.06 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | - | | | 1 Dokumen | 1,140,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | MPU Kota Lhokseumawe | | 1,140,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama |
| | 9 01 01 2.06 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - | | | 35 Laporan | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | MPU Kota Lhokseumawe | | 70,000,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama |
| | 9 01 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | 12 Bulan | 1,295,032,960 | | | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | MPU Kota Lhokseumawe | - | 1,326,032,960 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama |
| | 9 01 01 2.08 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - | | | 1 Laporan | 1,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | MPU Kota Lhokseumawe | | 1,000,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama |
| | 9 01 01 2.08 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | - | | | 5 Laporan | 1,294,032,960 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | MPU Kota Lhokseumawe | | 1,321,032,960 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----|-----------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|--------------------------------------|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 9 | 01 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Periode Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 12 Bulan | 114,800,000 | | | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | MPU Kota Lhokseumawe | - | 84,600,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama |
| 9 | 01 01 2.09 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 4 Unit | 109,800,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | MPU Kota Lhokseumawe | | 79,600,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama |
| 9 | 01 01 2.09 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 10 Unit | 5,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | MPU Kota Lhokseumawe | | 5,000,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama |
| 177 | 9 01 03 | PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH | Persentase Fatwa yang tersebarluaskan | - | | | 71.43 Persen | 155,917,000 | | | | | | - | 610,000,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama |
| 9 | 01 03 7.01 | Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama | Jumlah Laporan Peningkatan Sumber Daya Ulama dan Lembaga Keagamaan | - | | | 4 Laporan | 130,917,000 | | | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 575,000,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama |
| 9 | 01 03 7.01 0003 | Pendidikan Kader Ulama | Jumlah Kader Ulama yang Mengikuti Pendidikan | | | | 20 Orang | 70,917,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 500,000,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama |
| 9 | 01 03 7.01 0005 | Muzakarah Masalah Keagamaan | Jumlah Laporan Hasil Muzakarah Masalah Keagamaan | | | | 1 Laporan | 30,000,000 | Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 35,000,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama |
| 9 | 01 03 7.01 0011 | Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam | | | | 1 Laporan | 30,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 40,000,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama |
| 9 | 01 03 7.02 | Silaturahmi Ulama-Ulama | Jumlah Syiar Keagamaan Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe | - | | | 3 Kali | 25,000,000 | | | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Masyarakat Kota Lhokseumawe | - | 35,000,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama |
| 9 | 01 03 7.02 0002 | Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah | Jumlah Ulama yang Berperan dalam Pembangunan Daerah | | | | 40 Orang | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 35,000,000 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama |
| | | Sekretariat Baitul Mal | | | | | | 8,903,361,106 | | | | | | | 11,185,811,321 | Sekretariat Baitul Mal |
| 9 | | UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN | | | | | | 8,903,361,106 | | | | | | | 11,185,811,321 | Sekretariat Baitul Mal |
| 9 | 01 | KEKHUSUSAN ACEH | | | | | | 8,903,361,106 | | | | | | | 11,185,811,321 | Sekretariat Baitul Mal |
| 178 | 9 01 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | - | | | 100 Persen | 1,776,201,056 | | | | | | - | 2,646,533,196 | Sekretariat Baitul Mal |
| 9 | 01 01 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | 100 Prosen | 13,400,000 | | | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Sekretariat Baitul Mal | - | 18,522,000 | Sekretariat Baitul Mal |
| 9 | 01 01 2.01 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 10 Dokumen | 13,400,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Sekretariat Baitul Mal | | 18,522,000 | Sekretariat Baitul Mal |
| 9 | 01 01 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | 100 Prosen | 1,006,247,000 | | | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Aparatur Sekretariat Baitul Mal | - | 1,248,223,511 | Sekretariat Baitul Mal |
| 9 | 01 01 2.02 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 10 Orang/bulan | 1,006,247,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Aparatur Sekretariat Baitul Mal | | 1,248,223,511 | Sekretariat Baitul Mal |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----|-----------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|--------------------------------------|--|--|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Nasional | Daerah | | Target | Pagu Indikatif (Rp) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 9 | 01 01 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Periode Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | - | 100 Prosen | 126,140,000 | | | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Sekretariat Baitul Mal | - | 146,092,275 | Sekretariat Baitul Mal | |
| 9 | 01 01 2.06 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 41 Paket | 35,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Sekretariat Baitul Mal | | 11,576,250 | Sekretariat Baitul Mal | |
| 9 | 01 01 2.06 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 100 Paket | 5,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Sekretariat Baitul Mal | | 8,103,375 | Sekretariat Baitul Mal | |
| 9 | 01 01 2.06 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 3 Paket | 5,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Sekretariat Baitul Mal | | 9,261,000 | Sekretariat Baitul Mal | |
| 9 | 01 01 2.06 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 12 Dokumen | 1,140,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Sekretariat Baitul Mal | | 1,389,150 | Sekretariat Baitul Mal | |
| 9 | 01 01 2.06 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 40 Laporan | 80,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Sekretariat Baitul Mal | | 115,762,500 | Sekretariat Baitul Mal | |
| 9 | 01 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Dinas Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dan Sarana Prasarana Pendukung Kantor | - | - | - | 100 Prosen | 45,000,000 | | | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Sekretariat Baitul Mal | - | 43,101,250 | Sekretariat Baitul Mal | |
| 9 | 01 01 2.07 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 64 Unit | 45,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Sekretariat Baitul Mal | | 43,101,250 | Sekretariat Baitul Mal | |
| 9 | 01 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Periode Tersedianya Jasa Pelayanan Kantor | - | - | - | 100 Prosen | 516,814,056 | | | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Sekretariat Baitul Mal | - | 1,084,694,625 | Sekretariat Baitul Mal | |
| 9 | 01 01 2.08 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 87 Laporan | 1,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Sekretariat Baitul Mal | | 2,315,250 | Sekretariat Baitul Mal | |
| 9 | 01 01 2.08 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 515,814,056 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Sekretariat Baitul Mal | | 1,082,379,375 | Sekretariat Baitul Mal | |
| 9 | 01 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Periode Tersedianya Pemeliharaan dan Rehabilitasi | - | - | - | 100 Prosen | 68,600,000 | | | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh, Meningkatkan Kualitas Demokrasi dan Menjaga Perdamaian | Sekretariat Baitul Mal | - | 105,899,535 | Sekretariat Baitul Mal | |
| 9 | 01 01 2.09 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 33,100,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Sekretariat Baitul Mal | | 47,647,845 | Sekretariat Baitul Mal | |
| 9 | 01 01 2.09 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 27,500,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Sekretariat Baitul Mal | | 46,675,440 | Sekretariat Baitul Mal | |
| 9 | 01 01 2.09 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi | | | | 27 Unit | 8,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Sekretariat Baitul Mal | | 11,576,250 | Sekretariat Baitul Mal | |
| 179 | 9 01 04 | PROGRAM BAITUL MAL | Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan | - | - | - | 100 Persen | 7,127,160,050 | | | | | | - | 8,539,278,125 | Sekretariat Baitul Mal | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|----|-----------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|--|---|--|--|---------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 9 | 01 04 7.01 | Pengelolaan ZISWAF | Periode Penyusunan Perencanaan ZISWAF | - | - | - | 1 Dokumen | 10,000,000 | | | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Masyarakat | - | 28,940,625 | Sekretariat Baitul Mal |
| 9 | 01 04 7.01 0001 | Penyusunan Perencanaan ZISWAF | Jumlah Perencanaan Ziswaf yang Disusun | | | | 1 Dokumen | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Masyarakat | | 28,940,625 | Sekretariat Baitul Mal |
| 9 | 01 04 7.02 | Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal | Periode Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal | - | - | - | 100 Prosen | 65,000,000 | | | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Masyarakat, Pemerintah dan Instansi Vertikal | - | 810,337,500 | Sekretariat Baitul Mal |
| 9 | 01 04 7.02 0001 | Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran ZISWAF | Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran Ziswaf | | | | 1000 Orang | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Masyarakat, Pemerintah dan Instansi Vertikal | | 405,168,750 | Sekretariat Baitul Mal |
| 9 | 01 04 7.02 0003 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM | | | | 6 Dokumen | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Masyarakat, Pemerintah dan Instansi Vertikal | | 173,643,750 | Sekretariat Baitul Mal |
| 9 | 01 04 7.02 0004 | Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal | Jumlah Dokumen tentang Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal | | | | 5 Dokumen | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Masyarakat, Pemerintah dan Instansi Vertikal | | 231,525,000 | Sekretariat Baitul Mal |
| 9 | 01 04 7.03 | Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf | Jumlah Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan ZISWAF Sebanyak 8 Senif | - | - | - | 100 Persen | 7,052,160,050 | | | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Masyarakat | - | 7,700,000,000 | Sekretariat Baitul Mal |
| 9 | 01 04 7.03 0001 | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir | Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fakir | | | | 1145 Orang | 1,145,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Masyarakat | | 2,063,000,000 | Sekretariat Baitul Mal |
| 9 | 01 04 7.03 0002 | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin | Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Miskin | | | | 1349 Orang | 2,520,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh | Masyarakat | | 2,500,000,000 | Sekretariat Baitul Mal |
| 9 | 01 04 7.03 0003 | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil | Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Amil | | | | 120 Orang | 694,508,119 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Masyarakat | | 794,000,000 | Sekretariat Baitul Mal |
| 9 | 01 04 7.03 0004 | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf | Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Muallaf | | | | 15 Orang | 30,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Masyarakat | | 45,000,000 | Sekretariat Baitul Mal |
| 9 | 01 04 7.03 0005 | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin | Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Gharimin | | | | 6 Orang | 12,500,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Masyarakat | | 48,000,000 | Sekretariat Baitul Mal |
| 9 | 01 04 7.03 0006 | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah | Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fisabilillah | | | | 60 Orang | 60,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Masyarakat | | 500,000,000 | Sekretariat Baitul Mal |
| 9 | 01 04 7.03 0007 | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil | Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fakir | | | | 1040 Orang | 1,120,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Masyarakat | | 350,000,000 | Sekretariat Baitul Mal |
| 9 | 01 04 7.03 0008 | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq | Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Infaq | | | | 330 Orang | 1,470,151,931 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Masyarakat | | 1,400,000,000 | Sekretariat Baitul Mal |
| | | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah | | | | | | 12,874,014,000 | | | | | | | 23,318,911,475 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|----|------|----|----|------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---|--------------------------------------|--|---|------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 | 9 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 4 Dokumen | 16,723,600 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | SKPD | 21,668,168 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah | | |
| | 9 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 1 Tahun | 2,998,680,000 | | | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | SKPD | 2,740,200,000 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah | | |
| | 9 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 378 Orang/bulan | 2,998,680,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | SKPD | 2,689,500,000 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah | | |
| | 9 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1 Tahun | 138,140,000 | | | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing | SKPD | 263,955,000 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah | | |
| | 9 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 38 Paket | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | SKPD | 26,700,000 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah | | |
| | 9 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 3 Paket | 2,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing | SKPD | 15,500,000 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah | | |
| | 9 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 400 Paket | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing | SKPD | 16,045,000 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah | | |
| | 9 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 5 Paket | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | SKPD | 15,750,000 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah | | |
| | 9 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 2 Dokumen | 1,140,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | SKPD | 2,010,000 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah | | |
| | 9 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 95 Laporan | 100,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | SKPD | 130,000,000 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah | | |
| | 9 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 1 Tahun | 150,000,000 | | | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | SKPD | 753,036,243 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah | | |
| | 9 | 01 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 2 Unit | 140,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | SKPD | 100,023,000 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah | | |
| | 9 | 01 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 5 Unit | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | SKPD | 100,500,000 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah | | |
| | 9 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 12 Bulan | 572,322,400 | | | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | SKPD | 638,376,600 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah | | |
| | 9 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 100 Laporan | 2,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | SKPD | 2,100,000 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah | | |

| No | Kode | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----|------|----|----|------|--|---|--|--|---|--|----------------------|---|--------------------------------------|--|---|---|---------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 | 9 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | 3 Laporan | 417,500,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | SKPD | | 375,450,000 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah |
| | 9 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | 3 Laporan | 152,822,400 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | SKPD | | 255,806,600 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah |
| | 9 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik | | | 1 Tahun | 216,400,000 | | | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | SKPD | | 446,287,000 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah |
| | 9 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | 1 Unit | 34,100,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | SKPD | | 35,200,000 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah |
| | 9 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | 1 Unit | 47,300,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | SKPD | | 47,557,000 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah |
| | 9 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | 1 Unit | 15,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | SKPD | | 100,120,000 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah |
| | 9 | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | 21 Unit | 10,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | SKPD | | 85,102,000 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah |
| | 9 | 01 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | 6 Unit | 110,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | SKPD | | 90,108,000 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah |
| 183 | 9 | 01 | 02 | | | PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH | Cakupan Pembinaan Syariat Islam | | | 53.88 Persen | 3,154,861,600 | | | | | | | 9,950,754,659 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah |
| | 9 | 01 | 02 | 7.01 | | Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam | Meningkatnya Pemahaman Wawasan Keislaman | | | 98 Persen | 135,000,000 | | | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Masyarakat, Pelajar, Tokoh Masyarakat, Pendidik | | 575,690,000 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah |
| | 9 | 01 | 02 | 7.01 | 0001 | Pelatihan Mawaris | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Mawaris | | | 68 Orang | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Masyarakat, Pelajar, Tokoh Masyarakat, Pendidik | | 100,120,000 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah |
| | 9 | 01 | 02 | 7.01 | 0003 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariat Islam | Jumlah Tokoh Masyarakat yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitas dalam Pelaksanaan Syariat Islam | | | 90 Orang | 35,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Masyarakat, Pelajar, Tokoh Masyarakat, Pendidik | | 100,120,000 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah |
| | 9 | 01 | 02 | 7.01 | 0005 | Seminar Problematika Syariat Islam | Jumlah Peserta yang Mengikuti Seminar Problematika Syariat Islam | | | 85 Orang | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Masyarakat, Pelajar, Tokoh Masyarakat, Pendidik | | 100,120,000 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah |
| | 9 | 01 | 02 | 7.01 | 0006 | Pembinaan Mental Spiritual Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat | Jumlah Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat yang Terbina Mental Spiritualnya | | | 90 Orang | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Masyarakat, Pelajar, Tokoh Masyarakat, Pendidik | | 150,180,000 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah |
| | 9 | 01 | 02 | 7.02 | | Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an Bagi Generasi Muda | Persentase Pemahaman dan Pengamalan Al-Qur'an Bagi Generasi Muda | | | 99 Persen | 885,000,000 | | | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Masyarakat, Pelajar, Imam Hafidz dan Juri Tilawatil Qur'an | | 1,973,065,440 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|--------------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 9 01 02 7.02 0001 | Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran | Jumlah Lembaga Tilawah Quran yang Mengikuti Pembinaan Kelembagaan | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | 2 Lembaga | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Masyarakat, Pelajar, Imam Hafidz dan Juri Tilawatil Qur'an | | 200,941,440 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah |
| | | | | | | | 182 Orang | 860,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing | Masyarakat, Pelajar, Imam Hafidz dan Juri Tilawatil Qur'an | | 1,501,800,000 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah |
| | | | | | | | 95 Persen | 20,000,000 | | | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Masyarakat, Pelajar, Tokoh Agama, | | 85,102,000 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah |
| | | | | | | | 2 Dokumen | 20,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Masyarakat, Pelajar, Tokoh Agama, | | 85,102,000 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah |
| | | | | | | | 98 Persen | 469,631,600 | | | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Masyarakat, Pelajar, Majelis Taklim, Takmir Masjid, Warga Binaan, Para Khatib, | | 2,541,185,544 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah |
| | | | | | | | 1 Dokumen | 230,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Masyarakat, Pelajar, Majelis Taklim, Takmir Masjid, Warga Binaan, Para Khatib, | | 154,994,950 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah |
| | | | | | | | 500 Orang | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Masyarakat, Pelajar, Majelis Taklim, Takmir Masjid, Warga Binaan, Para Khatib, | | 100,120,000 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah |
| | | | | | | | 100 Orang | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Masyarakat, Pelajar, Majelis Taklim, Takmir Masjid, Warga Binaan, Para Khatib, | | 150,180,000 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah |
| | | | | | | | 9 Unit | 139,631,600 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing | Masyarakat, Pelajar, Majelis Taklim, Takmir Masjid, Warga Binaan, Para Khatib, | | 1,430,170,594 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah |
| | | | | | | | 95 Persen | 1,010,230,000 | | | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Masyarakat, Pelajar, Imam Masjid, Qari-qariah dan Hafidz-Hafidzah | | 2,987,889,521 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah |
| | | | | | | | 1 Laporan | 25,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Masyarakat, Pelajar, Imum Masjid, Qari-qariah dan Hafidz-Hafidzah | | 100,120,000 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah |
| | | | | | | | 100 Orang | 35,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Masyarakat, Pelajar, Imum Masjid, Qari-qariah dan Hafidz-Hafidzah | | 150,180,000 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah |
| | | | | | | | 80 Orang | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Masyarakat, Pelajar, Imum Masjid, Qari-qariah dan Hafidz-Hafidzah | | 351,647,521 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah |
| | | | | | | | 65 Orang | 900,230,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian | Masyarakat, Pelajar, Imum Masjid, Qari-qariah dan Hafidz-Hafidzah | | 1,010,000,000 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah |
| | | | | | | | 1 Tahun | 505,000,000 | | | Memperkuat Penyeragaman Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing | Masyarakat, Pelajar, Pengaguk Hukum, Calon Jemaah Haji, Penceramah, Khatib, | | 1,286,970,944 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------------------|------|----|------|------|---|--|---|----------------------------------|--|---|--|---|--------------------------------------|--|--|---|------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| 9 | 01 | 02 | 7.06 | 0007 | Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam | | | | 6 Laporan | 225,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyelesaian Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Masyarakat, Pelajar, Penegak Hukum, Calon Jannah Haji, Penceramah , | | 374,432,000 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah | |
| 9 | 01 | 02 | 7.06 | 0009 | Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Ibadah Haji Daerah | | | | 250 Orang | 280,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyelesaian Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Masyarakat, Pelajar, Penegak Hukum, Calon Jannah Haji, Penceramah , | | 325,890,000 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah | |
| 9 | 01 | 02 | 7.07 | | <i>Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Agung Daerah</i> | <i>Meningkatnya Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Agung Daerah</i> | | | | 99 Persen | 130,000,000 | | | <i>Memperkuat Penyelesaian Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur</i> | <i>Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian</i> | <i>Masyarakat Kota Lhokseumawe</i> | | 500,851,210 | <i>Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah</i> | |
| 9 | 01 | 02 | 7.07 | 0001 | Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Agung Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Raya Baiturrahman | | | | 2 Lembaga | 80,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyelesaian Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 100,120,000 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah | |
| 9 | 01 | 02 | 7.07 | 0005 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Masjid Agung Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Masjid Agung Daerah yang Dipelihara Secara Rutin/Berkala | | | | 1 Unit | 50,000,000 | Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyelesaian Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 251,210 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah | |
| J U M L A H | | | | | | | | | | | | | | | | | | 787,102,762,222 | | |

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN KOTA LHOKSEUMAWE

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dan gambaran dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang berfungsi sebagai alat ukur kuantitatif yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Tujuan dari penetapan IKU adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja pembangunan daerah yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Secara rinci, Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.1
Target Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2025

| No. | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Capaian 2023 | Target 2024 | Target 2025 |
|-----|--|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Indeks reformasi birokrasi | Kategori /Point | CC/ 54.79 | CC/ 56.00 | B / 60.01 |
| 2. | Nilai LPPD Kota | Kategori /Point | Rendah 2.3546 | Sangat Tinggi 4,20 | Sangat Tinggi 4,22 |
| 3. | Nilai Evaluasi SAKIP | Kategori /Poin | B 60.18 | B 60.50 | B 61.00 |
| 4. | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | Opini | WTP | WTP | WTP |
| 5. | Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi | Level | Level 3 | Level 3 | Level 3 |
| 6. | Tingkat Manajemen Risiko | Level | Level 3 | Level 3 | Level 3 |
| 7. | Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai "IKM" yang Baik | Kategori /Poin | A 83.51 | A 88.81 | A 89.31 |
| 8. | Indeks Pembangunan Syariat Islam | Indeks | 80.71 | 80.85 | 80.95 |
| 9. | Persentase Penegakan Pelanggaran Syariat Islam dalam Bermasyarakat | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Persentase Penerima ZIS | Persen | 12.79 | 13.50 | 14.50 |
| 11. | Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah | Persen | 50.00 | 59.09 | 59.09 |
| 12. | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indeks | 80.26 | 80.85- 81.65 | 81.65- 83.65 |
| 13. | Harapan lama sekolah | Tahun | 15.54 | 15.70 | 15.92 |
| 14. | Rata-rata lama sekolah | Persen | 11.27 | 11.32 | 11.50 |
| 15. | Persentase Pemuda Berprestasi dan Atlit Berprestasi | Persen | 60.37 | 64.5 | 65.20 |
| 16. | Usia Harapan Hidup | Tahun | 74.76 | 74.82 | 74.95 |
| 17. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Persen | 63.4 | 65.35 | 65.80 |
| 18. | Indeks Kualitas Air | Nilai | 58.57 | 59.96 | 61.23 |
| 19. | Indeks Kualitas Udara | Nilai | 89.96 | 93.00 | 94.00 |
| 20. | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | Nilai | 22.58 | 24.00 | 25.00 |
| 21. | Persentase RTH Publik | Persen | | 2.49 | 2.69 |
| 22. | Persentase pertumbuhan ekonomi | Persen | 4.21 | 4.35- 4.40 | 4.40- 4.50 |
| 23. | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) | Rp. Miliar | 249.5 | 500 | 500 |
| 24. | Jumlah Investor (PMDN/PMA) | Perusahaan | 470 | 472 | 492 |
| 25. | Tingkat kemiskinan | Persen | 10.73 | 10.53 | 10.33 |
| 26. | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 8.78 | 8.48 | 7.98- 7.48 |
| 27. | PDRB Perkapita | Rp. (Juta) | 56.60 | 57.20 | 59.08 |
| 28. | Laju Inflasi | Persen | 1.56 | 1.42 | 1.35 |
| 29. | Cakupan ketersediaan infrastruktur berkualitas | Persen | 34.90 | 35.98 | 37.73 |

| No. | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Capaian 2023 | Target 2024 | Target 2025 |
|-----|--|--------|--------------|-------------|-------------|
| 30. | Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap | Persen | 69.52 | 71.64 | 75.19 |
| 31. | Persentase lingkungan permukiman kumuh | Persen | 0.26 | 0.32 | 0.27 |
| 32. | Persentase ketaatan terhadap RTRW | Persen | 86.00 | 95.00 | 98.00 |
| 33. | Indeks Layanan Infrastruktur Perhubungan | Persen | 0.41 | 0.50 | 0.50 |

Sumber : RPK Lhokseumawe 2023-2026, diolah

Penetapan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2025 mengikuti target yang telah ditetapkan dalam RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026, namun untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang targetnya telah tercapai pada tahun 2023 atau melebihi target RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026, maka dilakukan penyesuaian target untuk tahun 2025.

Selain penetapan Indikator Kinerja Utama, ditetapkan pula Indikator Kinerja Daerah sebagai alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Penetapan indikator kinerja daerah disusun berdasarkan penetapan kinerja pada aspek kesejahteraan, daya saing daerah, dan pelayanan umum. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang melingkupi kebutuhan dasar masyarakat terkait pembangunan manusia, ketertiban dan ketenteraman, pemerataan pendapatan, dan kesempatan kerja. Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan yang terkait dengan kependudukan, ketenagakerjaan, dan gender. Aspek pelayanan umum mengukur kinerja Pemerintah Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang mencakup fokus pelayanan urusan wajib dasar, urusan wajib nondasar, serta urusan pilihan. Target capaian indikator kinerja daerah yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Lhokseumawe
Tahun 2025

| No. | Bidang Urusan Pemerintahan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Tahun 2023 | Target Kinerja | |
|----------|---|--------|--------------------------|----------------|---------------|
| | | | | Tahun 2024 | Tahun 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN | | | | |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase Sekolah yang Menerapkan Assessment Kompetensi Minimum (AKM) | Persen | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Angka Partisipasi Kasar | Persen | 102.6 | 100 | 100 |
| 3 | Kelulusan Dan Ketercapaian Kurikulum di Satuan Pendidikan | Persen | 100 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | Persentase Guru dan Tendik Yang Mendapatkan Pembinaan | Persen | 90.3 | 90.60 | 91.94 |
| 5 | Persentase Sekolah yang Memperoleh Izin | Persen | 90 | 100 | 100 |
| | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | |
| 1 | Persentase Dayah dengan Type A | Dayah | 10.71 | 12.21 | 15.26 |
| | | | | | |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan | Persen | 11.0 | 11.50 | 12.00 |
| 4 | Persentase Rekomendasi Usaha Kesehatan | Persen | 100 | 100.00 | 100 |
| 5 | Cakupan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Persen | 81.00 | 83.44 | 93.17 |
| | | | | | |
| 3 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase tidak terjadi genangan > 2 kali setahun | Persen | 64.29 | 70.42 | 92.31 |

| No. | Bidang Urusan Pemerintahan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Tahun 2023 | Target Kinerja | |
|----------|--|--------|--------------------|----------------|------------|
| | | | | Tahun 2024 | Tahun 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Persentase penduduk berakses air minum | Persen | 22.54 | 22.95 | 23.10 |
| 4 | Persentase rumah tinggal bersanitasi | Persen | 72.67 | 73.12 | 74.21 |
| 5 | Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat | Persen | 83.34 | 83.95 | 85.22 |
| 6 | Persentase penataan bangunan gedung | Persen | 2.29 | 7.69 | 7.69 |
| 7 | Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap | Persen | 69.53 | 71.64 | 75.19 |
| 8 | Persentase ketaatan terhadap RTRW | Persen | | 95.00 | 98.00 |
| | | | | | |
| 4 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | |
| 1 | Persentase Ketersediaan rumah layak huni | Persen | 66.70 | 69.63 | 69.88 |
| 2 | Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh | Persen | 0.43 | 0.32 | 0.27 |
| 3 | Rasio PSU dalam kondisi baik | Rasio | 0.03 | 0.117 | 0.143 |
| | | | | | |
| 5 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase Penanggulangan Bencana | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | Persen | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | |
| 6 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | |
| 4 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban dan Ketenteraman | Persen | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | |
| 7 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Cakupan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Keluarga Kurang Mampu | Persen | 35.32 | 74.92 | 76.80 |
| 3 | Persentase Penanganan Rehabilitasi Sosial | Persen | 100 | 100 | 100 |

| No. | Bidang Urusan Pemerintahan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Tahun 2023 | Target Kinerja | |
|-----------|--|--------|--------------------|----------------|------------|
| | | | | Tahun 2024 | Tahun 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial | Persen | 100 | 43.76 | 47.00 |
| 5 | Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Masa Tanggap Darurat | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Persentase Taman Makam Pahlawan Yang dikelola | Persen | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | |
| II | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | | | | | |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan | Persen | 26.37 | 26.50 | 26.70 |
| 3 | Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang ditempatkan | Persen | 7.46 | 53.57 | 55.63 |
| 4 | Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | Persen | 88.37 | 100 | 100 |
| | | | | | |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender | Persen | 51.5 | 62.02 | 58.58 |
| 3 | Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak | Persen | 75.00 | 87.50 | 100 |
| 4 | Persentase Pembinaan Kelompok Perempuan | Persen | N/A | 92.41 | 93.83 |
| 5 | Persentase Perangkat Daerah yang Menyediakan Kebutuhan Data SIGA/SDGA | Persen | 29.41 | 32.35 | 32.35 |
| 6 | Cakupan Pemenuhan Hak Anak | Persen | 36.40 | 37.18 | 39.86 |
| 7 | Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | Persen | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | |
| 3 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Ketersediaan Pangan Utama | Persen | 136.12 | 100 | 100 |

| No. | Bidang Urusan Pemerintahan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Tahun 2023 | Target Kinerja | |
|----------|--|-----------|--------------------|----------------|------------|
| | | | | Tahun 2024 | Tahun 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Persentase Ketersediaan Informasi Kerawanan Pangan | Persen | N/A | 55.56 | 66.67 |
| 4 | Persentase Pengawasan dan Pengendalian Konsumsi Pangan Segar | Persen | N/A | 63.64 | 63.64 |
| | | | | | |
| 4 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase Santunan Persertifikatan | Persen | N/A | 80.00 | 83.33 |
| 3 | Persentase Penanganan Tanah Kosong | Persen | N/A | 20.00 | 25.00 |
| 4 | Persentase Luas Lahan bersertifikat Milik Pemerintah | Persen | 0.62 | 0.59 | 0.63 |
| 5 | Persentase Luas Lahan Bersertifikat Milik Masyarakat | Persen | 45.85 | 45.64 | 46.42 |
| 6 | Persentase Tanah yang Dipetakan | Persen | N/A | 67.80 | 67.07 |
| 7 | Persentase Pembinaan SDM Pertanian | Persen | 95.36 | 52.63 | 57.02 |
| 8 | Persentase Pemanfaatan Lahan Wilayah Pesisir dan Sempadan Pantai | Persen | N/A | 58.33 | 62.50 |
| 9 | Ketersediaan Sistem Informasi Pertanian | Ada/Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| 10 | Persentase Penyelesaian Kasus Sengketa Dan Konflik Pertanian | Persen | 77.92 | 60 | 60 |
| | | | | | |
| 5 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Tersusunnya RPPLH Kab/Kota | Ada/Tidak | Ada | Ada | Ada |
| 3 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Nilai | 63.4 | 65.35 | 65.80 |
| 4 | Persentase luasan taman | Persen | 28.91 | 61.95 | 76.70 |
| 5 | Persentase penanganan limbah B3 | persen | | 85.00 | 90.00 |
| 6 | Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten / Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten / kota. | persen | 75.00 | 85.00 | 90.00 |
| 7 | Persentase aparaturnya desa yang terlatih | Persen | 1.47 | 7.35 | 7.35 |
| 8 | Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup | Ada/Tidak | Ada | Ada | Ada |
| 9 | Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup | Persen | 100 | 100 | 100 |

| No. | Bidang Urusan Pemerintahan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Tahun 2023 | Target Kinerja | |
|----------|--|---------------|--------------------|----------------|------------|
| | | | | Tahun 2024 | Tahun 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | Persentase jumlah sampah yang ditangani | Persen | 99.58 | 100 | 100 |
| | | | | | |
| 6 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Persen | 66.16 | 71.18 | 74.88 |
| 3 | Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil | Persen | 86.42 | 87.77 | 88.85 |
| 4 | Cakupan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Ketersediaan Profil Perkembangan Kependudukan | Ada/ Tidak | Ada | Ada | Ada |
| | | | | | |
| 7 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Gampong yang Baik | Persen | 89.71 | 95.59 | 95.59 |
| 3 | Persentase Kerjasama Gampong | Persen | 61.76 | 67.65 | 73.53 |
| 4 | Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong | Persen | 67.96 | 74.49 | 81.84 |
| 5 | Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan | Persen | 84.19 | 86.03 | 91.54 |
| | | | | | |
| 8 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | |
| 1 | Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB | Persen | 55.82 | 64.71 | 67.65 |
| 2 | Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana | Persen | 50.00 | 51.61 | 51.08 |
| 3 | Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera | Persen | 90.07 | 100 | 100 |
| | | | | | |
| 9 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Cakupan Kualitas Layanan Transportasi | Persen | 29.17 | 52.08 | 45.83 |

| No. | Bidang Urusan Pemerintahan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Tahun 2023 | Target Kinerja | |
|-----------|---|-------------|--------------------|----------------|------------|
| | | | | Tahun 2024 | Tahun 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Ketersediaan Pelabuhan Laut | Ada / Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| 10 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase Penyebaran Informasi Publik | Persen | 33.00 | 34.00 | 34.21 |
| 3 | Persentase Pelayanan Publik Yang Terintegrasi | Persen | 27.00 | 27.25 | 27.65 |
| 11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase Koperasi yang memiliki USP | Persen | 94.00 | 94.50 | 95.00 |
| 3 | Persentase Koperasi Mandiri | Persen | 5.10 | 76.89 | 83.49 |
| 4 | Persentase Koperasi yang Sehat | Persen | 16.35 | 16.48 | 17.27 |
| 5 | Persentase Fasilitasi UMKM | Persen | 9.12 | 24.89 | 27.26 |
| 6 | Persentase Pengembangan UMKM | Persen | 5.09 | 7.31 | 7.87 |
| 12 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | |
| 1 | Persentase Kemudahan Penanaman Modal | Persen | N/A | 40.00 | 40.00 |
| 2 | Persentase Sektor pada Promosi Penanaman Modal | Persen | N.A | 20.00 | 30.00 |
| 3 | Indeks Peningkatan Pelayanan Perizinan | Indeks | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Indeks Pemantauan dan Pengawasan Investasi | Indeks | 42.46 | 76.83 | 75.98 |
| 5 | Ketersediaan Database Perizinan | Ada/Tidak | Ada | Ada | Ada |
| 13 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Jumlah prestasi olahraga | Cabor | 4 | 6 | 7 |
| 4 | Pembinaan Pramuka | Persen | 44.44 | 44.86 | 44.98 |
| 14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | |

| No. | Bidang Urusan Pemerintahan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Tahun 2023 | Target Kinerja | |
|------------|--|--------|--------------------|----------------|------------|
| | | | | Tahun 2024 | Tahun 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Persentase OPD yang melakukan pengamanan data dan informasi terintegrasi | Persen | 9.70 | 9.80 | 9.95 |
| 15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | |
| 1 | Persentase kegiatan pengembangan budaya | Persen | 42.9 | 61.54 | 61.54 |
| 2 | Persentase pembinaan sanggar seni | Persen | 3.13 | 3.45 | 6.90 |
| 3 | Persentase objek sejarah | Persen | 50.00 | 56.25 | 56.25 |
| 4 | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan | Persen | 50.00 | 59.09 | 59.09 |
| 16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase Fasilitasi sengketa adat | Persen | 62.00 | 100 | 100 |
| 17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Cakupan Pembinaan Perpustakaan | Persen | 7.7 | 9.02 | 11.10 |
| 18 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | | | |
| 1 | Persentase Pengelolaan arsip sesuai standar | Persen | 7.41 | 10.91 | 14.29 |
| 2 | Persentase Penyelamatan Arsip | Persen | 18.18 | 25.00 | 30.77 |
| III | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | |
| 1 | Cakupan bina kelompok nelayan | Persen | 42.63 | 47.47 | 49.54 |
| 2 | Cakupan bina kelompok pembudidaya | Persen | 28.84 | 49.83 | 53.14 |
| 3 | Persentase Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | Persen | 41.62 | 46.67 | 49.17 |
| 4 | Cakupan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Persen | N/A | 100 | 100 |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | | |
| 1 | Persentase Peningkatan Daya Tarik Pariwisata | Persen | 25.00 | 60.00 | 70.00 |

| No. | Bidang Urusan Pemerintahan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Tahun 2023 | Target Kinerja | |
|-----------|---|-----------|--------------------|----------------|------------|
| | | | | Tahun 2024 | Tahun 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Peningkatkan Kunjungan Wisata | Persen | 97.70 | 96.88 | 96.97 |
| 3 | Persentase Pembinaan SDM Pariwisata | Persen | 100 | 100.00 | 100.00 |
| | | | | | |
| 3 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | |
| 1 | Cakupan Sarana Kelompok Tani | Persen | 19.01 | 33.46 | 41.35 |
| 2 | Cakupan Prasarana Kelompok Tani | Persen | 22.86 | 34.51 | 42.93 |
| 3 | Cakupan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Verterner | Persen | 38.01 | 42.00 | 44.12 |
| 4 | Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Persen | N/A | 50.37 | 54.68 |
| 5 | Cakupan Pembinaan Kelembagaan Penyuluhan dan Kelembagaan Petani | Persen | 37.23 | 40.93 | 42.93 |
| | | | | | |
| 4 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | |
| 1 | Cakupan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Persen | 0.1 | 0.22 | 0.40 |
| 2 | Cakupan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | Persen | 60.0 | 60.01 | 59.98 |
| 3 | Persentase Partisipasi pada Promosi Dagang | Persen | 50.0 | 75.00 | 80.00 |
| 4 | Persentase Tera Tera Ulang UTTP | Persen | 75.00 | 75.35 | 76.07 |
| | | | | | |
| 5 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | |
| 1 | Cakupan Pembinaan, Pengawasan dan Promosi Industri Kecil Menengah | Persen | 6.36 | 7.27 | 7.77 |
| 2 | Persentase IKM yang memiliki Izin | Persen | 4.50 | 5.00 | 5.33 |
| 3 | Ketersediaan Informasi yang dibutuhkan | Ada/Tidak | Ada | Ada | Ada |
| | | | | | |
| IV | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | |
| | | | | | |
| 1 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat | Persen | 84.61 | 98.70 | 98.70 |

| No. | Bidang Urusan Pemerintahan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Tahun 2023 | Target Kinerja | |
|----------|---|-----------------------------------|--------------------|----------------|-------------|
| | | | | Tahun 2024 | Tahun 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan | Persen | 77.27 | 97.00 | 92.00 |
| 2 | SEKRETARIAT DPRD | | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan | Persen | 63 | 72.73 | 81.82 |
| V | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | |
| 1 | PERENCANAAN | | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Ketersediaan Dokumen Perencanaan: RKPK yang telah ditetapkan dengan Perkada | Ada/Tidak | Ada | Ada | Ada |
| 3 | Penjabaran Konsistensi Program RPJMK ke dalam RKPK | Persen | | 100 | 100 |
| 2 | KEUANGAN | | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 98.39 | 100 | 100 |
| 2 | Penetapan APBD Tepat Waktu | Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu |
| 3 | Opini BPK | Opini | WTP | WTP | WTP |
| 4 | Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persen | 100 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | Persentase penerimaan PAD | Persen | 97 | 100 | 100 |
| 3 | KEPEGAWAIAN | | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase fasilitasi pelayanan Administrasi kepegawaian | Persen | 52.19 | 53.10 | 54.02 |
| 4 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | |
| 1 | Persentase pejabat yang telah mengikuti diklat struktural | Persen | 14.30 | 25.50 | 35.60 |
| 5 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | |
| 1 | Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan | Persen | 85.71 | 86.00 | 86.20 |

| No. | Bidang Urusan Pemerintahan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Tahun 2023 | Target Kinerja | |
|------------|---|------------------|--------------------|----------------|-------------|
| | | | | Tahun 2024 | Tahun 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| VI | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | | | |
| 1 | INSPEKTORAT DAERAH | | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan | Persen | 83.74 | 84.43 | 84.60 |
| 3 | Kategori Penilaian Reformasi Birokrasi | Point / Kategori | CC 54.79 | CC/ 56.00 | B / 60.01 |
| 4 | Level Kapabilitas APIP | Level | Level 3 | Level 3 | Level 4 |
| 5 | Tingkat Maturitas SPIP Pemko Lhokseumawe | Level/Point | Level 3 3.031 | Level 3 3.2 | Level 3 3.5 |
| VII | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | |
| 1 | KECAMATAN | | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase pembinaan PKK Gampong | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Persentase Penertiban | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 2 | KECAMATAN | | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase Peningkatan Fasilitas Publik | Persen | 40 | 60 | 100 |
| 3 | Persentase pembinaan PKK Gampong | Persen | 86.37 | 86.40 | 90.91 |
| 4 | Persentase Penertiban | Persen | 80.00 | 80.90 | 100 |
| 5 | Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam | Persen | 22.74 | 22.80 | 22.84 |
| 6 | Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 3 | KECAMATAN | | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase pembinaan PKK Gampong | Persen | 86.37 | 100 | 100 |

| No. | Bidang Urusan Pemerintahan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Tahun 2023 | Target Kinerja | |
|-------------|---|--------|--------------------|----------------|------------|
| | | | | Tahun 2024 | Tahun 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Persentase Penertiban | Persen | 80.00 | 82.00 | 82.86 |
| 4 | Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam | Persen | 22.74 | 100 | 100 |
| 5 | Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 4 | KECAMATAN | | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase pembinaan PKK Gampong | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Persentase Penertiban | Persen | 23.53 | 23.60 | 24.00 |
| 4 | Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam | Persen | 17.65 | 17.95 | 18.00 |
| 5 | Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong | Persen | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | |
| VIII | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | |
| | | | | | |
| 1 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan wawasan kebangsaan | Persen | 48.59 | 49.3 | 50.00 |
| 3 | Rasio partisipasi masyarakat dalam partai politik | Rasio | 49.97 | 79.95 | 81.02 |
| 4 | Persentase Pembinaan Ormas | Persen | N?A | 18.75 | 18.57 |
| 5 | Persentase pembinaan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba, PEKAT, serta Kerukunan Umat Beragama | Persen | N/A | 2.65 | 3.61 |
| 6 | Persentase konflik sosial yang tertangani | Persen | N/A | 100 | 100 |
| | | | | | |
| IX | UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN | | | | |
| | | | | | |
| 1 | KEKHUSUSAN ACEH | | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase Fatwa yang tersebarluaskan | Persen | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | |
| 2 | KEKHUSUSAN ACEH | | | | |

| No. | Bidang Urusan Pemerintahan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Tahun 2023 | Target Kinerja | |
|----------|---|--------|--------------------|----------------|------------|
| | | | | Tahun 2024 | Tahun 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan | Rasio | | 0.99 | 0.99 |
| | | | | | |
| 3 | KEKHUSUSAN ACEH | | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 0.97 | 100 | 100 |
| 2 | Cakupan Pembinaan Syariah Islam | Persen | 44.00 | 53.88 | 53.88 |

Sumber : RPK Lhokseumawe 2023-2026, diolah

Sama halnya dengan Penetapan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2025, Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) juga mengikuti target yang telah ditetapkan dalam RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026, namun untuk Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang targetnya telah tercapai pada tahun 2023 atau melebihi target RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026, maka dilakukan penyesuaian target untuk tahun 2025.

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun ketiga Rencana Pembangunan Kota (RPK) Lhokseumawe Tahun 2023-2026. Tema Pembangunan RKPK Tahun 2025 adalah “Meningkatkan Infrastruktur, Ekonomi Kota Lhokseumawe berkualitas dengan memperhatikan tata kelola lingkungan hidup yang baik serta peningkatan layanan publik melalui digitalisasi”.

Penyusunan RKPK Lhokseumawe tahun 2025, dilakukan melalui berbagai tahapan dan dibahas dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya, serta memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPK Lhokseumawe Tahun 2025, tergantung pada kesesuaian asumsi-asumsi yang dibangun pada saat penyusunan RKPK Lhokseumawe Tahun 2025 ini. Salah satu asumsi yang digunakan dalam proses penyusunan RKPK Tahun 2025 ini adalah adanya kerjasama semua pelaku pembangunan dalam memberikan kontribusi sesuai peran serta kemauan untuk turut mengawal dan mengendalikan melaksanakan semua rencana program/kegiatan yang telah direncanakan.

Pj. WALI KOTA LHOKSEUMAWE

A. HANAN



**PEMERINTAH KOTA LHOKEUMAWE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2024**